



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023**





BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 34);

22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2023; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
- (4) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (5) Penambahan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dan/atau ditampung dalam RKPD Perubahan.

Pasal 3

RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergisitas antar sektor dan antar wilayah.

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2023 terdiri atas :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan
Keuangan Daerah

(2) Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2023 Pemerintah Daerah menggunakan dokumen RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan DPRD

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

pada tanggal 01 Juli
BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

~~A.TENRI SESSU~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR



KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Soppeng Tahun 2023, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD 2023 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan periode RPJMD Kab.Soppeng Tahun 2021-2026. RKPD Kab. Soppeng Tahun 2023 telah dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan telah disempurnakan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD 2023 dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, serta sebagai Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Soppeng Tahun 2023 merupakan instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam pencapaian target pembangunan RKPD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kab. Soppeng, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota sekitar, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2023 ini, kami ucapkan terima kasih.

Watansoppeng, 1 Juli 2022



BUPATI SOPPENG,

H. A. KASWADI RAZAK





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

- 1.1. Latar Belakang.....I-1
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....I-2
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen.....I-7
- 1.4. Maksud dan Tujuan.....I-8
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

- 2.1. Kondisi Umum Daerah.....II-1
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....II-1
 - 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
 - 2.1.1.2. Potensi Pembangunan Wilayah.....II-4
 - 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....II-7
 - 2.1.1.4. Aspek Demografi.....II-8
 - 2.1.1.5. Potensi Sumber Daya untuk dikembangkan II-10
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-20
 - 2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....II-20
 - 2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial.....II-44
 - 2.1.2.3. Seni, Budaya dan Olahraga II-53
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....II-54
 - 2.1.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....II-54
 - 2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-107
 - 2.1.3.3. Pelayanan Urusan Pilihan.....II-177
 - 2.1.3.4. Urusan Penunjang Urusan II-187
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-204
 - 2.1.4.1. Nilai Tukar Petani.....II-204
 - 2.1.4.2. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa II-204
 - 2.1.4.3. Rasio Ketergantungan.....II-205
 - 2.1.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah II-206
 - 2.1.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021.....II-206
 - 2.1.5.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 – 2021 II-208
 - 2.1.5.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Soppeng II-234
 - 2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-241
 - 2.1.5.1. Bidang Pendidikan.....II-241
 - 2.1.5.2. Bidang Kesehatan.....II-243
 - 2.1.5.3. Bidang Pekerjaan Umum II-250
 - 2.1.5.4. Bidang Perumahan Rakyat II-250
 - 2.1.5.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-251
 - 2.1.5.6. Bidang Sosial.....II-253
 - 2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB / SDGs II-256
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 II-270
 - 2.2.1. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2021.....II-271
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....II-454
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-454
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ...II-460
 - 2.3.2.1. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-460
 - 2.3.2.2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....II-463
 - 2.3.2.3. Urusan Pilihan.....II-465
 - 2.3.2.4. Fungsi Penunjang urusan.....II-466
- 2.4. Isu Strategis.....II-467
 - 1) Identifikasi Isu Strategis dari Level Global II-467
 - 2) Identifikasi Isu Strategis dari Level Nasional.....II-469
 - 3) Identifikasi Isu Strategis Provinsi.....II-469
 - 4) Identifikasi Isu Strategis dari Masalah Pembangunan Daerah II-469





2.5.	Inovasi Daerah	II-470
1.	Lagenda Dukcapil (Layanan Pengambilan Golongan Darah sebagai elemen data kependudukan dan Pencatatan Sipil)	II-470
2.	Mobile Class Mario	II-473
3.	Pabeta (Pengembangan Ayam Buras Berbasis Rumah Tangga)	II-475

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH..... III-1

3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Pembangunan Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2021.....	III-2
3.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	III-2
3.1.2.	Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah	III-21
3.1.3.	Arah Kebijakan dan Target Ekonomi Makro Tahun 2023	III-24
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-27
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-28
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-32
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-47

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH IV-1

4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-2
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-2
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2023	IV-4
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-14
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-14
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	IV-16
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2023	IV-18
4.2.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023.....	IV-25
4.2.5.	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-26

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN V-1

5.1.	Kerangka Pendanaan Tahun 2023	V-1
5.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	V-2
5.3.	Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023.....	V-10

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH VI-1

6.1.	Penetapan Indikator Kinerja Makro.....	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
6.3.	Indikator Kinerja Daerah.....	VI-3
6.4.	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-20
6.5.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	VI-22

BAB VII PENUTUP.....VII-1

7.1	Kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
7.2	Kesimpulan.....	VII-2





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Area, Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2021 ..II-9	
Tabel 2. 2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2021	II-10
Tabel 2. 3. Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng	II-12
Tabel 2. 4. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng	II-13
Tabel 2. 5. Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus.....	II-15
Tabel 2. 6. Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap.....	II-17
Tabel 2. 7. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Soppeng.....	II-18
Tabel 2. 8. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Soppeng Tahun 2020.....	II-19
Tabel 2. 9. Daya Dukung Ketersediaan Pangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019.....	II-19
Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021	II-20
Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017–2021	II-21
Tabel 2.12. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen)	II-23
Tabel 2.13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2017 - 2021	II-26
Tabel 2. 14. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2021	II-33
Tabel 2. 15. Penguatan cadangan pangan Tahun 2017-2021	II-36
Tabel 2.16. Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017-2021.....	II-36
Tabel 2.17. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017-2021	II-37
Tabel 2.18. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017-2021.....	II-38
Tabel 2.19. Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2017-2021.....	II-38
Tabel 2.20. Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.21. Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.22. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.23. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.24. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2017-2021.....	II-42
Tabel 2.25. Pertumbuhan Industri Tahun 2017-2021.....	II-43
Tabel 2.26. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-49
Tabel 2.27. Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-50
Tabel 2.28. Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng	II-51
Tabel 2.29. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	II-53
Tabel 2.30. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk.....	II-54
Tabel 2.31. Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-54
Tabel 2.32. Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017-2021	II-55
Tabel 2.33. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017-2021.....	II-55
Tabel 2.34. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B.....	II-56
Tabel 2.35. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	II-56
Tabel 2.36. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	II-57
Tabel 2.37. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	II-57
Tabel 2.38. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	II-58
Tabel 2.39. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.40. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.41. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.42. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.43. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs.....	II-60
Tabel 2.44. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2017-2021.....	II-61





Tabel 2.45. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2017-2021.....	II-61
Tabel 2.46. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2017-2021.....	II-62
Tabel 2.47. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2017-2021.....	II-63
Tabel 2.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	II-64
Tabel 2.50. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-64
Tabel 2.51. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021.....	II-65
Tabel 2.52. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-66
Tabel 2.53. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.54. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021.....	II-67
Tabel 2.55. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021.....	II-67
Tabel 2.56. Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2017-2021	II-68
Tabel 2.57. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021.....	II-69
Tabel 2.58. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.59. Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.60. Rasio tenaga medis per satuan Penduduk	II-70
Tabel 2.61. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	II-71
Tabel 2.62. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.63. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.64. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.....	II-72
Tabel 2.65. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.66. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Tahun 2017-2021.....	II-74
Tabel 2.67. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun 2017-2021	II-74
Tabel 2.68. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	II-74
Tabel 2.69. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2017-2021.....	II-75
Tabel 2.70. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2017-2021.....	II-76
Tabel 2. 71. Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk Tahun 2017-2021.....	II-76
Tabel 2.72. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021.....	II-77
Tabel 2.73. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021.....	II-78
Tabel 2.74. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2017-2021.....	II-78
Tabel 2.75. Penderita Diare yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-79
Tabel 2.76. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng.....	II-79
Tabel 2.77. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Tahun 2017-2021	II-80
Tabel 2.78. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi.....	II-80
Tabel 2.79. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2017-2021.....	II-81
Tabel 2.80. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 ...	II-82
Tabel 2.81. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2017-2021	II-83





Tabel 2.82. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Soppeng	II-83
Tabel 2.83. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.84. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.85. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan keluarga miskin di Kabupaten Soppeng	II-85
Tabel 2.86. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021	II-85
Tabel 2.87. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2017-2021.....	II-86
Tabel 2.88. Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2017-2021	II-87
Tabel 2.89. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2.90. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	II-88
Tabel 2.91. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2017-2021	II-89
Tabel 2.92. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam) Tahun 2017-2021.....	II-89
Tabel 2.93. Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2017-2021	II-90
Tabel 2.94. Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2017-2021.....	II-90
Tabel 2.95. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2017-2021.....	II-91
Tabel 2.96. Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2017-2021.....	II-91
Tabel 2.97. Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2017-2021.....	II-92
Tabel 2.98. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2017-2021	II-92
Tabel 2.99. Penduduk berakses air minum Tahun 2017-2021	II-92
Tabel 2.100. Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tahun 2017-2021	II-93
Tabel 2.101. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Tahun 2017-2021.....	II-94
Tabel 2.102. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021.....	II-94
Tabel 2.103. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	II-94
Tabel 2.104. Luas RTH Public Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2017-2021	II-95
Tabel 2.105. Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017-2020.....	II-95
Tabel 2.106. Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.107. Pemukiman Layak Huni Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.108. Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.109. Layanan rumah layak huni yang terjangkau	II-97
Tabel 2.110. Pemukiman yang Tertata Tahun 2017-2021	II-97
Tabel 2.111. Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2017-2021	II-97
Tabel 2.112. Rumah tangga kumuh perkotaan Tahun 2017-2021	II-98
Tabel 2.113. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2017-2021.....	II-98
Tabel 2.114. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	II-99
Tabel 2.115. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.116. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021.....	II-100
Tabel 2.117. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2017-2021	II-101
Tabel 2.118. Penegakan PERDA Tahun 2017-2021	II-101
Tabel 2.119. Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2017-2021	II-103
Tabel 2.120. Persentase PMKS Skala Kab. Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2017-2021.....	103
Tabel 2.121. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya Tahun 2017-2021	II-104





Tabel 2.122. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial tahun 2017-2021	II-104
Tabel 2.123. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.124. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2017-2021.....	II-106
Tabel 2.125. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2017-2021.....	II-106
Tabel 2.126. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2017-2021.....	II-107
Tabel 2.127. Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2017-2021	II-108
Tabel 2.128. Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2017-2021.....	II-108
Tabel 2.129. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2017-2021.....	II-109
Tabel 2.130. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2017-2021.....	II-110
Tabel 2.131. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	II-110
Tabel 2.132. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	II-111
Tabel 2.133. Rasio KDRT Tahun 2017-2021	II-112
Tabel 2.134. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2017-2021	II-112
Tabel 2.135. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2017-2021	II-113
Tabel 2.136. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2017-2021	II-114
Tabel 2.137. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2017-2021 ...	II-114
Tabel 2.138. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2017-2021	II-115
Tabel 2.139. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2017-2021	II-116
Tabel 2.140. Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2017-2021	II-116
Tabel 2.141. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2017-2021	II-117
Tabel 2.142. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2017-2021.....	II-118
Tabel 2.143. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2017-2021	II-118
Tabel 2.144. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2017-2021	II-118
Tabel 2.145. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2017-2021.....	II-119
Tabel 2.146. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2017-2021	II-119
Tabel 2.147. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Nonpertanian Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.148. Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.149. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2017-2021.....	II-121
Tabel 2.150. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	II-122
Tabel 2.151. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2021.....	II-122
Tabel 2.152. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2017-2021.....	II-123
Tabel 2.153. Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.154. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.155. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2017-2021.....	II-124
Tabel 2.156. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2017-2021	II-124





Tabel 2.157. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2021	II-124
Tabel 2.158. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2017-2021.....	II-125
Tabel 2.159. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-125
Tabel 2.160. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat Tahun 2017-2021.....	II-126
Tabel 2.161. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2017-2021.....	II-126
Tabel 2.162. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021.....	II-126
Tabel 2.163. Timbulan sampah yang ditangani Tahun 2017-2021.....	II-127
Tabel 2.164. Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	II-127
Tabel 2.165. Cakupan area pelayanan Tahun 2017-2021	II-128
Tabel 2.166. Jumlah sampah yang tertangani Tahun 2017-2021	II-128
Tabel 2.167. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021.....	II-129
Tabel 2.168. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan tahun 2017-2021	II-129
Tabel 2.169. Pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2017-2021	II-130
Tabel 2.170. Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2017-2021	II-130
Tabel 2.171. Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2017-2021 Kabupaten Soppeng.....	II-131
Tabel 2.172. Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2017-2021 Kabupaten Soppeng.....	II-131
Tabel 2.173. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2021.....	II-132
Tabel 2.174. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	II-132
Tabel 2.175. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2017-2021.....	II-133
Tabel 2.176. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Tahun 2017-2021	II-134
Tabel 2.177. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2017-2021	II-134
Tabel 2.178. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	II-135
Tabel 2.179. Persentase LPM Aktif Tahun 2017-2021	II-135
Tabel 2.180. Persentase LPM Berprestasi Tahun 2017-2021.....	II-136
Tabel 2.181. Persentase PKK Aktif Tahun 2017-2021	II-136
Tabel 2.182. Persentase Posyandu Aktif Tahun 2017-2021.....	II-137
Tabel 2.183. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017-2021	II-137
Tabel 2.184. Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017-2021.....	II-138
Tabel 2.185. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-139
Tabel 2.186. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Soppeng.....	II-139
Tabel 2.187. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2017-2021	II-140
Tabel 2.188. Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	II-140
Tabel 2.189. Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2017-2021.....	II-141
Tabel 2.190. Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2017-2021	II-142





Tabel 2.191. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-143
Tabel 2.192. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng.....	II-143
Tabel 2.193. Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2017-2021.....	II-144
Tabel 2.194. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2017-2021.....	II-144
Tabel 2.195. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun Tahun 2017-2021	II-145
Tabel 2.196. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2017-2021.....	II-146
Tabel 2.197. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2017-2021.....	II-146
Tabel 2.198. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2017-2021.....	II-147
Tabel 2.199. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2017-2021.....	II-147
Tabel 2.200. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2017-2021.....	II-148
Tabel 2.201. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2017-2021.....	II-148
Tabel 2.202. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2017-2021.....	II-149
Tabel 2.203. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2017-2021	II-149
Tabel 2.204. Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2017-2021	II-150
Tabel 2.205. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri.....	II-151
Tabel 2.206. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2017-2021	II-152
Tabel 2.207. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2017-2021	II-152
Tabel 2.208. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS	II-153
Tabel 2.209. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Tahun 2017-2021	II-154
Tabel 2.210. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2017-2021	II-154
Tabel 2.211. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-154
Tabel 2.212. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2017-2021	II-155
Tabel 2.213. Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes.....	II-156
Tabel 2.214. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	II-156
Tabel 2.215. Rasio izin trayek Tahun 2017-2021	II-157
Tabel 2.216. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2017-2021	II-157
Tabel 2.217. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	II-158
Tabel 2.218. Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2017-2021.....	II-158
Tabel 2.219. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2017-2021 ...	II-158
Tabel 2.220. Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2017-2021	II-159
Tabel 2.221. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.....	II-159
Tabel 2.222. Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2017-2021.....	II-160
Tabel 2.223. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2017-2021.....	II-160
Tabel 2.224. Proporsi rumah tangga dengan akses internet.....	II-161





Tabel 2.225. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Tahun 2017-2021.....	II-161
Tabel 2.226. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2021	II-162
Tabel 2.227. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2017-2021.....	II-163
Tabel 2.228. Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2017-2021	II-163
Tabel 2.229. Data Bank Prekreditasi Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif di Kabupaten Soppeng	II-164
Tabel 2.230. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2021.....	II-165
Tabel 2.231. Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2017-2021	II-166
Tabel 2.232. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	II-166
Tabel 2.233. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2017-2021.....	II-167
Tabel 2.234. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2017-2021	II-167
Tabel 2.235. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2017-2021	II-167
Tabel 2.236. Cakupan Pembinaan Olahraga 2017-2021	II-168
Tabel 2.237. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat 2017-2021	II-168
Tabel 2.238. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2017-2021	II-168
Tabel 2.239. Jumlah Atlet Yang Berprestasi 2017-2021	II-169
Tabel 2.240. Jumlah Prestasi Olahraga 2017-2021.....	II-169
Tabel 2.241. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tahun 2017-2021.....	II-170
Tabel 2.242. Buku "Kabupaten Dalam Angka" Tahun 2017-2021	II-170
Tabel 2.243. Buku "PDRB" Tahun 2017-2021	II-171
Tabel 2.244. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021	II-171
Tabel 2.245. Penyelenggaraan Festival, seni, budaya dan adat Tahun 2017 – 2021	172
Tabel 2.246. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2017 – 2021	II-172
Tabel 2.247. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu Tahun 2017 – 2021	II-173
Tabel 2.248. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021	II-174
Tabel 2.249. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021	II-174
Tabel 2.250. Rasio perpustakaan per satuan penduduk Kab Soppeng Tahun 2017 - 2021.....	II-175
Tabel 2.251. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021	II-175
Tabel 2.252. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021	II-175
Tabel 2.253. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2017 – 2021	II-176
Tabel 2.254. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021	II-176
Tabel 2.255. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2017-2021.....	II-177
Tabel 2.256. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2017-2021	II-177
Tabel 2.257. Rata-Rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun Tahun 2017-2021.....	II-178
Tabel 2.258. PAD Sektor Pariwisata Tahun 2017-2021	II-178
Tabel 2.259. Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisata Tahun 2017-2021.....	II-179
Tabel 2.260. Bina Kelompok Petani Tahun 2017-2021.....	II-180
Tabel 2.261. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2017-2021.....	II-181
Tabel 2.262. Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2017-2021	II-182
Tabel 2.263. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.264. Produksi Perikanan Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.265. Konsumsi Ikan Tahun 2017-2021	II-185
Tabel 2.266. Bina Kelompok Nelayan Tahun 2017-2021.....	II-186
Tabel 2.267. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.....	II-186
Tabel 2.268. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2017-2021	II-187





Tabel 2.269. Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2017-2021.....	II-187
Tabel 2.270. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2017-2021	II-188
Tabel 2.271. Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2017-2021	II-188
Tabel 2.272. Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2017-2021	II-188
Tabel 2.273. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2017-2021	II-189
Tabel 2.274. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2017-2021.....	II-189
Tabel 2.275. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2017-2021.....	II-190
Tabel 2.276. Persentase SILPA Tahun 2017-2021	II-191
Tabel 2.277. Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2017-2021	II-191
Tabel 2.278. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tahun 2017-2021.....	II-192
Tabel 2.279. Persentase belanja pendidikan (20%) Tahun 2017-2021.....	II-193
Tabel 2.280. Persentase belanja kesehatan (10%) Tahun 2017-2021	II-194
Tabel 2.281. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tahun 2017-2021.....	II-194
Tabel 2.282. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2017-2021	II-195
Tabel 2.283. Penetapan APBD Tahun 2017-2021.....	II-196
Tabel 2.284. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2017-2021.....	II-197
Tabel 2.285. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2017-2021.....	II-197
Tabel 2.286. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2017-2021	II-198
Tabel 2.287. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Tahun 2017-2021.....	II-198
Tabel 2.288. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2017-2021.....	II-198
Tabel 2.289. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Tahun 2017-2021	II-199
Tabel 2.290. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	II-199
Tabel 2.291. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Tahun 2017-2021	II-200
Tabel 2.292. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Tahun 2017-2021	II-200
Tabel 2.293. Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2017-2021	II-201
Tabel 2.294. Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2017-2021.....	II-201
Tabel 2.295. Jumlah Temuan BPK Tahun 2017-2021.....	II-202
Tabel 2.296. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota Tahun 2017-2021	II-202
Tabel 2.297. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2017-2021	II-203
Tabel 2.298. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	II-204
Tabel 2.299. Nilai Tukar Petani Tahun 2017-2021	II-204
Tabel 2.300. Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2017-2021	II-205
Tabel 2.301. Target dan Capaian IKU Kabupaten Soppeng Tahun 2021	II-206
Tabel 2.302. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021	II-209
Tabel 2.303. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Soppeng Tahun 2021, Berdasarkan PERMENDAGRI 18 Tahun 2020	II-234





Tabel 2.304. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2017-2021	II-241
Tabel 2.305. Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021	II-242
Tabel 2.306. Pendidikan Kesetaraan Tahun 2017-2021	II-243
Tabel 2.307. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2021.....	II-243
Tabel 2.308. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-250
Tabel 2.309. Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021	II-251
Tabel 2.310. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021.....	II-251
Tabel 2.311. Bidang Sosial Tahun 2021	II-253
Tabel 2.312. Hasil Analisis Capaian Kinerja SPM Tahun 2021	II-254
Tabel 2.313. Realisasi Capaian TPB yang dilaksanakan.....	II-257
Tabel 2.314. Realisasi Capaian TPB yang belum dilaksanakan	II-266
Tabel 2.315. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2021	II-271
Tabel 3.1. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2017–2021	III-3
Tabel 3.2. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng.....	III-4
Tabel 3.3. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,.....	III-5
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2017 – 2021.....	III-9
Tabel 3.5. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021	III-15
Tabel 3.6. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021	III-16
Tabel 3.7. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Persen).....	III-17
Tabel 3.8. Jumlah Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2021.....	III-19
Tabel 3.9. Target Indikator Makro Kab. Soppeng Tahun 2023.....	III-27
Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024.....	III-36
Tabel 3.11. Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2023	III-37
Tabel 3.12. Proyeksi Alokasi Anggaran Program Prioritas tahun 2023	III-38
Tabel 3.13. Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	III-43
Tabel 3.14. Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah Terhadap Tujuan TPB/SDGS Tahun 2023.....	III-44
Tabel 3.15. Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-48
Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Kinerja Tahun 2023	IV-3
Tabel 4.2. Penjelasan Visi Kepala Daerah Terpilh Kab. Soppeng	IV-4
Tabel 4.3. Penjelasan Misi Kepala Daerah Terpilih.....	IV-5
Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 yang termuat Dalam RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026.....	IV-7
Tabel 4.5. Arah Kebijakan RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025.....	IV-9
Tabel 4.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023	IV-10
Tabel 4.7. Keterkaitan antara Tujuan dan Pembangunan Tahun 2023 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025.....	IV-12
Tabel 4.8. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	IV-16
Tabel 4.9. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-19
Tabel 4.10. Sinergitas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Soppeng Tahun 2023	IV-20
Tabel 4.11. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan daerah dan isu strategis dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023.....	IV-22
Tabel 4. 12. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	IV-25





Tabel 4.13. Program Prioritas Kab. Soppeng Tahun 2023 IV-26

Tabel 4.14. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2023 IV-32

Tabel 4.15. Keterkaitan Target Capaian Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2023 IV-32

Tabel 5.1. Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023 V-1

Tabel 5.2. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023.....V-2

Tabel 5.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 V-11

Tabel 6.1. Penetapan Indikator Makro Kab.Soppeng Tahun 2023.....VI-1

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama Kab. Soppeng Tahun 2023.....VI-2

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Daerah Kab. Soppeng Tahun 2023 (Permendagri 86 tahun 2017) VI-3

Tabel 6.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Soppeng Tahun 2023 (Permendagri 18 Tahun 2020) VI-13

Tabel 6.5. Indikator SPM Kab. Soppeng Tahun 2023 VI-19

Tabel 6.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kab. Soppeng Tahun 2023.....VI-19





DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021	II-9
Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-24
Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Wilayah sekitar Tahun 2017 - 2021.....	II-25
Grafik 2.4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	II-25
Grafik 2.5. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021	II-28
Grafik 2.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2021.....	II-28
Grafik 2.7. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar 2017-2021.....	II-29
Grafik 2.8. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II-30
Grafik 2.9. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021	II-31
Grafik 2.10. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021...II-32	
Grafik 2.11. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.....	II-35
Grafik 2.12. Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng	II-35
Grafik 2.13. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB.....	II-41
Grafik 2.14. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2017 - 2021	II-45
Grafik 2.15. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 - 2021	II-45
Grafik 2.16. Indeks Pendidikan Tahun 2017 - 2021	II-46
Grafik 2.17. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 - 2021	II-46
Grafik 2.18. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 - 2021	II-47
Grafik 2.19. Indeks kesehatan Tahun 2017 - 2021	II-47
Grafik 2.20. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 - 2021	II-48
Grafik 2.21. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, ...	II-49
Grafik 2.22. Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-51
Grafik 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-52
Grafik 2.24. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021.....	II-52
Grafik 2.25. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021.....	II-65
Grafik 2.26. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup.....	II-67
Grafik 2.27. Diagram Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021.....	II-68
Grafik 2.28. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	II-87
Grafik 2.29. Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	II-102
Grafik 2.30. Usaha Mikro.....	II-165
Grafik 2.31. Sentra Usaha Industri.....	II-183
Grafik 2.32. Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng.....	II-206
Grafik 2.33. Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Soppeng	II-270
Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, ...	III-7
Grafik 3.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi.....	III-7
Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di	III-8
Grafik 3.4. Perbandingan Inflasi Nasional, ...	III-10
Grafik 3.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021 (Juta Rupiah).....	III-11





Grafik 3.6. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten III-11

Grafik 3.7. Perbandingan Indeks Gini Nasional, Sulawesi Selatan dan
Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 III-12

Grafik 3.8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng III-13

Grafik 3.9. Persentase Penduduk Miskin Kab./ Kota III-14

Grafik 3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja III-19

Grafik 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka..... III-20

Grafik 3.12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, ... III-21

Grafik 3.13. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan..... III-21

Grafik 3.14. Korelasi Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kab. Soppeng
dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023 III-29

Grafik 3.15. Korelasi Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kab. Soppeng
dengan Belanja Daerah Tahun 2019-2023 III-32





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain.....	I-7
Gambar 1.2. Alur Perencanaan dan Penganggaran	I-8
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Soppeng	II-1
Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Soppeng.....	II-2
Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten	II-3
Gambar 2.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2021	II-4
Gambar 2.5. Peta Rawan Banjir Kabupaten Soppeng.....	II-7
Gambar 2.6. Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng	II-12
Gambar 4.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023	IV-19





BAB I

PENDAHULUAN

“Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik”

-
- 1.1 LATAR BELAKANG
 - 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
 - 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
 - 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
-



Lampiran : Peraturan Bupati Soppeng
Nomor : 26 Tahun 2022
Tanggal : 01 Juli 2022
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedelapan belas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 juga merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Selain itu RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.

Keterkaitan antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023 telah mempedomani RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan RKP Nasional tahun 2023. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai persiapan penyusunan, rancangan awal, rancangan, musrenbang, perumusan rancangan akhir serta penetapan. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan Teknokratik, partisipatif,





politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Capaian kinerja ekonomi makro pada tahun 2021 menjadi dasar penentuan target-target prioritas pembangunan. Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan dengan menunjukkan angka 68,99 di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi naik sampai pada angka 6,15% sebagai upaya dari pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi akibat Covid-19 juga mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,92%. Pandemi ini menyebabkan kegiatan ekonomi sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Beberapa pengusaha terjun kembali sehingga meningkatkan aktifitas ekonomi dan mempengaruhi peningkatan jumlah pekerja serta omset yang bertambah di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga berpengaruh pada pendapatan per kapita sebesar Rp52.750.000. Akan tetapi angka kemiskinan mengalami peningkatan dari 17.230 Jiwa di tahun 2020 hingga 17.270 jiwa di tahun 2021. Selain itu gini ratio menunjukkan nilai 0,406 di tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah





- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah





- Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi





- Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
 48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);
 50. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);





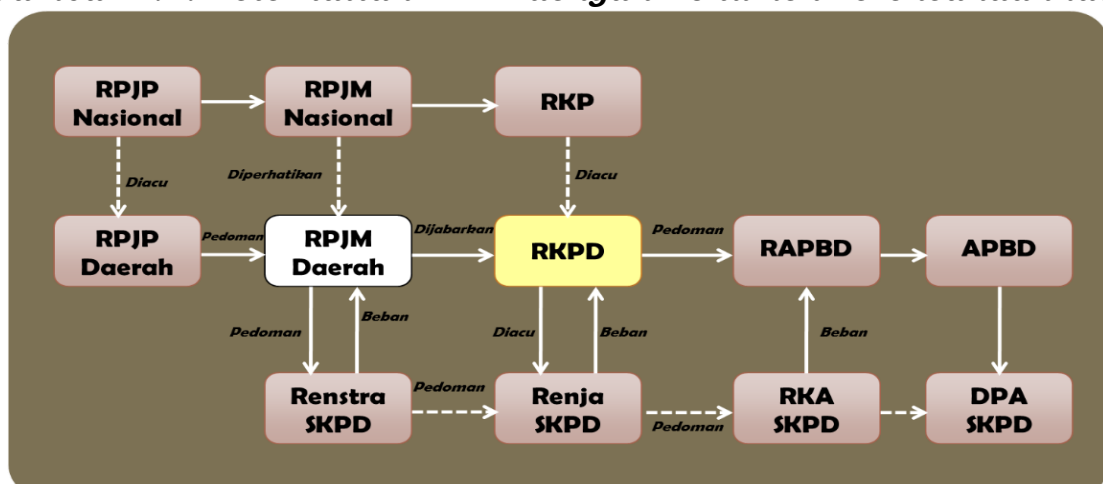
53. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
56. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 34);
57. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 14).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023 harus memperhatikan dokumen perencanaan baik ditingkat pusat (RKP Tahun 2023) maupun ditingkat provinsi (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023). Hal tersebut dimaksudkan agar program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 sesuai dengan tujuan di tingkat provinsi maupun nasional dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahan.

Di samping itu RKPD juga perlu mempertimbangkan RPJMD, agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. RKPD tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Soppeng dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain

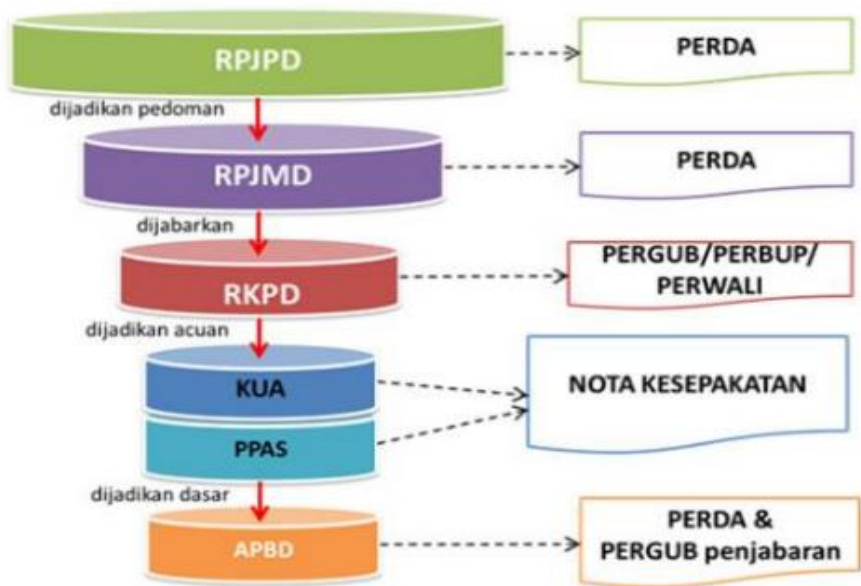


Sumber : Undang-Undang No 25 Tahun 2004, Diolah



Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng. Adapun alur perencanaan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Alur Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- Tujuan yang dikehendaki;
- Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
- SKPD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023 merupakan pedoman dasar dalam penyusunan Rancangan APBD dengan mengacu RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan serta akan menjadi bagian dari RPJMD 2021-2026. Selain itu, konsistensi RKPD juga diperlukan dalam penyusunan kerangka pendanaan tahunan, dimana fungsinya sebagai arah serta pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;



3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan menetapkan program dan prioritas pembangunan Tahun 2023;
4. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Soppeng dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Soppeng maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari **Latar Belakang** yang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. **Dasar Hukum Penyusunan** yang memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. **Hubungan Antar Dokumen** dimana pada bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng. **Maksud dan Tujuan** memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. **Sistematika Dokumen RKPD** mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH yang terdiri dari **Kondisi Umum Daerah** yang memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi pembangunan wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD** yang mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja





Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Serta **Permasalahan Pembangunan Daerah** yang berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH yang terdiri dari **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah** yang mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. **Arah Kebijakan Keuangan Daerah** yang berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

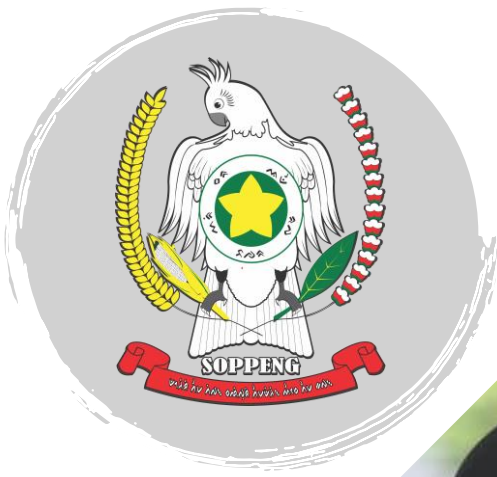
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH yang terdiri dari **Tujuan dan Sasaran Pembangunan** yang menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng. **Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023** yang merupakan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. SERTA Berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH yang terdiri dari **Rencana Program Prioritas** yang memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2023, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah. **Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** yang memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang disesuaikan dengan program prioritas pembangunan tahun 2023.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH yang memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

"Pada bagian ini dijelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan "

-
- 2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
 - 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
-

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

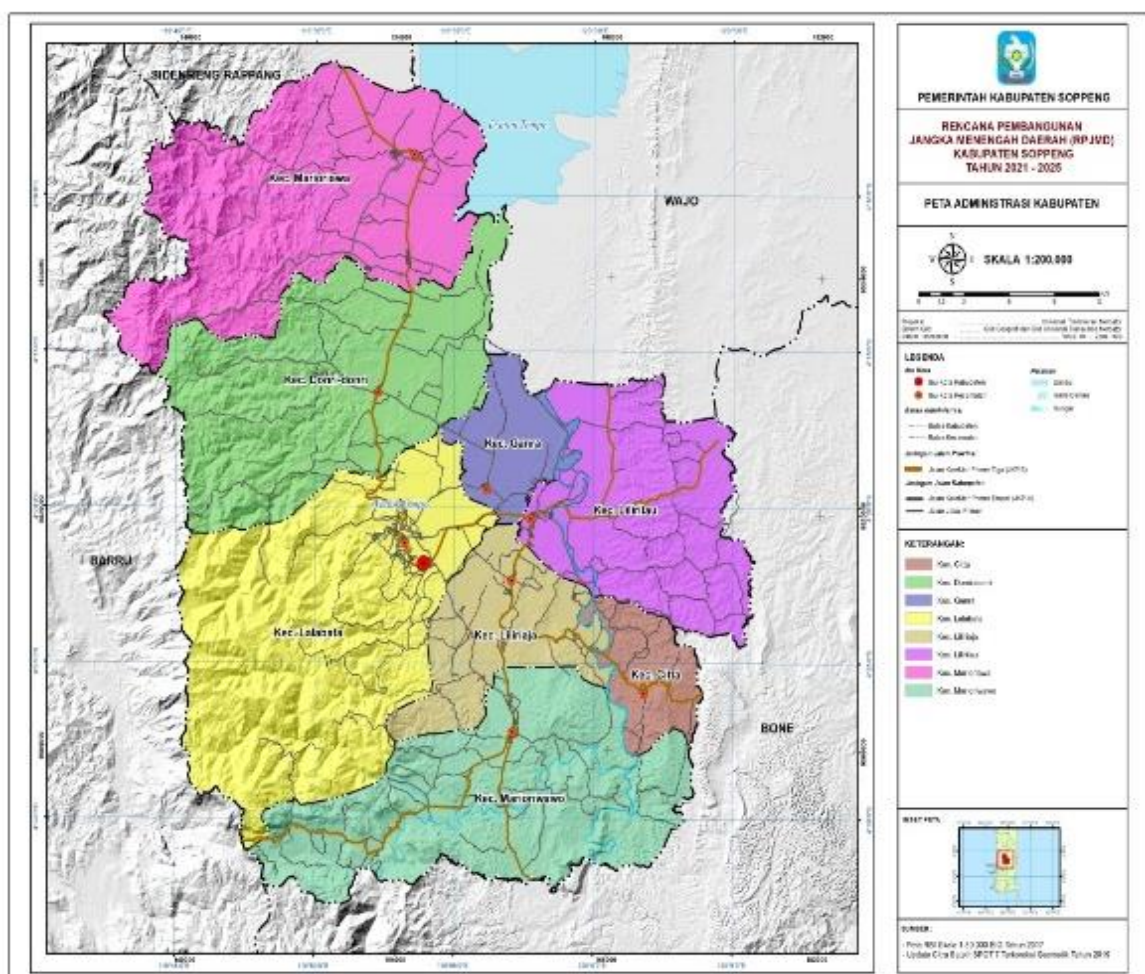
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara $4^{\circ} 06' 00''$ - $4^{\circ} 32' 00''$ Lintang Selatan $119^{\circ} 42' 18''$ - $120^{\circ} 06' 13''$ Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km².

Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng.

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Soppeng

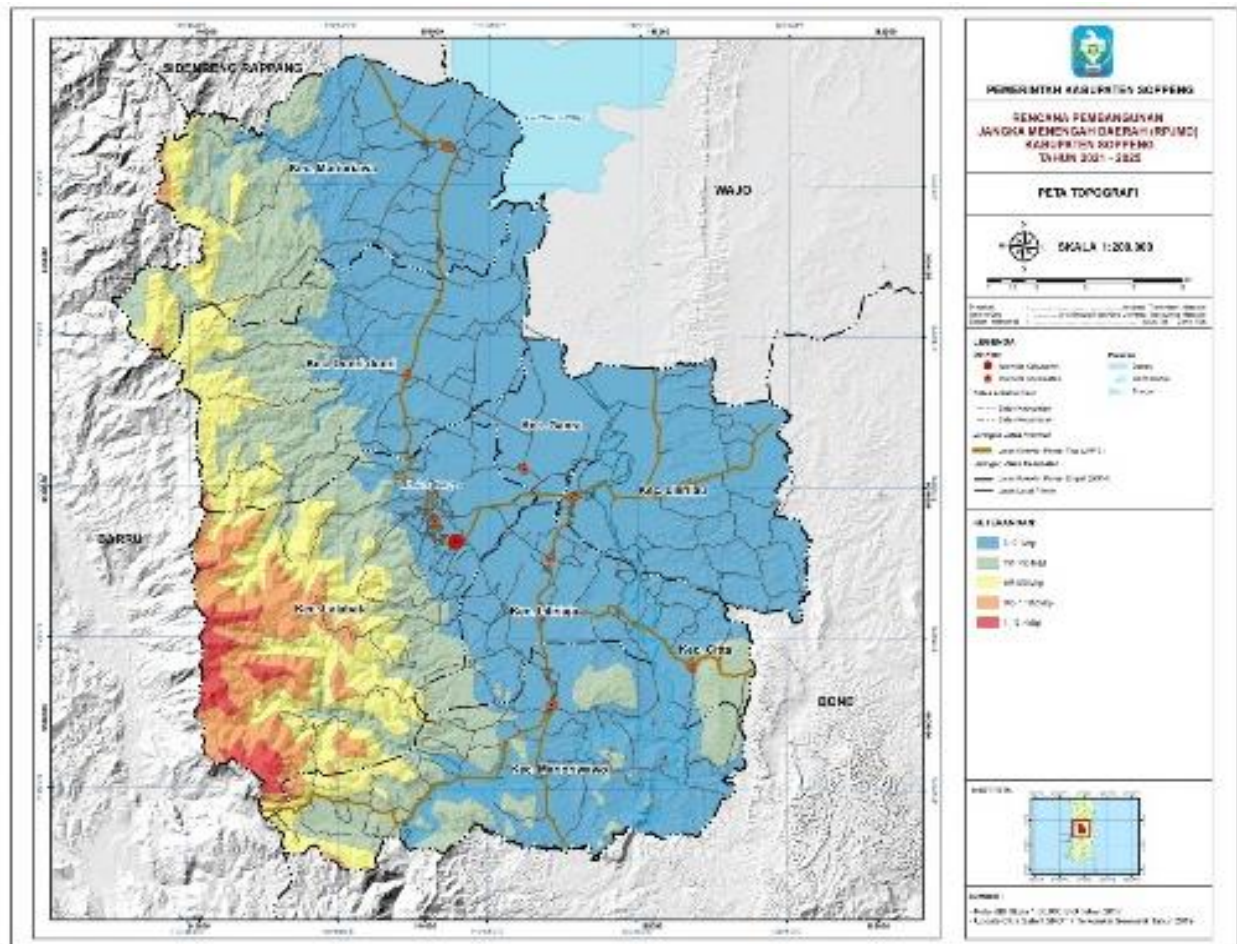


Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2026

Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Soppeng



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2026

Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Soppeng diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

- Area ketinggian 0 - 25 meter DPL ;
- Area ketinggian 25 - 100 meter DPL;
- Area ketinggian 100 - 500 meter DPL;
- Area ketinggian 500 - 1.000 meter DPL;
- Area ketinggian >1.000 meter DPL;

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

- Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl
- Gunung Sewo + 860 m dpl
- Gunung Lapancu + 850 m dpl
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl

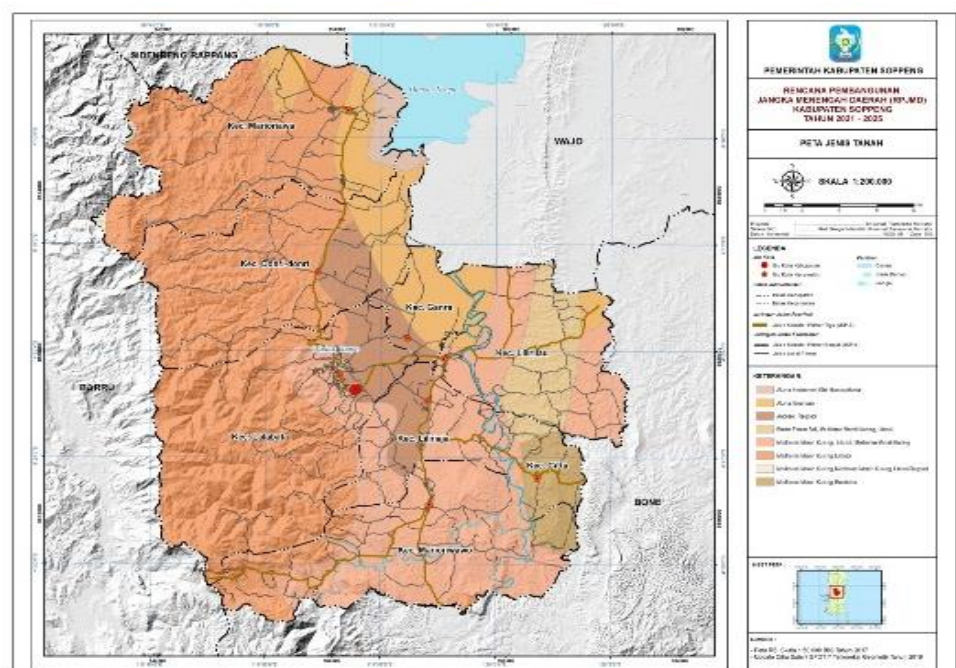
Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapancu bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut :

- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;
- Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol;
- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol
- Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2026

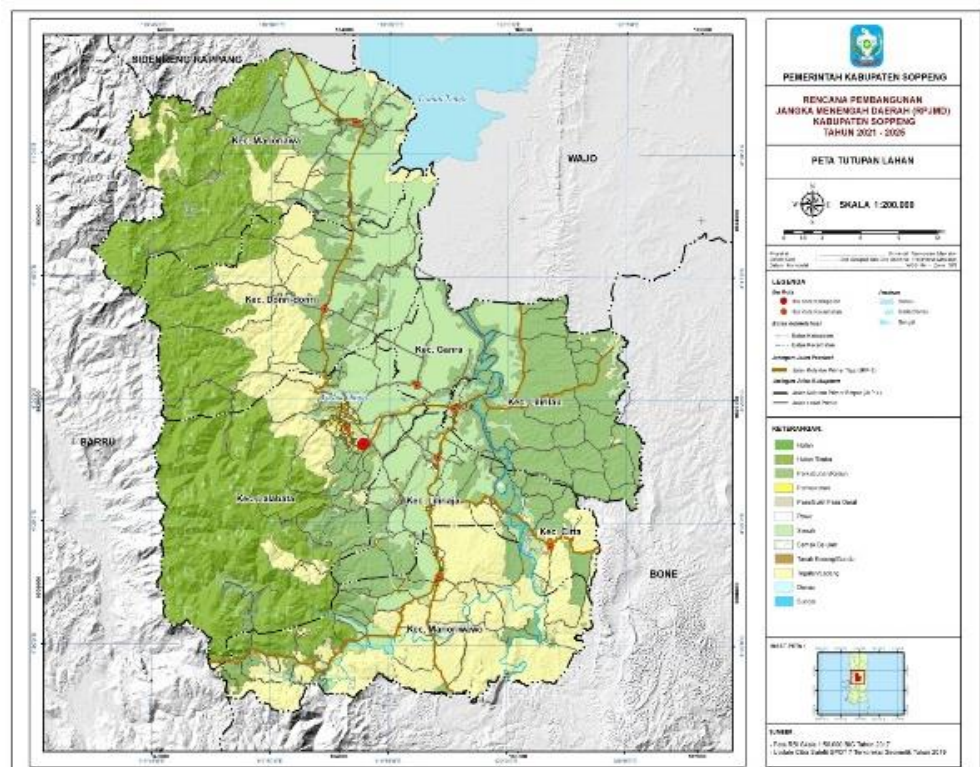
Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran $\pm 24^{\circ}$ sampai dengan $\pm 30^{\circ}$ dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah

hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan.

2.1.1.2. Potensi Pembangunan Wilayah

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.

Gambar 2. 4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2021



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2026

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:

- ✓ Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 48.437 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- ✓ Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-donri dan Kecamatan Lilirilau;
- ✓ Kawasan perkebunan terdiri atas:
 - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
 - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Marioriwawo, dan Donri-donri;
 - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo dan Maarioriwawo;
 - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, Marioriwawo, Lalabata, Donri-donri dan Liliriaja;



- kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriawa, Lilirilau, Donri-donri, dan Citta;
 - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lalabata, Donri-donri, dan Marioriawa;
 - kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, dan Ganra;
 - kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Donri-donri, Marioriawa dan Liliriaja;
 - kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Donri-donri, Lalabata, Liliriaja, Marioriwawo, Marioriawa, dan Ganra; dan
 - tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.
2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:
- ✓ Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kecamatan Donri-donri;
 - ✓ Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kecamatan Liliriaja;
 - ✓ Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan;
 - ✓ Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.
 - ✓ Kawasan Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
3. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
- ✓ Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-Donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;
 - ✓ Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.
4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:
- ✓ Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
 - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng,





- Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, di Kecamatan Lalabata;
- Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri;
 - Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuaara di Kecamatan Marioriawa;
 - Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
 - Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
 - Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liriaja;
 - Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
 - Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.
 - ✓ Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesuteraan Alam (Kecamatan Donri-Donri).
 - ✓ Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;
 - ✓ Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.
5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
- ✓ Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
 - ✓ Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
 - ✓ Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liriaja, Marioriwawo, Ganra;
6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
- ✓ Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa
 - ✓ Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan





- ✓ Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

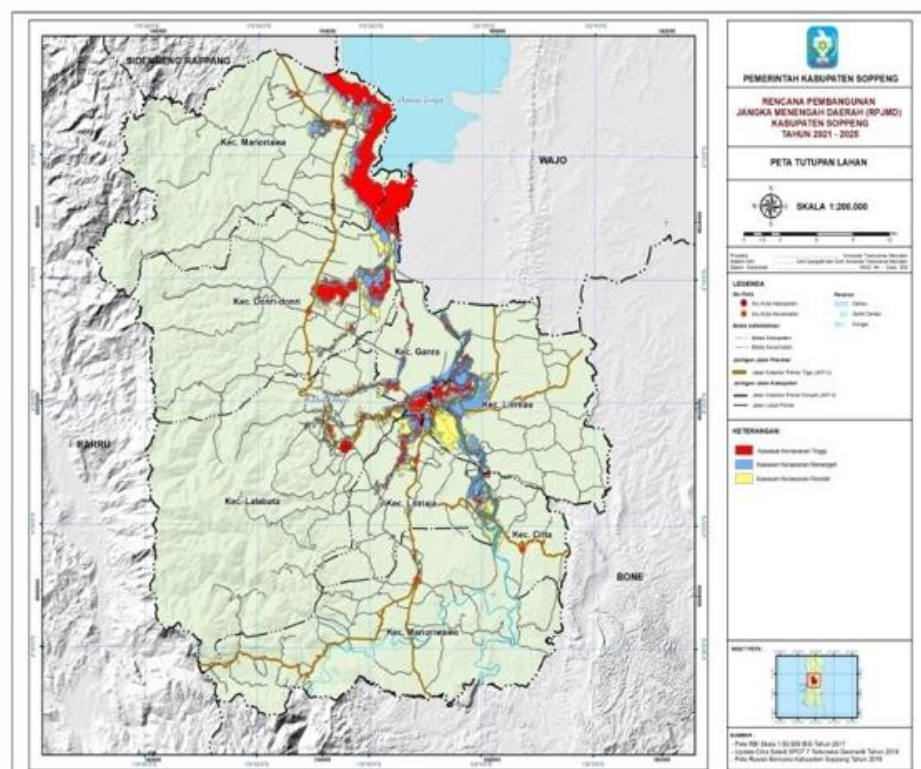
Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan puting beliung.

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra;
2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta;
3. Penetapan kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Desa Laringgi, Kelurahan Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu, dan Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanaan lintas sektor dalam penanganannya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.

Gambar 2. 5. Peta Rawan Banjir Kabupaten Soppeng



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2026





2.1.1.4. Aspek Demografi

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinyu. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya analisis mengenai kondisi kependudukan yang bertujuan untuk mengetahui kuantitas dan kondisi penduduk, baik berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, bahkan kondisi sosio-ekonomi, mengetahui pertumbuhan masa lampau, masa sekarang, serta penurunannya dan penyebarannya dalam suatu wilayah pembangunan, mengembangkan hubungan sebab-akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam macam aspek pembangunan, mencoba memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan-kemungkinan konsenkuensinya serta pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan.

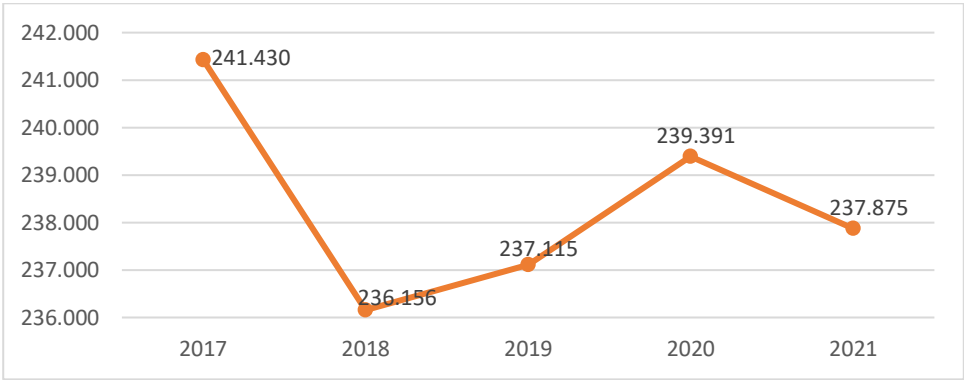
Berdasarkan data KTP-El Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 penduduk kabupaten soppeng sebanyak 241.430 jiwa dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 236.156 jiwa. Penurunan jumlah penduduk tersebut disamping disebabkan adanya mutasi penduduk juga karena adanya pembersihan data sehingga data penduduk ganda ataupun data penduduk yang telah meninggal dikeluarkan dari database kependudukan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 237.115 jiwa meningkat dibanding tahun 2018. Sementara itu pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Soppeng sebesar 239.391 jiwa meningkat dibanding tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2021sebanyak 237.875 jiwa.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perbaikan data kependudukan terus dilakukan selama lima tahun terakhir, dan selama kurun waktu 2018-2021 data kependudukan di Kabupaten Soppeng sudah mulai akurat dimana sudah tidak terdapat lagi data penduduk ganda dan update data sudah terus dilakukan.





Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2021

Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 237.875 jiwa yang terbagi ke dalam 8 kecamatan akan di tampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1. Luas Area, Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2021

KECAMATAN	LUAS AREA	PENDUDUK			KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
LALABATA	278	23,929	25,014	48,943	176,05
GANRA	57	5,577	6,146	11,723	205,67
CITTA	40	3,857	4,210	8,067	201,68
MARIORIWAWO	300	23,652	25,215	48,867	162,89
MARIORIAWA	320	14,235	14,987	29,222	91,32
DONRI-DONRI	222	11,677	12,730	24,407	109,94
LILIRIAJA	96	13,543	14,824	28,367	295,49
LILIRILAU	187	18,214	20,065	38,279	204,70
TOTAL	1500	114,684	123,191	237,875	180,97

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2021

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menentukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat muda (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun ke atas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) pada tahun 2021 yaitu sebesar 198.165 jiwa, maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupaten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2. 2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2021

GOLONGAN UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0 – 4	6,563	6,004	12,567
5 – 9	8,321	7,916	16,237
10 – 14	9,493	8,798	18,291
15 – 19	9,985	9,561	19,546
20 – 24	10,321	10,078	20,399
25 – 29	8,737	8,306	17,043
30 – 34	6,974	7,124	14,098
35 – 39	7,440	7,874	15,314
40 – 44	7,819	8,292	16,111
45 – 49	8,209	9,086	17,295
50 – 54	8,399	9,234	17,633
55 – 59	6,053	7,578	13,631
60 – 64	5,199	6,990	12,189
65 – 69	3,913	5,207	9,120
70 – 74	3,002	4,315	7,317
75+	4,256	6,828	11,084
JUMLAH	114,684	123,191	237,875

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.1.5. Potensi Sumber Daya untuk dikembangkan

2.1.1.5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Soppeng termuat dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Selanjutnya diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada seluruh Kawasan Perkotaan yang terdapat di Kabupaten Soppeng sebagai penjabaran terhadap rencana umum tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana rinci tata ruang kabupaten.



2.1.1.5.2. Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan dan kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan Kawasan budidaya perikanan air tawar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau
- Kawasan pengembangan balai benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta.

2.1.1.5.3. Kawasan Pertanian

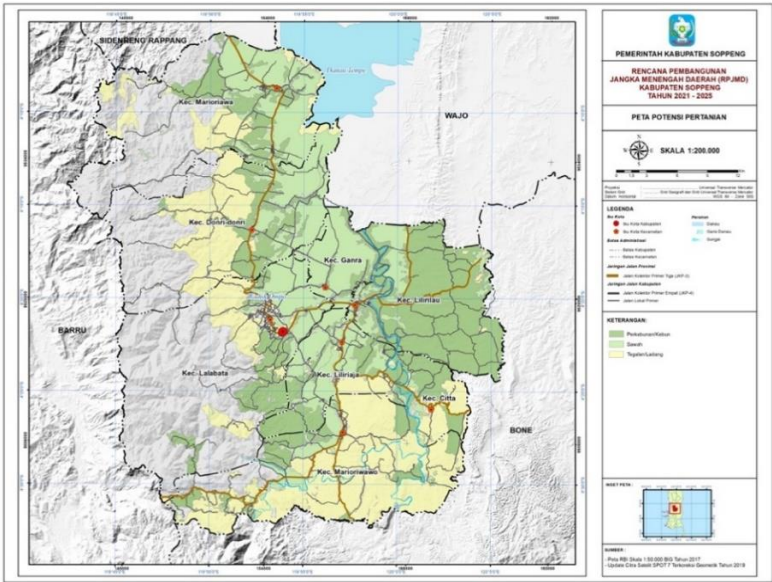
Kawasan Pertanian yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas:

- Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan perkebunan terdiri atas:
 - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
 - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
 - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;
 - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
 - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
 - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
 - kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;
 - kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;



- kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan
- tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

Gambar 2. 6. Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2026

2.1.1.5.4. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2033 terdapat beragam potensi wisata yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya permandian wisata alam, agro, situs sejarah dan budaya masyarakat tradisional termasuk kuliner tradisional, maupun *events* (peristiwa pariwisata).

2.1.1.5.4.1. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam merupakan salah satu daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Soppeng. Daftar objek wisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3. Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
1	Kawasan TWA Lejja	Desa Babbae Kecamatan Marioriawa
2	Kawasan TWA Danau Tempe	Kelurahan Limpomajang Kec. Marioriawa
3	Kawasan TWA Citta	Desa Citta Kecamatan Citta
4	Kawasan TWA Goa Coddong	Desa Citta Kecamatan Citta
5	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Alam Adventure Park Gattareng Toa	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
7	Kawasan Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng	Botto Kecamatan Lalabata
8	Kawasan Pesuteraan Alam	Kecamatan Donri-Donri
9	AppejengĒ	Desa Lalabata Riaja Kec, Donri-Donri





NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
10	Kawasan Matabulu	Desa Matabulu Kec. Lalabata
11	Puncak Biccuing	Dusun Biccuing Kel. Botto Kec. Lalabata
12	Air Terjun Minawoe	Desa Bulue Kec. Marioriawa
13	Air Terjun Datae	Desa Bulue Kec. Marioriawa

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

2.1.1.5.4.2. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi wisata alam, Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi wisata sejarah dan Budaya yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten Soppeng. Adapun rincian potensi wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Soppeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 4. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
1	Prosesi Perkawinan	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
2	Musik Tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
3	Tari Tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
4	Lagu daerah	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
5	Villa Yuliana (Bola MaccacaE)	Kecamatan Lalabata
6	Kawasan makam Kuno Jera LompoE	Kecamatan Lalabata
7	Kompleks Istana Datu Soppeng	Kecamatan Lalabata
8	Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge)	Kelurahan Bila Kec. Lalabata
9	Makam Petta Bulu Matanre	Kec. Lalabata
10	Situs Megalitik Lawo	Kec. Lalabata
11	Situs Megalitik Tinco	Kec. Lalabata
12	Situs Megalitik Sewo	Kec. Lalabata
13	Situs Megalitik Umpungeng	Kec. Lalabata
13	Makam Petta Seppang	Kec. Lalabata
14	Kompleks Makam Datu Soppeng	Kec. Lalabata
15	Gereja Khatolik Patung Bunda Maria	Kec. Lalabata
16	Rumah Tradisional Batu Laiya	Kec. Lalabata
17	Kompleks makam Jera CaddiE	Kec. Lalabata
18	Menhir Latemmamala (LamumpatuE)	Kec. Lalabata
19	Situs Petta BanuangÉ	Kec. Lalabata
20	Situs Petta Wanua	Kec. Lalabata
21	Makam Lato Gappong	Kec. Lalabata
22	Makam Petta Awo	Kec. Lalabata
23	Menhir La Temma Pole	Kec. Lalabata
24	Makam Petta Sering	Kec, Donri-Donri
25	Situs Tomanurung Sanyili	Kec, Donri-Donri





NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
26	Makam Petta AbbaraningngE	Kec, Donri-Donri
27	Makam Petta BalubuE	Kec, Donri-Donri
28	Bulu BottingngE	Kec, Donri-Donri
29	Makam Petta AddagangE	Kec, Donri-Donri
30	Makam Datu Mario	Kec. Marioriawa
31	Kompleks Makam Petta Jangko	Kec. Marioriawa
32	Kompleks Sao Mario	Kec. Marioriawa
33	Situs Tampaning	Kec. Marioriawa
34	Makam Kuno Padali	Kec. Marioriawa
35	Makam Petta Kajuara	Kec. Marioriawa
36	Makam Kuno Datu Lompulle	Kec. Ganra
37	Kompleks Makam Pakka SaloE	Kec. Ganra
38	Makam Petta Sara'E	Kec. Ganra
39	Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karame	Kec. Ganra
40	Museum Calio	Kec. Lilirilau
41	Situs Kecce	Kec. Lilirilau
42	Situs Marale	Kec. Lilirilau
43	Situs Paroto	Kec. Lilirilau
44	Kompleks Makam Datu Salaonro	Kec. Lilirilau
45	Makam Arung Baringeng	Kec. Lilirilau
46	Makam AbbanuangE	Kec. Lilirilau
47	Situs Megalitik Samoling	Kec. Lilirilau
48	Situs Paleolitik Jampu	Kec. Lilirilau
49	Situs Talepu	Kec. Liliriaja
50	Situs Lonrong	Kec. Liliriaja
51	Situs Lenrang	Kec. Liliriaja
52	Kompleks Makam AbbanuangE	Kec. Liliriaja
53	Kompleks Makam Datu Pattojo	Kec. Liliriaja
54	Benteng Pattojo	Kec. Liliriaja
55	Saoraja Seng	Kec. Liliriaja
56	Gua Lakaroci	Kec. Liliriaja
57	Gua Coddong	Desa Citta Kec. Citta
58	Situs Paleolitik Lakibong	Kec. Citta
59	Makam Datu Citta	Kec. Citta
60	Makam KalokoE Watu	Kec. Marioriwawo
61	Makam Lato Garimpang	Kec. Marioriwawo
62	Situs GoariE	Kec. Marioriwawo
63	Situs Megalitik Madenra	Kec. Marioriwawo
64	Sumur Tua TettikenraraE	Kec. Marioriwawo
65	Makam Arung Sekkang	Kec. Marioriwawo
66	Rumah Arrajang	Kec. Marioriwawo

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033





2.1.1.5.4.3. Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Soppeng juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke kabupaten Soppeng. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. Adapun rincian potensi wisata buatan manusia (*Manmade*) dan minat khusus dapat diketahui melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 5. Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus
di Kabupaten Soppeng**

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
1	Kawasan wisata Ompo	Kec. Lalabata
2	Kawasan Wisata Agro	Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo
3	Kawasan Wisata Agro	Desa Gattareng Kec. Marioriwawo
4	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
5	Kawasan Adventure Park Gattareng Toa	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Populasi Kelelawar (Taman Kalong)	Botto Kecamatan Lalabata

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

2.1.1.5.5. Kawasan Pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi:

- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
 - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
 - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
 - Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo.
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi ditetapkan di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa.





2.1.1.5.6. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:

- Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:
 - Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri;
 - Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
- Kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:
 - Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.

2.1.1.5.7. Kawasan Perdagangan

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:

- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di kawasan perdagangan Watansoppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala Kecamatan Marioriwawo dan kawasan perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.

2.1.1.5.8. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Penggunaan energi di dunia akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Guna memenuhi kebutuhan, tak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil. Diperlukan juga sistematis untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan. Berdasarkan hasil





kajian sumberdaya alam dan energi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, terdapat potensi energi yang terdapat di Kabupaten Soppeng yaitu:

1. Batubara
Potensi batubara di Kabupaten Soppeng dapat ditemukan, dimana terdapat Singkapan batubara di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo, berdasarkan luas dan penyebarannya perhitungan yang sifatnya sumber daya tereka sekitar 2,65 juta ton.
2. Geothermal
Potensi Panas Bumi di Kabupaten Soppeng dijumpai di Desa Bulue Kecamatan Marioriwawo dengan temperatur manifestasi panas bumi di permukaan cukup tinggi berkisar 39° C dan Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo dengan temperatur berkisar 37° C.
3. Hidrologi
Pemanfaatan air yang berpotensi digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dijumpai di beberapa lokasi, antara lain
 - Potensi PLTM Sungai Langkemme di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo dengan kapasitas bangkitan 3 MW.
 - Potensi PLTM Sungai Lawo di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.
 - Potensi PLTM Sungai Salau di Desa Sering Kecamatan Donri-donri dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.

2.1.1.5.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.5.9.1. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6. Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan





No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
7	VII	Pgt, hutan.
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingbiel dan Montgomery (1961) dan Fenton (2014)
Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif;
Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas;
Pgi: pengembalaan intensif; Pgsd: pengembalaan sedang;
Pgt: Pengembalaan terbatas

Tabel 2. 7. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Soppeng
Tahun 2020

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Citta	-	-	523,44	1.490,21	661,93	-	496,25	351
Donri- donri	-	-	351,09	6.767,47	2.912,81	1,12505787	-	-
Ganra	-	-	-	4.866,24	-	-	-	-
Lalabata	-	-	334,79	4.587,60	1.592,43	1,233726852	-	27,6
Liliriaja	1.430	-	938,19	4.745,07	519,81	965,09	623,17	-
Lilirilau	3.956	0,71	6.964,82	4.601,52	503,93	-	-	-
Marioriawa	-	-	3.139,66	7.407,85	7.109,54	9.584,87	-	-
Maroriwawo	1.137	453,74	554,47	8.539,65	3.124,08	3.982,67	4.392,39	1.372
Total	6.523	454,44	12.806,46	43.005,61	16.424,54	49.889,02	5.511,80	1.751

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

Berdasarkan hal tersebut kemampuan lahan di Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa kelas kemampuan lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten Soppeng yakni sebesar 36.58% dari luasan Kabupaten Soppeng, diikuti kelas lahan IV sebesar 31.54 %, kelas lahan V 12.04%, kelas lahan III 9.39%, kelas lahan I 4.78%, kelas lahan VII 4.09%, kelas lahan VIII 1,28% dan yang terakhir kelas lahan II 0.33%. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Soppeng hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Selain itu, data di atas juga menunjukkan kecamatan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Maroriwawo.

2.1.1.5.9.2. Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, salah satunya dengan pendekatan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Air merupakan salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Selain digunakan untuk keperluan minum dan rumah tangga, air juga dimanfaatkan dalam aspek kehidupan lainnya yaitu untuk pertanian, perkebunan, perumahan, industri, dan pariwisata. Status daya dukung lingkungan dengan pendekatan air menunjukkan suatu kondisi ketersediaan air wilayah dengan kebutuhan yang ada. Pengelolaan air yang kurang tepat menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan air.





Ketersediaan serta kebutuhan air di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Kecamatan	Volume Air Tahun 2019 (m ³ /tahun)		Selisih
	Ketersediaan	Kebutuhan	
Citta	2.715.818,61	355.893,55	2.359.925,07
Donri-donri	20.065.611,15	1.038.601,03	19.027.010,12
Ganra	4.290.747,79	509.512,66	3.781.235,13
Lalabata	27.382.213,30	2.086.490,06	25.295.723,24
Liliriaja	7.121.624,67	1.257.077,81	5.864.546,86
Lilirilau	11.991.100,73	1.587.811,78	10.403.288,95
Marioriawa	27.824.802,60	1.276.368,80	26.548.433,80
Marioriwawo	19.418.287,64	2.092.043,33	17.326.244,31
Grand Total	120.810.206,50	10.203.799,01	110.606.407,49

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

Daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Soppeng sebesar 120.810.206,50 m³/tahun, sementara kebutuhan air sebesar 10.203.799,01 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 110.606.407,49 m³/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui.

2.1.1.5.9.3. Daya Dukung Ketersediaan Pangan

Untuk pemenuhan akan ketersediaan pangan perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang menjadi faktor untuk memproduksi pangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Food and Agriculture Organization (1996) bahwa ketersediaan pangan menjadi salah satu faktor penentu ketahanan pangan agar tercukupinya kebutuhan dan keamanan akan pangan. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penyediaan lahan untuk pangan adalah penurunan luas lahan akibat alih fungsi lahan ke non pertanian. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan baik akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Ketersediaan, kebutuhan dan selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2019 dapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9. Daya Dukung Ketersediaan Pangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2019 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Citta	24.758.041.867,34	6.464.987.523,90	18.293.054.343,44
Donri-donri	163.330.533.449,78	18.866.716.668,47	144.463.816.781,30
Ganra	39.213.179.301,11	9.255.556.921,10	29.957.622.380,01
Lalabata	200.434.798.210,73	37.902.154.507,36	162.532.643.703,38
Liliriaja	66.071.187.252,22	22.835.458.573,24	43.235.728.678,98
Lilirilau	119.301.059.687,79	28.843.409.500,95	90.457.650.186,83
Marioriawa	219.608.860.426,71	23.185.889.284,22	196.422.971.142,49





Kecamatan	Status Pangan Tahun 2019 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Marioriwawo	160.532.398.364,17	38.003.032.468,06	122.529.365.896,09
Grand Total	993.250.058.559,83	185.357.205.447,30	807.892.853.112,52

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2021 Perekonomian Kabupaten Soppeng tetap menunjukkan laju perkembangan yang positif, meskipun masih dalam kondisi bencana akibat Covid 19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi global, nasional dan daerah. Hal ini tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2021 yang sebesar Rp12.426.781,61 dan tahun 2020 sebesar Rp11.382.122,02 Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah pandemic Covid-19. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 terangkum dalam berikut:

Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,731,526.10	3,057,935.70	3,138,491.00	3,336,193.48	3,564,663.27
B	Pertambangan dan Penggalian	384,274.80	432,920.40	477,330.90	506,494.11	534,199.73
C	Industri Pengolahan	936,725.30	1,048,113.00	1,150,263.20	1,130,157.01	1,255,899.87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,449.30	8,125.20	8,682.00	9,068.90	9,885.39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,050.10	4,461.90	4,717.80	4,975.43	5,323.48





Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
F	Konstruksi	1,098,866.00	1,290,274.60	1,468,400.10	1,537,616.97	1,761,452.76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,101,069.00	1,276,053.60	1,458,273.20	1,414,753.16	1,573,576.14
H	Transportasi dan Pergudangan	273,810.80	303,263.30	335,477.30	324,709.77	374,609.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,377.60	147,031.70	167,153.60	163,898.42	186,672.23
J	Informasi dan Komunikasi	261,882.20	299,074.30	332,939.00	369,116.18	415,216.70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	295,267.60	324,413.00	352,304.60	384,579.91	416,535.69
L	Real Estate	483,696.50	527,386.20	568,306.40	592,730.77	617,441.72
M,N	Jasa Perusahaan	17,835.60	19,750.50	22,149.90	21,350.43	24,001.83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561,179.30	607,050.80	685,513.70	722,368.41	731,851.14
P	Jasa Pendidikan	379,408.50	418,110.50	488,576.70	562,871.42	624,505.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,963.10	167,871.50	192,962.00	218,892.78	242,112.08
R,S, T,U	Jasa lainnya	64,825.10	74,102.00	85,846.60	82,344.87	88,833.80
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,876,207.00	10,005,938.30	10,937,388.00	11,382,122.02	12,426,781.61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.7.146.654,36 dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp7,585,976.28 sedangkan kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2021 sebesar Rp2.017.695,33.

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017–2021

Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,757,019.70	1,896,925.70	1,946,887.40	1,995,488.51	2,017,695.33
B	Pertambangan dan Penggalan	189,228.40	207,354.40	228,338.70	237,152.57	246,968.79
C	Industri Pengolahan	621,778.80	657,200.80	710,969.20	691,955.40	753,015.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,615.90	8,068.70	8,627.30	9,141.62	9,758.18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	3,391.50	3,712.90	3,915.30	4,129.08	4,377.65





Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	728,663.30	793,817.00	876,612.10	916,147.34	1,007,670.46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	860,583.90	943,562.00	1,047,940.10	1,005,657.51	1,092,249.23
H	Transportasi dan Pergudangan	172,636.30	190,016.30	209,471.00	196,819.02	216,796.66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95,683.30	107,252.30	120,543.40	117,067.77	131,956.60
J	Informasi dan Komunikasi	225,201.30	245,823.90	273,085.80	305,146.03	341,946.64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	174,714.40	185,203.20	196,578.50	213,335.14	222,314.13
L	Real Estate	290,107.20	306,756.60	324,701.80	337,560.00	351,632.88
M,N	Jasa Perusahaan	13,248.40	14,568.10	16,045.40	15,183.72	16,747.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	369,224.50	385,072.20	423,603.10	438,879.32	440,345.97
P	Jasa Pendidikan	342,203.40	376,713.30	415,966.80	461,390.37	511,912.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,580.00	124,167.00	136,049.70	150,430.20	166,014.76
R,S, T,U	Jasa lainnya	42,575.30	48,178.00	54,177.60	51,170.75	54,573.62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,007,455.72	6,494,392.43	6,993,513.10	7,146,654.36	7,585,976.28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2021 sebesar Rp2,017,695.33 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.092.249,23 dan konstruksi sebesar Rp1.007.670,46 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun masih ditengah pandemik Covid-19, tetapi sektor utama perekonomian di Kab. Soppeng pada tahun 2021 tetap memberikan kontribusi yang cukup.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.





2.1.2.1.1.2. **Distribusi Sektoral**

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2017-2021 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2021 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,69%. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2021 yaitu konstruksi sebesar 14,17%.

Tabel 2.12. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.77	30.56	28.7	29.31	28.69
B	Pertambangan dan Penggalian	4.33	4.33	4.36	4.45	4.3
C	Industri Pengolahan	10.55	10.47	10.52	9.93	10.11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
F	Konstruksi	12.38	12.9	13.43	13.51	14.17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.4	12.75	13.33	12.43	12.66
H	Transportasi dan Pergudangan	3.08	3.03	3.07	2.85	3.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.45	1.47	1.53	1.44	1.50
J	Informasi dan Komunikasi	2.95	2.99	3.04	3.24	3.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.33	3.24	3.22	3.38	3.35
L	Real Estate	5.45	5.27	5.2	5.21	4.97
M,N	Jasa Perusahaan	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.32	6.07	6.27	6.35	5.89
P	Jasa Pendidikan	4.27	4.18	4.47	4.95	5.03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.64	1.68	1.76	1.92	1.95
R,S, T,U	Jasa lainnya	0.73	0.74	0.78	0.72	0.71
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , 2022

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Sulawesi Selatan.



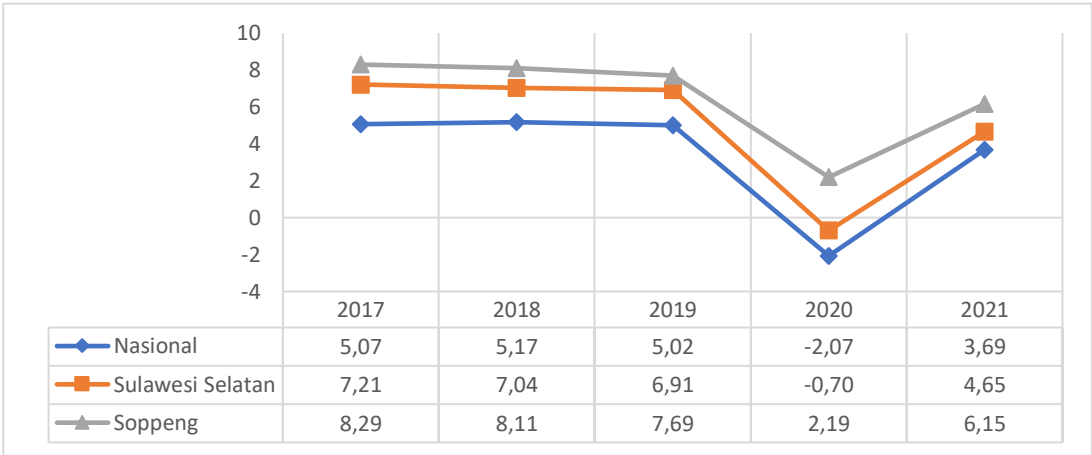


2.1.2.1.1.3. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

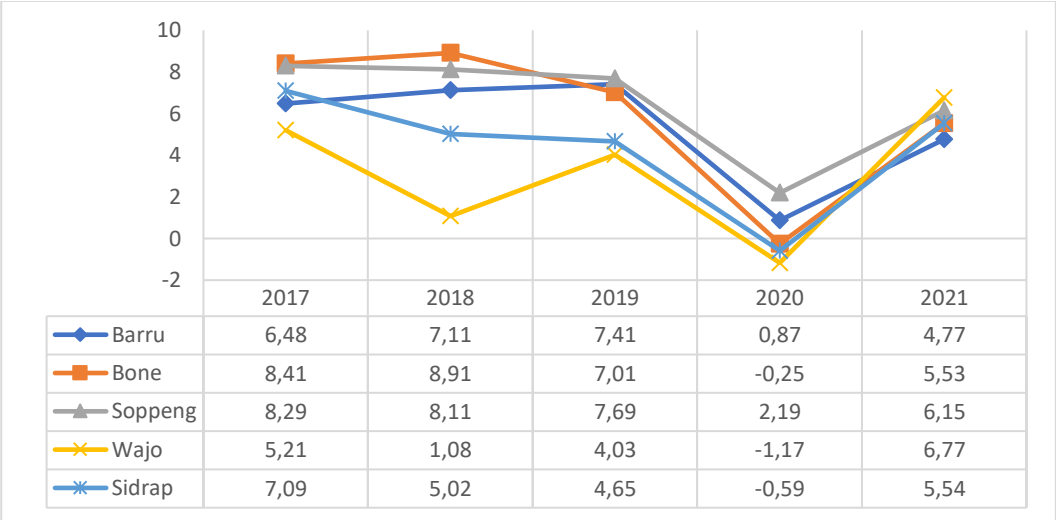
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 2,19 % mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan capaian 6,15% lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai sebesar 3,69% dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 4,65%.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi wilayah sekitar, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng pada empat tahun terakhir berada pada posisi yang baik. Pada tahun 2021 walaupun masih dalam masa pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng terbilang tinggi yaitu berada pada posisi kedua dari pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang setara. Perbandingan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.





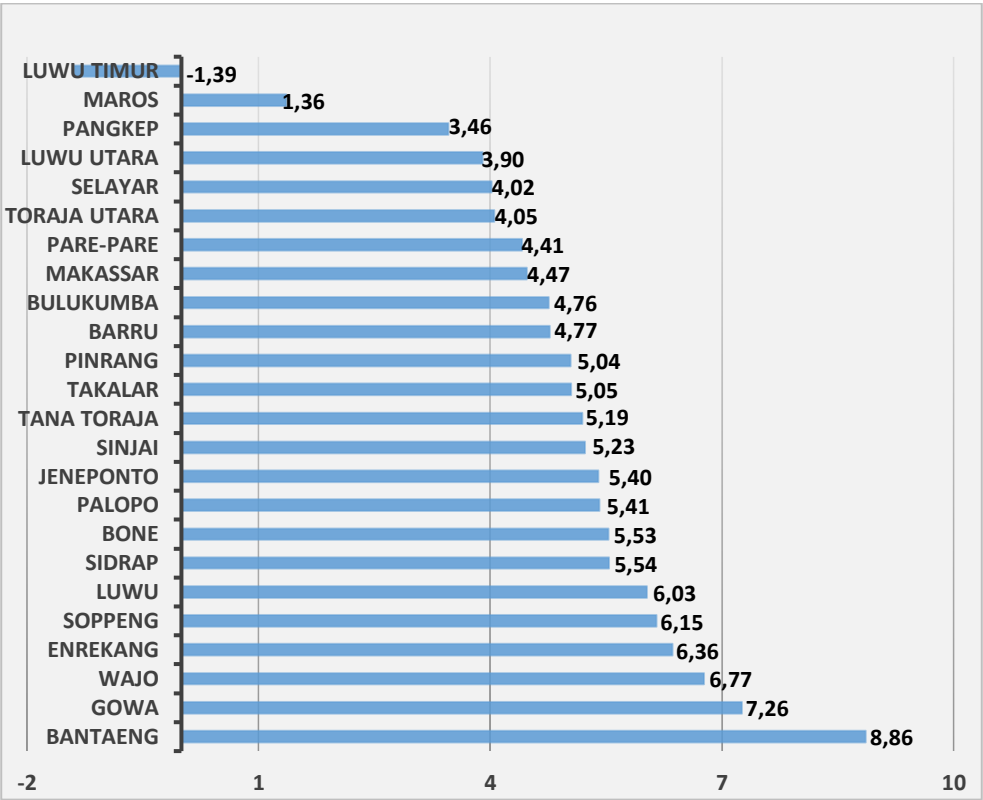
Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Wilayah sekitar Tahun 2017 - 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sul-Sel, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Soppeng berada pada urutan kedua setelah kabupaten wajo. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi di Kabupaten Soppeng di tengah pandemi Covid -19 cukup menggeliat pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sulawesi Selatan.

Grafik 2. 4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha sampai tahun 2019, pada tahun 2020 saat pandemic covid-19 berdampak pada seluruh sector lapangan usaha sedangkan pada tahun 2021, dimana masih dalam pengaruh covid-19





beberapa sektor mulai bertumbuh yang sebelumnya mengalami kontraksi, industri pengolahan bertumbuh menjadi 8,82%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bertumbuh menjadi 8,61%, transportasi dan pergudangan tumbuh menjadi 10,15%, penyediaan akomodasi makan dan minum tumbuh menjadi 12,72% dan jasa perusahaan bertumbuh dengan capaian 10,30%, serta jasa lainnya bertumbuh menjadi 6.65%, sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pelambatan 1,11% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi yaitu pada sektor industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya. Kategori lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng meskipun pada tahun 2020, mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2019. Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dengan kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 yaitu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang sebesar 12,72 persen.

Tabel 2. 13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2017 - 2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.19	7.38	2.57	2.50	1.11
B	Pertambangan dan Penggalan	7.14	8.74	9.19	3.86	4.14
C	Industri Pengolahan	9.21	5.39	7.56	-2.68	8.82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.87	5.61	6.47	5.96	6.74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.97	8.66	5.17	5.46	6.02
F	Konstruksi	7.72	8.21	9.44	4.51	9.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.31	8.79	9.96	-4.03	8.61
H	Transportasi dan Pergudangan	7.29	9.15	9.29	-6.04	10.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.41	10.79	11.03	-2.88	12.72
J	Informasi dan Komunikasi	10.71	8.39	9.98	11.74	12.06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.94	5.66	5.79	8.52	4.21
L	Real Estate	3.28	5.43	5.53	3.96	4.17
M,N	Jasa Perusahaan	7.22	9.06	9.21	-5.37	10.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.68	4.12	9.1	3.61	0.33
P	Jasa Pendidikan	7.14	9.16	9.44	10.92	10.95





Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.87	8.53	8.73	10.57	10.36
R,S, T,U	Jasa lainnya	8.42	11.63	11.07	-5.55	6.65
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.29	8.11	7.69	2.19	6.15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

2.1.2.1.2. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

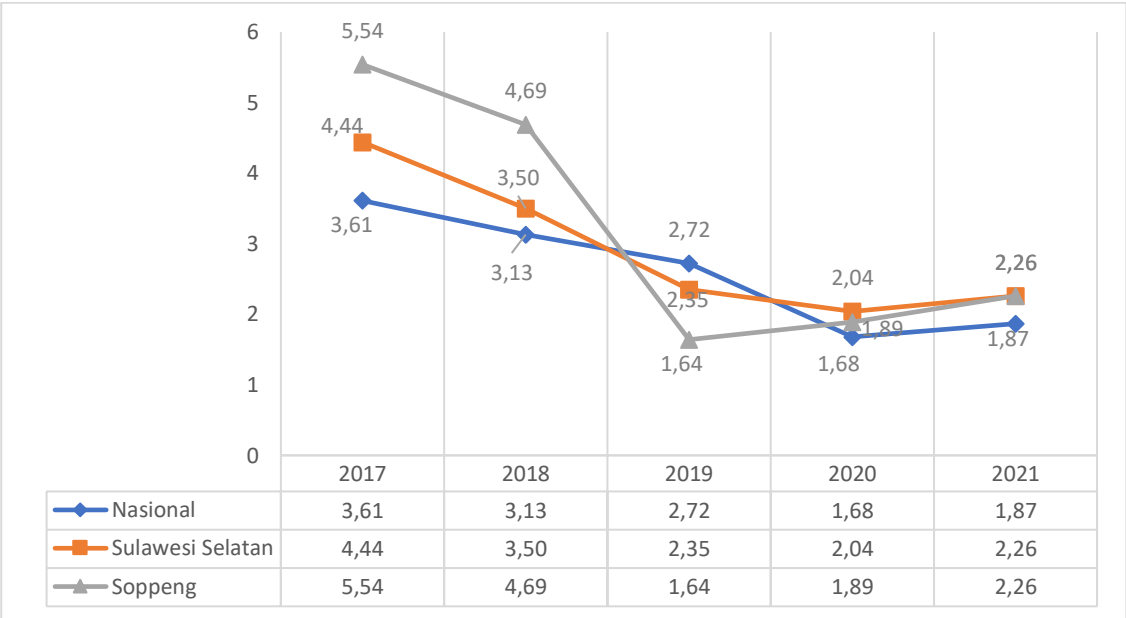
Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 2,26%, inflasi ini memberikan informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 2,26%, inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1,89%, Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2021 sama dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,26 %. Dan lebih tinggi dari laju inflasi nasional sebesar 1,87%.





Grafik 2. 5. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021

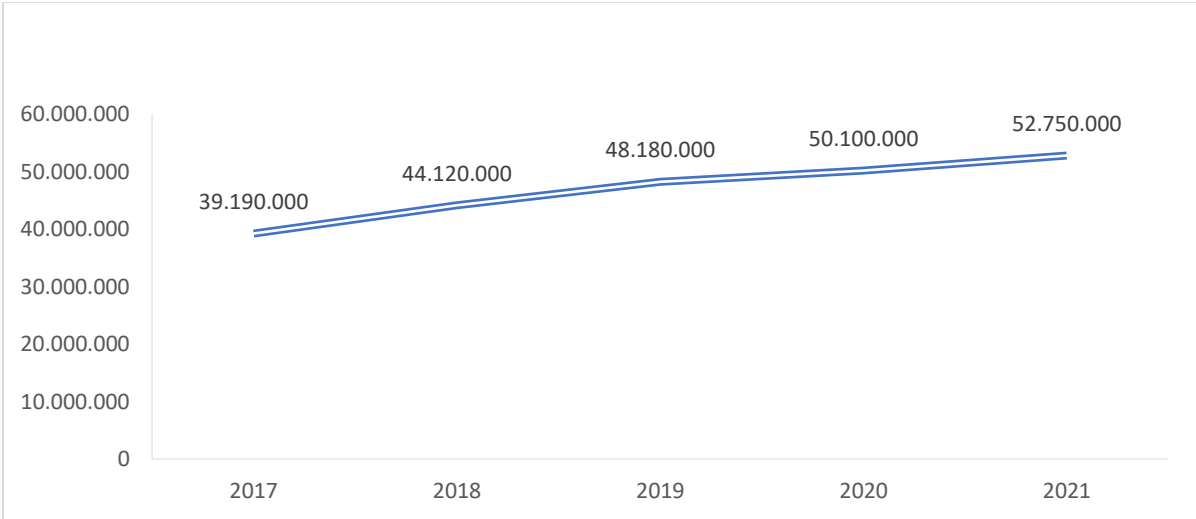


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp52.75 juta lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp50,10 juta.

Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2021



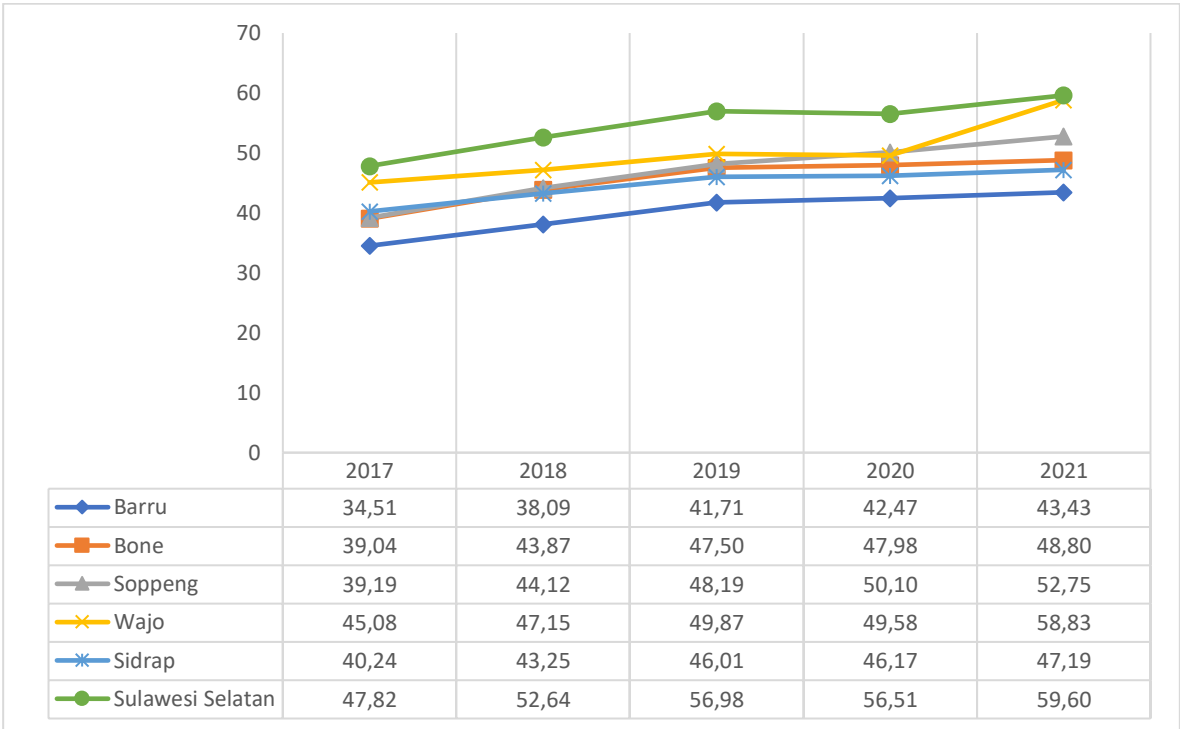
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022





Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kab. Bone, Kab. Sidrap, Kab. Barru, dan Kab. Wajo. PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup tinggi.

Grafik 2. 7. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

2.1.2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini (GR) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

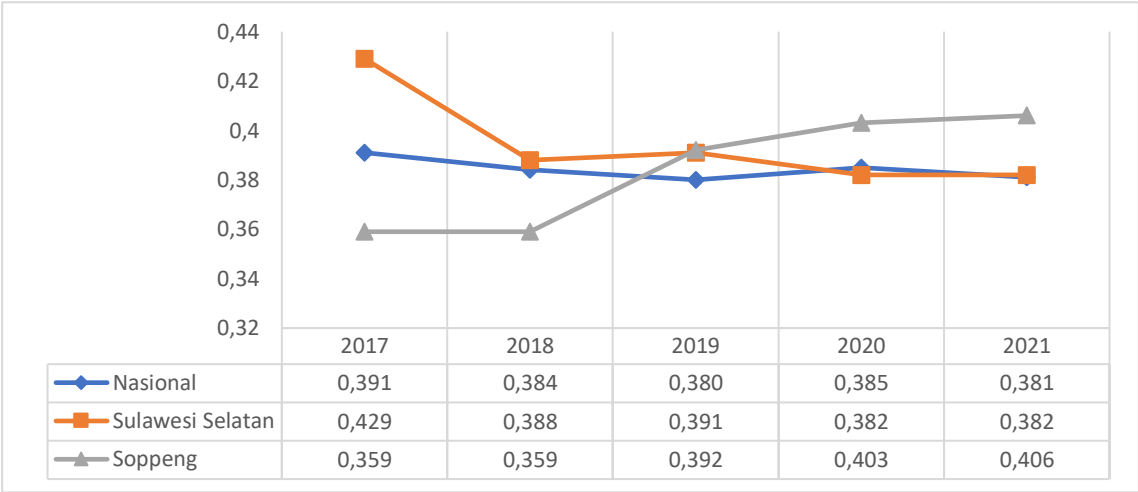
Nilai indeks gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai indeks gini mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai Indeks Gini kecil atau mendekati nol, maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai indek gini:

- GR < 0,3 → ketimpangan rendah
- 0,3 ≤ GR ≤ 0,5 → ketimpangan sedang
- GR > 0,5 → ketimpangan tinggi





Grafik 2. 8. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh indeks gini selama tahun 2017-2021 berfluktuasi, dengan capaian indeks gini terendah sebesar 0,359 pada tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh indeks gini adalah sebesar 0,403 mengalami kenaikan 0,003 point pada tahun 2021 dengan indeks gini sebesar 0,406.

Jika dibandingkan dengan indeks gini di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, indeks gini Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 lebih tinggi dimana indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,382 dan Nasional sebesar 0,381. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2021, tetapi Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang.

2.1.2.1.5. Kemiskinan

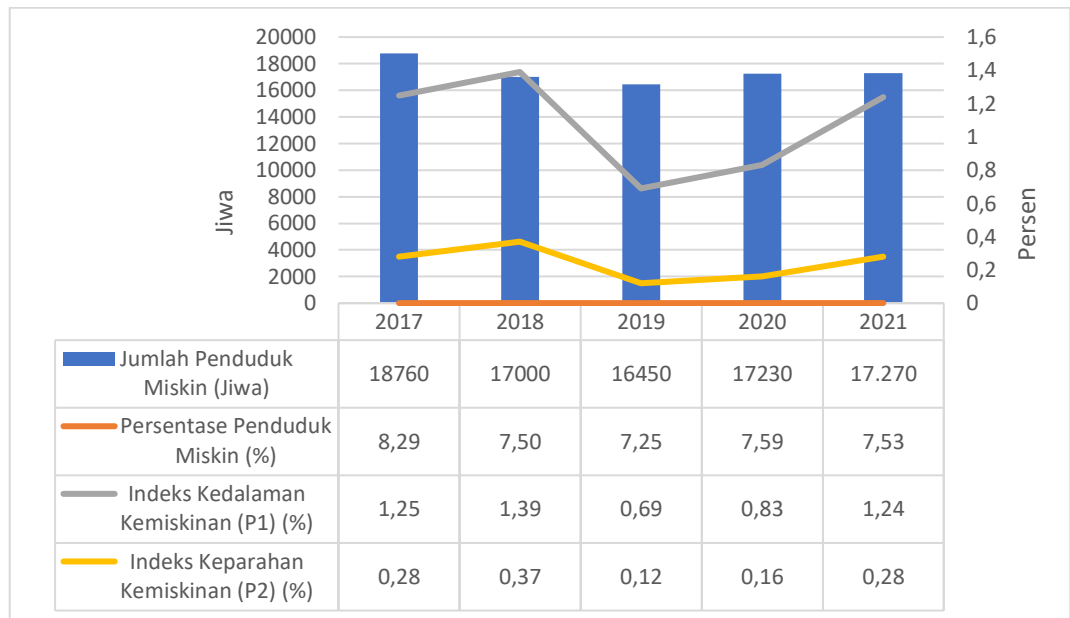
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 :





**Grafik 2. 9. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng
Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Pada kurun 2017 – 2021 penduduk miskin di Kabupaten Soppeng terus mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 18.760 jiwa atau mencapai 8,29%, tahun 2018 mencapai 17.000 jiwa atau mencapai 7,50% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 16.450 jiwa atau mencapai 7,25%, Tetapi dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 17.230 jiwa atau mencapai 7,59% dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 17.270 jiwa atau mencapai 7,53%

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2017 – 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dan cenderung menurun dimana pada tahun 2017 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,25%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,83% dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,24%

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Selain ideks kedalaman kemiskinan yang terus menurun Indeks keparahan Kemiskinan (P2) juga berfluktuatif dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2017 Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,28% dan pada tahun 2020 sebesar 0,16% dan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,28%. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (poverty gap) di

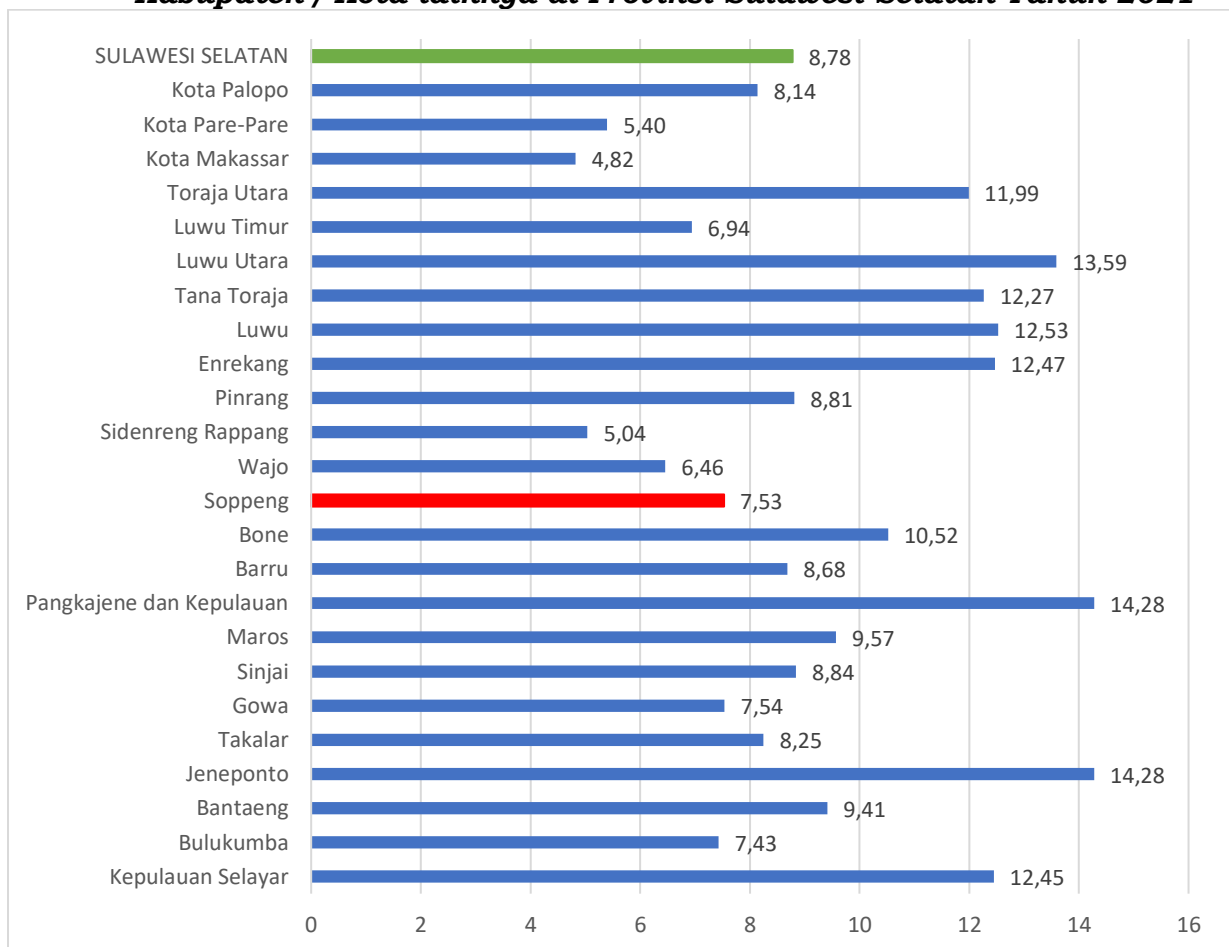




Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin rendah.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Prov. Sulawesi selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah.

Grafik 2. 10. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan lapangan kerja (Pro Job).

2.1.2.1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan





masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menumbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, Perumda Air Minum Tirta Ompo dan Perseroda Lamataesso dengan jumlah dari 86 unit penyelenggara layanan yang terdiri dari 27 unit penyelenggara pelayanan dasar dan 59 unit penyelenggara non pelayanan dasar, didapatkan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 14. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2021

No	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Nilai	Predikat
1.	IKM KABUPATEN SOPPENG	84.09	Baik
2.	IKM PELAYANAN DASAR	84.65	Baik
3.	IKM PELAYANAN NON DASAR	83.83	Baik
4.	IKM BIDANG KESEHATAN	84.48	Baik
5.	IKM BIDANG PERTANIAN	84.56	Baik
6.	IKM LAYANAN KECAMATAN SE KABUPATEN SOPPENG	86.73	Baik
7.	IKM KELURAHAN SE KABUPATEN SOPPENG	84.01	Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Kelola 2021





Hasil pengolahan data hasil survei 86 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa terdapat 3 unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian sangat positif dari masyarakat dengan nilai mutu pelayanan “A” dan Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”, yaitu Kantor Kecamatan Lalabata dengan nilai IKM 91,57, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Marioriwawo dengan nilai IKM 90,27, dan Puskesmas Cakkuridi dengan nilai IKM 91,10. Sedangkan 80 unit penyelenggara pelayanan publik lainnya memiliki nilai mutu pelayanan “B” dan Kinerja Unit Pelayanan “Baik” dan terdapat 3 unit penyelenggara pelayanan publik memiliki nilai “C” dengan kinerja unit pelayanan “Kurang Baik”.

Pengolahan data hasil survei menunjukkan bahwa diantara Sembilan unsur pelayanan publik yang dinilai seperti unsur persyaratan, unsur sistem, mekanisme dan prosedur, unsur waktu penyelesaian, unsur biaya/tarif, unsur produk spesifikasi jenis pelayanan, unsur kompetensi pelaksana, unsur perilaku pelaksana, unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, unsur sarana dan prasarana.

Berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”, direkomendasikan untuk mempertahankan kinerjanya. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan “baik” diharapkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih rendah, agar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dapat menjadi sangat baik. Sedangkan unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki kinerja “kurang baik” juga dapat mendorong mutu pelayanan dengan kinerja unit pelayanan menjadi baik ataupun meningkat menjadi sangat baik.

2.1.2.1.7. Persentase PAD Terhadap pendapatan

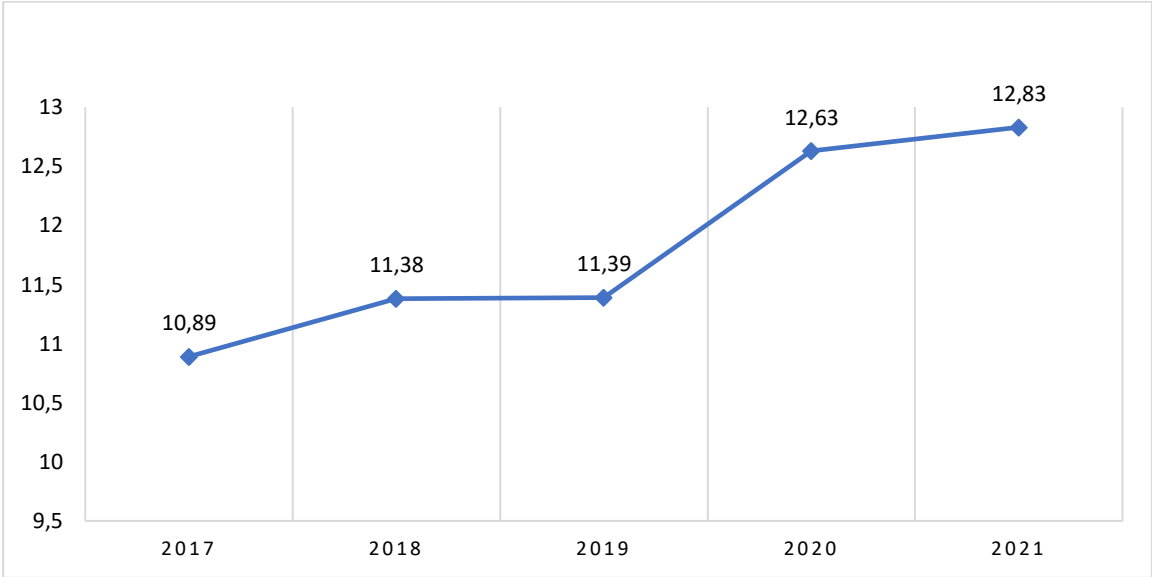
PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.

Persentase PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, pada tahun 2017 mencapai 10,89% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 12,83% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena perbaikan regulasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan juga dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses penagihan kepada para wajib pajak.





Grafik 2. 11. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng, 2022

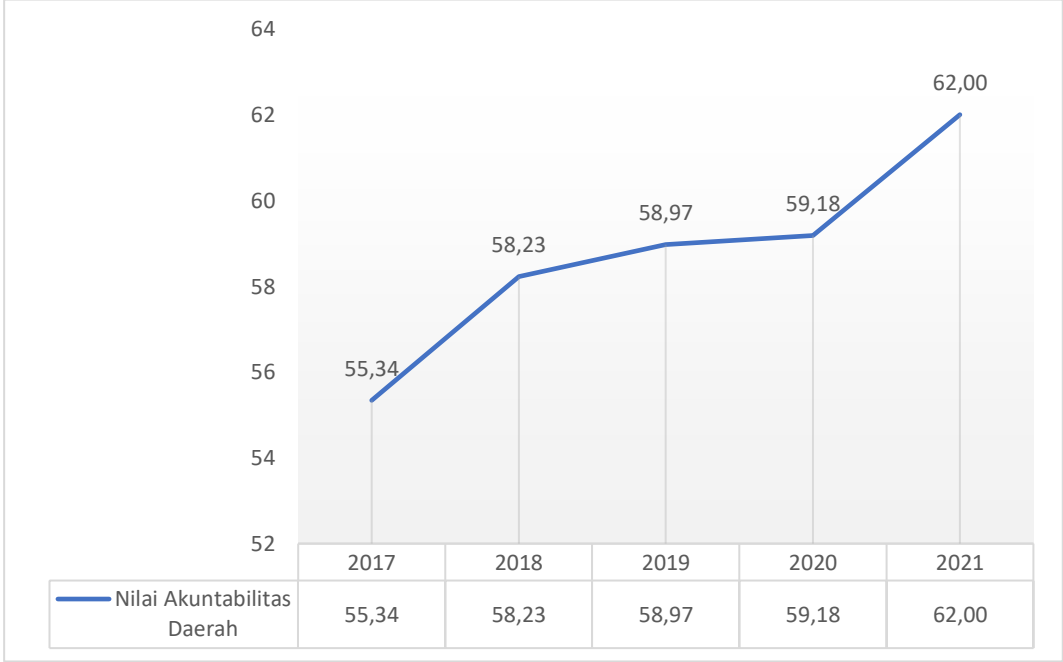
2.1.2.1.8. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2021 telah mendapat predikat opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik.

2.1.2.1.9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Indikator Nilai Akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2020 terhadap implementasi system akuntabilitas kinerja kabupaten Soppeng tahun 2020 dengan nilai 58.18% atau dengan predikat penilaian CC. Nilai akuntabilitas tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 dengan nilai 62,00 atau dengan predikat nilai B.

Grafik 2. 12. Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng



Sumber : Bappelitbangda Kab.Soppeng, 2022





2.1.2.1.10. Penguatan Cadangan Pangan

Penyediaan Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban dalam melakukan penguatan cadangan pangan di wilayah masing-masing. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, diatur mengenai Jumlah Cadangan Beras sebagai pangan utama tiap daerah. Adapun penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 15.Penguatan cadangan pangan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Soppeng	Ton	10.0	20.0	10.0	20.0	25.34
	Penguatan Cadangan Pangan ((Jumlah Cadangan Pangan / 100)*100%)	%	10.0	20.0	10.0	20.0	25.34

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

Pada tahun 2017 jumlah cadangan pangan yang diadakan yaitu 10 Ton, tahun 2018 meningkat menjadi 20 Ton, tahun 2019 menurun menjadi 10 Ton dan kembali meningkat menjadi 20 Ton pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 25,34 Ton Penguatan cadangan pangan menjadi instrumen strategis untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

2.1.2.1.11. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija)	Juta Rp	277.531,85	342.910,60	515.401,00	672.229,70	737.123,00
2	Jumlah PDRB sektor pertanian /perkebunan	Juta Rp	2.481.733,20	2.755.401,13	2.788.415,30	2.931.461,20	3.564.663,27
	Kontribusi Sektor Pertanian(Palawija) Terhadap PDRB	%	11,18%	12,45%	18,48%	22,93%	20,68%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021





Berdasarkan tabel tersebut diatas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2017 sebesar 11,18% dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 menjadi 22,93% sedangkan untuk tahun 2021 terjadi penurunan dengan persentase capain sebesar 20,68%.

2.1.2.1.12. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Gambaran dari besaran kontribusi tersebut mencerminkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Soppeng. Berikut tabel kontribusi PDRB Sektor Pertanian tahun 2017-2021:

Tabel 2.17. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,481,733.20	2,759,442.40	2,788,415.30	2,931,461.20	1,772,900.40
2	Jumlah Total PDRB	Juta Rp	8,947,107.05	10,005,938.30	10,937,388.00	11,382,120.00	12,426,780.00
	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	27.74	27.58	25.49	25.75	14.27

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

Pada Tahun 2017, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB mencapai 27,74% dan mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 14,27%.

Tingginya kontribusi tersebut terutama didukung oleh Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Perkebunan, sebagai sub sektor terbesar dalam sektor pertanian yang ada di Kabupaten Soppeng. Adanya penurunan yang sangat besar pada tahun 2019 disebabkan akibat dari menurunnya produksi Tanaman Pangan, khususnya Padi sebagai komoditi terbesar, tercatat sekitar 9.161 Hektar Pertanaman Padi Puso, dengan perkiraan nilai kerugian sekitar 200 Milyar Rupiah. Selain itu produksi Kakao juga menurun dan termasuk memberi pengaruh pada penurunan kontribusi PDRB sektor pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi PDRB sektor pertanian sebesar 14,27% atau menurun dibanding tahun 2020.

2.1.2.1.13. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kabupaten





Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017-2021 :

Tabel 2.18. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta Rp	700,881.50	772,112.40	771,137.70	808,273.63	1,026,402.00
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,481,733.20	2,755,401.13	2,788,415.30	2,931,461.20	3,564,663.27
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	28.24	28.02	27.66	27.57	28.79

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

Dari tabel tersebut diatas, tergambar bahwa tahun 2017 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 28,24% dan mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 27,57%, sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor perkebunan mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 28,79%. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi ekspor yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

2.1.2.1.14. Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sebagai penggerak utama kehidupan perekonomian di Kabupaten Soppeng ditunjukkan dari besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB sangat bergantung pada produksi hasil pertanian. Gambaran produksi hasil pertanian di Kabupaten Soppeng khususnya Tanaman Pangan Tahun 2017-2021 pada tabel berikut :

Tabel 2.19. Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Sektor Pertanian						
	a. Padi	Ton	309,816.00	338,933.00	267,256.00	276.589	280911
	b. Jagung	Ton	84,759.00	94,837.00	148,015.00	195.504	178341
	c. Kedelai	Ton	1,319.00	523.00	525.00	525	108
	d. Kacang Tanah	Ton	145.00	1,425.00	1,164.00	1.067	801
	e. Kacang Hijau	Ton	54.00	257.00	47.40	61	217
	f. Ubi Kayu	Ton	465.00	230.00	1,191.00	1.526	-
	g. Ubi Jalar	Ton	123.00	156.00	92.00	104	101
	Jumlah	Ton	396,681.00	436,361.00	418,290.40	475.376	460.479

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021





Pada Tahun 2017 total produksi pertanian khusus 7 (tujuh) jenis Tanaman Pangan sebagaimana tabel diatas yaitu 396.681 Ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 460.479 Ton

Pada tahun 2019, faktor bencana alam banjir yang terjadi di awal tahun dan kemarau panjang dari Juni-Desember 2019 menyebabkan sekitar 9.161 hektar pertanaman padi yang mengalami fuso (gagal panen), sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi secara total penurunan hanya mencapai -4,14%, karena adanya peningkatan produksi jagung. Total produksi tahun 2019 sebesar 418.290,4 Ton. Dan pada tahun 2020, total produksi sudah mencapai 475.376 Ton. Pada tahun 2021 total produksi hasil pertanian sebesar 460.479 ton.

2.1.2.1.15. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu andalan bagi pendapatan petani pada lahan kering, terutama jenis tanaman keras (tahunan) maupun tanaman perkebunan musiman. Berikut gambaran produksi hasil perkebunan tahun 2017-2021 :

Tabel 2.20. Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Sektor Perkebunan						
	a. Kelapa Dalam	Ton	2,386.59	2,146.50	2,810.40	2,988.43	3.024.38
	b. Kelapa Hibrida	Ton	64.31	64.25	83.32	84.90	83.85
	c. Kopi Robusta	Ton	64.74	64.74	64.74	63.12	-
	d. Cengkeh	Ton	56.75	25.10	35.49	37.21	37.04
	e. Kakao	Ton	10,015.79	7,868.66	4,625.00	4,158.15	3.483.11
	f. Jambu Mete	Ton	568.95	568.87	892.16	930.48	825.12
	g. Lada	Ton	3.92	3.92	22.85	23.90	21.01
	h. Kemiri	Ton	678.79	1,015.05	1,838.61	2,028.02	2.029.42
	i. Aren	Ton	153.96	138.40	153.03	160.27	101.33
	j. Tembakau	Ton	99.50	101.75	111.50	101.25	121.6
	Jumlah	Ton	14,093.30	11,997.24	10,637.10	10,575.73	9,726.86

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

Pada Tahun 2017 total produksi hasil perkebunan sebagaimana tabel diatas mencapai 14.093,3 Ton Pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan produksi yang hanya mencapai 11.997,24 Ton atau menurun sebesar - 14,00% dibanding tahun 2017. Tahun 2019, juga menurun menjadi 10.637,10 Ton atau menurun sebesar -11,33% dibanding tahun 2018. Untuk tahun 2020 total produksi hanya mencapai 10.575,73 Ton dan tahun 2021 kembali mengalami penurunan dengan capaian 9.726,86 Ton. Penurunan produksi hasil perkebunan selama 5 (lima) tahun berturut-turut disebabkan oleh menurunnya produksi kakao sebagai komoditi terbesar pada sub sektor perkebunan.

2.1.2.1.16. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi,





keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2017-2021 :

Tabel 2.21. Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani	Ton	309.816	338.933	267.256	276.589	280.911
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah	Ton	309.816	338.933	267.256	276.589	280.911
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

2.1.2.1.17. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional dan Regional (daerah) termasuk Kabupaten Soppeng., Kontribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Soppeng belum signifikan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng, namun demikian mampu menggerakkan ekonomi daerah, seperti penyerapan tenaga kerja pada beberapa objek wisata daerah dan perputaran uang dari wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2.22. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta Rp	95,683.30	107,252.30	120,543.40	117,067.77	131,956.60
2	Total PDRB	Juta Rp	6,007,455.70	6,494,392.40	6,993,513.10	7,146,654.36	7,585,976.30
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1.59	1.65	1.72	1.64	1.74

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2017-2021

Pada Tahun 2017, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,59 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,65 persen dan tahun 2019 kembali meningkat menjadi 1,72 persen sementara untuk tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,64% atau lebih rendah dibanding tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada sektor pariwisata, sedangkan tahun 2021 kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng Kembali mengalami peningkatan dengan capaian 1,74%.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB, yang cenderung stagnan, tidak berarti sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak ada pergerakan, ini dapat dilihat pada tabel di atas, adanya peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (juta) dari tahun ke tahun.

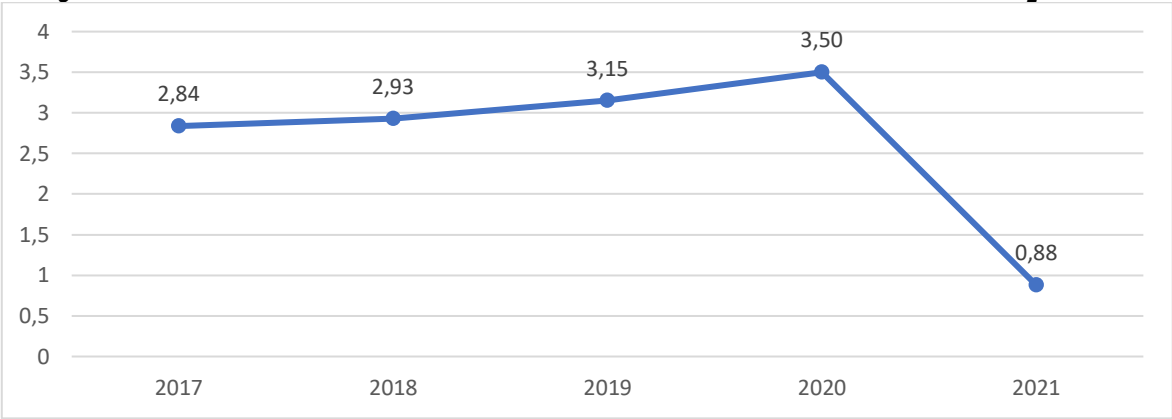




2.1.2.1.18. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Pada Tahun 2017, kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng adalah 2,84%, dan meningkat menjadi 2.93% ditahun 2018. Trend peningkatan terus berlanjut sampai menyentuh angka 3.50% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan secara signifikan pada angka 0,88%.

Grafik 2. 13. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

2.1.2.1.19. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha baik penjualan secara grosir (Perdagangan Besar) maupun eceran dari berbagai jenis barang memberikan sumbangan kontribusi yang cukup besar pada PDRB Kabupaten Soppeng. Perdagangan besar seringkali secara fisik berarti mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penjualan eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, pedagang keililing, koperasi konsumsi, rumah pekelangan, dan lain-lain.

Tabel 2.23. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta Rp	860,583.90	943,562.00	1,047,940.10	1,005,657.51	1,092,249.20
2	Total PDRB	Juta Rp	6,007,455.70	6,494,392.40	6,993,533.30	7,146,654.36	7,585,976.30
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14.33	14.53	14.98	14.07	14.40

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2017-2021





Pada Tahun 2017, kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng hanya mencapai 14,33%, pada tahun 2018 terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi 14,98% sementara untuk tahun 2020 Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi Covid-19, terutama untuk subkategori perdagangan besar. Sehingga kontribusi sector ini menurun sebesar 14,07% dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 14,40%

2.1.2.1.20. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat ditempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Tabel 2.24. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	621,778.80	657,200.80	710,989.40	691,955.40	753,015.10
2	Total PDRB	Juta	6,007,455.70	6,494,392.40	6,993,513.10	7,146,654.36	7,585,976.30
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10.35	10.12	10.17	9.68	9.93

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2017-2021

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 10,35% namun menurun pada tahun 2018 yakni pada tingkat 10,12%. Walaupun kembali terjadi kenaikan





pada tahun 2019 yakni sebesar 10,17% namun tidak cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng. Pertumbuhan untuk kategori industri pengolahan cenderung menurun bahkan negatif pada tahun 2020 yang sebesar 9,68% dan Kembali naik pada tahun 2021 sebesar 9,93%.

Hal ini disebabkan karena hampir seluruh subkategori pada Industri Pengolahan mengalami kontraksi. Selain itu, adanya penurunan omzet terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar untuk industri pengolahan di Kabupaten Soppeng menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi negatif. Namun, untuk Industri Kimia dan Farmasi mengalami peningkatan pertumbuhan dikarenakan konsumsi masyarakat terkait obat-obatan meningkat di masa pandemi corona. Selain itu, industri tekstil dan pakaian jadi juga mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan dikarenakan ketiadaan pesanan yang menyebabkan nilai omzetnya bahkan tidak ada.

2.1.2.1.21. Pertumbuhan Industri

Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Keberadaan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Berikut adalah data kinerja Pertumbuhan Industri di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2017-2021.

Tabel 2.25. Pertumbuhan Industri Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Industri tahun-n	Unit	12	12	15	20	31
2	Jumlah Industri sampai tahun-n	Unit	3701	3713	3728	3748	3780
3	Pertumbuhan Industri (%)	%	0.32	0.32	0.40	0.53	0.83

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Pertumbuhan industri adalah adanya kenaikan dari suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017 s.d 2021) mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan pada Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2019 tercatat bahwa Industri pengolahan telah berkontribusi sebesar Rp621.778.800.000 pada Tahun 2017 dan naik menjadi Rp753.015.100.000 pada tahun 2021. Lapangan usaha Industri Pengolahan





sebesar 10,11 persen, naik dari 9,93 persen di tahun 2020. Hal ini didukung oleh penambahan jumlah unit industri yang bertambah setiap tahunnya.

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng mencapai 0,32%. Pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 0,40% dan pada tahun 2020 semakin bertumbuh menjadi 0,53% dan meningkat Kembali tahun 2021 menjadi 0,83%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng mempunyai kecenderungan untuk memiliki nilai tukar dan output yang lebih tinggi daripada sektor lain meskipun inputnya sedikit.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial dilakukan antara lain terhadap angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

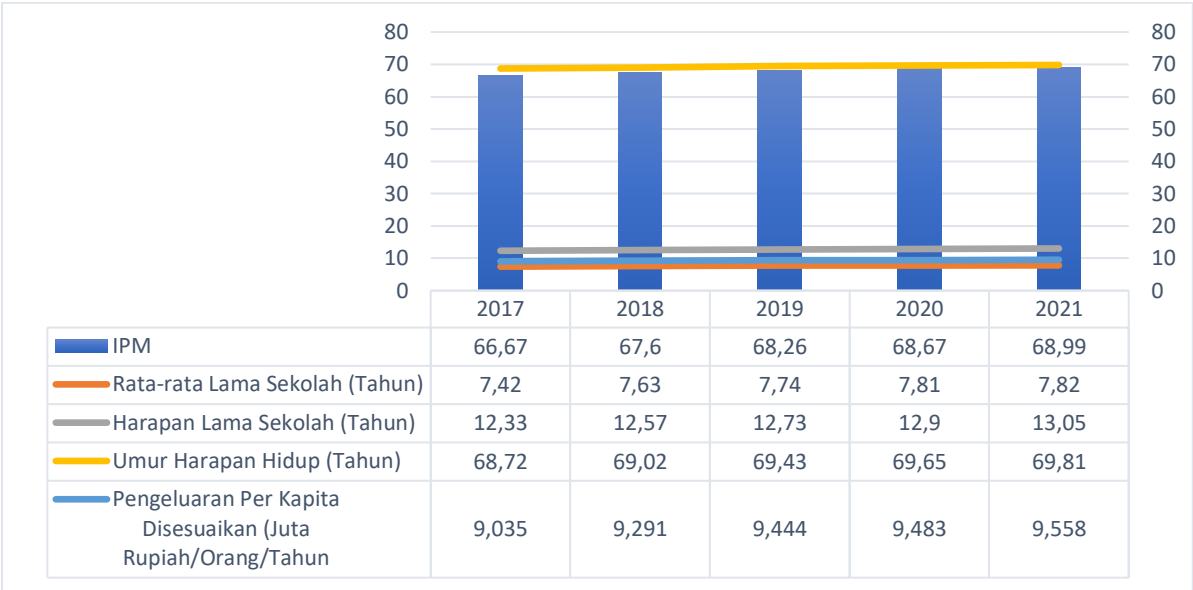
2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.





Grafik 2. 14. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2017 – 2021

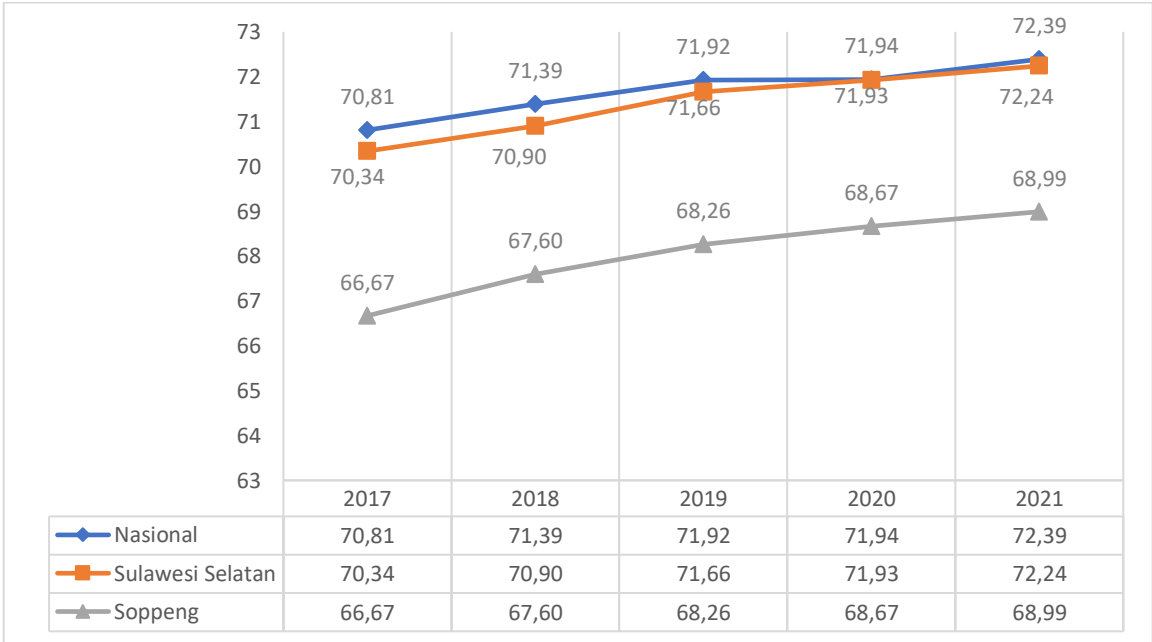


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Selama 5 (lima) tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2017 mencapai 66,67 hingga tahun 2020 mencatat capaian 68,67% dan tahun 2021 kembali meningkat dengan capaian 68,99. Hal ini membuktikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik.

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Nilai IPM Kab. Soppeng masih sangat rendah bahkan berada pada peringkat 18 pada tahun 2021.

Grafik 2. 15. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

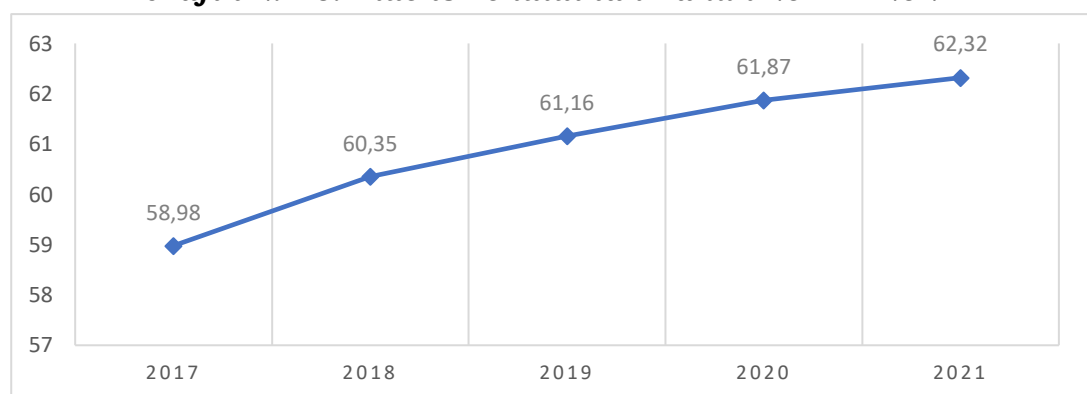




2.1.2.2.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Ukuran kinerja pembangunan di bidang pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks pendidikan. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indeks Pendidikan di Kab. Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2017 indeks Pendidikan sebesar 58,98 dan pada tahun 2021 sebesar 62,32. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor Pendidikan selama lima tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kab. Soppeng. Adapun perkembangan indeks Pendidikan di Kab. Soppeng tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Grafik 2. 16. Indeks Pendidikan Tahun 2017 – 2021



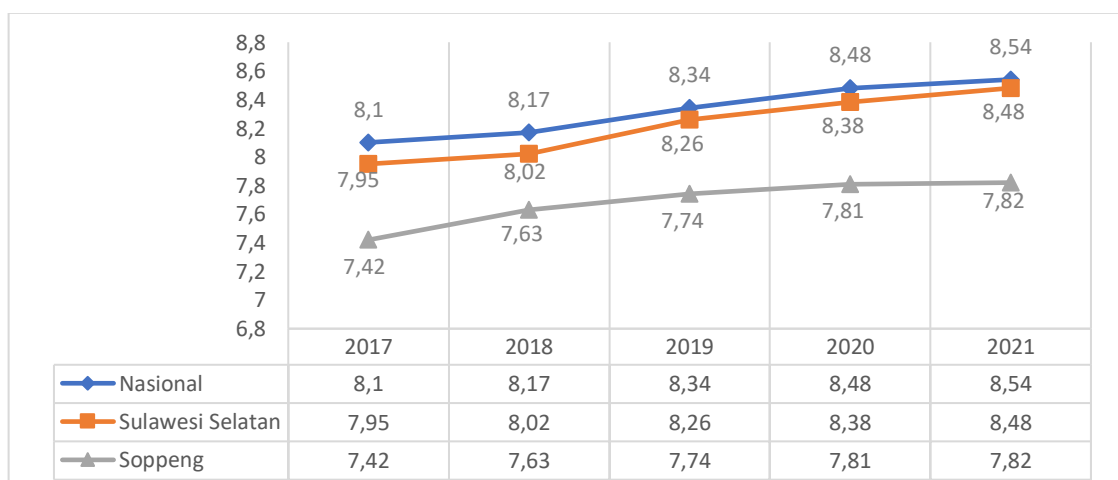
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

2.1.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Soppeng mencapai 7,82 tahun mengalami peningkatan dari Tahun 2020 dengan mencatat angka selama 7,81 tahun.

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,48 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 8,54 tahun.

Grafik 2. 17. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

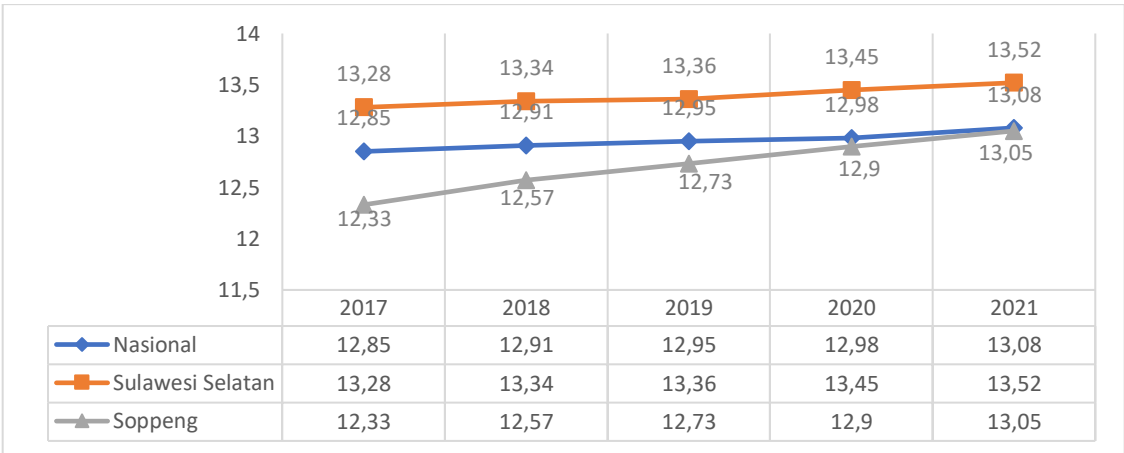




2.1.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang \ma saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 masih rendah yaitu sebesar 12,90 tahun dan tahun 2021 menjadi 13,05 tahun. Bahkan ketika dibandingkan dengan provinsi dan nasional angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah.

Grafik 2. 18. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 – 2021

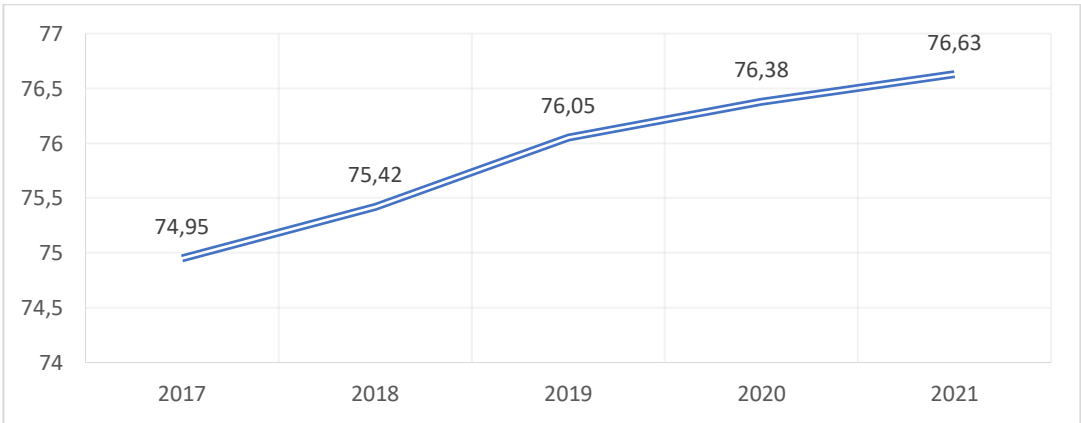


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

2.1.2.2.5. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran kinerja pembangunan di bidang kesehatan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks kesehatan. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indeks kesehatan di Kab. Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2017 indeks Kesehatan sebesar 74,95 dan pada tahun 2021 sebesar 76,63. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor Kesehatan selama kurun waktu tersebut, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kab. Soppeng. Adapun perkembangan indeks Kesehatan di Kab. Soppeng tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Grafik 2.19. Indeks kesehatan Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

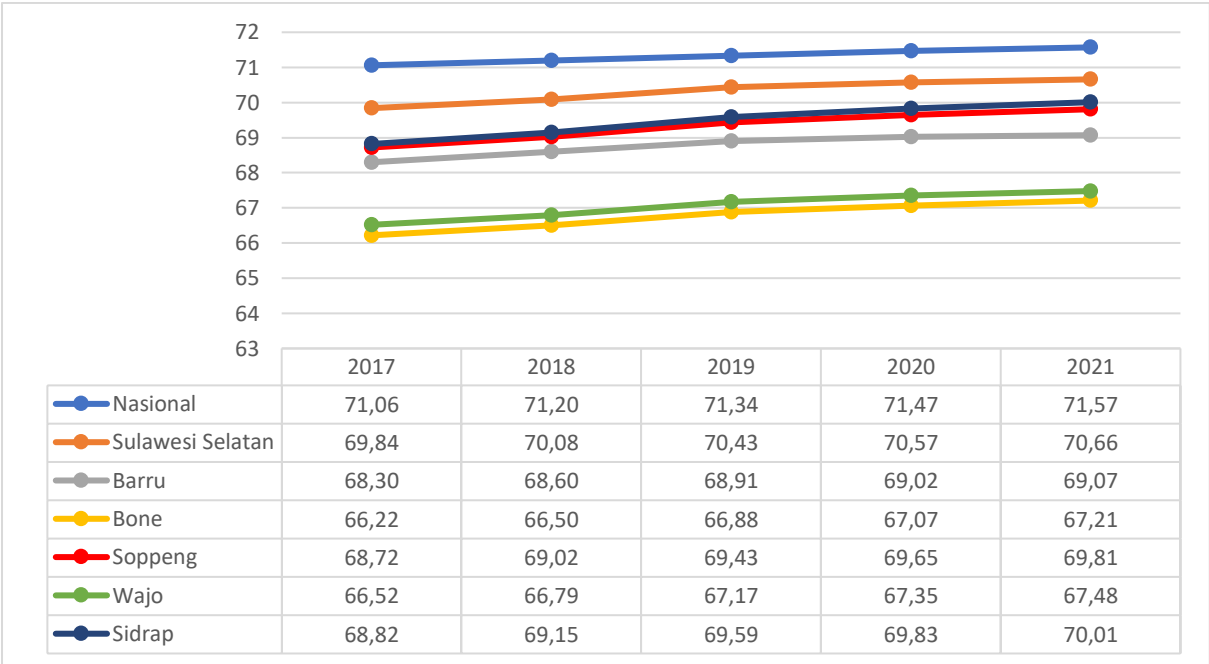




2.1.2.2.6. Umur Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Umur harapan hidup Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 selama 69,81 tahun, lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi yang sebesar 70,66 tahun dan Nasional yang sebesar 71,57 tahun. Walaupun lebih rendah dari provinsi dan nasional tetapi jika dibandingkan dengan wilayah disekitar, angka harapan hidup di Kabupaten Soppeng masih cukup baik. Angka harapan hidup ini sangat berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Grafik 2.20. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Penduduk Kabupaten Soppeng secara umum memiliki angka usia harapan hidup 69,81 tahun atau lebih. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

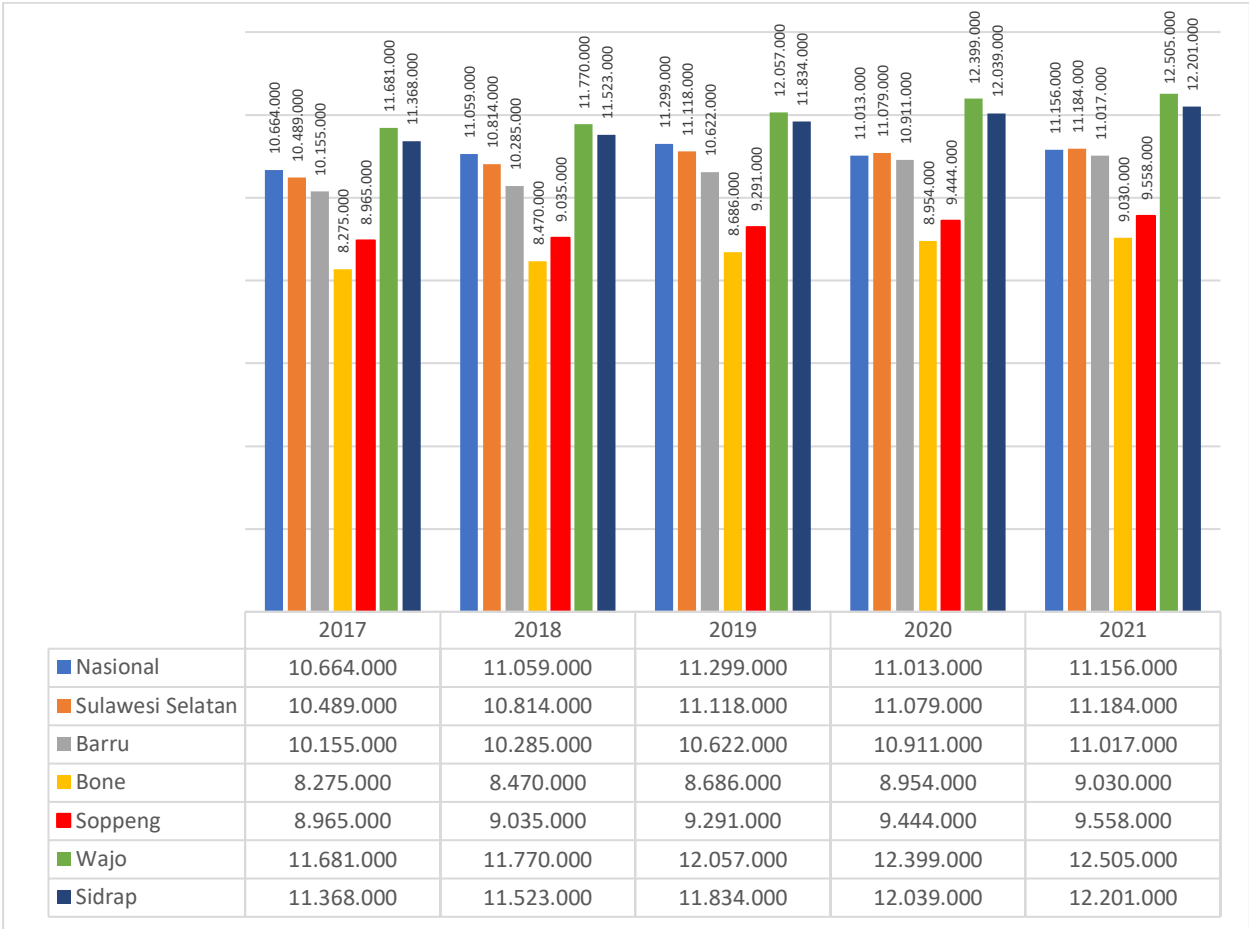
2.1.2.2.7. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng selama 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan trend kenaikan, pada tahun 2017 mencatat capaian Rp8.965.000 hingga tahun 2021 mencapai sebesar Rp9.558.000, walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dibanding dengan tingkat Provinsi yang sebesar Rp.11.184.000,- dan nasional yang sebesar Rp. 11.156.000,-. Bahkan pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa wilayah disekitar.





Grafik 2. 21. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

2.1.2.2.8. Persentase Balita Gizi buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi anak tidak menerima mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menjadi pemicu gizi buruk.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 0,015% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai 0,008% dari total jumlah balita, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 sebesar 0,015% dari jumlah total balita sebanyak 13.156 balita, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,024% atau sebanyak 3 kasus dari total balita sebanyak 12.759.

Jumlah balita gizi buruk mengalami kenaikan karena adanya penyakit penyerta yang diderita. Semua balita kasus gizi buruk yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan peningkatan. Pelayanan perawatan gizi buruk yang diberikan yakni pemantauan status gizi balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan pemberian edukasi berupa konseling dan penyuluhan kepada orang tua Balita.

Tabel 2.26. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk	Balita	2	2	1	2	3
2	Jumlah balita	Balita	13.138	13.020	13.021	13.156	12.759





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	% Balita Gizi Buruk	%	0,015	0,015	0,008	0,015	0,024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.2.2.9. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2021 prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 3,46%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 3,28% dan tahun 2019 sebesar 3,31%.

Pada tahun 2017 untuk menentukan status gizi secara manual dengan menggunakan buku standar antropometri. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

Tabel 2.27. Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya balita gizi kurang	Balita	180	449	431	431	441
2	Jumlah balita	Balita	13.318	13.020	13.021	13.156	12.759
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,35	3,45	3,31	3,28	3,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.2.2.10. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan di wilayahnya. Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Soppeng telah mencapai 100% di tahun 2017, 2019, 2020 dan tahun 2021. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam menjaga kualitas masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan dasar setiap hari.





Tabel 2.28.Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng
Tahun 2017-2021

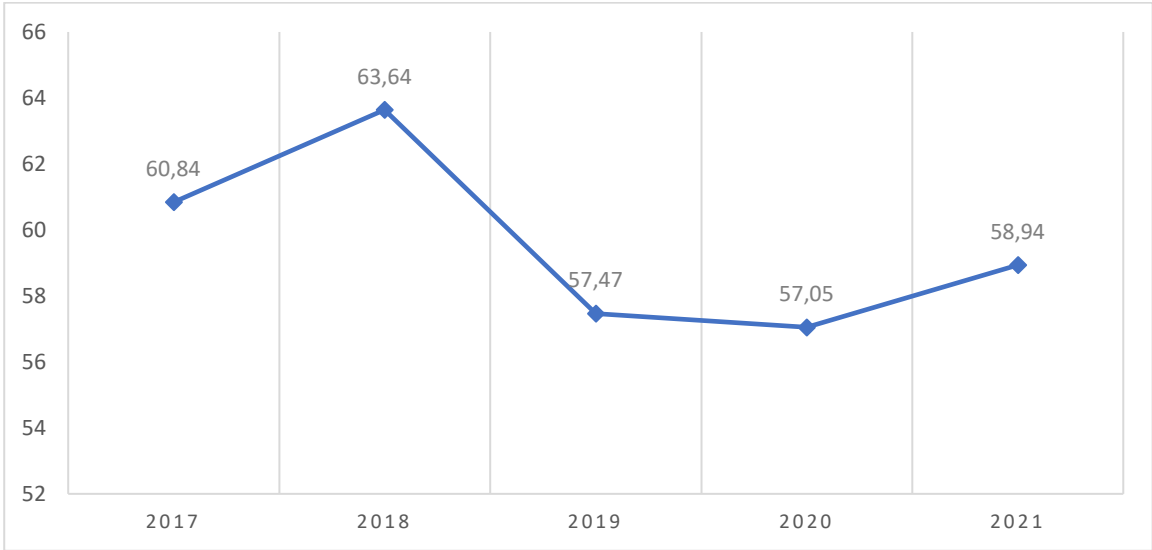
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Siaga Aktif	Desa	70	68	70	70	70
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	Desa	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	97,14	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.2.2.11. Angka partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase Penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah. Karena semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi; semakin banyak pasokan tenaga kerja (labour supply) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 2. 22. Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) Kabupaten Soppeng
Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.2.12. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Soppeng mengalami penurunan tiap tahun sebelum meningkat menjadi 3.53% ditahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 4,42% sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian 3,92% Meskipun demikian, untuk tahun 2021 persentase Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,92%. Sementara itu, Indikator Tingkat

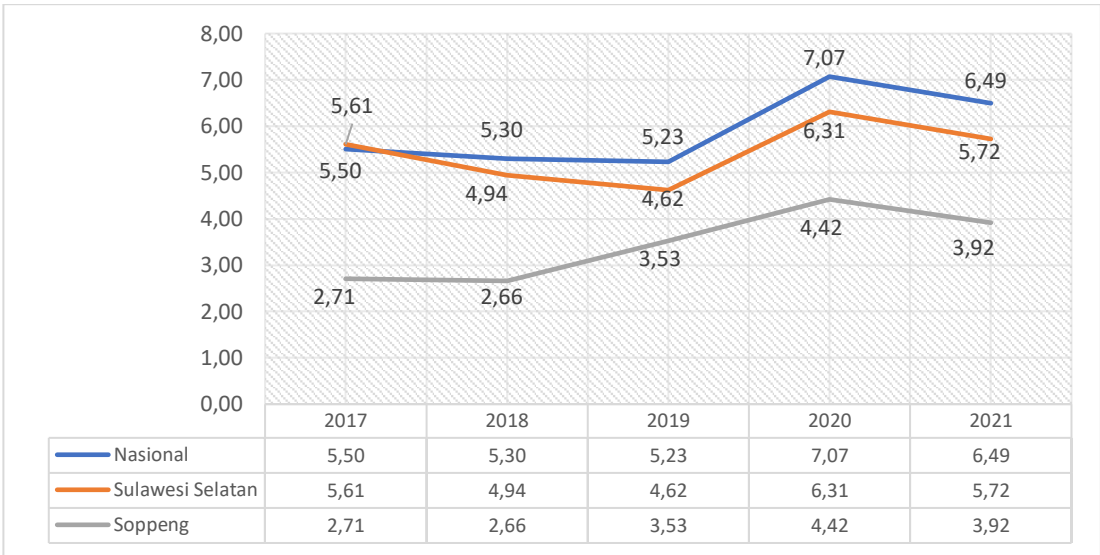




Pengangguran terbuka itu jauh lebih rendah dari TPT Provinsi dan Nasional lima tahun terakhir.

TPT di Kabupaten Soppeng apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dapat terlihat bahwa peningkatan ekonomi ditahun 2018 menunjukkan ada penurunan dengan TPT ditahun 2018 tersebut yang sebelumnya 2,71% di tahun 2017. sebelum meningkat di tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2021 TPT dapat kembali ditekan sebesar 0,50%.

Grafik 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

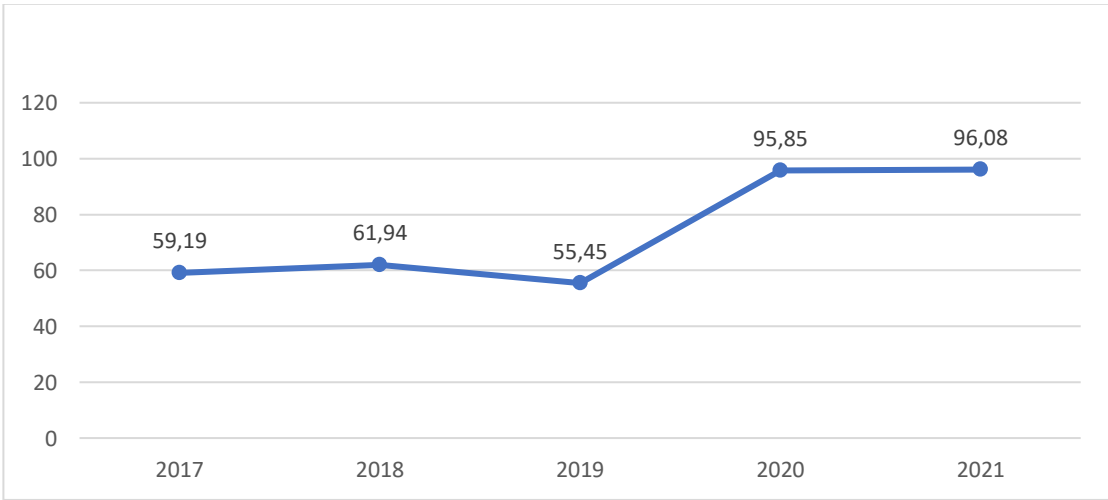


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.2.13. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tahun 2017 sampai dengan 2021 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuatif. Dimana tahun 2017 sebesar 59,19% dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 61,94%. Sementara itu pada tahun 2019 menurun dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 55,45% dan mengalami peningkatan Kembali di tahun 2020 sebesar 95,85% dan tahun 2021 sebesar 96,08%.

Grafik 2.24. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Soppeng, 2022





2.1.2.2.14. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi seimbang dan Aman. Data Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dari hasil survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.29. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bobot Masing-masing Kelompok Pangan	Skor	91.8	87.8	88.2	93.3	75.8
	Padi-Padian	Skor	53.5	25.0	25.0	25	25
	Umbi-Umbian	Skor	2.3	1.1	0.6	2.5	0.3
	Pangan Hewani	Skor	9.8	19.5	24.0	24	18.5
	Minyak dan Lemak	Skor	8.3	4.1	0.8	0.4	4.5
	Buah/Biji Berminyak	Skor	1.3	0.6	0.2	0.4	0.3
	Kacang-Kacangan	Skor	2.7	5.4	7.0	10	3.8
	Gula	Skor	4.1	2.1	0.6	1.1	1.7
	Sayur dan Buah	Skor	7.6	30.0	30.0	30	21.7
	Lain-lain	Skor	2.2	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel tersebut diatas mengalami fluktuasi dimana tahun 2017 capaian skor pola pangan harapan sebesar 91,8 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 87,8 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 88,2. Dan untuk Tahun 2020 skor pola pangan harapan sebesar 93,3 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 75,8%.

Kondisi ideal Pola Pangan Harapan yaitu sebesar 100. Capaian 2017-2021 masih belum mencapai kondisi ideal, yang menggambarkan bahwa kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan harapan.

2.1.2.3. Seni, Budaya dan Olahraga

Kinerja Pembangunan daerah di bidang seni dan budaya diukur dari Indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

Grup kesenian yang terbentuk di Kabupaten Soppeng terdiri atas beberapa sanggar seni dan kelompok seni budaya yang dibentuk baik oleh sekolah, desa maupun kelompok pemuda. Sanggar seni yang ada umumnya berfokus pada seni musik dan tari tradisional dan kontemporer. Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan seni dan budaya tradisional, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa alat dan dana pembinaan bagi sanggar seni yang telah terdaftar. Dengan adanya sanggar seni diharapkan semakin





banyak generasi muda yang dapat menyalurkan hobby mereka di bidang seni, yang secara tidak langsung melakukan pelestarian budaya daerah.

Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah grup kesenian	Grup	5	12	15	15	16
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	238.967
	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0,21	0,51	0,63	0,63	0,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Gedung kesenian sebagai wadah atau tempat berkumpul, berekspresi dan berkreasi para seniman penting untuk dimiliki oleh setiap daerah. Namun hingga akhir tahun 2021, Kabupaten Soppeng belum memiliki gedung kesenian.

Sementara Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31.Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Soppeng, 2021

Di Kabupaten Soppeng terdapat 96 klub olahraga yang tersebar di 8 Kecamatan, atau dengan perbandingan 3,98 per 10.000 penduduk. Sementara untuk gedung olahraga terdapat 1 gedung olahraga yang merupakan milik pemerintah daerah yaitu Gedung KONI dengan perbandingan 0,04 per 10.000 penduduk. Angka ini belum termasuk gedung olahraga yang dikelola pihak swasta yang tersebar di berbagai tempat di setiap kecamatan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak untuk kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA). Untuk TK





disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal.

Tabel 2.32. Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK /RA /Penitipan Anak	Siswa	5.035	3.445	4.669	6.151	5.997
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Anak	10.345	6.744	9.805	9.601	9.121
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	48,67	51,08	47,62	64,07	65,75

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi Tahun 2017 tercatat 48,67 persen mengalami kenaikan ditahun 2018 sebesar 51,08 persen dan pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan capaian 47,62% sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebesar 65,75 persen meningkat disbanding pada tahun 2020 tercatat sebesar 64,07 persen, Peningkatan realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatkan peran guru PAUD dan penilik PAUD dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD, sehingga penduduk yang berusia 4-6 tahun dapat berpartisipasi pada PAUD.

2.1.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2. 33.Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah semua siswa n dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	21.780	21.343	21.652	21.043	20.736
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	22.441	21.521	22.355	21.697	20.866
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,05	99,17	96,86	96,99	99,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pada tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Soppeng adalah 97,05 persen meningkat menjadi 96,99 persen pada tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 kembali meningkat menjadi 99,38%.





Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SMP/Mts/Paket B pada tahun 2017 adalah 85,81persen dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 dengan capaian 93,59 persen, sedangkan tahun 2021 mencapai 101,08 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2. 34. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah semua siswa dijenjang SMP/MTS/Paket B	Siswa	11.468	10.789	11.077	10.837	11.370
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Jiwa	13.364	12.473	11.892	11.579	11.248
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	%	85,81	86,5	93,15	93,59	101,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.1.3.1.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Berikut tabel yang menunjukkan angka partisipasi murni di Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021.

Tabel 2. 35. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	19.517	19.245	19.314	19.285	18.788
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	22.441	21.521	22.355	21.697	20.866
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	86,97	89,42	86,4	88,88	90,04

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 Angka Partisipasi Murni pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A adalah 86,97 persen, meningkat menjadi 88,88 persen pada tahun 2020 sedangkan tahun 2021 mencatat capaian 90,04 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Untuk ATS di tahun 2021 pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A sebanyak 2.078 orang atau sebesar 9,96%.





**Tabel 2. 36. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	9.913	9.354	8.139	8.089	7.319
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Jiwa	13.364	12.473	11.892	11.579	11.248
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	74,18	74,99	68,44	69,86	65,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dari tahun 2017 sampai 2018 persentasenya mengalami kenaikan. Selanjutnya menurun pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B adalah 74,18 persen dan mengalami penurunan menjadi 65,07 persen pada tahun 2021. Untuk ATS di tahun 2021 pada jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B sebanyak 3.929 jiwa atau sebesar 34,93%.

Belum tercapainya target APM 100 persen, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.

2.1.3.1.1.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan memperoleh layanan pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak mampu merasakan layanan pendidikan.

**Tabel 2.37. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah murid usia 7-12 thn	Murid	19.517	21.343	19.314	21.616	22.372
2	Jumlah penduduk usia 7-12 thn	Jiwa	22.441	21.521	22.355	21.697	20.866
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	86,97	99,17	86,4	96,63	107,22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021





Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 tercatat capaian sebesar 86,97, meningkat ditahun 2018 sebesar 99,17 persen, mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 86,4 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan capaian 96,63, sedangkan pada tahun 2021 tercatat capaian sebesar 107,22 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dasar dan partisipasi penduduk usia sekolah semakin baik.

Tabel 2.38. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah murid usia 13-15 thn	Murid	9.913	10.789	8.139	9.150	9.266
2	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	Jiwa	13.364	12.473	11.892	11.579	11.248
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	74,18	86,5	68,44	79,02	82,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket B, menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 tercatat capaian sebesar 74,18, meningkat ditahun 2018 sebesar 86,5 persen, mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 68,44 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan capaian 79,02, sedangkan pada tahun 2021 tercatat capaian sebesar 82,38 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Adanya persentase penurunan pada tahun 2019 disebabkan oleh masih adanya siswa putus sekolah jenjang SMP dan masih adanya penduduk usia 13-15 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.

2.1.3.1.1.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka putus sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs disajikan pada tabel berikut:





Tabel 2.39. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI	Jiwa	21.780	21.343	21.385	21.043	20.736
2	Jumlah Seluruh APS SD/MI	Jiwa	7	40	67	1	13
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,032	0,187	0,313	0,005	0,063

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pada tahun 2017 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Soppeng pada jenjang Pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) tercatat 0,032 persen, sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,063 persen. Angka Putus Sekolah (APts) SD terealisasi sebesar 0,063 persen dari target nol persen dengan capaian 99,995 persen, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 40. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs	Jiwa	11.468	10.789	10.745	10.837	11.370
2	Jumlah Seluruh APS SMP/MTs	Jiwa	14	163	135	3	12
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,12	1,51	1,26	0,03	0,11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Data menunjukkan bahwa APS pada jenjang usia 13-15 pada tahun 2017 adalah 0,12 persen, sedangkan untuk tahun 2021 sebesar ,11 persen. Realisasi sebesar 0,11 persen dari target 0 persen dengan capaian 99,89 persen, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan kesulitan akses ke sekolah. Solusi ke depan diupayakan bagi peserta didik yang rawan putus sekolah akibat faktor ekonomi diberikan biaya personil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standat Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2.1.3.1.1.6. **Angka Kelulusan**

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan.

Tabel 2.41. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	4.137	3.574	3.577	3.628	3.533
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Siswa	4.139	3.582	3.625	3.629	3.539
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,95	99,78	98,68	99,97	99,83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021





Berdasarkan data, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 angka kelulusan pada jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 99,95 persen dan tahun 2018 menurun pada capaian 99,78 persen, juga terjadi pada tahun 2019 menurun pada posisi 98,68 persen dan meningkat menjadi 99,97 persen pada tahun 2020, dan Kembali mengalami penurunan sebesar 99,83 persen pada tahun 2021.

Penyebab utama belum tercapainya angka kelulusan 100 persen dikarenakan tidak semua siswa yang terdaftar pada tingkat tertinggi jenjang SD mengikuti ujian akhir antara lain disebabkan sakit pada saat ujian dan tidak dapat lagi mengikuti ujian susulan.

Tabel 2.42. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	4.476	3.796	3.635	3.408	3.408
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Siswa	4.477	3.846	3.718	3.411	3.411
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,98	98,7	97,77	99,91	99,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Sementara angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2021 mencapai 99,91 persen, dimana persentase capain sama dengan tahun sebelumnya.

Kecenderungan penurunan pada tingkatan SMP/MTs mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng yang menurun. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam menurunkan angka kelulusan. Angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs tingkat kelulusannya harus diupayakan agar mencapai 100 persen pada tahun berikutnya.

2.1.3.1.1.7. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.43. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	3.624	3.579	3.715	3.758	3.618
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	4.137	3.574	3.577	3.628	3.533





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	87,6	100,14	103,86	103,58	102,41

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pada tahun 2017 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs adalah 87,6% dan meningkat menjadi 103,58 % pada tahun 2020 dan tahun 2021 menurun pada angka 102,41%, persentase tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Capaian realisasi sebesar 102,41% melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%, yang berarti semua lulusan SD/MI dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMP/Mts. Tingginya capaian terjadi karena adanya siswa jenjang pendidikan SD yang bersekolah di luar Kabupaten Soppeng, tapi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.44. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	n/a	n/a	3.875	3.259	3.268
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	4.476	3.796	3.635	3.408	3.424
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	n/a	n/a	106,6	95,63	95,44

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs pada tahun 2017 adalah n/a dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 95,44%. Capaian realisasi sebesar 95,44% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya siswa jenjang SMP yang bersekolah di Kabupaten Soppeng namun melanjutkan jenjang SMA di luar Kabupaten Soppeng.

2.1.3.1.1.8. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) adalah angka menunjukkan jumlah capaian kinerja penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dari total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut:

Tabel 2.45. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Jiwa	197.290	184.554	181.791	159.290	167.559





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf	Jiwa	197.997	185.266	182.483	182.033	190.780
	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	99,64	99,62	99,62	87,51	87,83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Soppeng tahun 2017 mencapai 99,64% atau hanya 0,36% diantaranya yang belum mampu membaca dan menulis dari jumlah penduduk Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf, Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 87,83% atau sekitar 12,17% yang belum mampu membaca dan menulis pada tahun 2021. Untuk meningkatkan pencapaian target dimasa yang akan datang Pemerintah daerah berupaya agar penduduk usia 15-24 tahun yang tidak dapat membaca untuk berpartisipasi pada Pendidikan Kesetaraan.

2.1.3.1.1.9. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Fasilitas pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2017 terealisasi sebesar 89,54% dan mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 77,20%.

Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah masih ada bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, diupayakan fasilitas pendidikan jenjang SD yang mengalami kerusakan minimal sedang untuk dilakukan rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jumlah ruang kelas SD/MI dengan kondisi rusak berat sebanyak 372 unit dan ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebanyak 433 unit. Untuk kondisi bangunan baik (kelas) sekolah pendidikan SD/MI pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Kelas)	Unit	1.481	1.389	1.514	1.514	1.287
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI (Kelas)	Unit	1.654	1.613	1.766	1.766	1.667
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	89,54	86,11	85,73	85,73	77,20

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Jumlah ruang kelas SMP/MTs dengan kondisi rusak berat sebanyak 71 unit dan ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebanyak 90 unit. Untuk kondisi bangunan baik (kelas) sekolah pendidikan SMP/MTs pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:





Tabel 2. 47. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Kelas)	Unit	392	333	492	492	400
2	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs (Kelas)	Unit	441	412	601	601	495
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	88,89	80,83	81,86	81,86	80,81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.1.3.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Tabel 2.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)	Unit	342	341	344	344	345
2	Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn	Jiwa	35.805	33.994	34.247	33.276	32.114
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Poin	95,52	100,31	100,45	103,38	107,43

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan data diatas menggambarkan pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) adalah 95,52, dan mengalami peningkatan pada pada tahun 2021 sebesar 107,43 Jumlah sekolah sudah cukup banyak untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Capaian target akan dipertahankan dengan mengupayakan sekolah-sekolah yang sudah ada tetap berjalan sesuai ketentuan yang ada.

2.1.3.1.1.11. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Soppeng, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar pada tahun 2017 sebesar 0,12 poin mengalami peningkatan sebesar 12,08 poin pada tahun 2021.





**Tabel 2.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	Guru	3.451	3.885	4.452	3.756	3.794
2	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	Murid	29.430	28.599	32.130	31.880	31.401
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Poin	0,12	0,013	0,14	0,12	12,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.1.3.1.1.12. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

**Tabel 2. 50. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Guru	3.151	3.535	3.929	3.513	3.599
2	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	3.181	3.885	4.452	3.756	3.811
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	99,06	90,99	88,25	93,53	94,44

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pada tahun 2017 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 99,06% dan pada tahun 2021 menurun menjadi 94,44%, guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV belum mencapai target 100%. Tidak tercapainya target dikarenakan ada beberapa guru yang sudah S1 namun tidak linear dengan pendidikan guru sehingga masih dianggap belum sarjana S1. Adapula beberapa guru yang belum sarjana namun sudah tidak berminat mengikuti pendidikan S1/D-IV karena sudah mendekati usia pensiun.

2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, AKB per 1000 kelahiran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 sebesar 73,68%, tahun 2018





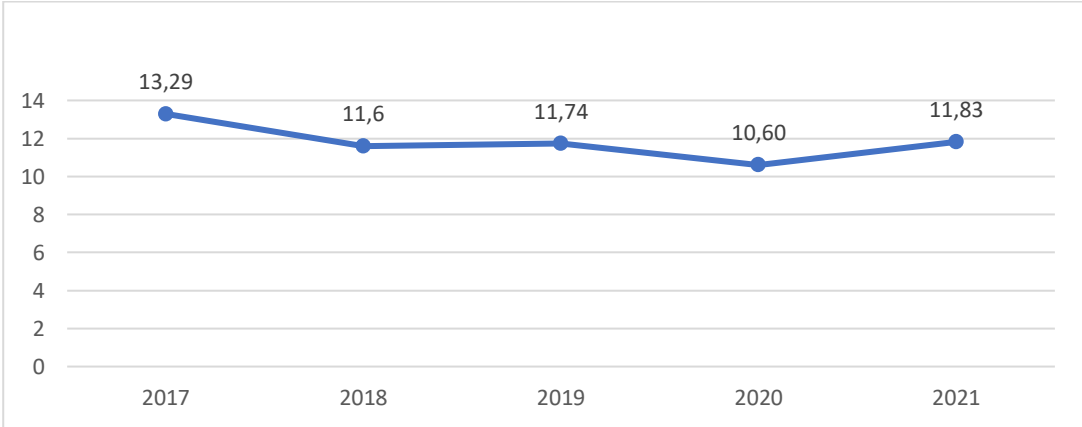
sebesar 96,88%, tahun 2019 sebesar 74,29% dan tahun 2020 sebesar 70,37%. Kasus kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Soppeng akibat kelainan bawaan sejak lahir, gangguan pernapasan, atau mengalami penyakit berat yang sudah komplikasi. Sehingga upaya untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir menjadi sangat strategis. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 51. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Bayi	38	32	35	31	33
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	2.860	2.759	2.982	2.938	2.790
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	%	13,29	11,6	11,74	10,60	11,83

sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Grafik 2. 25. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Dari grafik diatas diketahui jumlah AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 adalah sebesar 13,29% dan angkanya menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,6%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 11,83%.

Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu wilayah. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan dalam penurunan AKB menunjukkan derajat kesehatan di Kabupaten Soppeng dan merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

2.1.3.1.2.2. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi





usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021, pada tabel berikut:

Tabel 2.52. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jiwa	38	37	35	31	33
2	Jumlah Kelahiran Hidup Bayi	Jiwa	2822	2722	2947	2907	2757
3	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2860	2759	2982	2938	2790
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	98,67	98,66	98,83	98,94	98,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Dari tabel di atas tergambar, bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng cukup tinggi, pada tahun 2020 mencapai angka 98,94% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 98,82% atau dari 2.757 bayi yang lahir hidup hanya 33 bayi diantaranya yang meninggal berumur kurang dari 1 tahun.

2.1.3.1.2.3. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap anak dibawah lima tahun. Realisasi yang diperoleh dari data kasus kematian Balita yang berumur dibawah lima tahun.

Pada tahun 2017 Angka Kematian Balita berjumlah 1,4% dan tahun 2021 berjumlah 0,37% jiwa dalam 1.000 balita lebih baik dari tahun 2017 dengan kematian 3,2 jiwa dalam 1.000 balita. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup menunjukkan penurunan sebesar 1,03%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	Jiwa	4	2	3	3	1
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.860	2.759	2.982	2.938	2.725
	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	%	1,4	0,7	1	1,02	0,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal menunjukkan jumlah kematian neonatal yang terjadi pada bayi baru lahir yang berumur 0 sampai 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatus pada tahun 2017 hingga tahun 2021 ditargetkan 0 kasus, tapi hingga tahun 2021 masih ada kasus yang terjadi. Rata-rata neonatus yang meninggal mengalami kelainan kongenital





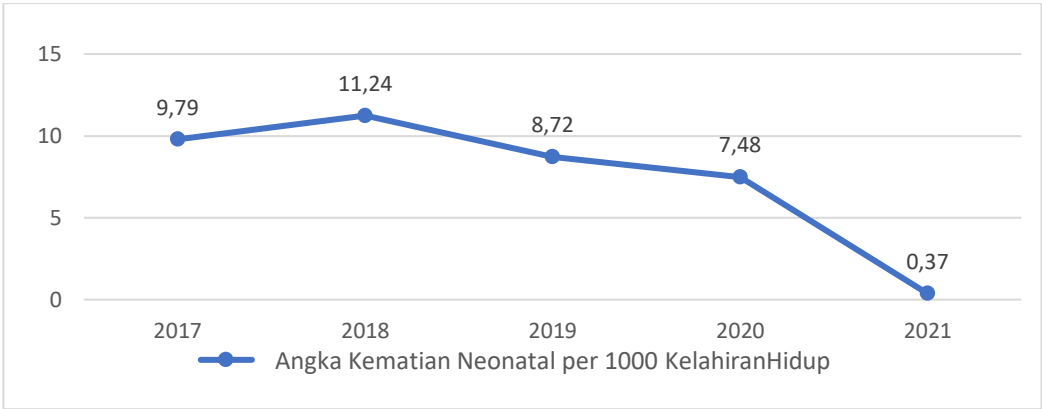
dan komplikasi dengan penyakit lain. Berat bayi yang terlahir rendah dengan kongenital, sekitar 20% bayi akan meninggal pada minggu pertama dalam masa kehidupannya.

Tabel 2.54. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan)	Jiwa	28	31	26	22	1
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2860	2759	2982	2938	2725
	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	9,79	11,24	8,72	7,48	0,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Grafik 2. 26. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu merupakan jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas. Angka kematian ibu pada tahun 2017 mencapai 1,05 per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 1,21 per 100.000 kelahiran hidup, dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 0,73 per 100.000 kelahiran hidup Sehingga masih diperlukan berbagai upaya yang berkelanjutan untuk menurunkan angka tersebut. Risiko komplikasi yang terjadi pada ibu hamil dapat berkurang jika sebelum hamil ibu sehat dan bergizi baik, selama kehamilan melakukan pelayanan antenatal ke petugas kesehatan minimal 4 kali, saat persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, kemudahan dalam mengakses layanan rujukan, serta ibu dan bayi mendapatkan layanan neonatal dan nifas.

Tabel 2.55. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	Jiwa	3	2	4	3	2
2	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	2.860	2.759	2.982	2.398	2,725

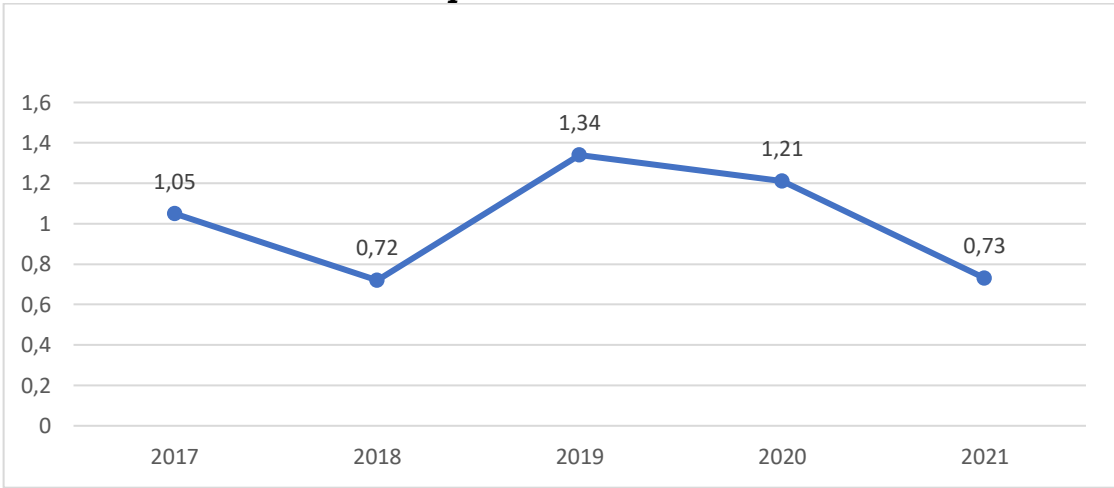




NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	1,05	0,72	1,34	1,21	0,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Grafik 2. 27. Diagram Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.6. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Berdasarkan data pada tahun 2021 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng 0,025 yang artinya setiap 1000 balita dilayani 25 posyandu.

Tabel 2.56. Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah posyandu	Unit	327	327	327	328	328
2	Jumlah balita	Jiwa	13.138	13.020	13.021	13.156	12.945
	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per Satuan Balita	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Sampai tahun 2021, puskesmas di Kabupaten Soppeng berjumlah 17 buah, poliklinik 3 buah dan Puskesmas Pembantu 43 buah. Rasio puskesmas, klinik, dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sampai tahun 2021 rasio puskesmas per satuan penduduk mencapai adalah 0,0003. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2. 57. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	Unit	61	64	64	64	63
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237,875
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.8. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 yaitu 0,0042, dan tahun 2021 tercatat 0,0042 Jumlah Penduduk dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi sampai saat ini Rumah Sakit yang tersedia di Kabupaten Soppeng hanya 1 yaitu RSUD La Temmamala.

Tabel 2.58. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237.875
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0041	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.9. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng, baik berstatus PNS maupun bukan. Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah dokter tercatat 51 orang yang bertugas di Rumah sakit dan Puskesmas, dengan demikian jika dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2017, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng adalah 0,21, hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 dimana dokter yang tercatat adalah 107 orang atau dengan rasio 0,41 jika dibandingkan dengan





jumlah penduduk pada tahun yang sama. Angka tersebut dipengaruhi adanya rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, sehingga terjadi penambahan tenaga dokter dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 59. Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokter	Orang	51	60	80	98	107
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237.875
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,21	0,25	0,34	0,41	0,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.10. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis yang dimaksud merupakan tenaga yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Pada tahun 2017 jumlah tenaga medis sebanyak 239 orang dengan jumlah penduduk 241.430 jiwa, atau rasio 1 orang tenaga medis terhadap 1.010 jiwa. Hal ini mengalami peningkatan ditahun 2021 dengan jumlah tenaga medis sebanyak 973 orang dengan jumlah penduduk 237.875 jiwa, atau rasio 1 orang tenaga medis terhadap 244 jiwa.

Peningkatan rasio ini dipengaruhi adanya rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, sehingga terjadi penambahan tenaga medis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain tenaga medis berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berusaha mengatasi kekurangan tenaga medis dengan merekrut tenaga medis berstatus tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten.

Tabel 2. 60. Rasio tenaga medis per satuan Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga medis	Orang	239	567	667	537	973
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237.875
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	2,4	2,81	3,49	4,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravida rum, perdarahan per vaginal, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.





Tabel 2.61. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Jiwa	451	472	473	424	417
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Jiwa	451	472	473	424	417
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.

2.1.3.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.62. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jiwa	2.867	2.770	2.978	2.506	2.811
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Jiwa	2.867	2.770	2.978	2.506	2.811
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Imunisasi dasar pada bayi dilakukan pada saat bayi masih berusia kurang dari 12 bulan,





dengan pemberian imunisasi meliputi BCG, DPT, Polio, hepatitis dan campak. Persentase Desa/Kelurahan mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi diperoleh dari perhitungan jumlah desa/kelurahan yang mencapai 80% pada bayi dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan.

Tabel 2.63. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Desa/ Kelurahan	65	68	70	58	55
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	92,86	97,14	100	82,86	78.57

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2017 mencapai 92,86% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 100%. Namun pada tahun 2020, hanya mencapai 82,86%. Dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 78,57%. Hal disebabkan oleh karena dihentikannya pelayanan imunisasi bayi selama beberapa bulan karena Pandemi Covid-19. Pelayanan imunisasi dilaksanakan kembali pada masa *new normal*, tapi kecendrungan orang tua belum membawa bayi untuk mendapatkan imunisasi karena masih takut tertular Covid-19.

2.1.3.1.2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita Gizi Buruk merupakan faktor anak terlahir dengan BBLR dan adanya penyakit yang menyertai sejak lahir (kelainan bawaan). Hal ini dapat dicapai karena meningkatnyakesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR yang menjadi faktor utama terjadinya gizi buruk.Pemantauan balita gizi buruk dilakukan dengan kunjungan rumah serta melakukan pemantauan status gizi dan konseling. Untuk jumlah balita yang mengalami gizi kurang sebanyak 441 jiwa, sedangkan terkait stunting sebanyak 1.514 jiwa. Adapun perawatan kasus balita gizi buruk di puskesmas dilakukan sesuai tatalaksana gizi buruk dengan pemberian Formula 100.

Tabel 2.64. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Balita	2	2	1	2	3
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Balita	2	2	1	2	3





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.15. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

Kalori adalah Potensi Pembangunan Wilayah satuan unit kandungan panas atau energi. Akan tetapi, lebih tepatnya kalori adalah jumlah energi yang Anda dapatkan dari makanan dan minuman, atau energi yang kita bakar melalui aktivitas sehari-hari. Sederhananya, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Standar proporsi kalori yang ditetapkan di Indonesia sebesar 2.100 Kkal/Kapita/hari. Namun di Kabupaten Soppeng masyarakat dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum sebesar 2,49% di tahun 2017 dan 2,97% di tahun 2020 dan tahun 2021 dengan capaian 1,32%.

Hal tersebut membuktikan bahwa asupan kalori yang diterima masyarakat Soppeng tinggal sedikit yang belum menerima asupan kalori dibawah standar. Namun tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui petugas kesehatan.

Tabel 2.65. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)	Jiwa	327	327	326	325	166
2	Jumlah balita	Jiwa	13.138	13.020	13.021	10.928	12.567
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal /kapita /hari)	%	2,49	2,51	2,5	2,97	1,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.16. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Penyakit Campak adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata/konjungtiva) dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan Paramixovirus. Sehingga salah satu cara untuk mencegah penyakit campak adalah dengan memberikan imunisasi campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2017 mencapai 90,77% dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 80,93%





Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut antara lain adanya penolakan dari orangtua anak terkait isu halal haram dari vaksin, dan penghentian pelayanan imunisasi di Posyandu selama beberapa bulan pada masa pandemi covid-19.

Tabel 2.66. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jiwa	2.792	3.073	3.079	2.854	2.610
2	Jumlah anak usia 1 tahun	Jiwa	3.076	3.073	3.282	3.225	3.225
	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	90,77	100	93,81	88,5	80,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.17. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Non polio AFP (Acute Flaccid Paralysis) adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Pada tahun, 2017 dan 2020 dan 2021 tidak ditemukan kasus lumpuh layu dibawah umur 15 tahun di Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan keberhasilan petugas kesehatan, terutama petugas munisasi yang memberikan pelayanan imunisasi polio pada bayi dan balita. Namun pada tahun 2018 dan 2019 masih ditemukan kasus SFP non polio, oleh karena itu pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan yang harus terus ditingkatkan.

Tabel 2.67. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	Kasus	0	5	2	0	0
2	Jumlah penduduk < 15 tahun	Jiwa	49.538	49.320	48.962	48.652	47.095
	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	10,14	4,08	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.18. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Balita pneumonia adalah balita yang mengidap penyakit paru-paru basah, cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan rasio jumlah penderita yang ditangani dibandingkan dengan jumlah prakiraan penderita pneumonia balita, table dibawah ini menyajikan Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani pada tahun 2017-2021.

Tabel 2.68. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jiwa	192	374	324	90	22





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Jiwa	2263	858	859	859	859
	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	8,48	43,59	37,72	10,48	2,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Jumlah kasus Balita dengan Pneumonia ditangani di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017 sebanyak 192 kasus atau mencapai 8,48% dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 22 kasus atau mencapai 2,56%.

Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta menjauhkan anak-anak dari perokok, mengingat pneumonia masih merupakan permasalahan yang perlu penanggulangan yang serius mengingat dampak yang timbul sangat mempengaruhi derajat kesehatan terutama pada kelompok umur balita.

2.1.3.1.2.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB didapat dari perhitungan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun orang dibagi jumlah orang yang diperkirakan menderita TBC BTA dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 2.69. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa	304	370	379	236	198
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jiwa	486	651	632	651	762
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	62,55	56,84	59,97	36,25	25,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dalam lima tahun cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2017 tercatat sebesar 62,55% dengan jumlah penderita yang ditangani sebanyak 304 jiwa dan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) sebanyak 486 jiwa dan tahun 2021 tercatat 25,98% dengan jumlah penderita baru yang ditemukan dan diobati sebanyak 198 kasus dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) sebanyak 486 jiwa.





Tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya kasus yang tidak ditemukan. Kasus yang ditemukan terbilang masih rendah. Mereka yang tidak ditemukan dan diobati hingga sembuh berpotensi besar menularkan pada orang lain. Inilah yang menyebabkan kasus TB masih tinggi, di samping faktor penyebab lainnya seperti lingkungan, kultur, dan lain-lain. Dibutuhkan dukungan dari semua sektor, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga dari swasta, dan masyarakat sendiri.

2.1.3.1.2.20. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 125,92 dari 100.000 penduduk dan meningkat sampai pada tahun 2019 sebesar 379 kasus atau 159,84% dari 100.000 penduduk. Pada tahun 2021 jumlah kasus penderita TBC menurun dengan jumlah kasus sebanyak 198 atau 83,24%. Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat.

Tabel 2. 70. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Kasus	304	370	379	236	198
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237.875
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	125,92	156,68	159,84	98,76	83,24

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.21. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Mortalitas karena TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB pada orang dengan HIV negatif sesuai dengan revisi terakhir dari ICD-10 (*International Classification of Diseases*). Angka kematian karena Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 0,00 per 100.000 penduduk menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 71. Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Jiwa	8	8	7	0	0
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	235.167





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	3,31	3,39	2,95	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.22. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah $(200:100.000) \times 1.000.000 = 2.000$ kasus. Program nasional pengendalian tuberkolosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (Directly Observed Treatment Short-course, DOTS) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap.

Tabel 2.72. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Jiwa	304	370	379	236	198
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	Jiwa	486	651	632	651	762
	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	62,55	56,84	59,97	36,25	25,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Di Kabupaten Soppeng proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS selama lima tahun terus mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebanyak 62,55% dan menurun di tahun 2021 menjadi 25,98%.

2.1.3.1.2.23. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Angka kesembuhan semua kasus pada tahun 2017 sebesar 27,63% dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 96,55% dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 252 jiwa dari 261 jiwa pasien TB paru BTA yang diobati, Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kinerja petugas dalam penanganan penyakit Tuberkulosis.





Tabel 2.73. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Jiwa	84	343	334	0	252
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	Jiwa	304	370	379	236	261
	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	27,63	92,7	88,13	0	96,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.24. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue melalui Vektor nyamuk. Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebanyak 112 kasus. Semua kasus tersebut telah dilakukan penanganan dengan baik sehingga tidak terjadi kematian akibat penyakit DBD.

Jumlah kasus pada tahun 2021 tercatat 102 penderita lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 sebanyak 122 penderita. Meskipun tren ini menurun akan tetapi DBD perlu tetap diwaspadai di tengah pandemi infeksi Covid-19. Masyarakat diimbau untuk melakukan gerakan 3M plus dan menjadi juru pemantik jentik (jumantik) dalam lingkungan keluarga sebagai langkah pencegahan. Jumantik bertanggung jawab memantau jentik nyamuk yang ada di lingkungan rumah.

Tabel 2.74. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	35	130	85	112	102
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	35	130	85	112	102
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.25. Penderita diare yang ditangani

Penderita diare yang ditangani tahun 2020 sebesar 60,07% atau sebanyak 4.229 jiwa dari total perkiraan jumlah penderita sebanyak 6.123 jiwa, sedangkan tahun 2021 Penderita diare yang ditangani tahun 2021 sebesar 4,41% atau sebanyak 2.798 jiwa dari total perkiraan jumlah penderita sebanyak 63.495 jiwa. Kualitas lingkungan yang sehat, pola hidup bersih serta pemanfaatan jamban keluarga dapat membantu menurunkan angka kesakitan terutama penyakit diare. Kabupaten Soppeng dinyatakan telah mencapai status sebagai Kabupaten yang sudah bebas dari perilaku





Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Masyarakat telah menerapkan budaya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

Tabel 2.75. Penderita Diare yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader	Jiwa	7.051	8.375	7.651	4.229	2.798
2	Jumlah perkiraan penderita diare	Jiwa	12.220	6.115	6.123	6.123	63.495
	Penderita Diare yang Ditangani	%	57,7	136,96	124,96	60,07	4,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.26. Angka kejadian Malaria

Penyakit malaria merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk anopheles. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada kasus malaria di Kabupaten Soppeng. Jika ada kasus, hanya dari pendatang dari daerah endemik malaria. Indikator angka kejadian malaria yaitu kasus pada masyarakat lokal.

Tabel 2.76. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk yang menderita malaria	Jiwa	10	0	0	0	0
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	235.167
	Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	4,14	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.27. Tingkat kematian akibat malaria

Berdasar dari kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 hingga 2021 tidak terjadi kematian, hal tersebut dikarenakan semua kasus tertangani dengan baik oleh petugas kesehatan.

2.1.3.1.2.28. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

Kejadian malaria merupakan hal yang wajib diwaspadai, untuk itu perlu dilakukan penanganan pencegahan penyakit malaria, salah satu cara yang dilakukan yaitu penggunaan kelambu berinsektisida. Namun di kabupaten Soppeng kejadian malaria bukanlah endemic, melainkan kejadian yang diperoleh dari kunjungan masyarakat dari luar daerah terutama dari Papua. Sehingga penularan penyakit malaria di kabupaten Soppeng tidak dianggap sebagai endemic dan suplai kelambu berinsektisida sudah tidak ada.





2.1.3.1.2.29. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

Kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 dilakukan penanganan dengan pemberian obat anti malaria yang diberikan dengan tepat terutama terhadap balita dengan demam dan terduga malaria. Adapun pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 tidak ada balita yang demam karena malaria, sehingga tidak ada pemberian obat anti malaria pada anak balita.

Tabel 2.77. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT	Jiwa	10	0	0	0	0
2	Jumlah penderita positif	Jiwa	10	0	0	0	0
	Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	%	100	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Persentase prevalensi HIV/AIDS diperoleh dari jumlah pasien HIV dan AIDS pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama.

Pada Tahun 2020 terdapat 7 pasien HIV/AIDS atau 0,0029 dari total populasi, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang tercatat 13 pasien atau 0,0055 dari total populasi

Untuk menekan jumlah kasus HIV/AIDS maka perlu dilakukan penanggulangan. Upaya yang dilakukan antara lain survei pada masyarakat rawan (resiko tinggi) tertular HIV/AIDS, sosialisasi kepada masyarakat baik yang beresiko terinfeksi ataupun yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Pelatihan bagi petugas pada sarana RS,VCT, CST dan petugas laboratorium, serta menerapkan layanan VCT dan CST di RSUD Latemmamala.

Tabel 2.78. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jiwa	8	11	15	7	13
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	235.167
	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	%	0,0033	0,0047	0,0063	0,0029	0,0055

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.31. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

Penggunaan kondom merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah penyakit HIV/AIDS. Namun tidak ada data yang diperoleh terkait pengguna kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir tidak





dapat diketahui. Karena tidak adanya pemantauan penggunaan kondom yang dilakukan petugas saat ada hubungan seks.

2.1.3.1.2.32. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

Pemberian pengetahuan tentang HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Capaian indikator terhadap proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS belum dapat disimpulkan, karena data tidak tersedia. Petugas kesehatan telah melakukan penyuluhan HIV/AIDS yang maksimal terhadap siswa SMP dan SMA. Namun belum menyentuh bagi yang berusia 15-24 tahun tetapi tidak mengenyam pendidikan yang lebih baik atau tidak sekolah.

2.1.3.1.2.33. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di puskesmas dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin. Masyarakat miskin perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini merupakan tujuan pokok upaya kesehatan dengan meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.

Data jumlah seluruh miskin yang digunakan pada indikator ini adalah data Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI adalah peserta jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Adapun cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.79. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	Jiwa	40.439	194.681	201.641	139.922	92.801
2	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten	Jiwa	153.940	194.681	201.641	174.668	94.932
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	26,27	100	100	80,11	97,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Capaian rujukan terhadap masyarakat miskin pada tahun 2020 adalah sebesar 80,11%, mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan jumlah tercatat 97,76%

Hal ini disebabkan peningkatan layanan puskesmas bagi warga miskin. Selanjutnya, perlu upaya memaksimalkan sistem rujukan puskesmas dan penguatan lintas sektor serta mendorong masyarakat untuk





datang ke puskesmas bukan pada saat sakit, akan tetapi untuk memeriksakan Kesehatan berkala.

2.1.3.1.2.34. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam memantau tingkat kesehatan bayi lahir. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2017-2021 sebesar 100%.

Tabel 2.80. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jiwa	2.631	2.638	2.724	2.938	2.769
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Jiwa	2.631	2.638	2.724	2.938	2.769
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.35. Cakupan puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng hingga tahun 2017 sebanyak 17 (tujuh belas) unit, yang terdiri dari 7 (tujuh) Puskesmas Rawat Inap, 10 (sepuluh) Puskesmas Non Rawat Inap yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng. Cakupan puskesmas dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sebesar 212,50%.

2.1.3.1.2.36. Cakupan pembantu puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (tujuh belas) unit terdiri dari 7 (tujuh) Puskesmas Rawat Inap, 11 (sepuluh) Puskesmas Non Rawat Inap, dengan Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 44 (empat puluh empat) unit yang memberikan pelayanan kesehatan di 70 Desa/Kelurahan. Dan ditunjang dengan Poskesdes sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dengan pelayan KIA/KB. Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sebesar 62,9%.

2.1.3.1.2.37. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dengan distribusi sekali pada tri semester pertama, sekali pada trimester ke-2 dan dua kali pada trimester





ke-3 dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Melalui ANC (K4) diharapkan deteksi dini dan perawatan kehamilan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dengan demikian komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dapat dicegah sehingga kematian pada ibu hamil dan janinnya dapat juga dicegah.

Tabel 2.81. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jiwa	2.757	2.736	2.936	2.733	2.574
2	Jumlah sasaran ibu hamil	Jiwa	3.134	3.044	3.280	3.548	2.574
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	87,97	89,88	89,51	77,03	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2020 sebesar 77,03%, dan mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 100%. Jumlah ibu hamil diambil dari data riil (K1 Kunjungan pertama) dan belum semua ibu hamil yang ada pada tahun tersebut memperoleh pelayanan antenatal K4 karena umur kehamilan belum mencapai trimester ketiga (9 bulan) dan ada juga ibu hamil dari tahun sebelumnya baru mendapatkan pelayanan antenatal K4 pada tahun tersebut karena umur kehamilannya baru mencapai trimester ketiga (9 bulan). Capaian kunjungan ibu hamil telah mencapai target SPM, hal ini berarti akses pelayanan kepada sasaran ibu hamil sudah baik.

2.1.3.1.2.38. Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan.

Tabel 2.82. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jiwa	2.721	2.807	2.921	2.880	2.757
2	Jumlah seluruh ibu nifas	Jiwa	2.867	2.770	2.978	3.386	2.757
	Cakupan Pelayanan Nifas	%	94,91	101,34	98,09	85,1	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021





Cakupan Pelayanan ibu nifas di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 sebesar 85,1% dan telah mencapai 100% pada tahun 2021

Jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar pada tahun berkenaan tidak sama dengan jumlah ibu nifas, bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini dikarenakan terkadang pada tahun berkenaan belum mencapai pelayanan 3 kali sehingga pelayanannya berpindah ke tahun berikutnya.

2.1.3.1.2.39. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi sepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gram, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Jumlah neonatal resiko tinggi dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 216, dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah tercatat sebanyak 203 Cakupan Neonatal dengan komplikasi semua ditangani oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.83. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Jiwa	190	188	278	216	203
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Jiwa	190	188	278	216	203
	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.40. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan balita. Jumlah perkiraan sasaran anak balita pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng Potensi Pembangunan Wilayah sebanyak 15.846 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 11.113 (70,13%), dan tahun 2021 telah mencapai 100% pada tahun 2021 dengan Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali sebanyak 9.846 jiwa.

Tabel 2.84. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jiwa	11.132	12.086	8.610	11.113	9.846





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah seluruh anak balita	Jiwa	17.878	17.874	13.068	15.846	12.945
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	62,27	67,62	65,89	70,13	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.41. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 di Kabupaten Soppeng cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah 100%.

Tabel 2.85. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan keluarga miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Jiwa	179	477	328	334	436
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Jiwa	179	477	328	334	436
	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.42. Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat

Penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat dilakukan pada semua murid SD/setingkat yang duduk di kelas I. Penjarangan kesehatan siswa SD/setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD/setingkat terhadap murid kelas I SD/setingkat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Bersama guru dan dokter kecil. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 di Kabupaten Soppeng cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat mencapai 100% sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 92,54%

Tabel 2.86. Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Murid	275	275	276	3.584	2.926
2	Jumlah murid SD dan setingkat	Murid	275	275	276	3.584	3.162





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	100	100	100	100	92,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.43. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat diharapkan mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan fasilitas JKN. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2020 mencapai 80,11 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 97,76% Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 sebanyak 92.801 jiwa.

Tabel 2.87. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Jiwa	174.884	194.681	201.641	139.922	92.801
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Jiwa	153.940	194.681	201.641	174.668	94.932
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	113,61	100	100	80,11	97,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.2.44. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2017-2021 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten Soppeng sebanyak 1 (satu) unit dengan pelayanan gawat darurat level 1. Sehingga cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan 100% pada tahun 2017-2021.

2.1.3.1.2.45. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Ketentuan penetapan KLB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.





Tabel 2.88. Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam	KLB	3	4	4	4	1
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	KLB	3	4	4	4	1
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2021

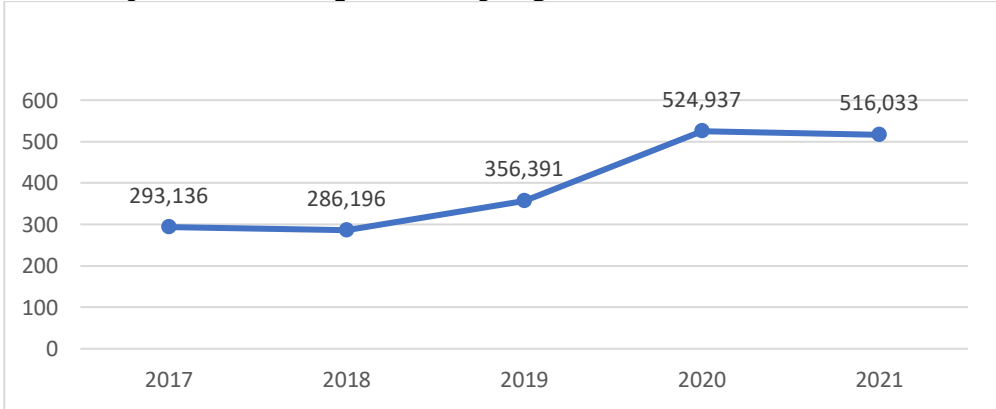
Pada tahun 2021 terjadi pengurangan Desa/Kelurahan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2020 pandemi covid-19 menyebabkan warga dari 41 desa/kelurahan terinfeksi covid-19. Penyebaran covid-19 masuk ke dalam bencana non alam. Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dilakukan dengan baik oleh petugas kesehatan sebagai upaya penanganan penyakit. Penanggulangan lainnya antara lain meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif atau surveilans selama KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan 100% penyelidikan epidemiologi terhadap KLB.

2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan percepatan pergerakan arus barang dan jasa di suatu wilayah sehingga aktivitas ekonomi juga akan semakin tinggi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang dan jasa maupun penumpang. Pengelolaan Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jalan, untuk Jalan di wilayah Kabupaten menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten, sehingga Jalan yang berada di Pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antar Kecamatan, antar desa akan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 28. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021





Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Soppeng semakin meningkat pada periode 2017-2021. Dimana pada tahun 2017 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 293,14 km. dan meningkat pada tahun 2021 yang sepanjang 516,033 km. peningkatan kondisi jalan dalam kondisi baik ini juga dapat dilihat dari data proporsi jumlah jalan dalam kondisi baik yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,33 dan pada tahun 2021 sebesar 0,57. Hal ini terjadi karena selama periode 2017 – 2021 pemerintah Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan kondisi infrastruktur jalan. Dengan masifnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan. Untuk kondisi jalan rusak berat dengan panjang 358,22 km sedangkan kondisi jalan rusak sedang dengan panjang 26,085 km.

Tabel 2.89. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	293,14	286,2	356,39	524,94	516,033
2	Panjang Jalan Seluruhnya	Km	898,88	898,88	898,88	898,88	900,338
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,33	0,32	0,4	0,58	0,57

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan, Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2017 jumlah rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,0037, sedangkan tahun 2021 sebesar 0,0038. Panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten mengalami penambahan sementara jumlah penduduk mengalami penurunan.

Tabel 2.90. Rasio. Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah panjang jalan	Km	898.881	898.881	898.881	898,88	900,338
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	235.967
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Poin	0,0037	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.3. Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 mengindikasikan bahwa terdapat kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Persentase kawasan permukiman





di Kabupaten Soppeng yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 pada tahun 2019 sebesar 10,28% dan pada tahun 2021 sebesar 8,12%.

Tabel 2.91. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	Ha	*)	*)	80	80	38
2	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Ha	*)	*)	778	778	468
	% Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	*)	*)	10,28	10,28	8,12

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.4. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/ jam) di Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana pada pada tahun 2017 sebesar 32,61%. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 31,84% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 39,65%. Pada tahun 2020 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/ Jam) sebesar 58,40%, dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 57,32%

Tabel 2.92. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	293.136	286.196	356.391	524,947	516,033
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898.881	898.881	898.881	898,881	900,338
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	%	32,61	31,84	39,65	58,4	57,32

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.5. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Perentase jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Soppeng pada pada tahun 2017 sebesar 48,12 %. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 47,12%. Berdasarkan data persentase jalan yang memiliki trotoar dan darainase dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena jumlah trotoar dan drainase yang rusak tidak sebanding dengan jumlah trotoar yang dibangun dan dipelihara. Selain itu Sebagian besar jalan kabupaten berada di luar kawasan perkotaan sehingga belum dilengkapi dengan trotoar.





Tabel 2. 93. Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	432.561	426.621	423.590	423.590	423.590
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898.881	898.881	898.881	898.881	898.881
	% Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	%	48,12%	47,46%	47,12%	47,12%	47,12%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.6. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun ke tahun mengalami terus peningkatan. Dimana pada tahun 2017 sebesar 48,49%. dan untuk tahun 2021 mencapai 99,95%. Indikator akses sanitasi yang digunakan adalah akses sanitasi layak yaitu rumah tangga perkotaan yang menggunakan leher angsa dan dilengkapi tangka septik dan untuk perdesaan, rumah tangga yang menggunakan akses Bersama (bukan umum) dengan leher angsa namun masih mungkin bangunan bawah cubluk/lubang tanah. Capaian akses sanitasi dasar sudah mencapai 100% sejak tahun 2018.

Target Provinsi Sulawesi Selatan hingga 2024 untuk sanitasi layak sebesar 95% termasuk 8% akses aman. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah untuk sanitasi layak khususnya pada rumah tangga kumuh yang ada di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 94. Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Unit	28,296	30,27	38,095	38,661	57,605
2	Jumlah rumah tinggal	Unit	58,353	57,003	56,994	56,994	57,632
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	48.49	53.10	66.84	67.83	99,95

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.3.7. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Soppeng bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 mencapai 55,42%. Selanjutnya mengalami penurunan tahun 2018 menjadi 54,66% kemudian menurun kembali pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 54,27% dan tahun 2021 mencapai 54,21%.





Tabel 2. 95. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air	Km	432,561	426,62	423,59	423,59	1.740
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	Km	780,52	780,52	780,52	780,52	3.210
	% Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	55,42	54,66	54,27	54,27	54,21

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.8. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan indikator Bidang Cipta Karya terkait penyediaan sanitasi yaitu persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Genangan dapat terjadi apabila air buangan maupun air hujan tidak dapat mengalir ke badan air sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang permukaannya lebih rendah. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh drainase yang tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air. Pada daerah Kabupaten Soppeng persentase luas wilayah tergenang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 14,38% menjadi 1,79% pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel 2. 96. Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan daerah yang tergenang	Ha	*)	*)	1545	192,51	12,844
2	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Ha	*)	*)	10740,57	10741	717,55
	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	%	*)	*)	14,38%	1,79%	1,79%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.9. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Produksi dari hampir semua jenis tanaman akan meningkat, dengan adanya pemberian air yang tepat waktu dan tepat jumlah.

persentase irigasi dalam kondisi baik tahun 2017 mencapai 74,53% mengalami peningkatan sampai tahun 2019 yang mencapai 79,37% dan





tahun 2020 mengalami penurunan dengan capaian 62,06% dan tahun 2021 mengalami peningkatan 65,31%, hal ini diakibatkan karena selain adanya penambahan luas irigasi dalam kondisi baik juga dipengaruhi berkurangnya luas irigasi kabupaten.

Tabel 2. 97. Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	7.235	7.525	7.705	5.999	6.001
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	9.708	9.708	9.708	9.666	9.189
	% Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	74,53	77,51	79,37	62,06	65,31

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.3.10. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya pertanian. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pada tahun 2020 dan 2021 rasio jaringan irigasi sebesar 0,022.

Tabel 2.98. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang saluran irigasi	M	*)	265.230	268.925	200.101	204.923
2	Luas lahan budidaya pertanian	M	97.972	*)	*)	9.018,62	9.189,00
	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	-	-	-	0,022	0,022

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.11. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sebesar 90,46% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 98,19%, dari data terlihat bahwa cakupan persentase penduduk berakses air semakin meningkat, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya. Saat ini masih sering dijumpai banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang belum lancar distribusi maupun keluhan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Hal ini diakibatkan karena Belum optimalnya kinerja PDAM dan belum terinventarisasi dengan baik potensi air baku untuk air minum.

Tabel 2.99. Penduduk berakses air minum Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk berakses air minum	Jiwa	218.407	222.476	222.512	226.874	225.286
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237.875
	% Penduduk Berakses Air Minum	%	90,46%	94,21%	93,84%	94,55%	94,71%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021





2.1.3.1.3.12. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Terkait infrastruktur permukiman pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2017 – 2021 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan mengalami fluktuasi, rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng telah masuk kategori rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen yang tinggi terkait dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan tahun 2017 mencapai 12,43% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 46,10%. Capaian akses air minum layak rumah tangga melalui jaringan perpipaan sebanyak 17.307 dan akses air minum layak rumah tangga non perpipaan sebanyak 39.688 pada tahun 2021.

Tabel 2.100. Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	7.253	9.196	15.605	16.005	105.768
2	Jumlah penduduk seluruhnya (Rumah Tangga)	Jiwa	58.353	57.003	56.994	56.994	229.450
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	12,43%	16,13%	27,38%	28,08%	46,10%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.13. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dipengaruhi oleh proses guna ulang, daur ulang dan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA. Rendahnya persentase tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengolahan sampah dan keterbatasan lahan pembangunan sarana dan prasarana. Untuk mengurangi





volume sampah yang ada, di kabupaten soppeng terdapat 3 unit TPS 3R pada tahun 2021 sebagai tempat pengelolaan sampah.

Tabel 2. 101. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	M ³	*)	*)	4.850	4.850	7.686,69
2	Total volume sampah (Ton)	Ton	*)	*)	7040,12	7040,12	34.707,12
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	*)	*)	68,89%	68,89%	22,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.14. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2017 samapi dengan tahun 2021 mencapai 0,017.

Tabel 2. 102. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Jiwa	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237.875
	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.15. Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 1,94 meningkat menjadi 2,07 pada tahun 2021.

Tabel 2. 103. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tempat ibadah	Unit	469	478	478	478	492
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237.875
	Rasio tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	1,94	2,02	2,02	2	2,07

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021





2.1.3.1.3.16. Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan

Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan adalah persentase luas RTH publik yang tersedia terhadap luas RTH publik yang seharusnya tersedia di kawasan perkotaan.

Tabel 2. 104. Luas RTH Public Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha	*)	238,33	238,33	238,33	12,02
2	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan Perkotaan	Ha	388.72	372,75	372,75	372,75	367,76
	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	-	63,94%	63,94%	63,94%	3,27%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.3.1.3.17. Ketaatan terhadap RTRW

Realisasi terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kendati demikian, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng seharusnya telah mengalami proses revisi karena telah mengalami perubahan substansi dan dinilai tidak dapat mengakomodir pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang ada di Kabupaten Soppeng. Selain itu, terdapat perubahan landasan hukum terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat pembaharuan basis data yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dari tabel dibawah dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang sebanyak 70 dan pada tahun 2020 sebanyak 165 rekomendasi dan tahun 2021 sebanyak 147 surat keterangan kesesuaian taat ruang dan terealisasi sebanyak 144. Sisanya merupakan permohonan yang masuk pada akhir tahun sehingga akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tabel 2. 105. Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi RTRW		70	38	57	165	144
2	Rencana Peruntukan		70	38	57	165	147
	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	100	100	100	97.96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020





2.1.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,20 dan pada tahun 2020 sebesar 0,21 dan tahun 2021 mencapai 0,21. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk mengalami penurunan, jumlah rumah layak huni cenderung sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 0,43%, dengan jumlah rumah yang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 244 rumah dari 56.899 rumah yang ada di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 106. Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	47.588	48.190	48.860	50.189	50.189
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	235.167
	Rasio Rumah Layak Huni	Poin	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.4.2. Rasio permukiman layak huni

Dalam kurun waktu 2018 – 2019, rasio permukiman layak huni di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan yakni pada tahun 2018 sebesar 0,99 dan pada tahun 2019 sebesar 0,98.

Tabel 2. 107. Pemukiman Layak Huni Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas pemukiman layak huni	M ²	Na	5.888,30	5.845,70	Na	Na
2	Luas wilayah permukiman	M ²	Na	5.943,55	5.943,55	5.943,55	5.943,55
	Rasio Permukiman Layak Huni	Poin	Na	0,99	0,98	Na	Na

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.4.3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Di Kabupaten soppeng, cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun tahun 2017 sebesar 81,55 hingga pada tahun 2021 sebesar 88,21. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan.

Tabel 2. 108. Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit	47,588	48,19	48,86	50,189	50,189
2	Jumlah rumah	Unit	58,353	57,003	56,994	56,994	56,899
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	81.55	84.54	85.73	88.06	88.21

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021





2.1.3.1.4.4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 sebesar 63,58% mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar dan tahun 2021 mencapai 65,19% atau tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hal ini didukung oleh adanya program pemerintah seperti program Kotaku, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Susun Santri, dan Program Sejuta Rumah.

**Tabel 2. 109. Layanan rumah layak huni yang terjangkau
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni	Unit	36,913	36,959	37,255	38,04	38,04
2	Jumlah rumah tangga MBR	Unit	58,055	58,353	58,353	58,353	58,353
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	63.58	63.34	63.84	65.19	65.19

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.4.5. Persentase pemukiman yang tertata

Persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Soppeng mengami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebesar 0,68% dan tahun 2021 mencapai 98,54% hal ini disebabkan makin banyaknya luas area pemukiman yang tertata.

Tabel 2. 110. Pemukiman yang Tertata Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas area permukiman tertata	Ha	35.38	40.41	41.81	43.78	5856,74
2	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	Na	5,943.55	5,943.55	5,943.55	5943,55
	Persentase Pemukiman yang Tertata	%	Na	0.68	0.70	0.74	98,54

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.4.6. Persentase lingkungan pemukiman kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Di Kabupaten Soppeng, persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2018 sebesar 0,04% dan pada tahun 2021 sebesar 0,06%. Untuk luas kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2021 sebanyak 11,04 Ha.

Tabel 2. 111. Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	Na	55,25	97,85	86,81	86,81





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Luas wilayah	Ha	Na	150	150	150	150
	% Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	Na	0,04	0,07	0,06	0,06

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.4.7. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Di Kabupaten Soppeng Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 sebesar 1,85%, pada tahun 2020 mencapai 3,41% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian 2,05%.

Tabel 2.112. Rumah tangga kumuh perkotaan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Unit	Na	1,057	1,945	1,945	1167
2	Jumlah seluruh rumah	Unit	Na	57,003	56,994	56,994	56899
	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	Na	1.85	3.41	3.41	2,05

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.4.8. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2017 sebesar 63,58 meningkat pada tahun 2020 sebesar 63,84 dan tahun 2021 mencapai 100%.

Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya data PSU di lingkungan perumahan komersil dan perumahan umum.

Tabel 2.113. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU	Ha	36,913	36,959	37,255	37,255	354
2	Jumlah lingkungan perumahan	Ha	58,055	58,353	58,353	58,353	354
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	63.58	63.34	63.84	63.84	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

2.1.3.1.5.1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan





memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengacu ke target SPM maka Linmas setiap RT adalah 1 orang. Berdasarkan data yang ada, Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Soppeng, yang dihitung dari jumlah petugas Linmas di Kabupaten dibagi dengan 1 Wilayah kerja Kabupaten (jumlah RT) pada tahun 2017 cakupan petugas perlindungan masyarakat sebesar 38,30% dan meningkat pada tahun 2021 yang sebesar 129,10%. Capaian di tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan pencapaian 2020 hal ini disebabkan jumlah wilayah kerja/jumlah TR bertambah sebanyak 153 jika dibandingkan tahun 2020.

**Tabel 2. 114. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Petugas Linmas di Kab/Kota daerah pemekaran baru	Petugas	406	1566	1566	1566	1.566
2	1 Wilayah Kerja Kab/Kota	Jumlah RT	1060	1060	1060	1060	1.213
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	38,30	147,74	147,74	147,74	129,10

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2021

2.1.3.1.5.2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Pada tahun 2017 sebesar 71,23%. Sementara itu pada tahun 2020 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100%, dan pada tahun 2021 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100% dengan jumlah kasus sebanyak 92 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 sebanyak 107 kasus. Data Tingkat Penyelesaian K3 di Kabupaten Soppeng ini sudah berkoordinasi dengan Pihak POLRES soppeng.

Tabel 2. 115. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2017-2021

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Pelanggaran K3	104	190	223	107	92
2	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat	Pelanggaran K3	146	256	286	107	92
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	71,23	74,22	77,97	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2021





2.1.3.1.5.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota

Luas wilayah rawan bencana di daerah Kabupaten Soppeng yakni 210,216 Ha. Untuk cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran (PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan data Satpol PP & Damkar, pada Tahun 2019 sampai Tahun 2021 cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 94,20%. Hal ini disebabkan untuk menentukan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) digunakan pembulatan angka di atas 0,5. Target kinerja Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Soppeng adalah merupakan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terbentuk mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Subtansi dari pencapaian target tersebut adalah pembangunan Sektor/Pos Pemadam Kebakaran, dimana sampai dengan Tahun 2016 telah dibangun Sektor/Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 5 unit, yaitu Lalabata, Marioriawa, Citta, Lilirilau dan Marioriwawo, Tahun 2017 tidak ada, Tahun 2018 sebanyak 3 unit, yaitu Donri-Donri, Liliriaja dan Lalabata (pindah lokasi/menempati Sektor/Pos baru), Tahun 2019 sebanyak 2 unit, yaitu Ganra dan Citta (pindah lokasi yang lebih strategis). Jadi Sektor/Pos Pemadam Kebakaran yang telah dibangun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebanyak 8 unit. Hal ini yang membuat pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan setiap tahun.

**Tabel 2.116. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	Km ²	883,15	1236,4	1413	1413	1413,04
2	Luas Wilayah Kab/Kota	Km ²	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	%	58,88	82,43	94,2	94,2	94,2

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2021

2.1.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi





kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK adalah merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada permukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Pada tahun 2017 Response Time Rate sebesar 71,43% Sementara itu pada tahun 2018 response time rate sebesar 56,86% menurun jika dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 baru dibangun 3 pos damkar. Pada tahun 2019 dengan bertambahnya pos damkar yang dibangun pada tahun 2018, walaupun jumlah kasus kebakaran lebih besar dari tahun 2018 tetapi response time rate pada tahun 2019 meningkat jika dibanding tahun 2018 dimana pada tahun 2019 sebesar 65,73%. Dan pada tahun 2020 response time rate meningkat jika dibanding tahun 2019, dimana pada tahun 2020 sebesar 90,70%, sedangkan ditahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 64,44%.

Tabel 2. 117. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu Maks.15 Menit	Kasus	20	29	188	39	58
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	28	51	286	43	90
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	71,43	56,86	65,73	90,7	64,44

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2021

2.1.3.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Anggota Satpol PP. selama tahun 2017 – 2021 persentase penegakan perda sebesar 100%. Penyelesaian pelanggaran Perda oleh Satpol PP dilakukan sesuai dengan SOP yaitu tindakan preventif non yustisial, dan apabila pelanggaran Perda mengandung unsur pidana dapat meneruskan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 118. Penegakan PERDA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Pelanggaran	20	60	38	15	5





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Pelanggaran	20	60	38	15	5
	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2021

2.1.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

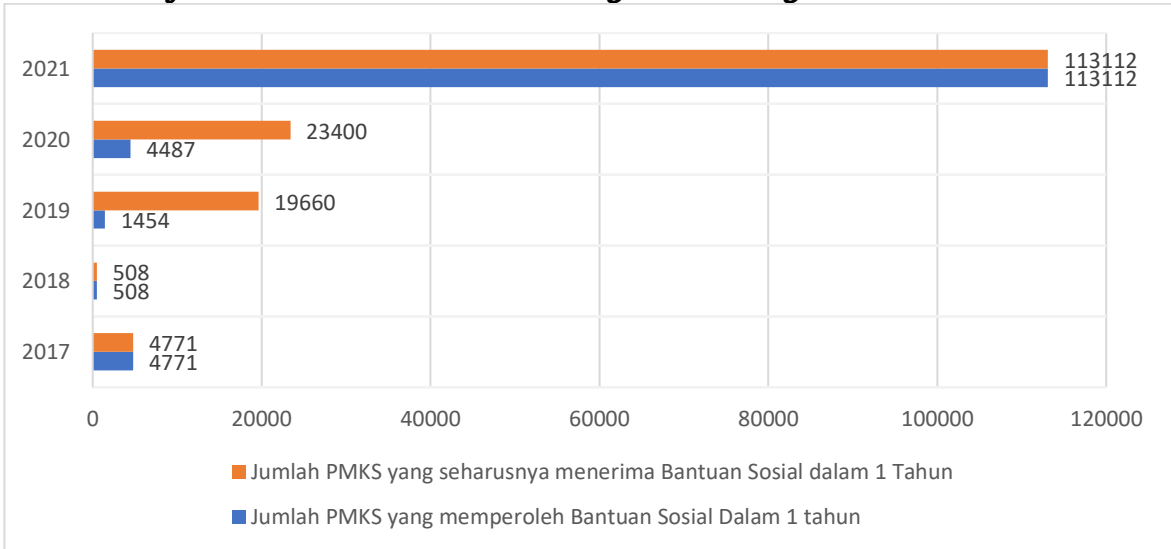
2.1.3.1.6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa jumlah PMKS pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan drastis apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 dan 2018 secara keseluruhan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan telah diberikan bantuan atau dengan capaian 100%. Namun persentase tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi hanya 7% dan tahun 2020 sebesar 19% dan tahun 2021 mencapai 100% dengan jumlah PMKS penerima bantuan sebanyak 113.112.

Pendataan dan pengelolaan data PMKS sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dibenahi. Dalam penanganan PMKS diperlukan data yang akurat dan akuntabel, sehingga kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial perlu lebih ditingkatkan.

Grafik 2. 29. Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2021





2.1.3.1.6.2. **Persentase PMKS yang tertangani**

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2017 dan 2018 adalah 100 persen yang berarti dari keseluruhan jumlah PMKS yang ada semuanya mendapatkan penanganan. Pada tahun 2019 jumlah PMKS yang ada meningkat tajam 19.660 dengan persentase jumlah PMKS yang tertangani mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya sebesar 7 persen, demikian pula pada tahun 2020, dengan jumlah 23.400 PMKS, persentase yang PMKS yang tertangani hanya 19 persen, dan tahun 2021 jumlah jumlah PMKS yang tertangani sebesar 113.112 orang dengan capaian 100%.

Tabel 2. 119. Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	4.771	508	1.454	4.487	113.112
2	Jumlah PMKS yang ada	Orang	4.771	508	19.660	23.400	113.112
	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	7	19	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.6.3. **Persentase PMKS skala Kab. yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2017, 2018 persentase PMKS Skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah 100 persen. Semua PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial dalam 1 tahun telah diberikan bantuan. Sementara untuk tahun 2019 dan 2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar menurun drastis, hanya 7,40 persen tahun 2019 dan 19,18 persen tahun 2020, sedangkan tahun 2021 jumlah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan social dalam 1 tahun sebesar 113.112 orang dengan capaian 100%.

Tabel 2. 120. Persentase PMKS Skala Kab. Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Dalam 1 tahun	Orang	4.771	508	1.454	4.487	113.112
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima Bantuan Sosial dalam 1 Tahun	Orang	4.771	508	19.660	23.400	113.112
	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	7,4	19,18	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2021





2.1.3.1.6.4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar 40 persen dan tahun 2021 meningkat menjadi 100% dengan jumlah Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis sebanyak 36 orang.

Tabel 2. 121. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	0	0	0	6	36
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang harusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	0	0	10	15	36
	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya	%	0	0	0	40	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.6.5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial dihitung dari jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dibagi dengan Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial, panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial hingga tahun 2020 sebanyak 7 panti dan tahun 2021 sebanyak 7 panti dengan capaian 100%.

Tabel 2.122. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	6	6	7	7	7





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	6	6	7	7	7
	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.6.6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di Kabupaten Soppeng yaitu 2 WKBSM dengan capaian 100 persen pada tahun 2018-2020.

Tabel 2.123. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	0	2	2	2	0
2	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	0	2	2	2	0
	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0	100	100	100	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.6.7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat pada tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah 100 persen. Hal ini berarti jumlah korban yang menerima bantuan sama dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.





Tabel 2.124. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	132	388	1299	147	150
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	132	388	1299	147	150
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.1.6.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2017-2021 tidak ada korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap karena tidak ada korban bencana yang membutuhkan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Pada saat bencana banjir terjadi, masyarakat lebih memilih untuk tetap di rumah masing-masing.

2.1.3.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dengan capaian 19,8 persen. Peningkatan ini merupakan indikator meningkatnya pembangunan daerah yang lebih inklusif bagi warga yang rentan. Namun pada tahun 2020 persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial hanya 0,4 persen atau 80 dari 19.229 orang Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial hanya 166 orang yang telah menerima jaminan sosial.

Tabel 2.125. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	130	130	3806	80	3011





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	2965	4277	19192	19229	3011
	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	4,4	3	19,8	0,4	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng tidak terdapat angka sengketa antara pengusaha pekerja pertahun.

2.1.3.2.1.2. Besaran Pencari Kerja Yang terdaftar Yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. pada tahun 2017 yang sebesar 30,61%. Pada tahun 2018 besaran pencari kerja yang ditempatkan sebesar 28,71% meningkat dibanding tahun 2017. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 2,74%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 4,41% dan pada tahun 2021 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 729 orang dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 447 orang atau mencatat capain 61,32% meningkat dibantingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.126. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Jiwa	135	178	14	18	447
2	Jumlah Pencari Kerja Yang terdaftar	Jiwa	441	620	511	408	729
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	30,61	28,71	2,74	4,41	61,32

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2021





2.1.3.2.1.3. Keselamatan Dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan adalah indikator untuk mengukur seberapa banyak perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan terhadap karyawan, dihitung dari jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari total jumlah seluruh perusahaan di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Keselamatan dan Perlindungan pada tahun 2020 mencatat capaian sebesar 7,24% dengan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 20 dan jumlah perusahaan di wilayah sebanyak 276, sedangkan pada tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 48 dan jumlah perusahaan di wilayah sebanyak 489 dengan capaian 9,82% kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya

Data keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut:

Tabel 2.127. Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Perusahaan	20	20	20	20	48
2	Jumlah Perusahaan di wilayah	Perusahaan	269	226	245	276	489
	Keselamatan dan perlindungan	%	7,43	8,84	8,16	7,24	9,82

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2021

2.1.3.2.1.4. Besaran Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menunjukkan seberapa besar jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK dari total jumlah buruh/pekerja. Jumlah Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek pada tahun 2020 mencapai 94,5% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian 71,36% hal ini disebabkan jumlah buruh jamsostek mengalami penurunan.

Data Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2.128. Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK	Pekerja/Buruh	450	575	310	5.176	907
2	Jumlah Pekerja/ Buruh	Pekerja/Buruh	737	620	532	5.477	1.271
	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	%	61,05	92,74	58,27	94,5	71,36

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2021





2.1.3.2.1.5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dilatih dari jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Data Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun 2017 sampai 2021 mencapai 100%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.129. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga yang dilatih	Tenaga Kerja	40	110	40	0	5
2	Jumlah Pendaftar pelatihan kewirausahaan	Tenaga Kerja	40	110	40	0	5
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	0	100

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2021

2.1.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Secara khusus disebutkan dalam tujuan 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Pada tujuan 5 banyak menekankan pada usaha-usaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan aspek pemberdayaan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak antara lain pemberian beasiswa 10 Milyar, pelayanan kesehatan yang ramah anak, sekolah ramah anak, taman bermain anak (taman kalong) sebagai tempat bermain anak, perpustakaan ceria untuk anak. Juga perlindungan khusus bagi anak dengan adanya call center Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PSC 119 dengan pelayanan kesehatan 24 jam termasuk bagi anak yang membutuhkan bantuan.

Pada tahun 2018 Kabupaten Soppeng menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori madya. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Presiden Republik Indonesia bagi kementrian/lembaga dan daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan evaluasi setiap 2 tahun. Pada tahun yang sama, Kabupaten Soppeng juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) predikat pratama, selanjutnya pada tahun 2019 menerima penghargaan untuk kedua kalinya.





Perkembangan capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2019-2021 secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.2.2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintahan, menunjukkan persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah dari jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 11,54% meningkat hingga tahun 2019 sebesar 12,97. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penerimaan CPNS dan kontrak di lembaga pemerintahan. Meningkatnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan membuktikan bahwa peran perempuan di lembaga pemerintahan semakin menguat. Pada tahun 2020 capaian pekerja perempuan di lembaga pemerintah mengalami penurunan menjadi 12,10% dan tahun 2021 mengalami peningkatan dengan pencapaian tercatat 13,79%.

Tabel 2.130. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Perempuan	4.626	4.642	5.918	5.539	6.315
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	40.092	40.092	45.639	45.794	45.794
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	11,54	11,58	12,97	12,1	13,79

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD kabupaten). Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD menunjukkan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif di daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan.

Tabel 2.131. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kursi DPRD yang di duduki perempuan	Posisi	6	8	7	7	7
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Posisi	30	30	30	30	30





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	26,67	23,33	23,33	23,33

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan pada tahun 2017 sebanyak 6 kursi atau 20 persen dari jumlah total kursi keanggotaan DPRD sebanyak 30 kursi. Jumlah ini meningkat menjadi 8 kursi pada tahun 2018. Adapun pada tahun 2019 sampai tahun 2021 jumlahnya sebanyak 7 kursi atau 23,33. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat telah mengamanatkan kuota 30 persen, jumlah perolehan kursi yang sekarang tetap masih belum mencapai 30 persen.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD karena kurangnya pemahaman pemilih perempuan untuk memilih perempuan, dan kurangnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik, serta kurangnya kualitas perempuan yang menjadi calon legislatif. Selain memenuhi minimal 30 persen keterwakilan, peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan juga harus didorong agar keterwakilan perempuan di parlemen memberi dampak yang signifikan.

2.1.3.2.2.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, menunjukkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dari total jumlah pekerja perempuan. Secara persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 90,27 persen . Secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga swasta terbuka karena bertumbuhnya lembaga-lembaga swasta di daerah yang membutuhkan tenaga kerja baik perempuan maupun laki-laki.

**Tabel 2. 132. Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Perempuan	30.455	30.513	40.025	41.339	41.339
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	40.092	40.092	45.663	45.794	45.794
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	75,96	76,11	87,65	90,27	90,27

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.4. Rasio KDRT

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari total jumlah rumah tangga. Rasio KDRT ditargetkan 0, akan tetapi hingga tahun 2020 masih ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah 2 kasus atau 0,0034 dari jumlah seluruh





rumah tangga. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 10 kasus atau 0,0127% dari jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 78.923.

Kasus KDRT tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga. Sehingga kesadaran masyarakat tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga terkait pembinaan dan penyadaran perlu dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan sosialisasi.

Tabel 2. 133. Rasio KDRT Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KDRT	Kasus	2	3	3	2	10
2	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	58.353	57.003	56.994	56.994	78.923
	Rasio KDRT	%	0,0034	0,0053	0,0053	0,0035	0,0127

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.5. Persentase jumlah pekerja dibawah umur

Persentase jumlah pekerja dibawah umur tidak menjadi indikator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sehingga tidak ada data terkait indikator ini.

2.1.3.2.2.6. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan, menunjukkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dari total jumlah angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2017 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng sebanyak 39.025 atau 98,11 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 39.775. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 89,1 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Penurunan angka partisipasi kerja perempuan karena banyak dari perempuan pekerja meninggalkan pekerjaan untuk mengurus keluarga, terutama setelah melahirkan. Selain itu, juga diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sejumlah tenaga kerja perempuan kehilangan pekerjaan, serta beralihnya kegiatan belajar anak dari sekolah ke rumah yang membutuhkan pendampingan orangtua khususnya ibu.

Tabel 2.134. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Partisipasi Angkatan kerja perempuan	Perempuan	39.025	40.092	40.484	45.794	45.794
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	39.775	44.718	45.693	51.394	51.394
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	98,11	89,66	88,6	89,10	89,10

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021





2.1.3.2.2.7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah pengaduan/laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu dari jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 semua pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2017-2020 sebesar 100 persen. Kecuali pada tahun 2018 yang cakupannya sebesar 90%.

Tabel 2.135. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Pengaduan/Laporan	21	35	37	24	25
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Pengaduan/Laporan	21	39	37	24	25
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	90	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, menunjukkan jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dari jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit tahun 2018 sampai dengan 2021 mencapai 100%





Tabel 2.136. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Jiwa	Na	3	3	5	25
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit	Jiwa	Na	3	3	5	25
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	Na	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.9. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dari jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 realisasi sebesar 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial memperoleh penanganan melalui koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan.

Anak direhabilitasi berdasarkan hasil kesepakatan diversi dan penetapan atau berdasarkan kebutuhan anak baik sebagai korban ataupun pelaku. Pada saat direhabilitasi anak tetap bisa ikut belajar, baik secara online atau belajar tatap muka. Setelah masa rehabilitasi selesai, anak dikembalikan ke orang tua namun tetap diawasi oleh pekerja sosial selama 3 kali kunjungan rumah.

Tabel 2.137. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	Jiwa	Na	3	3	5	0





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Jiwa	Na	3	3	5	0
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	Na	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.10. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari keseluruhan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan. Jika dilihat dari persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara dengan capain 100% sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 7 perkara dengan capain 100%. Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan mengalami penurunan.

Tabel 2.138. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	5	1	2	2	7
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	11	6	5	2	7
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	45	17	40	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021





2.1.3.2.2.11. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, menunjukkan jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dari jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 korban yang membutuhkan bantuan hukum seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Upaya mengantisipasi dan menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dengan sosialisasi baik disekolah, lingkungan masyarakat dan organisasi pemerintahan. Semua pihak harus terlibat dalam pencegahan, terutama keluarga sebab semakin baik ketahanan keluarga maka perempuan dan anak akan terhindar dari kekerasan.

Tabel 2.139. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Jiwa	21	39	37	24	25
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Jiwa	21	39	37	24	25
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APKB, 2021

2.1.3.2.2.12. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan dari keseluruhan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0%. Tahun 2020 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan 4 orang atau sebesar 16,67 % mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 16 orang dengan capaian 0,64% dari jumlah yang tercatat di UPT.

Tabel 2. 140. Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Jiwa	0	0	0	4	16
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Jiwa	21	39	37	24	25





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	0	16,67	0,64

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.13. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dari keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial. Berdasarkan data, pada tahun 2017 hingga tahun 2019 cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0 persen. Sementara pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 100 persen atau keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial telah disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya.

Tabel 2. 141. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Jiwa	0	0	0	4	25
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Jiwa	0	1	2	4	25
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	0	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.14. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD menunjukkan perbandingan APM SD perempuan dengan APM SD laki-laki. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan/laki-laki cenderung meningkat.





Tabel 2. 142. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	APM-SD Perempuan	Perempuan	10.495	10.047	9.281	9.239	9.398
2	APM-SD Laki-laki	Laki-laki	9.022	9.267	10.033	10.046	10.071
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	Poin	1,16	1,08	0,93	0,92	0,93

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2017 dan 2018 rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD menunjukkan angka di atas 1, menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut. Sebaliknya, pada tahun 2019 dan 2020 rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang yang sama menunjukkan angka di bawah 1. Hal ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD murid perempuan yang bersekolah lebih sedikit dibandingkan dengan murid laki-laki, demikian hal nya pada tahun 2021 angka realisasi masih 0,93 dari target yang telah ditetapkan dengan rasio 0,96.

2.1.3.2.2.15. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP menunjukkan perbandingan APM SMP perempuan dengan APM SMP laki-laki. Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP berfluktuasi sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021. Namun capaian tetap pada angka di atas 1 atau jumlah perempuan yang bersekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2019. Dan pada tahun 2021 mencapai 1,04.

Tabel 2. 143. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	APM-SMP Perempuan	Perempuan	5.879	5.137	3.982	4.182	3.526
2	APM-SMP Laki-laki	Laki-laki	4.034	4.217	4.157	3.907	3.383
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	Poin	1,46	1,22	0,96	1,07	1,04

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMA menunjukkan perbandingan APM SMA perempuan dengan APM SMA laki-laki. Angka Partisipasi Murni perempuan setiap tahunnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2017 dan 2018 menjadi masing-masing 1,48 dan 1,53. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,50. Pada Tahun 2020 Rasio APM Perempuan terhadap APM laki-laki di SMA mengalami penurunan menjadi 0,99 demikian halnya juga tahun 2021 mengalami penurunan 0,80.

Tabel 2. 144. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18	Perempuan	3.154	3.041	2.826	4.217	1.416





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18	Laki-laki	2.135	1.989	1.886	4.271	1.768
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	Poin	1,48	1,53	1,5	0,99	0,80

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.16. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang Perguruan Tinggi menunjukkan perbandingan APM perempuan di Perguruan Tinggi dengan APM laki-laki. Pada tahun 2017 tercatat 2,57 point dan menurun tahun 2018 menjadi 0,72. Pada tahun 2019 rasio APM perempuan/ Laki-laki di perguruan tinggi sebesar 3,00 dan pada Tahun 2020 menjadi 3,50 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 1,45 poin.

Tabel 2. 145. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak perempuan di tingkat Perguruan tinggi usia 19-24 tahun	Perempuan	108	147	75	501	1559
2	Jumlah anak laki-laki di tingkat Pendidikan Tinggi usia 19-24 tahun	Laki-Laki	42	205	25	143	1072
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	2,57	0,72	3	3,5	1,45

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.2.17. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, menunjukkan perbandingan AMH 15-24 perempuan dengan AMH 15-24 laki-laki. Rasio AMH 15-24 perempuan terhadap laki-laki pada tahun 2017 adalah 1,49 poin, meningkat hingga tahun 2019 mencapai 1,51 poin, mengalami penurunan tahun 2020 dengan capaian 0,97 poin dan meningkat Kembali pada tahun 2021 sebesar 0,98 poin.

Tabel 2. 146. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	AMH 15-24 perempuan	Perempuan	3.262	3.188	2.901	9871	19034
2	AMH 15-24 laki-laki	Laki-laki	2.177	2.194	1.911	10131	19353
	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	Poin	1,49	1,45	1,51	0,97	0,98

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021





2.1.3.2.2.18. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, dihitung dari banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian dari total banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian. Pada tahun 2017 kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian adalah 29,51%, meningkat hingga tahun 2020 mencapai 36,36%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya minat perempuan untuk berpenghasilan sendiri dan perempuan sudah memahami pentingnya kesetaraan gender. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah dari segi jumlah pekerja upahan perempuan sebanyak 4952 orang atau 19,22%.

Tabel 2. 147. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Nonpertanian Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian	Pekerja	352	234	220	124	4.952
2	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian	Pekerja	1.193	704	638	341	25.764
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	29,51	33,24	34,48	36,36	19,22

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

2.1.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama menggambarkan kondisi ketersediaan bahan pangan utama yang diproduksi terhadap kebutuhan pangan penduduk. Untuk wilayah Kabupaten Soppeng, bahan pangan utama yang dihasilkan terdiri dari Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Dengan produktivitas padi 5,48 ton/ha, jagung 4,86 ton/ha dan ubi jalar 50,50 ton/ha. Adapun kondisi capaian ketersediaan pangan utama untuk tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 148. Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Kg	61,118,873	67,094,672	63,539,425	86,983,333	83,556,517
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241,43	236,156	237,115	239,391	237,720
	Ketersediaan Pangan Utama	%	253	284	268	363	351,5

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

Ketersediaan Pangan Utama (%) dari tahun 2017-2021 selalu berada pada kondisi diatas 100% yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama melebihi kebutuhan penduduk atau mengalami surplus. Pada Tahun 2017 sebesar 253%. Tahun 2018 meningkat menjadi 284% dan tahun 2019 menurun menjadi 268%. Tahun 2020 mencapai 363%,





akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 351,5%. Capaian ketersediaan pangan utama ini sangat bergantung pada produksi hasil pertanian, khususnya 4 (empat) jenis komoditi pangan utama yaitu Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

2.1.3.2.3.2. Ketersediaan energi dan Protein

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita menggambarkan kondisi ketersediaan jumlah energi dan protein yang terkandung dalam bahan pangan yang ada di Kabupaten Soppeng terhadap kebutuhan penduduk. Standar kebutuhan energi per kapita per hari ideal yaitu 2.400 Kkal, dan protein 63 gram per kapita per hari. Adapun kondisi ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 149. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan/kapita/hari	Perkapita /hari	338.12	460.10	465.00	445.98	478,62
2	Kandungan Kalori	Kkal	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2400
3	Kandungan Protein	Gram	63.00	63.00	63.00	63.00	63
4	BDD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Ketersediaan Energi Perkapita (KKal/kapita/hari)	Kkal	9,438.00	11,179.00	11,401.00	11,287.00	11,995.00
	Ketersediaan Protein Perkapita (Gram/kapita/hari)	Gram	241.26	286.28	286.96	259.07	288.20

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

Ketersediaan Energi dan Protein dari tahun 2017-2021 selalu berada pada kondisi diatas standar konsumsi ideal karena melimpahnya bahan pangan yang dihasilkan, terutama komoditi pangan penghasil energi seperti Padi-padian dan Umbi-umbian, serta penghasil protein dari Hewani maupun Nabati. Pada Tahun 2017 Ketersediaan Energi mencapai 9.438,00 Kkal/kapita/hari, dan terus meningkat sampai 2021 menjadi 11.995,00 Kkal/kapita/hari

Sedangkan untuk ketersediaan protein pada tahun 2017 yaitu 241,26 gram/kapita/hari, meningkat sampai tahun 2019 menjadi 286,96 gram/kapita/hari. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan 259,07 gram/kapita/hari dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 288,20 gram/kapita/hari.

2.1.3.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan terkait keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian Ketahanan Pangan, tidak hanya dari segi ketersediaan, tetapi juga mencakup aman atau tidaknya suatu jenis pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pengujian terhadap sampel bahan pangan yang diperjual belikan di pasar-pasar yang ada. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut :





Tabel 2. 150. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	Sampel	5	2	5	6	8
2	Jumlah total sampel pangan yang di Perdagangan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	Sampel	11	5	5	6	8
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	45,45	40	100	100	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tahun 2017 capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yaitu 45,45%, akan tetapi pada tahun 2018 turun menjadi 40% dan kembali meningkat pada tahun 2019 sampai 2021 menjadi 100%. Upaya membangun kesadaran masyarakat khususnya pengusaha atau pedagang bahan pangan terus dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan sosialisasi maupun kunjungan langsung, agar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dari berbagai jenis zat berbahaya.

2.1.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

2.1.3.2.4.1. Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 sebesar 41,77 & dan pada tahun 2019 sebesar 41,86%, an tahun 2021 mengalami peningkatan dengan capain 95,37%.

Tabel 2.151. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	Ha	Na	342,42	342,97	Na	781,39
2	Jumlah luas wilayah	Ha	Na	819,84	819,29	Na	819,29
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	Na	41,77	41,86	Na	95,37

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.2.4.2. Penyelesaian kasus tanah negara

Kasus tanah negara di Kabupaten Soppeng dari tahun 2017 dan 2018 dapat diselesaikan dengan persentase 100%, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 50% dan tahun 2020 masih terdapat kasus yang belum terselesaikan diakibatkan karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka sebagai wujud dari kegiatan mediasi antara pihak pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang melakukan klaim, sedangkan pada tahun 2021 penyelesaian kasus tanah negara mencapai 50% dengan 3 kasus dari 6 kasus yang terdaftar.





Tabel 2. 152. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	8	2	1	0	3
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	8	2	2	1	6
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	50	0	50

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.2.4.3. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin lokasi tersebut dapat diselesaikan dengan persentase sebesar 100% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2. 153. Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Izin Lokasi	Izin	5	5	3	2	4
2	Permohonan Izin Lokasi	Izin	5	5	3	2	4
	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

2.1.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut sampai saat ini belum disusun.

Tabel 2. 154. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Dokumen RPPLH	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dokumen KLHS di Kabupaten Soppeng telah disusun di tahun 2020 dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng periode 2021-2026.





Tabel 2. 155. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Dokumen KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi (Ada/Tidak ada)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air yang mencerminkan tingkat kualitas air di sungai dan danau, selain untuk keperluan air yang digunakan seperti; air minum, air yang digunakan di pertanian, atau air yang digunakan di industry. Indeks kualitas air juga memberi data penting untuk menggambarkan status kualitas air secara umum yang dapat sangat membantu dalam memilih teknik pengolahan air yang sesuai untuk mengatasi masalah kontaminasi. Di kabupaten soppeng, Indeks kualitas air pada tahun 2017 sebesar 1,63 dan terus menurun pada tahun 2021 sebesar 60 poin.

Tabel 2. 156. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kualitas air	Poin	1.63	1.51	0.86	70	60

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Di Kabupaten Soppeng, Indeks kualitas udara bersifat fluktuatif, pada tahun tahun 2017 sebesar 91,71 menurun di tahun 2018 sebesar 90, 70 bahkan mencapai 93,67 di tahun 2019 namun menurun Kembali di tahun 2020 sebesar 93,16 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan capaian tercatat 93,87 poin.

Tabel 2. 157. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Udara	Poin	91.71	90.70	93.67	93.16	93.87

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Penghitungan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya IKTL Pada tahun 2017-2019 nilainya konstan pada 0,48 poin kemudian nilai indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2020 sebesar 78,9 dan tahun 2021 sebesar 40,85 poin. Perubahan data mencolok pada tahun 2020 diakibatkan oleh adanya perubahan parameter , dimana perhitungan tutupan lahan dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di Kawasan hutan , sempadan sungai , danau





dan pantai lereng, ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 158. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kualitas Tutupan lahan	Poin	0,48	0,48	0,48	78,9	40,85

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.6. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar 100% di tahun 2017 sampai tahun 2019 dan pada 2020 mengalami penurunan 61%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 66%.

Tabel 2. 159. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Izin	30	71	136	103	70
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		30	71	136	169	106
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	61%	66%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.7. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat

Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan





kebersihan lingkungan. Pendidikan dan pelatihan tersebut setiap tahun dilaksanakan dengan frekuensi 2-3 kali setiap tahunnya.

Tabel 2. 160. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kali	3	3	3	3	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.8. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Setiap tahunnya di Kabupaten Soppeng dilaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup dengan harapan masyarakat Kabupaten Soppeng semakin peduli dan berbudaya lingkungan.

Tabel 2. 161. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Ada/Tidak ada)	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.9. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha di Kabupaten Soppeng dapat ditangani dengan baik, setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat segera ditangani dan diselesaikan di tahun berkenaan.

Tabel 2. 162. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Pengaduan	1	0	0	1	0
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Pengaduan	1	0	0	1	0





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.10. Timbulan sampah yang ditangani

Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Soppeng di tahun 2017 sebesar 53,45%, jumlah tersebut terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi 65,85 % dan tahun 2021 menjadi 74,06%.

Tabel 2. 163. Timbulan sampah yang ditangani Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	volume timbulan sampah yang ditangani	M ³	8.099.027	4.112,54	4.157.69	7.672,30	77.888,24
2	total timbulan sampah	M ³	13729.11	5.614,45	5.623.99	11.650,36	105.173,09
	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	53.45	73.25	73.93%	65.85	74,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.11. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

Pendekatan pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan melalui pendekatan berbasis 3R dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu dengan melaksanakan pengelolaan sejak dari sumbernya. 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle). Penerapan sampah dengan konsep 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dapat dijadikan solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Di Kabupaten Soppeng, persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017 sebesar 12,69 % hingga 35,01 % di tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 9,62%.

Tabel 2. 164. Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan	M ³	2,913.76	6,927.70	7,535.67	2,634.25	10,117.6





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan						
	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	12.69	30	32.3	35.01	9.62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.12. Persentase cakupan area pelayanan

Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng mencakup wilayah Ibu kota Kecamatan di tiap kecamatan. Area pelayanan belum dapat menjangkau daerah-daerah terpencil disebabkan oleh masih kurangnya armada kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga persentase cakupan area pelayanannya hanya sebesar 26% pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 27%.

Tabel 2. 165. Cakupan area pelayanan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /ha)	Km ² /Ha	390	390	390	390	423,5
2	luas area kabupaten/kota (km ² /ha)	Km ² /Ha	1500	1500	1500	1500	1557
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	26%	26%	26%	26%	27%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.13. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani dihitung dari jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan total jumlah timbulan sampah yang ada. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 53,45% dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 73,93 %. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 65,85%, dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2021 sebesar 74,06%.

Tabel 2. 166. jumlah sampah yang tertangani Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	24,297.08	24,334.55	24,601.73	23,016.90	25962,74
2	Total jumlah timbulan sampah di kabupaten /kota	Ton	45,457.59	33,221.57	33,278.05	34,951.09	35057,69
	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	53.45	73.25	73.93	65.85	74,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021





2.1.3.2.5.14. Operasionalisasi TPA/ TPST /SPA di Kabupaten / Kota

Pengelolaan dan pengembangan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) merupakan salah satu indikator dalam penilaian Program Adipura. Nilai TPA Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 75,95 dan terus meningkat hingga angka 75 pada tahun 2020. Akan tetapi untuk tahun 2021 Tidak ada penilaian TPA dalam program Adipura yang dilakukan.

Tabel 2. 167. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai TPA (Program Adipura)	Nilai	75.95	73.55	75	75	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.15. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan

Pengelolaan sampah oleh swasta harus mendapatkan izin oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menerbitkan sebanyak 2 izin di tahun 2019. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 bukan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan izin, akan tetapi hanya akan memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2. 168. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	Izin	0	0	2	0	0
2	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	Izin	0	0	2	0	0
	Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Diterbitkan	%	0	0	100	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.5.16. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan

Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 62,50 % menurun 4,35 % di tahun 2020. Untuk tahun 2021 jumlah pengelola sampah oleh swasta mengalami peningkatan sebesar 34, akan tetapi peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pengelola sampah swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Persentase capaian pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan hanya sebesar 2,94% di tahun 2021. Jumlah pengelola sampah oleh swasta pada data di bawah termasuk pengelola yang belum memiliki izin.





Tabel 2. 169. Pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan	Pengelola Sampah Swasta	10	2	1	1	1
2	Jumlah Pengelolaan sampah oleh swasta	Pengelola Sampah Swasta	16	22	22	23	34
	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	62.50	9.09	4.55	4.35	2.94

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.1.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.6.1. Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kabupaten Soppeng, Angka ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dengan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (Wajib KTP) Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 100, Rasio penduduk ber KTP tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 0,99 poin.

Tabel 2. 170. Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	177.785	177.749	177.801	177.197	181.248
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Jiwa	183.416	178.255	178.080	177.767	182.588
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Poin	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.1.3.2.6.2. Rasio bayi berakte kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase bayi yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran bermanfaat untuk kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi, rasio bayi berakta kelahirantahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 0,98 poin





Berikut data Rasio bayi ber-akte kelahiran di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2017-2021:

**Tabel 2. 171. Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2017-2021
Kabupaten Soppeng**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi berakta kelahiran	Bayi	3.671	4.232	4.341	4.131	6.490
2	Jumlah bayi	Bayi	3.808	4.316	4.406	4.198	6.645
	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	Poin	0,96	0,98	0,99	0,98	0,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.1.3.2.6.3. Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa jumlah pasangan nikah yang ada di Kabupaten Soppeng sudah berakte nikah, rasio pasangan berakta nikah tahun 2020 sebesar 0,61 sebesar 0,61 meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,64 poin

Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2. 172. Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2017-2021
Kabupaten Soppeng**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	Pasangan	19.341	23.441	29.128	68.486	70.953
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	52.100	51.478	51.969	111.956	111.560
	Rasio pasangan berakta nikah	Poin	0,37	0,45	0,56	0,61	0,64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.1.3.2.6.4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kabupaten Soppeng telah memiliki database kependudukan pada skala Provinsi. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sudah tersedia. Database kependudukan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.





Tabel 2. 173. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2021

KECAMATAN	LUAS AREA	PENDUDUK			KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
Lalabata	278	23,929	25,014	48,943	176,05
Ganra	57	5,577	6,146	11,723	205,67
Citta	40	3,857	4,210	8,067	201,68
Marioriwawo	300	23,652	25,215	48,867	162,89
Marioriawa	320	14,235	14,987	29,222	91,32
Donri-Donri	222	11,677	12,730	24,407	109,94
Liliriaja	96	13,543	14,824	28,367	295,49
Lilirilau	187	18,214	20,065	38,279	204,70
Total	1500	114,684	123,191	237,875	180,97

2.1.3.2.6.5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.

2.1.3.2.6.6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dari total jumlah penduduk Wajib KTP. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Cakupan Penerbitan KTP, cakupan KTP tahun 2017 sebesar 96,93% mengalami penurunan sampai tahun 2020 yang mencapai 99,33% dan Kembali mengalami penurunan tahun 2021 sebesar 99,27%. Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. 174. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2017-2021 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	KTP	177.785	177.749	178.857	182.331	181.248





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	183.416	178.255	179.807	183.561	182.588
	Cakupan penerbitan KTP	%	96,93	99,72	99,47	99,33	99,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.1.3.2.6.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dari total jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2017 sebesar 94,35%, mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 99,02 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sebesar 97,67% dan 97,16%. Sedangkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 97,67%. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 175. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	2.555	2.741	2.013	1.337	6.490
2	Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	2.708	2.768	2.061	1.376	6.645
	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	94,35	99,02	97,67	97,16	97,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.1.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.7.1. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah jumlah kantor pemerintahan desa yang berfungsi dengan kondisi baik dan layak pakai pada masing-masing pemerintahan desa. Pada Tahun 2017 hingga tahun 2020 terdapat 49 desa di Kabupaten Soppeng dengan keseluruhan pemerintahan desa telah memiliki kantor pemerintahan desa





yang berfungsi baik dan beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan desa. Sehingga cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada tahun 2017 hingga tahun 2020 telah mencapai 100%, sedangkan tahun 2021 jumlah kantor pemerintahan desa yang baik mengalami penurunan sebanyak 44 unit atau mencapai 89,80%.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.176. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	49	49	49	49	44
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	49	49	49	49	49
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100	100	100	100	89,80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

2.1.3.2.7.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. LPM mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPM dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng adalah 70 LPM. Sementara rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017 hingga tahun 2019 terdapat 70 kelompok binaan LPM dari 70 jumlah LPM. Sehingga apabila dirata-ratakan terdapat 1 kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng pada masing-masing LPM. Pada Tahun 2020 dan 2021 jumlahnya meningkat menjadi rata-rata 3 kelompok binaan LPM pada masing-masing LPM.

Tabel 2. 177. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	70	70	70	210	210
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Rata-Rata	1	1	1	3	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

2.1.3.2.7.3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup pembinaan Tim Penggerak PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program- program pembangunan daerah/pusat. Kelompok binaan PKK bergerak di penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dibina secara teknis oleh Tim Penggerak PKK.

Rata-rata jumlah binaan PKK adalah jumlah kelompok binaan PKK dari jumlah seluruh PKK di Kabupaten Soppeng. PKK di Kabupaten Soppeng sejumlah 70 terdiri dari PKK Kabupaten 1, PKK Kecamatan 8 dan PKK Desa/Kelurahan 70. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yaitu 79 kelompok binaan PKK dari 79 jumlah PKK yang ada. atau rata-rata 1 kelompok binaan pada masing-masing PKK. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi rata-rata 4 kelompok binaan pada masing-masing PKK, pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 237 atau rata-rata tercatat 3 kelompok.

Tabel 2.178. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	79	79	79	350	237
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	79
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	1	1	1	4	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

2.1.3.2.7.4. Persentase LPM Aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir (2017-2021) berjumlah 70 LPM dengan tingkat capaian persentase LPM aktif mencapai 100%.

Tabel 2.179. Persentase LPM Aktif Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LPM aktif	Lembaga	70	70	70	70	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

2.1.3.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi

LPM berprestasi adalah LPM yang mampu berperan pada aspek tertentu dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat mewujudkan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan. Seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk peran aktif lembaga-lembaga tersebut. Pelaksanaan lomba LPM berprestasi diharapkan dapat mendorong sinergitas antara peran pemerintah desa/kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dalam proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Pada kurun waktu 2017-2019 dari 70 LPM yang ada di Kabupaten Soppeng terdapat 3 LPM yang berprestasi atau 4,29 persen dari jumlah LPM. Namun pada tahun 2020 dan tahun 2021, lomba LPM berprestasi ditiadakan akibat pandemi covid-19.

Tabel 2. 180. Persentase LPM Berprestasi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LPM berprestasi	Lembaga	3	3	3	0	0
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Berprestasi	%	4,29	4,29	4,29	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

2.1.3.2.7.6. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah s.d. tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada Tahun 2017-2021, terdapat 79 PKK yang aktif dari 79 PKK yang terdata di Kabupaten Soppeng, atau persentase PKK aktif di Kabupaten Soppeng mencapai 100 persen.

Tabel 2. 181. Persentase PKK Aktif Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKK aktif	Lembaga	79	79	79	79	79
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	79
	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021





2.1.3.2.7.7. **Persentase Posyandu Aktif**

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Tujuan diselenggarakan Posyandu antara lain untuk: 1) mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran; 2) mempercepat penerimaan NKKBS; 3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Soppeng yang ditempatkan di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya sebanyak 327 posyandu dengan Persentase Posyandu yang aktif mencapai 100 persen.

Tabel 2. 182. Persentase Posyandu Aktif Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu aktif	Unit	327	327	327	327	327
2	Total Posyandu	Unit	327	327	327	327	327
	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

2.1.3.2.7.8. **Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat berintegrasi dengan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural dimana masyarakat yang berswadaya dapat berupa kelompok organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri ataupun himpunan masyarakat tanpa organisasi.

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase swadaya masyarakat sebesar 27,12% dari total program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh beberapa desa dengan kepanitiaan dilaksanakan oleh Badan Kerjasamanya antar Desa (BKAD). Tahun 2018 dan 2019 swadaya masyarakat meningkat menjadi 33,55%. Adapun persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 34,34% dan tahun 2021 meningkat dengan capaian 34,40%.

Tabel 2. 183. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Juta Rp	4.376,30	7.950,80	7.950,80	8.139,00	8.154,05





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	Juta Rp	16.136,10	23.700,70	23.700,70	23.700,70	23.700,76
	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	27,12	33,55	33,55	34,34	34,40

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

2.1.3.2.7.9. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam struktur APBDESA Kabupaten soppeng terdapat keseragaman pelaksanaan program/kegiatan dengan melaksanakan 2 item Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa serta BPD, dan program/kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Desa. Program/Kegiatan tersebut berbentuk non fisik berupa bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan, sehingga tidak terdapat data yang dapat ditampilkan untuk program/kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat khususnya pada Tahun 2017-2019. Pada Tahun 2020 pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat mencapai 80 persen, dan tahun 2021 tidak terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 184. Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	Program	-	-	-	40	40
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	Program	-	-	-	50	50
	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	-	-	-	80	80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

2.1.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR. Perkembangan capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:





2.1.3.2.8.1. **Laju pertumbuhan penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh perubahan dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021). Angka laju pertumbuhan tersebut masih termasuk dalam kategori lambat, karena angka pertumbuhan penduduk masih kurang dari 1% setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 185. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,07	0,13	0,1	0,48	0,13

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2.8.2. **Total Fertility Rate**

Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Data ini sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 2. 186. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,19	2,16	2,16	2,16

Sumber: Dinas P3APKB, 2021

TFR untuk tahun 2017 menunjukkan angka 2,3 artinya rata-rata satu keluarga memiliki 2-3 orang anak. Pada tahun 2018 TFR pada angka 2,19. Sedangkan pada tahun 2019-2021 dimana angka ini berhasil melampaui target nasional dengan angka 2,16. Namun demikian harus tetap dilakukan konseling dan penyuluhan secara intens kepada para akseptor (PUS) dalam hal pemakaian alat kontrasepsi secara tepat.

2.1.3.2.8.3. **Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB**

Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB semakin meningkat artinya adanya kepedulian stakeholder Perangkat Daerah dalam pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Soppeng. Hal ini ditunjukkan dengan upaya mereka untuk membantu baik berupa data maupun koordinasi terkait hal-hal yang diperlukan dalam operasional kampung KB.





Tabel 2. 187. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	OPD	38	38	34	34	10
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	38	38	34	34	34
3	Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	100	100	100	100	29,41

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.4. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, adalah proporsi jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk terhadap Jumlah semua perangkat daerah.

Tabel 2. 188. Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	OPD	21	24	24	24	21
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	38	38	34	34	34
	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	55,26	57,89	70,59	70,59	61,76

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Berdasarkan data Dinas P3APPKB, persentase SKPD yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun mencapai 55,26%, mengalami fluktuasi sampai tahun 2020 seiring perubahan jumlah SKPD, sedangkan tahun 2021, mengalami penurunan dengan capaian 61,76% disebabkan terdapat penurunan jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebanyak 21 SKPD dari 34 jumlah perangkat daerah.

2.1.3.2.8.5. Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset bermanfaat bagi pembangunan, sebaliknya penduduk yang rendah kualitasnya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan





penduduk yang bermanfaat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Namun regulasi atau kebijakan tentang pengendalian penduduk berupa Peraturan Daerah belum tersedia, dikarenakan masih sangat terbatasnya alokasi anggaran yang dapat digunakan dan masih terdapat beberapa kegiatan lain yang diprioritaskan. Di masa yang akan datang diharapkan penyusunan regulasi tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk bisa menjadi prioritas utama sehingga kegiatan DP3APPKB maupun SKPD dan stakeholder terkait akan mengacu pada *grand design* perencanaan kependudukan.

2.1.3.2.8.6. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Data profil termasuk parameter dan proyeksi penduduk merupakan data yang diperlukan daerah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data profil (parameter dan proyeksi penduduk) belum sepenuhnya diperkenalkan ke Perangkat Daerah lain sehingga mengakibatkan ketidakseragaman penggunaan data kependudukan. Sementara penggunaan data kependudukan merupakan data pokok dalam hal pembagian dan penentuan beberapa data dan capaian pembangunan lainnya. Oleh karena itu, selanjutnya akan menjadi tugas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng supaya dapat menyusun Parameter dan Proyeksi Penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang untuk kepentingan Perangkat Daerah lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dan koordinasi secara intens dengan Para penyuluh KP (PLKB), aparat Desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait, tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sebanyak 6 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan tahun 2021 masing masing sebanyak 7 dan 10 sektor.

Tabel 2. 189. Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	6	6	6	7	10

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021





2.1.3.2.8.7. Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan

Indikator ini menunjukkan adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal yang melakukan pendidikan kependudukan. Kegiatan ini telah dilakukan pada tahun 2020 dalam bentuk sosialisasi, kunjungan maupun *Focus Group Discussion* pada tiap jenjang pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, serta organisasi-organisasi perempuan dan anak, baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian informasi pendidikan kependudukan bisa diketahui lebih luas dan menyeluruh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini melakukan kerja sama dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengadakan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Tabel 2. 190. Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerja sama	0	0	0	1	2

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.8. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya penurunan tingkat fertilitas dengan Program Utama Keluarga Berencana. Seiring dengan meluasnya akses media massa terhadap informasi KB cukup mempengaruhi masyarakat untuk melakukan penundaan kelahiran maupun penundaan jarak kelahiran hingga adanya persepsi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 orang. Pasangan yang berniat memiliki satu atau dua orang anak akan memperpanjang jarak antara pernikahan dan kelahiran anak pertama yaitu dengan menunda kelahiran anak pertama dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik sebagai pasangan. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sebagai usaha untuk penundaan kehamilan.

Sebagai upaya mendukung program KB, para penyuluh melakukan penyuluhan secara aktif atau konseling terhadap Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB, melakukan sosialisasi pada pasangan usia subur, kelompok BKL, kelompok BKB, Kelompok BKR tentang pentingnya menjarangkan kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan data Dinas P3APPKB, rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2020 sebanyak 1,36 dan tahun 2021 menjadi 1,15.





Tabel 2.191. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Anak	Anak	85,610	102,120	96,307	105,789	91,835
2	Jumlah Keluarga	Keluarga	63,085	65,715	73,137	77,782	79,714
	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Per Keluarga	1.36	1.6	1.31	1.36	1.15

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.9. Rasio akseptor KB

Akseptor KB adalah masyarakat pasangan usia subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi atas tiga fase yaitu, fase menunda dan mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan dan mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Data ini menunjukkan proporsi jumlah akseptor KB terhadap Jumlah pasangan Usia Subur. Secara umum, jumlah akseptor KB tidak mengalami perubahan signifikan, walau demikian Jumlah Pasangan Usia Subur mengalami penurunan, sehingga rasio akseptor KB juga tidak mengalami perubahan signifikan.

Pada tahun 2020 dan 2021 memperlihatkan cukup tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga rasio akseptor KB mencapai 78,22% dan 75,05%.

Hal ini dapat diwujudkan karena tersedianya alat kontrasepsi disarana kesehatan, kerja sama dengan tenaga penyuluh KB aktif di lapangan, melakukan konseling pada pasangan usia subur yang belum ber KB untuk menggunakan alat kontrasepsi baik jangka panjang maupun jangka menengah.

Tabel 2.192. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Akseptor KB	Pasangan	27.583	27.689	28.122	28.218	27.405
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	36.774	36.711	36.483	36.072	36.517
	Rasio Akseptor KB	%	75,01	75,42	77,08	78,22	75,05

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi atau tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.





Tabel 2.193. Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah peserta KB aktif	Peserta	27.583	27.689	28.122	27.901	27.405
2	Jumlah Pasangan usia subur	Pasangan	36.774	36.711	36.483	36.056	36.517
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	75,01	75,42	77,08	77,38	75,05

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Data pada table di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 angka pemakaian kontrasepsi berada pada kisaran 70%. Cenderung stagnan jika dibandingkan antara data tahun 2017 sebesar 75,01% dan tahun 2020 sebesar 77,38%, dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 75,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran Pasangan Usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi cukup tinggi, ditunjang pula oleh pelaksanaan penyuluhan secara aktif tentang penggunaan alat kontrasepsi serta tersedianya ALKON yang dibutuhkan oleh PUS.

2.1.3.2.8.11. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Proporsi angka kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 Tahun adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur 15 - 19 tahun terhadap keseluruhan jumlah penduduk perempuan kelompok 15 - 19 Tahun. Selama 5 tahun angka tersebut bergerak secara fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 27,69% mengalami penurunan pada 2018 menjadi 7,99%, namun naik kembali menjadi 25,99% di tahun 2019. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya angka pernikahan dini. Upaya advokasi dan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan di tahun 2020 kembali turun menjadi 16,65% dan meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 17,36% atau berjumlah 9.561 jiwa

Dalam hal ini diselenggarakan penyuluhan dan konseling terhadap para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan juga penundaan kelahiran anak pertama bagi pasangan muda.

Tabel 2.194. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 -19	Jiwa	240	69	259	166	166
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 -19	Jiwa	8,668	8,637	9,967	9,967	9,561
	Angka kelahiran remaja (Perempuan Usia 15 -19) per 1.000 Usia 15 -19 tahun (ASFR 15 -19)	%	27.69	7.99	25.99	16.65	17,36

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021





2.1.3.2.8.12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia dibawah 20 Tahun adalah proporsi jumlah pasangan usia subur dengan usia istri yang kurang dari 20 Tahun terhadap jumlah pasangan usia subur.

Tabel 2.195. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	Pasangan	2.937	919	911	901	1.027
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	36.774	36.711	36.483	36.056	36.517
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	7,99	2,5	2,5	2,5	2,81

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun pada Tahun 2017 menjadi 7,99%. Pada tahun 2018 hingga 2020 stagnan dengan nilai persentase sebesar 2,50%, dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,81%. Rata-rata cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat menunda usia kawin muda atau masih banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, penyuluhan dan konseling terhadap orang tua yang mempunyai anak usia 20 tahun kebawah harus tetap diaktifkan.

2.1.3.2.8.13. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*unmet need* merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dengan total jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka *unmet need*, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya besarnya tingkat *unmet need* KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Karakteristik *unmet need* berbeda menurut umur, daerah tempat tinggal, dan status sosial ekonomi. *Unmet need* pada perempuan usia muda (15-29 tahun) lebih banyak untuk menjarangkan kelahiran, sementara di usia tua (30-49 tahun) lebih banyak untuk membatasi kelahiran mengingat resiko melahirkan yang semakin besar seiring dengan usia ibu.





Tabel 2.196. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani	Pasangan	5.763	5.615	5.081	4.611	5.105
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	36.774	36.711	36.483	36.072	36.517
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Poin	15,67	15,3	13,93	12,78	13,98

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun, sempat mengalami kenaikan di angka 15, 67 pada tahun 2017, namun di tahun 2020 kembali turun di angka 12,78, dan pada tahun 2021 meningkat Kembali meningkat menjadi 13,98%, yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB, terpenuhi, dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik. Hal ini karena Dinas DP3APKB berhasil dalam memberikan pelayanan akseptor dan konseling.

2.1.3.2.8.14. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode yang efektif untuk menunda dan menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung meningkat pada periode 2017-2021 dengan kondisi terakhir pada tahun 2021 mencapai 2,97%. Namun belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 26 persen.

Tabel 2.197. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Akseptor	3.908	4.503	5.211	5.414	814
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	27.583	27.689	28.122	28.218	27.405
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	14,17	16,26	18,53	19,19	2,97

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan PUS tidak menjadi peserta KB adalah pelayanan KB yang masih kurang berkualitas, penyampaian konseling maupun KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) belum dilaksanakan dengan baik, hambatan budaya, kelompok wanita yang sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi (*unmet need*), dan kelompok *hard core* yaitu kelompok wanita yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang.

Peran aktif tenaga medis (bidan) dan penyuluh KB sangat dibutuhkan dalam peningkatan jumlah pengguna metode kontrasepsi jangka panjang pada PUS, antara lain melalui pemberian penyuluhan-penyuluhan tentang kontrasepsi jangka panjang, pemberian informasi lengkap saat kunjungan pertama klien untuk menentukan pilihan berkontrasepsi dan memotivasi





setiap calon akseptor KB baru untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

2.1.3.2.8.15. *Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi*

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah proporsi jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap jumlah akseptor KB. Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Faktor sosial, ekonomi antara lain meliputi keterlibatan dalam organisasi, norma dan hukum, pendapatan, kebiasaan, agama dan tempat pelayanan. Sedangkan faktor demografi antara lain meliputi karakteristik individu seperti umur, status perkawinan, pendidikan, lama perkawinan dan pekerjaan.

Tabel 2.198. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan	9.191	9.022	8.361	7.854	9.112
2	Jumlah akspetor KB	Akseptor	27.583	27.689	28.125	28.218	27.405
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	33,32	32,58	29,73	27,83	33,25

Sumber: Dinas P3APKB, 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat keberlangsungan ini mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Data di tahun 2017 senilai 33,32% terus menurun menjadi 27,83% di tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2021 sebesar 33,25%

Kelangsungan penggunaan kontrasepsi yang rendah apabila tidak diatasi dikhawatirkan dapat menambah laju pertumbuhan penduduk, yang dapat mengakibatkan masalah diberbagai segi kehidupan. Peran aktif perangkat daerah yang terkait diperlukan untuk meningkatkan penyuluhan dan konseling terhadap akseptor atau Pasangan Usia Subur untuk ber-KB.

2.1.3.2.8.16. *Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB*

Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua untuk mengasuh serta membina tumbuh kembang anak. Upaya tersebut melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. BKB lebih menyasar pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengasuh anak. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2017 hanya 53,43%, kemudian meningkat mencapai 60,67 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 64,23%.

Tabel 2.199. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB	Anggota	1.318	1.728	1.768	1.749	1.602





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah anggota kelompok BKB	Anggota	2.467	2.656	2.690	2.883	2.494
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	53,43	65,06	65,72	60,67	64,23

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.17. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun, dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021 dengan kondisi akhir 56,10% pada tahun 2021. Faktor pendukung capaian tersebut antara lain adanya semangat dan kerjasama yang baik dari setiap kader, kemudian didukung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran keluarga tentang Bina Keluarga Remaja.

Tabel 2.200. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB	Anggota	1.070	1.290	1.419	1.365	1.219
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Anggota	1.908	1.995	2.250	2.406	2.173
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	56,08	64,66	63,07	56,73	56,10

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.18. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah salah satu program kegiatan di DP3APPKB yang menitik beratkan pada pembinaan lansia dan keluarga lansia. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB mengalami peningkatan sampai 2020, Data tahun 2017 menunjukkan capaian 34,28%, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 51,11% pada tahun 2020, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 36,91%, disebabkan terjadinya penurunan jumlah anggota bina keluarga lansia yang ber KB yang tahun 2021 sebanyak 629 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.201. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber KB	Anggota	556	614	775	1.086	629
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Anggota	1.622	1.767	1.695	2.125	1.704





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	34,28	34,75	45,72	51,11	36,91

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang telah dibentuk di Kabupaten Soppeng ada 2 yaitu UPPKS Kecamatan Lalabata dan UPPKS Kecamatan Marioriwawo. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 hanya 25%. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, idealnya setiap kecamatan memiliki PPKS.

Tabel 2. 202. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PPKS	Unit	2	2	2	2	2
2	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	25	25	25	25	25

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.20. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa adalah proporsi data jumlah PIK R/M terhadap jumlah kecamatan. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Tabel 2.203. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PIK R/M	PIK R/M	62	62	62	56	62
2	Jumlah kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	%	7,75	7,75	7,75	7	7,75

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Berdasarkan tabel pada tahun 2017-2019 cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dalam pusat sebanyak 7,75% dengan jumlah PIK R/M sebanyak 62. Namun di tahun 2020, mengalami penurunan karena PIK R/M turun menjadi 56, sehingga





perbandingan cakupan hanya menjadi 7%. Hal ini disebabkan selama 2020 ini terjadi pembatasan kegiatan karena adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya harus mencari cara agar dapat kembali meningkatkan cakupan dengan melakukan berbagai program penyuluhan terhadap remaja/mahasiswa untuk mengikuti informasi dan konseling. Selain itu, PIK Remaja adalah nama generic, maka untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK Remaja, nama generic ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat, dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebanyak 7,75% dengan jumlah PIK R/M sebanyak 62.

2.1.3.2.8.21. Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Peran PKB/PLKB sebagai komponen pemerintah, beserta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program KKBPK, dalam rangka mendukung pengembangan kualitas keluarga.

Tabel 2. 204. Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	PKB/ PLKB	38	36	35	32	31
2	Jumlah PKB/PLKB	PKB/ PLKB	38	36	35	32	31
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APKB, 2021

Jumlah PKB/PLKB yang ada jumlahnya menurun yang dikarenakan ada yang pensiun dan belum ada penerimaan baru, yang semula berjumlah 38 orang di tahun 2017, kini hanya berjumlah 31 orang di tahun 2021. Sebagaimana diketahui bahwa PKB/PLKB ini mengalami pengalihan status kepegawaian PKB dari pegawai daerah (pemerintah kabupaten/kota) menjadi pegawai vertikal dalam hal ini BKKBN. Namun semua berperan secara aktif melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pendayagunaan KB sesuai kompetensi yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam manajemen ASN (UU No.5 Tahun 2014 pasal 69 point a, b dan c tentang





Aparatur Sipil Negara), terdiri atas : 1. Kompetensi Teknis, 2 Kompetensi Manajerial dan 3. Kompetensi Sosial Kultural.

2.1.3.2.8.22. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dengan Jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka unmeet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya Besarnya tingkat unmet need KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun, pada tahun 2017 sebesar 63,85% dan tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 58,25% dan 56%, namun di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 78,60% yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB terpenuhi dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik dan tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 47,87%.

Tabel 2.205. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB	Anggota	800	611	560	507	427
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Anggota	1.253	1.049	1.000	645	892
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	%	63,85	58,25	56	78,6	47,87

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.23. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Rasio Petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa terhadap jumlah Desa/Kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Melihat pentingnya peran dan tugas PPKBD maka dibentuklah 1 (satu) orang PPKBD untuk setiap Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng, yang terdiri dari 49 PPKBD Desa dan 21 PPKBD Kelurahan, capaian tahun 2017 sampai 2021 sebesar 100%.





Tabel 2.206. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	Petugas	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.24. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alat kontrasepsi kab/kota terhadap Perkiraan permintaan masyarakat. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa tahun 2017 mencapai 20,65% menjadi 77,61% di Tahun 2021. Namun bukan berarti jumlah peserta KB Aktif rendah tetapi masih banyaknya masyarakat yang cenderung menggunakan alat kontrasepsi mandiri. Dengan demikian mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat khususnya pasangan usia subur yang tinggi dalam penggunaan alat kotrasepsi dan mendukung program Keluarga Berencana.

Tabel 2. 207. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota	Unit	3.088	3.301	3.153	4.393	24.605
2	Perkiraan permintaan masyarakat	Unit	14.956	15.920	16.945	18.036	31.704
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	20,65	20,73	18,61	24,36	77,61

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.25. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Dalam rangka menjamin agar setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat secara mudah mendapatkan pelayanan dan upaya menjamin tersedianya pelayanan yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS melalui Fasilititasi Pelayanan KB yang telah bekerjasama dengan BPJS. Persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan





merupakan proporsi data yang menunjukkan perbandingan jumlah Fasilitas Kesehatan dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS terhadap jumlah Fasilitas kesehatan dan jejaring.

Tabel 2. 208. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS	Unit	18	18	18	18	18
2	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	18	18	18	18	18
	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Tabel di atas menunjukkan target persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS mencapai 100% dengan jumlah fasilitas sebanyak 18 buah, pada tahun 2017 sampai tahun 2021 dengan capaian 100%. Pencapaian 100% ini disebabkan karena adanya kerjasama dan koordinasi secara aktif antara Dinas DP3APKB dengan *stakeholder* Fasilitas Kesehatan dan jejaring yang ada di setiap tingkatan wilayah.

2.1.3.2.8.26. Persentase Remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Pendataan mengenai remaja terkena infeksi menular seksual belum dilaksanakan oleh dinas terkait.

2.1.3.2.8.27. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa didapatkan dengan membandingkan jumlah Informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga. Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan. Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.





Tabel 2.209. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan, setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%) yang dilakukan dengan melakukan kerja sama dan pembinaan terhadap stakeholder yang ada di 70 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng.

2.1.3.2.8.28. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di kelompok masing-masing pada tahun 2017-2021 mencapai 100% atau semua kelompok kegiatan yang ada melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi. Jumlah kelompok kegiatan mengalami peningkatan mulai pada tahun 2017 sebanyak 351 kelompok hingga pada tahun 2021 mengalami penurunan mencapai 53 kelompok.

Tabel 2. 210. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	351	300	267	360	53
2	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	351	300	267	360	53
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.29. Rata-rata usia kawin pertama Wanita

Usia pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda usia kawin pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 dan 2019 yaitu usia 20 tahun, dan pada tahun 2020 usia 19 tahun dan tahun 2021 usia 20 tahun.

Tabel 2.211. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	Jiwa	Na	212.400	199.340	193.876	397.140





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	Jiwa	Na	10.620	9.967	10.204	19.857
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	Na	20	20	19	20

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.30. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh pada tahun 2017 mencapai 82,08% mengalami peningkatan hingga tahun 2020 yang mencapai 85,85% dan tahun 2021 menurun hingga mencapai 23,01%

Hal ini tidak terlepas dari peran kader Bina Keluarga Balita.

Tabel 2.212. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Keluarga	8.265	8.251	8.273	8.248	2.494
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Keluarga	10.070	9.769	9.515	9.608	10.836
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	%	82,08	84,46	86,95	85,85	23,01

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.8.31. Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD adalah perbandingan antara jumlah anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap jumlah APBD. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan melalui APBD di Kabupaten Soppeng secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.213. Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Anggaran untuk urusan PPKB	Rp	416.299.300	261.920.400	2.928.702.184	3.899.678.900,00	3.410.510.850
2	Jumlah APBD dan APBDes	Rp	1.931.160.500	3.501.636.350	1.271.512.024.838,52	1.298.262.158.702,95	1.307.375.584.577,00
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Melalui APBD dan APBDes	%	21,56	7,48	0,23	0,30	0,26

Sumber: Dinas P3APPKB, 2021

2.1.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

2.1.3.2.9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2017 berjumlah 1.344 orang, menurun hingga tahun 2021 hanya sebesar 484 orang. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang beroperasi semakin berkurang karena kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Soppeng semakin meningkat. Selain itu, wabah covid-19 menyebabkan mobilitas masyarakat berkurang cukup drastis.

Tabel 2. 214. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.	Orang	1.344	1.340	1.340	1.005	848
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	Orang	1.344	1.340	1.340	1.005	848

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021





2.1.3.2.9.2. Rasio izin trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Setiap kendaraan yang mengangkut penumpang umum harus memiliki izin trayek. Di kabupaten soppeng, jumlah izin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2017 sebanyak 245 izin, angka ini terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2020 jumlah izin yang dikeluarkan hanya 18 izin, dan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 50 izin trayek atau mencapai 0,0002 poin Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pengusaha angkutan umum yang mengalihfungsikan kendaraannya menjadi kendaraan pribadi karena penumpang angkutan umum maupun barang sudah berkurang karena banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kendaraan pribadi.

Tabel 2. 215. Rasio izin trayek Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	245	125	152	18	50
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	237.720
	Rasio izin trayek	Poin	0,001	0,001	0,001	0,0001	0,0002

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

2.1.3.2.9.3. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji KIR merupakan rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Uji KIR adalah sesuatu yang mutlak dilakukan para pemilik kendaraan pengangkut. Baik yang menggunakan plat nomor kuning atau hitam. Baik yang mengangkut penumpang, atau mengangkut barang, atau bahkan keduanya. Di Kabupaten Soppeng, jumlah uji kir angkutan umum yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 89 kendaraan, terus meningkat hingga mencapai 135 kendaraan di tahun 2018. Selanjutnya pengujian ini mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 120 kendaran dan pada tahun 2020 hanya 85 kendaraan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan Uji KIR. Di tahun 2021 tidak dilaksanakan uji KIR dikarenakan alat yang digunakan mengalami kerusakan, sedagkan alat baru yang diadakan datang terlambat, yakni pada bulan desember 2021.

Tabel 2. 216. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	89	135	120	85	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

2.1.3.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan/ Terminal merupakan tempat pemberhentian maupun pemberangkatan jasa angkutan baik barang maupun penumpang. Di kabupaten Soppeng, jumlah terminal pada tahun 2017-2018 sebanyak 3 terminal. Salah satu terminal kemudian dialihfungsikan menjadi bagian dari Pusat Pertokoan Watansoppeng karena sudah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan terminal Tipe C. hal tersebut menyebabkan jumlah terminal pada tahun 2019 sampai tahun 2021 hanya berjumlah 2 terminal.





**Tabel 2. 217. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

2.1.3.2.9.5. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017 sebesar 39,68% hingga tahun 2020 sebesar 91,85%. Pada tahun 2021 persentase layanan angkutan darat menunjukkan penurunan sebesar 17,45%. Hal tersebut terjadi dikarenakan penurunan jumlah angkutan darat sebesar 148 unit dari tahun sebelumnya serta jumlah penumpang angkutan darat yang melonjak sebanyak 848 orang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan angkutan di Kabupaten Soppeng semakin baik yang di dukung oleh kondisi jaringan jalan yang baik serta kemudahan pengguna untuk mencapai rute kendaraan.

Tabel 2. 218. Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah angkutan darat	Unit	200	207	207	248	148
2	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	504	500	475	270	848
	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	39,68	41,40	43,58	91,85	17,45

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

2.1.3.2.9.6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng sangat berfluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 55,50% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 65,72%. Akan tetapi di tahun 2021 jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR menunjukkan angka 0 dikarenakan tidak adanya uji kir yang dilakukan. Kendala yang dihadapi dikarenakan alat uji yang biasanya dipakai mengalami kerusakan dan alat yang baru, tiba pada akhir tahun. Jumlah angkutan umum yang semakin berkurang juga sangat mempengaruhi. Berkurangnya kendaraan umum tersebut disebabkan oleh tergerus karena usia dan tidak adanya peremajaan kendaraan.

**Tabel 2. 219. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit	111	72	87	163	0
2	Jumlah angkutan umum	Unit	200	207	207	248	148
	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	55.50%	34.78%	42.03%	65.72%	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021





2.1.3.2.9.7. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu lalu lintas yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Keterpenuhan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 20 atau mencapai 40% namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 34,72 %, dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2021 sebesar 61% dengan jumlah pemasangan rambu sebanyak 61 dan jumlah rambu yang seharusnya tersedia sebanyak 100unit.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya refocusing anggaran pengadaan rambu-rambu.

Tabel 2. 220. Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit	20	29	82	50	61
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	50	50	100	144	100
	Pemasangan Rambu-rambu	%	40%	58%	82%	34,72%	61%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

2.1.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.10.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok informasi masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan pada Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa disetiap kecamatan terdapat 8-9 KIM.

Tabel 2. 221. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KIM	Kelompok	0	48	54	54	54
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	Kecamatan	8	8	8	8	8





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	600	675	675	675

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa lebih dari setengah wilayah Kabupaten Soppeng telah terjangkau oleh layanan telekomunikasi terlihat pada tahun 2018 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 65,88 namun pada tahun 2019 dan 2020 tidak dilakukan pendataan kembali sehingga data tersebut tidak terupdate, dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 66,15%

Tabel 2. 222. Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km ²	N/a	988.15	988.15	988.15	1030
2	Luas Wilayah Keseluruhan	Km ²	1500	1500	1500	1500	1557
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	N/a	65,88	65,88	65,88	66,15

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.10.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Hp atau telepon adalah Alat komunikasi ini memudahkan kita dalam berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertatap muka. Teknologi ini telah menggeser fungsi surat dan telegram sebagai alat komunikasi bagi mereka yang bertempat tinggal saling berjauhan. Di Kabupaten Soppeng, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon pada tahun 2018 sebesar 77% mengalami penurunan hingga 2021 sebesar 75%.

Tahun 2021 tidak dilakukan Kembali pendataan sehingga data jumlah penduduk yang menggunakan Hp/Telepon tidak terupdate.

Tabel 2. 223. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	Jiwa	0	181.044	181.044	181.044	178.893
2	Jumlah penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	238.967	235.167
	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon	%	0%	77%	76%	76%	75%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.10.4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Internet merupakan sebuah singkatan dari *Interconnection Networking*, atau yang berarti jaringan yang terhubung secara luas. Dengan





jaringan inilah semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah dan dalam waktu yang singkat dari seluruh dunia tanpa batas. Kehidupan modern telah menjadi lebih mudah berkat kontribusi besar teknologi internet untuk komunikasi dan berbagi informasi. Manfaat internet tak hanya sebatas pada akses komunikasi dan informasi. Kini manfaat internet telah merambah pada sektor ekonomi, sosial, hiburan, hingga keamanan. Di Kabupaten Soppeng, proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2018 sebesar 81,48 sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 81,49.

Tabel 2. 224. Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Unit	0	46.444	46.444	46.444	64.314
2	Jumlah rumah tangga	Unit	0	57.003	56.994	56.994	78.923
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	81,48	81	81,49	81,49

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.10.5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

Pada era digital saat ini kebutuhan komputer dan perangkat pintar lainnya sudah termasuk kedalam kebutuhan primer manusia. Setiap kegiatan manusia mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial sudah menggunakan perangkat komputer untuk mempermudahnya. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018-2021 sebesar 61%.

Tabel 2. 225. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Unit	0	34.833	34.833	34.833	48.143
2	Jumlah rumah tangga	Unit	0	57.003	56.994	56.994	78.923
	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	61%	61%	61%	61%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi aktif tahun 2017 adalah 183 unit, menurun pada tahun 2019 yakni sebanyak 163 unit koperasi. Pada tahun 2020 tercatat koperasi aktif meningkat menjadi 166 koperasi aktif. Namun pada tahun 2021 koperasi





aktif kembali mengalami penurunan dengan catatan sebanyak 150 unit koperasi yang aktif dari 166 koperasi yang ada di Kabupaten Soppeng sedang.

Berikut ini adalah data Koperasi aktif yang ada di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

Tabel 2. 226. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	183	183	163	166	150
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	204	203	204	206	166
3	Persentase Koperasi Aktif	%	89,71	90,15	79,9	80,58	90,36

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Persentase koperasi aktif pada tahun 2017 sebesar 89,71% mengalami peningkatan hanya 0,44% pada tahun 2018 menjadi 90,15%. Walaupun akhirnya menurun sekitar 10,25% pada tahun 2019 menjadi 79,90%, hal ini disebabkan setelah diadakannya diidentifikasi secara kelembagaan dan usaha oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, ternyata terdapat penambahan jumlah koperasi yang tidak aktif. Hal ini disebabkan antara lain karena pengurus kelembagaan koperasi sudah tidak aktif, usaha koperasi sudah tidak berjalan dan koperasi tersebut tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut.

Pada tahun 2020 persentase koperasi aktif kembali naik yakni 80,58% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 90,36%. Animo masyarakat untuk berkoperasi paling tinggi pada tahun 2021 dalam lima tahun terakhir ini.

Walaupun dengan kondisi peningkatan yang terjadi pada tahun terakhir, masih perlunya Peran Pemerintah (Dinas PPK dan UKM) dalam mengembangkan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha yang dilakukan. Adapun pembinaan atau pengembangan yang dilakukan antara lain, Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, meningkatkan partisipasi anggota, bimbingan dan konsultasi tertib organisasi dalam penyelenggaraan RAT serta penerapan sistem akuntansi koperasi.

2.1.3.2.11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah UKM non BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng.

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil yang ada di Kabupaten Soppeng. Sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM adalah jumlah seluruh usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Soppeng. UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah lembaga keuangan mikro dan usaha mikro yang tidak berbadan hukum namun bergerak di bidang usaha dan pembiayaan dan masih aktif berjalan sampai sekarang. UKM non BPR/LKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat





pengangguran yang ada di suatu daerah. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja , selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara.

Berikut adalah data Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2017-2021

Tabel 2. 227. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	6.471	6.491	6.514	7.464	8.414
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	6.542	6.562	6.585	7.535	8.485
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	98,91	98,92	98,92	99,06	99,16

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun 2017 tercatat sebanyak 6.471 unit dari 6.542 UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng atau mencapai 98,91% terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebanyak 7464 unit dari 7535 UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 8.414 Jumlah UKM non BPR/LKM aktif dari jumlah seluruh UKM BPR/LKM sebanyak 8.485 unit atau mencapai 99,16%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 950 UKM non BPR/LKM aktif dari tahun 2020.

2.1.3.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif adalah jumlah BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng.

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dana atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM berperan dalam kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

LKM formal terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bumdes dan sejenisnya. LKM di Kabupaten Soppeng antara lain BPRS Niaga Madani, PT. Mandala, PT.Adira Multifinance, Bumdes dan lain.lain.

Berikut adalah data Persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2017-2021.

Tabel 2. 228. Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	52	53	55	55	55





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	Unit	52	53	55	55	55
3	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Persentase BPR/LKM aktif sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan persentase yang stagnan yakni 100%. Jumlah BPR/LKM aktif pada tahun 2017 yakni sebanyak 52 unit, bertambah 3 unit pada tahun 2021 menjadi 55 unit.

Tabel 2.229. Data Bank Prekreditasi Rakyat (BPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2017 - 2021

NO	KECAMATAN	TAHUN																			
		2017				2018				2019				2020				2021			
		BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH
1	Marioriwawo	11			11	11			11	11			11	11			11	11			11
2	Liliriaja	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5
3	Lilirilau	7			7	7			7	8			8	8			8	8			8
4	Lalabata	3	1	3	7	3	1	4	8	3	1	5	9	3	1	5	9	3	1	5	9
5	Marioriawa	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5
6	Donri-Donri	9			9	9			9	9			9	9			9	9			9
7	Ganra	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4
8	Citta	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4
JUMLAH		48	1	3	52	48	1	4	53	49	1	5	55	49	1	5	55	49	1	5	55

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

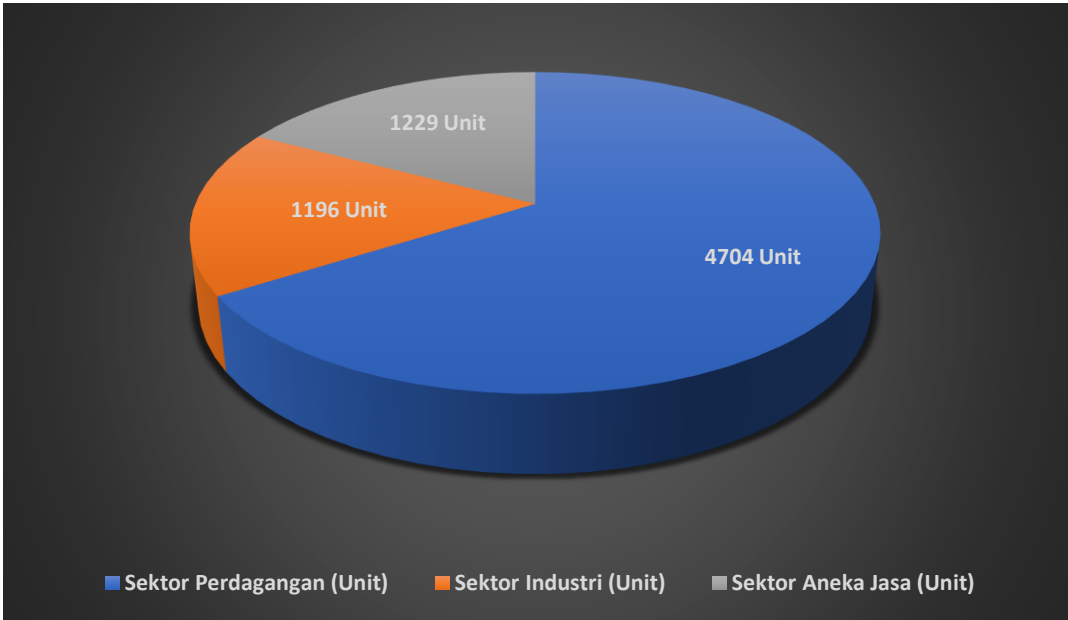
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.





Grafik 2. 30. Usaha Mikro



Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Jumlah usaha mikro dan kecil tahun 2017 tercatat sebanyak 6.471 unit dari 6.542 UKM yang ada di Kabupaten Soppeng atau mencapai 98,91% terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebanyak 7464 unit dari 7535 UKM dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 8.414 unit dari jumlah seluruh UKM sebanyak 8.485 unit atau mencapai 99,16%

Peningkatan ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan kemudahan fasilitas kredit KUR dengan bunga yang sangat rendah dengan tanpa jaminan dan kebijakan pemerintah tentang kemudahan pemasaran produk UMKM melalui retail modern dan pasar online.

Berikut adalah data Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2017-2021.

Tabel 2.230. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	6.471	6.491	6.514	7.464	8.414
2	Jumlah seluruh UKM	Unit	6.542	6.562	6.585	7.535	8.485
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,91	98,92	98,92	99,06	99,16

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2017 sebesar 98,91% dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebesar 99,06% dan 2021 telah mencapai 99,16% dengan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 8.414.

2.1.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

2.1.3.2.12.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor merupakan orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selama tahun 2017 sampai 2021 jumlah investor berskala nasional di





Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan tiap tahun dimana pada tahun 2017 sebanyak 11 investor dan pada tahun 2020 menjadi 40 investor atau terjadi peningkatan sebanyak 29 Investor di Kabupaten Soppeng selama tahun 2017 sampai dengan 2020, tahun 2021 kembali meningkat menjadi 63 investor atau terdapat penambahan 23 investor, investor tersebut lebih banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor; perdagangan besar dan eceran dan sektor jasa.

Tabel 2.231. Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	11	17	22	40	63

Sumber : Dinas PMPTSP, 2021

2.1.3.2.12.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Sejalan dengan peningkatan jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Soppeng, maka perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN juga cenderung meningkat signifikan. Pada tahun 2017 nilai investasi perusahaan PMDN di Kabupaten Soppeng mencapai Rp2.108.038.000,- kemudian meningkat menjadi Rp1.700.091.116.933 di tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat menjadi Rp123.688.144.297 pertumbuhan nilai investasi tersebut diharapkan lebih menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.232. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp	22.086.500.000	90.347.238.849	239.145.555.197	1.700.091.116.933	123.688.144.297

Sumber : Dinas PMPTSP, 2021

2.1.3.2.12.3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Secara umum, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2017-2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan nilai realisasi ini terjadi seiring dengan penambahan jumlah investor PMDN. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu kenaikan/penurunan realisasi PMDN pada tahun 2017 mencapai 94,73%. Sedangkan pada tahun 2020 kenaikan nilai realisasi sebesar 61,1%, sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 114,52%.





Tabel 2.233. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum Evaluasi	Rp	19.978.462.000	68.260.738.849	148.798.316.348	1.460.945.561.736	66.029.477.044
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rp	2.108.038.000	22.086.500.000	90.347.238.849	239.145.555.197	57.658.667.253
3	Kenaikan / Penurunan nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	94,77%	3,09%	16,46%	61,10%	114,52%

Sumber : Dinas PMPTSP, 2021

2.1.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.3.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Tabel 2.234. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	50	100	100	100	38
2	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisasi	50	100	100	100	102
	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	100%	100%	100%	100%	37,25%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.2.13.2. Persentase Wirausaha Muda

Tabel 2.235. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah wirausaha muda	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	547
2	Jumlah seluruh wirausaha	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	547
	Persentase wirausaha muda	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2.13.3. Cakupan pembinaan olahraga

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah.

Selama periode 2017 s/d 2021 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Soppeng Mengalami Penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar





100% dan pada tahun 2020 sebesar 25% sedangkan tahun 2021 sebesar 84%.

Tabel 2.236. Cakupan Pembinaan Olahraga 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Cabang	21	19	11	6	21
2	Jumlah Seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	21	24	24	24	25
	Cakupan pembinaan olahraga (% realisasi)	%	100	79	46	25	84

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2.13.4. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Para pelatih yang memegang cabang olahraga, wajib memiliki ‘lisensi’ atau sertifikat baik level Nasional maupun level Daerah Sertifikat kepelatihan ini sebagai syarat bagi para pelatih, agar menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas dan meraih prestasi terbaik. Jumlah pelatih bersertifikat di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2017 s/d 2021 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2017 pelatih yang bersertifikat sebanyak 12 pelatih dan pada tahun 2020 sebanyak 38 pelatih, dan tahun 2021 menjadi 46 pelatih atau mengalami penambahan 8 orang peningkatan jumlah pelatih bersertifikat ini sebagai hasil program pelatihan insan olahraga dan adanya inisiatif mengikuti pelatihan pelatih secara mandiri.

Tabel 2.237. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	12	14	28	38	46
2	Jumlah Seluruh pelatih	Orang	18	20	35	42	66
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	66,67	70	80	90	69,70

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2.13.5. Cakupan pembinaan atlet muda

Pembinaan atlet usia dini dapat menjadi program strategis di daerah. Sebab, tidak akan muncul atlet berprestasi tanpa partisipasi, sedangkan partisipasi hanya bisa dimulai dari pembinaan di usia dini. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sejak tahun 2017 s/d 2021 cukup konsisten dalam pelaksanaan pembinaan atlet muda. Dimana setiap tahun terdapat atlet muda yang berprestasi. Untuk tahun 2020 tidak terdapat atlet muda yang berprestasi diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19 sedangkan tahun 2021 sebanyak 380 atlet muda berprestas, darijumlah seluruh atlit muda sebanyak 380 orang.

Tabel 2.238. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atlet muda berprestasi	Orang	80	54	30	0	380
2	Jumlah Seluruh atlet muda	Orang	179	190	190	190	386





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	44,69	28,42	15,79	0	98,45

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2.13.6. Jumlah atlet berprestasi

Pada tahun 2017 terdapat 3 atlet Kab. Soppeng yang berprestasi di tingkat nasional. Hal ini meningkat pada tahun 2019 sebanyak 10 atlet yang berprestasi tingkat nasional pada tahun 2017 Tetapi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 Menyebabkan prestasi olahraga berkurang drastis akibat tertundanya berbagai kejuaraan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 2 atlet nasional.

Tabel 2.239. Jumlah Atelet Yang Berprestasi 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Atlet yang memenangi kejuaraan tingkat dalam satu tahun						
	a. Internasional	Orang	0	2	0	0	0
	b. Nasional	Orang	3	3	10	0	2
	c. Provinsi	Orang	107	67	24	0	7

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2.13.7. Jumlah prestasi olahraga

Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Soppeng di tiap kejuaraan berfluktuasi tiap tahun. Dimana pada tahun 2017 sebesar 14 cabang olahraga. Pada tahun 2018 cabang olahraga yang berprestasi sebanyak 14 cabang olahraga dan menurun pada tahun 2019 sebesar 8 cabang olahraga. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kuantitas prestasi olahraga akibat adanya penundaan berbagai kejuaraan akibat pendemi COVID-19, dan tahun 2021 sebanyak 4 cabang yaitu Prestasi Kejuaraan pada PON Paralimpic (2 orang), Kejuaraan Tennis Meja Kelompok Umur Se-Sulsel 2021 (1 Orang) dan Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel CUP IX 2021 (1 Orang).

Tabel 2.240. Jumlah Prestasi Olahraga 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun						
	a. PRAPORDA	Prestasi	14				
	b. PORDA	Prestasi		12			
	c. POPDA	Prestasi		1			
	d. KEJURDA	Prestasi			4		
	e. KEJUARAAN LAIN	Prestasi		1	4	4	4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.3.2.14. Bidang Statistik

2.1.3.2.14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Sistem data statistik yang terintegrasi adalah hasil pengolahan sumber data statistik yang terpusat dan terpadu dalam satu sistem yang sama sehingga dapat dengan mudah diakses dan diuji tingkat





keakuratannya. Sumber data statistik Kabupaten Soppeng bersumber dari sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng serta data primer dan sekunder dari Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Statistik dan Persandian sebagai pelaksana dalam mengintegrasikan data statistik hingga Tahun 2018 belum memiliki sistem terpadu dalam mengakomodir kebutuhan data dan statistik. Akan tetapi pada tahun 2019 Diskominfo menerbitkan aplikasi e-data yang digunakan sampai saat ini untuk menghimpun data dan statistik dari berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.241. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi (Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak Ada)	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.14.2. Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Buku Kabupaten Soppeng dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data statistik yang lengkap, menyeluruh dan terintegrasi mengenai karakteristik dan keadaan sosial ekonomi Kabupaten Soppeng. Data yang dimuat bersumber dari BPS Kabupaten Soppeng dan perangkat/daerah atau instansi terkait. Sejak tahun 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng telah merilis Buku Soppeng dalam angka, begitu juga pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2.242. Buku "Kabupaten Dalam Angka" Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"(Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.14.3. Buku "PDRB"

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan buku yang memuat salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Buku PDRB pada dasarnya memuat jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng tidak menerbitkan Buku PDRB Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017. Akan tetapi pada Buku Soppeng Dalam Angka Tahun 2017 telah memuat BAB tersendiri yang memuat Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2017 demikian juga untuk tahun -tahun selanjutnya.





Tabel 2.243. Buku "PDRB" Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku "PDRB" (Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.15. Bidang Persandian

2.1.3.2.15.1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Praktek komunikasi persandian di Kabupaten Soppeng belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengelolaan persandian di Kabupaten Soppeng terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan informasi berklasifikasi walaupun disadari bahwa pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksansakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Namun sampai saat ini urgensi untuk menggunakan persandian dalam berkomunikasi di Kabupaten Soppeng masih sangat minim sehingga persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi masih 0 %, sedangkan tahun 2021 terdapat capaian sebesar 76% dengan Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah sebanyak 26 OPD dari 34 jumlah OPD.

Tabel 2.244. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	0	0	0	0	26
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	38	38	34	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0%	0%	0%	0%	76%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.1.3.2.16. Bidang Kebudayaan

2.1.3.2.16.1. Penyelenggaraan festival seni, budaya dan adat

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan adat merupakan wujud pelestarian budaya yang dimiliki. Salah satu bentuk kegiatan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Soppeng yaitu Pattaungeng. Beberapa rangkaian acara pada penyelenggaraan pattaungeng yang dilaksanakan diantaranya: mappadendang, massure', mattojang, maddaga dan tarian tradisional lainnya. Pada tahun 2017 pattaungeng diselenggarakan sebanyak 10 kali, tahun 2018 sebanyak 8 kali, tahun 2019





sebanyak 10 kali. Pada tahun 2020 diselenggarakan 7 kali dan tahun 2021 sebanyak 5 kali

Penyelenggaraan kegiatan seni budaya mengalami hambatan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid-19. Beberapa kegiatan yang telah dijadwal harus diundur pelaksanaannya sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah virus corona (covid-19). Memasuki masa normal baru, pattaungeng mulai diselenggarakan kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tabel 2.245. Penyelenggaraan Festival, seni, budaya dan adat Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	10	8	10	7	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.1.3.2.16.2. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan dilestarikan oleh daerah. Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran. Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB, dan sebagian lainnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs.

Adapun benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.246. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	29	11	7	7	8
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	29	29	29	29	32
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	100	37,93	24,13	24,13	25,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021





2.1.3.2.16.3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Data terkait jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Soppeng selama tahun 2017-2021 belum ada.

2.1.3.2.16.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu kebermanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cagar budaya yang dikelola bukan hanya berdampak pada lestariannya cagar budaya, tetapi juga memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu hingga tahun 2020 adalah 8 (delapan) cagar budaya yaitu Cagar Budaya Calio, Villa Yuliana, Kompleks Makam Jera Lompoe, Jera Caddie, Bola Ridie, Saoraja Mario, Situs Arung Palakka dan Situs Gorie.

Tabel 2.247. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Unit	2	3	3	3	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.1.3.2.17. Bidang Perpustakaan

2.1.3.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Indikator ini menunjukkan berapa banyak pengunjung perpustakaan yang datang di perpustakaan yang telah disediakan Pemerintah Daerah dalam satu tahun. Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2019 sebesar 5,06 dari sebelumnya sebesar 4,37 di tahun 2018 dan 5,14 di tahun 2017. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan menurun drastis akibat pandemi covid-19. Pada Tahun 2020 rasio jumlah pengunjung hanya 1,38. Pandemi covid-19 mendorong pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial (sosial distancing) demi mencegah meluasnya penularan covid-19. Pengunjung perpustakaan dibatasi dan perpustakaan keliling tidak dilaksanakan, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kunjungan keperpustakaan selama 1 tahun sebanyak 27.077 orang atau mencapai 1,41%.





Tabel 2.248. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	8.148	9.155	10.856	2.750	2.707
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	158.670	209.662	214.520	199.780	192.190
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	%	5,14	4,37	5,06	1,38	1,41

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.1.3.2.17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Indikator ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberi akses yang cukup bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bacaan. Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk distock opname. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 tidak ada penambahan koleksi buku. Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 menyebabkan anggaran untuk pengadaan koleksi buku perpustakaan ditiadakan, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 101.112 koleksi atau mencapai 100%.

Tabel 2.249. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	11.585	12.425	13.284	13.284	101.112
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	42.636	44.317	47.858	47.858	101.112
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	27,17	28,04	27,76	27,76	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.1.3.2.17.3. Rasio perpustakaan per satuan penduduk

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2019 dan 2020 rasio perpustakaan persatuan penduduk mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah perpustakaan tetap, sedangkan tahun 2021 mencapai 1,58 point, peningkatan ini dibarengi pengurangan jumlah penduduk sedangkan jumlah perputakaan tetap.





Tabel 2.250. Rasio perpustakaan per satuan penduduk Kab Soppeng Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan	Unit	365	375	375	375	375
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	241.430	236.156	237.115	239.391	237.875
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	1,51	1,59	1,58	1,56	1,58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.1.3.2.17.4. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun

Indikator ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk datang berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang telah disediakan. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan sampai 2019 mengalami peningkatan setiap tahun. Namun pada tahun 2020, hanya mencapai 2.730. Penyebab utama terjadinya penurunan jumlah pengunjung adalah adanya pandemi covid-19., sedangkan pada tahun 2021 mencapai 8.924 pengunjung.

Tabel 2.251. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rata - Rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	Orang	8.148	9.155	10.856	2.730	8.924

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.1.3.2.17.5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Indikator ini menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan, karena semakin banyak koleksi judul buku, maka akan semakin banyak alternatif bagi pengunjung yang datang ke perpustakaan. Semakin bervariasi koleksi perpustakaan akan semakin menarik bagi pengunjung. Penambahan jumlah koleksi judul buku dilaksanakan setiap tahun, kecuali pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 dan 2021 mengalami peningkatan sebanyak 15.687 judul buku.

Tabel 2. 252. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	11.585	12.425	13.284	13.284	15.687

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.1.3.2.17.6. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Perpustakaan di Kabupaten Soppeng sampai saat ini sudah memiliki pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 56%, penurunan tersebut di banding dengan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat mengalami penurunan sebanyak 25 orang. Namun jika dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada, masih dibutuhkan tambahan tenaga pengelola





perpustakaan untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan. Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang ada, belum sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada.

Tabel 2. 253. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	33	43	48	48	25
2	Jumlah Seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	33	43	48	48	45
	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan penilai yang Memiliki Sertifikat	%	100%	100%	100%	100%	56%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.1.3.2.18. Bidang Kearsipan

2.1.3.2.18.1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Pada dasarnya arsip yang ada di setiap Perangkat Daerah memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dapat dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap Perangkat Daerah. Dalam hal penyelolaan arsip, Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Soppeng setiap tahun melakukan pembinaan kepada perangkat daerah secara bertahap. Namun demikian, belum semua perangkat daerah telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku hingga tahun 2020 mencapai 61,76% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 20,59%. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah masih perlu peningkatan keperdulian terhadap pengelolaan arsip.

Tabel 2.254. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kab Soppeng Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Arsip Secara Baku	OPD	9	14	18	21	7
2	Jumlah Perangkat Daerah	OPD	37	37	34	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	%	24,32	37,84	52,94	61,76	20,59

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.1.3.2.18.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kemampuan SDM pengelola kearsipan setiap tahun. Namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19, sedangkan tahun 2021 meyenggarakan sosialisasi sebanyak 1 kegiatan.





Tabel 2. 255. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM kearsipan	Kegiatan	1	1	1	0	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.1.3.3. Pelayanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Bidang Pariwisata

2.1.3.3.1.1. Kunjungan Wisata

Pemerintah Kab.Soppeng melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng, Kepariwisataaan adalah salah satu sektor yang memiliki prospek dikembangkan di Kabupaten Soppeng, karena sektor ini memiliki potensi yang cukup besar. Selama ini kepariwisataan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, khususnya dari objek wisata yang dikembangkan, seperti objek wisata permandian alam ompo, permandian alam Lejja, permandian citta dan beberapa objek wisata lainnya yang dikelola pemerintah desa.

Kinerja Kunjungan Wisata dihitung dari jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten Soppeng dibagi dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan, berikut adalah data kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2017-2021 :

Tabel 2. 256. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten	Orang	224.018	162.767	125.411	48.574	226.297
2	Jumlah kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten	Orang	201.300	211.100	221.920	234.126	70.000
3	Kunjungan Wisata (%)	%	111,29	77,1	56,51	20,75	323%

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Pada tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 224.018 atau 111,29% dari target sebanyak 201.300, tahun 2018 jumlah kunjungan wisata menurun menjadi 162.767 atau 77,10% dari target sebanyak 211.100, tahun 2019 kembali menurun menjadi 125,411 orang dari target sebanyak 221.920 orang atau 56,51% dan tahun 2020 jumlah kunjungan hanya mencapai 48.574 orang atau hanya 20,75% dari target 234.126 orang, dan tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah kunjungan 226.297 orang dari target kunjungan 70.000 orang sehingga mencatat capaian 323%. Penentuan target yang ditetapkan cukup rendah dikarenakan pandemi Covid-19, dari target tersebut tidak diperkirakan jumlah peningkatan kunjungan wisata di tahun 2021 sehingga capaiannya melonjak drastis.

Dari tabel di atas terlihat jika jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng selama tahun 2017-2020, cenderung mengalami penurunan dari





tahun ke tahun. Salah satu penyebab dari penurunan tersebut karena ketidaksiapan destinasi wisata yang ada. Ketidaksiapan tersebut dalam arti minimnya pengembangan objek wisata. Disisi lain destinasi wisata di daerah lain berkembang pesat baik dari segi jumlah maupun pengembangan.

2.1.3.3.1.1.1. Lama Kunjungan Wisata

Lama Kunjungan Wisata, menunjukkan berapa hari rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng, karena semakin lama waktu tinggal wisatawan diharapkan dapat lebih banyak kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Semakin lama waktu tinggal wisatawan maka semakin banyak mereka membelanjakan uang yang dimiliki, ini tentu bernilai positif dalam pergerakan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan semakin banyak pemasukan daerah dari sektor tersebut. Rata-rata lama kunjungan wisata selama tahun 2017-2021 pada tabel berikut :

**Tabel 2. 257. Rata-Rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari	2	2	2	1	2

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas terlihat, jika kurun waktu tahun 2017-2019, rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng, stagnan, yaitu rata-rata 2 (dua) hari, sementara untuk tahun 2020, lama kunjungan wisata menurun menjadi 1 hari, ini salah satunya disebabkan karena mewadahnya Corona Virus Disease (Covid-19) di awal tahun 2020 yang berdampak pada menurunnya minat wisata masyarakat, tahun 2021 mengalami peningkatan Kembali menjadi 2 hari lama kunjungan wisata.

Secara keseluruhan rata-rata lama kunjungan wisata tersebut masih rendah akibat masih kurangnya objek wisata dan masih kurangnya jumlah sarana akomodasi.

2.1.3.3.1.1.2. PAD Sektor Pariwisata

Sektor kepariwisataan merupakan salah satu potensi daerah yang berkontribusi dalam penerimaan daerah. Potensi tersebut, di harapkan dapat terus meningkatkan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli daerah, termasuk pendapatan sektor kepariwisataan selain retribusi tempat rekreasi, seperti pajak hotel, pajak restoran dan retribusi penginapan, villa, dan pesangrahan. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, selama kurun waktu tahun 2017-2021 pada tabel berikut:

Tabel 2. 258. PAD Sektor Pariwisata Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	PAD sektor Pariwisata	Rp	2.332.697.400	2.392.979.010	2.734.581.838	1.809.057.228	276.697.000





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Total PAD	Rp	125.892.548.021	131.607.491.253,80	138.447.182.182	151.857.742.474	155.470.054.145
3	PAD sektor Pariwisata (%)	%	1,85	1,82	1,98	1,19	0,18

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Kontribusi sektor pariwisata terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2017, yaitu 1,85% dari total PAD, dan turun pada tahun 2020 hanya 1,19%, Kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capain 0,18%.

Rincian Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 259. Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisataan Tahun 2017-2021

JENIS PENDAPATAN	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	Rp	58.402.140,00	95.205.750,00	170.512.926,80	106.643.080,00	90.220.115,00
Pajak Restoran	Rp	762.709.260,00	762.709.260,00	1.382.555.911,00	718.206.196,00	257.038.217,00
Retribusi Tempat Penginapan /Villa	Rp	29.550.000,00	32.250.000,00	27.300.000,00	2.000.000,00	,
Retribusi tempat rekreasi	Rp	1.482.036.000,00	1.502.814.000,00	1.154.213.000,00	281.157.000,00	,
PAD Pariwisata	Rp	2.332.697.400,00	2.392.979.010,00	2.734.581.837,80	1.108.006.276,00	276.697.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng, 2021





Dari tabel diatas, tergambar rincian penerimaan dari sektor kepariwisataan, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat penginapan/villa, dan rektribusi tempat rekreasi. Jenis pendapatan yang paling besar kontribusinya yaitu retribusi tempat rekreasi dengan rata-rata kontribusi setiap tahun cenderung fluktuatif dengan nilai di atas satu milyar. Yang berkontribusi paling rendah adalah Retribusi tempat penginapan/Villa. Ini dapat berarti wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng rata-rata wisatawan lokal yang tidak menginap.

2.1.3.3.2. Bidang Pertanian
2.1.3.3.2.1. Cakupan Bina Kelompok Petani

Pelayanan Urusan Pertanian tidak terlepas dari pembinaan kelompok tani, wadah kelompok tani menjadi sasaran utama pembangunan pertanian. Cakupan bina kelompok tani menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa Sarana dan Prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng melalui penyuluh pertanian. Adapun capaian Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2017-2021 Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 260. Bina Kelompok Petani Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pmda	Kelompok tani	920	957	879	910	892
2	Jumlah kelompok tani	Kelompok tani	953	957	981	910	892
	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	96.54	100.00	89.60	100.00	100.00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Katahanan Pangan, 2021

Pada tahun 2017, adanya kebijakan untuk melakukan pendataan atau registrasi ulang kelompok menjadi 953 Kelompok, dan yang terbina sebanyak 920 atau 96,54%. Tahun 2018 jumlah kelompok 957 dan 100% terbina, sedangkan pada tahun 2019, dari 981 Kelompok hanya terbina 879 Kelompok atau 89,60%, rendahnya capaian 2019 ini karena banyaknya kelompok terdaftar yang sudah tidak aktif. Pada tahun 2020, jumlah kelompok berkurang menjadi 910 Kelompok, dan 100% terbina. Jumlah kelompok Kembali berkurang sebanyak 892 dengan 100% pembinaan di tahun 2021. Fluktuasi capaian cakupan bina kelompok petani ini sangat bergantung pada ketersediaan tenaga penyuluh, updating data kelompok serta keaktifan kelompok tani itu sendiri.

2.1.3.3.3. Bidang Perdagangan
2.1.3.3.3.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Neraca perdagangan atau balance of trade (BoT) ialah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Net exports, ekspor netto atau ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian





orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal.

Pertumbuhan domestik yang tinggi biasanya meningkatkan permintaan barang impor. Akibatnya, ekspor bersih menurun, ceteris paribus. Barang domestik yang lebih mahal membuat barang asing lebih kompetitif bagi konsumen domestik. Permintaan impor meningkat karena lebih banyak konsumen lebih memilih barang asing. Di pasar Regional dan Internasional, barang domestik juga kurang kompetitif, sehingga mengurangi permintaan mereka.

Apresiasi mata uang mengurangi ekspor neto. Impor meningkat karena barang asing lebih murah untuk konsumen dalam negeri dan ekspor menurun karena barang dalam negeri lebih mahal untuk orang asing. Disamping itu biaya produksi memiliki implikasi untuk harga jual. Biaya produksi yang lebih rendah membuat barang dan jasa dalam negeri lebih murah. Ini akan menyebabkan peningkatan ekspor neto karena barang-barang domestik relatif lebih kompetitif.

Hambatan perdagangan seperti kuota impor, standar keselamatan, lisensi impor, persyaratan konten lokal, dll. mempengaruhi neraca perdagangan suatu daerah. Ekspor mendorong produksi dalam negeri meningkat. Sementara itu, impor merusak produksi dalam negeri karena pasokannya berasal dari luar negeri. Demikian juga di Kabupaten Soppeng masih tingginya nilai import perdagangan disebabkan masih terbatasnya jumlah jenis komoditi dan jumlah produksi perdagangan antar daerah/ekspor, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk-produk industri dari luar

Tabel 2. 261. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Us \$	-542,197.15	-378,912.76	-572,571.90	-468,970.00	-296,270.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Dari tabel di atas terlihat jika Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun adalah defisit. Hal ini menunjukkan bahwa nilai import lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Pada tahun 2017 nilai defisit berada pada angka -542.197,15. Bertambahnya import barang yang diiringi dengan kenaikan nilai ekspor membuat defisit ekspor bersih perdagangan semakin menurun pada tahun 2018 yakni pada nilai -378.912,76. Namun pada tahun 2019 nilai defisit semakin naik hingga -572.571,90. Kemudian di tahun 2020 penurunan defisit sebesar -468,970.00. kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -96,270.00.

Salah satu potensi sektor penyumbang nilai ekspor di Kabupaten Soppeng adalah sutera. Persuteraan alam memiliki prospek yang baik sebagai komoditas ekspor maupun substitusi impor. Namun perkembangan industri persuteraan alam di Kabupaten Soppeng cenderung lambat dan kurang merespon potensi tersebut. Ketersediaan bibit ulat sutera yang masih impor dari Cina sehingga ketersediaan kokon (sektor hulu) lebih lambat dibandingkan kebutuhan. Demikian juga perkembangan impor lebih besar dibandingkan dengan perkembangan ekspor produk-produk sutera.





2.1.3.3.3.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, menunjukkan jumlah cakupan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok pedagang (informal). Pedagang informal dalam hal ini adalah kelompok pedagang pasar. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah pembinaan terhadap kelompok pedagang utamanya kelompok Pedagang Pasar. Perhatian pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang cukup besar telah dioptimalkan melalui adanya kegiatan Revitalisasi 8 unit sarana dan prasarana perdagangan (pasar) di Kabupaten Soppeng. Optimaliasasi sarana perdagangan berupa pasar semi tradisional dengan diaktifkannya kembali Pasar Lolloe pada tahun 2018. Dengan bertambahnya sarana perdagangan maka akses kelompok pedagang untuk memasarkan dagangannya semakin meningkat. Program revitalisasi melalui Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan sharing APBD merupakan program revitalisasi Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Pembinaan pedagang pasar oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng juga meliputi pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Hal ini untuk memastikan barang beredar dapat sesuai dengan parameter pengawasan dan para pedagang mengetahui dan menyadari hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi barang yang tidak terdistorsi atau tercampur dengan barang yang rusak/kadaluwarsa, tidak terdaftar, atau hal yang menurunkan kualitas lainnya, ketika sudah beredar di pasar. Termasuk pengawasan untuk menjaga ketersediaan dan menjaga stabilitas harga barang pokok serta tertib niaga.

Kinerja cakupan bina kelompok pedagang dihitung dari Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dibagi dengan jumlah kelompok pedagang/uasaha informal, berikut adalah data cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2017-2021.

Tabel 2. 262. Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pedagang	17	17	18	18	18
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok Pedagang	17	17	18	18	18
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Dari tabel di atas terlihat jika jumlah cakupan bina kelompok pedagang selama tahun 2017-2021, cenderung stagnant dari tahun ke tahun dan tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017





Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda di Kabupaten Soppeng adalah 17 kelompok pedagang atau 100 persen dari target sebanyak 17 kelompok pedagang pasar, dan tahun 2018 tidak mengalami perubahan jumlah dari tahun sebelumnya. Peningkatan pembinaan pedagang. Peningkatan jumlah binaan cakupan kelompok pedagang baru menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 yakni 18 kelompok pedagang informal, demikian halnya tahun 2021 jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tetap berjumlah 18 kelompok

Salah satu faktor yang mendorong penggunaan fasilitas sarana perdagangan/pasar semi tradisional adalah bahwa peran pasar disamping sebagai sumber retribusi daerah, tempat pertukaran barang, pusat pengembangan ekonomi rakyat, pusat perputaran uang daerah, pasar juga sebagai salah satu tempat lapangan pekerjaan.

2.1.3.3.4. Bidang Perindustrian

2.1.3.3.4.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah industri pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan jumlah keseluruhan industri pengrajin. Jumlah kelompok binaan terhadap Industri Kecil dan Menengah IKM yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan.

Grafik 2. 31. Sentra Usaha Industri



Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal ini Dinas PPK dan UKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah berhasil membentuk dan membina sentra industri pada 5 Kecamatan. Sentra ini sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.

Berikut adalah data kinerja cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2017-2021:





Tabel 2. 263. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pengrajin	29	39	50	62	82
2	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok Pengrajin	58	78	100	124	144
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	50	50	50	50	56,94

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2021

Persentase cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan angka stagnan yakni sebesar 50% selama kurun waktu 2017 s.d 2020, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 56,94% dengan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda sebanyak 82 kelompok dari 144 jumlah kelompok pengrajin.

Perkembangan Industri kerajinan di Kabupaten Soppeng memang sangat rendah, namun industri kerajinan senantiasa mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan tetap dilakukan pembinaan sehingga akan terus berkembang. Lambatnya pertumbuhan industri kerajinan disebabkan karena animo masyarakat yang masih kurang terhadap industri kerajinan karena mereka beranggapan bahwa perputaran ekonomis industri pangan lebih cepat dari industri kerajinan yang butuh kreatifitas dan keahlian khusus.

Komitmen pemerintah untuk selalu mengembangkan Industri Kecil dan Menengah diantaranya melalui pemberian kemudahan izin usaha dan pembinaan kepada Industri Kecil, penyusunan kebijakan industri terkait dengan industri penunjang, pelatihan, pembinaan dan bantuan alat dalam bentuk pinjam pakai (bantuan sarpras untuk IKM tidak dilanjutkan karena terkendala oleh kebijakan nasional tentang pemberian hibah kepada masyarakat), serta pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Peluang dan potensi pengembangan industri kerajinan di Kabupaten Soppeng adalah industri kerajinan/barang dari kayu, rotan, bambu, serat, dan industri sutera, industri olahan pertanian dan perkebunan (ecoprint) karena bahan baku cukup banyak namun persoalannya sangat sedikit masyarakat kita yang mau menggeluti industri kerajinan karena proses perputaran ekonominya cukup lambat dan pemasarannya masih terbatas.

2.1.3.3.5. Bidang Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.5.1. Produksi perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Soppeng, meliputi perikanan tangkap di perairan umum dan perikanan budidaya dikolam dan budidaya ikan di sawah (minapadi). Berikut tabel Kontribusi Produksi Perikanan terhadap Total Produksi Tahun 2017-2021 :

Tabel 2. 264. Produksi Perikanan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Ikan	Ton	5,381.21	2,600.70	3,120.90	3,383.72	3,425.70
2	Target Daerah	Ton	3,000	3,300	3,630	3,993	3,418





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Produksi Perikanan	%	179.37	78.81	85.98	84.74	100.24

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2021

Berdasarkan data produktivitas tersebut diatas, pada tahun 2017 sebesar 5.381,21 ton dan menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 2.600,70 Ton dan mengalami peningkatan menjadi 3.120,90 ton pada tahun 2019, dan Tahun 2020 menjadi 3.384,72 Ton dan 2021 mengalami peningkatan sebanyak 3.425,70 ton Terjadinya penurunan drastis pada tahun 2018 disebabkan berkurangnya populasi ikan kegiatan akibat puncak revitalisasi Danau Tempe dan menyerap tenaga kerja dari kalangan nelayan lokal sehingga aktifitas penangkapan ikan berkurang yang berujung pada penurunan produksi tangkapan. Namun pada tahun 2019 sampai 2021 terjadi peningkatan dikarenakan selesainya kegiatan revitalisasi dan kembali normalnya aktifitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan restocking (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi.

2.1.3.3.5.2. **Konsumsi Ikan**

Konsumsi Ikan merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam penentuan Indikator Kinerja Utama di sektor kelautan dan perikanan, karena data konsumsi ikan merupakan data yang menjadi acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional Berikut tabel kontribusi konsumsi ikan Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 265. Konsumsi Ikan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	7,605,340	7,253,700	7,884,130	8,624,230	8,678,000
2	Target Daerah	Kg	7,200,000	7,250,000	7,300,000	7,350,000	8,466,000
	Konsumsi Ikan	%	105.63	100.05	108	117.34	102.50

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2021

Berdasarkan data diatas, konsumsi ikan pada tahun 2017 sebesar 7.605.340 kg dan menurun menjadi 7.253.700 kg pada tahun 2018, dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 7.884.130 kg, dan Tahun 2020, meningkat menjadi 8.624.230 kg, dan Kembali meningkat pada tahun 2021 sebanyak 8.678.000 Kg atau mencapai 102,50% terjadinya peningkatan tersebut dikarenakan konsumsi ikan terus terjadi disebabkan meningkatnya produksi perikanan dari hasil tangkapan dan budidaya perikanan dari tahun ke tahun.

2.1.3.3.5.3. **Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Pelayanan Urusan Perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok Nelayan. Cakupan bina kelompok Nelayan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor Perikanan tangkap. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa Sarana dan Prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Peternakan, kesehatan





Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng melalui penyuluh perikanan. Adapun capaian Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2017-2021 Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 266. Bina Kelompok Nelayan Tahun 2017-2021

NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok Nelayan	0	0	5	0	3
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok Nelayan	36	37	39	44	30
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	0	0	12.82	0	10

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan, 2021

Pada Tahun 2017 – 2020 Jumlah Kelompok Nelayan terus meningkat tahun 2017 sebanyak 36 kelompok dan tahun 2020 menjadi 44 kelompok dan 2021 mengalami penurunan menjadi 30 kelompok Pada dasarnya capaian pembinaan nelayan dari tahun ke tahun yang meliputi pembinaan kunjungan, pelatihan serta fasilitasi kelompok nelayan tercapai 100% namun yang menjadi indikator Bina nelayan yaitu Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda dimana ketersediaan anggaran untuk bantuan Hibah kepada Masyarakat nelayan tidak sebanding dengan peningkatan kelompok nelayan dan jumlah terbatas setiap tahunnya serta jumlah penyuluh perikanan yang sangat minim.

2.1.3.3.5.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sebanyak 5063,2 ton dan menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 2.235,9 ton dan mengalami peningkatan menjadi 2.703,1 ton pada tahun 2019, Tahun 2020 menjadi 2.957,90 ton, meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 2.989,10 ton Terjadinya penurunan drastis pada tahun 2018 disebabkan berkurangnya populasi ikan akibat puncak kegiatan revitalisasi Danau Tempe dan menyerap tenaga kerja dari kalangan Nelayan lokal sehingga aktifitas penangkapan ikan berkurang yang berujung pada penurunan produksi tangkapan. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan dikarenakan selesainya kegiatan revitalisasi dan kembali normalnya aktifitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan restocking (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi.

Tabel 2. 267. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	5063.2	2235.9	2.703.1	2,957.90	2,989.10
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	5381.21	2600.7	3120.9	3,383	3,426
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	94.09	85.97	86.61	87.42	87.26

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan, 2021





2.1.3.3.5.5. *Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman*

Berdasarkan data, Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman cenderung tetap dikarenakan belum diketahui cara penghitungan potensi hasil tangkapan secara keseluruhan dan diperlukannya data awal terkait potensi sumberdaya ikan yang ada di perairan umum yang meliputi Danau, Sungai dan Rawa secara keseluruhan dan perlu dilakukan penghitungan MSY (pendugaan Stok Ikan di Perairan) per jenis ikan di perairan.

Tabel 2. 268. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	5,063.20	2,235.90	2,703.10	2,957.90	2,989.10
2	80% dari tangkapan maksimum lestari	Ton	4,050.56	1,788.72	2,162.48	2,366.32	2,391.28
	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	%	125	125	125	125	125

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2021

2.1.3.3.5.6. *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*

Berdasarkan data yang tersedia, Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap total luas perairan teritorial cenderung tetap dikarenakan Luas areal penangkap dan kawasan lindung perairan tidak mengalami perubahan.

Tabel 2. 269. Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kawasan lindung perairan	Ha	413	413	413	413	413
2	Total luas perairan teritorial	Ha	3000	3000	3000	3000	3000
	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Poin	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2021

2.1.3.4. *Urusan Penunjang Urusan*

2.1.3.4.1. *Urusan Perencanaan Pembangunan*

2.1.3.4.1.1. *Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA*

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat





penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumberdaya daerah. Karena RPJPD adalah salah dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010.

Tabel 2. 270. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

2.1.3.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dengan mengacu pada Dokumen RPJPD selanjutnya diturunkan kedalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD periode tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2. 271. Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan-RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

2.1.3.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen tersebut disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 272. Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021





2.1.3.4.1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen yang berisi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Namun, karena sebagian besar data sudah tidak sesuai sehingga dokumen RTRW Kabupaten Soppeng perlu dilakukan peninjauan Kembali.

Tabel 2. 273. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

2.1.3.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kabupaten Soppeng kedalam RKPD dapat dilaksanakan dengan persentase 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2. 274. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	149	149	149	159	111
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	149	149	149	159	111
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

2.1.3.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan





peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Soppeng dari tahun 2017 – 2021 dapat dilaksanakan dengan persentase 100% setiap tahunnya.

Tabel 2. 275. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2017-2021

NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program	2,425	1,661	1,281	1,34	111
2	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	2,425	1,661	1,281	1,34	111
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

2.1.3.4.1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten). rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, serta acuan dalam administrasi pertanahan. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Soppeng secara garis besar dapat dikatakan telah sesuai 100%. Namun, data pada dokumen RTRW masih sangat umum, tidak spesifik dan perlu di update sehingga dokumen RTRW tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali.

2.1.3.4.2. Urusan Keuangan

2.1.3.4.2.1. Persentase SILPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SiLPA dari Total APBD pada Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. SiLPA merupakan dana sisa yang hanya boleh digunakan, dalam konteks pembiayaan yang fungsinya untuk menutupi defisit anggaran pada pembiayaan. Pemerintah Kabupaten





Soppeng dalam penggunaan SiLPA selalu mengoptimalkan pada perubahan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 276. Persentase SILPA Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Total SILPA	Rp	111,780,078,528.82	108,188,097,254.52	119,890,735,353.61	63,500,223,512.94	160,306,659,677.53
2	Total APBD	Rp	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,251,860,939,169.68	1,307,375,584,577.00
	Persentase SILPA	%	9.05	8.86	9.35	5.07	12.26

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.1.3.4.2.2. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan, yaitu adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SILPA dari Total APBD (Pendapatan) sepanjang tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. SiLPA yang ada dalam struktur APBD merupakan asumsi yang dipengaruhi oleh target penerimaan dan belanja yang mengakibatkan APBD berada pada kondisi surplus/defisit. Dalam penyusunan APBD kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan SiLPA selalu berasumsi null, sehingga terjadi keseimbangan antara pembiayaan dan belanja.

Tabel 2. 277. Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Total SILPA	Rp	111,780,078,528.82	108,188,097,254.52	119,890,735,353.61	63,500,223,512.94	160306659677,53





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Total APBD	Rp	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,202,470,518,866.01	1307375584577,00
	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	9.05	8.86	9.35	5.28	12,26

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.1.3.4.2.3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana

program/kegiatan yang tidak terlaksana tahun 2017 sebanyak 5 program dan 72 kegiatan jumlah ini meningkat pada tahun 2020 sebanyak 12 program dan 233 kegiatan sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 2 program dan 19 kegiatan. masih terdapat beberapa kegiatan pada APBD yang tidak terlaksana dengan berbagai pertimbangan dan alasan seperti gagal kontrak dan sebagainya. sedang untuk tahun 2021 masih dalam progres penyelesaian.

Tabel 2. 278. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Program	5	1	2	12	2
2	Total Program dalam APBD	Program	305	318	324	233	175
3	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Kegiatan	72	23	34	220	19
4	Total Kegiatan dalam APBD	Kegiatan	1352	1224	1252	1289	475
	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana						
	Persentase Program yang Tidak Terlaksana	%	1.64	0.31	0.62	5.15	1.14
	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	5.33	1.88	2.72	17.07	4.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.1.3.4.2.4. Persentase belanja pendidikan (20%)

Salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD adalah belanja Pendidikan. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, dan sebagainya. Alokasi dana untuk belanja pendidikan di Kabupaten Soppeng telah sesuai Mandatory spending dalam





tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), dengan pengalokasian belanja pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. untuk 2017 mencapai 30,32% dan Tahun 2020 mengalami penurunan Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 370.804.822.895,07 dari Total APBD Rp.1.298.262.158.701,95 atau 28,56% sedangkan tahun 2021 jumlah alokasi Pendidikan sebesar Rp409.110.770.323.00 dari jumlah total APBD sebesar Rp1.307.375.584.577.0 atau mencapai 31,29%.

Hal ini disebabkan oleh Adanya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Akan tetapi untuk anggran Pendidikan Penurunan tersebut masih dalam kerangka persentase batas minimal 20%.

Tabel 2.279. Persentase belanja pendidikan (20%) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Rp	374,360,240,894.00	350,748,210,585	384,483,937,296.00	370,804,822,895.07	409,110,770,323.00
2	Total APBD	Rp	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95	1,307,375,584,577.00
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	30.32	28.72	30.00	28.56	31.29

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.1.3.4.2.5. Persentase belanja kesehatan (10%)

Sama halnya dengan Pendidikan, Kesehatan juga merupakan salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD dengan persentase sebesar minimal 10 %. Di Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, bahkan mengalami peningkatan sejak 2017 sampai 2021, dari 17,18 % tahun 2021 sudah mencapai 34,67%.





Tabel 2. 280. Persentase belanja kesehatan (10%) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Rp	212,145,677,240.00	227,082,865,711.00	237,425,771,752.00	258,035,107,551.50	323.275.739.004.00
2	Total APBD	Rp	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95	1.307.375.584.577,00
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	17.18	18.60	18.53	19.88	34.67

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.1.3.4.2.6. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung pada tahun 2017 dan 2019, berdasarkan data, persentase Belanja langsung lebih tinggi daripada belanja tidak langsung. Namun di tahun 2018,2020 dan tahun 2021 persentase belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 281. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tahun 2017-2021

NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Belanja Langsung	Rp	617,974,795,821.00	588,769,081,570.00	648,422,088,879.00	564,956,594,707.58	17.024.246.335,00





NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	616,906,529,783.00	632,397,173,129.82	633,219,544,958.52	733,305,563,994.37	128.494.827.083,00
3	Total APBD	Rp	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95	1.307.375.584.577,00
Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung							
	Persentase Belanja Langsung	%	50.04	48.21	50.59	43.52	1.30
	Persentase Belanja Tidak Langsung	%	49.96	51.79	49.41	56.48	9.83

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.1.3.4.2.7. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa

Alokasi belanja bagi hasil Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 awalnya adalah Rp1.916.133.440,00 atau 0,12% dari Total APBD dan namun pada tahun 2021 Bagi Hasil Kabupaten ke Desa meningkat menjadi Rp2.574.554.592,00 atau 0,20% dari Total APBD, hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya dana transfer dari pusat dan PAD sehingga berpengaruh terhadap persentase dana bagi hasil ke desa.

**Tabel 2.282. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Rp	1,916,133,440.00	2,472,902,412.00	2,549,749,931.00	2,723,530,114.00	2,574,554,592.00
2	Total APBD	Rp	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95	1,307,375,584,577.00





NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	0.16	0.20	0.20	0.21	0.20

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.1.3.4.2.8. Penetapan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat berkomitmen dan memperhatikan tahapan penetapan APBD agar tepat waktu, dengan demikian pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu pula. Hal ini didukung oleh Adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, adanya sanksi tegas apabila APBD terlambat ditetapkan, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan dikeluarkan tepat waktu, dan transparansi dalam proses penyusunan APBD, serta adanya analisis standar belanja (ASB) untuk menilai kewajaran belanja.

Tabel 2. 283. Penetapan APBD Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	(Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.1.3.4.3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

2.1.3.4.3.1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai negeri sipil untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan Latihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Soppeng setiap tahun menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data dari BPKSDM rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam tahun 2021 sebanyak 19,29 JP mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 sebanyak 17 JP meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 15 JP di tahun 2019, 15 JP di tahun 2018, 11 JP di tahun 2017 Pendidikan dan pelatihan tersebut termasuk Diklat yang diikuti PNS di luar dari Diklat yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Soppeng.





Tabel 2. 284. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	11 JP	15 JP	15 JP	17 JP	19,92 JP

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

2.1.3.4.3.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat tersebut adalah diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut merupakan Diklat Wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tertentu. pada tahun 2017 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 400 ASN atau 7,55 % dari Total ASN sebanyak 5.300 ASN. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2020 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 423 orang atau 8,50 %, dari total ASN sebanyak 4975 ASN dan 2021 mengalami penurunan dengan capaian 6,66% dengan jumlah ASN sebanyak 329 ASN dari jumlah total ASN sebanyak 4.941 ASN.

Tabel 2. 285. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	ASN	400	340	340	423	329
2	Jumlah total ASN	ASN	5300	5122	5162	4975	4941
	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	7,55	6,64	6,59	8,50	6,66

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

2.1.3.4.3.3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Diklat kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu, Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Di Kabupaten Soppeng, Pada tahun 2020, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural telah mencapai 88,54 % dan tahun 2021 sebesar 83,13% atau sebanyak 404 ASN yang telah mengikuti diklat struktural.





Tabel 2. 286. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	ASN	479	584	623	626	404
2	Jumlah Total Jabatan	Jabatan	776	732	708	707	486
	Presentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	61.73	79.78	87.99	88.54	83,13

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

2.1.3.4.3.4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. pimpinan tinggi di Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. Pengisian JPT harus melalui tahapan Perencanaan, Pengumuman Lowongan, Pelamaran, Seleksi, Pengumuman Hasil seleksi dan terakhir adalah Penetapan dan Pengangkatan. Di Kabupaten Soppeng, pada tahun 2020 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah sebanyak 31 orang dan 2021 sebanyak 33 orang.

Tabel 2. 287. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	27	30	26	31	33

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

2.1.3.4.3.5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2017, jumlah jabatan administrasi di Kabupaten Soppeng sebanyak 1950 namun pada tahun 2021 jumlah jabatan administrasi hanya sebanyak 1880. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perampingan kelembagaan.

Tabel 2. 288. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Administrasi	1950	1887	1999	1994	1880

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021





2.1.3.4.3.6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam UU ASN merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng, jumlah JFT sebanyak 3.277 orang sedangkan pada tahun 2021 menurun hanya sebanyak 3.091 orang.

Tabel 2. 289. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Fungsional	3.277	3.205	3.139	2.950	3.091

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

2.1.3.4.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.1.3.4.4.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Soppeng dari tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah sebesar 100%. Namun dalam perumusan rencana kelitbangan kedepan perlu mengkoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan kelitbangan dengan stakeholder agar lebih terarah guna menjawab dinamika permasalahan dan mendukung pelaksanaan kelitbangan satu pintu, serta perlu penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang berorientasi pada dukungan kelitbangan di Pusat dan Daerah.

Tabel 2. 290. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

2.1.3.4.4.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 telah dilakukan beberapa penelitian dan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Soppeng, diharapkan hasil-hasil Litbang dapat segera dimanfaatkan oleh para stakeholder terkait sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

2.1.3.4.4.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Belum adanya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah disebabkan oleh belum





disusunnya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sehingga data terkait persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tahun 2017-2020 masih 0%, sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 23,53%

Tabel 2. 291. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	OPD	0	0	0	0	8
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	0	0	0	0	34
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0	0	0	0	23,53

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

2.1.3.4.4.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2017-2020 masih 0%. Dan untuk tahun 2021 persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 23,53%.

Tabel 2. 292. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	OPD	0	0	0	0	8
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	0	0	0	0	34
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0	0	0	0	23.53

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021





2.1.3.4.5. **Urusan Pengawasan**

2.1.3.4.5.1. **Persentase tindak lanjut temuan**

Data Presentase tindak lanjut temuan merupakan proporsi data jumlah temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan. Berdasarkan data capaian dapat dilihat mengalami penurunan yang signifikan, pada thun 2017 jumlah persentase temuan yang ditindak lanjuti mencapai 61,97% atau sebanyak 176 temuan dari jumlah total temuan sebanyak 286 temuan dan tahun 2021 mencapai 59,54% atau sebanyak 156 temuan dari jumlah total temuan sebanyak 262 temuan

Hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah total temuan yang juga makin berkurang. Terhadap Persentase tindak lanjut temuan, dapat dilihat bahwa tidak tercapainya target disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi antara lain pihak terkait temuan telah pensiun/meninggal /tidak diketahui alamatnya serta sulitnya penanganan tindak lanjut bagi pejabat/ASN terkait temuan yang telah ditugaskan ke SKPD lain, selain itu dikarenakan kurangnya respon individu atau skpd atas laporan hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan terhadap temuan yang ada.

Tabel 2. 293. Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Temuan	176	253	98	130	156
2	Jumlah total temuan	Temuan	284	352	146	228	262
	Persentase tindak lanjut temuan	%	61.97	71.88	67.12	57.02	59,54

Sumber : Inspektorat Daerah, 2021

2.1.3.4.5.2. **Persentase pelanggaran pegawai**

Data Presentase Pelanggaran Pegawai merupakan proporsi data jumlah ASN yang dikenakan sanksi terhadap jumlah total ASN. Berdasarkan data capaian dapat dilihat mengalami pergerakan yang fluktuatif, mengalami penurunan nilai di Tahun 2017 dan 2018, namun mengalami sedikit lonjakan di Tahun 2019 dan kembali turun di tahun 2020 dengan nilai 0,17%, sedangkan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,55% namun pada dasarnya Pelanggaran pegawai yang dimaksud dalam hal ini baik dari segi kedisiplinan ataupun ASN yang terlibat dengan masalah hukum seperti pelanggaran terhadap hal keuangan dan belanja atas kegiatan yang dilakukan. Adanya jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami peningkatan pada tahun 2019 didominasi pelanggaran kedisiplinan berupa kehadiran.

Tabel 2. 294. Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	ASN	10	9	17	9	27
2	Jumlah total ASN	ASN	5300	5122	5165	5192	4935
	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0.19	0.18	0.33	0.17	0,55

Sumber : Inspektorat Daerah, 2021





2.1.3.4.5.3. Jumlah temuan BPK

Data indikator Jumlah Temuan BPK merupakan data yang diperoleh dari Berita Acara Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dikeluarkan setiap semester oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan, dimana jumlah temuan dalam hal keuangan yaitu terkait laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat, kinerja terkait aspek ekonomis, efektif, efektifitas penggunaan anggaran dan temuan dari hasil pemeriksaan tujuan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di Kabupaten Soppeng, Sebagian besar temuan BPK dapat ditindaklanjuti walaupun masih terdapat beberapa temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel 2. 295. Jumlah Temuan BPK Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	8	4	14	12	12

Sumber : Inspektorat Daerah, 2021

2.1.3.4.6. Urusan Sekretariat Dewan

2.1.3.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan fungsinya dibagi tugas dalam bentuk organisasi kerja kecil berupa alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna. Alat kelengkapan dewan tersebut memiliki rencana kerja tahunan yang dituang dalam Rencana Kerja DPRD setiap tahun anggaran. DPRD Soppeng mulai pada tahun 2017 hingga 2021 telah memiliki Rencana Kerja Tahunan DPRD.

Tabel 2.296. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2021

2.1.3.4.6.2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). dan fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan





peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Soppeng. Program kerja dalam melaksanakan Fungsi DPRD Soppeng tersebut selalu tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Soppeng mulai tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 2.297. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2021

2.1.3.4.6.3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). dan fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD Soppeng.





Tabel 2.298. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan petani baik berupa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi usaha pertanian yang dilakukan. Berikut capaian Nilai Tukar Petani di Kabupaten Soppeng 2017-2021 :

Tabel 2.299. Nilai Tukar Petani Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks yang diterima Petani	Poin	102.93	100.00	100.00	107.67	112.26
2	Indeks yang dibayar Petani	Poin	101.10	97.98	96.22	103.34	108.83
	Nilai Tukar Petani	Poin	101.81	102.06	103.93	104.4	103.15

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Untuk NTP Tahun 2017-2021 mencapai diatas 100, yang artinya petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Soppeng tahun 2017 mencapai 101,81 poin, dan mengalami penurunan menjadi 102,06 pada tahun 2018 serta menjadi 103,93 pada tahun 2019. Adapun nilai tukar petani pada tahun 2020 meningkat menjadi 104,4 sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 103,15 poin, Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan nilai produksi hasil pertanian (yang diterima) petani baik karena adanya peningkatan produksi maupun harga jual dari komoditi hasil pertanian. Nilai Tukar Petani bisa terus meningkat diatas 100, jika terus dipacu melalui peningkatan produksi dan peningkatan harga jual ditingkat petani.

2.1.4.2. Persetanse Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tingkat perkembangan desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di





desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

- Desa Swakarya; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Di Tahun 2021 terdapat 6 desa di Kabupaten Soppeng yang diklasifikasikan sebagai Desa Swasembada. Jumlah ini tentunya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang terdapat 3 desa swasembada. Desa dengan klasifikasi swasembada pada tahun 2021 yakni Desa Gattareng Toa, Desa Timusu, Desa Labae, Desa Paroto, Desa Baringeng, dan Desa Laringgi dengan mencatat capain 12,24%.

Tabel 2.300. Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa berswasembada	Desa	3	3	3	3	6
2	Jumlah desa	Desa	49	49	49	49	49
	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	6,12	6,12	6,12	6,12	12,24

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

2.1.4.3. Rasio Ketergantungan

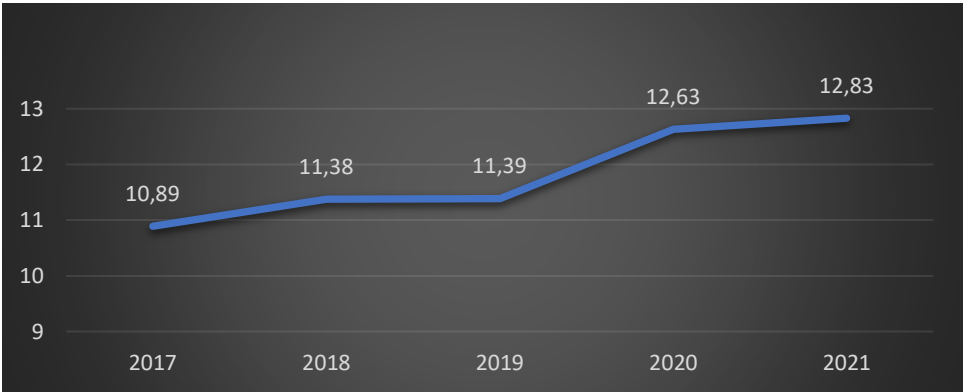
Angka Beban Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka Beban Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.





Grafik 2. 32. Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan agar dapat memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Soppeng sepanjang 2018- 2020 berdasarkan data dinas kependudukan dan capil konsisten mengalami penurunan yaitu sebanyak 46,41% pada 2018 dan menjadi 45,81% pada 2020. Peningkatan angka ketergantungan menjadi 46,65% pada tahun 2019 tentu menarik perhatian tersendiri apakah angka ketergantungan sudah mencapai titik terendah dan akan kembali meningkat pada tahun selanjutnya. Peningkatan angka ketergantungan ini setidaknya menjadi bahan evaluasi awal apakah bonus demografi di Kabupaten Soppeng benar-benar sudah dimanfaatkan atau sebaliknya akan berlalu begitu saja.

2.1.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.1.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 5 Tujuan pembangunan serta 11 Sasaran yang terdiri dari 6 indikator tujuan dan 18 indikator sasaran. Penetapan Tujuan, sasaran beserta indikator tersebut untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini capaian indikator tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.301. Target dan Capaian IKU Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak (T1)	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Nilai	85,87	84,09	97,93	85,87





Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	%	100	89,28	89,28	100
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	%	84	83,83	99,80	84
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) (T2)	IPM	Indeks	69,13	68,99	99,80	69,13
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	Indeks Pendidikan	Indeks	62,34	62,32	99,97	62,34
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	Indeks Kesehatan	Indeks	76,8	76,63	99,78	76,8
Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata (T3)	Indeks Gini	Indeks	0,395	0,406	97,29	0,395
	PDRB/Perkapita (Rp)	Rp	55.119.000	52.750.000	104,49	55.119.000
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	Pertumbuhan ekonomi (%)	%	5,80	6,15	106,03	5,80
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	4,4	3,92	112,24	4,4
Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	Angka kemiskinan (%)	Jiwa	7,15	7,53	94,95	7,15
Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah (T4)	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Indeks	69,45			69,45
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	61,63	69,45	112,69	61,63
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya terhadap PDRB	Milyar Rupiah	280,213	275,5	98,32	280,213
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Angka Kriminalitas (Kasus)	Kasus	86	92	93,94	86
Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif (T5)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks / kategori	50,53/CC	CC	100	50,53/CC
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	Skor/Status Kinerja	3,9/Tinggi	3,7/Tinggi	94,87	3,9/Tinggi
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai Indeks	B	A	100	B
	Opini laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	100	WTP
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Skor/Status Kinerja	60 (B)	62 (B)	103,33	60 (B)
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	30.00-35.00 (inovatif)	35,48	100,00	30.00-35.00 (inovatif)
Memelihara daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup (T6)	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Nilai / Kategori	Belum terlampaui	Belum terlampaui	100,00	Belum terlampaui





Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (11)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	131,20	131,20	100	131,20
	Indeks Gas Rumah Kaca (IRK)	Ton Co2	36238	36240	99,99	36238
	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	Indeks	65,83	69,52	105,61	65,83

2.1.5.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 – 2021

Pada tahun 2021 terdapat beberapa kinerja Urusan pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah tercapai, belum tercapai dan telah melebihi target. Dimana sebanyak 115 indikator yang belum tercapai, sebanyak 71 indikator yang melampaui dan sebanyak 107 indikator yang sesuai dengan target. Selain itu beberapa indikator yang tidak memiliki target tetapi terdapat realisasi sebanyak 32 indikator juga terdapat indikator yang tidak ada. Selengkapnya pada table berikut:





Tabel 2.302. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	8,34	8,34	8,4	8,5		8,29	8,11	7,69	2,19	6,15		
1.2	Laju Inflasi		1,48	5,54	4-5	4-5		5,54	4,69	1,64	1,89	2,26		
1.3	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	39,5	42,16	44,82	47,47	55,12	39,19	44,12	48,18	50,1	52,75	<	Belum Tercapai
1.4	Indeks Gini		0,36	0,35	0,34	0,33	0,395	0,359	0,359	0,392	0,403	0,406	<	Belum Tercapai
1.7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%						91,71	91,55	92,75	91,28	92,47		
1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,67	67,32	67,99	68,66	69,13	66,67	67,6	68,26	68,67	68,99	<	Belum Tercapai
1.11	Angka melek huruf	%	99,64	99,7	99,76	99,82		99,64	99,62	99,62	87,51	87,83		
1.12	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)		7,42	7,55	7,73	7,92		7,42	7,63	7,74	7,81	7,82		
1.13	Angka usia harapan hidup (tahun)		68,72	68,82	68,92	69,02		68,72	69,02	69,43	69,65	69,81		
1.14	Persentase balita gizi buruk	%	0,015	0	0	0	0	0,015	0,015	0,008	0,015	0,024	<	Belum Tercapai
1.15	Prevalensi balita gizi kurang		0,11	0	0	0	0	1,35	3,45	3,31	2,56	3,46	<	Belum Tercapai
1.16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	97,14	100	100	100	=	Sesuai
1.17	Angka partisipasi angkatan kerja							60,84	63,64	57,47	57,05			
1.18	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	86	87	88	89		60,84	63,64	57,47	57,05	58,94		
1.19	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,71	2,61	2,48	2,36	4,40	2,71	2,66	3,53	4,42	3,92	>	Melampaui
1.20	Rasio penduduk yang bekerja	%						59,19	61,94	55,45		59,04		
1.25	Indeks Kepuasan Masyarakat									78,81 (Baik)	84,34 (Baik)	84,09 (Baik)		





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1.26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	10%	11%	12%	13%		10,89	11,38	11,39	13,17	12,83		
1.27	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	Sesuai
1.28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)							91,8	87,8	88,20%	93,3	75,8		
1.29	Penguatan cadangan pangan	ton	10	20	20	20		10	20	10	20	25,34		
1.30	Penanganan daerah rawan pangan		0	0	0	0		n.a	n.a	n.a	9,97			
1.31	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	%	27,74	28,85	29,74	30,62		27,74	27,58	25,49	25,75	14,27		
1.32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	11,18	11,5	12	12,5		11,18	12,45	18,48	22,93	20,68		
1.33	Produksi sektor pertanian (ton)		396,68	377,89	396,68	377,89		396.681,00	436.361,00	418.290,40	475.376	460.479		
1.34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,74	28,85	29,74	30,62		28,24	28,02	27,66	27,57	28,79		
1.35	Produksi sektor perkebunan (Ton)	ton	14.093	16.532	18.972	21.412		14.093,30	11.997,24	10.637,10	10.575,73	9.726,86		
1.36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
1.39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,9	2,79	3,68	4,57		1,59	1,65	1,72	1,64	1,74		
1.40	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	3,8	4,99	6,18	7,37		2,8	2,9	3,1	3,5	0,88		
1.41	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,13	12,72	14,31	15,9		14,33	14,53	14,98	14,07	14,40		
1.42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	9,19	10,32	11,45	12,58		10,35	10,12	10,17	9,98	9,93		
1.44	Pertumbuhan industri	%	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,4	0,53	0,83	>	Melampaui
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH													
2.1	Nilai tukar petani		101,81	102,65	103,49	104,33		101,81	102,06	103,93	104,4	103,15		
2.2	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6,13	6,14	6,15	6,16		6,12	6,12	6,12	6,12	12,24		
2.3	Rasio ketergatalungan		0,47	0,47	0,47	0,47		0,47	46,41	46,65	45,52	45,70		





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3	ASPEK PELAYANAN UMUM													
3,1	Layanan Urusan Wajib													
3.1.1	Pendidikan													
3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	51,99	70	100	100	100	48,67	51,08	47,62	64,07	65,75	<	Belum Tercapai
3.1.1.2	Angka Partisipasi kasar													
3.1.1.2 .1	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	85,07	98,85	100	100	100	97,05	99,17	96,86	96,99	99,38	<	Belum Tercapai
3.1.1.2 .2	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%					89,21	85,81	86,5	93,15	93,59	101,08	>	Melampaui
3.1.1.3	Angka Partisipasi Murni													
3.1.1.3 .1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	86,97	100	100	100	100	86,97	89,42	86,4	88,8	90,04	<	Belum Tercapai
3.1.1.3 .2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	74,18	100	100	100	100	74,18	74,99	68,44	69,86	65,07	<	Belum Tercapai
3.1.1.4	Angka Partisipasi Sekolah:													
3.1.1.4 .1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	86,97	100	100	100	100	86,97	99,17	86,4	96,63	107,22	>	Melampaui
3.1.1.4 .2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	74,18	100	100	100	100	74,18	86,5	68,44	79,02	82,38	<	Belum Tercapai
3.1.1.5	Angka Putus Sekolah:													
3.1.1.5 .1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,03	0	0	0	0	0,032	0,187	0,313	0,005	0,063	<	Belum Tercapai
3.1.1.5 .2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,12	0	0	0	0	0,12	1,51	1,26	0,03	0,106	<	Belum Tercapai
3.1.1.6	Angka Kelulusan:													
3.1.1.6 .1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	99,95	100	100	100	100	99,95	99,78	98,68	99,97	99,83	<	Belum Tercapai
3.1.1.6 .2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,98	100	100	100	100	99,98	98,7	97,77	99,91	99,91	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.1.7	Angka Melanjutkan (AM):													
3.1.1.7 .1	Angka Melanjutkan (AL) SD/ MI ke SMP/ MTs		87,6	100	100	100	100	87,6	100,14	103,86	103,58	102,41	>	Melampaui
3.1.1.7 .2	Angka Melanjutkan (AL) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	n.a	100	100	100	100	n/a	n/a	106,6	95,63	95,44	<	Belum Tercapai
3.1.1.8	Fasilitas Pendidikan:													
3.1.1.8 .1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	89,54	90	90,46	90,92	85,9	89,54	86,11	85,73	85,73	77,20	<	Belum Tercapai
3.1.1.8 .2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik						83,15	88,89	80,83	81,86	81,86	80,81	<	Belum Tercapai
3.1.1.9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar		52,38	52,38	52,38	52,38	125,8 2	95,52	100,31	100,45	103,38	107,43	<	Belum Tercapai
3.1.1.1 0	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar		12	20	20	20	9	8,53	7,36	7,22	8,49	12,08	>	Melampaui
3.1.1.1 1	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	99,64	100	100	100	88	8,53	7,36	7,22	87,51	87,83	<	Belum Tercapai
3.1.1.1 2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,31	94,31	97,31	100	100	99,06	90,99	88,25	93,53	94,44	<	Belum Tercapai
3.2.2	Kesehatan													
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		3,5	0	0	0	10,6	13,29	11,6	11,74	10,6	0,073	>	Melampaui
3.1.2.2	Angka kelangsungan hidup bayi		99,65	100	100	100	95	98,67	98,66	98,83	98,94	99,92	>	Melampaui
3.1.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		1,4	0	0	0	1,02	1,4	0,7	1	1,2	0,37	>	Melampaui
3.1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		9,79	0	0	0	7,5	9,79	11,24	8,72	7,64	0,37	>	Melampaui





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		1,65	0	0	0	1,2	1,05	0,72	1,34	1,21	0,73	>	Melampaui
3.1.2.6	Rasio posyandu per satuan balita		24,9	24,9	24,9	24,9	25	24,89	25,12	25,11	25,29	0,03	>	Melampaui
3.1.2.7	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk		0,25	0,26	0,27	0,28	0,27	0,25	0,27	0,27	0,27	0,26	<	Belum Tercapai
3.1.2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,004	0,004	0,004	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	=	Sesuai
3.1.2.9	Rasio dokter per satuan penduduk		0,298	0,298	0,414	0,414	0,41	0,21	0,25	0,34	0,41	0,45	>	Melampaui
3.1.2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,99	1	1	1	3,49	0,99	2,4	2,81	3,49	4,09	>	Melampaui
3.1.2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		71,93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		95,82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)		92,86	100	100	100	82,86	92,86	97,14	100	71,43	78,57	<	Belum Tercapai
3.1.2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		2,49	100	100	100	100	2,49	2,51	2,5	2,97	1,32	<	Belum Tercapai
3.1.2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		90,77	100	100	100	100	90,77	100	93,81	62,6	80,93	<	Belum Tercapai
3.1.2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		na	100	100	100	100	0	10,14	4,08	0	0	<	Belum Tercapai
3.1.2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		22,67	100	100	100	100	8,48	43,59	37,72	9,9	2,56	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.2.1 9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		62,55	100	100	100	100	62,55	56,84	59,97	36,25	25,98	<	Belum Tercapai
3.1.2.2 0	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		126	0	0	0	0	125,92	156,68	159,84	98,76	83,24	<	Belum Tercapai
3.1.2.2 1	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		3,31	0	0	0	0	3,31	3,39	2,95	0	0	=	Sesuai
3.1.2.2 2	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		62,55	100	100	100	100	62,55	56,84	59,97	36,25	25,98	<	Belum Tercapai
3.1.2.2 3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		43,3	100	100	100	100	27,63	92,7	88,13	0	96,55	<	Belum Tercapai
3.1.2.2 4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.2 5	Penderita diare yang ditangani		100	100	100	100	100	57,7	136,96	124,96	60,07	4,41	<	Belum Tercapai
3.1.2.2 6	Angka kejadian Malaria		4,42	0	0	0	0	4,14	0	0	0	0	=	Sesuai
3.1.2.2 7	Tingkat kematian akibat malaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.1.2.2 8	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.1.2.2 9	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	<	Belum Tercapai
3.1.2.3 0	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,0033	0	0	0	0	0,0033	0,0047	0,0004	0,00003	0,0055	<	Belum Tercapai
3.1.2.3 3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		26,27	100	100	100	100	26,27	100	100	80,11	9,84	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.2.3 4	Cakupan kunjungan bayi		93,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.3 5	Cakupan puskesmas		212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	=	Sesuai
3.1.2.3 6	Cakupan pembantu puskesmas		62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	=	Sesuai
3.1.2.3 7	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		87,97	100	100	100	100	87,97	89,88	89,51	77,03	100	=	Sesuai
3.1.2.3 8	Cakupan pelayanan nifas		90,9	100	100	100	100	94,91	101,34	98,09	85,1	100	=	Sesuai
3.1.2.3 9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		45,34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.4 0	Cakupan pelayanan anak balita		62,27	100	100	100	100	62,27	67,62	65,89	70,13	76,06	<	Belum Tercapai
3.1.2.4 1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.4 2	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	92,54	<	Belum Tercapai
3.1.2.4 3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		113,61	100	100	100	100	113,61	100	100	80,11	97,76	<	Belum Tercapai
3.1.2.4 4	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.4 5	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
3.1.3.1	Pekerjaan Umum:													
3.1.3.1 .1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,33	0,35	0,37	0,39	0,6	0,33	0,32	0,4	0,58	0,57	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.3.1 .2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk						0,0038	0,0037	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	=	Sesuai
3.1.3.1 .3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%					10	*)	*)	10,28	10,28	8,12	<	Belum Tercapai
3.1.3.1 .4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	32,61	35	37	39	58,45	32,61	31,84	39,65	58,4	57,32	<	Belum Tercapai
3.1.3.1 .5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%					48	48,12	47,46	47,12	47,12	47,12%	<	Belum Tercapai
3.1.3.1 .6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90,84	100	100	100	70	48,49	53,1	66,84	67,83	99,95	>	Melampaui
3.1.3.1 .7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%					54,27	55,42	54,66	54,27	54,27	54,21	<	Belum Tercapai
3.1.3.1 .8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun						1,79	*)	*)	14,38	1,79	1,79%	=	Sesuai
3.1.3.1 .9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%												
3.1.3.1 .10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%					65	74,53	77,51	79,37	62,06	65,310	>	Melampaui
3.1.3.1 .11	Rasio Jaringan Irigasi						0,044	-	-	-	0,022	0,022	<	Belum Tercapai
3.1.3.1 .12	Persentase penduduk berakses air minum		90,46	100	100	100	95	90,46	94,21	93,84	94,55	94,71	<	Belum Tercapai
3.1.3.1 .13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan		90,03	100	100	100	30	90,46	94,2	27,38	28,08	46,10%	>	Melampaui
3.1.3.1 .14	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan						1,25	*)	*)	68,89	68,89	22,15	>	Melampaui





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.3.1 .15	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		15,58	15,58	15,58	15,58	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	<	Belum Tercapai
3.1.3.1 .16	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk						0,002 5	1,94	2,02	2,02	2	2,068	>	Melampaui
3.1.3.1 .17	Penataan Ruang:													
3.1.3.1 .18	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		1651,0 5	1651,0 5	1651,0 5	1651,0 5	64	-	63,94%	63,94%	63,94%	3,27%	<	Belum Tercapai
3.1.3.1 .19	Ketaatan terhadap RTRW						32	100	100	100	100	97,96	>	Melampaui
3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
3.1.4.1	Rasio rumah layak huni		79,46	82,98	86,5	90,02	0,213 4	0,2	0,2	0,21	0,21	0,2110	<	Belum Tercapai
3.1.4.2	Rasio permukiman layak huni						0,98	na	0,99	0,98	0,98	Na		
3.1.4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni						88,21	81,55	84,54	85,73	88,06	88,21	=	Sesuai
3.1.4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau						65,19	63,58	63,34	63,84	65,19	65,19	=	Sesuai
3.1.4.5	Persentase pemukiman yang tertata	%					0,74	na	0,68	0,7	0,74	98,54	>	Melampaui
3.1.4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0007	0,0007	0,0005	0,0006	0,06	na	0,04	0,07	0,06	0,06	=	Sesuai
3.1.4.7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan						3,41	na	1,85	3,41	3,41	2,05	<	Belum Tercapai
3.1.4.8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU						63,84	63,58	63,34	63,84	63,84	100	>	Melampaui
3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
3.1.5.1	Cakupan petugas :													
3.1.5.1 .1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	38,3	147,74	147,74	147,74	129,10	>	Melampaui





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.5.1 .2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	71,23	72	73	74	75	71,23	74,22	77,97	100	100	>	Melampaui
3.1.5.2	Cakupan pelayanan :													
3.1.5.2 .1	bencana kebakaran kabupaten/kota		58,88	100	100	100	100	58,88	82,43	94,2	94,2	94,20	<	Belum Tercapai
3.1.5.2 .2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		71,43	80	100	100	100	71,43	56,86	65,73	90,7	64,44	<	Belum Tercapai
3.1.5.2 .3	Persentase Penegakan PERDA		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6	Sosial													
3.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	99,2	100	100	100	100	100	100	7	19	100	=	Sesuai
3.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	99,2	100	100	100	100	100	100	7	19	100	=	Sesuai
3.1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	99,2	100	100	100	100	100	100	7,4	19,18	100	=	Sesuai
3.1.6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0	100	100	100	50	0	0	0	40	100	>	Melampaui
3.1.6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0	<	Belum Tercapai
3.1.6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	155	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	67	100	100	100	100	0	0	0	0	100	=	Sesuai
3.2.6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	54	100	100	100	100	4,4	3	19,8	0,4	100	=	Sesuai
3,2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
3.2.1	Tenaga Kerja													
3.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.2.1.2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	30,61	38,18	47,89	57,6	25	30,61	28,71	2,74	0	61,32	>	Melampaui
3.2.1.3	Keselamatan dan perlindungan		4,06	3,9	4,35	4,8	8,5	7,43	8,84	8,16	0	9,82	>	Melampaui
3.2.1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	1,3	1,66	2,19	2,72	95	61,05	92,74	58,27	94,5	71,36	<	Belum Tercapai
3.2.1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	=	Sesuai
3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
3.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	11,61	11,75	12	12,25	12,5	11,54	11,58	12,97	12,1	13,79	>	Melampaui
3.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20	20	20	23,35	20	26,67	23,33	23,33	23,33	<	Belum Tercapai
3.2.2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	88,39	90	91	92	93	75,96	76,11	87,65	90,27	90,27	<	Belum Tercapai
3.2.2.4	Rasio KDRT		0,0035	0	0	0	0	0,0034	0,0053	0,0053	0,0035	0,0127	<	Belum Tercapai
3.2.2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%									-			
3.2.2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	na	0	0	0	98,13	98,11	89,66	88,6	89,1	89,10	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	=	Sesuai
3.2.2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	na	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	40	100	100	100	100	NA	3	100	100	100	=	Sesuai
3.2.2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	45,45	50	55	60	100	45	17	40	100	100	=	Sesuai
3.2.2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	17,39	0	0	0	16,67	0,64	<	Belum Tercapai
3.2.2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	=	Sesuai
3.2.2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		92,5	93,43	94,36	95,29	0,94	1,16	1,08	0,93	0,92	0,93	<	Belum Tercapai
3.2.2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,46	1,22	0,96	1,07	1,04	<	Belum Tercapai
3.2.2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	147,73	152,89	149,84	1,1	0,80	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.2.1 7	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		na				1,1	1,48	1,53	3	1,1	1,45	>	Melampaui
3.2.2.1 8	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		2,57	2,57	2,57	2,57	0,97	149,84	145,31	1,51	0,97	0,98	>	Melampaui
3.2.2.1 9	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	52,89	57,07	61,25	65,43	36,36	33,24	34,59	36,36	36,36	19,22	<	Belum Tercapai
3.2.3	Pangan													
3.2.3.1	Ketersediaan pangan utama	%	70,02	87,16	100	100	252	253	284	268	257	351,3	>	Melampaui
3.2.3.2	Ketersediaan energi perkapita	kkal	54291	10004 3	14579 5	19154	9438	9.438,00	11.179, 00	11.401, 00	10.775	11,995.00	>	Melampaui
3.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	gram	476,7	752,15	1027,6	1303,0 5	241,2 6	241,26	286,28	286,96	271,01	288.20	>	Melampaui
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	45,45	50	55	60	100	45,45	40	100	100	100	=	Sesuai
3.2.4	Pertanahan													
3.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	67,12	67,34	67,56	67,78		67,12	na	na	na	95,37		
3.2.4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	0	100	100	50	0	50	>	Melampaui
3.2.4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.5	Lingkungan Hidup													
3.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	=	Sesuai
3.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	ada	Ada	Ada	Tidak ada				Tidak ada	Tidak ada	=	Sesuai
3.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		1,63	1	1	1	72	1,63	1,51	0,86	70	60	<	Belum Tercapai
3.2.5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		91,71	91,71	91,71	91,71	91,5	91,71	90,46	93,67	91,42	93,87	>	Melampaui
3.2.5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		0,48	0,48	0,48	0,48	78,9	0,48	0,48	0,48	78,9	40,85	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	46,67	50	55	60	63%	100	100	100	61	66%	>	Melampaui
3.2.5.8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat						50	3	3	3	3	1	<	Belum Tercapai
3.2.5.9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.5.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	(tidak ada pengaduan)	100	100	100	=	Sesuai
3.2.5.11	Timbulan sampah yang ditangani	%	53	60	65	70	74	53,45	91,07	73,93	65,85	74,06	>	Melampaui
3.2.5.12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	94,53	95	96	97	24	12,69	30	32,3	22	9.62	<	Belum Tercapai
3.2.5.13	Persentase cakupan area pelayanan	%	18,53	18,53	33,33	33,33	27,2	26%	26%	26%	27,2	27%	<	Belum Tercapai
3.2.5.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	53,45	60	65	70	74	53,45	73,25	73,93	63,85	74,06	>	Melampaui
3.2.5.15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		75,95	78,85	81,75	84,65	75	75,95	73,55	75	75	0	<	Belum Tercapai
3.2.5.16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	=	Sesuai
3.2.5.17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	100	100	100	0	62,5	9,09	4,55	4,35	2,94	>	Melampaui
3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
3.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,97	1	1	1	0,99	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	=	Sesuai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran		0,96	1	1	1	0,98	0,96	0,98	0,99	0,98	0,98	=	Sesuai
3.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah		0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,37	0,46	0,51	0,61	0,64	>	Melampaui
3.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=	Sesuai
3.2.6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	96,93	100	100	100	100	96,93	99,72	99,84	99,33	99,27	<	Belum Tercapai
3.2.6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	94,35	95,6	96,85	98,1	99,35	94,35	99,02	97,67	97,16	97,67	<	Belum Tercapai
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
3.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89,80	<	Belum Tercapai
3.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	3	5	7	9	3	1	1	1	3	3	=	Sesuai
3.2.7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	0,2	0,2	0,2	0,2	4	1	1	1	4	3	<	Belum Tercapai
3.2.7.4	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	1	4	4	4	4	4,29	4,29	4,29	0%	0%	<	Belum Tercapai
3.2.7.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	27,48	28,36	29,24	30,12	34,40	27,12	33,55	33,55	34,34	34,40	=	Sesuai
3.2.7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%					80	-	-	-	80	80	=	Sesuai
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
3.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,13	0,1	0,07	0,13	>	Melampaui
3.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)		2,3	2,3	2,3	2,3	2,16	2,3	2,19	2,19	2,16	2,16	=	Sesuai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	41,18	61,77	82,36	100	100	100	100	100	100	29,41	<	Belum Tercapai
3.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	41,18	100	100	100	85	55,26	57,89	70,59	70,59	61,76	<	Belum Tercapai
3.2.8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/P erkada	na	0	1	1	1	0	0	0	0	0	<	Belum Tercapai
3.2.8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor					7	6	6	6	7	10	>	Melampaui
3.2.8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan						1	0	0	0	1	2	>	Melampaui
3.2.8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,36	1,6	1,31	1,36	1,15	<	Belum Tercapai
3.2.8.9	Ratio Akseptor KB	%	0,75	0,75	0,75	0,75	78,22	75,01	75,42	77,08	78,22	75,05	<	Belum Tercapai
3.2.8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	0,75	0,75	0,75	0,75	77,38	75,01	75,42	77,08	77,38	75,05	<	Belum Tercapai
3.2.8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)						16,66	27,69	7,99	25,99	16,65	16,65	<	Belum Tercapai
3.2.8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%					2,5	7,99	2,5	2,5	2,5	2,81	>	Melampaui





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.8.1 3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,67	13,74	13,74	13,74	12,78	15,67	15,3	13,93	12,78	13,98	>	Melampaui
3.2.8.1 4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14	18	22	26	19,19	14,17	16,26	18,53	19,19	2,97	<	Belum Tercapai
3.2.8.1 5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	33	38	43	48	29,83	33,32	32,58	29,73	27,83	33,25	>	Melampaui
3.2.8.1 6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	53	54	55	56	60,67	53,43	65,06	65,72	60,67	64,23	>	Melampaui
3.2.8.1 7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56	56	56	56	56,73	56,08	64,66	63,07	56,73	56,10	<	Belum Tercapai
3.2.8.1 8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	53	53	53	53	53	34,28	34,75	45,72	51,11	36,91	<	Belum Tercapai
3.2.8.1 9	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	=	Sesuai
3.2.8.2 0	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	jiwa	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,8	7,8	775%	7	7,75	=	Sesuai
3.2.8.2 1	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.2 2	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	83	83	83	83	83	63,85	58,25	56	78,6	47,87	<	Belum Tercapai
3.2.8.2 3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.2 4	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	20,65	21,98	23,31	24,64	25,97	20,65	20,73	18,61	24,36	77,61	>	Melampaui





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.8.2 5	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.2 6	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.2 7	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	0	0	0	n.a	n.a	n.a	n,a			
3.2.8.2 8	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	71	75	79	83	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.2 9	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	9,81	10,11	10,41	10,71	85,85	82,08	84,46	86,95	85,85	23,01	<	Belum Tercapai
3.2.8.3 0	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	na	17	17	17	20	n.a	0,65	2,6	19	20	=	Sesuai
3.2.8.3 1	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%					0,3	21,6	7,5	5,2	0,3	0,3	=	Sesuai
3.2.9	Perhubungan													
3.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1344	1344	1344	1344	1005	1344	1340	1340	1005	848	<	Belum Tercapai
3.2.9.2	Rasio ijin trayek		0,08	0,14	0,2	0,26	0,0008	0,001	0,001	0,001	0,0001	0,0002	<	Belum Tercapai
3.2.9.3	Jumlah uji kir angkutan umum		89	92	95	98	90	89	135	120	85	0	<	Belum Tercapai
3.2.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		-	-	-	-	2	3	3	2	2	2	=	Sesuai
3.2.9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	30	40	50	60	26,67	3,97%	4,14%	0,04%	0,09%	17,45	<	Belum Tercapai
3.2.9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,2	0,33	0,46	0,59	65	55,50%	34,78%	42,03%	65,72%	0,00%	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.9.7	Pemasangan Rambu- rambu						86	40%	58%	82%	34,72%	61,00%	<	Belum Tercapai
3.2.10	Komunikasi dan Informatika													
3.2.10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		575	575	575	575	675	0	600	675	675	675	=	Sesuai
3.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		66	66	66	66	65,88	N/a	65,88	65,88	65,88	66,15	>	Melampaui
3.2.10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	80	80	80	80	76	0	77	76	76	75%	<	Belum Tercapai
3.2.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		80	80	80	80	81,49	0	81,48	81	81,49	81,49	=	Sesuai
3.2.10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		60	60	60	60	61	0	61	61	61	61%	=	Sesuai
3.2.11	Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah													
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	89,71	90,26	90,81	91,36	89,25	89,71	90,15	79,9	80,58	90,36	>	Melampaui
3.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%					99,16	98,91	98,92	98,92	99,06	99,16	=	Sesuai
3.2.11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%					100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,91	98,92	98,93	98,94	99,16	98,91	98,92	98,92	99,06	99,16	=	Sesuai
3.2.12	Penanaman Modal													
3.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		11	15	20	25	46	11	17	22	40	63	>	Melampaui
3.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	RP	Rp22.086.500.000	Rp22.100.500.000	Rp22.200.500.000	Rp22.300.500.000	Rp74.956.267.427	Rp22.086.500.000	Rp90.347.238.849	Rp239.145.555.197	Rp1.700.091.116.933	Rp123.688.144.297	>	Melampaui





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.12. 3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	947,70 %	947,70 %	947,70 %	947,70 %	61,1%	947,70%	3,09%	16,46%	57,65%	114,52%	>	Melampaui
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga													
3.2.13. 1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50	100	100	100	100	52	26	100	100	37,25%	<	Belum Tercapai
3.2.13. 2	Persentase wirausaha muda	%										100		
3.2.13. 3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	33	100	79	46	25	84	>	Melampaui
3.2.13. 4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	66,67	70	80	90	90	66,67	70	80	90	69,70	<	Belum Tercapai
3.2.13. 5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	44,72	47,39	50,06	52,73	55,4	44,69	28,42	15,79	0	98,45	>	Melampaui
3.2.13. 6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	3	5	6	7	7	3	5	10	0	9	>	Melampaui
3.2.13. 7	Jumlah prestasi olahraga	Atlet	14	14	14	14	14	14	14	8	4	4	<	Belum Tercapai
3.2.14	Statistik													
3.2.14. 1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.14. 2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.14. 3	Buku "PDRB"	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.15	Persandian													
3.2.15. 1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	13	13	13	13	13	0%	0%	0%	0%	76%	>	Melampaui
3.2.16	Kebudayaan													
3.2.16. 1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		9	11	11	11	5	10	8	10	7	5	=	Sesuai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.2.16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		97	100	100	100	380	100	100	24,13	24,13	25	<	Belum Tercapai
3.2.16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		na				0	n.a	n.a	n.a	n,a	n,a	n,a	
3.2.16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		2	2	2	2	3	2	3	3	3	8	>	Melampaui
3.2.17	Perpustakaan													
3.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3,37	3,44	3,51	3,58	3,65	5,14	4,37	5,06	0,013	1,41	<	Belum Tercapai
3.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	28,89	29,59	30,29	30,99	31,69	27,17	28,04	27,76	27,76	100	>	Melampaui
3.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	1,51	1,59	1,58	1,56	1,58	>	Melampaui
3.2.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengun- g	8148	8342	8536	8730	8924	8,148	9,155	10,856	2,73	8.924	=	Sesuai
3.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	12711	13455	14199	14943	15687	11,585	12,425	13,284	13.284	15.687	=	Sesuai
3.2.17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	56%	<	Belum Tercapai
3.2.18	Kearsipan													
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	24,32	37,83	51,43	64,58	78,36	24,32	37,84	52,94	61,76	20,59	<	Belum Tercapai
3.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	=	Sesuai
3,3	Layanan Urusan Pilihan													
3.3.1	Pariwisata													
3.3.1.1	Kunjungan wisata	%	1,11	1,13	1,15	1,17	25	111,29	80,03	58,19	20,75	323%	>	Melampaui
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	=	Sesuai
3.3.1.3	PAD sektor pariwisata	%	0,012	0,02	0,025	0,03	0,2	1,85	1,82	1,98	1,19	0,18	<	Belum Tercapai
3.3.2	Pertanian													
3.3.2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	31,27	32	32,3	32,6	26,01	27,74	27,58	25,49	25,75	14,27	<	Belum Tercapai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	11,18	11,5	11,82	12,14	13	11,18	12,45	18,48	22,93	4,003183 167	>	Melampaui
3.3.2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	28,24	28,51	28,78	29,05	27,48	28,24	28,02	27,66	27,57	28,79	<	Belum Tercapai
3.3.2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.3.2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,82	5,85	5,87	5,89	5,36	na	na	na	5,67	5,67	>	Melampaui
3.3.2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	96,54	98,42	98,5	98,6	100	96,54	100	89,6	100	100.00	=	Sesuai
3.3.3	Perdagangan													
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)		-	-	-	-	-	542.197,15	378.912,76	572.571,90	468.970,00	296.270.00		
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	=	Sesuai
3.3.4	Perindustrian													
3.3.4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	na	98,92	50	98,93	50	50	50	50	50	56,94	>	Melampaui
3.3.5	Kelautan dan Perikanan													
3.3.5.1	Produksi perikanan	%	179,37	185,08	190,79	196,5	85	179,37	78,81	85,98	84,74	100,24	>	Melampaui
3.3.5.2	Konsumsi ikan	%	106	100	100	100	100	105,63	100,05	108	117,34	102,50	>	Melampaui
3.3.5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	0	0	0	10	0	0	12,82	0	10	=	Sesuai
3.3.5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	94,1	94,6	95,1	95,6	88	94,09	85,97	86,61	87,42	87,26	<	Belum Tercapai
3.3.5.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	na				125	125	125	125	125	125	=	Sesuai
3.3.5.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	=	Sesuai
3.4	Penunjang Urusan													
3.4.1	Perencanaan Pembangunan													
3.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100	=	Sesuai
3.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100	=	Sesuai
3.4.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%					100	100%	100%	100%	100%	97,96%	<	Belum Tercapai
3.4.2	Keuangan													
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP /WDP /TMT /TW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	Sesuai
2.2.	Persentase SILPA	%	9,87	8,91	7,95	6,99	9,99	9,05	8,86	9,35	5,07	12,26	>	Melampaui
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10,09	9,03	7,97	6,91	9,99	9,05	8,86	9,35	5,28	12,26	>	Melampaui
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	1,64	0,31	0,62	5,15	1,14	<	Belum Tercapai
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana		0	0	0	0	0	5,33	1,88	2,72	17,07	4,00	<	Belum Tercapai
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	30,32	32,7	32,7	32,7	20,00	30,32	28,72	30	28,56	31,29	>	Melampaui
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17,18	20,16	23,14	26,12	10,00	17,18	18,6	18,53	19,88	24,73	<	Belum Tercapai
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	50,04	50,01	49,98	49,95	43,52	49,96	51,79	49,41	56,55	1,30	<	Belum Tercapai
							56,48					9,83	<	Belum Tercapai
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0,16	0,2	0,24	0,28	0,21	0,16	0,2	0,2	0,21	0,20	<	Belum Tercapai
2.9.	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	=	Sesuai





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan													
3.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	7,54	9,94	12,34	14,74	20	11	15	15	17	19,92 JP	<	Belum Tercapai
3.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,92	7,21	9,5	11,79	7,5	7,55	6,64	6,59	8,5	6,66	<	Belum Tercapai
3.4.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	61,73	61,97	62,21	62,45	87,32	61,73	79,78	87,99	88,54	83,13	<	Belum Tercapai
3.4.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		35	35	37	37	33	27	30	26	31	33	=	Sesuai
3.4.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		146	146	146	146	1926	1950	1887	1999	1994	1880	<	Belum Tercapai
3.4.3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3277	3277	3277	3277	3277	3.277	3.205	3.139	2.950	3.091	<	Belum Tercapai
3.4.4	Penelitian dan pengembangan													
3.4.4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.4.4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	0	100	100	100	0	0	=	Sesuai
3.4.4.3	Penerapan SIDA:													
3.4.4.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,53	>	Melampaui
3.4.4.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.4.5	Pengawasan													
3.4.5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	27,49	100	100	100	75	61,97	71,88	67,12	57,02	59,54	>	Melampaui
3.4.5.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,19	0,19	0	0	0,1	0,19	0,18	0,33	0,17	0,55	<	Belum Tercapai
3.4.5.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	8	8	8	8	15	413	215	77,78%	77,60%	12	>	Melampaui





No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3.4.6	Sekretariat Dewan													
3.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai





2.1.5.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Soppeng

Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah merupakan gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.303. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Soppeng Tahun 2021, Berdasarkan PERMENDAGRI 18 Tahun 2020

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB						
1	URUSAN PENDIDIKAN					
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	112,25	69	100	DISDIKBUD
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	107,48	91,01	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	120,62	78,35	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,95	58,33	100	
2	URUSAN KESEHATAN					
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,13	0,13	0,135	DINAS KESEHATAN
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100	
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	19,68	100	100	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	51,86	100	100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	51,86	100	100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	2,19	100	100	
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023	OPD Penanggung Jawab
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM					
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	9,72	0,2	0,25	DINAS PUPR
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	Tidak ada Pantai	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	6,21	0,68	0,72	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,02	0,35	40%	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,95	72,5	75	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		100	0,35	0,6	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	57,32	0,605	59,50%	
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0	0,25	0,3	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	1	1	
	4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	106,25	100	100	DINAS PERKIM
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	100%	50,45%	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	11,79	100%	2,44%	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,43	100%	100%	
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	55,56	50	62	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	53426	101735	101735	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan	jiwa	53426	101735	101735	BPBD





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023	OPD Penanggung Jawab
	dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	123456 jiwa	1001 KK	1002 KK	SATPOL PP & DAMKAR - BPBD
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	44,44	90	90	SATPOL PP & DAMKAR
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	5,53	7,75	7,75	
6	URUSAN SOSIAL					
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	49,7	100	100	DINAS SOSIAL
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	
7	URUSAN KETENAGA KERJAAN					
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	61,32	20	25	DPMPTSPTKT
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,47	23,9	24	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	579642	3,85	3,89	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	3,98	4,9	5	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		61,32			
8	URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,56	2,75	3	DP3APPKB
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,03	0,04	100	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%		0,001	0,001	
9	URUSAN PANGAN					
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	25,82	32	34	DTPHPKP
10	URUSAN PERTANAHAN					
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	DINAS PERKIM
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	70	72,5	
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		100	n.a	n.a	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari		100	n.a	100	





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023	OPD Penanggung Jawab
	Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100	n.a	n.a	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50	100	100	
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	69,52	82,16	82,2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	74,06	68%	69%	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	11,43	65	67	
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,59	99,33	99,33	DINAS DUKCAPIL
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	64,25	60,15	60,2	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,54	99,15	96,5	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	23,53	100	88,23	
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	25	33	DPMD
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	3,85	4	3	
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,16	2,15	2,13	DP3APPKB
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	74,52	78,25	78,26	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,24	12,1	12	
15	URUSAN PERHUBUNGAN					
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	63	82	83	DINAS PERHUBUNGAN
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,9	0,065	0,07	
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,06	100	100	DISKOMINFO
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	1	1,5	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	42,25	70	27	
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	45,18	38,17	38,17	DPPKUKM
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	7,5	3,3	4,52	
18	URUSAN PENANAMAN MODAL					
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	114,52	64,76	68.64	DPMPTSPTKT
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	1,03	1,04	1,07	DISPAPORA





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023	OPD Penanggung Jawab
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5,49	28,54	29,83	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	2	4	1	
20	URUSAN STATISTIK					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	DISKOMINFO
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	
21	URUSAN PERSANDIAN					
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	49,8	260	265	DISKOMINFO
22	URUSAN KEBUDAYAAN					
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	25	21,88	21,88	DISDIKBUD
23	URUSAN PERPUSTAKAAN					
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai		50	51	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	28,73	0	0	
24	URUSAN KEARSIPAN					
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	0	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	0	25	25	
	URUSAN PILIHAN					
25	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3425,7	3451,73	3486,25	DPKHP
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		3017,35	3047,53	
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		434,38	438,72	
26	URUSAN PARIWISATA					
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	33	40	DISPAPORA
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	365,94	44,5	44,62	
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	2184,13	10	10	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	4,97	1,48	1,5	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,18	0,2	0,2	
27	URUSAN PERTANIAN					





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023	OPD Penanggung Jawab
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	547,85	5,43	5,5	DTPHPKP
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-42,86	29,5	29,5	
28	URUSAN PERDAGANGAN					
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	3,77	0	0	DPPKUKM
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	26,81	22,5	23,8	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,55	80,88	84,56	
29	URUSAN PERINDUSTRIAN					
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	47,62	43,33	44,19	DPPKUKM
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	20	100	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	0	0	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
	1. Keterkinian informasi industri :		0			
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	0	0	50	
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	0	25	25	
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	0	
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :					
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	10	10	10	
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	10	10	10	
30	URUSAN TRANSMIGRASI					
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	UPT	1			DPMPTSPTKT
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	kk	85			
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	pemukiman	1			





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023	OPD Penanggung Jawab
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	13,78	31,75	31,75	BPKPD
	Rasio PAD	Poin	1,46	1,33	1,33	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	LEVEL 3	LEVEL 3	INSPEKTORAT
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	LEVEL 2	LEVEL 3	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	14,28	0,66	0,66	BPKPD
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP/	WTP	WTP	WTP	
2	PENGADAAN					
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	84	9,9	9,9	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	49,77	97	98	
3	KEPEGAWAIAN					
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	675,93	7,81	8,72	BKPSDM
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,39	1,6	0,25	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	39,75	1,02	0,69	
4	MANAJEMEN KEUANGAN					
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-7,28	0,04	0,04	BPKPD
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	21,61	0,2	0,2	
	Assets Management		ya	YA	YA	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	12,81	4,99	4,99	
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA / DPMPSTP/ KECAMATAN
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA





2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Adapun capaian SPM di Kabupaten Soppeng yaitu:

2.1.5.1. Bidang Pendidikan

2.1.5.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM Pendidikan PAUD yang sesuai jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Rendahnya capaian SPM PAUD dimana pada tahun tahun 2017 sebesar 51,99% , pada tahun 2019 sebesar 51,26%. Sedangkan pada tahun 2021 capaian SPM sebesar 56,10%, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, padahal jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah banyak. Berdasarkan data, jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit, dan RA di Kabupaten Soppeng sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 0,041 atau 1 : 24. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh lembaga PAUD.

Keberadaan sebahagian PAUD swasta dipelosok-pelosok kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel 2.304. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2017-2021

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	%	51,99	51,08	51,26	59,91	56,10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021





2.1.5.1.2. Pendidikan Dasar

SPM Pendidikan dasar adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. SPM Pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng selama tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 80,58% dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 96,77%. Sedangkan pada tahun 2019 SPM Pendidikan dasar menurun dengan persentase sebesar 88,23%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dimana SPM Pendidikan dasar sebesar 90,67%. Dan pada tahun 2021 menurun 4,1% sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar menjadi 86,57%.

Faktor penyebab sehingga SPM Pendidikan dasar belum maksimal antara lain karena masih adanya peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD/MI sederajat yang belum cukup usia yang diwajibkan yaitu 7 tahun pada jenjang SD/MI sederajat dan 13 tahun pada jenjang SMP/MTs. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pada kegiatan penerimaan siswa baru pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan penerimaan siswa baru sesuai usia wajib.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan APM masih rendah yakni adanya peserta didik yang mengulang termasuk yang tidak lulus pada ujian akhir. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pendidikan dalam bentuk peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan-pelatihan dan sejenisnya. Sedangkan untuk mendorong minat baca peserta didik dapat dilakukan bimbingan belajar bagi siswa. Selain dari itu, tentunya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas.

Faktor lain yang menyebabkan SPM Pendidikan dasar masih rendah yakni Angka Putus Sekolah dan kondisi peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan. Jika indikator Angka Melanjutkan rendah, hal ini juga membuat indikator angka putus sekolah ikut berpengaruh. Ini menggambarkan bahwa ada penduduk usia sekolah yang tidak lagi berpartisipasi dalam layanan pendidikan. Namun demikian tidak semua penduduk usia sekolah tersebut belum berpartisipasi dalam layanan pendidikan, hal ini bisa disebabkan karena peserta didik melanjutkan di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sama halnya dengan peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sehingga objek pembagi dalam formulasi indikator menjadi lebih kecil. Rata-rata peserta didik yang tidak melanjutkan dan putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan beasiswa khusus bagi peserta didik yang kurang mampu.

Tabel 2.305. Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	%	80,58	96,77	88,23	90,67	86,54

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021





2.1.5.1.3. Pendidikan Kesetaraan

SPM Pendidikan Kesetaraan adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Selama tahun 2017 – 2021 pencapaian SPM Pendidikan kesetaraan masih kurang maksimal dimana pada tahun 2017 sebesar 61,09% dan pada tahun 2018 sebesar 31,87%. Tetapi pada tahun 2019 meningkat sebesar 37,25% ,pada tahun 2020 sebesar 66,66% dan pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 100%. Walaupun Realisasi SPM ini mencapai target yang ditetapkan berdasarkan regulasi yang sebesar 100%, akan tetapi masih rendah minat masyarakat yang belum tamat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan dan Adanya sebagian sasaran yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempal tinggal di luar Kabupaten Soppeng. Selain itu jumlah PKBM di Kabupaten Soppeng juga masih kurang.

Tabel 2.306. Pendidikan Kesetaraan Tahun 2017-2021

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	61,09	31,87	37,25	66,66	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.1.5.2. Bidang Kesehatan

Jenis SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Pencapaian SPM Kesehatan untuk tahun 2021 adalah:

Tabel 2. 307. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Angka Absolut			
		Target (%)	Pembilang	Penyebut	%
Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	3.085	3.085	100
	2 Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	2.955	2.955	100
	3 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2.938	2.938	100
	4 Cakupan pelayanana kesehatan balita	100	8.540	8.540	100





Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Angka Absolut			
		Target (%)	Pembilang	Penyebut	%
	5 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	7.279	7.279	100
	6 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	14.902	74.082	20,11
	7 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	10.433	10.433	100
	8 Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	24.118	24.118	100
	9 Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	2.310	2.310	100
	10 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	507	507	100
	11 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	277	277	100
	12 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	14	14	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2.1.5.2.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Kunjungan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dengan memenuhi kriteria 10 T. Tahun 2021 jumlah sasaran bumil adalah 3.085 dengan capaian 3.085 (100%). adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga bidan baik di puskesmas maupun poskesdes untuk meningkatkan kompetensi mereka
- Sosialisasi tanda bahaya kehamilan
- Monev bidan desa di poskesdes
- Kelas ibu hamil dan balita
- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- Adanya bimbingan teknis yang rutin dilaksanakan ke 17 puskesmas

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:



- Timbang berat badan dan ukur tinggibadan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas /LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundusuteri).
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin

2.1.5.2.2. Cakupan Pertolongan Persalinan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pertolongan persalinan yang diberikan oleh tenaga terlatih akan membantu menurunkan kejadian kesakitan, kecacatan dan kematian pada bayi baru lahir. Tahun 2021 terjadi 2.955 persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan dari target 2.955 ibu bersalin dengan capaian indikator 100%, adapun kiat-kiat yang dilakukan dalam pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang memiliki kompetensi kebidanan adalah:

- Pendataan ibu bersalin
- Peningkatan SDM melalui pertemuan dan pembelajaran Audit Maternal Neonatal (AMP)
- Skreening Hypotiroid kongenital
- Asuhan persalinan normal
- Penanganan Asfiksia dan BBLR
- Kemitraan bidan dan dukun
- Kelas Ibu Hamil
- Sosialisasi rumah tunggu kelahiran (RKT)
- Melaksanakan Monev bidan desa di poskesdes
- Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

2.1.5.2.3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan kunjungan bayi setiap tahun di atas target yang direncanakan, hal tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesehatan bayi, dimana pengaruhnya sangat besar kepada masa depan bayi yang bersangkutan. Capaian tahun 2020 adalah (100%) dengan sasaran 2.938 dan capaian 2.938 dengan target (100%) dan realisasi (100%). Dan Capaian tahun 2019 adalah (100%) dengan sasaran 2.742 dan 2.742 capaian, dengan target (100%) dan realisasi (100%) dan tahun 2018 (100%) dengan 2.759 sasaran dan 2.759 realisasi, target (100%) dan realisasi (100%), indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun persentase capaian indikator tahun 2018 dan 2019 adalah (100%). Di tahun 2021 juga masih di angka yang sama sebesar 100% dengan sasaran 2.938 dan capaian 2.938 dengan target dan realisasi 100%. Adapun kiat-kiat yang dilakukan adalah :

- Pendataan bayi baru lahir
- Penimbangan balita dan pemberian imunisasi
- Pelayanan kesehatan pada bayi melalui perawatan tali pusat





- Melakukan pijatan bayi setelah dimandikan
- Pemberian ASI eksklusif
- Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi umur 6 bulan ke atas
- Adanya kelas ibu dan bayi di puskesmas
- Pencatatan dan Pelaporan sudah baik

2.1.5.2.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak balita juga dimaksudkan untuk monitoring tumbuh kembang anak balita. Tahun 2021 cakupan pelayanan anak balita dengan sasaran 8.540 dan capaian 8.540 adapun targetnya (100%) dan realisasi (100%) Adapun capaian indikator ini (100%), tahun 2019 cakupan pelayanan anak balita dengan sasaran 7.824 dan capaian 7.824 adapun targetnya (100%) dengan realisasi (100%) adapun capaian indikator ini (100%), tahun 2018 capaian pelayanan anak balita (100%) dengan sasaran 14.528 capaian 14.528 balita dengan target (100%) dan indikator ini mencapai target hal ini disebabkan karena setelah anak balita mendapatkan semua imunisasi yang diberikan ibu balita menimbang anaknya di posyandu. Adapun kiat-kiat yang dilakukan dengan :

- Pendataan balita 0 – 59 bulan
- Mengaktifkan kembali untuk datang keposyandu walaupun pemberian imunisasinya sudah lengkap
- Defenisi operasional cakupan pelayanan kesehatan anak balita sudah dipahami dengan baik
- Pencatatan dan pelaporan kohort balita sudah per-posyandu
- Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM

2.1.5.2.5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD dan madrasah ibtidaiyah dan SMP yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Tahun 2021 target (100%) dan realisasi (100%) dengan persentase capaian indikator (100%), persentase capaian tahun 2018 dengan target (100%) dan realisasi (100%). Persentase pada indikator ini meningkat karena intensitas petugas ke sekolah yang sering, jumlah tenaga yang dalam pemeriksaan ataupun skreening pada anak sekolah sudah memadai dan aktifnya guru yang terlibat langsung untuk membantu kegiatan tersebut. adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan pada siswa-siswi
- Pelatihan pada guru SD/Madrasah ibtidaiyah
- Pembinaan UKS
- Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penjaringan anak sekolah





2.1.5.2.6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah . Tahun 2021 cakupan pelayanan anak pada usia produktif dengan sasaran 74.082 dan capaian 14.902 adapun targetnya (100%) dengan realisasi (20.11%).

- Posbindu masyarakat belum semua berkunjung dan faktor ketenagaan
- Solusinya lakukan Posbindu di kantor, sekolah, tempat kerja
- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan untuk di Posbindu.

2.1.5.2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Jumlah sasaran Usila pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 10.433 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 10,433 (100%). Jumlah sasaran usila pada tahun 2019 sebanyak 15,761. Setiap warga negara Indonesia usia (60) tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar.

1. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:
 - a. Dilakukan sesuai kewenangan oleh:
 - Dokter;
 - Bidan;
 - Perawat;
 - Nutrisionis/TenagaGizi;
 - Kader Posyandulansia/Posbindu
 - b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
 - c. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.
 - d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut:
 - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanandarah.
 - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
 - Deteksi kadar kolesterol dalamdarah
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini* atau *Abbreviated Mental Test (AMT)* dan *Geriatric Depression Scale(GDS)*.
2. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini
3. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya





2.1.5.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah sasaran penderita hipertensi pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 24.118 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 24.118 sehingga persentase capaian (100%).

1. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas
2. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP).
3. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.
4. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - a. Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter diFKTP.
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi diFKTP.
 - c. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
 - d. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis. Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

2.1.5.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jumlah sasaran penderita diabetes melitus pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 2.310 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 2.310 (100%). Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

1. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja Puskesmas.
2. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
3. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
4. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:



- a) Dokter/DLP
 - b) Perawat
 - c) Nutrisionis/TenagaGizi
5. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
- a) Edukasi
 - b) Aktifitas fisik
 - c) Terapi nutrisi medis
 - d) Intervensi farmakologis
6. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
7. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

2.1.5.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah sasaran penderita gangguan jiwa berat pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 507 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 507 (100%). Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat di berikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerja.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan Tindakan kebersihan diri ODGJ berat.

2.1.5.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB BTA

Pelaksanaan program TB dengan DOTS di layanan selain puskesmas untuk meningkatkan cakupan penanganan pasien TB sesuai standar Penanggulangan penderita terduga TB BTA tahun 2021 sebanyak 277 orang, dan target 100% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 381 orang terjadi penurunan hal ini disebabkan karena masih adanya masyarakat dengan TB yang berobat kelayanan swasta dengan layanan DOTS yang kurang berkualitas (masyarakat yang mempunyai perilaku pencarian layanan kesehatan ke swasta/dokter swasta), belum optimalnya peran PMO (pengawas menelan obat). Kunci sukses pengobatan TB adalah kepatuhan dalam minum obat TB. Adapun upaya yang dilakukan adalah penerapan strategi DOTS dan peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik).

2.1.5.2.12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 sebanyak 14 orang. Upaya pelayanan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV di





samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan yang dilakukan melalui skrining HIV terhadap donor darah dan upaya pemantauan yang tidak hanya pada orang-orang yang beresiko akan tetapi luas pada masyarakat umum dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS).

2.1.5.3. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis SPM bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan adalah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Realisasi pada tahun 2021 untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2. 308. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian			
		Jumlah yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah yang sudah terlayani (Rumah Tangga)	Jumlah yang belum terlayani (Jiwa)	Capaian %
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	57.543	52.873	4.670	94,55%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	57.543	57.543	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.1.5.3.1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2021, memperoleh capaian kinerja berada pada kisaran 94,55% dengan jumlah rumah tangga pengguna air bersih yang terlayani sebanyak 52.873 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga yang harus dilayani adalah sebanyak 57.543 rumah tangga, Hal ini berarti pula masih terdapat 5,45 % penduduk Kabupaten Soppeng yang belum memperoleh akses pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2.1.5.3.2. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2021 mencapai target 100 % dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 57.543 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang harus dilayani sebanyak 57.543.

2.1.5.4. Bidang Perumahan Rakyat

Jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan terdiri dari Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Cakupan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu:





Tabel 2. 309. Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		
		Jumlah orang yang akan terlayani	Jumlah orang yang terlayani	Capaian %
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	32 Unit	34 Unit	106%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.1.5.4.1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Penyediaan dan rehabilitasi rumah rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami bencana yang di akibatkan adanya bencana alam yang terjadi yang mengakibatkan kerusakan total atau sebagian pada bangunan rumah masyarakat. Selama tahun 2021 jumlah rumah korban bencana yang seharusnya direhab sebanyak 32 unit dan yang telah direhab sebanyak 34 unit sehingga capaian SPM sebesar 106%.

2.1.5.4.2. Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah pelayanan terhadap warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Selama tahun 2021 jumlah warga negara yang terkena dampak relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebanyak 0 rumah.

2.1.5.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertinban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu:

Tabel 2. 310. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Persentase
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%





No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Persentase
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2021

2.1.5.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Selama tahun 2021 tidak ada warga yang terdampak gangguan trantibum berupa kerugian materiil maupun terkena cedera akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada maka bisa dikatakan capaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100%

2.1.5.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Realisasi pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana terlaksana dengan persentase pelaksanaan 100 Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi pencegahan bencana dan pelatihan evakuasi bencana yang dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Soppeng yang melibatkan seluruh aparat kecamatan, kelurahan/desa, kepala lingkungan, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing kecamatan. Capaian SPM terkait pelayanan informasi rawan bencana sebesar 100%.

2.1.5.5.3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Realisasi pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan mengacu pada indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam pelaksanaan pencegahan bencana alam dan evakuasi bencana, badan penanggulangan melaksanakan kegiatan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melakukan pembentukan kelompok pemuda siaga bencana di masing-masing kelurahan/desa, dan melakukan apel kesiapsiagaan tiap tahun untuk inspeksi kesiagaan petugas bencana dalam menghadapi bencana alam di Kabupaten Soppeng. Capaian SPM pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di tahun 2021 sebesar 100%.

2.1.5.5.4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Jumlah bencana alam pada tahun 2021 sebanyak 10 kejadian dengan jumlah korban yang terdampak sebanyak 14.681 jiwa. Terkait realisasi pelayanan dasar ini mengacu pada indikator jumlah warga Negara yang





memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk tahun 2021, pelayanan dasar ini terealisasi sebesar 100% dengan adanya dukungan sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2.1.5.5.5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada tahun 2021 jumlah capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kebakaran.

2.1.5.6. Bidang Sosial

Jenis SPM Bidang sosial yang dilaksanakan terdiri dari Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu:

Tabel 2. 311. Bidang Sosial Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Seharusnya dilayani	dilayani	Persentase (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	41	41	100,00%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	31	31	100,00%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	107	107	100,00%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0	0	100,00%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	192	192	100,00%

Sumber : Dinas Sosial, 2021





2.1.5.6.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial

Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti tahun 2021 sebanyak 41 orang dari jumlah penyandang disabilitas di tahun 2021 sebanyak 1108 jiwa.

2.1.5.6.2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2021 ditemukan 31 (dua) kasus anak terlantar yang semuanya dapat ditangani dinas sosial (100%).

2.1.5.6.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial

Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2021 sebanyak 107 jiwa dan semuanya dapat ditangani, sehingga capainnya sebesar 100%. Adapun jumlah keseluruhan warga Negara lanjut usia (usia tua/non produktif) di kabupaten soppeng pada tahun 2021 sebanyak 27.521 jiwa.

2.1.5.6.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial

Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna wisma diluar panti. Pada tahun 2021 tidak ditemukan adanya warga yang berstatus sebagai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Soppeng.

2.1.5.6.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota

Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Pada tahun 2021 pelaksanaan perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana bagi korban bencana jumlah warga yang dilayani 192 jiwa dari jumlah korban bencana yang seharusnya dilayani di kabupaten soppeng sebanyak 192 jiwa atau persentase 100%. Dengan rincian Jumlah korban bencana alam yang dilayani sebanyak 162 jiwa dan bencana social kabupaten soppeng sebanyak 30 jiwa.

Tabel 2. 312. Hasil Analisis Capaian Kinerja SPM Tahun 2021

Urusan	Indikator SPM	Target	Capaian	Keterangan
PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	100%	56,10%	Belum Tercapai
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	100%	86,54%	Belum Tercapai
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	100%	Tercapai





Urusan	Indikator SPM	Target	Capaian	Keterangan
KESEHATAN	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	20,11%	Belum Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100%	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	100%	Tercapai
PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	94,55%	Belum Tercapai
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	100%	Tercapai
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	106%	Tercapai
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%		
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	Tercapai
	Pelayanan Informasi rawan bencana	100%	100%	Tercapai
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	Tercapai
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	Tercapai





Urusan	Indikator SPM	Target	Capaian	Keterangan
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	Tercapai
SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	Tercapai
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	100%	100%	Tercapai
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	Tercapai
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100%	100%	Tercapai
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	Tercapai

2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB / SDGs

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Namun, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan karakteristik wilayah maka pemerintah Kabupaten Soppeng hanya memiliki 196 indikator TPB. Salah satunya dikarenakan TPB (14), yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, mengingat Kabupaten Soppeng tidak memiliki laut. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Soppeng terbagi atas empat kategori, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
4. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data
5. Realisasi capaian indicator TPB yang terlaksana dan belum mencapai target





Tabel 2. 313. Realisasi Capaian TPB yang dilaksanakan belum mencapai target

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
1	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	7,5%	8
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	86%	
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun	7.233	
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	94,3%	
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	63,4%	
			1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat .	Meningkat menjadi 94,78%	86,4%	
			1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	68,44%	
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh sumber pen erangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	77,13%	





No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Menurun	18,94%	4
	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	16%	
			2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun , berdasarkan tipe.	Menurun	0,04%	
			2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	0,01%	
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	86,59%	5
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	60%	





No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0,98%	
	3.a	Memperkuat pelaksanaan <i>The Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	8,81%	
	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	38,34%	6





No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	68,42%	
			4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat .	Meningkat menjadi 114,09%	96,86%	
			4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	93,15%	
			4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,63 Tahun	
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	70,97%	
5	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	25%	4
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam	Menurun	25%	





No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
				12 bulan terakhir.			
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	22,76%	
			5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	57,59%	
6	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1 .(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	94,3%	6
			6.1 .1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	90,05%	
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 .(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	63,4%	
			6.2.1 .(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat	1 Kecamatan	
	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya,	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi	Meningkat menjadi 409 kabupaten/ kota	1 Kecamatan	





No. TPB	Target	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).			
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	0,86
8	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Meningkat	40 kantor bank
	8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	7,69%
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp 48.180.000,-
	8.5	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	3,53%
	8.9	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	0 Orang
		8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	200.597 Orang
		8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Rp 1.148.566.000
10	10.1	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,35





No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	7,5%	
			10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	43 daerah	
			10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	6 desa	
			10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	0 desa	
11	1 1.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	ada	Tidak Ada	2
	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	73,59%	
15	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta Ha (skala nasional)	20.508 Ha	2





No. TPB	Target	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Tidak Ada
16	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18- 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Persentase instansi	Menurun	31%
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	0%
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	2%
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	12.077 Anak
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	75,5%
17	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	Meningkat	0,91%
					6





No. TPB	Target	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		menurut sumbernya.		
		17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	
	17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	
		17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	
	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	



Tabel 2. 314. Realisasi Capaian TPB yang belum dilaksanakan

No. TPB	Target	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
1	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	3
		1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	
		1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	
2	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	1
3	3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	1



No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
5	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	3
	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	
	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	
7	7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	2
	7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	
10	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	2
			10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	





No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	2
	11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	
12	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	1
16	16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	4



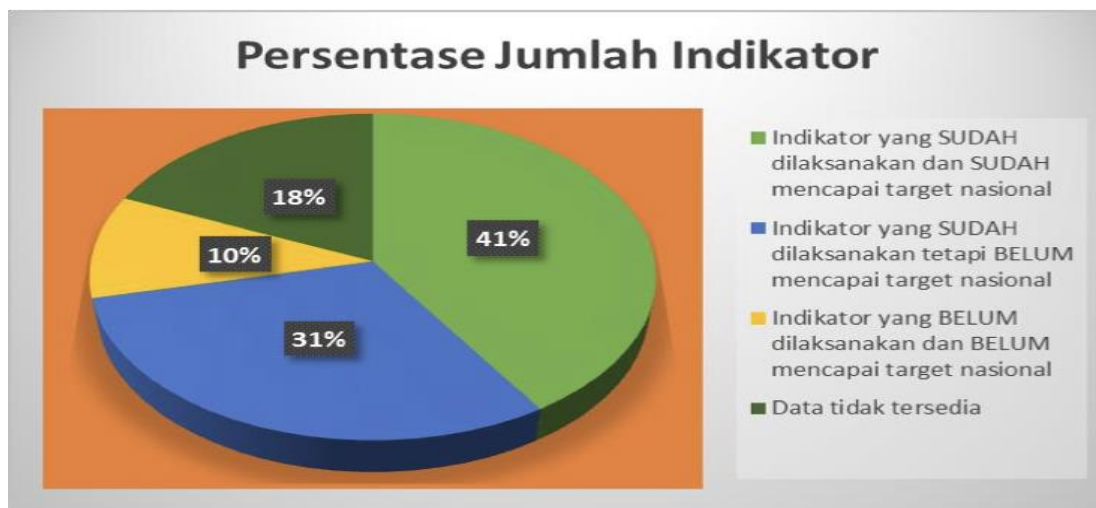


No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
	16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	
	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	
17	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	1



Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Soppeng yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 41% atau sebanyak 80 indikator, dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Soppeng. Sementara itu, sebanyak 31% (60 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 20 indikator atau 10% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 18% atau 36 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Soppeng secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 33. Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Soppeng



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan TPB 1, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 1 memiliki jumlah yang paling banyak, yakni delapan indikator. Sementara itu, pada indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 16 dengan empat indikator yang paling tinggi, yakni menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 8 memiliki jumlah terbanyak, yaitu sebelas indikator dengan tujuan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk RKPD tahun 2021 berdasarkan urusan menunjukkan bahwa sebanyak 6 layanan urusan wajib, 18 layanan urusan wajib non dasar, 5 layanan urusan pilihan dan 6 penunjang urusan, menunjukkan capaian kinerja rata-rata sebesar 97,97 % dan realisasi anggaran rata-rata sebesar 85,30 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:





2.2.1. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2021

Tabel 2. 315 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2021

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				4		5		6		7					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			306.126.438.300		40.519.566.039		99.178.640.510		65.055.083.879		80.200.880.902		284.954.171.330		93,08%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	626	132.297.000	156	-	156	27.250.000	156	22.200.000	158	72.095.250	626	121.545.250	100,00%	91,87%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	2	40.372.000	-	-	-	2.500.000	1	10.400.000	1	27.472.000	2	40.372.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	312	44.525.000	-	-	56	24.750.000	128	11.800.000	128	6.124.650	312	42.674.650	100,00%	95,84%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	312	47.400.000	-	-	-	-	-	-	312	38.498.600	312	38.498.600	100,00%	81,22%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	7	305.046.282.230	1	40.519.566.039	1	98.926.085.964	1	64.900.172.975	4	79.593.700.336	7	283.939.525.314	100,00%	93,08%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	2500	304.888.257.530	-	40.519.566.039	-	98.862.801.964	-	64.872.804.975	2.500	79.526.327.636	2.500	283.781.500.614	100,00%	93,08%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang di verifikasi (SPM)	1000	5.100.000	-	-	-	1.284.000	-	2.568.000	1.000	1.248.000	1.000	5.100.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	2	152.924.700	-	-	1	62.000.000	-	24.800.000	1	66.124.700	2	152.924.700	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya (ASN)	2500	18.498.600	625	-	625	1.500.000	625	-	625	16.978.300	2.500	18.478.300	100,00%	99,89%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN (Orang)	2500	9.499.450	-	-	-	-	-	-	2.500	9.499.450	2.500	9.499.450	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (Dokumen)	12	8.999.150	3	-	3	1.500.000	3	-	3	7.478.850	12	8.978.850	100,00%	99,77%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	4	298.777.920	1	-	1	82.066.500	1	71.680.490	1	144.829.350	4	298.576.340	100,00%	99,93%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	4	698.850	1	-	1	-	1	-	1	698.850	4	698.850	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jenis)	4	8.398.000	-	-	2	5.008.000	-	1.680.000	2	1.710.000	4	8.398.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	2	86.750.000	-	-	1	21.760.000	-	21.050.000	1	43.930.000	2	86.740.000	100,00%	99,99%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	59445	39.040.100	14.861	-	14.861	10.000.000	14.861	-	14.862	29.038.000	59.445	39.038.000	100,00%	99,99%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	20	59.491.570	5	-	5	9.995.000	5	10.986.890	5	38.490.100	20	59.471.990	100,00%	99,97%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	148	104.399.400	37	-	37	35.303.500	37	37.963.600	37	30.962.400	148	104.229.500	100,00%	99,84%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	4	139.100.000	1	-	1	-	1	-	1	139.049.000	4	139.049.000	100,00%	99,96%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	139.100.000	1	-	1	-	1	-	1	139.049.000	4	139.049.000	100,00%	99,96%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	12	351.238.250	3	-	3	126.321.846	3	52.438.834	3	126.268.818	12	305.029.498	100,00%	86,84%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	188.038.250	3	-	3	60.821.846	3	26.238.834	3	58.268.818	12	145.329.498	100,00%	77,29%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	4	163.200.000	1	-	1	65.500.000	1	26.200.000	1	68.000.000	4	159.700.000	100,00%	97,86%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	83	140.244.300	20	-	20	15.416.200	20	8.591.580	23	107.959.848	83	131.967.628	100,00%	94,10%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	83	53.638.250	9	-	1	11.616.200	50	8.591.580	23	33.225.798	83	53.433.578	100,00%	99,62%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	16	8.660.000	4	-	4	3.800.000	4	-	4	4.860.000	16	8.660.000	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (M2)	80	77.946.050	-	-	-	-	-	-	80	69.874.050	80	69.874.050	100,00%	89,64%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	93,08%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102.224.664.173		-		18.328.113.424		13.288.503.150		59.551.776.925		91.168.393.499		89,18%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	62.847.780.173	-	-	-	15.431.741.924	-	5.793.827.300	-	38.173.126.246	-	59.398.695.470	0,00%	94,51%		
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah sarana SD Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	36	337.804.724	-	-	-	85.233.900	20	192.759.100	16	277.993.000	36	277.993.000	100,00%	82,29%		
	Jumlah SPF Sekolah Dasar yang Dikelola (sekolah)	250		-	-	-		-		250		250		100,00%			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang dibangun (Unit)	0	243.219.000	-	-	-	-	-	-	-	241.966.000	-	241.966.000	0,00%	99,48%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah sarana SD Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	25	15.195.748.976	-	-	-	-	15	3.778.174.650	10	9.586.941.200	25	13.365.115.850	100,00%	87,95%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah sarana SD Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	16	5.141.672.000	-	-	-	-	10	1.506.557.450	6	3.335.456.400	16	4.842.013.850	100,00%	94,17%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah sarana SD Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	9	1.299.750.800	-	-	-	-	6	338.183.800	3	747.705.800	9	1.085.889.600	100,00%	83,55%		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sarana SD Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	12	6.491.237.500	-	-	-	-	6	-	6	6.490.000.000	12	6.490.000.000	100,00%	99,98%		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Yang Dibuat (Dokumen)	1	42.220.000	-	-	-	12.790.000	-	3.700.000	1	15.715.000	1	32.205.000	100,00%	76,28%		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba (Siswa)	10000	3.617.447.450	5.000	-	-	1.768.724.700	-	81.977.500	5.000	1.756.232.750	10.000	3.606.934.950	100,00%	99,71%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah SD yang Mendapatkan Dana Bos (%)	100	30.478.679.723	25	-	25	13.650.227.224	25	-	25	15.806.349.996	100	29.456.577.220	100,00%	96,65%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	38	30.628.709.000	8	-	10	705.521.500	10	6.444.989.900	10	17.148.219.500	38	24.298.730.900	100,00%	79,33%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	1	13.451.566.000	-	-	-	3.991.104.900	-	8.861.050.500	1	12.852.155.400	1	12.852.155.400	100,00%	95,54%		
	Jumlah SPF Sekolah Mengah Pertama yang Dikelolah (sekolah)	38		-	-	-		38		38		100,00%					





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Sarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan (kali)	1	2.600.190.000	-	-	-	-	-	733.273.000	1	1.656.187.000	1	2.389.460.000	100,00%	91,90%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan (kali)	1	1.062.050.000	-	-	-	-	-	282.980.600	1	640.131.400	1	923.112.000	100,00%	86,92%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Sarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	1	3.138.290.000	-	-	-	-	-	904.451.900	1	2.038.191.100	1	2.942.643.000	100,00%	93,77%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	1	1.795.740.000	-	-	-	-	-	500.622.000	1	1.130.688.000	1	1.631.310.000	100,00%	90,84%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Presentase SMP Negeri yang melaksanakan Pendidkan bebas pungutan (persen)	100	5.000.000.000	25	-	25	-	25	-	25	-	100	-	100,00%	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan (Kali)	11	2.119.520.000	-	-	-	-	-	-	11	2.115.900.000	11	2.115.900.000	100,00%	99,83%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba (Siswa)	10000	1.390.553.000	-	-	5.000	681.971.500	-	22.357.500	5.000	670.971.500	10.000	1.375.300.500	100,00%	98,90%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang difasilitasi (Sekolah)	5	70.800.000	-	-	-	23.550.000	3	10.200.000	2	35.100.000	5	68.850.000	100,00%	97,25%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah SMP yang Mendapatkan Dana Bos (Persen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100	6.592.175.000	25	-	25	1.368.750.000	64	946.607.250	-	3.471.391.379	29	5.786.748.629	28,52%	87,78%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD yang Dibangun (Kali)	1	138.938.500	-	-	-	-	-	41.405.300	1	93.910.200	1	135.315.500	100,00%	97,39%
	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud (persen)	100		-		-		-		100		100			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga PAUD Negeri yang dibangun/diadakan (Unit)	1	795.425.000	-	-	-	-	-	181.167.600	1	522.543.400	1	703.711.000	100,00%	88,47%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga PAUD Negeri yang dibangun/diadakan (Unit)	5	1.654.011.500	-	-	-	-	3	352.449.500	2	1.073.133.000	5	1.425.582.500	100,00%	86,19%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Sosialisasi PAUD yang Dilaksanakan (Kali)	1	37.800.000	-	-	-	15.750.000	-	6.300.000	1	15.750.000	1	37.800.000	100,00%	100,00%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang diselenggarakan (Lembaga)	15	3.966.000.000	-	-	-	1.353.000.000	-	365.284.850	15	1.766.054.779	15	3.484.339.629	100,00%	87,86%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,92	2.156.000.000	2	-	2	822.100.000	2	103.078.700	2	759.039.800	2	1.684.218.500	25,00%	78,12%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Program Paket A(orang); Jumlah Orang Yang Mengikuti Paket B (orang); Jumlah Orang Yang Megikuti Program Paket C (orang) (Orang)	737	2.156.000.000	245	-	-	822.100.000	245	103.078.700	247	759.039.800	737	1.684.218.500	100,00%	78,12%
	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (orang)	1000		-		500		-		500		1.000		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,76%	89,18%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			32.750.000		-		13.500.000		5.400.000		13.500.000		32.400.000		98,93%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			32.750.000		-		13.500.000		5.400.000		13.500.000		32.400.000		98,93%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (Kali)	1	32.750.000	-	-	-	13.500.000	-	5.400.000	1	13.500.000	1	32.400.000	100,00%	98,93%
	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud (persen)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,93%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			220.297.850		-		84.680.300		9.100.000		86.385.950		180.166.250		81,78%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidik (%)	40	220.297.850	10	-	10	84.680.300	10	9.100.000	10	86.385.950	40	180.166.250	100,00%	81,78%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang Mengikuti uji Kompetensi (orang); Jumlah Guru yang Mengikuti Pelatihan (orang) (Orang)	40	220.297.850	-	-	-	84.680.300	-	9.100.000	40	86.385.950	40	180.166.250	100,00%	81,78%	
	Guru Yang Berkualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4 (persen)	100		-		-		-		100		100				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	81,78%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			17.220.000		-		7.000.000		2.800.000		7.000.000		16.800.000		97,56%	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			17.220.000		-		7.000.000		2.800.000		7.000.000		16.800.000		97,56%	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni (Sanggar Seni)	14	17.220.000	-	-	-	7.000.000	7	2.800.000	7	7.000.000	14	16.800.000	100,00%	97,56%	
	Sanggar Seni Yang Dibina (persen)	60		-		-		-		60		60				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	97,56%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			489.400.000		-		80.400.000		153.201.000		231.625.000		465.226.000		95,06%	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota (Persen)	28	489.400.000	4	-	6	80.400.000	8	153.201.000	10	231.625.000	28	465.226.000	100,00%	95,06%	
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah (Paket)	5	489.400.000	-	-	-	80.400.000	2	153.201.000	3	231.625.000	5	465.226.000	100,00%	95,06%	
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (situs)	28		-		-		-		28		28				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	95,06%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		409.110.770.323		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											99,94%	92,11%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS KESEHATAN															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			171.729.773.192		18.899.707.970		37.931.744.583		39.353.392.390		51.092.465.320		147.277.310.263		85,76%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	61.900.000	100	-	100	13.673.500	100	12.050.000	100	26.150.000	100	51.873.500	100,00%	83,80%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun (Dokumen)	2	15.900.000	-	-	1	4.223.500	-	1.400.000	1	5.525.000	2	11.148.500	100,00%	70,12%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	7.850.000	-	-	-	-	1	3.350.000	-	4.500.000	1	7.850.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1	7.850.000	-	-	-	-	1	4.500.000	-	3.350.000	1	7.850.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	4	30.300.000	1	-	1	9.450.000	1	2.800.000	1	12.775.000	4	25.025.000	100,00%	82,59%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	100	76.828.733.663	100	13.004.093.201	100	21.399.116.689	100	17.968.500.939	100	17.423.830.192	100	69.795.541.021	100,00%	90,85%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya (ASN)	877	76.787.533.663	877	13.001.393.201	877	21.388.366.689	877	17.961.300.939	877	17.403.288.992	877	69.754.349.821	100,00%	90,84%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Dokumen)	1	41.200.000	1	2.700.000	1	10.750.000	1	7.200.000	1	20.541.200	1	41.191.200	100,00%	99,98%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Barang Milik Daerah (%)	100	25.900.000	100	-	100	6.300.000	100	6.300.000	100	13.299.900	100	25.899.900	100,00%	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah (Dokumen)	21	25.900.000	21	-	21	6.300.000	21	6.300.000	21	13.299.900	21	25.899.900	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian yang terdata dengan baik (%)	100	388.482.000	100	-	100	9.240.000	100	4.200.000	100	323.343.700	100	336.783.700	100,00%	86,69%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang di kelola (Sistem Informasi)	2	17.500.000	2	-	2	4.200.000	2	4.200.000	2	9.099.900	2	17.499.900	100,00%	100,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (Orang)	2	370.982.000	1	-	-	5.040.000	-	-	1	314.243.800	2	319.283.800	100,00%	86,06%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	618.735.355	100	49.259.200	100	96.738.040	100	120.139.967	100	294.173.997	100	560.311.204	100,00%	90,56%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	6	9.894.765	4	-	2	9.573.300	-	-	-	-	6	9.573.300	100,00%	96,75%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	12	86.700.000	3	-	3	15.490.000	3	35.950.000	3	30.075.000	12	81.515.000	100,00%	94,02%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar) (Lembar)	68000	65.280.000	-	-	12.000	9.422.000	34.000	25.275.000	22.000	22.963.850	68.000	57.660.850	100,00%	88,33%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	6	130.506.590	2	49.259.200	1	33.864.340	2	14.703.150	1	28.310.750	6	126.137.440	100,00%	96,65%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Tamu)	12	14.000.000	3	-	3	3.180.000	3	2.290.000	3	7.930.000	12	13.400.000	100,00%	95,71%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	300	312.354.000	42	-	61	25.208.400	92	41.921.817	105	204.894.397	300	272.024.614	100,00%	87,09%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%)	100	1.276.890.000	100	30.000.000	100	378.631.000	100	-	100	850.639.300	100	1.259.270.300	100,00%	98,62%
Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan (Jenis)	2	346.450.000	2	-	-	183.909.000	-	-	-	161.480.000	2	345.389.000	100,00%	99,69%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	2	930.440.000	2	30.000.000	-	194.722.000	-	-	-	689.159.300	2	913.881.300	100,00%	98,22%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	1.170.679.469	100	19.901.322	100	62.224.546	100	206.496.473	100	603.076.376	100	891.698.717	100,00%	76,17%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (kali)	12	602.229.469	3	19.901.322	3	52.674.546	3	25.646.473	3	262.626.376	12	360.848.717	100,00%	59,92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (Paket)	3	568.450.000	3	-	3	9.550.000	3	180.850.000	3	340.450.000	3	530.850.000	100,00%	93,39%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	828.791.720	100	58.748.400	100	80.373.315	100	240.621.600	100	381.260.075	100	761.003.390	100,00%	91,82%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	46	418.696.720	46	41.430.000	46	55.556.900	46	84.953.000	46	172.338.866	46	354.278.766	100,00%	84,61%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara (Unit)	45	30.120.000	22	7.320.000	6	5.085.000	7	5.875.000	10	9.715.000	45	27.995.000	100,00%	92,94%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara (M2)	1250	379.975.000	250	9.998.400	1.000	19.731.415	-	149.793.600	-	199.206.209	1.250	378.729.624	100,00%	99,67%		
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD (%)	100	90.529.660.985	100	5.737.705.847	100	15.885.447.493	100	20.795.083.411	100	31.176.691.780	100	73.594.928.531	100,00%	81,29%		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD (Puskesmas)	17	90.529.660.985	17	5.737.705.847	17	15.885.447.493	17	20.795.083.411	17	31.176.691.780	17	73.594.928.531	100,00%	81,29%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	85,76%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			141.966.504.047		5.672.048.100		5.070.614.968		20.972.718.087		79.224.038.838		110.939.419.993		78,14%		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia (Persen)	100	96.948.062.600	100	160.765.000	100	54.353.281	100	16.429.310.501	100	65.374.137.884	100	82.018.566.666	100,00%	84,60%		
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung rumah sakit serta sarana dan prasarana pendukung (Unit)	1	5.098.868.000	-	-	-	-	-	996.330.500	1	1.095.198.500	1	2.091.529.000	100,00%	41,02%		
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun (Unit)	3	18.300.000.000	-	97.130.000	-	-	-	7.475.316.200	3	10.590.320.100	3	18.162.766.300	100,00%	99,25%		
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun (Unit)	1	2.617.520.000	-	29.700.000	-	-	-	893.649.086	1	1.587.778.396	1	2.511.127.482	100,00%	95,94%		
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang yang dikembangkan tipenya /klasifikasi (Rumah Sakit)	1	30.499.999.640	-	-	-	-	-	6.587.425.700	1	16.864.434.900	1	23.451.860.600	100,00%	76,89%		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1	850.000.000	-	-	-	39.693.281	-	181.795.015	1	512.485.586	1	733.973.882	100,00%	86,35%		
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (Unit)	3	1.814.187.600	-	33.935.000	-	-	-	-	3	1.772.838.200	3	1.806.773.200	100,00%	99,59%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (Unit)	5	34.326.188.760	-	-	-	-	1	239.936.000	4	29.968.460.357	5	30.208.396.357	100,00%	88,00%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara (Unit)	17	99.100.000	-	-	-	-	10	40.698.000	7	33.040.000	17	73.738.000	100,00%	74,41%
Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pengadaan obat dan/atau vaksin yang terlaksana (%)	100	1.412.170.000	-	-	-	-	-	-	100	1.185.107.595	100	1.185.107.595	100,00%	83,92%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase pengadaan bahan habis pakai yang terlaksana (%)	100	1.800.543.600	-	-	-	-	-	-	50	1.713.361.250	50	1.713.361.250	50,00%	95,16%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas yang mendapatkan distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman (Puskesmas)	17	129.485.000	17	-	17	14.660.000	17	14.160.000	17	51.113.000	17	79.933.000	100,00%	61,73%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100	44.590.409.947	100	5.511.283.100	100	4.998.976.687	100	4.494.327.636	100	13.525.309.604	100	28.529.897.027	100,00%	63,98%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Persen)	100	429.792.250	100	-	100	8.350.000	100	10.995.000	100	60.150.250	100	79.495.250	100,00%	18,50%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Persen)	100	2.430.837.250	100	-	100	910.000	100	3.075.000	100	129.380.250	100	133.365.250	100,00%	5,49%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Persen)	100	138.391.000	100	-	100	-	100	3.350.000	100	16.145.000	100	19.495.000	100,00%	14,09%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Persen)	100	335.677.750	100	-	100	2.800.000	100	29.895.000	100	60.131.500	100	92.826.500	100,00%	27,65%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen)	100	404.608.600	100	-	100	-	100	9.976.000	100	152.746.000	100	162.722.000	100,00%	40,22%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan	100	4.950.000	-	-	-	-	-	-	78	4.500.000	78	4.500.000	78,00%	90,91%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	sesuai standar (Persen)														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Persen)	100	119.316.000	100	-	100	47.650.000	100	6.500.000	100	20.165.000	100	74.315.000	100,00%	62,28%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen)	100	140.059.250	100	-	100	-	100	600.000	100	22.315.000	100	22.915.000	100,00%	16,36%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen)	100	122.096.750	100	-	100	-	100	-	100	14.905.000	100	14.905.000	100,00%	12,21%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Persen)	100	71.573.380	100	-	100	-	100	975.000	100	14.820.000	100	15.795.000	100,00%	22,07%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Persen)	100	87.525.000	100	-	100	-	100	1.375.000	100	17.310.000	100	18.685.000	100,00%	21,35%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (Persen)	100	37.800.000	100	-	100	-	100	-	100	11.735.000	100	11.735.000	100,00%	31,04%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan penderita DBD dan KLB yang ditangani (Persen)	100	4.997.488.135	100	-	100	-	100	97.245.000	100	959.789.750	100	1.057.034.750	100,00%	21,15%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang mampu melakukan Pelayanan Gizi Masyarakat (Puskesmas)	17	824.313.650	17	-	17	162.281.575	17	37.709.200	17	172.907.350	17	372.898.125	100,00%	45,24%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas)	17	122.061.000	17	-	17	-	17	1.175.000	17	34.160.000	17	35.335.000	100,00%	28,95%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) yang diverifikasi (Kelurahan) (Kelurahan)	70	286.765.700	70	-	70	7.000.000	70	11.475.000	70	102.029.000	70	120.504.000	100,00%	42,02%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan Promosi Kesehatan (Puskesmas)	17	981.306.160	17	-	17	-	17	38.143.000	17	356.452.500	17	394.595.500	100,00%	40,21%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional dan asuhan	17	10.550.000	17	-	17	-	17	-	17	10.550.000	17	10.550.000	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	mandiri (Puskesmas) (Puskesmas)														
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans kesehatan (Puskesmas) (Puskesmas)	17	1.394.160.710	17	-	17	-	17	230.000.000	17	421.394.010	17	651.394.010	100,00%	46,72%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Puskesmas)	17	52.425.000	-	-	-	-	-	450.000	17	10.175.000	17	10.625.000	100,00%	20,27%
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Khusus (Puskesmas)	17	10.400.000	17	-	17	4.800.000	17	-	17	5.600.000	17	10.400.000	100,00%	100,00%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan terintegrasi penyakit menular (Puskesmas) (Puskesmas)	17	1.240.319.350	17	-	17	27.300.000	17	83.120.000	17	445.158.550	17	555.578.550	100,00%	44,79%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta integrasi program BPJS bagi Masyarakat kabupaten Soppeng (Orang) (Orang)	272000	16.661.580.600	272.000	5.142.443.100	272.000	3.167.333.498	272.000	1.697.614.600	272.000	5.835.015.800	272.000	15.842.406.998	100,00%	95,08%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Cakupan penemuan AFP < 15 tahun (Persen)	100	7.810.000	-	-	-	-	-	-	-	3.260.000	-	3.260.000	0,00%	41,74%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kelurahan ODF/SBS di kabupaten Soppeng dalam upaya Pencapaian Kota Sehat (Kelurahan) (Kelurahan)	70	13.800.000	70	-	70	-	70	-	70	13.520.000	70	13.520.000	100,00%	97,97%
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang tersedia biaya operasional (RSUD Gandus) (RSUD Gandus)	1	8.061.056.936	1	173.640.000	1	1.209.314.200	1	895.075.013	1	2.589.746.300	1	4.867.775.513	100,00%	60,39%
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang tersedia biaya operasional (Puskesmas)	17	1.132.433.650	17	-	17	-	17	213.418.050	17	367.143.600	17	580.561.650	100,00%	51,27%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia biaya operasional (PMI) (PMI)	2	3.595.588.634	2	195.200.000	2	361.237.414	2	1.121.861.773	2	1.672.079.744	2	3.350.378.931	100,00%	93,18%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang lulus survei reakreditasi (Puskesmas)	8	811.631.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Jumlah Puskesmas yang mampu melakukan investigasi awal KIPI (Puskesmas)	17	35.100.000	-	-	-	-	-	-	17	1.625.000	17	1.625.000	100,00%	4,63%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Massal)															
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan kewaspadaan dini dan respon wabah (Puskesmas)	17	28.991.500	-	-	-	-	-	300.000	17	400.000	17	700.000	100,00%	2,41%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (Persen)	100	164.986.500	100	-	100	2.500.000	100	1.000.000	100	153.486.500	100	156.986.500	100,00%	95,15%
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah media informasi kesehatan yang dikelola (media)	1	3.986.500	-	-	1	-	-	-	-	3.986.500	1	3.986.500	100,00%	100,00%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola (sistem/aplikasi)	1	161.000.000	1	-	1	2.500.000	1	1.000.000	1	149.500.000	1	153.000.000	100,00%	95,03%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki izin operasional (Persen)	100	263.045.000	100	-	100	14.785.000	100	48.079.950	100	171.104.850	100	233.969.800	100,00%	88,95%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Jenis Dokumen akreditasi (Dokumen)	8	250.845.000	-	-	-	8.335.000	-	46.679.950	-	166.904.850	-	221.919.800	0,00%	88,47%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan Kinerja baik (Layanan)	1	12.200.000	1	-	1	6.450.000	1	1.400.000	1	4.200.000	1	12.050.000	100,00%	98,77%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,61%	78,14%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			8.993.570.015		-		4.200.000		3.721.605.858		3.373.589.070		7.099.394.928		78,94%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) (%)	100	8.751.330.015	100	-	100	-	100	3.717.405.858	100	3.182.878.570	100	6.900.284.428	100,00%	78,85%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumla Tenaga Kesehatan yang dibutuh kan (Orang)	25	8.751.330.015	25	-	25	-	25	3.717.405.858	25	3.182.878.570	25	6.900.284.428	100,00%	78,85%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan kompetensi (Persen)	100	242.240.000	100	-	100	4.200.000	100	4.200.000	100	190.710.500	100	199.110.500	100,00%	82,20%



II-284



Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			97.745.000		-		-		62.660.000		6.500.000		69.160.000		70,76%		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP Pre Market yang dilakukan pengawasan dan pengendalian tentang kesehatan makanan (IRTP) (IRTP)	2	97.745.000	-	-	-	-	1	62.660.000	1	6.500.000	2	69.160.000	100,00%	70,76%		
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan (Persen)	100	81.097.000	100	-	100	-	100	1.079.600	100	35.893.600	100	36.973.200	100,00%	45,59%		
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (Sarana)	270	81.097.000	-	-	20	-	150	1.079.600	50	35.893.600	220	36.973.200	81,48%	45,59%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												91,15%	74,34%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			886.800.750		-		42.400.000		73.446.000		451.246.900		567.092.900		63,95%		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Persen)	100	260.601.000	100	-	100	-	100	-	100	216.611.000	100	216.611.000	100,00%	83,12%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang mampu melakukan upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas) (Puskesmas)	17	260.601.000	-	-	-	-	-	-	17	216.611.000	17	216.611.000	100,00%	83,12%		
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersihdan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Persen)	100	140.000.000	100	-	100	35.850.000	100	21.430.000	100	61.048.000	100	118.328.000	100,00%	84,52%		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah media yang digunakan untuk pelaksanaan promosi kesehatan (media saluran) (Media Saluran)	2	140.000.000	-	-	1	35.850.000	1	21.430.000	2	61.048.000	2	118.328.000	100,00%	84,52%		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100	486.199.750	100	-	100	6.550.000	100	52.016.000	100	173.587.900	100	232.153.900	100,00%	47,75%		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaa n Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM (Posyandu aktif) yang dibina (Posyandu) (Posyandu)	70	486.199.750	-	-	10	6.550.000	22	52.016.000	53	173.587.900	53	232.153.900	75,71%	47,75%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												86,69%	63,95%
				Predikat Kinerja												Tinggi	Rendah
		323.975.739.004		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,34%	82,16%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.468.121.237		2.538.399.206		4.012.233.442		3.040.371.700		3.813.120.508		13.404.124.856		86,66%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	15	28.844.300	3	-	3	-	-	6.900.000	-	15.674.150	6	22.574.150	40,00%	78,26%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun (Dokumen)	3	11.119.750	-	-	-	-	-	3.600.000	3	6.548.750	3	10.148.750	100,00%	91,27%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	2.199.800	-	-	-	-	-	-	1	1.190.000	1	1.190.000	100,00%	54,10%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1	2.324.750	-	-	-	-	-	-	1	1.492.400	1	1.492.400	100,00%	64,20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	10	13.200.000	2	-	3	-	2	3.300.000	3	6.443.000	10	9.743.000	100,00%	73,81%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	8	13.741.397.057	2	2.538.399.206	2	4.012.233.442	-	2.620.155.155	-	2.704.776.489	4	11.875.564.292	50,00%	86,42%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	145	13.703.097.057	140	2.538.399.206	140	4.012.233.442	141	2.602.155.155	136	2.685.726.489	139	11.838.514.292	96,03%	86,39%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	8	38.300.000	1	-	2	-	1	18.000.000	4	19.050.000	8	37.050.000	100,00%	96,74%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah buku inventaris barang milik daerah (Buku)	6	7.900.000	1	-	2	-	-	3.600.000	-	4.300.000	3	7.900.000	50,00%	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	6	7.900.000	1	-	2	-	1	3.600.000	2	4.300.000	6	7.900.000	100,00%	100,00%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis retribusi yang dikelola (jenis)	3	1.160.000	3	-	-	-	-	-	-	843.000	1	843.000	25,00%	72,67%
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	3	1.160.000	3	-	3	-	3	-	3	843.000	3	843.000	100,00%	72,67%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya (ASN)	145	29.500.000	141	-	141	-	-	14.400.000	-	15.100.000	71	29.500.000	48,62%	100,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)	100	14.750.000	25	-	25	-	25	7.200.000	25	7.550.000	100	14.750.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (Dokumen)	2	14.750.000	-	-	1	-	-	7.200.000	1	7.550.000	2	14.750.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	6	512.724.975	6	-	6	-	-	97.962.889	-	290.243.644	3	388.206.533	50,00%	75,71%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	2.992.475	25	-	25	-	25	-	25	2.597.000	100	2.597.000	100,00%	86,78%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor (%)	100	64.950.000	25	-	25	-	25	-	25	47.000.000	100	47.000.000	100,00%	72,36%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%)	100	20.178.850	25	-	25	-	25	4.375.000	25	12.907.800	100	17.282.800	100,00%	85,65%
Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan bahan/material (%)	100	60.951.250	25	-	25	-	25	31.385.000	25	23.512.000	100	54.897.000	100,00%	90,07%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi (%)	100	12.000.000	25	-	25	-	25	-	25	-	100	-	100,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)	100	351.652.400	25	-	25	-	25	62.202.889	25	204.226.844	100	266.429.733	100,00%	75,77%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			221.875.000		-		-		-		214.591.000		214.591.000		96,72%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya (%)	100	221.875.000	-	-	-	-	-	-	100	214.591.000	100	214.591.000	100,00%	96,72%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	2	350.323.748	2	-	2	-	-	168.130.256	-	170.383.331	1	338.513.587	50,00%	96,63%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik kantor yang dibayar per bulan (Rekening)	4	131.923.748	4	-	4	-	4	59.230.256	4	62.033.331	4	121.263.587	100,00%	91,92%
	Jumlah rekening air kantor yang dibayar per bulan (Rekening)	2		2		2		2		2		100,00%			
	Jumlah rekening internet kantor yang dibayar per bulan (Rekening)	2		2		2		2		2		100,00%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor (%)	100	218.400.000	25	-	25	-	25	108.900.000	25	108.350.000	100	217.250.000	100,00%	99,47%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	128	574.396.157	30	-	30	-	-	129.223.400	-	397.208.894	60	526.432.294	46,88%	91,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (%)	100	38.397.790	25	-	25	-	25	14.016.200	25	14.610.600	100	28.626.800	100,00%	74,55%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kendaraan Dinas Jabatan															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara (%)	100	238.789.432	25	-	25	-	25	49.293.000	15	160.660.494	90	209.953.494	90,00%	87,92%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase alat besar yang dipelihara (%)	100	249.998.935	25	-	25	-	25	57.754.200	25	185.044.800	100	242.799.000	100,00%	97,12%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan perbaikan peralatan kerja yang rusak ringan/sedang/berat (%)	100	19.840.000	25	-	25	-	25	-	25	17.775.000	100	17.775.000	100,00%	89,59%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	100	27.370.000	25	-	25	-	25	8.160.000	25	19.118.000	100	27.278.000	100,00%	99,66%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96,33%	86,66%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			22.196.608.008		1.017.098.600		5.198.579.900		3.876.448.380		10.291.825.841		20.383.952.721		91,83%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan titik genangan air (%)	0	2.963.495.000	-	-	-	-	-	14.100.000	-	1.792.674.020	-	1.806.774.020	0,00%	60,97%
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen database sungai yang tersusun (Dokumen)	1	38.495.000	-	-	-	-	-	14.100.000	1	16.970.000	1	31.070.000	100,00%	80,71%
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun (unit)	2	2.925.000.000	-	-	-	-	-	-	2	1.775.704.020	2	1.775.704.020	100,00%	60,71%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			19.233.113.008		1.017.098.600		5.198.579.900		3.862.348.380		8.499.151.821		18.577.178.701		96,59%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi secara partisipatif	300	1.574.646.678	-	-	-	-	-	30.422.800	300	1.047.953.800	300	1.078.376.600	100,00%	68,48%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)					
				I		II		III		IV									
				4		5		6		7									
1	2	3		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
	(Meter)																		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran dan jumlah bendung yang direhabilitasi (Meter)	1000	17.374.723.830	200	1.017.098.600	300	5.198.579.900	400	3.828.625.580	100	7.237.898.021	1.000	17.282.202.101	100,00%	99,47%				
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang dilaksanakan OP irigasi (DI)	20	72.692.500	-	-	-	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	6.600.000	0,00%	9,08%				
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah petugas OP Irigasi (Orang)	50	211.050.000	50	-	50	-	50	-	50	210.000.000	50	210.000.000	100,00%	99,50%				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,67%	91,83%				
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			6.142.009.250		-		-		1.431.115.098		3.213.490.292		4.644.605.390		75,62%				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			6.142.009.250		-		-		1.431.115.098		3.213.490.292		4.644.605.390		75,62%				
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/direhabilitasi (Paket)	15	4.799.087.450	-	-	-	-	13	1.431.115.098	2	3.213.490.292	15	4.644.605.390	100,00%	96,78%				
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			1.342.921.800		-		-		-		-		-		0,00%				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										78,14%	75,62%				
				Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.926.093.000		-		-		504.315.000		1.409.879.950		1.914.194.950		99,38%				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.926.093.000		-		-		504.315.000		1.409.879.950		1.914.194.950		99,38%				
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sarana air limbah yang dibangun (Paket)	6	1.793.893.000	-	-	-	-	6	439.140.000	-	1.344.985.000	6	1.784.125.000	100,00%	99,46%				
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat (kegiatan)	8	5.000.000	2	-	2	-	2	1.875.000	2	1.594.950	8	3.469.950	100,00%	69,40%				
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	jumlah rumah tangga yang dilayani Layanan Lumpur (Rumah Tangga)	50	127.200.000	10	-	15	-	10	63.300.000	15	63.300.000	50	126.600.000	100,00%	99,53%				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,38%				





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			4.979.200.000		29.983.000		-		1.081.776.950		1.874.827.100		2.986.587.050		59,98%		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			4.979.200.000		29.983.000		-		1.081.776.950		1.874.827.100		2.986.587.050		59,98%		
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah pengawasan perizinan bangunan yang terfasilitasi (Kali)	0	19.200.000	-	-	-	-	-	7.875.000	-	7.950.300	-	15.825.300	0,00%	82,42%		
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan gedung negara yang sesuai dengan ketentuan (Tahun)	1	4.960.000.000	-	29.983.000	-	-	1	1.073.901.950	-	1.866.876.800	1	2.970.761.750	100,00%	59,89%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												99,61%	59,98%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Rendah
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			3.029.727.716		-		458.480.000		1.456.606.000		874.478.420		2.789.564.420		92,07%		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			3.029.727.716		-		458.480.000		1.456.606.000		874.478.420		2.789.564.420		92,07%		
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah paket penataan bangunan yang direncanakan (Paket)	3	3.029.727.716	-	-	1	458.480.000	-	1.456.606.000	2	874.478.420	3	2.789.564.420	100,00%	92,07%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	92,07%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			75.870.411.180		169.895.000		3.243.850.000		17.588.318.237		3.816.437.254		24.818.500.491		32,71%		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			75.870.411.180		169.895.000		3.243.850.000		17.588.318.237		3.816.437.254		24.818.500.491		32,71%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang disusun (Dokumen)	1	104.400.000	-	-	-	-	1	7.200.000	-	96.973.000	1	104.173.000	100,00%	99,78%
Rekonstruksi Jalan			450.000.000		-		-		130.244.400		303.903.600		434.148.000		96,48%
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan statusnya (Km)	30	72.934.068.740	20	169.895.000	5	3.243.850.000	3	17.432.383.837	2	2.660.343.013	30	23.506.471.850	100,00%	32,23%
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Km)	20	1.014.710.570	-	-	3	-	5	12.090.000	4	124.670.441	12	136.760.441	60,00%	13,48%
Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (Unit)	2	920.000.000	-	-	-	-	-	-	1	428.203.000	1	428.203.000	50,00%	46,54%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi (Unit)	3	447.231.870	-	-	-	-	-	6.400.000	3	202.344.200	3	208.744.200	100,00%	46,67%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,27%	32,71%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			39.910.000		-		-		10.200.000		18.980.000		29.180.000		73,11%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			14.685.000		-		-		3.300.000		3.300.000		6.600.000		44,94%
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi			14.685.000		-		-		3.300.000		3.300.000		6.600.000		44,94%
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			17.200.000		-		-		6.900.000		7.950.000		14.850.000		86,34%
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional			17.200.000		-		-		6.900.000		7.950.000		14.850.000		86,34%
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			8.025.000		-		-		-		7.730.000		7.730.000		96,32%
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis (kegiatan)	1	8.025.000	-	-	-	-	-	-	1	7.730.000	1	7.730.000	100,00%	96,32%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										20,11%	73,11%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sedang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			31.000.000		-		-		10.800.000		20.175.000		30.975.000		99,92%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			19.100.000		-		-		7.200.000		11.875.000		19.075.000		99,87%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			19.100.000		-		-		7.200.000		11.875.000		19.075.000		99,87%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			11.900.000		-		-		3.600.000		8.300.000		11.900.000		100,00%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			11.900.000		-		-		3.600.000		8.300.000		11.900.000		100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	99,92%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi
		129.683.080.391		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										97,39%	54,75%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Rendah

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.778.525.411		439.775.037		828.149.930		527.272.273		744.551.023		2.539.748.263		91,41%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	11	78.530.000	-	-	-	28.500.000	6	11.400.000	11	37.430.000	11	77.330.000	100,00%	98,47%
	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	2	24.455.000	-	-	-	9.750.000	1	3.900.000	2	10.805.000	2	24.455.000	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	2		-		-		-		2		2		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang di susun (Dokumen)	2	20.650.000	-	-	-	7.000.000	1	2.800.000	2	10.850.000	2	20.650.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang di Evaluasi	3	33.425.000	-	-	1	11.750.000	1	4.700.000	1	15.775.000	3	32.225.000	100,00%	96,41%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Realisasi Kinerja SKPD	(Dokumen)														
	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	5		1		2		3		5		5		100,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	4	2.187.276.209	-	439.775.037	-	713.489.736	2	465.875.977	4	479.173.533	4	2.098.314.283	100,00%	95,93%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	19	2.155.976.209	19	439.775.037	19	703.239.736	19	461.775.977	19	462.223.533	19	2.067.014.283	100,00%	95,87%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kelengkapan jasa administrasi keuangan yang disediakan (Paket)	1	19.500.000	-	-	-	6.500.000	1	2.600.000	1	10.400.000	1	19.500.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Dokumen)	2	11.800.000	-	-	-	3.750.000	1	1.500.000	2	6.550.000	2	11.800.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi (Jenis)	6	380.092.102	1	-	2	61.201.194	2	40.276.296	1	136.515.640	6	237.993.130	100,00%	62,61%
	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100		-		-		-		100		100			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	12	2.266.573	-	-	-	-	12	2.266.573	-	-	12	2.266.573	100,00%	100,00%
	Jumlah kelengkapan jasa surat menyurat yang tersedia (Tahun)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	6	58.435.929	-	-	-	14.480.744	-	6.033.123	6	17.200.440	6	37.714.307	100,00%	64,54%
	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (Kali)	12		3		6		9		12		12		100,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman (Orang)	1315	72.455.000	-	-	339	4.905.000	339	10.670.000	637	33.240.000	1.315	48.815.000	100,00%	67,37%
	Jumlah tabung gas (Kali)	22		4		6		6		6		22		100,00%	
	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Meter)	35	16.528.000	-	-	-	5.777.000	16	4.483.500	19	6.267.500	35	16.528.000	100,00%	100,00%
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Rangkap)	368		50		200		275		368		368		100,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	48	78.396.600	37	-	36	30.438.450	48	14.263.900	48	33.443.500	48	78.145.850	100,00%	99,68%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah petugas kebersihan, jumlah jenis peralatan/bahan pembersih (Orang)	2		2		2		2		2		2		100,00%	
	Jumlah petugas kebersihan, jumlah jenis peralatan/bahan pembersih (Jenis)	7		1		2		2		7		100,00%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (kali)	30	152.010.000	4	-	8	5.600.000	8	2.559.200	3	46.364.200	23	54.523.400	76,67%	35,87%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Unit)	7	55.235.000	-	-	-	-	-	-	5	48.835.000	5	48.835.000	71,43%	88,41%
	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	7	55.235.000	-	-	-	-	-	-	5	48.835.000	5	48.835.000	71,43%	88,41%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Jenis)	2	14.000.000	-	-	-	6.409.000	1	2.000.000	1	5.494.750	2	13.903.750	100,00%	99,31%
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah STNK kendaraan dinas/oprasional (Unit)	2	14.000.000	1	-	-	6.409.000	-	2.000.000	2	5.494.750	2	13.903.750	100,00%	99,31%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Meter)	393	63.392.100	-	-	-	18.550.000	-	7.720.000	393	37.102.100	393	63.372.100	100,00%	99,97%
	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara (Unit)	2	49.000.000	1	-	1	17.350.000	-	6.500.000	-	25.150.000	2	49.000.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	10	5.020.000	-	-	2	1.200.000	6	1.220.000	10	2.580.000	10	5.000.000	100,00%	99,60%
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	10		-		-		-		10		10		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(Jenis)														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara (M2)	393	9.372.100	-	-	-	-	-	-	393	9.372.100	393	9.372.100	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,79%	91,41%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			123.043.900		-		12.250.000		15.067.800		85.726.300		113.044.100		91,87%
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana/relokasi yang dibangun/rehab (Unit)	32	123.043.900	1	-	2	12.250.000	8	15.067.800	23	85.726.300	34	113.044.100	106,25%	91,87%
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah tinggal korban bencana yang dibangun/rehabilitasi (Rumah)	32	123.043.900	1	-	3	12.250.000	11	15.067.800	34	85.726.300	34	113.044.100	106,25%	91,87%
	Jumlah Rumah Yang Direhabilitasi akibat bencana (Unit)	32		-		-		-		32		32		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										103,13%	91,87%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			56.400.000		-		16.390.000		6.000.000		22.670.000		45.060.000		79,89%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten yang diselesaikan (Kasus)	2	56.400.000	-	-	-	16.390.000	-	6.000.000	3	22.670.000	3	45.060.000	150,00%	79,89%
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan (Kasus)	2	56.400.000	-	-	-	16.390.000	-	6.000.000	3	22.670.000	3	45.060.000	150,00%	79,89%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										150,00%	79,89%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
		2.957.969.311		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										99,95%	91,21%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				4		5		6		7					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.527.912.896		1.055.783.237		2.017.835.860		1.424.526.847		1.673.412.714		6.171.558.658		94,54%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	11	17.609.036	-	-	1	3.750.000	-	2.250.000	-	7.480.000	-	13.480.000	0,00%	76,55%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	2	4.600.000	-	-	1	-	1	-	-	3.900.000	2	3.900.000	100,00%	84,78%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	9.700.000	-	-	1	3.750.000	1	2.250.000	-	3.000.000	2	9.000.000	100,00%	92,78%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	9	3.309.036	2	-	3	-	2	-	2	580.000	9	580.000	100,00%	17,53%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	19	5.177.468.678	4	1.014.636.702	5	1.656.960.544	-	1.080.247.660	-	1.120.408.727	2	4.872.253.633	11,84%	94,10%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	56	5.154.628.778	56	1.014.636.702	56	1.649.560.544	56	1.075.347.660	56	1.112.148.727	56	4.851.693.633	100,00%	94,12%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (Dokumen)	1	4.000.000	1	-	1	900.000	1	1.000.000	1	2.100.000	1	4.000.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	20	18.839.900	5	-	5	6.500.000	5	3.900.000	5	6.160.000	20	16.560.000	100,00%	87,90%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11.509.600		-		3.250.000		1.950.000		4.309.700		9.509.700		82,62%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah (Dokumen)	6	11.509.600	1	-	1	3.250.000	2	1.950.000	2	4.309.700	6	9.509.700	100,00%	82,62%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (ASN)	50	31.900.000	50	-	50	3.250.000	-	15.933.200	-	4.899.300	-	24.082.500	0,00%	75,49%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian dinas yang diadakan (set)	28	15.500.000	-	-	-	-	28	13.983.200	-	1.499.300	28	15.482.500	100,00%	99,89%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaiaan (Dokumen)	5	16.400.000	1	-	1	3.250.000	1	1.950.000	2	3.400.000	5	8.600.000	100,00%	52,44%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	7	493.806.477	-	2.970.000	6	146.129.700	-	111.172.483	-	211.380.250	6	471.652.433	85,71%	95,51%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat/Penerangan Bangunan (Jenis)	18	15.203.277	3	-	3	7.188.400	5	-	7	6.501.000	18	13.689.400	100,00%	90,04%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	7	6.114.000	-	-	2	-	2	-	3	3.082.000	7	3.082.000	100,00%	50,41%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	2	264.460.000	2	2.970.000	2	96.405.000	2	66.525.000	2	97.850.000	2	263.750.000	100,00%	99,73%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis) (jenis)	2	21.750.000	2	-	2	-	2	10.500.000	2	11.250.000	2	21.750.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	51	94.205.400	10	-	20	21.998.100	20	14.811.000	1	40.613.850	51	77.422.950	100,00%	82,19%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	203	92.073.800	20	-	80	20.538.200	50	19.336.483	53	52.083.400	203	91.958.083	100,00%	99,87%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	1	100.001.315	-	-	1	-	-	50.667.650	-	49.122.700	1	99.790.350	100,00%	99,79%
Pengadaan Mebel	Jumlah meubel yang diadakan (jenis)	2	35.469.315	-	-	1	-	1	13.300.650	-	21.999.450	2	35.300.100	100,00%	99,52%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit)	10	64.532.000	2	-	2	-	3	37.367.000	3	27.123.250	10	64.490.250	100,00%	99,94%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	2	93.287.170	2	18.361.835	2	20.643.738	-	20.886.504	-	28.904.544	1	88.796.621	50,00%	95,19%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	93.287.170	3	18.361.835	3	20.643.738	3	20.886.504	3	28.904.544	12	88.796.621	100,00%	95,19%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	21	602.330.620	-	19.814.700	15	183.851.878	-	141.419.350	-	246.907.493	15	591.993.421	71,43%	98,28%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan stnk (Unit)	1	40.527.685	1	1.622.250	1	6.959.970	1	12.083.500	1	19.687.650	1	40.353.370	100,00%	99,57%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	29	554.552.935	29	18.192.450	29	176.891.908	29	129.335.850	29	219.969.843	29	544.390.051	100,00%	98,17%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	12	7.250.000	12	-	12	-	12	-	12	7.250.000	12	7.250.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	94,54%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.116.772.550		506.125.000		919.350.000		1.069.127.550		1.603.995.000		4.098.597.550		99,56%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh sat pol pp (%)	100	4.095.832.550	100	506.125.000	100	919.350.000	-	1.066.677.550	-	1.588.805.000	200	4.080.957.550	200,00%	99,64%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah patroli keamanan yang dilaksanakan (Hari)	365	407.600.000	91	198.525.000	91	2.750.000	91	132.545.000	92	71.105.000	365	404.925.000	100,00%	99,34%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang terbina (Orang)	120	3.000.000	-	-	-	-	-	-	120	3.000.000	120	3.000.000	100,00%	100,00%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Sat Pol PP yang terbina (Orang)	309	3.685.232.550	309	307.600.000	309	916.600.000	309	934.132.550	309	1.514.700.000	309	3.673.032.550	100,00%	99,67%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegak PERDA (%)	100	15.900.000	25	-	50	-	-	2.450.000	-	10.150.000	75	12.600.000	75,00%	79,25%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan dan pengawasan perda/perkada (Kali)	72	15.900.000	20	-	20	-	20	2.450.000	12	10.150.000	72	12.600.000	100,00%	79,25%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang terbina (%)	100	5.040.000	-	-	-	-	-	-	-	5.040.000	-	5.040.000	0,00%	100,00%
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil kabupaten Soppeng (Orang)	2	5.040.000	-	-	-	-	-	-	2	5.040.000	2	5.040.000	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,56%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			3.070.170.600		261.506.250		768.910.000		764.754.350		1.245.150.000		3.040.320.600		99,03%		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran diWMK yang tertangani dalam waktu 15 menit (%)	100	3.070.170.600	25	261.506.250	50	768.910.000	-	764.754.350	-	1.245.150.000	75	3.040.320.600	75,00%	99,03%		
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pemadam kebakaran (Orang)	224	3.009.414.350	224	248.100.000	224	744.340.000	224	764.754.350	224	1.229.150.000	224	2.986.344.350	100,00%	99,23%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah jenis sarana dan prsarana pencegahan kebakaran (Unit)	28	60.756.250	9	13.406.250	8	24.570.000	3	-	5	16.000.000	25	53.976.250	89,29%	88,84%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												99,79%	99,03%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		13.714.856.046		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										99,95%	97,05%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

DINAS SOSIAL															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.532.357.747		692.236.313		1.630.984.982		1.435.073.534		2.498.445.722		6.256.740.551		95,78%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	52.200.000	25	-	50	15.700.000	75	19.900.000	100	13.900.000	100	49.500.000	100,00%	94,83%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	11.250.000	-	-	-	2.600.000	3	8.550.000	3	-	3	11.150.000	100,00%	99,11%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun (Dokumen)	2	18.700.000	-	-	1	4.800.000	-	4.800.000	1	9.100.000	2	18.700.000	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	4	22.250.000	-	-	2	8.300.000	-	6.550.000	2	4.800.000	2	19.650.000	50,00%	88,31%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.106.734.362	25	631.437.813	50	978.514.665	75	633.424.435	100	658.039.975	100	2.901.416.888	100,00%	93,39%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	32	3.072.084.362	32	631.437.813	32	963.989.665	32	628.224.435	32	648.889.975	32	2.872.541.888	100,00%	93,50%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Materai (Lembar)	950	5.700.000	-	-	950	5.700.000	-	-	-	-	950	5.700.000	100,00%	100,00%
	Jumlah SPM yg diverifikasi (Dokumen)	300		75		75		75		75		300		100,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	300	28.950.000	15	-	15	8.825.000	-	5.200.000	270	9.150.000	300	23.175.000	100,00%	80,05%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100	1.556.832.041	25	-	50	217.778.241	75	568.799.700	100	735.114.300	100	1.521.692.241	100,00%	97,74%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	2	11.750.991	-	-	2	496.991	-	-	-	10.750.000	2	11.246.991	100,00%	95,71%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	2	14.290.000	-	-	2	8.870.000	-	190.000	-	3.615.000	2	12.675.000	100,00%	88,70%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	207093	396.900.050	-	-	69.031	6.000.050	69.031	234.654.700	69.031	153.103.500	207.093	393.758.250	100,00%	99,21%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	6	584.987.000	1	-	2	41.500.000	1	229.462.000	2	286.880.000	6	557.842.000	100,00%	95,36%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	426	548.904.000	130	-	105	160.911.200	136	104.493.000	55	280.765.800	426	546.170.000	100,00%	99,50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	1.064.745.000	25	-	50	108.515.000	75	14.950.000	100	924.207.000	100	1.047.672.000	100,00%	98,40%
Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan (Jenis)	5	305.040.000	1	-	1	108.515.000	-	-	3	195.250.000	5	303.765.000	100,00%	99,58%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	100	462.705.000	-	-	-	-	-	14.950.000	100	433.034.000	100	447.984.000	100,00%	96,82%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	1	297.000.000	-	-	-	-	-	-	1	295.923.000	1	295.923.000	100,00%	99,64%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	136.598.369	25	12.348.500	50	29.183.956	75	41.665.359	100	46.842.295	100	130.040.110	100,00%	95,20%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telpon,Air dan Listrik (Kali)	36	50.198.369	-	1.248.500	-	11.483.956	-	12.865.359	36	19.142.295	36	44.740.110	100,00%	89,13%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	3	86.400.000	1	11.100.000	1	17.700.000	1	28.800.000	-	27.700.000	3	85.300.000	100,00%	98,73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	615.247.975	25	48.450.000	50	281.293.120	75	156.334.040	100	120.342.152	100	606.419.312	100,00%	98,57%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			305.717.975		-		130.078.120		146.514.040		21.007.152		297.599.312		97,34%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	16	9.820.000	4	-	4	-	5	9.820.000	3	-	16	9.820.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	2350	299.710.000	1.350	48.450.000	500	151.215.000	500	-	-	99.335.000	2.350	299.000.000	100,00%	99,76%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95,15%	95,78%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			473.798.300		3.300.000		43.338.300		4.400.000		409.412.000		460.450.300		97,18%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan Pemberian Modal Usaha (%)	100	473.798.300	25	3.300.000	50	43.338.300	75	4.400.000	100	409.412.000	100	460.450.300	100,00%	97,18%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Kelompok)	2	473.798.300	-	3.300.000	2	43.338.300	-	4.400.000	-	409.412.000	2	460.450.300	100,00%	97,18%
	Petugas Pendamping PKH (Orang)	31		31		31		31		31		100,00%			
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,18%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			116.115.950		3.900.000		3.900.000		74.516.000		31.299.950		113.615.950		97,85%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar Panti (%)	100	116.115.950	25	3.900.000	50	3.900.000	75	74.516.000	100	31.299.950	100	113.615.950	100,00%	97,85%	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Panti Asuhan yang dibantu (Panti)	7	66.716.000	-	-	-	-	7	66.716.000	-	-	7	66.716.000	100,00%	100,00%	
	Jumlah Penyandang Disabilitas (Eks Kusta) yang dibantu (KK)	41		-		-		41		-		41		100,00%		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang tersedia (Unit)	10	25.000.000	-	-	-	-	-	-	9	22.500.000	9	22.500.000	90,00%	90,00%	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (BPJS) (Bulan)	12	24.399.950	3	3.900.000	6	3.900.000	-	7.800.000	3	8.799.950	12	24.399.950	100,00%	100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											97,85%	97,85%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			2.497.298.250		10.500.000		23.100.000		865.140.050		1.438.828.000		2.337.568.050		93,60%	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	2.497.298.250	25	10.500.000	50	23.100.000	75	865.140.050	100	1.438.828.000	100	2.337.568.050	100,00%	93,60%	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah (KK)	26764	91.200.000	26.764	10.500.000	26.764	14.900.000	26.764	32.900.000	26.764	30.100.000	26.764	88.400.000	100,00%	96,93%	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang di Verifikasi dan di Validasi (KK)	26764	2.406.098.250	26.764	-	26.764	8.200.000	26.764	832.240.050	26.764	1.408.728.000	26.764	2.249.168.050	100,00%	93,48%	
	Jumlah Fakir Miskin yang diberi bantuan sosial (BSP) (KK)	1602		1.602		1.602		1.602		1.602		100,00%				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	93,60%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			87.000.000		24.750.000		2.250.000		43.500.000		16.500.000		87.000.000		100,00%	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan	100	87.000.000	25	24.750.000	50	2.250.000	75	43.500.000	100	16.500.000	100	87.000.000	100,00%	100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)				
			I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota	Jaminan Sosial (%)															
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Bulan)	12	87.000.000	3	24.750.000	3	2.250.000	3	43.500.000	3	16.500.000	12	87.000.000	100,00%	100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			92.840.640		27.930.000		9.760.000		48.120.640		5.200.000		91.010.640		98,03%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan (%)	100	92.840.640	25	27.930.000	50	9.760.000	75	48.120.640	100	5.200.000	100	91.010.640	100,00%	98,03%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Veteran yang diberi bantuan bingkisan (Keluarga)	63	92.840.640	-	27.930.000	-	9.760.000	63	48.120.640	-	5.200.000	63	91.010.640	100,00%	98,03%	
	Jumlah Monumen Sejarah yang dipelihara (Gapis) (Monumen)	1		1		-		-		1		100,00%				
	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (Taman Makam Pahlawan)	1		1		-		-		1		100,00%				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	98,03%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		9.799.410.887		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											96,74%	95,38%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.490.207.047		496.519.735		971.471.469		621.446.824		966.474.738		3.055.912.766		87,56%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	46.512.300	25	-	25	9.354.400	25	11.057.600	10	20.455.850	85	40.867.850	85,00%	87,86%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	2	2.124.850	-	-	1	1.124.550	1	-	-	962.500	2	2.087.050	100,00%	98,22%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(Dokumen)														
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	26.814.750	-	-	-	5.018.100	1	6.692.250	1	11.916.950	2	23.627.300	100,00%	88,11%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	7	17.572.700	2	-	3	3.211.750	1	4.365.350	1	7.576.400	7	15.153.500	100,00%	86,23%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	2.640.945.928	25	489.469.377	25	774.769.128	25	486.599.853	10	509.957.003	85	2.260.795.361	85,00%	85,61%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	100	2.578.971.428	25	489.469.377	25	760.698.678	25	471.799.403	5	479.492.103	80	2.201.459.561	80,00%	85,36%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.650.000		-		1.161.000		1.161.000		2.320.000		4.642.000		99,83%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	13	57.324.500	3	-	3	12.909.450	3	13.639.450	1	28.144.900	10	54.693.800	76,92%	95,41%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	429.349.455	-	-	50	120.158.400	25	52.458.100	-	254.508.750	75	427.125.250	75,00%	99,48%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	1.499.855	-	-	-	-	25	-	15	1.499.700	40	1.499.700	40,00%	99,99%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor (%)	100	99.650.000	-	-	25	23.385.000	50	600.000	5	74.525.000	80	98.510.000	80,00%	98,86%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%)	100	41.749.400	25	-	25	5.431.650	25	5.433.050	10	30.801.950	85	41.666.650	85,00%	99,80%
Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan bahan/material (%)	100	65.304.400	25	-	25	10.329.850	25	7.380.450	5	46.900.400	80	64.610.700	80,00%	98,94%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi (%)	100	5.005.000	-	-	25	-	50	2.450.000	25	2.450.000	100	4.900.000	100,00%	97,90%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	133	216.140.800	25	-	15	81.011.900	45	36.594.600	15	98.331.700	100	215.938.200	75,19%	99,91%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-		0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-		0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	169.811.000	25	7.050.358	25	35.791.691	25	37.050.811	15	71.880.640	90	151.773.500	90,00%	89,38%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik kantor yang dibayar per bulan (Rekening)	12	40.811.000	3	7.050.358	3	5.799.691	3	7.598.811	2	10.940.640	11	31.389.500	91,67%	76,91%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor (%)	100	129.000.000	25	-	25	29.992.000	25	29.452.000	5	60.940.000	80	120.384.000	80,00%	93,32%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	203.588.364	20	-	25	31.397.850	25	34.280.460	15	109.672.495	85	175.350.805	85,00%	86,13%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	1	58.388.120	-	-	1	8.786.000	-	9.329.600	-	19.614.400	1	37.730.000	100,00%	64,62%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara (%)	12	120.292.044	3	-	2	20.211.850	3	21.017.860	4	71.819.220	12	113.048.930	100,00%	93,98%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (unit)	22	5.430.000	-	-	7	2.400.000	7	2.410.000	2	620.000	16	5.430.000	72,73%	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (M2)	1100	19.478.200	-	-	-	-	1.000	1.523.000	-	17.618.875	1.000	19.141.875	90,91%	98,27%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										81,09%	87,56%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.063.828.700		-		306.078.425		219.776.000		529.679.525		1.055.533.950		99,22%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota (%)	100	224.324.700	-	-	50	9.024.350	25	8.980.350	25	205.540.000	100	223.544.700	100,00%	99,65%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (Kegiatan)	1	224.324.700	-	-	1	9.024.350	-	8.980.350	-	205.540.000	1	223.544.700	100,00%	99,65%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	571.625.000	25	-	25	274.637.825	25	141.737.900	-	147.785.575	75	564.161.300	75,00%	98,69%		
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (%)	100	41.125.000	-	-	-	10.013.750	100	9.117.750	-	16.933.500	100	36.065.000	100,00%	87,70%		
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota (%)	100	530.500.000	25	-	25	264.624.075	25	132.620.150	10	130.852.075	85	528.096.300	85,00%	99,55%		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	267.879.000	-	-	25	22.416.250	50	69.057.750	-	176.353.950	75	267.827.950	75,00%	99,98%		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (%)	100	144.725.000	-	-	-	4.950.000	100	51.112.500	-	88.612.500	100	144.675.000	100,00%	99,97%		
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (%)	100	123.154.000	-	-	25	17.466.250	50	17.945.250	25	87.741.450	100	123.152.950	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												92,52%	99,22%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		4.554.035.747		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												83,76%	90,28%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Tinggi	Sangat Tinggi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.438.348.187		762.958.662		1.448.664.643		926.537.904		1.715.614.947		4.853.776.156		89,25%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14	35.907.050	3	-	2	13.202.450	4	5.890.000	5	16.814.600	14	35.907.050	100,00%	100,00%
	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
	Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	3.124.900	-	-	1	-	1	1.790.000	1	1.334.900	3	3.124.900	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	3		-		-		-		1		1		33,33%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	2	2.567.200	-	-	-	-	1	-	1	2.567.200	2	2.567.200	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	2		-		-		-		1		1		50,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	9	30.214.950	3	-	1	13.202.450	2	4.100.000	3	12.912.500	9	30.214.950	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9		-		-		-		3		3		33,33%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	6	4.202.091.764	1	762.958.662	1	1.254.005.923	1	782.229.133	3	850.929.919	6	3.650.123.637	100,00%	86,86%
	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	37	4.160.470.014	37	762.958.662	37	1.239.005.923	37	776.229.133	36	830.308.169	37	3.608.501.887	99,32%	86,73%
	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	36		-		-		-		36		36		100,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yg diverifikasi (Dokumen)	200	21.734.750	10	-	15	8.000.000	50	3.200.000	90	10.534.750	165	21.734.750	82,50%	100,00%
	Jumlah SPM yang terverikasi (SPM)	150		-		-		-		90		90		60,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	4	19.887.000	1	-	1	7.000.000	1	2.800.000	1	10.087.000	4	19.887.000	100,00%	100,00%
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	4		-		-		-		1		1		25,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah buku inventaris barang milik daerah (Buku)	1	8.374.900	-	-	-	3.874.850	-	1.305.000	1	2.750.000	1	7.929.850	100,00%	94,69%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada PD (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah (Dokumen)	5	8.374.900	1	-	1	3.874.850	1	1.305.000	2	2.750.000	5	7.929.850	100,00%	94,69%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaianya (ASN)	36	33.149.800	36	-	36	13.489.900	36	5.729.950	36	13.489.900	36	32.709.750	100,00%	98,67%
	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaiaan (Dokumen)	5	17.100.000	1	-	1	6.989.900	2	2.919.950	1	6.969.900	5	16.879.750	100,00%	98,71%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola (sistem informasi)	2	16.049.800	2	-	2	6.500.000	2	2.810.000	2	6.520.000	2	15.830.000	100,00%	98,63%
	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola (Sistem informasi)	2		-		-		-		2		2		100,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	7	407.952.710	7	-	7	89.983.410	7	57.324.350	7	248.185.399	7	395.493.159	100,00%	96,95%
	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	5	1.499.650	-	-	5	1.499.650	-	-	-	-	5	1.499.650	100,00%	100,00%
	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (Jenis)	5		-		-		-		5		5		100,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	5	7.374.500	-	-	5	4.976.000	5	-	5	2.398.500	5	7.374.500	100,00%	100,00%
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	5		-		-		-		5		5		100,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	2	49.075.000	2	-	2	12.565.000	2	7.490.000	2	28.635.000	2	48.690.000	100,00%	99,22%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	30000	18.349.800	7.500	-	7.500	2.259.800	8.000	3.225.000	7.000	12.865.000	30.000	18.349.800	100,00%	100,00%
	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan	3												100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penggandaan yang Tersedia (Jenis)			-		-		-		3		3			
Penyediaan Bahan/Material	Jumalh jenis bahan/material yang di sediakan (Jenis)	40	102.106.160	40	-	40	26.616.560	40	12.560.350	40	62.929.250	40	102.106.160	100,00%	100,00%
	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4		-		-		-		4		4		100,00%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	100	18.000.000	10	-	20	-	50	-	20	18.000.000	100	18.000.000	100,00%	100,00%
	Jumlah tamu yg terfasilitasi (Orang)	400		-		-		-		320		320		80,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	300	204.547.600	30	-	65	42.066.400	165	34.049.000	299	116.357.649	299	192.473.049	99,67%	94,10%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi/website yang terkelola (Aplikasi/Website)	1	7.000.000	-	-	-	-	-	-	1	7.000.000	1	7.000.000	100,00%	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	5	138.500.000	-	-	-	-	-	-	5	137.555.000	5	137.555.000	100,00%	99,32%
	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Jenis)	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	1	6.000.000	1	6.000.000	100,00%	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	5	132.500.000	-	-	-	-	-	-	5	131.555.000	5	131.555.000	100,00%	99,29%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	2	114.277.939	2	-	2	45.286.955	2	18.379.971	2	46.980.573	2	110.647.499	100,00%	96,82%
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telpn,Air dan Listrik (Kali)	12	50.677.939	3	-	3	18.786.955	3	7.779.971	3	20.480.573	12	47.047.499	100,00%	92,84%
	Jumlah pemenuhan jasa telepon (Kali)	12		-		-		-		3		3		25,00%	
	Jumlah pemenuhan listrik (Kali)	12		-		-		-		3		3		25,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	3	63.600.000	3	-	3	26.500.000	3	10.600.000	3	26.500.000	3	63.600.000	100,00%	100,00%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	105	498.094.024	12	-	21	28.821.155	31	55.679.500	41	398.909.556	105	483.410.211	100,00%	97,05%	
	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yng dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	21	75.247.120	3	-	7	8.288.750	5	19.103.500	6	42.704.185	21	70.096.435	100,00%	93,15%	
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik (Unit)	21		-		-		-		6		6		28,57%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	55	195.052.629	7	-	8	7.863.130	18	35.176.000	22	143.615.871	55	186.655.001	100,00%	95,69%	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik (Unit)	55		-		-		-		22		22		40,00%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	31	19.550.000	2	-	5	4.425.000	8	1.400.000	16	13.650.000	31	19.475.000	100,00%	99,62%	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik (Unit)	31		-		-		-		16		16		51,61%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara(meter/persegi) (meter per segi)	270	208.244.275	-	-	270	8.244.275	270	-	270	198.939.500	270	207.183.775	100,00%	99,49%	
	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	270		-		-		-		270		270		100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											97,10%	89,25%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			29.545.000		-		-		8.625.000		20.920.000		29.545.000		100,00%	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG (SKPD)	34	4.750.000	-	-	-	-	34	4.750.000	-	-	-	4.750.000	0,00%	100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	2,5		-		-		-		2		2		62,40%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi (Peserta)	75	4.750.000	-	-	-	-	75	4.750.000	-	-	75	4.750.000	100,00%	100,00%
	Jumlah peserta advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Peserta)	75		-		-		-		75		75		100,00%	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota (Organisasi Perempuan)	20	24.795.000	-	-	-	-	20	3.875.000	-	20.920.000	-	24.795.000	0,00%	100,00%
	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan (%)	70		-		-		-		85		85		121,54%	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi (Peserta)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang dibina (Organisasi)	20	24.795.000	-	-	-	-	20	3.875.000	-	20.920.000	20	24.795.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			67.985.000		-		-		2.000.000		16.362.000		18.362.000		27,01%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	100	64.110.000	20	-	45	-	70	2.000.000	100	12.487.000	100	14.487.000	100,00%	22,60%
	Persentase layanan rujukan lanjutan pada korban yang terlaksana (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Layanan Pengaduan	Persentase korban yang terlayani	0												0,00%	0,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan (%)	100	64.110.000	18	-	40	-	62	2.000.000	100	12.487.000	100	14.487.000	100,00%	22,60%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten yang dikembangkan (Lembaga)	5	3.875.000	-	-	-	-	5	-	-	3.875.000	-	3.875.000	0,00%	100,00%
	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang terbina (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat (Lembaga)	5	3.875.000	-	-	-	-	5	-	-	3.875.000	5	3.875.000	100,00%	100,00%
	Jumlah penyedia layanan perempuan (Lembaga)	5		-		-		-		5		5		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	27,01%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			28.984.900		-		6.000.000		8.259.900		12.100.000		26.359.900		90,94%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang ditingkatkan kualitas keluarganya (Kepala Keluarga)	100	28.984.900	100	-	100	6.000.000	100	8.259.900	100	12.100.000	100	26.359.900	100,00%	90,94%
	Persentase keluarga yang dibina (%)	0,58		-		-		-		1		1		86,21%	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan (Kepala Keluarga)	100	28.984.900	100	-	100	6.000.000	100	8.259.900	100	12.100.000	100	26.359.900	100,00%	90,94%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	90,94%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN															100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			20.374.800		-		7.000.000		2.800.000		10.574.800		20.374.800		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan dalam kelembagaan data ditingkat daerah/kabupaten (Dokumen)	2	20.374.800	-	-	-	7.000.000	2	2.800.000	-	10.574.800	-	20.374.800	0,00%	100,00%
	Persentase lembaga pemerintah yang memiliki petugas data gender dan anak terlatih entry data (%)	25		-		-		-		3		3		11,76%	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah profil pemberdayaan perempuan dan anak (Dokumen)	2	20.374.800	-	-	-	7.000.000	2	2.800.000	-	10.574.800	2	20.374.800	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen data informasi gender dan anak (Dokumen)	2		-		-		-		2		2		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			28.979.500		-		-		15.179.500		13.800.000		28.979.500		100,00%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten yang dilembagakan (PHA)	1	23.225.000	-	-	-	-	1	9.425.000	-	13.800.000	-	23.225.000	0,00%	100,00%
	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa yang terfasilitasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha (Desa/Kelurahan)	5		-		-		-		28		28		560,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta forum anak (Peserta)	100	23.225.000	-	-	100	-	-	9.425.000	-	13.800.000	100	23.225.000	100,00%	100,00%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten yang dikembangkan (Lembaga)	20	5.754.500	-	-	-	-	-	5.754.500	20	-	20	5.754.500	100,00%	100,00%
	Persentase desa/kelurahan penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang mendapatkan	29		-		-		-		49		49		167,48%	







Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			60.219.750		-		13.500.000		5.400.000		41.319.750		60.219.750		100,00%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sinkronisasi (Dokumen)	2	9.214.750	-	-		2	-	-	9.214.750	-	9.214.750	0,00%	100,00%	
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang tersusun (Dokumen)	1		-	-		-	1	1	100,00%					
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diadvokasi (Lembaga)	10	5.514.750	-	-		10	-	-	5.514.750	10	5.514.750	100,00%	100,00%	
	Jumlah peserta sosialisasi (Peserta)	100		-	-		-	100	100	100,00%					
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah desa/kelurahan wilayah pedesaan (Desa/Kelurahan)	70	3.700.000	-	-		70	-	-	3.700.000	70	3.700.000	100,00%	100,00%	
	Jumlah peserta (Peserta)	50		-	-		-	50	50	100,00%					
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta Rakerda (Peserta)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen (Dokumen)	12	51.005.000	3	-	3	13.500.000	3	5.400.000	3	32.105.000	12	51.005.000	100,00%	100,00%
	Persentase desa/kelurahan yang didampingi dalam pengembangan kampung KB (%)	21		-	-	-	19	19	88,10%						
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah laporan (Laporan)	24	51.005.000	4	-	8	13.500.000	6	5.400.000	6	32.105.000	24	51.005.000	100,00%	100,00%
	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1		-	-	-	1	1	100,00%						
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3.328.716.300		-		29.206.500		696.198.650		1.942.743.100		2.668.148.250		80,16%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diadvokasi (Kampung KB)	13	744.903.800	13	-	13	12.456.500	13	253.822.400	13	416.652.800	13	682.931.700	100,00%	91,68%
	Jumlah kecamatan yang didampingi (Kecamatan)	8		-		-		-		8		8		100,00%	
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah paket sarana KIE KB yang tersedia (Paket)	8	150.559.600	1	-	1	-	1	9.761.400	5	140.360.300	8	150.121.700	100,00%	99,71%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah balai KB yang dibiayai (Balai KB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah balai KB yang dibiayai (Balai KB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai KB yang dibiayai (Balai KB)	8	594.344.200	8	-	8	12.456.500	8	244.061.000	8	276.292.500	8	532.810.000	100,00%	89,65%
	Jumlah paket operasional balai penyuluhan yang dikelola (Paket)	8		-		-		-		8		8		100,00%	
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah balai KB yang dibiayai (Balai KB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diadvokasi (Orang)	32	340.054.950	-	-	-	-	-	172.054.950	32	168.000.000	32	340.054.950	100,00%	100,00%
	Persentase tenaga fungsional penyuluh KB PKB/PLKB dan IMP yang terlatih (%)	80		-		-		-		100		100		125,00%	
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD (PPKBD dan Sub PPKBD)	70	4.054.950	-	-	-	-	70	4.054.950	-	-	70	4.054.950	100,00%	100,00%
	Jumlah peserta IMP (Peserta)	50		-		-		-		50		50		100,00%	
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana dan prasarana KB (Paket)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	Jumlah balai KB yang dibiayai (Balai KB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang mengikuti kegiatan pertemuan (Kader)	140	336.000.000	140	-	140	-	140	168.000.000	140	168.000.000	140	336.000.000	100,00%	100,00%
	Jumlah kader IMP yang mendapatkan biaya pergerakan (Orang)	140		-		-		-		140		140		100,00%	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB yang dilayani, jumlah sarana dan prasarana KB (Akseptor KB)	7000	1.831.202.550	1.000	-	2.000	16.750.000	2.000	218.386.300	2.000	997.470.300	7.000	1.232.606.600	100,00%	67,31%
	Persentase pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di faskes (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang dilayani (Faskes)	18	42.965.200	18	-	18	-	18	5.013.200	18	9.882.800	18	14.896.000	100,00%	34,67%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Peserta MKJP)	5000	569.580.000	-	-	-	-	-	39.314.000	875	104.198.600	875	143.512.600	17,50%	25,20%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah faskes yang dilayani (Faskes)	18	16.962.400	18	-	18	7.000.000	18	2.800.000	18	7.000.000	18	16.800.000	100,00%	99,04%
	Jumlah dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Dokumen)	18		-		-		-		18		18		100,00%	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB (Paket)	9	1.152.755.000	-	-	4	-	2	153.159.100	2	856.088.900	8	1.009.248.000	88,89%	87,55%
	Jumlah sarana penunjang KB yang diadakan (Paket)	9		-		-		-		2		2		22,22%	
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah peserta KB yang dilayani (Akseptor KB)	7000	48.939.950	1.000	-	2.000	9.750.000	2.000	18.100.000	2.000	20.300.000	7.000	48.150.000	100,00%	98,39%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan (Kampung KB)	13	412.555.000	-	-	-	-	-	51.935.000	13	360.620.000	13	412.555.000	100,00%	100,00%
	Cakupan kemitraan yang dibina (%)	31,78		-		-		-		38		38		120,33%	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang dibiayai (Kampung KB)	13	412.555.000	13	-	13	-	13	51.935.000	13	360.620.000	13	412.555.000	100,00%	100,00%
	Jumlah kampung KB yang dikelola (Kampung KB)	13		-		-		-		13		13		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										70,49%	80,16%
				Predikat Kinerja										Sedang	Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			21.574.800		-		6.500.000		2.600.000		12.474.800		21.574.800		100,00%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok yang dibina (Kelompok)	13	21.574.800	-	-	-	6.500.000	8	2.600.000	5	12.474.800	13	21.574.800	100,00%	100,00%
	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina (Kelompok)	26		-		-		-		26		26		100,00%	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang dibina (Kelompok)	13	21.574.800	-	-	-	6.500.000	8	2.600.000	5	12.474.800	13	21.574.800	100,00%	100,00%
	Jumlah kelompok yang diorientasi/dilatih (Kelompok)	13		-		-		-		13		13		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		9.329.151.987		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										87,78%	83,94%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Tinggi

DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.487.229.697		1.023.752.798		1.747.348.922		1.581.158.942		1.838.412.347		6.190.673.009		95,43%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persentase)	100	17.517.100	25	-	75	2.000.000	100	500.000	100	15.017.100	300	17.517.100	300,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3	4.464.850	1	-	1	-	1	-	-	4.464.850	3	4.464.850	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	8	13.052.250	-	-	4	2.000.000	2	500.000	2	10.552.250	8	13.052.250	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	100	5.099.361.117	25	1.023.752.798	50	1.647.691.735	75	1.036.760.305	100	1.127.242.327	250	4.835.447.165	250,00%	94,82%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	50	5.068.268.817	50	1.023.752.798	50	1.638.291.735	50	1.034.410.305	50	1.107.900.027	50	4.804.354.865	100,00%	94,79%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	1	31.092.300	-	-	-	9.400.000	-	2.350.000	1	19.342.300	1	31.092.300	100,00%	100,00%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang terlaksana dengan baik (%)	100	77.957	25	-	50	-	75	-	100	-	250	-	250,00%	0,00%
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi) (Jenis)	4	77.957	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	100,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	329.524.650	25	-	50	43.514.050	75	19.466.450	100	259.154.350	250	322.134.850	250,00%	97,76%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	1	496.800	-	-	1	496.800	-	-	-	-	1	496.800	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	11	71.888.500	-	-	4	1.488.500	6	845.000	1	68.819.600	11	71.153.100	100,00%	98,98%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	1	32.400.000	1	-	1	2.860.000	1	1.970.000	1	27.510.000	1	32.340.000	100,00%	99,81%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis) (jenis)	1	3.507.000	1	-	1	-	1	1.685.250	1	1.821.750	1	3.507.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	3	34.736.750	-	-	3	14.466.750	-	-	3	20.270.000	2	34.736.750	50,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	283												51,59%	96,46%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dan Konsultasi SKPD	konsultasi SKPD (Kali)		186.495.600	-	-	70	24.202.000	100	14.966.200	146	140.733.000	146	179.901.200		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaaan BMD yang terlaksana dengan baik ()	100	660.412.000	25	-	50	-	75	425.880.000	100	232.738.000	250	658.618.000	250,00%	99,73%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan (Buah/Unit)	15	660.412.000	-	-	-	-	11	425.880.000	4	232.738.000	15	658.618.000	100,00%	99,73%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	137.797.274	25	-	50	46.277.647	75	17.844.937	100	65.185.186	250	129.307.770	250,00%	93,84%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	65.197.274	12	-	12	22.077.647	12	12.294.937	12	28.335.186	12	62.707.770	100,00%	96,18%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan (Orang)	3	72.600.000	3	-	3	24.200.000	3	5.550.000	3	36.850.000	3	66.600.000	100,00%	91,74%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasae barang milik daerah urusan pemerintah yang terpelihara dengan baik (%)	100	242.539.599	25	-	50	7.865.490	75	80.707.250	100	139.075.384	250	227.648.124	250,00%	93,86%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	38	46.583.813	9	-	9	4.885.490	7	4.533.000	12	28.416.574	37	37.835.064	97,37%	81,22%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	3	56.804.346	-	-	1	2.980.000	1	31.274.250	1	17.304.710	3	51.558.960	100,00%	90,77%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan STNK (Unit)	4	56.221.440	-	-	-	-	1	35.020.000	3	21.193.100	4	56.213.100	100,00%	99,99%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	5	3.050.000	-	-	-	-	-	-	5	3.000.000	5	3.000.000	100,00%	98,36%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Dipelihara/ Jumlah Unit Gedung yang Direhab (Meter Persegi)	225	79.880.000	-	-	225	-	-	9.880.000	-	69.161.000	225	79.041.000	100,00%	98,95%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,32%	95,43%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			210.000.000		-		-		-		199.650.000		199.650.000		95,07%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di	Jumlah sarana dan prasarana	1												100,00%	95,07%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/kota yang dikelola (paket)		210.000.000	-	-	-	-	-	-	1	199.650.000	1	199.650.000		
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia (paket)	1	210.000.000	-	-	-	-	-	-	1	199.650.000	1	199.650.000	100,00%	95,07%
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan (Ton)	2987,48	-	449	-	432	-	759	-	1.349	-	2.989	-	100,05%	0,00%
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibina (Kelompok)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,07%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			987.518.000		-		106.550.000		181.362.425		695.817.775		983.730.200		99,62%
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidayaan ikan kecil yang diberdayakan (kelompok)	5	557.108.000	-	-	-	106.550.000	5	54.498.125	-	395.178.875	5	556.227.000	100,00%	99,84%
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Benih Ikan yang Dihasilkan (Ekor)	8400000	557.108.000	2.468.000	-	2.276.700	106.550.000	2.171.000	54.498.125	1.784.300	395.178.875	8.700.000	556.227.000	103,57%	99,84%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil pembudidaya ikan (ton)	430,8	430.410.000	78	-	91	-	130	126.864.300	137	300.638.900	437	427.503.200	101,35%	99,32%
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pengembangan Perikanan yang Diadakan (Paket)	1	261.270.000	-	-	-	-	1	126.864.300	-	131.941.700	1	258.806.000	100,00%	99,06%
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana usaha pembudidaya ikan dalam kabupaten/kota (paket)	1	169.140.000	-	-	-	-	-	-	1	168.697.200	1	168.697.200	100,00%	99,74%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										102,01%	99,62%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			116.499.400		-		14.400.000		51.829.000		49.849.900		116.078.900		99,64%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah sumber daya perikanan yang diawasi (lokasi)	2	116.499.400	2	-	2	14.400.000	2	51.829.000	2	49.849.900	2	116.078.900	100,00%	99,64%







Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kabupaten/ Kota																	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang diberikan fasilitas (unit)	2	376.790.000	-	-	1	-	1	111.573.200	-	263.237.800	2	374.811.000	100,00%	99,47%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,50%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			518.437.300		-		84.520.000		73.609.000		349.826.500		507.955.500		97,98%		
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota (dosis)	1200	518.437.300	200	-	250	84.520.000	350	73.609.000	400	349.826.500	1.200	507.955.500	100,00%	97,98%		
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah IB Sapi (Dosis)	1200	518.437.300	200	-	250	84.520.000	350	73.609.000	400	349.826.500	1.200	507.955.500	100,00%	97,98%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	97,98%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			62.505.200		-		4.000.000		25.966.000		28.982.000		58.948.000		94,31%		
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana peternakan yang diadakan (unit)	1	62.505.200	-	-	-	4.000.000	1	25.966.000	-	28.982.000	1	58.948.000	100,00%	94,31%		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Bangunan/Gedung Yang direhab Prasarana Pertanian Lainnya (unit)	1	62.505.200	-	-	-	4.000.000	1	25.966.000	-	28.982.000	1	58.948.000	100,00%	94,31%		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan Tepat Guna yang Diadakan (Unit)	1		-		-		-		1		1		100,00%			
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	94,31%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)					
			I		II		III		IV								
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			115.779.900		-		8.000.000		43.350.000		60.369.900		111.719.900		96,49%		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan dan kesmavet (ekor)	1200	108.869.900	300	-	300	8.000.000	300	37.380.000	300	60.369.900	1.200	105.749.900	100,00%	97,13%		
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin dan Pengobatan Ternak (Dosis)	12000	108.869.900	3.000	-	3.000	8.000.000	3.000	37.380.000	3.000	60.369.900	12.000	105.749.900	100,00%	97,13%		
	Jumlah HPR (Hewan Penular Rabies) yang kebal terhadap rabies (ekor)	2000		-		-		-		500		500		25,00%			
	Jumlah ternak sapi yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi (ekor)	300		-		-		-		300		300		100,00%			
	Jumlah ternak yang kebal terhadap anthrax (ekor)	2000		-		-		-		1.680		1.680		84,00%			
	Jumlah unggas yang tahan terhadap penyakit AI (Avian Influenza) (ekor)	500000		-		-		-		500.000		500.000		100,00%			
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan sampel kesmavet (sampel)	20	6.910.000	5	-	5	-	5	5.970.000	5	-	20	5.970.000	100,00%	86,40%		
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pemeriksaan Sampel Daging dan Uji Sampel Produk Hewan (Sampel)	60	6.910.000	15	-	15	-	15	5.970.000	15	-	60	5.970.000	100,00%	86,40%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												82,89%	96,49%
				Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi
		8.893.632.297		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												98,78%	96,28%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			6.100.561.014		1.077.988.261		1.857.755.488		1.282.500.868		1.470.731.564		5.688.976.181		93,25%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	34.680.000	25	2.900.000	25	6.275.000	25	7.395.000	10	18.105.000	85	34.675.000	85,00%	99,99%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	26.040.000	-	2.900.000	1	5.032.500	1	6.152.500	-	11.952.500	2	26.037.500	100,00%	99,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen)	4	8.640.000	-	-	2	1.242.500	2	1.242.500	-	6.152.500	4	8.637.500	100,00%	99,97%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100	5.452.216.307	25	1.062.333.771	25	1.741.422.008	25	1.138.673.743	25	1.176.258.242	100	5.118.687.764	100,00%	93,88%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan (Bulan)	12	5.419.016.307	3	1.059.733.771	6	1.735.379.508	9	1.132.631.243	12	1.165.543.242	12	5.093.287.764	100,00%	93,99%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Materai (Lembar)	900	12.600.000	-	-	150	900.000	550	900.000	900	3.000.000	900	4.800.000	100,00%	38,10%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan (Dokumen)	2	20.600.000	1	2.600.000	1	5.142.500	1	5.142.500	2	7.715.000	2	20.600.000	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100	14.400.000	25	2.400.000	25	3.600.000	25	3.600.000	-	4.800.000	75	14.400.000	75,00%	100,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN (Orang)	57	14.400.000	13	2.400.000	27	3.600.000	42	3.600.000	57	4.800.000	57	14.400.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (Persen)	100	236.972.780	25	-	25	51.034.830	25	26.576.700	5	126.262.050	80	203.873.580	80,00%	86,03%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik yang Diadakan (Jenis)	5	2.459.180	-	-	5	2.123.180	5	-	5	-	5	2.123.180	100,00%	86,34%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas Elpiji yang Diadakan (Kali)	12	16.980.000	3	-	6	4.060.000	9	4.445.000	12	4.095.000	12	12.600.000	100,00%	74,20%
	Penyediaan Makan Minum Harian (Tahun)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
	Penyediaan Makan Minum Rapat (OM)	28		7		14		21		28		28		100,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Fotocopy dan Cetak Dokumen Administrasi Kantor (Lembar)	25722	13.018.350	7.431	-	12.862	3.747.500	18.300	3.249.950	25.722	5.514.250	25.722	12.511.700	100,00%	96,11%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bidang dan Sekretariat yang Dilayani Kebutuhan ATKnya (Bidang)	4	39.942.650	1	-	2	16.368.550	3	5.336.750	4	17.150.600	4	38.855.900	100,00%	97,28%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Makan Minum Tamu (OM)	57	1.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	55	162.577.600	5	-	12	24.735.600	13	13.545.000	25	99.502.200	55	137.782.800	100,00%	84,75%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	163.738.000	25	-	25	-	25	75.570.000	-	82.170.000	75	157.740.000	75,00%	96,34%
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Jenis)	4	81.470.000	-	-	-	-	4	75.570.000	-	-	4	75.570.000	100,00%	92,76%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (Unit)	6	82.268.000	-	-	-	-	-	-	6	82.170.000	6	82.170.000	100,00%	99,88%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	89.849.869	25	10.092.770	25	19.366.610	25	19.280.575	5	24.981.022	80	73.720.977	80,00%	82,05%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik (Bulan)	12	56.399.869	3	6.142.770	3	10.516.610	3	10.430.575	3	13.181.022	12	40.270.977	100,00%	71,40%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Service (Orang)	3	33.450.000	3	3.950.000	3	8.850.000	3	8.850.000	3	11.800.000	3	33.450.000	100,00%	100,00%
	Jumlah Tenaga Penjaga Malam (Orang)	1		1		1		1		1		100,00%			
	Jumlah Tenaga Sopir Kadis (Orang)	1		1		1		1		1		100,00%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	108.704.058	25	261.720	25	36.057.040	25	11.404.850	-	38.155.250	75	85.878.860	75,00%	79,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)	1	35.129.938	1	-	1	8.482.400	1	9.133.800	1	12.062.350	1	29.678.550	100,00%	84,48%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Terbayar Jasa STNK (STNK)	54	45.804.120	1	261.720	15	8.285.140	23	2.271.050	54	22.102.900	54	32.920.810	100,00%	71,87%
	KIR (KIR)	24		-		-		-		-		0,00%			
	Pajak (Unit)	3		-		-		1		2		3		100,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara (Unit)	21	8.010.000	1	-	6	1.600.000	1	-	13	3.990.000	21	5.590.000	100,00%	69,79%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/ Halaman yang Dipelihara (Gedung)	2	19.760.000	1	-	1	17.689.500	-	-	-	-	2	17.689.500	100,00%	89,52%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,72%	93,25%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			126.076.198		12.000.000		16.350.000		17.450.000		48.678.420		94.478.420		74,94%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	111.026.198	25	12.000.000	50	16.350.000	75	17.450.000	80	37.628.420	80	83.428.420	80,00%	75,14%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Akreditasi Laboratorium (Laboratorium)	1	91.983.698	-	9.600.000	-	14.400.000	-	14.400.000	-	28.785.920	-	67.185.920	0,00%	73,04%
	Industri yang Dipantau (Industri)	20		5		5		20		20		100,00%			
	Jumlah Sungai (Sungai)	6		1		2		1		2		6		100,00%	
	Sumber Mata Air (Sumber Mata Air)	3		1		-		1		2		4		133,33%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kampung Iklim Binaan (Kampung Iklim)	3	19.042.500	-	2.400.000	1	1.950.000	1	3.050.000	1	8.842.500	3	16.242.500	100,00%	85,30%
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-		0,00%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	15.050.000	25	-	25	-	70	-	10	11.050.000	130	11.050.000	130,00%	73,42%
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	15.050.000	-	-	-	-	-	-	1	11.050.000	1	11.050.000	100,00%	73,42%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										87,84%	74,94%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sedang
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			151.685.730		1.570.000		58.930.200		2.433.500		69.198.200		132.131.900		87,11%
Pengelolaan Keanekaragaman	Persentasi tersedianya luasan RTH	60												75,00%	87,11%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Hayati Kabupaten/Kota	publik selesai 20% dari luas perkotaan (%)		151.685.730	15	1.570.000	30	58.930.200	45	2.433.500	45	69.198.200	45	132.131.900		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Taman Kota yang Ditata (Taman)	7	151.685.730	1	1.570.000	4	58.930.200	1	2.433.500	1	69.198.200	7	132.131.900	100,00%	87,11%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	87,11%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			9.907.300		-		-		7.675.000		-		7.675.000		77,47%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluh Lingkungan Hidup (Orang)	100	9.907.300	-	-	100	-	100	7.675.000	100	-	100	7.675.000	100,00%	77,47%
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Penyuluhan Lingkungan (Peserta)	50	9.907.300	-	-	-	-	50	7.675.000	-	-	50	7.675.000	100,00%	77,47%
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			-		-		-		-		-		-		0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	77,47%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			31.780.000		2.400.000		5.600.000		4.100.000		18.250.000		30.350.000		95,50%
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (%)	100	31.780.000	25	2.400.000	50	5.600.000	75	4.100.000	100	18.250.000	100	30.350.000	100,00%	95,50%
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Lingkungan yang Didapat (Piala)	1	31.780.000	-	2.400.000	-	5.600.000	-	4.100.000	1	18.250.000	1	30.350.000	100,00%	95,50%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,50%
				Predikat Kinerja										Sangat	Sangat





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			-		-		-		-		-		-		0,00%		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-		0,00%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan			-		-		-		-		-		-		0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0,00%	0,00%
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			3.523.789.965		601.708.200		618.062.900		768.665.300		1.344.225.050		3.332.661.450		94,58%		
Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	75	3.523.789.965	18	601.708.200	35	618.062.900	55	768.665.300	75	1.344.225.050	75	3.332.661.450	100,00%	94,58%		
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Daur Ulang Sampah Plastik yang Dihasilkan (Ton)	10	89.027.975	2	12.000.000	3	25.161.000	2	19.297.800	3	26.690.400	10	83.149.200	100,00%	93,40%		
	Jumlah Pupuk Kompos Organik (Kg)	10		2		2		2		4		10		100,00%			
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Persampahan (Orang)	169	3.319.590.790	169	589.708.200	169	559.860.900	169	737.067.500	169	1.272.034.650	169	3.158.671.250	100,00%	95,15%		
	Kendaraan Dinas yang Dipelihara (Unit)	51		12		13		15		11		51		100,00%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Jenis)	17	115.171.200	3	-	3	33.041.000	7	12.300.000	4	45.500.000	17	90.841.000	100,00%	78,87%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	94,58%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		9.943.800.207		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,67%	93,39%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.297.976.524		630.591.217		1.290.314.825		1.504.837.073		1.455.231.904		4.880.975.019		92,13%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	15	55.242.000	6	-	7	3.946.200	2	30.818.250	-	19.717.550	15	54.482.000	100,00%	98,62%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun (Dokumen)	3	11.760.000	-	-	1	3.364.950	1	4.834.500	1	3.560.550	3	11.760.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	4	3.685.000	1	-	2	-	1	2.017.500	-	1.667.500	4	3.685.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	11	39.797.000	4	-	4	581.250	3	23.966.250	-	14.489.500	11	39.037.000	100,00%	98,09%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	7	3.136.037.250	3	627.945.617	4	1.019.152.683	-	675.079.372	-	676.108.285	7	2.998.285.957	100,00%	95,61%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	29	3.107.242.250	29	627.945.617	29	1.012.876.733	29	662.223.222	-	666.445.385	22	2.969.490.957	75,00%	95,57%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	100	25.050.000	17	-	41	5.550.000	41	11.500.000	35	8.000.000	134	25.050.000	134,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	5	3.745.000	2	-	2	725.950	-	1.356.150	1	1.662.900	5	3.745.000	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah Kabupaten (%)	29	87.050.750	29	-	29	10.750.000	29	37.325.750	-	38.975.000	22	87.050.750	75,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (%)	52	25.500.000	-	-	-	-	-	-	52	25.500.000	52	25.500.000	100,00%	100,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)	3	23.075.000	1	-	1	5.550.000	-	9.775.000	1	7.750.000	3	23.075.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (Dokumen)	2	17.000.000	1	-	1	5.200.000	-	6.075.000	-	5.725.000	2	17.000.000	100,00%	100,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Dokumen)	89	21.475.750	-	-	-	-	89	21.475.750	-	-	89	21.475.750	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	7	988.731.963	1	2.645.600	3	51.105.350	-	303.945.000	-	447.868.043	-	805.563.993	0,00%	81,47%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	15	965.161	-	-	-	-	15	946.500	-	-	15	946.500	100,00%	98,07%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor (%)	91	289.931.422	-	-	-	-	58	166.578.500	33	121.808.800	91	288.387.300	100,00%	99,47%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor (%)	2	35.700.000	-	-	-	-	2	13.250.000	-	20.075.000	2	33.325.000	100,00%	93,35%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%)	25000	11.275.000	-	-	5.000	-	15.000	5.165.500	5.000	5.904.500	25.000	11.070.000	100,00%	98,18%
Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan bahan/material (%)	56	105.336.980	-	-	35	25.146.750	10	24.652.900	11	52.063.200	56	101.862.850	100,00%	96,70%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi (%)	140	7.000.000	-	-	-	-	110	1.750.000	25	4.900.000	135	6.650.000	96,43%	95,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)	1232	538.523.400	-	2.645.600	313	25.958.600	256	91.601.600	407	243.116.543	976	363.322.343	79,22%	67,47%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%)	23	167.000.000	-	-	23	151.382.000	-	-	-	14.700.000	-	166.082.000	0,00%	99,45%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya (%)	23	167.000.000	-	-	-	151.382.000	23	-	-	14.700.000	23	166.082.000	100,00%	99,45%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	2	701.248.366	-	-	1	36.991.392	-	413.253.451	-	219.584.414	-	669.829.257	0,00%	95,52%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik kantor yang dibayar per bulan (Rekening)	12	125.531.354	-	-	-	31.141.392	9	34.449.965	3	31.009.384	12	96.600.741	100,00%	76,95%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor (%)	7	575.717.012	-	-	-	5.850.000	7	378.803.486	-	188.575.030	7	573.228.516	100,00%	99,57%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	30	162.666.195	-	-	7	16.987.200	-	44.415.250	-	38.278.612	-	99.681.062	0,00%	61,28%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (%)	6	44.856.040	-	-	3	5.588.000	2	21.140.250	1	15.560.000	6	42.288.250	100,00%	94,28%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara (%)	1	77.650.155	-	-	1	3.749.200	-	2.175.000	-	13.636.612	1	19.560.812	100,00%	25,19%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan perbaikan peralatan kerja yang rusak ringan/sedang/berat (%)	23	14.410.000	-	-	-	-	17	3.000.000	6	9.082.000	23	12.082.000	100,00%	83,84%		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase pelaksanaan perbaikan aset tak berwujud yang rusak ringan/sedang/berat (%)	6	5.750.000	-	-	-	-	6	5.750.000	-	-	6	5.750.000	100,00%	100,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	1032	20.000.000	-	-	750	7.650.000	282	12.350.000	-	-	1.032	20.000.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												83,38%	92,13%
				Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			125.460.800		-		118.782.000		2.939.200		3.234.600		124.955.800		99,60%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (%)	4	125.460.800	1	-	3	118.782.000	-	2.939.200	-	3.234.600	-	124.955.800	0,00%	99,60%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (Kegiatan)	13000	120.725.800	3.059	-	3.060	117.907.000	9.803	1.206.700	5.508	1.207.100	21.430	120.320.800	164,85%	99,66%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			-		-		-		-		-		-		0,00%
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase SKPWN yang diterbitkan (%)	100	4.735.000	15	-	20	875.000	45	1.732.500	20	2.027.500	100	4.635.000	100,00%	97,89%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										162,40%	99,60%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			9.989.000		-		2.880.000		6.432.450		676.550		9.989.000		100,00%
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (%)	2	4.910.000	1	-	1	2.880.000	-	1.353.450	-	676.550	-	4.910.000	0,00%	100,00%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan (%)	100	4.910.000	25	-	12	2.880.000	57	1.353.450	6	676.550	100	4.910.000	100,00%	100,00%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Kegiatan)	0	-	1.803	-	1.803	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (%)	100	5.079.000	-	-	-	-	-	5.079.000	-	-	-	5.079.000	0,00%	100,00%
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil dalam Satu Tahun (Kegiatan)	12	5.079.000	-	-	-	-	12	5.079.000	-	-	12	5.079.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			8.677.250		-		-		8.677.000		-		8.677.000		100,00%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	2	8.677.250	-	-	-	-	-	8.677.000	-	-	-	8.677.000	0,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jaringan SIAK yang Terpelihara (Jaringan)	2	8.677.250	-	-	-	-	2	8.677.000	-	-	2	8.677.000	100,00%	100,00%
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		-		-		-		-		-		0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			-		-		-		-		-		-		0,00%
Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	-	33	-	77	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain			-		-		-		-		-		-		0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		5.442.103.574		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										85,26%	92,33%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Sangat Tinggi

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.989.826.474		499.690.884		835.024.304		540.585.513		813.734.966		2.689.035.667		89,94%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14	33.080.800	4	5.550.000	9	4.320.850	-	7.609.700	1	14.800.250	14	32.280.800	100,00%	97,58%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	10.055.050	1	1.950.000	2	650.000	-	3.205.050	-	4.250.000	3	10.055.050	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang	1												100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				4		5		6		7					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dokumen RKA-SKPD	disusun (Dokumen)		6.080.250	-	1.950.000	1	1.754.950	-	1.300.000	-	1.075.300	1	6.080.250		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	5.729.900	-	-	1	-	-	650.000	-	5.079.900	1	5.729.900	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	9	11.215.600	3	1.650.000	5	1.915.900	-	2.454.650	1	4.395.050	9	10.415.600	100,00%	92,87%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	66	2.407.187.231	22	462.272.965	30	722.859.492	45	463.726.874	66	479.309.804	66	2.128.169.135	100,00%	88,41%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	23	2.388.643.531	23	458.672.965	23	719.962.992	23	459.624.374	23	471.365.104	23	2.109.625.435	100,00%	88,32%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (Dokumen)	60	9.794.000	20	1.950.000	26	2.144.000	45	1.950.000	60	3.750.000	60	9.794.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	5	8.749.700	1	1.650.000	2	752.500	1	2.152.500	1	4.194.700	5	8.749.700	100,00%	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah buku inventaris barang milik daerah (Buku)	4	8.299.800	4	1.950.000	4	774.950	4	2.074.950	4	3.499.900	4	8.299.800	100,00%	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah (Dokumen)	6	8.299.800	1	1.950.000	3	774.950	4	2.074.950	6	3.499.900	6	8.299.800	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (ASN)	23	25.925.250	23	5.850.000	23	2.324.850	23	6.224.850	23	11.525.550	23	25.925.250	100,00%	100,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaiaan (Dokumen)	5	9.325.300	5	1.950.000	5	774.950	5	2.074.950	5	4.525.400	5	9.325.300	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola (sistem informasi)	2	16.599.950	2	3.900.000	2	1.549.900	2	4.149.900	2	7.000.150	2	16.599.950	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	7	401.941.991	7	10.023.400	7	90.062.622	7	37.929.622	7	258.552.147	7	396.567.791	100,00%	98,66%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	4	1.619.891	4	-	4	595.722	4	557.522	4	466.647	4	1.619.891	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-		-		-		-		-		0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	24.320.000	3	295.000	3	1.750.000	3	2.350.000	3	19.925.000	3	24.320.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	17394	17.954.450	4.348	-	8.696	5.070.100	10.196	2.420.100	17.394	9.714.250	17.394	17.204.450	100,00%	95,82%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	66	101.941.650	66	-	66	51.836.800	66	-	66	50.104.850	66	101.941.650	100,00%	100,00%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	75	3.975.000	18	-	20	1.050.000	10	675.000	27	2.250.000	75	3.975.000	100,00%	100,00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	384	252.131.000	62	9.728.400	107	29.760.000	103	31.927.000	112	176.091.400	384	247.506.800	100,00%	98,17%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	2	72.241.362	2	11.984.519	2	8.506.540	2	15.626.517	2	25.846.665	2	61.964.241	100,00%	85,77%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telpn,Air dan Listrik (Kali)	12	45.241.362	3	5.234.519	6	6.256.540	9	8.876.517	12	14.596.665	12	34.964.241	100,00%	77,28%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	3	27.000.000	3	6.750.000	3	2.250.000	3	6.750.000	3	11.250.000	3	27.000.000	100,00%	100,00%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	10	41.150.040	2	2.060.000	2	6.175.000	7	7.393.000	10	20.200.650	10	35.828.650	100,00%	87,07%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan stnk (Unit)	8	39.340.040	1	1.450.000	-	6.175.000	5	7.393.000	8	19.000.650	8	34.018.650	100,00%	86,47%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	2	1.810.000	1	610.000	-	-	-	-	1	1.200.000	2	1.810.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	89,94%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			1.035.791.450		16.400.000		231.853.720		228.216.064		440.644.182		917.113.966		88,54%		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi PemerintahanDesa yang dibina dan diawasi (orang)	441	1.035.791.450	441	16.400.000	441	231.853.720	441	228.216.064	441	440.644.182	441	917.113.966	100,00%	88,54%		
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	49	900.000.000	49	-	49	196.569.220	49	197.075.764	49	394.428.582	49	788.073.566	100,00%	87,56%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum tentang Desa (Perbup)	1	5.050.100	-	-	1	5.049.750	-	-	-	-	1	5.049.750	100,00%	99,99%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang fifasilitasi dalam penyusunan RKPD/APBDesa (Desa)	49	21.580.750	49	2.400.000	49	2.400.000	49	3.600.000	49	13.030.750	49	21.430.750	100,00%	99,30%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa; Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD (orang)	147	57.430.100	147	7.500.000	147	15.644.900	147	7.500.000	147	20.184.850	147	50.829.750	100,00%	88,51%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta pelatihan (orang)	98	8.780.200	98	-	-	8.289.850	-	490.000	-	-	98	8.779.850	100,00%	100,00%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah bumdes yang terbina (Bumdes)	49	23.700.300	49	3.900.000	49	1.300.000	49	12.000.300	49	6.500.000	49	23.700.300	100,00%	100,00%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan profilDesa/Kel. (Desa/Kel)	70	15.600.000	70	2.600.000	70	2.600.000	70	3.900.000	70	6.500.000	70	15.600.000	100,00%	100,00%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah lomba desa yang diadakan. (Desa/Kel)	70	3.650.000	70	-	70	-	70	3.650.000	70	-	70	3.650.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	88,54%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			258.498.940		5.250.000		4.150.000		41.240.200		202.908.550		253.548.750		98,09%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang diberdayakan (lembaga)	10	258.498.940	10	5.250.000	10	4.150.000	10	41.240.200	10	202.908.550	10	253.548.750	100,00%	98,09%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pengurus LPM (orang)	472	6.600.000	472	1.650.000	472	550.000	472	1.650.000	472	2.750.000	472	6.600.000	100,00%	100,00%		
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah aparat kecamatan yang memahami ttg TTG (orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah program pokok yang difasilitasi PKK (Program Pokok PKK)	10	251.898.940	10	3.600.000	10	3.600.000	10	39.590.200	10	200.158.550	10	246.948.750	100,00%	98,03%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	98,09%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		4.284.116.864		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												100,00%	90,09%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

DINAS PERHUBUNGAN															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.667.699.147		942.937.901		1.726.981.953		1.152.333.025		1.495.122.205		5.317.375.084		93,82%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	11	34.774.000	11	-	11	9.000.000	11	11.458.450	11	14.314.250	11	34.772.700	100,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	9.815.000	-	-	1	3.000.000	2	3.410.950	-	3.403.700	3	9.814.650	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	2	5.225.000	-	-	1	-	-	1.869.000	1	3.355.700	2	5.224.700	100,00%	99,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	10	19.734.000	10	-	10	6.000.000	10	6.178.500	10	7.554.850	10	19.733.350	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	19	4.761.578.063	4	942.937.901	5	1.520.833.539	5	1.000.302.506	5	1.026.485.300	19	4.490.559.246	100,00%	94,31%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	50	4.732.528.063	50	942.937.901	50	1.510.583.539	50	992.527.656	50	1.015.460.450	50	4.461.509.546	100,00%	94,27%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	150	3.000.000	-	-	75	1.500.000	-	-	75	1.500.000	150	3.000.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	19	26.050.000	4	-	5	8.750.000	5	7.774.850	5	9.524.850	19	26.049.700	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya (ASN)	50	272.800.000	50	-	50	30.375.000	50	18.675.000	50	222.671.000	50	271.721.000	100,00%	99,60%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian yang disusun (Laporan)	6	272.800.000	6	-	6	30.375.000	6	18.675.000	6	222.671.000	6	271.721.000	100,00%	99,60%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	7	338.711.610	7	-	7	84.350.460	7	65.551.700	7	163.797.250	7	313.699.410	100,00%	92,62%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	5	1.304.250	-	-	-	-	2	480.600	3	360.150	5	840.750	100,00%	64,46%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jenis)	1	689.000	-	-	1	689.000	-	-	-	-	1	689.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	2	37.600.000	2	-	2	7.590.000	2	11.005.000	2	7.870.000	2	26.465.000	100,00%	70,39%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%)	5	14.015.000	-	-	1	3.702.500	1	2.187.300	3	7.925.000	5	13.814.800	100,00%	98,57%
Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan bahan/material (%)	53	50.391.960	-	-	8	12.314.660	7	10.799.200	38	27.278.100	53	50.391.960	100,00%	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi (%)	28	980.000	-	-	14	350.000	14	140.000	-	-	28	490.000	100,00%	50,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)	1056	233.731.400	-	-	352	59.704.300	352	40.939.600	352	120.364.000	1.056	221.007.900	100,00%	94,56%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	1	40.904.000	-	-	1	4.680.000	-	-	-	-	1	4.680.000	100,00%	11,44%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	40.904.000	-	-	4	4.680.000	-	-	-	-	4	4.680.000	100,00%	11,44%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	2	94.346.189	2	-	2	35.361.004	2	22.249.019	2	28.412.555	2	86.022.578	100,00%	91,18%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (kali)	12	43.946.189	-	-	6	14.361.004	3	9.649.019	3	11.612.555	12	35.622.578	100,00%	81,06%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	2	50.400.000	2	-	2	21.000.000	2	12.600.000	2	16.800.000	2	50.400.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	21	124.585.285	-	-	15	42.381.950	3	34.096.350	3	39.441.850	21	115.920.150	100,00%	93,04%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan stnk (Unit)	1	28.464.545	1	-	1	6.865.750	1	8.935.080	1	12.633.450	1	28.434.280	100,00%	99,89%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	15	92.400.740	-	-	10	33.686.200	3	25.161.270	2	25.308.400	15	84.155.870	100,00%	91,08%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	6	3.720.000	-	-	3	1.830.000	3	-	-	1.500.000	6	3.330.000	100,00%	89,52%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	93,82%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			3.633.008.241		30.450.000		348.675.000		415.309.500		2.661.820.650		3.456.255.150		95,13%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang diadakan dan direhab (Paket)	9	2.730.633.591	-	-	-	6.250.000	-	207.533.000	9	2.350.939.000	9	2.564.722.000	100,00%	93,92%
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik lampu jalan yang dipelihara, Panjang jalan yang terlayani lampu jalan, Jumlah lampu tenaga surya yang diadakan, Jumlah lampu LED yang diadakan (Paket)	5	1.932.658.591	-	-	1	6.250.000	2	207.533.000	2	1.626.066.000	5	1.839.849.000	100,00%	95,20%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rambu - Rambu Jalan dan Marka Jalan yang Berfungsi (Paket)	3	774.575.000	-	-	-	-	-	-	3	701.723.000	3	701.723.000	100,00%	90,59%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara (unit)	34	23.400.000	-	-	-	-	-	-	34	23.150.000	34	23.150.000	100,00%	98,93%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola (Terminal)	2	5.627.650	-	-	-	-	-	-	2	5.627.650	2	5.627.650	100,00%	100,00%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/direhabilitasi (unit)	2	5.627.650	-	-	-	-	-	-	2	5.627.650	2	5.627.650	100,00%	100,00%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Parkir (Laporan)	48	333.951.000	-	-	24	138.500.000	12	83.100.000	12	111.665.500	48	333.265.500	100,00%	99,79%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan operasional pengawasan parkir yang dilaksanakan tiap bulan (laporan)	48	333.951.000	-	-	16	138.500.000	16	83.100.000	16	111.665.500	48	333.265.500	100,00%	99,79%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan (Paket)	2	63.200.000	-	-	-	5.500.000	-	3.300.000	2	54.130.000	2	62.930.000	100,00%	99,57%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara (Kegiatan)	2	63.200.000	-	-	2	5.500.000	2	3.300.000	2	54.130.000	2	62.930.000	75,00%	99,57%
Pelaksanaan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (kali)	48	475.625.000	12	30.450.000	12	192.675.000	12	117.926.500	12	126.031.000	12	467.082.500	25,00%	98,20%
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan disiplin pengendara mobil penumpang/barang (kali) (kali)	48	471.425.000	12	30.450.000	12	192.675.000	12	117.926.500	12	121.881.000	48	462.932.500	100,00%	98,20%
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota (Laporan)	1	4.200.000	-	-	-	-	-	-	1	4.150.000	1	4.150.000	100,00%	98,81%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Bengkel yang dibina (Bengkel)	40	896.000	-	-	-	-	-	-	40	807.500	40	807.500	100,00%	90,12%
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	Jumlah bengkel yang dibina (Bengkel) (Bengkel)	40	896.000	-	-	-	-	-	-	40	807.500	40	807.500	100,00%	90,12%
Audit dan Inspeksi Keselamatan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi	8												100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)					
			I		II		III		IV								
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
LLAJ di Jalan	LLAJ di Jalan (Dokumen)		14.380.000	-	-	-	2.750.000	-	1.650.000	8	9.980.000	8	14.380.000				
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pemeliharaan dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan (Orang)	8	14.380.000	-	-	2	2.750.000	1	1.650.000	5	9.980.000	8	14.380.000	100,00%	100,00%		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi angkutan (Kali) (kali)	48	8.400.000	-	-	-	3.000.000	-	1.800.000	48	2.400.000	48	7.200.000	100,00%	85,71%		
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi angkutan (Kali) (kali)	48	8.400.000	12	-	12	3.000.000	12	1.800.000	12	2.400.000	12	7.200.000	25,00%	85,71%		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang di tertibkan (Rekomendasi)	200	295.000	-	-	8	-	-	-	24	240.000	32	240.000	16,00%	81,36%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang di tertibkan (unit)	200	295.000	-	-	-	-	-	-	200	240.000	200	240.000	100,00%	81,36%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												99,39%	95,13%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		9.300.707.388		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,76%	94,33%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.052.343.709		717.839.328		1.231.939.880		813.256.416		1.095.705.400		3.858.741.024		95,22%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	11	25.005.500	2	3.000.000	6	8.675.000	2	5.430.500	1	7.900.000	11	25.005.500	100,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah (Dokumen)	3	2.625.000	1	-	2	2.625.000	3	-	3	-	3	2.625.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	9.930.500	-	1.500.000	-	2.250.000	1	3.180.500	1	3.000.000	1	9.930.500	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1	1.900.000	-	-	-	-	-	-	1	1.900.000	1	1.900.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	6	10.550.000	1	1.500.000	3	3.800.000	2	2.250.000	6	3.000.000	6	10.550.000	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	20	3.376.005.094	5	690.124.178	5	1.092.570.303	5	704.741.817	5	724.604.639	20	3.212.040.937	100,00%	95,14%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	34	3.360.941.794	34	688.624.178	34	1.088.645.303	34	702.491.817	34	717.216.339	34	3.196.977.637	100,00%	95,12%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverikasi (SPM)	150	3.775.000	10	-	75	1.675.000	110	-	150	2.100.000	150	3.775.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	8	11.288.300	2	1.500.000	4	2.250.000	6	2.250.000	8	5.288.300	8	11.288.300	100,00%	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah buku inventaris barang milik daerah (Buku)	1	700.000	1	-	1	700.000	1	-	1	-	1	700.000	100,00%	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah (Dokumen)	6	700.000	2	-	3	700.000	4	-	6	-	6	700.000	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (ASN)	34	37.550.000	34	4.700.000	34	10.550.000	34	10.550.000	34	11.150.000	34	36.950.000	100,00%	98,40%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)	4	8.750.000	4	-	4	3.500.000	4	3.500.000	4	1.750.000	4	8.750.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola (sistem)	2	28.800.000	2	4.700.000	2	7.050.000	2	7.050.000	2	9.400.000	2	28.200.000	100,00%	97,92%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	7	281.723.850	2	13.778.900	2	85.224.250	2	66.971.250	1	115.458.650	7	281.433.050	100,00%	99,90%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	10	1.000.000	-	-	10	1.000.000	10	-	10	-	10	1.000.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	8	1.000.000	-	-	8	1.000.000	8	-	8	-	8	1.000.000	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	2	30.000.000	2	175.000	2	5.075.000	2	14.000.000	2	10.675.000	2	29.925.000	100,00%	99,75%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	3	15.917.100	3	-	3	7.997.500	3	3.911.250	3	4.008.350	3	15.917.100	100,00%	100,00%		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	50	38.844.750	25	-	50	38.816.750	50	-	50	-	50	38.816.750	100,00%	99,93%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Tamu)	240	6.600.000	70	-	140	2.200.000	200	2.180.000	240	2.220.000	240	6.600.000	100,00%	100,00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	70	188.362.000	20	13.603.900	35	29.135.000	60	46.880.000	70	98.555.300	70	188.174.200	100,00%	99,90%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	8	215.523.000	-	-	-	-	-	-	8	206.598.150	8	206.598.150	100,00%	95,86%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	8	215.523.000	2	-	4	-	6	-	8	206.598.150	8	206.598.150	100,00%	95,86%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	2	46.960.000	2	6.236.250	2	12.447.077	2	11.329.899	2	14.840.936	2	44.854.162	100,00%	95,52%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	24	19.360.000	6	2.936.250	12	4.247.077	18	4.429.899	24	5.640.936	24	17.254.162	100,00%	89,12%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (Paket)	2	27.600.000	2	3.300.000	2	8.200.000	2	6.900.000	2	9.200.000	2	27.600.000	100,00%	100,00%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	22	68.876.265	4	-	12	21.773.250	4	14.232.950	2	15.153.025	22	51.159.225	100,00%	74,28%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan stnk (Unit)	1	30.996.890	1	-	1	11.685.800	1	1.067.600	1	2.747.500	1	15.500.900	100,00%	50,01%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	3	26.999.375	3	-	3	10.087.450	3	2.755.350	3	12.405.525	3	25.248.325	100,00%	93,51%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	18	10.880.000	4	-	8	-	14	10.410.000	18	-	18	10.410.000	100,00%	95,68%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	95,22%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)					
			I		II		III		IV								
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.940.418.450		16.300.000		792.300.000		428.690.000		667.875.000		1.905.165.000		98,18%		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Jenis)	5	1.940.418.450	5	16.300.000	5	792.300.000	5	428.690.000	5	667.875.000	5	1.905.165.000	100,00%	98,18%		
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pengaduan dan Aspirasi Publik yang dimonitoring (Pengaduan)	13	9.660.000	3	-	6	-	10	9.660.000	13	-	13	9.660.000	100,00%	100,00%		
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah domain dan sub domain Pemkab soppeng yang dikelola;Jumlah kegiatan pemerintah yang diliput dan didokumentasikan (Domain/Kegiatan)	1	44.750.000	1	5.800.000	1	10.450.000	1	12.200.000	1	15.100.000	1	43.550.000	100,00%	97,32%		
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik yang Terlaksana (Jenis)	2	48.803.450	2	2.300.000	2	5.200.000	2	20.200.000	2	6.350.000	2	34.050.000	100,00%	69,77%		
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah menara yang diawasi (Menara)	70	3.500.000	70	-	70	-	70	-	70	3.500.000	70	3.500.000	100,00%	100,00%		
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (Orang)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan daerah melalui media cetak lokal,media cetak nasional dan media online (Informasi)	200	1.833.705.000	50	8.200.000	100	776.650.000	150	386.630.000	200	642.925.000	200	1.814.405.000	100,00%	98,95%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	98,18%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1.308.878.106		536.849.980		236.424.935		243.145.000		230.965.000		1.247.384.915		95,30%		
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	554.478.106	100	36.850.000	100	57.025.000	100	243.145.000	100	166.065.000	100	503.085.000	100,00%	90,73%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain pemkab soppeng yang dikelola (Domain)	1	365.078.106	1	6.450.000	1	9.675.000	1	195.795.000	1	101.765.000	1	313.685.000	100,00%	85,92%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jenis informasi yang tersaji (Jenis)	10	189.400.000	10	30.400.000	10	47.350.000	10	47.350.000	10	64.300.000	10	189.400.000	100,00%	100,00%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	754.400.000	100	499.999.980	100	179.399.935	100	-	100	64.900.000	100	744.299.915	100,00%	98,66%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah langganan provider internet (Provider)	2	750.000.000	2	499.999.980	2	174.999.935	2	-	2	64.900.000	2	739.899.915	100,00%	98,65%
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah skpd yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah (Skpd)	35	4.400.000	35	-	35	4.400.000	35	-	35	-	35	4.400.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,30%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			143.950.000		5.800.000		8.700.000		8.700.000		119.205.000		142.405.000		98,93%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota (Dokumen)	3	143.950.000	-	5.800.000	-	8.700.000	-	8.700.000	3	119.205.000	3	142.405.000	100,00%	98,93%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dihasilkan (Dokumen)	3	143.950.000	-	5.800.000	-	8.700.000	-	8.700.000	3	119.205.000	3	142.405.000	100,00%	98,93%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,93%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			48.350.000		2.300.000		3.450.000		3.450.000		30.550.000		39.750.000		82,21%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	35	14.700.000	35	-	35	-	35	-	35	10.700.000	35	10.700.000	100,00%	72,79%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kabupaten/Kota	(Skpd)																
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah peserta bimbingan pengamanan informasi sandi (Orang)	70	14.700.000	-	-	-	-	-	-	70	10.700.000	70	10.700.000	100,00%	72,79%		
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten yang ditetapkan (%)	100	33.650.000	100	2.300.000	100	3.450.000	100	3.450.000	100	19.850.000	100	29.050.000	100,00%	86,33%		
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Orang)	70	33.650.000	-	2.300.000	-	3.450.000	-	3.450.000	70	19.850.000	70	29.050.000	100,00%	86,33%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	82,21%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
		7.493.940.265		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												100,00%	95,99%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.423.374.577		1.037.894.515		1.813.387.747		1.205.350.282		1.913.150.377		5.969.782.921		92,94%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	13	26.140.000	4	-	5	6.800.000	3	6.800.000	1	12.540.000	13	26.140.000	100,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	8.250.000	1	-	-	2.400.000	2	2.400.000	-	3.450.000	3	8.250.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	9.360.000	-	-	1	2.400.000	1	2.400.000	-	4.560.000	2	9.360.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	8	8.530.000	3	-	4	2.000.000	-	2.000.000	1	4.530.000	8	8.530.000	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	8	5.310.845.685	3	1.033.091.791	3	1.674.408.667	1	1.071.197.274	1	1.101.888.855	8	4.880.586.587	100,00%	91,90%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya (ASN)	52	5.287.585.685	52	1.033.091.791	52	1.668.408.667	52	1.063.647.274	52	1.092.178.855	52	4.857.326.587	100,00%	91,86%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (Dokumen)	100	10.500.000	15	-	25	2.000.000	40	3.550.000	20	4.950.000	100	10.500.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	6	12.760.000	3	-	3	4.000.000	-	4.000.000	-	4.760.000	6	12.760.000	100,00%	100,00%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis retribusi yang dikelola (jenis)	2	21.369.584	2	-	2	-	2	-	2	17.123.266	2	17.123.266	100,00%	80,13%
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi) (Jenis)	2	21.369.584	2	-	2	-	2	-	2	17.123.266	2	17.123.266	100,00%	80,13%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya (ASN)	52	13.750.000	52	-	52	4.000.000	52	4.000.000	52	5.750.000	52	13.750.000	100,00%	100,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaiaan (Dokumen)	4	13.750.000	1	-	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.750.000	4	13.750.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	6	382.861.408	6	-	6	93.376.994	6	80.913.061	6	204.528.050	6	378.818.105	100,00%	98,94%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	9	997.208	-	-	5	-	4	-	-	997.200	9	997.200	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	24.890.000	3	-	3	3.005.000	3	330.000	3	20.045.000	3	23.380.000	100,00%	93,93%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Fotocopy dan Cetak Dokumen Administrasi Kantor (Lembar)	45611	41.860.000	16.603	-	3.991	1.320.000	10.745	-	14.272	38.280.600	45.611	39.600.600	100,00%	94,60%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	3	90.323.800	3	-	3	20.220.050	3	17.431.100	3	52.417.450	3	90.068.600	100,00%	99,72%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	160	2.400.000	10	-	40	-	60	-	50	2.400.000	160	2.400.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	400	222.390.400	50	-	150	68.831.944	117	63.151.961	83	90.387.800	400	222.371.705	100,00%	99,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	177	522.503.500	-	-	2	-	169	9.350.000	6	503.676.000	177	513.026.000	100,00%	98,19%
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Jenis)	2	99.532.000	-	-	-	-	-	-	2	97.532.000	2	97.532.000	100,00%	97,99%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	177	422.971.500	-	-	2	-	169	9.350.000	6	406.144.000	177	415.494.000	100,00%	98,23%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	2	95.478.040	2	4.802.724	2	30.201.366	2	26.807.997	2	33.406.238	2	95.218.325	100,00%	99,73%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	65.478.040	3	4.802.724	3	20.201.366	3	16.807.997	3	23.406.238	12	65.218.325	100,00%	99,60%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	2	30.000.000	2	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	30.000.000	100,00%	100,00%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	17	50.426.360	17	-	17	4.600.720	17	6.281.950	17	34.237.968	17	45.120.638	100,00%	89,48%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan stnk (Unit)	16	29.590.560	16	-	16	4.600.720	16	6.281.950	16	16.227.904	16	27.110.574	100,00%	91,62%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	1	5.627.800	1	-	1	-	1	-	1	3.181.064	1	3.181.064	100,00%	56,52%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (unit)	11	5.440.000	-	-	4	-	3	-	4	5.140.000	11	5.140.000	100,00%	94,49%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (M2)	42	9.768.000	-	-	42	-	-	-	-	9.689.000	42	9.689.000	100,00%	99,19%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	92,94%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			7.250.000		-		2.000.000		2.000.000		3.250.000		7.250.000		100,00%		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten yang diperiksa dan diawasi (koperasi)	26	7.250.000	-	-	-	2.000.000	26	2.000.000	-	3.250.000	26	7.250.000	100,00%	100,00%		
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dimonitor dan dievaluasi (koperasi)	26	7.250.000	-	-	-	2.000.000	26	2.000.000	-	3.250.000	26	7.250.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja												Sangat	Sangat





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			12.264.000		-		2.000.000		2.000.000		7.125.000		11.125.000		90,71%		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten yang sehat (koperasi)	184	12.264.000	-	-	-	2.000.000	184	2.000.000	-	7.125.000	184	11.125.000	100,00%	90,71%		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai (koperasi)	50	2.914.000	-	-	25	-	25	-	-	1.775.000	50	1.775.000	100,00%	60,91%		
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina (koperasi)	184	9.350.000	-	-	64	2.000.000	64	2.000.000	56	5.350.000	184	9.350.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	90,71%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			390.304.000		-		5.000.000		319.245.000		63.334.000		387.579.000		99,30%		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten (orang)	110	156.055.000	-	-	110	5.000.000	-	151.055.000	-	-	110	156.055.000	100,00%	100,00%		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah orang dalam pelatihan manajemen organisasi dan pengelolaan koperasi (orang)	110	156.055.000	-	-	110	5.000.000	-	151.055.000	-	-	110	156.055.000	100,00%	100,00%		
Pendidikan Dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah KABUPATEN/KOTA	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi UKM (orang)	140	234.249.000	-	-	-	-	140	168.190.000	-	63.334.000	140	231.524.000	100,00%	98,84%		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan peningkatan kompetensi usaha mikro (orang)	140	234.249.000	-	-	-	-	140	168.190.000	-	63.334.000	140	231.524.000	100,00%	98,84%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,30%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO			13.000.000		-		4.000.000		4.000.000		5.000.000		13.000.000		100,00%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(UMKM)															
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (UMKM)	55	13.000.000	-	-	25	4.000.000	25	4.000.000	5	5.000.000	55	13.000.000	100,00%	100,00%
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang didata (UMKM)	91	13.000.000	-	-	26	4.000.000	46	4.000.000	19	5.000.000	91	13.000.000	100,00%	100,00%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			-		-		-		-		-		-		0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			42.348.313		-		-		3.500.000		36.568.313		40.068.313		94,62%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang dikembangkan (UMKM)	6	42.348.313	-	-	3	-	3	3.500.000	-	36.568.313	6	40.068.313	100,00%	94,62%
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi (kali)	1	42.348.313	-	-	1	-	-	3.500.000	-	36.568.313	1	40.068.313	100,00%	94,62%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	94,62%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			10.009.908.800		-		209.400.000		139.600.000		341.136.200		690.136.200		6,89%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola (pasar)	18	10.000.618.800	18	-	18	209.400.000	18	139.600.000	18	331.846.200	18	680.846.200	100,00%	6,81%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direvitalisasi (unit pasar)	1	9.408.398.800	-	-	-	-	-	-	-	89.650.000	-	89.650.000	0,00%	0,95%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terancang/terdesain (unit pasar)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan yang dikelola (Pasar)	18	592.220.000	18	-	18	209.400.000	18	139.600.000	18	242.196.200	18	591.196.200	100,00%	99,83%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah paket pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (paket)	1	9.290.000	-	-	-	-	-	-	1	9.290.000	1	9.290.000	100,00%	100,00%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kelompok pedagang yang dibina (kelompok)	3	9.290.000	-	-	-	-	-	-	3	9.290.000	3	9.290.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										53,00%	6,89%
				Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			6.450.000		-		2.000.000		2.000.000		2.450.000		6.450.000		100,00%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar (dokumen)	1	6.450.000	1	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.450.000	1	6.450.000	100,00%	100,00%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen pemantauan harga dan stock (dokumen)	1	6.450.000	1	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.450.000	1	6.450.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			32.530.000		-		4.000.000		4.000.000		24.526.000		32.526.000		99,99%
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku (alat)	2100	32.530.000	-	-	70	4.000.000	1.838	4.000.000	1.918	24.526.000	1.918	32.526.000	91,33%	99,99%
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Tera/Tera ulang UTTP (alat)	2100	20.180.000	-	-	70	2.000.000	1.838	2.000.000	1.918	16.176.000	1.918	20.176.000	91,33%	99,98%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi	Jumlah konsumen dan pelaku	80												100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Legal	usaha (orang)		3.995.000	-	-	80	-	-	-	-	3.995.000	80	3.995.000		
Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah barang yang diawasi/disidik (barang)	6020	8.355.000	-	-	2.765	2.000.000	2.479	2.000.000	1.236	4.355.000	6.480	8.355.000	107,64%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96,59%	99,99%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			31.450.000		-		2.000.000		2.000.000		27.420.000		31.420.000		99,90%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dalam pemasaran dan peningkatan pengunaan produk dalam negeri (Persen)	1	31.450.000	-	-	1	2.000.000	-	2.000.000	-	27.420.000	1	31.420.000	100,00%	99,90%
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	jumlah dokumen jaringan informasi (dokumen)	1	31.450.000	1	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	27.420.000	1	31.420.000	100,00%	99,90%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,90%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1.604.409.000		-		401.750.700		5.725.000		1.174.115.000		1.581.590.700		98,58%
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota (kali)	2	1.604.409.000	-	-	1	401.750.700	1	5.725.000	-	1.174.115.000	2	1.581.590.700	100,00%	98,58%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah penrajin yang dibina dan jumlah sentra yang terbentuk (penrajin/sentra)	21	1.558.764.000	-	-	10	387.455.700	10	3.725.000	1	1.144.765.000	21	1.535.945.700	100,00%	98,54%
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah peserta yang dilatih (IKM)	30	45.645.000	-	-	30	14.295.000	-	2.000.000	-	29.350.000	30	45.645.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,58%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			7.000.000		-		2.000.000		2.000.000		3.000.000		7.000.000		100,00%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen informasi industri (dokumen)	1	7.000.000	1	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	7.000.000	100,00%	100,00%



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.509.968.873		738.655.878		1.377.830.910		947.650.589		1.032.942.531		4.097.079.908		90,84%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	11	60.600.000	3	-	2	19.800.000	3	20.200.000	3	20.600.000	11	60.600.000	100,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	5	22.400.000	1	-	1	7.200.000	1	7.600.000	2	7.600.000	5	22.400.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (Dokumen)	5	38.200.000	1	-	2	12.600.000	2	12.600.000	-	13.000.000	5	38.200.000	100,00%	100,00%
	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	3		1		1		1		-		3		100,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	2	3.987.204.646	2	738.655.878	2	1.233.827.934	2	812.000.183	2	841.485.853	2	3.625.969.848	100,00%	90,94%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	37	3.964.689.646	37	738.655.878	37	1.226.427.934	37	804.600.183	35	833.770.853	35	3.603.454.848	94,59%	90,89%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	2	22.515.000	-	-	-	7.400.000	-	7.400.000	2	7.715.000	2	22.515.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	5	255.531.682	5	-	5	51.423.102	5	81.520.800	5	118.619.180	5	251.563.082	100,00%	98,45%



Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan (Buah)	5	934.452	-	-	5	934.452	-	-	-	-	5	934.452	100,00%	100,00%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas (Isi)	6	40.340.000	1	-	2	7.845.000	2	13.135.000	1	17.760.000	6	38.740.000	100,00%	96,03%		
	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman (Paket)	3		-		1		1		1		3		100,00%			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	11	16.000.200	2	-	3	1.050.000	3	4.450.000	3	10.500.000	11	16.000.000	100,00%	100,00%		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan Jenis Peralatan,bahan pembersih (Buah)	8	121.126.030	-	-	8	41.593.650	-	42.094.000	-	36.138.380	8	119.826.030	100,00%	98,93%		
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	3		-		1		1		1		3		100,00%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (kali)	200	77.131.000	44	-	50	-	50	21.841.800	66	54.220.800	210	76.062.600	105,00%	98,61%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran jasa telpone, air dan listrik (Kali)	12	121.939.265	3	-	3	39.890.354	3	19.885.103	3	27.030.761	12	86.806.218	100,00%	71,19%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (kali)	12	121.939.265	3	-	3	39.890.354	3	19.885.103	3	27.030.761	12	86.806.218	100,00%	71,19%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	9	84.693.280	-	-	3	32.889.520	4	14.044.503	2	25.206.737	9	72.140.760	100,00%	85,18%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	9	75.973.280	4	-	3	24.169.520	1	14.044.503	1	25.206.737	9	63.420.760	100,00%	83,48%		
	Jumlah pemeliharaan dan STNK kendaraan dinas/operasional (unit)	9		2		2		2		3		9		100,00%			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (unit)	5	8.720.000	-	-	5	8.720.000	-	-	-	-	5	8.720.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												95,33%	90,84%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			216.720.000		-		70.400.000		70.400.000		72.420.000		213.220.000		98,39%		
Penyusunan Rencana Tenaga	Jumlah dokumen rencana tenaga	4												25,00%	98,39%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kerja (RTK)	kerja (RTK) yang disusun (dokumen)		216.720.000	-	-	-	70.400.000	-	70.400.000	1	72.420.000	1	213.220.000				
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro yang tersusun (dokumen)	4	216.720.000	-	-	-	70.400.000	-	70.400.000	1	72.420.000	1	213.220.000	25,00%	98,39%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												25,00%	98,39%
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			49.999.850		-		-		-		48.580.600		48.580.600		97,16%		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	jumlah peserta berdasarkan unit kompetensi (peserta)	5	49.999.850	-	-	-	-	-	-	5	48.580.600	5	48.580.600	100,00%	97,16%		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (Persen)	85	49.999.850	-	-	-	-	-	-	69	48.580.600	69	48.580.600	81,18%	97,16%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												81,18%	97,16%
				Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			235.000.000		-		75.600.000		78.900.000		80.500.000		235.000.000		100,00%		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen izin dan perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah yang di terbitkan (dokumen)	1	235.000.000	-	-	-	75.600.000	-	78.900.000	1	80.500.000	1	235.000.000	100,00%	100,00%		
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi dan perizinan, non perizinan penanaman modal yang ditindaklanjuti (rekomendasi)	600	203.800.000	412	-	527	65.200.000	374	68.500.000	310	70.100.000	310	203.800.000	51,67%	100,00%		
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Dokumen)	4	31.200.000	1	-	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	4	31.200.000	100,00%	100,00%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi informasi pelayanan publik (kali)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												58,08%	100,00%
				Predikat Kinerja												Rendah	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			353.123.000		-		52.292.050		108.113.400		160.121.350		320.526.800		90,77%		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah (dokumen)	4	353.123.000	1	-	1	52.292.050	1	108.113.400	1	160.121.350	4	320.526.800	100,00%	90,77%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlsh perusahaan, jumlah laporan (perusahaan)	20	353.123.000	20	-	20	52.292.050	20	108.113.400	20	160.121.350	20	320.526.800	100,00%	90,77%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	90,77%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			152.399.500		-		5.200.000		5.200.000		138.929.050		149.329.050		97,99%		
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi (Dokumen)	4	152.399.500	-	-	-	5.200.000	-	5.200.000	3	138.929.050	3	149.329.050	75,00%	97,99%		
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi (Persen)	100	152.399.500	-	-	-	5.200.000	50	5.200.000	50	138.929.050	100	149.329.050	100,00%	97,99%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	97,99%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		5.517.211.223		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												91,28%	91,78%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				4		5		6		7					
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.031.513.141		845.085.259		1.487.260.776		927.988.850		1.239.663.434		4.499.998.319		89,44%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.899.400		-		11.921.700		5.250.000		13.689.100		30.860.800		99,88%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	9.279.800	-	-	1	3.407.200	2	1.800.000	-	4.044.600	3	9.251.800	100,00%	99,70%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun (Dokumen)	2	7.820.000	-	-	1	2.819.500	2	1.650.000	2	3.349.500	2	7.819.000	100,00%	99,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	9	13.799.600	1	-	3	5.695.000	5	1.800.000	9	6.295.000	9	13.790.000	100,00%	99,93%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.572.754.838		845.085.259		1.393.257.145		838.181.654		1.041.407.887		4.117.931.945		90,05%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	42	4.523.829.238	42	845.085.259	42	1.377.487.995	42	827.221.504	42	1.019.215.587	42	4.069.010.345	100,00%	89,95%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang di verifikasi (SPM)	60	26.325.000	10	-	20	8.379.000	15	5.400.000	15	12.542.000	60	26.321.000	100,00%	99,98%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	5	22.600.600	1	-	1	7.390.150	1	5.560.150	2	9.650.300	5	22.600.600	100,00%	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.200.000		-		2.400.000		1.800.000		3.000.000		7.200.000		100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah (Dokumen)	6	7.200.000	1	-	1	2.400.000	2	1.800.000	2	3.000.000	6	7.200.000	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			44.250.000		-		14.200.000		10.650.000		19.400.000		44.250.000		100,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)	5	23.250.000	1	-	1	7.200.000	1	5.400.000	2	10.650.000	5	23.250.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang di kelola (Sistem Informasi)	2	21.000.000	-	-	1	7.000.000	2	5.250.000	2	8.750.000	2	21.000.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			179.792.300		-		26.936.420		38.015.530		102.798.750		167.750.700		93,30%
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah jenis alat listrik/penerangan	6												100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan (Jenis)		2.996.100	-	-	2	589.120	2	1.788.980	2	618.000	6	2.996.100				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	20.690.000	-	-	1	4.720.000	1	4.380.000	1	11.010.000	3	20.110.000	100,00%	97,20%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	18571	20.679.600	4.621	-	4.627	2.624.700	4.642	5.249.400	4.681	12.805.500	18.571	20.679.600	100,00%	100,00%		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	36	29.298.600	-	-	8	5.407.600	16	13.531.150	12	9.732.450	36	28.671.200	100,00%	97,86%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	234	13.320.000	-	-	58	3.280.000	100	3.280.000	76	6.760.000	234	13.320.000	100,00%	100,00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	80	92.808.000	-	-	10	10.315.000	50	9.786.000	19	61.872.800	79	81.973.800	98,75%	88,33%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.320.000		-		-		-		-		-		0,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	13.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			123.749.873		-		28.945.511		23.551.066		37.613.255		90.109.832		72,82%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telpon,Air dan Listrik (Kali)	36	96.149.873	-	-	18	19.745.511	9	16.651.066	9	26.113.255	36	62.509.832	100,00%	65,01%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	2	27.600.000	2	-	2	9.200.000	2	6.900.000	2	11.500.000	2	27.600.000	100,00%	100,00%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.546.730		-		9.600.000		10.540.600		21.754.442		41.895.042		70,36%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	7	50.046.730	-	-	-	7.710.000	7	10.540.600	7	14.174.442	7	32.425.042	100,00%	64,79%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	15	9.500.000	-	-	-	1.890.000	5	-	10	7.580.000	15	9.470.000	100,00%	99,68%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												99,71%	89,44%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA																	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			373.438.300		-		14.999.850		155.660.000		201.233.450		371.893.300		99,59%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			373.438.300		-		14.999.850		155.660.000		201.233.450		371.893.300		99,59%	
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota lulus seleksi, jumlah anggota paskibraka yang dibina (orang)	71	373.438.300	-	-	-	14.999.850	71	155.660.000	71	201.233.450	71	371.893.300	100,00%	99,59%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	99,59%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			480.090.800		-		16.640.000		20.080.000		347.334.500		384.054.500		80,00%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-		48.964.500		48.964.500		97,93%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan dan dipelihara (paket)	2	50.000.000	-	-	-	-	1	-	1	48.964.500	2	48.964.500	100,00%	97,93%	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			74.100.000		-		16.640.000		20.080.000		24.650.000		61.370.000		82,82%	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kompetensi cabang olahraga yang dilaksanakan (Cabang)	3	43.150.000	-	-	-	11.600.000	-	8.700.000	3	22.850.000	3	43.150.000	100,00%	100,00%	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olahraga prestasi tingkat daerah yang dibina (Cabang)	3	30.950.000	-	-	-	5.040.000	3	11.380.000	3	1.800.000	3	18.220.000	100,00%	58,87%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			349.999.900		-		-		-		273.720.000		273.720.000		78,21%	
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi tingkat daerah yang dibina (Cabang)	3	349.999.900	-	-	-	-	3	-	3	273.720.000	3	273.720.000	100,00%	78,21%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Atlit yang diberikan penghargaan, jumlah pelatih yang diberi penghargaan (Orang)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			5.990.900		-		-		-		-		-		0,00%
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang dipelihara (unit)	1	5.990.900	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	80,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			13.200.000		-		4.400.000		-		8.800.000		13.200.000		100,00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			13.200.000		-		4.400.000		-		8.800.000		13.200.000		100,00%
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota kepramukaan yang dibina (Orang)	100	13.200.000	-	-	-	4.400.000	100	-	100	8.800.000	100	13.200.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			464.437.299		-		170.356.250		106.225.000		167.401.142		443.982.392		95,60%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			464.437.299		-		170.356.250		106.225.000		167.401.142		443.982.392		95,60%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (objek)	2	438.812.299	-	-	-	161.481.250	2	97.350.000	2	167.401.142	2	426.232.392	100,00%	97,13%
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi (objek)	2	25.625.000	-	-	-	8.875.000	2	8.875.000	2	-	2	17.750.000	100,00%	69,27%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,60%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			110.718.300		-		-		42.600.000		39.465.000		82.065.000		74,12%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			110.718.300		-		-		42.600.000		39.465.000		82.065.000		74,12%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tingkat Dasar																	
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif (Pelatihan)	3	110.718.300	-	-	-	-	3	42.600.000	3	39.465.000	3	82.065.000	100,00%	74,12%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	74,12%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang
		6.473.397.840		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,78%	89,52%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.684.812.682		637.855.365		1.136.509.670		806.453.373		1.030.082.748		3.610.901.156		77,08%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	100	44.804.700	15	-	40	14.047.150	65	10.943.600	100	17.809.200	100	42.799.950	100,00%	95,53%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	13.274.850	1	-	1	4.249.900	1	3.249.900	2	5.772.000	2	13.271.800	100,00%	99,98%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	13.474.850	1	-	1	4.274.750	1	3.274.750	2	3.924.500	2	11.474.000	100,00%	85,15%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	10	18.055.000	2	-	5	5.522.500	7	4.418.950	10	8.112.700	10	18.054.150	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (Persen)	100	4.048.626.390	25	637.855.365	50	1.003.854.363	75	714.188.558	85	749.214.644	85	3.105.112.930	85,00%	76,70%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan (Bulan)	3	4.025.136.390	-	637.855.365	1	997.889.413	2	708.483.708	3	737.744.444	3	3.081.972.930	100,00%	76,57%
	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	33		8		15		25		30		30		90,91%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yg diverifikasi (Dokumen)	70	15.300.000	2	-	5	4.580.000	13	3.300.000	21	7.420.000	21	15.300.000	30,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan (Dokumen)	20	8.190.000	5	-	11	1.384.950	16	2.404.850	17	4.050.200	17	7.840.000	85,00%	95,73%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (Persen)	100	305.570.460	20	-	45	62.770.950	60	44.787.850	85	118.838.089	85	226.396.889	85,00%	74,09%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan (Buah)	9	3.562.960	-	-	9	-	-	-	-	3.285.000	9	3.285.000	100,00%	92,20%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	8	3.432.000	-	-	8	3.215.000	-	-	-	-	8	3.215.000	100,00%	93,68%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman (Paket)	12	39.780.000	3	-	3	6.720.000	3	6.965.000	12	16.800.000	21	30.485.000	175,00%	76,63%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis) (jenis)	4	9.471.750	1	-	1	1.888.500	1	800.000	1	3.754.500	4	6.443.000	100,00%	68,02%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	14	62.592.350	3	-	7	21.522.250	10	8.258.850	11	29.736.350	11	59.517.450	78,57%	95,09%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	330	10.500.000	50	-	120	1.925.000	235	3.850.000	295	4.725.000	295	10.500.000	89,39%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)	390	176.231.400	30	-	80	27.500.200	224	24.914.000	321	60.537.239	321	112.951.439	82,31%	64,09%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	68.838.000	-	-	-	-	-	-	100	68.563.000	100	68.563.000	100,00%	99,60%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	4	68.838.000	-	-	-	-	-	-	-	68.563.000	-	68.563.000	0,00%	99,60%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (persen)	100	122.923.762	25	-	45	46.398.767	70	28.156.865	95	43.091.142	95	117.646.774	95,00%	95,71%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	55.723.762	3	-	3	23.998.767	3	12.356.865	2	17.091.142	11	53.446.774	91,67%	95,91%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan (Orang)	8	67.200.000	2	-	2	22.400.000	2	15.800.000	1	26.000.000	7	64.200.000	87,50%	95,54%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	94.049.370	20	-	45	9.438.440	60	8.376.500	80	32.566.673	80	50.381.613	80,00%	53,57%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan stnk (Unit)	1	41.211.240	1	-	-	8.043.440	-	3.355.000	-	8.362.000	1	19.760.440	100,00%	47,95%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit) (Unit)	10	41.678.405	-	-	5	1.395.000	-	3.700.000	5	15.186.673	10	20.281.673	100,00%	48,66%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara (Unit)	19	5.460.000	-	-	10	-	-	-	-	5.460.000	10	5.460.000	52,63%	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara (M2)	320	5.699.725	-	-	250	-	-	1.321.500	-	3.558.000	250	4.879.500	78,13%	85,61%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										93,67%	77,08%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.545.604.000		-		1.386.681.605		275.463.830		606.322.815		2.268.468.250		89,11%
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rata - rata pengunjung perpustakaan / tahun (Orang)	8924	12.000.000	475	-	2.135	4.000.000	4.713	3.000.000	8.924	5.000.000	8.924	12.000.000	100,00%	100,00%
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Sekolah Dasar yang Ikut Lomba (Sekolah Dasar)	70	6.000.000	3	-	5	2.000.000	9	1.500.000	10	2.500.000	10	6.000.000	14,29%	100,00%
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Desa / Kelurahan yang Ikut Lomba (Desa / Kelurahan)	8	6.000.000	2	-	2	2.000.000	2	1.500.000	-	2.500.000	6	6.000.000	75,00%	100,00%
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pustakawan yang Mengikuti Survei (Orang)	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Diadakan (Judul)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rata - rata pengunjung perpustakaan / tahun (Orang)	8924	2.533.604.000	315	-	3.500	1.382.681.605	6.315	272.463.830	7.450	601.322.815	7.450	2.256.468.250	83,48%	89,06%
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum / Perpustakaan Desa / Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah yang Dikunjungi (Pengunjung)	1250	48.000.000	24	-	40	16.000.000	130	12.000.000	345	18.500.000	345	46.500.000	27,60%	96,88%
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Gedung Perpustakaan (Paket)	1	2.485.604.000	-	-	-	1.366.681.605	-	260.463.830	1	582.822.815	1	2.209.968.250	100,00%	88,91%
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			-		-		-		-		-		-		0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,37%	89,11%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			56.326.500		-		27.250.000		1.500.000		25.889.000		54.639.000		97,00%		
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Perangkat Daerah)	31	25.250.000	31	-	-	25.250.000	-	-	-	-	31	25.250.000	100,00%	100,00%		
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang mendapatkan pengawasan kearsipan Internal (OPD)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip yang Ditata dan Didata (Lembar)	1800	25.250.000	-	-	1.800	25.250.000	-	-	-	-	1.800	25.250.000	100,00%	100,00%		
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Perangkat Daerah)	31	20.223.000	2	-	6	2.000.000	8	1.500.000	30	15.910.500	30	19.410.500	96,77%	95,98%		
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (SKPD)	6	20.223.000	1	-	2	2.000.000	4	1.500.000	5	15.910.500	5	19.410.500	83,33%	95,98%		
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Perangkat Daerah)	100	10.853.500	-	-	-	-	-	-	100	9.978.500	100	9.978.500	100,00%	91,94%		
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi (Peserta)	70	10.853.500	-	-	-	-	-	-	70	9.978.500	70	9.978.500	100,00%	91,94%		
	Jumlah SKPD yang Mengelola Arsip (Orang)	21		-		-		-		21		21		100,00%			
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												94,02%	97,00%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		7.286.743.182		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												95,32%	81,44%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
			4		5		6		7						
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.348.287.552		2.525.910.613		4.943.523.714		3.388.523.243		4.113.892.861		14.971.850.431		86,30%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	20	23.400.000	2	-	4	1.350.000	15	1.350.000	18	19.700.000	18	22.400.000	90,00%	95,73%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun (Dokumen)	3	2.000.000	1	-	2	-	2	-	3	2.000.000	3	2.000.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	4.760.000	1	-	1	-	1	-	1	4.760.000	1	4.760.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	6.790.000	-	-	-	-	1	-	1	6.790.000	1	6.790.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	8	9.850.000	-	-	2	1.350.000	4	1.350.000	8	6.150.000	8	8.850.000	100,00%	89,85%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	7	15.806.145.021	-	2.525.910.613	1	4.752.983.847	3	3.071.554.635	5	3.147.363.197	5	13.497.812.292	71,43%	85,40%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	115	15.767.545.021	115	2.525.910.613	115	4.742.783.847	115	3.063.754.635	115	3.128.563.197	115	13.461.012.292	100,00%	85,37%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36.600.000		-		10.200.000		7.800.000		16.800.000		34.800.000		95,08%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	7	2.000.000	-	-	-	-	-	-	7	2.000.000	7	2.000.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	6	531.627.300	-	-	2	107.625.375	3	99.344.160	4	315.399.700	4	522.369.235	66,67%	98,26%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan (Buah)	10	500.000	10	-	10	-	10	500.000	10	-	10	500.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	2	29.400.000	-	-	1	5.080.000	1	900.000	1	16.965.000	1	22.945.000	50,00%	78,04%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.000.000		-		775.000		3.719.500		8.505.500		13.000.000		100,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	4	157.112.300	1	-	2	41.820.300	2	10.537.500	4	104.754.500	4	157.112.300	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	100	5.490.000	10	-	30	900.000	50	-	100	4.590.000	100	5.490.000	100,00%	100,00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	150	326.125.000	10	-	31	59.050.075	93	83.687.160	150	180.584.700	150	323.321.935	100,00%	99,14%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	5	321.130.000	-	-	-	3.410.000	5	75.363.000	5	238.705.500	5	317.478.500	100,00%	98,86%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	43.130.000	-	-	4	-	4	29.400.000	4	11.750.000	4	41.150.000	100,00%	95,41%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1	278.000.000	-	-	1	3.410.000	1	45.963.000	1	226.955.500	1	276.328.500	100,00%	99,40%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	6	296.470.376	-	-	-	70.048.402	3	80.286.538	5	116.638.083	5	266.973.023	83,33%	90,05%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	137.470.376	3	-	3	38.248.402	3	40.286.538	12	42.038.083	21	120.573.023	175,00%	87,71%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	4	159.000.000	-	-	1	31.800.000	2	40.000.000	4	74.600.000	4	146.400.000	100,00%	92,08%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	183	369.514.855	183	-	183	8.106.090	183	60.624.910	183	276.086.381	183	344.817.381	100,00%	93,32%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			32.937.385		-		1.350.500		13.068.750		13.390.000		27.809.250		84,43%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	153	218.280.530	140	-	140	6.755.590	140	45.126.160	153	150.901.256	143	202.783.006	93,63%	92,90%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan STNK (Unit)	2	23.996.940	-	-	-	-	-	-	2	23.265.125	2	23.265.125	100,00%	96,95%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	26	9.340.000	-	-	13	-	20	2.430.000	26	4.400.000	26	6.830.000	100,00%	73,13%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara (M2)	500	84.960.000	-	-	500	-	-	-	500	84.130.000	1.000	84.130.000	200,00%	99,02%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,44%	86,30%
				Predikat Kinerja												Sangat	Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														Tinggi			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			500.000.000		-		-		82.015.000		417.285.000		499.300.000		99,86%		
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun dan jumlah koordinasi yang dilakukan (Paket)	1	500.000.000	-	-	-	-	1	82.015.000	1	417.285.000	1	499.300.000	100,00%	99,86%		
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina (kelompok)	1	500.000.000	1	-	1	-	1	82.015.000	1	417.285.000	1	499.300.000	100,00%	99,86%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			-		-		-		-		-		-		0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,86%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			791.340.000		-		18.300.000		338.720.000		426.960.000		783.980.000		99,07%		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg)	76745000	39.600.000	-	-	-	5.400.000	50.000.000	5.400.000	50.000.000	28.800.000	50.000.000	39.600.000	65,15%	100,00%		
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Analisis Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Kebutuhan Pangan (Dokumen) (Dokumen)	1	6.330.000	1	-	1	1.350.000	1	1.350.000	1	3.630.000	1	6.330.000	100,00%	100,00%		
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Produk Olahan Pangan Lokal yang Dipromosikan (Jenis)	12	16.500.000	-	-	7	-	7	-	12	16.500.000	12	16.500.000	100,00%	100,00%		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			-		-		-		-		-		-		0,00%		
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Stabilitas Harga Pangan Strategis (Dokumen)	1	16.770.000	-	-	-	4.050.000	1	4.050.000	1	8.670.000	1	16.770.000	100,00%	100,00%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten yang dikelola (Ton)	10	157.500.000	-	-	-	7.500.000	10	100.000.000	10	50.000.000	10	157.500.000	100,00%	100,00%
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam mengatasi Kerawanan Pangan (Ton)	10	157.500.000	1	-	3	7.500.000	10	100.000.000	10	50.000.000	10	157.500.000	100,00%	100,00%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah ketersediaan energi protein per kapita per hari (Kkal)	2400	594.240.000	-	-	-	5.400.000	2.000	233.320.000	2.000	348.160.000	2.000	586.880.000	83,33%	98,76%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pengembangan Tanaman Pekarangan melalui Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Kelompok)	18	560.000.000	-	-	5	-	10	227.920.000	18	327.150.000	18	555.070.000	100,00%	99,12%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (Dokumen)	1	34.240.000	-	-	-	5.400.000	-	5.400.000	1	21.010.000	1	31.810.000	100,00%	92,90%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,07%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			17.000.000		-		2.700.000		2.700.000		11.600.000		17.000.000		100,00%
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun (Dokumen)	1	17.000.000	-	-	-	2.700.000	1	2.700.000	1	11.600.000	1	17.000.000	100,00%	100,00%
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan kondisi daerah rawan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi (Dokumen)	1	17.000.000	-	-	-	2.700.000	1	2.700.000	1	11.600.000	1	17.000.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			16.897.000		-		1.350.000		1.350.000		13.847.000		16.547.000		97,93%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (sampel)	1	16.897.000	-	-	-	1.350.000	1	1.350.000	1	13.847.000	1	16.547.000	100,00%	97,93%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pangan Segar yang diuji (Jenis)	4	16.897.000	-	-	1	1.350.000	2	1.350.000	4	13.847.000	4	16.547.000	100,00%	97,93%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,93%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.822.600.111		-		210.397.500		474.523.000		1.074.265.000		1.759.185.500		96,52%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang diawasi dan didampingi penggunaannya (Jenis)	3	772.718.000	-	-	-	26.900.000	3	164.724.000	3	560.817.000	3	752.441.000	100,00%	97,38%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Frekuensi Pendampingan dan Pengawasan Peningkatan Produksi (Kali)	70	461.213.000	-	-	70	26.900.000	70	162.024.000	70	267.335.000	70	456.259.000	100,00%	98,93%
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang tersedia (unit)	4	311.505.000	-	-	-	-	4	2.700.000	4	293.482.000	4	296.182.000	100,00%	95,08%
	Jumlah Alat Transportasi Perkebunan (unit)	1		-		-		1		1		1			
	Jumlah Mesin Pengolahan Hasil Pertanian yang diadakan (Unit)	4		-		-		4		4		4			
	Jumlah Pengecer dan Distributor Pupuk Bersubsidi yang terbina (orang)	52		-		-		52		52		52			
	Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun (Dokumen)	1		-		-		1		1		1			
	Tersedianya sarana dan prasarana pada kelompok tani pembudidaya tembakau (Kelompok)	8		-		-		8		8		8			
	Tersedianya Sarana Produksi (Hektar)	26		-		-		26		26		26			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sumber daya genetik tumbuhan yang dikelola dan dikembangkan (Jenis)	14	1.049.882.111	-	-	-	183.497.500	10	309.799.000	12	513.448.000	12	1.006.744.500	85,71%	95,89%
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit unggul hortikultura yang dikembangkan (Kg)	820	179.354.611	-	-	-	92.499.000	800	54.418.000	800	18.920.000	800	165.837.000	97,56%	92,46%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Luas areal penangkaran benih unggul tanaman pangan (hektar)	5		-		-		5		5		5		100,00%	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jenis komoditi hortikultura yang dikembangkan melalui pola pekarangan (Komoditi)	5		-		-		5		5		5		100,00%	
	Jumlah bibit sambung pucuk kakao (Pohon)	22000		-		-		20.000		20.000		20.000		90,91%	
	Jumlah bibit tanaman alternatif perkebunan yang diadakan (Pohon)	4100		-		-		4.000		4.000		4.000		97,56%	
	Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Pohon)	1600		-		-		1.300		1.300		1.300		81,25%	
	Jumlah bibit ulat yang diadakan (Box)	370		-		-		370		370		370		100,00%	
	Jumlah komoditi pengembangan hortikultura yang diusahakan (Komoditi)	4	870.527.500	-	-	-	90.998.500	4	255.381.000	4	494.528.000	4	840.907.500	100,00%	96,60%
	Luas areal pengembangan padi ladang (Hektar)	20		-		-		20		20		20		100,00%	
	Luas areal pengembangan padi organik (Hektar)	25		-		-		15		15		15		60,00%	
	Luas areal pengembangan tanaman aneka kacang dan umbi (Hektar)	16		-		-		16		16		16		100,00%	
	Luas areal pengembangan tanaman sayuran (Hektar)	15		-		-		15		15		15		100,00%	
	Luas areal pengembangan tanaman sereal (Hektar)	35		-		-		35		35		35		100,00%	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96,83%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			5.846.495.000		-		-		809.245.000		4.598.906.500		5.408.151.500		92,50%
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan dukungan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	61.470.000	-	-	-	-	2	22.425.000	2	34.147.000	2	56.572.000	100,00%	92,03%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen SID (Survey, Investigasi dan Desain) mendukung perluasan dan pengelolaan lahan pertanian melalui APBN TP (Dokumen)	2	25.000.000	-	-	2	-	2	7.425.000	2	17.127.000	2	24.552.000	100,00%	98,21%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah data base hortikultura yang dihasilkan (Dokumen)	1	36.470.000	-	-	-	-	-	15.000.000	1	17.020.000	1	32.020.000	100,00%	87,80%		
	Jumlah data base potensi produk pangan yang tersusun (Dokumen)	2		-		1		-		2		2		100,00%			
	Kegiatan pendampingan pembangunan infrastruktur pertanian (Kegiatan)	2		-		1		-		2		2		100,00%			
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket prasarana pertanian yang dibangun (Paket)	11	5.785.025.000	-	-	-	-	7	786.820.000	7	4.564.759.500	7	5.351.579.500	63,64%	92,51%		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah sumber - sumber air berupa Irigasi Air Tanah untuk Pertanian yang dibangun / direhabilitasi (Unit)	18	3.117.025.000	-	-	-	-	15	785.290.000	18	2.288.289.500	18	3.073.579.500	100,00%	98,61%		
	Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun / terehabilitasi (meter)	150		-		-		-		150		150		100,00%			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah sumber - sumber air untuk pertanian yang dibangun / direhabilitasi (embung) (Unit)	5	1.008.000.000	-	-	-	-	3	-	3	918.000.000	3	918.000.000	60,00%	91,07%		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usahatani dan Jalan Produksi yang dikembangkan / direhabilitasi (Km)	2	1.030.000.000	-	-	-	-	1	1.530.000	2	1.028.470.000	2	1.030.000.000	100,00%	100,00%		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah sumber - sumber air untuk pertanian yang dibangun / direhabilitasi (Dam Parit) (Unit)	5	630.000.000	-	-	-	-	1	-	1	330.000.000	1	330.000.000	20,00%	52,38%		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			-		-		-		-		-		-		0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												84,48%	92,50%
				Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA			128.163.000		-		5.517.000		43.696.000		78.782.000		127.995.000		99,87%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PERTANIAN															
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan (Jenis)	4	128.163.000	-	-	-	5.517.000	2	43.696.000	2	78.782.000	2	127.995.000	50,00%	99,87%
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah bahan OPT Hortikultura yang diadakan (Paket)	1	128.163.000	-	-	1	5.517.000	-	43.696.000	1	78.782.000	1	127.995.000	100,00%	99,87%
	Jumlah Kelompok Lokasi SL PHT Perkebunan (Kelompok)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
	Jumlah Pelaksanaan SL PHT Tanaman Pangan (Kali)	8		-		5		-		7		7		87,50%	
	Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian OPT Hortikultura (Orang)	25		-		-		-		25		25		100,00%	
	Jumlah Pestisida / Bahan Perlindungan Tanaman Pangan yang diadakan (Jenis)	3		-		3		-		3		3		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,50%	99,87%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.513.658.410		-		371.932.100		459.595.500		1.518.373.151		2.349.900.751		93,49%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah jenis kegiatan dukungan pengembangan kelembagaan penyuluhan (Jenis)	6	2.513.658.410	-	-	-	371.932.100	3	459.595.500	5	1.518.373.151	5	2.349.900.751	83,33%	93,49%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Frekuensi penyuluhan informasi spesifikasi lokasi yang telah direkomendasikan (Kali)	8	600.770.000	1	-	4	178.550.000	-	207.870.000	8	199.400.000	8	585.820.000	100,00%	97,51%
	Jumlah penyuluh yang memperoleh dukungan operasional (Orang)	31		10		15		-		31		31		100,00%	
	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (Orang)	100		20		30		50		100		100		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyusunan programa penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan (Dokumen)	79		-		-		20		79		79		100,00%	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah jenis pelatihan pengolahan hasil pertanian (Jenis)	3	220.684.510	-	-	-	6.750.000	-	53.400.000	3	144.234.451	3	204.384.451	100,00%	92,61%
	Jumlah kelembagaan pelaku utama yang dibina (Kelompok)	957		-		-		670		670		70,01%			
	Jumlah peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil Perkebunan (Orang)	30		-		-		25		25		83,33%			
	Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber daya petani melalui bantuan pemerintah (Orang)	30		-		-		25		25		83,33%			
	Jumlah petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	320		-		-		250		250		78,13%			
	Pendampingan kemitraan usaha Gapoktan (Gapoktan)	71		-		-		65		65		91,55%			
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan (Jenis)	5	403.400.000	-	-	-	750.000	-	6.088.000	5	391.160.600	5	397.998.600	100,00%	98,66%
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran promosi tingkat kab. prop. dan nasional (Kali)	5	41.447.900	-	-	-	4.907.500	1	2.700.000	2	23.667.000	2	31.274.500	40,00%	75,45%
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah daerah irigasi yang terbina melalui program Hibah IPDMIP (Daerah Irigasi)	5	1.247.356.000	-	-	-	180.974.600	-	189.537.500	5	759.911.100	5	1.130.423.200	100,00%	90,63%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,64%	93,49%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		28.984.441.073		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										96,72%	89,48%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				4		5		6		7					
1	2	3	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.076.250.364		651.627.724		1.148.833.635		808.831.896		1.111.911.895		3.721.205.150		91,29%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	32.658.200	100	-	100	10.750.000	100	6.143.000	100	12.335.000	100	29.228.000	100,00%	89,50%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	11.943.900	1	-	1	3.750.000	3	1.965.500	3	4.999.500	3	10.715.000	100,00%	89,71%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	10.829.000	1	-	-	3.750.000	-	2.877.500	-	2.250.000	1	8.877.500	100,00%	81,98%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1	1.829.000	-	-	-	-	1	-	1	1.661.000	1	1.661.000	100,00%	90,81%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	4	8.056.300	3	-	1	3.250.000	-	1.300.000	4	3.424.500	4	7.974.500	100,00%	98,98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	3.173.499.202	25	651.627.724	25	1.007.057.238	25	612.364.740	25	638.965.042	100	2.910.014.744	100,00%	91,70%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	33	3.154.187.402	33	651.627.724	33	1.002.227.238	33	609.978.240	33	632.247.392	33	2.896.080.594	100,00%	91,82%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang di verifikasi (SPM)	1500	6.750.000	-	-	240	1.080.000	580	-	1.500	2.000.000	1.500	3.080.000	100,00%	45,63%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	16	12.561.800	4	-	8	3.750.000	12	2.386.500	16	4.717.650	16	10.854.150	100,00%	86,41%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran (%)	100	346.891.700	25	-	50	10.391.500	75	81.801.200	100	223.471.900	100	315.664.600	100,00%	91,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	12	32.395.000	3	-	6	-	9	12.600.000	12	19.125.000	12	31.725.000	100,00%	97,93%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%)	25000	11.875.000	-	-	-	-	-	-	25.000	11.797.200	25.000	11.797.200	100,00%	99,34%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	48	45.129.500	-	-	27	10.391.500	-	-	21	23.689.000	48	34.080.500	100,00%	75,52%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Makan Minum Tamu	340												100,00%	31,91%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	(OM)		8.460.000	-	-	-	-	-	-	340	2.700.000	340	2.700.000				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)	350	249.032.200	-	-	102	-	110	69.201.200	138	166.160.700	350	235.361.900	100,00%	94,51%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)	100	29.900.000	25	-	25	-	25	-	25	29.700.000	100	29.700.000	100,00%	99,33%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	1	29.900.000	-	-	-	-	-	-	1	29.700.000	1	29.700.000	100,00%	99,33%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (Paket)	100	400.114.142	25	-	25	110.410.269	25	102.467.956	25	141.393.779	100	354.272.004	100,00%	88,54%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	140.114.142	3	-	3	46.621.189	3	14.889.796	3	38.815.619	12	100.326.604	100,00%	71,60%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	2	260.000.000	1	-	-	63.789.080	1	87.578.160	-	102.578.160	2	253.945.400	100,00%	97,67%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	100	93.187.120	-	-	-	10.224.628	25	6.055.000	100	66.046.174	100	82.325.802	100,00%	88,34%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan stnk (Unit)	12	53.847.120	-	-	5	10.224.628	9	6.055.000	12	27.645.174	12	43.924.802	100,00%	81,57%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	7	9.340.000	-	-	-	-	-	-	7	9.270.000	7	9.270.000	100,00%	99,25%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang direhab (unit)	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	1	29.131.000	1	29.131.000	100,00%	97,10%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	91,29%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PERENCANAAN																	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			462.920.250		-		160.532.400		159.961.050		137.793.950		458.287.400		99,00%		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu (Dokumen)	3	405.795.450	-	-	2	149.532.400	1	149.571.500	-	106.118.800	3	405.222.700	100,00%	99,86%		
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum (Orang)	34	21.965.000	34	-	-	21.965.000	-	-	-	-	34	21.965.000	100,00%	100,00%		
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	umlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)	2	96.264.950	2	-	-	85.640.200	-	7.024.750	-	3.500.000	2	96.164.950	100,00%	99,90%		
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPJMD dan Naskah Akademik dan RKPD (Dokumen)	3	287.565.500	-	-	2	41.927.200	1	142.546.750	-	102.618.800	3	287.092.750	100,00%	99,84%		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen ang tersusun tepat waktu (Dokumen)	1	21.409.700	-	-	-	7.250.000	-	2.900.000	1	7.250.000	1	17.400.000	100,00%	81,27%		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	3	10.659.700	1	-	-	3.750.000	2	1.500.000	-	3.750.000	3	9.000.000	100,00%	84,43%		
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD (Dokumen)	34	10.750.000	34	-	34	3.500.000	34	1.400.000	34	3.500.000	34	8.400.000	100,00%	78,14%		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersusun tepat waktu (Dokumen)	4	35.715.100	1	-	1	3.750.000	1	7.489.550	1	24.425.150	4	35.664.700	100,00%	99,86%		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	4	35.715.100	1	-	2	3.750.000	3	7.489.550	4	24.425.150	4	35.664.700	100,00%	99,86%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,00%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			455.411.400		-		47.867.250		98.676.950		232.333.245		378.877.445		83,19%		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang difasilitasi (SKPD)	34	89.015.500	34	-	34	13.000.000	34	15.038.800	34	44.315.500	34	72.354.300	100,00%	81,28%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Dokumen)	1	5.765.500	-	-	-	-	-	-	1	5.665.500	1	5.665.500	100,00%	98,27%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	2	83.250.000	-	-	-	13.000.000	2	15.038.800	-	38.650.000	2	66.688.800	100,00%	80,11%		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah SKPD yang difasilitasi (SKPD)	34	73.984.500	34	-	34	3.650.000	34	-	34	55.984.500	34	59.634.500	100,00%	80,60%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1	6.400.000	-	-	-	-	-	-	1	3.500.000	1	3.500.000	100,00%	54,69%		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Dokumen)	1	61.819.000	-	-	-	3.650.000	-	-	1	46.819.000	1	50.469.000	100,00%	81,64%		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Dokumen)	1	5.765.500	-	-	-	-	-	-	1	5.665.500	1	5.665.500	100,00%	98,27%		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah SKPD yang difasilitasi (SKPD)	34	292.411.400	34	-	34	31.217.250	34	83.638.150	34	132.033.245	34	246.888.645	100,00%	84,43%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	1	33.099.800	-	-	-	1.025.000	-	7.200.000	1	11.399.800	1	19.624.800	100,00%	59,29%		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonitasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Dokumen)	5	259.311.600	2	-	1	30.192.250	1	76.438.150	1	120.633.445	5	227.263.845	100,00%	87,64%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	83,19%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

II-380



Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(%)														
	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	23		10		7		-		6		23		100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	10	7.795.000	2	-	2	3.544.300	6	-	-	3.643.600	10	7.187.900	100,00%	92,21%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)	1	12.955.000	-	-	-	4.372.200	1	1.800.000	-	6.747.450	1	12.919.650	100,00%	99,73%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	1	13.310.000	-	-	-	3.388.600	1	2.800.000	-	7.011.400	1	13.200.000	100,00%	99,17%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9	11.800.000	2	-	2	5.299.350	4	750.000	1	5.596.800	9	11.646.150	100,00%	98,70%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	10.972.957.440	100	1.939.941.028	100	3.311.903.212	100	2.049.587.161	100	2.698.262.474	100	9.999.693.875	100,00%	91,13%
	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	3		3		3		3		3		3		100,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	107	10.851.654.440	107	1.939.941.028	107	3.275.134.512	107	2.036.587.161	107	2.629.396.574	107	9.881.059.275	100,00%	91,06%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverikasi (SPM)	1200	107.840.000	60	-	230	29.910.000	200	13.000.000	338	62.268.000	828	105.178.000	69,00%	97,53%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	3	13.463.000	-	-	1	6.858.700	1	-	1	6.597.900	3	13.456.600	100,00%	99,95%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis retribusi yang dikelola (jenis)	1	11.028.828	-	-	-	-	1	-	-	11.028.828	1	11.028.828	100,00%	100,00%
	Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100		100		100		100		100		100		100,00%	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi yang dikelola (objek retribusi)	2	11.028.828	-	-	-	-	2	-	2	11.028.828	2	11.028.828	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah	100	39.200.000	100	-	100	12.699.950	100	9.200.000	100	15.804.100	100	37.704.050	100,00%	96,18%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kabupaten (%)														
	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (ASN)	107		107		107		107		107		107		100,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			39.200.000		-		12.699.950		9.200.000		15.804.100		37.704.050		96,18%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	1.317.138.970	100	-	100	364.009.150	100	199.673.850	100	677.161.650	100	1.240.844.650	100,00%	94,21%
	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	6		6		6		-		-		3		50,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	2	15.523.500	2	-	2	5.198.000	2	800.000	2	6.097.500	2	12.095.500	100,00%	77,92%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	205.140.000	3	-	3	68.280.000	3	47.100.000	3	87.330.000	3	202.710.000	100,00%	98,82%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	3	335.632.500	3	-	3	87.323.750	3	55.808.250	3	145.098.100	3	288.230.100	100,00%	85,88%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	288.699.370	3	-	3	110.088.000	3	38.966.600	3	118.860.650	3	267.915.250	100,00%	92,80%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	600	24.925.000	200	-	370	10.150.000	25	4.950.000	35	9.800.000	630	24.900.000	105,00%	99,90%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)	280	447.218.600	90	-	190	82.969.400	-	52.049.000	50	309.975.400	330	444.993.800	117,86%	99,50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%)	100	485.400.000	100	-	100	268.774.000	100	-	100	202.478.000	100	471.252.000	100,00%	97,09%
	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	26		-		26		-		-		26		100,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	6	150.000.000	-	-	-	-	-	-	6	137.193.000	6	137.193.000	100,00%	91,46%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	28	335.400.000	26	-	-	268.774.000	-	-	2	65.285.000	28	334.059.000	100,00%	99,60%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	7.096.992.394	100	882.892.781	100	1.501.817.175	100	1.764.181.374	100	2.524.814.731	400	6.673.706.061	400,00%	94,04%
	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang	3		3		3		3		3		100,00%			





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	disediakan (Paket)														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman (kali)	89	10.000.000	20	-	25	909.000	25	324.000	19	-	89	1.233.000	100,00%	12,33%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	36	6.567.192.394	9	882.892.781	9	1.321.635.675	9	1.610.902.374	9	2.343.892.231	36	6.159.323.061	100,00%	93,79%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum (Jenis)	2	519.800.000	2	-	2	179.272.500	2	152.955.000	2	180.922.500	2	513.150.000	100,00%	98,72%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	290.109.670	100	-	100	56.132.475	100	12.774.781	100	173.488.213	100	242.395.469	100,00%	83,55%
	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	337		80		140		30		85		335		99,41%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (unit radis roda 2)	295	167.013.670	100	-	112	43.558.475	35	12.774.781	42	78.347.213	289	134.680.469	97,97%	80,64%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	22	12.150.000	15	-	3	3.425.000	2	-	2	7.125.000	22	10.550.000	100,00%	86,83%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	320	110.946.000	100	-	110	9.149.000	75	-	35	88.016.000	320	97.165.000	100,00%	87,58%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,03%	92,41%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
KEUANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			122.542.396.619		19.607.113.520		23.381.782.247		36.604.276.375		37.889.498.765		117.482.670.907		95,87%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	100	1.138.220.000	100	-	100	282.005.300	100	266.675.000	100	503.933.700	400	1.052.614.000	400,00%	92,48%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	1	21.450.000	-	-	-	-	1	-	-	18.582.800	1	18.582.800	100,00%	86,63%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	1	27.290.000	-	-	-	-	1	-	-	23.109.300	1	23.109.300	100,00%	84,68%
Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang	34												100,00%	99,53%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Verifikasi RKA-SKPD	Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)		36.225.000	-	-	-	-	34	-	-	36.054.200	34	36.054.200		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	34	36.225.000	-	-	-	-	34	-	-	36.139.950	34	36.139.950	100,00%	99,77%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	34	3.875.000	34	-	-	-	-	-	-	715.400	34	715.400	100,00%	18,46%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	34	5.255.000	-	-	-	-	-	-	34	5.043.850	34	5.043.850	100,00%	95,98%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	2	512.350.000	-	-	-	265.084.400	2	136.250.000	-	71.342.000	2	472.676.400	100,00%	92,26%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Peraturan Daerah dan Perbub tentang Perubahan APBD (Dokumen)	2	482.750.000	-	-	-	16.920.900	2	130.425.000	-	306.767.500	2	454.113.400	100,00%	94,07%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah (Dokumen)	1	12.800.000	-	-	-	-	1	-	-	6.178.700	1	6.178.700	100,00%	48,27%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	100	130.054.500	100	-	100	27.000.400	100	28.380.000	100	58.537.550	100	113.917.950	100,00%	87,59%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah (Dokumen)	4	18.533.000	4	-	4	2.599.850	4	2.780.000	4	9.673.150	4	15.053.000	100,00%	81,22%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD yang Diterbitkan untuk Diproses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah (Dokumen)	2	16.860.000	2	-	2	3.679.950	2	8.410.000	2	3.260.050	2	15.350.000	100,00%	91,04%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem (SKPD)	9	15.950.000	9	-	9	2.400.000	9	1.800.000	9	9.450.000	9	13.650.000	100,00%	85,58%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan (Dokumen)	6	23.290.000	6	-	6	4.800.000	6	4.580.000	6	8.585.100	6	17.965.100	100,00%	77,14%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)	6	23.255.000	6	-	6	4.600.000	6	4.430.000	6	12.827.250	6	21.857.250	100,00%	93,99%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu (%)	100	32.166.500	100	-	100	8.920.600	100	6.380.000	100	14.742.000	100	30.042.600	100,00%	93,40%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	100	283.175.000	100	-	100	64.417.400	100	27.750.000	100	152.903.800	100	245.071.200	100,00%	86,54%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akuntabel (Laporan)	2	18.400.000	1	-	-	7.748.700	1	1.650.000	-	8.233.800	2	17.632.500	100,00%	95,83%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten (Laporan)	2	43.125.000	-	-	1	11.624.800	1	6.900.000	-	23.352.600	2	41.877.400	100,00%	97,11%
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Laporan)	34		-		-		-		34		100,00%			
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	1	24.325.000	1	-	-	2.099.850	-	-	-	21.743.800	1	23.843.650	100,00%	98,02%
	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan	612										100,00%			





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Laporan)			-		-		-		612		612			
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang tekonsolidasi UN AUDIT (Dokumen)	1	113.350.000	1	-	-	41.894.050	-	7.200.000	-	52.000.000	1	101.094.050	100,00%	89,19%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	2	40.175.000	-	-	-	1.050.000	2	12.000.000	-	26.828.900	2	39.878.900	100,00%	99,26%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)	4	43.800.000	-	-	-	-	-	-	2	20.744.700	2	20.744.700	50,00%	47,36%
	Persentase Penyelesaian kerugian daerah (Persentase)	100		-		-		-		50		50		50,00%	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan termtang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PERPU)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Dibina Pengelolaan Keuangan Daerah (Desa)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	100	120.990.947.119	50	19.607.113.520	50	23.008.359.147	50	36.281.471.375	50	37.174.123.715	200	116.071.067.757	200,00%	95,93%
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemenrintah Daerah (%)	100	1.471.926.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemenrintah Daerah (%)	100	1.933.087.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengalokasian TKDD dan DD yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	100	112.897.797.112	100	19.607.113.520	100	23.008.359.147	100	36.281.471.375	100	33.970.179.623	100	112.867.123.665	100,00%	99,97%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengalokasian dan Pemenuhan Kebutuhan Dana Tanggap Darurat dan Mendesak (Persentase)	100	2.113.580.939	-	-	-	-	-	-	40	629.389.500	10	629.389.500	10,00%	29,78%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	100	2.574.554.592	-	-	-	-	-	-	100	2.574.554.592	100	2.574.554.592	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95,65%	95,87%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.120.135.000		-		63.633.200		234.527.400		487.635.452		785.796.052		70,15%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik (%)	100	1.120.135.000	100	-	100	63.633.200	100	234.527.400	100	487.635.452	100	785.796.052	100,00%	70,15%
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Diterbitkan (Dokumen)	2	256.650.000	1	-	-	1.400.000	1	-	-	195.720.000	2	197.120.000	100,00%	76,80%
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda (Aset PEMPDA)	50	365.570.000	-	-	25	37.428.600	15	26.502.400	-	114.924.700	40	178.855.700	80,00%	48,93%
	Jumlah Titik Penjagaan (Titik Penjagaan)	2		2		2		2		2					
	Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah (Persentase)	100		-		-		-		80		80			
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya (Dokumen)	2	104.800.000	-	-	-	1.265.300	1	-	1	61.128.800	2	62.394.100	100,00%	59,54%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtangan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	70.115.000	-	-	1	-	-	-	-	44.277.500	1	44.277.500	100,00%	63,15%
	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4		-		2		2		-		4		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi (Dokumen)	4		-		-		-		4		4		100,00%	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terakses dengan Baik (Dokumen)	5	323.000.000	2	-	1	23.539.300	1	208.025.000	1	71.584.452	5	303.148.752	100,00%	93,85%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95,65%	70,15%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.597.854.497		-		513.004.619		84.407.250		893.700.189		1.491.112.058		93,32%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah (%)	100	1.597.854.497	14	-	38	513.004.619	20	84.407.250	28	893.700.189	100	1.491.112.058	100,00%	93,32%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (Kecamatan)	8	395.849.497	-	-	-	106.000.819	-	-	8	218.933.139	8	324.933.958	100,00%	82,09%
	Potensi Pajak Daerah (Rupiah)	20		-		-		20		20		100,00%			
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Terproses untuk Diterbitkan (Dokumen)	1	69.000.000	-	-	-	23.824.400	-	13.350.000	1	29.319.000	1	66.493.400	100,00%	96,37%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolan Pajak Daerah yang Digunakan dengan Baik (Jenis)	2	279.500.000	-	-	-	-	-	-	2	277.832.000	2	277.832.000	100,00%	99,40%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Dokumen)	2	369.975.000	1	-	1	321.262.200	-	5.475.000	-	41.750.000	2	368.487.200	100,00%	99,60%
	Jumlah Jenis Obyek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan (Jenis)	7		-		-		-		7		7		100,00%	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar (Lembar SPPT)	20300	436.580.000	-	-	-	61.167.200	-	65.582.250	20.300	302.766.050	20.300	429.515.500	100,00%	98,38%
	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu (Wajib PBB)	150000		-		-		-		150.000		150.000		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	46.200.000	-	-	-	-	1	-	-	23.100.000	1	23.100.000	100,00%	50,00%		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah (%)	100	750.000	22	-	100	750.000	-	-	-	-	122	750.000	122,13%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,01%	93,32%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		145.519.073.418		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												96,31%	95,16%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.670.949.348		978.900.651		1.719.870.455		1.265.504.652		1.488.790.248		5.453.066.006		96,16%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	100	50.365.000	25	-	50	15.906.350	75	10.095.000	99	24.325.650	99	50.327.000	99,00%	99,92%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	16.450.000	1	-	2	6.025.000	3	3.720.000	3	6.693.250	3	16.438.250	100,00%	99,93%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun (Dokumen)	1	12.020.000	1	-	1	4.712.500	1	2.615.000	1	4.692.400	1	12.019.900	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	4.220.000	-	-	-	-	1	665.000	1	3.555.000	1	4.220.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	7	17.675.000	4	-	5	5.168.850	6	3.095.000	5	9.385.000	5	17.648.850	71,43%	99,85%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	3.994.669.758	20	819.585.904	40	1.321.255.765	90	863.502.528	100	892.582.098	100	3.896.926.295	100,00%	97,55%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya (ASN)	45	3.971.945.058	45	819.585.904	45	1.316.505.765	45	860.652.528	45	877.477.098	45	3.874.221.295	100,00%	97,54%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah SPM yang diverifikasi (Dokumen)	98	5.350.000	70	-	60	1.500.000	80	900.000	100	2.950.000	100	5.350.000	102,04%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
SKPD															
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	2	17.374.700	1	-	1	3.250.000	2	1.950.000	2	12.155.000	2	17.355.000	100,00%	99,89%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada PD (%)	100	9.850.000	100	-	100	3.750.000	100	3.100.000	100	3.000.000	100	9.850.000	100,00%	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah (Dokumen)	6	9.850.000	6	-	6	3.750.000	6	3.100.000	6	3.000.000	6	9.850.000	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	10.354.900	100	-	100	3.000.000	100	3.955.000	100	3.399.900	100	10.354.900	100,00%	100,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaiaan (Dokumen)	5	9.355.000	5	-	5	3.000.000	5	3.955.000	5	2.400.000	5	9.355.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola (sistem)	3	999.900	-	-	-	-	-	-	3	999.900	3	999.900	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100	769.913.767	100	99.634.430	100	169.943.914	100	123.075.650	100	309.918.204	100	702.572.198	100,00%	91,25%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	9	5.062.137	9	-	9	5.062.137	9	-	9	-	9	5.062.137	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	14	20.050.080	14	13.312.080	14	6.738.000	14	-	14	-	14	20.050.080	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	62.550.000	1	-	1	8.000.000	2	35.610.000	2	18.870.000	2	62.480.000	66,67%	99,89%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			51.146.000		15.800.000		-		-		35.346.000		51.146.000		100,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/ Material yang Disediakan (Jenis)	39	187.005.950	39	70.522.350	39	26.451.850	39	25.741.650	39	62.417.600	39	185.133.450	100,00%	99,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	887	14.100.000	60	-	120	1.200.000	600	5.400.000	800	7.500.000	800	14.100.000	90,19%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	400	429.999.600	100	-	130	122.491.927	200	56.324.000	400	185.784.604	400	364.600.531	100,00%	84,79%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100	188.929.750	25	42.500.000	50	54.186.000	75	-	100	91.443.000	250	188.129.000	250,00%	99,58%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Adakan (Unit)	22	188.929.750	16	42.500.000	16	54.186.000	16	-	16	91.443.000	16	188.129.000	72,73%	99,58%
Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase keterpenuhan jasa	100												100,00%	79,33%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Usuran Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		194.506.488	100	17.180.317	100	51.631.486	100	34.773.874	100	50.708.896	100	154.294.573		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			155.506.488		17.180.317		35.381.486		25.023.874		37.708.896		115.294.573		74,14%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	1	39.000.000	1	-	1	16.250.000	1	9.750.000	1	13.000.000	1	39.000.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100	452.359.685	25	-	50	100.196.940	75	227.002.600	100	113.412.500	100	440.612.040	100,00%	97,40%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			57.359.685		-		16.051.140		12.068.000		18.812.500		46.931.640		81,82%
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi yang dipelihara (Aplikasi) (Aplikasi)	3	95.000.000	3	-	3	-	3	-	3	94.600.000	3	94.600.000	100,00%	99,58%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas gedung halaman kantor/halaman yang direhab (Meter)	400	300.000.000	400	-	400	84.145.800	400	214.934.600	400	-	400	299.080.400	100,00%	99,69%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										93,96%	96,16%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
KEPEGAWAIAN															
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.400.108.700		8.697.500		168.126.000		79.365.800		1.008.103.450		1.264.292.750		90,30%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasi Kepegawainnya (%)	4993	745.255.850	1.000	-	2.000	22.716.000	4.500	58.629.050	5.000	561.319.850	5.000	642.664.900	100,14%	86,23%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi Pegawai yang sesuai Kebutuhan (ASN)	230	451.500.000	230	-	230	-	230	34.318.050	230	317.513.550	230	351.831.600	100,00%	77,93%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang memasuki Usia Pensiun berdasrkan PNS yang memnuhi syarat (ASN)	221	22.659.900	20	-	50	8.600.000	75	5.710.000	100	8.345.350	100	22.655.350	45,25%	99,98%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Usulan Cuti PNS, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, BPJS, Tenaga Kontrak dan LHP Kasus Perceraian (Berkas)	1550	43.816.000	900	-	950	5.616.000	1.000	8.776.000	1.550	29.256.000	1.550	43.648.000	100,00%	99,62%
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang digunakan (Sistem)	3	227.279.950	3	-	3	8.500.000	3	9.825.000	3	206.204.950	3	224.529.950	100,00%	98,79%
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan	4993												100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
				4		5		6		7							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	sesuai kapasitasnya (ASN)		64.958.750	1.000	8.697.500	2.000	19.450.000	3.500	13.273.750	4.993	23.537.500	4.993	64.958.750				
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Jabatan Fungsional (Berkas)	300	19.833.750	100	5.066.250	150	4.700.000	250	5.280.000	300	4.787.500	300	19.833.750	100,00%	100,00%		
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat (Berkas)	826	45.125.000	500	3.631.250	600	14.750.000	700	7.993.750	826	18.750.000	826	45.125.000	100,00%	100,00%		
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kompetensinya (ASN)	100	515.279.100	25	-	50	120.000.000	75	-	100	363.591.100	100	483.591.100	100,00%	93,85%		
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang lulus seleksi (ASN)	4	245.440.050	-	-	-	-	4	-	4	245.252.050	4	245.252.050	100,00%	99,92%		
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Tugas belajar dan izin belajar (ASN)	3	170.650.300	3	-	3	120.000.000	3	-	3	45.650.300	3	165.650.300	100,00%	97,07%		
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Bahan Publikasi/Sosialisasi Kepegawaian (Bahan Publikasi)	5	20.940.000	-	-	-	-	5	-	5	20.940.000	5	20.940.000	100,00%	100,00%		
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Penempatan ASN (ASN)	243	78.248.750	-	-	-	-	-	-	243	51.748.750	243	51.748.750	100,00%	66,13%		
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN (%)	100	74.615.000	25	-	50	5.960.000	75	7.463.000	100	59.655.000	100	73.078.000	100,00%	97,94%		
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Kebijakan (Dokumen)	1	2.325.000	-	-	-	-	-	-	1	2.325.000	1	2.325.000	100,00%	100,00%		
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan (ASN)	776	66.725.000	50	-	50	2.985.000	200	7.463.000	900	54.740.000	900	65.188.000	115,98%	97,70%		
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dijatuhi hukuman Disiplin (ASN)	25	5.565.000	-	-	23	2.975.000	10	-	25	2.590.000	25	5.565.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												99,88%	90,30%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			3.014.897.650		-		1.988.334.836		958.142.270		15.576.600		2.962.053.706		98,25%		
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (ASN)	400	5.565.000	400	-	400	-	400	-	400	1.325.000	400	1.325.000	100,00%	23,81%		
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Jumlah Dokumen Diklat Teknis (Dokumen)	1	5.565.000	-	-	-	-	-	-	1	1.325.000	1	1.325.000	100,00%	23,81%		





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)					
			I		II		III		IV								
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembanagn Kompetensi Manejerial dan Fungsional (ASN)	254	3.009.332.650	254	-	254	1.988.334.836	254	958.142.270	254	14.251.600	254	2.960.728.706	100,00%	98,38%		
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti pelaksanaan sertifikasi (ASN)	21	61.656.950	-	-	-	-	21	59.974.150	-	-	21	59.974.150	100,00%	97,27%		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pengiriman Peserta Diklat yang tidak tercover di BKD Soppeng dan Jumlah Peserta Diklat di BKD (ASN)	230	2.942.692.700	-	-	-	1.988.334.836	230	898.168.120	-	12.226.600	230	2.898.729.556	100,00%	98,51%		
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Diklat Manajerial dan fungsional (Dokumen)	1	4.983.000	-	-	-	-	-	-	-	2.025.000	-	2.025.000	0,00%	40,64%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												99,83%	98,25%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		10.085.955.698		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												96,54%	95,97%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

INSPEKTORAT DAERAH

Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.572.856.226		1.276.127.290		2.130.207.264		1.425.897.241		1.645.627.864		6.477.859.659		75,56%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	12	4.283.050	3	-	7	-	11	-	12	4.283.050	12	4.283.050	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
	Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang di susun (dokumen)	2	1.400.000	-	-	1	-	2	-	2	1.400.000	2	1.400.000	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	2		-		-		-		2		2		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun (Dokumen)	2	1.525.000	-	-	1	-	2	-	2	1.525.000	2	1.525.000	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)	2		-		-		-		2		2		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	9	1.358.050	3	-	5	-	7	-	9	1.358.050	9	1.358.050	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9		-		-		-		9		9		100,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	6	7.702.652.166	1	1.227.193.597	3	2.009.218.892	5	1.297.350.126	6	1.331.412.843	6	5.865.175.458	100,00%	76,14%
	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	59	7.692.500.166	59	1.226.593.597	59	2.009.218.892	59	1.297.350.126	59	1.321.860.843	59	5.855.023.458	100,00%	76,11%
	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	59		-		-		-		59		59		100,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yg diverifikasi (Dokumen)	100	5.600.000	69	600.000	88	-	97	-	100	5.000.000	100	5.600.000	100,00%	100,00%
	Jumlah SPM yang terverikasi (SPM)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	6	4.552.000	1	-	3	-	5	-	6	4.552.000	6	4.552.000	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	6		-		-		-		6		6		100,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (ASN)	54	336.482.000	54	10.000.000	54	65.610.000	54	55.790.000	54	44.661.000	54	176.061.000	100,00%	52,32%
	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaiaan (Dokumen)	20	31.050.000	5	5.000.000	10	7.500.000	15	7.000.000	20	10.786.000	20	30.286.000	100,00%	97,54%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (ASN)	16	253.746.000	6	5.000.000	8	58.110.000	11	48.790.000	12	5.090.000	12	116.990.000	75,00%	46,11%
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan sesuai tugas dan fungsi (Orang)	16		-		-		-		12		12		75,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (Orang)	59	51.686.000	-	-	-	-	-	-	59	28.785.000	59	28.785.000	100,00%	55,69%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	6	280.695.410	6	28.969.700	6	31.882.920	6	35.333.850	6	132.312.100	6	228.498.570	100,00%	81,40%
	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	7	1.824.240	-	-	4	454.120	4	-	4	-	4	454.120	57,14%	24,89%
	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (Jenis)	7		-		-		-		4		4		57,14%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	81.750.000	1	6.080.000	1	15.755.000	2	9.380.000	3	21.260.000	3	52.475.000	100,00%	64,19%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	12789	10.843.650	5.000	3.917.500	7.500	-	10.500	1.350.000	12.789	2.556.700	12.789	7.824.200	100,00%	72,15%
	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	7		-		-		-		7		7		100,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	3	64.064.520	1	15.047.000	1	676.200	2	14.484.250	3	30.353.400	3	60.560.850	100,00%	94,53%
	Jumlah paket bahan/material yang	5												100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	disediakan (Paket)			-		-		-		5		5			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	100	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah tamu yg terfasilitasi (Orang)	80		-		-		-		-		0,00%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	60	119.413.000	5	3.925.200	23	14.997.600	49	10.119.600	60	78.142.000	60	107.184.400	100,00%	89,76%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	11	74.250.000	-	-	-	-	-	-	11	72.600.000	11	72.600.000	100,00%	97,78%
	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Jenis)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Jenis)	4	74.250.000	-	-	-	-	-	-	4	72.600.000	4	72.600.000	100,00%	97,78%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	2	80.761.050	2	6.308.993	2	17.594.462	2	16.886.065	2	25.568.229	2	66.357.749	100,00%	82,17%
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	47.161.050	3	4.308.993	6	8.094.462	9	9.986.065	12	14.368.229	12	36.757.749	100,00%	77,94%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	2	33.600.000	1	2.000.000	1	9.500.000	1	6.900.000	2	11.200.000	2	29.600.000	100,00%	88,10%
	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum (Jenis)	3		-		-		-		3		3		100,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	101	93.732.550	4	3.655.000	16	5.900.990	54	20.537.200	72	34.790.642	72	64.883.832	71,29%	69,22%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yng dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	27	59.958.000	4	3.655.000	15	5.900.990	23	9.287.200	26	30.120.642	26	48.963.832	96,30%	81,66%
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik (Unit)	27		-		-		-		26		26		96,30%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin	74												62,16%	66,81%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Lainnya	lainnya yang dipelihara (Unit)		23.830.000	-	-	1	-	31	11.250.000	46	4.670.000	46	15.920.000		
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik (Unit)	74		-		-		-		46		46		62,16%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (M2)	117	9.944.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,97%	75,56%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
INSPEKTORAT DAERAH															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.546.600.000		111.780.000		337.010.000		303.270.000		629.495.000		1.381.555.000		89,33%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa (LHP)	101	1.249.565.000	21	108.780.000	56	271.260.000	82	238.010.000	101	488.760.000	101	1.106.810.000	100,00%	88,58%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengawasan kinerja yang terbit (LHP)	1	20.650.000	-	2.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	1	12.500.000	1	20.500.000	100,00%	99,27%
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (LHP)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengawasan keuangan yang terbit (LHP)	32	341.935.000	8	93.640.000	20	71.890.000	26	86.150.000	32	85.935.000	32	337.615.000	100,00%	98,74%
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP)	35		-		-		-		35		35		100,00%	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah SKPD yang direviu laporan kinerja dan dokumen perencanaannya (SKPD)	34	402.965.000	34	-	34	76.950.000	34	54.130.000	34	176.295.000	34	307.375.000	100,00%	76,28%
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LHP)	40		-		-		-		40		40		100,00%	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan yang terbit (LHP)	4	51.580.000	4	3.000.000	4	37.930.000	4	4.500.000	4	6.000.000	4	51.430.000	100,00%	99,71%
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (LHP)	4		-		-		-		4		4		100,00%	
Pengawasan Desa	Jumlah desa yang dievaluasi	49												100,00%	96,24%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(Desa)		183.460.000	49	-	49	24.780.000	49	49.030.000	49	102.750.000	49	176.560.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (LHP)	21		-		-		-		21		21		100,00%	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya monitoring & evaluasi temuan hasil pengawasan APIP & pemeriksaan BPK (Kali)	4	248.975.000	1	10.140.000	1	56.710.000	1	41.200.000	1	105.280.000	4	213.330.000	100,00%	85,68%
	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan: a. Inskab, b. Inssprov, c. BPK-RI (Kali)	4		-		-		-		4		4		100,00%	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan tujuan tertentu terkait penanganan kasus kepegawaian, pengaduan masyarakat, laporan gratifikasi/benturan kepentingan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa (LHP)	20	297.035.000	5	3.000.000	14	65.750.000	16	65.260.000	20	140.735.000	20	274.745.000	100,00%	92,50%
	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus- kasus/Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Tertentu (LHP)	20		-		-		-		20		20		100,00%	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu yang terbit (LHP)	20	297.035.000	5	3.000.000	14	65.750.000	16	65.260.000	20	140.735.000	20	274.745.000	100,00%	92,50%
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu yang Ditangani (LHP)	20		-		-		-		20		20		100,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	89,33%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			278.067.800		2.000.000		11.140.000		17.920.000		154.948.600		186.008.600		66,89%
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah SKPD dan pemerintahan desa yang didampingi (SKPD)	34	278.067.800	34	2.000.000	34	11.140.000	34	17.920.000	34	154.948.600	34	186.008.600	100,00%	66,89%
	Jumlah Pendampingan dan	4												100,00%	





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Asistensi terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa (Kali)			-		-		-		4		4					
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang didampingi dan diasistensi (SKPD)	34	31.682.800	34	2.000.000	34	11.140.000	34	11.160.000	34	5.222.400	34	29.522.400	100,00%	93,18%		
	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Kali)	4		-		-		-		4		4		4			
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Kali)	4	246.385.000	-	-	-	-	2	6.760.000	4	149.726.200	4	156.486.200	100,00%	63,51%		
	Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Sosialisasi/Operasi Saber Pungli yang Dilaksanakan (Kali)	4		-		-		-		4		4					
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	66,89%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang
		10.397.524.026		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,15%	77,38%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi

SEKRETARIAT DAERAH

Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28.896.206.790		2.644.506.577		6.873.109.278		5.133.583.420		9.984.539.274		24.635.738.549		85,26%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	16		6		5		4		1		16		100,00%	
	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	53.922.500	-	-	-	8.910.000	-	6.130.000	100	38.007.500	100	53.047.500	100,00%	98,38%
	Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	100		-	-	-	-	-		100		100		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	12.500.000	-	-	1	1.750.000	2	1.830.000	-	8.920.000	3	12.500.000	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	3		-		-		-		3		3		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun (Dokumen)	1	13.220.000	-	-	1	-	-	-	-	12.345.000	1	12.345.000	100,00%	93,38%
	Jumlah dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	2	10.892.500	-	-	1	-	1	-	-	10.892.500	2	10.892.500	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	2		-		-		-		2		2		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	10	17.310.000	6	-	2	7.160.000	1	4.300.000	1	5.850.000	10	17.310.000	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (Dokumen)	10		-		-		-		10		10		100,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	8	11.680.480.520	8	2.364.030.624	8	3.760.289.257	8	2.405.369.332	8	2.599.956.098	8	11.129.645.311	100,00%	95,28%
	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	114	11.551.906.520	114	2.364.030.624	114	3.719.834.007	114	2.376.475.082	114	2.542.381.598	114	11.002.721.311	100,00%	95,25%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverikasi (SPM)	956	99.605.000	37	-	318	28.618.250	216	24.094.250	385	45.242.500	956	97.955.000	100,00%	98,34%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	6	28.969.000	2	-	1	11.837.000	1	4.800.000	2	12.332.000	6	28.969.000	100,00%	100,00%
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	6		-		-		-		6		6		100,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	157	251.702.000	157	-	157	16.501.153	157	8.850.000	157	169.543.929	157	194.895.082	100,00%	77,43%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(Orang)														
	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)	1	41.850.000	-	-	-	14.750.000	-	8.850.000	1	17.050.000	1	40.650.000	100,00%	97,13%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (Orang)	22	209.852.000	-	-	3	1.751.153	5	-	14	152.493.929	22	154.245.082	100,00%	73,50%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	6	2.870.396.525	6	-	6	633.618.489	6	690.096.533	6	1.307.451.273	6	2.631.166.295	100,00%	91,67%
	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat/Penerangan Bangunan (Jenis)	9	66.264.305	-	-	3	10.641.599	3	12.286.363	3	43.336.343	9	66.264.305	100,00%	100,00%
	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan (Jenis)	13		-		-		-		13		13		100,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jenis)	1	1.209.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (Jenis)	1		-		-		-		-		-		0,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	11	220.245.000	11	-	11	28.765.000	11	51.075.000	11	124.155.000	11	203.995.000	100,00%	92,62%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	247705	83.540.000	18.630	-	66.451	19.012.250	106.452	13.667.500	56.172	44.660.250	247.705	77.340.000	100,00%	92,58%
	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	10		-		-		-		10		10		100,00%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/ Material yang Disediakan (Jenis)	441	351.992.770	129	-	90	75.636.440	82	81.723.900	140	194.604.430	441	351.964.770	100,00%	99,99%
	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	61		-		-		-		61		61		100,00%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	9000	931.275.000	-	-	3.000	313.284.000	3.000	380.395.500	3.000	236.075.000	9.000	929.754.500	100,00%	99,84%
	Jumlah tamu yg terfasilitasi (Orang)	25300		-		-		-		25.300		25.300		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	671	1.095.870.450	51	-	156	186.279.200	131	150.948.270	300	544.720.250	638	881.947.720	95,08%	80,48%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi/website yang dikelola (Aplikasi/Website)	1	120.000.000	-	-	-	-	-	-	1	119.900.000	1	119.900.000	100,00%	99,92%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	10	3.118.798.000	3	-	2	14.950.000	2	34.000.000	3	840.758.500	10	889.708.500	100,00%	28,53%
	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (Unit)	1	2.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Jenis)	9	395.838.000	-	-	-	-	-	-	9	395.409.000	9	395.409.000	100,00%	99,89%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	10	372.960.000	-	-	3	14.950.000	3	34.000.000	4	295.649.500	10	344.599.500	100,00%	92,40%
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Jenis)	15		-		-		-		15		15		100,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Jenis)	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	1	149.700.000	1	149.700.000	100,00%	99,80%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (Paket)	2	1.952.682.800	-	79.350.383	1	645.265.619	-	408.622.485	1	603.865.085	2	1.737.103.572	100,00%	88,96%
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	12	1.154.082.800	3	79.350.383	3	318.515.619	3	236.972.485	3	316.665.085	12	951.503.572	100,00%	82,45%
	Jumlah pemenuhan jasa telepon (Kali)	12		-		-		-		12		12		100,00%	
	Jumlah pemenuhan jasa air (Kali)	12		-		-		-		12		12		100,00%	
	Jumlah pemenuhan listrik (Kali)	12		-		-		-		12		12		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	2	798.600.000	-	-	1	326.750.000	-	171.650.000	1	287.200.000	2	785.600.000	100,00%	98,37%
	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum (Jenis)	3		-		-		3		3		100,00%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	170	2.499.462.725	35	145.341.950	35	515.095.030	35	392.794.790	65	1.332.221.461	170	2.385.453.231	100,00%	95,44%
	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100		-		-		100		100		100,00%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yng dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	106	1.455.973.725	17	145.341.950	30	450.900.030	25	338.120.790	34	448.710.961	106	1.383.073.731	100,00%	94,99%
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik (Unit)	106		-		-		106		106		100,00%			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	20	16.000.000	-	-	-	-	20	960.000	-	6.960.000	20	7.920.000	100,00%	49,50%
	Jumlah mebel yang berfungsi dengan baik (Unit)	200		-		-		-		200		200		100,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	44	62.912.500	-	-	15	7.240.000	15	4.750.000	14	30.630.000	44	42.620.000	100,00%	67,74%
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik (Unit)	56		-		-		-		56		56		100,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (Gedung Kantor) (M2)	1500	914.585.000	-	-	500	56.955.000	500	48.964.000	500	798.389.000	1.500	904.308.000	100,00%	98,88%
	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (Mess Pemda) (M2)	640		-		213		215		212		640		100,00%	
	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (Rujab Bupati) (M2)	7796		-		2.598		2.600		2.598		7.796		100,00%	
	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (Rujab Wakil Bupati) (M2)	1305		-		435		435		435		1.305		100,00%	
	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (Rumdis Sekda) (M2)	928		-		309		309		310		928		100,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang berfungsi	1	49.991.500	-	-	-	-	-	-	1	47.531.500	1	47.531.500	100,00%	95,08%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dengan baik (Unit)														
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Tepat Waktu (Kegiatan)	3	1.683.898.420	-	55.783.620	1	138.785.480	1	306.275.580	1	588.909.778	3	1.089.754.458	100,00%	64,72%
	Persentase keterpenuhan pengadministrasin Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana tepat waktu (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kali)	12	564.474.420	3	25.783.620	3	60.622.780	3	36.965.580	3	214.844.478	12	338.216.458	100,00%	59,92%
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kali)	12		-		-		-		12		12		100,00%	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Set Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan (set)	32	102.500.000	8	30.000.000	8	12.500.000	8	25.000.000	8	35.000.000	32	102.500.000	100,00%	100,00%
	Jumlah pemenuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Set)	34		-		-		-		34		34		100,00%	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (kali)	5	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah pemenuhan pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kali)	5		-		-		-		-		-		0,00%	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan Dana Penunjang Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kali)	12	966.924.000	-	-	4	65.662.700	4	244.310.000	4	339.065.300	12	649.038.000	100,00%	67,12%
	Jumlah pemenuhan penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	12		-		-		-		12		12		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah (Kali)															
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (%)	100	1.742.222.000	25	-	25	374.724.250	25	338.243.700	25	923.506.050	100	1.636.474.000	100,00%	93,93%	
	Persentase keterpenuhan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	3	1.066.905.000	-	-	1	287.345.500	1	216.564.000	1	536.466.300	3	1.040.375.800	100,00%	97,51%	
	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang tersedia (Paket)	4		-		-		-		4		4		100,00%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	550.880.500	-	-	1	87.378.750	1	121.679.700	1	262.603.250	3	471.661.700	100,00%	85,62%	
	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang tersedia (Paket)	5		-		-		-		3		3		60,00%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	1	124.436.500	-	-	-	-	-	-	1	124.436.500	1	124.436.500	100,00%	100,00%	
	Jumlah ketersediaan paket kebutuhan rumah tangga sekretariat kepala daerah yang tersedia (Paket)	7		-		-		-		7		7		100,00%		
Penataan Organisasi	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi yang Disusun (Kebijakan)	10	896.281.300	2	-	-	52.980.000	-	48.676.000	4	763.738.100	6	865.394.100	60,00%	96,55%	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen hasil evaluasi kelembagaan dan fungsi (Dokumen)	1	82.050.000	-	-	-	20.605.000	-	25.868.500	1	28.176.500	1	74.650.000	100,00%	90,98%	
	Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi jabatan serta standar kompetensi jabatan (Dokumen)	3		-		-		-		2		1		3		100,00%
	Evaluasi tugas pokok dan fungsi SKPD (Dokumen)	1		-		-		-		-		1		1		100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan (Dokumen)	2		-		-		-		2		2		100,00%	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Standar Operasional Prosedur (Dokumen)	1	65.594.400	-	-	-	10.125.000	-	8.112.500	1	39.766.600	1	58.004.100	100,00%	88,43%
	Dokumen Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	1		-		-		1		1		100,00%			
	Pedoman Tata Naskah, Pakaian Dinas, Mekanisme dan Produksi Kerja (Dokumen)	1		-		-		1		1		100,00%			
	UKPP yang bersyarat dinilai (Dokumen)	1		-		-		1		1		100,00%			
	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	2		-		-		2		2		100,00%			
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan PMPRB (Dokumen)		2		328.077.000		-		-		-		4.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana (Dokumen)	2	393.509.900	-	-	-	-	-	-	2	392.310.200	2	392.310.200	100,00%	99,70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	27.050.000	1	-	-	18.250.000	-	2.800.000	-	-	1	21.050.000	50,00%	77,82%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan ()	100	2.146.360.000	25	-	25	711.990.000	25	494.525.000	25	816.581.500	100	2.023.096.500	100,00%	94,26%
	Persentase Acara Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara Keprotokolan yang dilayani (Tahun)	1	102.000.000	1	-	1	42.500.000	1	25.500.000	1	34.000.000	1	102.000.000	100,00%	100,00%
	Jumlah Peserta Orientasi (Orang)	0		-		-		-		-		0,00%			
	Jumlah Acara Keprotokolan yang Terfasilitasi (Kali)	12		-		-		-		12		12		100,00%	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilayani (Kali)	30	2.044.360.000	-	-	10	669.490.000	10	469.025.000	10	782.581.500	30	1.921.096.500	100,00%	93,97%
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang	110		-		35		35		40		110		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dilaksanakan (Kali)														
	Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri yang dilayani (Kali)	20		-		10		10		-		20		100,00%	
	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terlayani (Tahun)	1		1		1		1		1		100,00%			
	Jumlah Komunikasi Pimpinan yang Terfasilitasi (Kali)	12		-		-		-		12		100,00%			
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91,48%	85,26%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
SEKRETARIAT DAERAH															
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.657.902.500		-		450.170.000		235.927.500		626.015.000		1.312.112.500		79,14%
Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang disusun (Kebijakan)	30	84.945.000	10	-	6	46.640.000	4	14.250.000	10	19.050.000	30	79.940.000	100,00%	94,11%
	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang Disusun (Kebijakan)	30		-		-		-		30		30		100,00%	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah PATEN yang Terlaksana di Kecamatan (Kali)	0	16.020.000	-	-	-	2.400.000	-	2.400.000	-	10.800.000	-	15.600.000	0,00%	97,38%
	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kali)	8		-		-		-		8		8		100,00%	
	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Administrasi Pemerintahan yang Terlaksana (Kali)	8		-		-		-		8		8		100,00%	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pembakuan Unsur Rupa Bumi di Setiap Kecamatan (Dokumen)	1	11.020.000	-	-	-	2.400.000	-	2.400.000	1	2.400.000	1	7.200.000	100,00%	65,34%
	Dokumen Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Soppeng (Dokumen)	1		-		-		-		1		1		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yang Dihasilkan (Dokumen)	2		-		-		-		2		2		100,00%	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Soppeng (Dokumen)	1	57.905.000	-	-	1	41.840.000	-	9.450.000	-	5.850.000	1	57.140.000	100,00%	98,68%
	Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Soppeng (Dokumen)	1		-		1		-		1		100,00%			
	Data Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kerjasama Daerah di Kabupaten Soppeng (Dokumen)	1		-		-		-		1		100,00%			
	Dokumen Koordinasi Penerapan SPM (Dokumen)	1		-		1		-		1		100,00%			
	Dokumen Pelaksanaan Administrasi KDH/WKDH dan DPRD (Dokumen)	1		-		-		-		-		0,00%			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Disusun (Dokumen)	4		-		-		-		4		100,00%			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun (Kebijakan)		2		1.207.463.000		1		-		-		357.736.500	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Festival LASQI (Kali)	0	1.149.988.000	-	-	-	355.536.500	-	172.315.000	-	414.503.500	-	942.355.000	0,00%	81,94%
	Jumlah Jamaah Haji yang diberangkatkan/dipulangkan (Orang)	0		-		-		-		-		0,00%			
	Jumlah Kajian Agama untuk Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan (Kali)	14		-		-		12		2		14		100,00%	
	Jumlah Pelaksanaan MTQ & STQ (Kali)	2		1		1		-		-		2		100,00%	
	Jumlah Perayaan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan (Kali)	7		-		3		2		2		7		100,00%	
	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan dalam 1 Tahun (Kali)	23		-		-		-		23		23		100,00%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lomba Sekolah Sehat (Kali)	3	57.475.000	-	-	-	2.200.000	-	1.100.000	-	3.300.000	-	6.600.000	0,00%	11,48%	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kesejahteraan Sosial (Kali)	3		-		-		-		-		0,00%				
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang disusun (Kebijakan)	30	365.494.500	1	-	4	45.793.500	20	48.262.500	5	189.161.500	30	283.217.500	100,00%	77,49%	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terasiliasi Sesuai Standar (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan PERDA (Perda)	8	132.709.100	-	-	8	10.217.500	-	22.162.500	-	90.841.500	8	123.221.500	100,00%	92,85%	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Data Pelaksanaan HAM di Kabupaten Soppeng (Dokumen)	1	120.075.000	-	-	-	17.100.000	-	17.100.000	1	53.320.000	1	87.520.000	100,00%	72,89%	
	Jumlah Kasus di Lingkup Pemerintahan Daerah yang ditangani (Kasus/LO)	2		-		-		2		-		2		100,00%		
	Warga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Hukum (Orang)	5		-		-		-		-		-		0,00%		
	Jumlah Kasus/LO di Lingkup Pemerintah Daerah yang Ditangani (Kasus/LO)	2		-		-		-		2		2		100,00%		
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Data LHKPN di Kabupaten Soppeng (Orang)	34	112.710.400	34	-	-	18.476.000	-	9.000.000	-	45.000.000	34	72.476.000	100,00%	64,30%	
	Jumlah Kelompok Kadarkum (Kelompok)	4		-		-		4		-		4		100,00%		
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terpublikasi (Produk)	80		4		20		40		16		80		100,00%		
	Jumlah yang Tersosialisasi Publikasi Perundang-Undangan Tentang Rokok/Pajak Tembakau (Orang)	240		-		-		-		-		-		0,00%		
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasikan dan Dipublikasikan (Perda/Perbup)	80		-		-		-		80		80		100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											69,34%	79,14%
				Predikat Kinerja											Sedang	Tinggi
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			863.074.745		-		51.397.200		37.342.600		707.937.750		796.677.550		92,31%	





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang disusun (kebijakan)	5	66.335.800	1	-	2	13.325.200	-	18.520.600	-	16.237.500	3	48.083.300	60,00%	72,48%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Data Koordinasi Stabilitas Perekonomian Daerah (Dokumen)	1	51.652.500	-	-	1	9.600.000	-	16.075.000	-	12.625.000	1	38.300.000	100,00%	74,15%
	Penerbitan dan Pengawasan Harga, Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi (Agen)	5		-		-		2		3		5		100,00%	
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dokumen)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Data Peningkatan, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan DBHCHT dan Tersusunnya Data Tembakau Ilegal (Dokumen)	4	14.683.300	1	-	1	3.725.200	1	2.445.600	1	3.612.500	4	9.783.300	100,00%	66,63%
	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4		-		-		-		4		4		100,00%	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun (Kebijakan)	1	49.248.500	-	-	-	25.672.000	-	5.372.000	1	14.549.500	1	45.593.500	100,00%	92,58%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Data Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Dokumen)	1	49.248.500	-	-	-	25.672.000	-	5.372.000	1	14.549.500	1	45.593.500	100,00%	92,58%
	Dokumen Laporan dan Capaian Realisasi Fisik Proyek/Kegiatan Pembangunan (Dokumen)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten (Dokumen)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
	Jumlah Data Koordinasi Dokumen Pelaporan dan Pembinaan Kegiatan Pembangunan (Dokumen)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (Kegiatan)	3	726.949.145	3	-	3	12.400.000	3	13.450.000	3	666.130.350	3	691.980.350	100,00%	95,19%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender/Pengadaan Langsung/E-Purchasing/Penunjukan Langsung	1000	679.897.400	400	-	700	4.800.000	800	4.800.000	1.000	646.567.400	1.000	656.167.400	100,00%	96,51%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(Paket)														
	Dokumen Data Evaluasi Pelaksanaan Tender (Dokumen)	1		-		-		-		1		1		100,00%	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumah Paket Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Paket)	1000	18.741.745	400	-	700	3.000.000	800	3.000.000	1.000	12.662.950	1.000	18.662.950	100,00%	99,58%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan/Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (Kali)	3	28.310.000	-	-	1	4.600.000	-	5.650.000	-	6.900.000	1	17.150.000	33,33%	60,58%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Rumusan Kebijakan Sumber daya Alam yang disusun (kebijakan)	3	20.541.300	-	-	-	-	-	-	1	11.020.400	1	11.020.400	33,33%	53,65%
	Persentase Kegiatan Strategis Daerah yang memiliki SOP/Juknis (%)	100		-		-		-		100		100		100,00%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Data Pengendalian Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	15.398.800	-	-	-	-	-	-	1	11.020.400	1	11.020.400	100,00%	71,57%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Data Pengendalian Sumber Daya Alam dan Mineral (Dokumen)	1	5.142.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah Data Pengendalian Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		-		-		-		-		-		0,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,22%	92,31%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		31.417.184.035		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										90,47%	85,13%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi

SEKRETARIAT DPRD

Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.355.100.327		3.497.930.625		6.205.164.678		4.917.919.617		7.071.601.203		21.692.616.123		97,04%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	53.595.000	3	4.735.700	5	11.998.700	5	1.500.000	2	34.700.050	15	52.934.450	100,00%	98,77%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(Dokumen)														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	19.135.000	-	-	2	4.499.000	-	-	-	14.600.050	2	19.099.050	100,00%	99,81%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	9.000.000	-	4.735.700	1	4.000.000	-	-	-	-	1	8.735.700	100,00%	97,06%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	13.160.000	-	-	-	-	1	-	-	12.800.000	1	12.800.000	100,00%	97,26%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	11	12.300.000	2	-	4	3.499.700	4	1.500.000	1	7.300.000	11	12.299.700	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	22	3.388.944.575	7	658.764.542	5	1.083.997.525	5	638.015.510	5	821.797.199	22	3.202.574.776	100,00%	94,50%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	36	3.318.094.575	36	655.393.542	36	1.064.761.975	36	632.551.210	36	783.640.099	36	3.136.346.826	100,00%	94,52%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang di verifikasi (SPM)	180	58.300.000	15	3.371.000	28	14.541.800	162	5.464.300	180	32.307.250	180	55.684.350	100,00%	95,51%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	12	12.550.000	2	-	2	4.693.750	4	-	4	5.849.850	12	10.543.600	100,00%	84,01%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah buku inventaris barang milik daerah (Buku)	1	14.000.000	1	-	1	3.000.000	1	4.000.000	1	6.975.000	1	13.975.000	100,00%	99,82%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah (Dokumen)	2	14.000.000	-	-	1	3.000.000	1	4.000.000	-	6.975.000	2	13.975.000	100,00%	99,82%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya (ASN)	36	62.500.000	36	-	36	40.775.000	36	10.500.000	36	-	36	51.275.000	100,00%	82,04%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian dinas yang diadakan (set)	68	51.500.000	-	-	68	39.875.000	-	10.500.000	-	-	68	50.375.000	100,00%	97,82%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaiaan (Dokumen)	5	5.000.000	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	100,00%	0,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola (sistem informasi)	2	3.000.000	2	-	2	900.000	2	-	2	-	2	900.000	100,00%	30,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)	35	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	8	1.051.946.050	8	43.305.800	8	267.328.430	8	214.874.059	8	498.748.100	8	1.024.256.389	100,00%	97,37%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	19	96.447.700	15	-	-	15.397.280	-	15.917.000	4	64.991.500	19	96.305.780	100,00%	99,85%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	15	69.460.700	4	-	8	-	12	11.302.000	15	56.932.700	15	68.234.700	100,00%	98,23%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	1	72.200.000	1	-	1	18.000.000	1	25.875.000	1	28.325.000	1	72.200.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis) (jenis)	6	53.870.000	-	-	2	5.000.000	4	4.155.000	6	44.615.000	6	53.770.000	100,00%	99,81%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	45	166.596.250	5	-	-	43.354.350	-	37.379.050	40	85.415.700	45	166.149.100	100,00%	99,73%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	7500	297.000.000	1.102	13.620.000	1.422	82.700.000	2.012	66.000.000	3.013	118.515.000	7.549	280.835.000	100,65%	94,56%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (kali)	254	204.601.000	12	29.685.800	72	16.541.800	88	54.246.009	77	95.228.200	249	195.701.809	98,03%	95,65%
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	254		-		-		-		249		249		98,03%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi/website yang dikelola (Aplikasi)	3	91.770.400	3	-	-	86.335.000	-	-	-	4.725.000	3	91.060.000	100,00%	99,23%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	10	1.760.052.000	3	-	3	281.513.000	3	140.462.450	-	1.329.491.150	9	1.751.466.600	90,00%	99,51%
Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan (Jenis)	4	542.370.000	-	-	1	274.583.000	2	-	1	265.570.000	4	540.153.000	100,00%	99,59%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (Unit)	6	310.682.000	-	-	-	-	6	-	6	307.352.100	6	307.352.100	100,00%	98,93%
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	12		-		-		-		12		12		100,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	12	907.000.000	-	-	1	6.930.000	1	140.462.450	10	756.569.050	12	903.961.500	100,00%	99,66%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	9	2.129.686.440	9	182.777.800	9	519.126.900	9	479.675.500	-	919.094.306	7	2.100.674.506	75,00%	98,64%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	36	447.036.440	9	64.427.800	9	99.284.400	9	14.210.500	8	249.548.906	35	427.471.606	97,22%	95,62%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	11	1.682.650.000	11	118.350.000	11	419.842.500	11	465.465.000	11	669.545.400	11	1.673.202.900	100,00%	99,44%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	72	407.978.500	22	16.516.522	23	163.278.015	20	133.025.650	10	86.719.750	75	399.539.937	104,17%	97,93%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	41	245.178.500	14	16.516.522	12	87.649.515	10	75.304.050	5	67.919.750	41	247.389.837	100,00%	100,90%	
	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (Unit)	41		14		12		10		5		41		100,00%		
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik (Unit)	36		-		-		-		41		41		113,89%		
	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara (Unit)	3		-		-		3		3		3		100,00%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	0	42.100.000	-	-	14	11.074.000	28	12.130.000	28	18.800.000	28	42.004.000	0,00%	99,77%	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik (Unit)	0		-		-		-		28		28		0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (Meter Persegi)/Jumlah Unit Gedung yang direhab (M2)	2000	120.700.000	-	-	1.000	64.554.500	820	45.591.600	189	-	2.009	110.146.100	100,45%	91,26%	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi Keuangan dan Kesejahteraanna (Orang)	30	11.746.422.762	30	2.401.957.261	30	3.336.324.008	30	2.781.668.148	30	2.830.875.148	30	11.350.824.565	100,00%	96,63%	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan tunjangan (Orang)	30	11.442.272.762	30	2.401.957.261	30	3.053.472.008	30	2.781.668.148	30	2.820.875.148	30	11.057.972.565	100,00%	96,64%	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian, atribut yang disediakan (Orang)	180	304.150.000	180	-	-	282.852.000	-	-	-	10.000.000	180	292.852.000	100,00%	96,29%	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical check up (Orang)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan (Paket)	4	1.739.975.000	4	189.873.000	4	497.823.100	-	514.198.300	-	543.200.500	2	1.745.094.900	50,00%	100,29%	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah kebutuhan yang disediakan (Jenis)	3	253.975.000	3	-	3	55.945.000	3	95.055.000	3	127.715.000	3	278.715.000	100,00%	109,74%	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Jabatan DPRD Yang Disediakan (Paket)	3	1.486.000.000	3	189.873.000	3	441.878.100	3	419.143.300	3	415.485.500	3	1.466.379.900	100,00%	98,68%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											99,77%	97,04%
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
SEKRETARIAT DPRD															
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			5.914.659.800		113.415.800		805.892.450		747.264.200		3.388.451.012		5.055.023.462		85,47%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Kegiatan Pembentukan Perda yang difasilitasi (Kegiatan)	14	245.495.000	1	-	3	146.374.850	3	16.125.000	-	82.994.800	7	245.494.650	50,00%	100,00%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Propemperda yang difasilitasi (Rapat)	3	72.885.000	1	-	-	2.999.850	1	-	1	69.884.800	3	72.884.650	100,00%	100,00%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Ranperda yang di fasilitasi (Ranperda)	11	33.610.000	1	-	3	4.375.000	4	16.125.000	3	13.110.000	11	33.610.000	100,00%	100,00%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik Ranperda Inisiatif yang dihasilkan (Dokumen)	3	139.000.000	-	-	3	139.000.000	-	-	-	-	3	139.000.000	100,00%	100,00%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi (Rapat)	8	39.000.000	1	-	3	-	3	10.325.000	-	25.175.000	7	35.500.000	87,50%	91,03%
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS yang di fasilitasi (Rapat)	2	6.400.000	2	-	-	-	-	6.400.000	-	-	2	6.400.000	100,00%	100,00%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS Perubahan yang difasilitasi (Rapat)	2	6.400.000	-	-	-	-	-	-	2	6.400.000	2	6.400.000	100,00%	100,00%
Pembahasan APBD	Jumlah Rapat Pembahasan APBD yang difasilitasi (Rapat)	1	9.900.000	1	-	-	-	-	-	-	8.475.000	1	8.475.000	100,00%	85,61%
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat Pembahasan APBD Perubahan yang difasilitasi (Rapat)	1	9.900.000	-	-	-	-	-	3.925.000	1	3.900.000	1	7.825.000	100,00%	79,04%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi (Rapat)	1	6.400.000	1	-	-	-	-	-	-	6.400.000	1	6.400.000	100,00%	100,00%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD yang difasilitasi (Kegiatan)	7	13.150.000	2	-	3	1.450.000	2	1.450.000	-	-	7	2.900.000	100,00%	22,05%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Agenda Pengawasan yang difasilitasi (Kegiatan)	1	1.450.000	1	-	-	1.450.000	-	-	-	-	1	1.450.000	100,00%	100,00%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Agenda Pengawasan yang difasilitasi (Kegiatan)	1	1.450.000	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Agenda Pengawasan yang difasilitasi (Kegiatan)	1	1.450.000	-	-	-	-	1	1.450.000	-	-	1	1.450.000	100,00%	100,00%
Pengawasan Urusan Pemerintahan	Jumlah Agenda Pengawasan yan	1												100,00%	0,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				4		5		6		7					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Bidang Perekonomian	difasilitasi (Kegiatan)		1.450.000	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Agenda Pengawasan yang difasilitasi (Kegiatan)	1	1.450.000	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Agenda Pengawasan yang difasilitasi (Kegiatan)	1	1.450.000	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Agenda Pengawasan yang difasilitasi (Kegiatan)	1	4.450.000	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi (Kegiatan)	6	803.850.000	3	25.000.000	2	211.350.000	1	181.125.000	-	342.496.500	6	759.971.500	100,00%	94,54%
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Pendalaman Tugas (Orang)	30	340.000.000	5	-	2	126.500.000	30	-	-	177.000.000	37	303.500.000	123,33%	89,26%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan (Kegiatan)	48	301.750.000	8	-	10	59.850.000	48	143.625.000	48	90.900.000	48	294.375.000	100,00%	97,56%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan (Orang)	2	60.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	25.000.000	2	60.000.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan (Orang)	5	90.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	22.500.000	5	37.500.000	5	90.000.000	100,00%	100,00%
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan (Dokumen)	1	12.100.000	-	-	-	-	-	-	1	12.096.500	1	12.096.500	100,00%	99,97%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi (Kegiatan)	6	1.619.900.000	1	-	1	270.770.000	2	4.500.000	2	1.293.270.524	6	1.568.540.524	100,00%	96,83%
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah kegiatan Penyusunan/Pengimputan Pokok- Pokok pikiran DPRD yang yang dilaksanakan (Kegiatan)	3	22.400.000	1	-	2	4.750.000	-	-	-	-	-	4.750.000	0,00%	21,21%
Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan (kegiatan)	3	1.597.500.000	-	-	1	266.020.000	1	4.500.000	-	1.293.270.524	2	1.563.790.524	66,67%	97,89%
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang difasilitasi (Kegiatan)	3	3.193.264.800	2	88.415.800	2	175.947.600	2	533.739.200	2	1.644.514.188	2	2.442.616.788	66,67%	76,49%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja, Study banding, Orientasi dan Pendalaman Tugas yang difasilitasi (Kegiatan)	23	2.944.600.000	4	73.666.600	6	152.265.400	23	494.942.200	23	1.475.829.188	23	2.196.703.388	100,00%	74,60%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen IKM terhadap Kinerja DPRD yang dihasilkan (Dokumen)	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	99.770.000	1	99.770.000	100,00%	99,77%		
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja, Study banding, Orientasi, dan Pendalaman Tugas Pimpinan DPRD yang difasilitasi (Kegiatan)	52	148.664.800	18	14.749.200	12	23.682.200	18	38.797.000	4	68.915.000	52	146.143.400	100,00%	98,30%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												91,96%	85,47%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
		28.269.760.127		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												98,14%	94,62%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.914.809.442		635.642.294		985.167.061		598.798.938		977.924.691		3.197.532.984		81,68%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	16.185.000	40	-	60	3.600.000	80	1.515.000	100	10.961.000	100	16.076.000	100,00%	99,33%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9	16.185.000	4	-	1	3.600.000	2	1.515.000	2	10.961.000	9	16.076.000	100,00%	99,33%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	3.466.446.493	25	635.642.294	50	931.565.241	75	543.894.796	100	692.888.753	100	2.803.991.084	100,00%	80,89%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	29	3.436.917.493	29	635.642.294	29	924.515.241	29	540.796.796	29	673.507.753	29	2.774.462.084	100,00%	80,73%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi (SPM)	86	4.799.000	7	-	22	1.200.000	55	798.000	104	2.801.000	104	4.799.000	120,93%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	6	24.730.000	2	-	4	5.850.000	6	2.300.000	6	16.580.000	6	24.730.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100	261.277.870	25	-	50	31.291.820	75	32.891.642	100	160.514.600	100	224.698.062	100,00%	86,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang	5	997.000	-	-	5	997.000	-	-	-	-	5	997.000	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	tersedia (Jenis)																
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	17.520.000	3	-	3	4.335.000	3	2.890.000	3	10.270.000	3	17.495.000	100,00%	99,86%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	3	22.051.050	3	-	3	5.409.950	3	4.009.900	3	12.631.050	3	22.050.900	100,00%	100,00%		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	35.204.220	3	-	3	7.755.970	3	5.379.700	3	22.068.550	3	35.204.220	100,00%	100,00%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi (Orang)	120	3.000.000	30	-	30	-	30	-	30	3.000.000	120	3.000.000	100,00%	100,00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	218	182.505.600	11	-	125	12.793.900	75	20.612.042	68	112.545.000	279	145.950.942	127,98%	79,97%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100	32.500.000	-	-	50	-	50	-	100	32.500.000	100	32.500.000	100,00%	100,00%		
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Jenis)	2	8.900.000	-	-	2	-	-	-	-	8.900.000	2	8.900.000	100,00%	100,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (Jenis)	2	23.600.000	-	-	-	-	-	-	2	23.600.000	2	23.600.000	100,00%	100,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	90.960.324	25	-	50	16.990.500	75	7.805.500	100	51.749.566	100	76.545.566	100,00%	84,15%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telpn,Air dan Listrik (Kali)	12	28.710.324	-	-	6	1.540.500	3	2.813.500	3	10.737.566	12	15.091.566	100,00%	52,56%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum (Jenis)	4	62.250.000	1	-	1	15.450.000	1	4.992.000	1	41.012.000	4	61.454.000	100,00%	98,72%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100	47.439.755	-	-	60	1.719.500	70	12.692.000	100	29.310.772	100	43.722.272	100,00%	92,16%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik (Unit)	5	45.629.755	-	-	3	1.719.500	1	12.692.000	1	27.500.772	5	41.912.272	100,00%	91,85%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik (Unit)	3	1.810.000	-	-	-	-	-	-	3	1.810.000	3	1.810.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												101,33%	81,68%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			46.450.000		-		3.300.000		26.067.000		17.028.000		46.395.000		99,88%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	46.450.000	-	-	50	3.300.000	50	26.067.000	100	17.028.000	100	46.395.000	100,00%	99,88%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan pertemuan/ rapat koordinasi FPK dan Keg. Bela Negara (kali)	2	46.450.000	-	-	1	3.300.000	-	26.067.000	1	17.028.000	2	46.395.000	100,00%	99,88%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,88%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			514.940.612		-		3.300.000		427.526.924		81.902.688		512.729.612		99,57%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan, pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (%)	100	514.940.612	-	-	50	3.300.000	75	427.526.924	100	81.902.688	100	512.729.612	100,00%	99,57%
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah partai politik yang difasilitasi (parpol)	7	512.245.612	-	-	-	3.300.000	6	427.526.924	1	79.207.688	7	510.034.612	100,00%	99,57%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah anggota yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik (orang)	25	2.695.000	-	-	-	-	-	-	25	2.695.000	25	2.695.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,57%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			13.955.000		-		1.650.000		550.000		10.555.000		12.755.000		91,40%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Persentase (%))	100	13.955.000	-	-	25	1.650.000	100	550.000	100	10.555.000	100	12.755.000	100,00%	91,40%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta pembinaan Ormas / LSM (orang)	70	13.955.000	-	-	-	1.650.000	70	550.000	-	10.555.000	70	12.755.000	100,00%	91,40%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	91,40%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			574.424.500		-		253.300.000		161.078.000		149.438.070		563.816.070		98,15%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomio, Sosial dan Budaya (Persentase	100	574.424.500	-	-	15	253.300.000	40	161.078.000	100	149.438.070	100	563.816.070	100,00%	98,15%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				4		5		6		7					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(%))														
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Rakor FKUB dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (kali)	8	574.424.500	-	-	1	253.300.000	2	161.078.000	5	149.438.070	8	563.816.070	100,00%	98,15%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,15%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			841.967.500		-		203.300.000		427.678.000		207.117.500		838.095.500		99,54%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Persentase (%))	100	841.967.500	25	-	50	203.300.000	75	427.678.000	100	207.117.500	100	838.095.500	100,00%	99,54%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pertemuan / Rapat Koordinasi anggota KOMINDA dan FKDM (kali)	24	832.517.500	6	-	6	203.300.000	6	427.678.000	6	197.667.500	24	828.645.500	100,00%	99,53%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pemantauan situasi ketertiban umum dan ekonomi (kali)	12	9.450.000	3	-	3	-	3	-	3	9.450.000	12	9.450.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,54%
				Predikat Kinerja										Sangat	Sangat





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																Tinggi	Tinggi
		5.906.547.054		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												100,88%	87,55%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi

KECAMATAN MARIORIWAWO															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.740.384.117		790.004.552		1.365.333.989		919.744.099		1.183.357.181		4.258.439.821		89,83%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	19.889.400	25	-	50	4.257.250	-	4.014.000	-	11.293.150	-	19.564.400	0,00%	98,37%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	989.800	-	-	-	-	2	-	1	989.800	3	989.800	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	9.599.750	-	-	1	2.070.000	-	1.650.000	1	5.744.750	2	9.464.750	100,00%	98,59%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	6	9.299.850	-	-	2	2.187.250	2	2.364.000	2	4.558.600	6	9.109.850	100,00%	97,96%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	4.101.913.835	-	790.004.552	25	1.275.415.743	-	825.993.103	-	847.777.555	-	3.739.190.953	0,00%	91,16%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	42	4.087.503.935	42	790.004.552	42	1.272.247.743	42	822.102.153	42	840.539.605	42	3.724.894.053	100,00%	91,13%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yg diverifikasi (Dokumen)	200	3.910.000	50	-	50	918.000	50	1.026.000	50	1.948.000	200	3.892.000	100,00%	99,54%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	20	10.499.900	-	-	8	2.250.000	8	2.864.950	4	5.289.950	20	10.404.900	100,00%	99,10%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah Kabupaten (%)	100	-	25	-	50	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Dokumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	351.207.002	25	-	50	47.696.110	-	55.236.650	-	183.141.260	-	286.074.020	0,00%	81,45%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan (Buah)	9	5.429.842	-	-	3	903.000	3	848.000	3	3.208.500	9	4.959.500	100,00%	91,34%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	9	75.580.000	2	-	2	14.920.400	2	11.175.000	3	36.100.000	9	62.195.400	100,00%	82,29%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.996.400		-		4.364.570		4.321.450		14.079.800		22.765.820		99,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	16	165.544.560	-	-	5	18.896.540	6	32.703.000	5	98.260.960	16	149.860.500	100,00%	90,53%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	1621	15.950.000	-	-	125	2.970.000	685	1.400.000	811	6.650.000	1.621	11.020.000	100,00%	69,09%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (kali)	338	65.706.200	-	-	5	5.641.600	256	4.789.200	77	24.842.000	338	35.272.800	100,00%	53,68%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%)	100	121.843.000	-	-	50	12.875.500	-	6.500.000	-	77.240.000	-	96.615.500	0,00%	79,30%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya (%)	4	102.443.000	-	-	-	-	-	-	4	77.240.000	4	77.240.000	100,00%	75,40%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya (Unit)	2	19.400.000	-	-	1	12.875.500	1	6.500.000	-	-	2	19.375.500	100,00%	99,87%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	79.479.386	25	-	50	14.802.836	-	15.179.796	-	32.265.222	-	62.247.854	0,00%	78,32%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (kali)	12	63.579.386	3	-	3	11.952.836	3	10.979.796	3	23.415.222	12	46.347.854	100,00%	72,90%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Service (Orang)	3	15.900.000	3	-	3	2.850.000	3	4.200.000	-	8.850.000	9	15.900.000	300,00%	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	66.051.494	-	-	25	10.286.550	-	12.820.550	-	31.639.994	-	54.747.094	0,00%	82,89%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara (%)	10	56.571.494	-	-	-	10.286.550	5	11.020.550	5	23.959.994	10	45.267.094	100,00%	80,02%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (unit)	10	9.480.000	-	-	2	-	3	1.800.000	3	7.680.000	8	9.480.000	80,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,15%	89,83%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
KECAMATAN																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			48.000.000		-		10.000.000		9.000.000		18.000.000		37.000.000		77,08%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (Kali)	100	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (kali)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerinatahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	48.000.000	25	-	50	10.000.000	-	9.000.000	-	18.000.000	-	37.000.000	0,00%	77,08%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan (buah)	50	24.000.000	10	-	18	5.500.000	12	4.500.000	10	9.000.000	10	19.000.000	20,00%	79,17%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan (buah)	200	24.000.000	31	-	45	4.500.000	65	4.500.000	59	9.000.000	200	18.000.000	100,00%	75,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												60,00%	77,08%
				Predikat Kinerja												Rendah	Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.353.474.500		-		4.500.000		238.677.250		1.074.843.250		1.318.020.500		97,38%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	25.824.500	-	-	50	4.500.000	-	8.407.250	-	12.917.250	-	25.824.500	0,00%	100,00%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	8	25.824.500	-	-	2	4.500.000	2	8.407.250	4	12.917.250	8	25.824.500	100,00%	100,00%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	100	1.327.650.000	-	-	25	-	-	230.270.000	-	1.061.926.000	-	1.292.196.000	0,00%	97,33%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dan transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (paket)	11	992.720.000	-	-	-	-	5	74.000.000	6	917.656.000	11	991.656.000	100,00%	99,89%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah imam masjid kelurahan, guru mengaji, RW, RT, Kader Posyandu, LPMK, yang diberi insentif dan Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi (orang)	201	334.930.000	201	-	201	-	201	156.270.000	-	144.270.000	151	300.540.000	75,00%	89,73%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										93,81%	97,38%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			106.700.000		-		2.920.000		53.060.000		50.680.000		106.660.000		99,96%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	106.700.000	-	-	50	2.920.000	-	53.060.000	-	50.680.000	-	106.660.000	0,00%	99,96%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas (orang)	240	106.700.000	60	-	60	2.920.000	60	53.060.000	60	50.680.000	240	106.660.000	100,00%	99,96%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,96%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			17.180.000		-		4.050.000		5.030.000		8.100.000		17.180.000		100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan	100	17.180.000	-	-	50	4.050.000	-	5.030.000	-	8.100.000	-	17.180.000	0,00%	100,00%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)					
			I		II		III		IV								
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)																
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			17.180.000		-		4.050.000		5.030.000		8.100.000		17.180.000		100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0,00%	100,00%
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi
		6.265.738.617		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												98,19%	91,57%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

KECAMATAN LALABATA															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.867.687.617		1.652.611.449		2.952.188.607		1.814.286.825		2.316.039.391		8.735.126.272		88,52%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	15.200.000	25	-	50	4.183.350	75	5.207.050	-	5.808.900	-	15.199.300	0,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra yang disusun (Dokumen)	3	2.000.000	3	-	3	629.050	3	701.750	3	918.950	3	2.249.750	100,00%	112,49%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	9.200.000	2	-	2	2.429.100	2	3.101.700	2	3.668.950	2	9.199.750	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	9	4.000.000	9	-	9	1.125.200	9	1.403.600	9	1.221.000	9	3.749.800	100,00%	93,75%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	8.727.831.537	25	1.652.611.449	50	2.618.481.143	75	1.543.877.328	-	1.852.010.059	-	7.666.979.979	0,00%	87,85%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	91	8.713.266.537	91	1.652.611.449	91	2.612.181.143	91	1.540.517.328	91	1.847.160.059	91	7.652.469.979	100,00%	87,83%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	100	14.565.000	25	-	50	6.300.000	75	3.360.000	100	4.850.000	100	14.510.000	100,00%	99,62%
Administrasi Umum Perangkat	Persentase Administrasi Umum	100												0,00%	95,27%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)					
				I		II		III		IV									
				4		5		6		7									
1	2	3		K		Rp		K		Rp		K		Rp		8		9	
Daerah	Perangkat Daerah (persentase)		543.530.680	25	-	50	163.341.500	75	139.651.300	-	214.826.700	-	517.819.500						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	5.696.040	-	-	100	2.934.500	-	2.725.000	-	-	-	5.659.500	0,00%	99,36%				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%)	100	-	10	-	45	-	70	-	100	-	100	-	100,00%	0,00%				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	141.025.000	-	-	3	41.135.000	3	44.790.000	3	48.195.000	2	134.120.000	75,00%	95,10%				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%)	100	46.613.000	14	-	55	12.819.200	70	16.113.050	100	16.961.500	100	45.893.750	100,00%	98,46%				
Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan bahan/material (%)	100	135.737.640	15	-	55	48.239.400	75	38.679.850	100	45.801.000	100	132.720.250	100,00%	97,78%				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi (%)	100	48.705.000	12	-	45	15.505.000	75	15.055.000	100	18.020.000	100	48.580.000	100,00%	99,74%				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)	100	165.754.000	10	-	45	42.708.400	75	22.288.400	100	85.849.200	100	150.846.000	100,00%	91,01%				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%)	100	90.264.500	-	-	50	27.914.500	75	-	-	62.100.000	-	90.014.500	0,00%	99,72%				
Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan mebel kantor (%)	100	14.050.000	-	-	75	6.650.000	-	-	100	7.200.000	100	13.850.000	100,00%	98,58%				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya (%)	100	76.214.500	-	-	50	21.264.500	75	-	90	54.900.000	90	76.164.500	90,00%	99,93%				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	362.537.140	25	-	50	110.961.714	75	86.963.147	-	130.901.026	-	328.825.887	0,00%	90,70%				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik kantor yang dibayar per bulan (Rekening)	12	109.137.140	3	-	6	28.061.714	9	26.263.147	12	31.601.026	12	85.925.887	100,00%	78,73%				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor (%)	100	253.400.000	20	-	50	82.900.000	75	60.700.000	100	99.300.000	100	242.900.000	100,00%	95,86%				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	128.323.760	-	-	25	27.306.400	75	38.588.000	-	50.392.706	-	116.287.106	0,00%	90,62%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Persentase kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	100	53.671.240	10	-	25	13.823.600	75	11.250.000	100	20.445.506	100	45.519.106	100,00%	84,81%				





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(%)																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara (%)	100	17.922.520	-	-	50	4.452.800	-	5.152.000	-	7.047.200	-	16.652.000	0,00%	92,91%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan perbaikan peralatan kerja yang rusak ringan/sedang/berat (%)	100	24.200.000	25	-	50	6.650.000	75	8.000.000	100	6.965.000	100	21.615.000	100,00%	89,32%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	100	32.530.000	25	-	50	2.380.000	75	14.186.000	100	15.935.000	100	32.501.000	100,00%	99,91%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												99,33%	88,52%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
KECAMATAN																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.600.000		-		7.200.000		7.200.000		7.200.000		21.600.000		100,00%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (Kali)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			-		-		-		-		-		-		0,00%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Buah)	250	21.600.000	63	-	126	7.200.000	189	7.200.000	-	7.200.000	-	21.600.000	0,00%	100,00%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (%)	150	10.800.000	10	-	50	3.600.000	100	3.600.000	150	3.600.000	150	10.800.000	100,00%	100,00%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan (buah)	100	10.800.000	25	-	50	3.600.000	75	3.600.000	75	3.600.000	75	10.800.000	75,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												87,50%	100,00%
				Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												96,10%	88,56%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.483.874.615		-		690.101.970		1.218.156.399		2.062.618.150		3.970.876.519		88,56%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	15.600.000	-	-	25	-	75	1.750.000	-	13.850.000	-	15.600.000	0,00%	100,00%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	4	15.600.000	1	-	2	-	3	1.750.000	4	13.850.000	4	15.600.000	100,00%	100,00%		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	100	4.468.274.615	-	-	25	690.101.970	75	1.216.406.399	-	2.048.768.150	-	3.955.276.519	0,00%	88,52%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang terselesaikan dengan baik (%)	100	2.844.619.615	-	-	25	251.951.970	70	826.742.849	95	1.320.898.900	95	2.399.593.719	95,00%	84,36%		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (Orang)	100	1.623.655.000	-	-	-	438.150.000	65	389.663.550	98	727.869.250	98	1.555.682.800	98,00%	95,81%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												96,10%	88,56%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			572.000.000		-		-		17.515.000		449.490.000		467.005.000		81,64%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			560.000.000		-		-		11.515.000		443.490.000		455.005.000		81,25%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas (orang)	1260	560.000.000	-	-	-	-	180	11.515.000	910	443.490.000	910	455.005.000	72,22%	81,25%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Kamtibmas (Orang)	240	12.000.000	60	-	120	-	180	6.000.000	-	6.000.000	-	12.000.000	0,00%	100,00%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Kamtibmas (Orang)	240	12.000.000	60	-	120	-	180	6.000.000	240	6.000.000	240	12.000.000	100,00%	100,00%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												72,80%	81,64%
				Predikat Kinerja												Sedang	Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10.500.000		-		1.800.000		2.400.000		1.800.000		6.000.000		57,14%		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	3	10.500.000	3	-	3	1.800.000	3	2.400.000	-	1.800.000	2	6.000.000	75,00%	57,14%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (Desa) 4 (Desa)	4	10.500.000	4	-	4	1.800.000	4	2.400.000	4	1.800.000	4	6.000.000	100,00%	57,14%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	57,14%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Rendah
		14.955.662.232		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												97,33%	88,26%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi

KECAMATAN DONRI-DONRI															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.558.061.534		477.829.265		780.018.292		555.329.551		661.515.752		2.474.692.860		96,74%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	11	10.376.250	-	-	3	-	8	-	-	10.376.250	-	10.376.250	0,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun (Dokumen)	0	8.289.950	-	-	-	-	-	-	-	8.289.950	-	8.289.950	0,00%	100,00%
	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3		-		2		3		3		3		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	1.458.800	-	-	-	-	2	-	2	1.458.800	2	1.458.800	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	6	627.500	-	-	1	-	5	-	6	627.500	6	627.500	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Realisasi Kinerja SKPD															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	43	2.231.206.360	9	466.674.019	23	747.887.278	35	491.644.844	36	482.610.345	36	2.188.816.486	83,72%	98,10%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	23	2.225.801.610	23	465.474.019	23	747.887.278	23	489.794.844	23	480.255.595	23	2.183.411.736	100,00%	98,10%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (Dokumen)	45	1.830.000	9	1.200.000	10	-	13	-	13	630.000	45	1.830.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	20	3.574.750	4	-	9	-	15	1.850.000	20	1.724.750	20	3.574.750	100,00%	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya (ASN)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	6	190.234.600	-	-	3	26.630.700	6	27.746.900	-	104.903.100	-	159.280.700	0,00%	83,73%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat/Penerangan Bangunan (Jenis)	2	1.489.000	-	-	2	-	2	1.489.000	2	-	2	1.489.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	2	42.525.000	-	-	1	7.510.000	1	855.000	2	34.135.000	2	42.500.000	100,00%	99,94%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	42468	19.801.900	5.000	-	22.000	-	25.000	5.162.500	42.468	14.639.400	42.468	19.801.900	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	5	31.285.100	-	-	3	16.074.700	4	14.901.200	5	308.700	5	31.284.600	100,00%	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi (%)	195	6.500.000	-	-	53	1.880.000	130	-	195	4.620.000	195	6.500.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	200	88.633.600	-	-	2	1.166.000	70	5.339.200	144	51.200.000	144	57.705.200	72,00%	65,11%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	2	21.050.000	-	-	-	-	-	2.100.000	-	18.950.000	-	21.050.000	0,00%	100,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Jenis)	2	3.200.000	-	-	-	-	2	2.100.000	2	1.100.000	2	3.200.000	100,00%	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	2	17.850.000	-	-	-	-	-	-	2	17.850.000	2	17.850.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang	2	48.477.964	-	7.567.246	1	3.476.314	-	18.113.427	-	14.958.875	-	44.115.862	0,00%	91,00%







Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan (buah)	200	18.000.000	50	3.000.000	100	1.500.000	200	7.500.000	200	6.000.000	200	18.000.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			28.094.700		3.600.000		1.800.000		9.675.000		13.019.700		28.094.700		100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (Kali)	8	28.094.700	1	3.600.000	4	1.800.000	-	9.675.000	-	13.019.700	-	28.094.700	0,00%	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	8	28.094.700	1	3.600.000	4	1.800.000	6	9.675.000	8	13.019.700	8	28.094.700	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			21.090.000		-		-		9.000.000		9.000.000		18.000.000		85,35%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat Penyuluhan Kantibmas (240) (Orang)	300	21.090.000	83	-	150	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-	18.000.000	0,00%	85,35%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas (orang)	300	21.090.000	83	-	150	-	250	9.000.000	300	9.000.000	300	18.000.000	100,00%	85,35%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	85,35%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			18.195.000		-		-		8.100.000		8.100.000		16.200.000		89,04%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	9	18.195.000	-	-	4	-	-	8.100.000	-	8.100.000	-	16.200.000	0,00%	89,04%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (Desa) 4 (Desa)	9	18.195.000	9	-	9	-	9	8.100.000	9	8.100.000	9	16.200.000	100,00%	89,04%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	89,04%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi
		2.660.241.234		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											98,91%	96,67%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

KECAMATAN LILIRIAJA															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.748.184.992		971.788.060		1.712.300.933		1.107.656.984		1.270.959.228		5.062.705.205		88,07%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	12	11.348.300	3	-	3	3.291.250	3	2.767.100	3	5.279.950	12	11.338.300	100,00%	99,91%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra yang disusun (Dokumen)	3	6.730.000	-	-	1	2.422.500	1	1.872.500	1	2.425.000	3	6.720.000	100,00%	99,85%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	3.244.150	2	-	2	194.600	2	194.600	2	2.854.950	2	3.244.150	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	7	1.374.150	7	-	7	674.150	7	700.000	7	-	7	1.374.150	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	72	5.103.668.355	18	971.788.060	18	1.518.850.398	18	976.285.114	18	1.004.182.940	72	4.471.106.512	100,00%	87,61%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	51	5.091.471.205	47	971.788.060	47	1.515.089.148	47	973.573.114	47	998.751.040	47	4.459.201.362	92,16%	87,58%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (Dokumen)	1	3.648.000	1	-	1	894.000	1	762.000	1	1.700.000	1	3.356.000	100,00%	92,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	20	8.549.150	4	-	6	2.867.250	4	1.950.000	6	3.731.900	20	8.549.150	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	6	240.468.837	6	-	6	70.199.850	6	52.141.500	6	94.256.700	6	216.598.050	100,00%	90,07%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	8	6.204.737	8	-	8	1.538.700	8	2.151.700	8	2.440.500	8	6.130.900	100,00%	98,81%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	3.250.000	1	-	1	3.250.000	1	-	1	-	1	3.250.000	100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Disediakan (Jenis)														
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	8	3.865.500	8	-	8	3.845.000	8	-	8	-	8	3.845.000	100,00%	99,47%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	66.030.000	3	-	3	20.340.000	3	15.080.000	3	22.065.000	3	57.485.000	100,00%	87,06%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.570.750		-		8.922.450		6.049.000		11.178.250		26.149.700		98,42%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	68.995.450	4	-	4	18.307.700	4	12.911.600	4	32.976.350	4	64.195.650	100,00%	93,04%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	1964	19.640.000	-	-	301	3.010.000	366	3.660.000	600	10.725.000	1.267	17.395.000	64,51%	88,57%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	162	45.912.400	-	-	52	10.986.000	64	12.289.200	27	14.871.600	143	38.146.800	88,27%	83,09%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	31	131.892.000	-	-	8	18.550.000	-	19.575.000	21	83.257.000	29	121.382.000	93,55%	92,03%
Pengadaan Mebel	Jumlah meubel yang diadakan (jenis)	9	33.965.000	-	-	2	11.180.000	5	15.100.000	2	4.000.000	9	30.280.000	100,00%	89,15%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	40	97.927.000	-	-	3	7.370.000	20	4.475.000	-	79.257.000	-	91.102.000	0,00%	93,03%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (Paket)	2	169.600.770	2	-	2	84.457.935	2	31.039.770	2	45.505.394	2	161.003.099	100,00%	94,93%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (kali)	12	60.050.770	3	-	3	21.657.935	3	12.989.770	2	18.655.394	11	53.303.099	91,67%	88,76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	3	109.550.000	3	-	3	62.800.000	3	18.050.000	3	26.850.000	3	107.700.000	100,00%	98,31%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	63	91.206.730	-	-	15	16.951.500	-	25.848.500	35	38.477.244	50	81.277.244	79,37%	89,11%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	4	58.570.680	4	-	4	13.866.000	4	15.781.000	4	23.497.244	4	53.144.244	100,00%	90,74%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	9	11.810.000	-	-	2	1.145.000	5	3.215.000	4	5.630.000	4	9.990.000	44,44%	84,59%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Dipelihara/ Jumlah Unit Gedung	4	20.826.050	-	-	2	1.940.500	1	6.852.500	1	9.350.000	4	18.143.000	100,00%	87,12%



II-436



Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	pendidikan dan kebudayaan dan transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (paket)														
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah imam masjid kelurahan, guru mengaji, RW, RT, Kader Posyandu, LPMK, yang diberi insentif dan Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi (orang)	305	534.840.000	305	-	305	265.670.000	305	51.000.000	305	214.120.000	305	530.790.000	100,00%	99,24%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,14%	99,59%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			257.200.000		-		11.200.000		93.965.000		121.975.000		227.140.000		88,31%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			257.200.000		-		5.600.000		93.965.000		121.975.000		221.540.000		86,14%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas (orang)	120	257.200.000	30	-	30	5.600.000	30	93.965.000	30	121.975.000	120	221.540.000	100,00%	86,14%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Kamtibmas (Orang)	120	-	30	-	30	5.600.000	30	-	30	-	120	5.600.000	100,00%	0,00%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Kamtibmas (Orang)	120	-	30	-	30	5.600.000	30	-	30	-	120	5.600.000	100,00%	0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	88,31%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			6.252.000		-		1.563.000		1.563.000		3.126.000		6.252.000		100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	5	6.252.000	5	-	5	1.563.000	5	1.563.000	5	3.126.000	5	6.252.000	100,00%	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Desa yang di Fasilitasi	5												100,00%	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	(Desa) 4 (Desa)		6.252.000	5	-	5	1.563.000	5	1.563.000	5	3.126.000	5	6.252.000				
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		7.986.807.915		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												92,87%	90,94%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

KECAMATAN LILIRILAU														
Semua Bidang														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.789.474.565		962.998.397		1.745.121.496		1.172.871.581		1.375.106.595		5.256.098.069	90,79%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	100	12.678.350	25	-	25	3.140.850	25	3.168.600	25	6.368.250	25	12.677.700	25,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3	1.574.300	-	-	-	332.700	2	417.150	1	824.250	3	1.574.100	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	9.629.400	-	-	-	2.421.200	2	2.402.600	-	4.805.300	2	9.629.100	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	2	1.474.650	-	-	-	386.950	2	348.850	-	738.700	2	1.474.500	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	5.015.716.196	25	962.998.397	25	1.529.626.554	25	1.014.921.780	25	1.059.898.597	100	4.567.445.328	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	100	5.005.577.546	100	962.998.397	100	1.526.654.254	100	1.012.665.680	100	1.055.005.447	100	4.557.323.778	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	35	7.539.000	-	-	20	2.553.000	10	1.599.000	3	3.370.000	33	7.522.000	94,29%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	20	2.599.650	-	-	10	419.300	5	657.100	5	1.523.150	20	2.599.550	100,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	301.004.830	25	-	50	108.119.800	-	66.611.350	25	99.214.600	100	273.945.750	100,00%	91,01%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	13	5.233.430	3	-	5	2.846.000	5	2.036.500	-	-	13	4.882.500	100,00%	93,29%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%)	1	5.850.000	-	-	-	5.850.000	1	-	-	-	1	5.850.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor (%)	13	101.405.000	-	-	5	36.140.000	5	24.820.000	3	36.695.000	13	97.655.000	100,00%	96,30%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%)	12	20.888.950	2	-	5	8.432.700	3	5.968.350	2	5.982.300	12	20.383.350	100,00%	97,58%
Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan bahan/material (%)	22	80.639.250	5	-	7	32.281.100	7	17.231.300	3	23.572.300	22	73.084.700	100,00%	90,63%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi (%)	1919	31.690.000	450	-	500	11.860.000	700	7.720.000	269	12.095.000	1.919	31.675.000	100,00%	99,95%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)	198	55.298.200	50	-	50	10.710.000	60	8.835.200	-	20.870.000	160	40.415.200	80,81%	73,09%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%)	100	84.642.315	-	-	50	12.100.000	-	-	50	69.693.000	100	81.793.000	100,00%	96,63%
Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan mebel kantor (%)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya (%)	12	65.642.315	3	-	3	12.100.000	4	-	2	50.693.000	12	62.793.000	100,00%	95,66%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (%)	3	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000	0,00%	100,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (%)	1	10.000.000	-	-	-	-	1	-	-	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	256.336.779	-	-	25	57.509.092	25	52.692.351	50	106.699.851	100	216.901.294	100,00%	84,62%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik kantor yang dibayar per bulan (Rekening)	12	97.386.779	3	-	4	23.509.092	4	16.092.351	-	20.099.851	11	59.701.294	91,67%	61,30%





Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor (%)	13	158.950.000	3	-	3	34.000.000	4	36.600.000	-	86.600.000	10	157.200.000	76,92%	98,90%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	119.096.095	-	-	25	34.625.200	25	35.477.500	50	33.232.297	100	103.334.997	100,00%	86,77%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (%)	6	51.579.760	2	-	2	16.328.000	2	6.958.000	-	16.342.997	6	39.628.997	100,00%	76,83%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara (%)	9	24.105.960	2	-	3	9.338.000	3	5.498.000	-	7.710.000	8	22.546.000	88,89%	93,53%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan perbaikan peralatan kerja yang rusak ringan/sedang/berat (%)	12	17.930.000	4	-	4	6.560.000	4	2.400.000	-	7.850.000	12	16.810.000	100,00%	93,75%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	1546	21.620.675	400	-	500	2.399.200	500	16.761.800	146	1.329.300	1.546	20.490.300	100,00%	94,77%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	170	3.859.700	-	-	50	-	100	3.859.700	20	-	170	3.859.700	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												98,83%	90,79%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
KECAMATAN																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			31.200.000		-		7.500.000		7.200.000		14.050.000		28.750.000		92,15%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Persentase)	100	-	-	-	25	-	25	-	50	-	100	-	100,00%	0,00%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (kali)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerinatahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	31.200.000	-	-	25	7.500.000	25	7.200.000	50	14.050.000	100	28.750.000	100,00%	92,15%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan (buah)	12	7.800.000	3	-	4	1.950.000	4	1.650.000	1	2.950.000	12	6.550.000	100,00%	83,97%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan (buah)	36	23.400.000	10	-	10	5.550.000	10	5.550.000	6	11.100.000	36	22.200.000	100,00%	94,87%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	92,15%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.624.615.270		-		216.326.000		541.568.758		1.798.490.512		2.556.385.270		97,40%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	10.119.850	-	-	25	4.783.000	25	-	50	5.336.850	100	10.119.850	100,00%	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	2	10.119.850	-	-	1	4.783.000	1	-	-	5.336.850	2	10.119.850	100,00%	100,00%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	100	2.614.495.420	-	-	25	211.543.000	25	541.568.758	50	1.793.153.662	100	2.546.265.420	100,00%	97,39%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang terselesaikan dengan baik (%)	10	1.812.265.420	3	-	3	26.818.000	2	355.343.758	1	1.423.103.662	9	1.805.265.420	90,00%	99,61%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (Orang)	180	802.230.000	25	-	50	184.725.000	75	186.225.000	10	370.050.000	160	741.000.000	88,89%	92,37%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89,70%	97,40%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			334.000.000		-		3.500.000		131.600.000		198.800.000		333.900.000		99,97%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	334.000.000	25	-	25	3.500.000	25	131.600.000	25	198.800.000	100	333.900.000	100,00%	99,97%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas (orang)	920	334.000.000	300	-	300	3.500.000	300	131.600.000	20	198.800.000	920	333.900.000	100,00%	99,97%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,97%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			7.899.150		-		2.225.050		2.225.050		3.449.050		7.899.150		100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	7.899.150	25	-	25	2.225.050	25	2.225.050	25	3.449.050	100	7.899.150	100,00%	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (Desa) 4 (Desa)	8	7.899.150	2	-	2	2.225.050	2	2.225.050	2	3.449.050	8	7.899.150	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		8.787.188.985		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										96,15%	93,12%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

KECAMATAN MARIORIAWA															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.458.567.676		1.031.990.536		1.893.235.256		1.308.580.323		1.428.945.351		5.662.751.466		87,68%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
				4		5		6		7							
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	26	15.965.000	-	-	3	2.600.000	3	5.088.750	20	8.272.000	26	15.960.750	100,00%	99,97%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3	2.505.000	-	-	-	-	2	1.249.000	1	1.255.000	3	2.504.000	100,00%	99,96%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	3	11.230.000	-	-	1	2.600.000	1	3.839.750	1	4.787.000	3	11.226.750	100,00%	99,97%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang di susun (Dokumen)	20	2.230.000	-	-	-	-	10	-	10	2.230.000	10	2.230.000	50,00%	100,00%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	56	5.472.965.393	56	1.028.295.963	56	1.646.838.127	56	1.070.967.202	56	1.101.796.381	56	4.847.897.673	100,00%	88,58%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	56	5.455.725.393	56	1.028.295.963	56	1.641.862.127	56	1.066.061.202	56	1.094.766.381	56	4.830.985.673	100,00%	88,55%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverikasi (SPM)	200	7.260.000	-	-	50	2.376.000	45	1.476.000	105	3.080.000	200	6.932.000	100,00%	95,48%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	15	9.980.000	-	-	10	2.600.000	-	3.430.000	5	3.950.000	15	9.980.000	100,00%	100,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	42	507.075.570	-	-	12	119.582.950	14	126.600.800	10	177.786.800	36	423.970.550	85,71%	83,61%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	40	7.314.600	-	-	15	5.965.400	15	662.000	10	464.000	40	7.091.400	100,00%	96,95%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	4	4.965.000	-	-	-	-	3	3.700.000	1	1.265.000	4	4.965.000	100,00%	100,00%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	24	146.920.000	-	-	10	34.540.000	8	34.690.000	5	59.540.000	23	128.770.000	95,83%	87,65%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	1	13.234.600	-	-	1	2.535.050	1	4.493.300	1	6.118.500	1	13.146.850	75,00%	99,34%		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	24	109.794.170	-	-	10	43.161.500	7	39.245.500	6	24.281.500	23	106.688.500	95,83%	97,17%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	1068	37.450.000	-	-	550	8.075.000	250	16.150.000	268	13.075.000	1.068	37.300.000	100,00%	99,60%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	857	187.397.200	-	-	175	25.306.000	245	27.660.000	180	73.042.800	600	126.008.800	70,01%	67,24%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	19	72.560.000	-	-	13	23.700.000	-	-	2	14.700.000	15	38.400.000	78,95%	52,92%		
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Jenis)	10	19.900.000	-	-	10	19.900.000	-	-	-	-	10	19.900.000	100,00%	100,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (Jenis)	11	52.660.000	-	-	3	3.800.000	-	-	2	14.700.000	5	18.500.000	45,45%	35,13%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	12	268.123.293	3	3.694.573	3	75.284.479	3	58.181.871	3	87.824.570	12	224.985.493	100,00%	83,91%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (kali)	12	135.823.293	3	3.694.573	3	29.734.479	3	26.031.871	3	42.674.570	12	102.135.493	100,00%	75,20%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan (Orang)	19	132.300.000	-	-	6	45.550.000	5	32.150.000	6	45.150.000	17	122.850.000	89,47%	92,86%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	44	121.878.420	-	-	14	25.229.700	16	47.741.700	14	38.565.600	44	111.537.000	100,00%	91,51%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan stnk (Unit)	16	85.738.420	-	-	4	17.666.700	6	25.486.700	6	33.956.600	16	77.110.000	100,00%	89,94%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	28	17.330.000	-	-	10	5.055.000	10	9.715.000	8	2.310.000	28	17.080.000	100,00%	98,56%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (M2)	90	18.810.000	-	-	12	2.508.000	60	12.540.000	11	2.299.000	83	17.347.000	92,22%	92,22%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												98,21%	87,68%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
KECAMATAN																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.000.000		-		12.000.000		9.000.000		15.000.000		36.000.000		100,00%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (Kali)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (kali)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (150) (Buah)	200	36.000.000	-	-	90	12.000.000	60	9.000.000	50	15.000.000	200	36.000.000	100,00%	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan (buah)	50	7.200.000	-	-	20	2.400.000	10	1.800.000	20	3.000.000	50	7.200.000	100,00%	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan (buah)	150	28.800.000	-	-	60	9.600.000	40	7.200.000	50	12.000.000	150	28.800.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.215.259.525		-		168.945.000		378.423.111		2.512.999.509		3.060.367.620		95,18%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)	35	16.050.000	-	-	6	-	12	-	4	16.050.000	22	16.050.000	62,86%	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	2	16.050.000	-	-	-	-	-	-	2	16.050.000	2	16.050.000	100,00%	100,00%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan (paket)	35	3.199.209.525	-	-	6	168.945.000	12	378.423.111	8	2.496.949.509	26	3.044.317.620	74,29%	95,16%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dan transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (paket)	31	2.450.539.525	-	-	6	-	12	241.908.111	13	2.131.209.509	31	2.373.117.620	100,00%	96,84%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah imam masjid kelurahan, guru mengaji, RW, RT, Kader Posyandu, LPMK, yang diberi	681	748.670.000	-	-	170	168.945.000	170	136.515.000	341	365.740.000	681	671.200.000	100,00%	89,65%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
			I		II		III		IV						
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	insentif dan Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi (orang)														
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,18%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			415.600.000		-		-		6.000.000		308.095.000		314.095.000		75,58%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarkat yang mengikuti Penyuluhan Kantibmas (Orang)	11670	415.600.000	-	-	-	-	120	6.000.000	9.500	308.095.000	9.620	314.095.000	82,43%	75,58%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas (orang)	11670	415.600.000	-	-	-	-	120	6.000.000	9.500	308.095.000	9.620	314.095.000	82,43%	75,58%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										82,43%	75,58%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			8.200.000		-		-		-		8.200.000		8.200.000		100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	5	8.200.000	-	-	-	-	-	-	5	8.200.000	5	8.200.000	100,00%	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (Desa) 4 (Desa)	5	8.200.000	-	-	-	-	-	-	5	8.200.000	5	8.200.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		10.133.627.201		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										98,14%	89,62%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi

KECAMATAN GANRA															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.401.524.351		426.153.953		730.419.059		477.356.152		529.189.538		2.163.118.702		90,07%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6		7		8	
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	11.944.650	-	-	40	4.836.800	-	-	100	7.107.850	140	11.944.650	140,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang di susun (dokumen)	2	3.379.950	-	-	1	1.370.200	-	-	1	2.009.750	2	3.379.950	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	3.774.750	-	-	1	1.526.100	-	-	1	2.248.650	2	3.774.750	200,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	9	4.789.950	-	-	3	1.940.500	-	-	-	2.849.450	3	4.789.950	33,33%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (Persen)	100	2.131.570.528	18	406.764.729	47	655.867.813	65	428.270.675	84	423.797.241	84	1.914.700.458	84,00%	89,83%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya (ASN)	21	2.129.290.528	21	406.404.729	21	655.327.813	21	427.730.675	21	422.957.241	21	1.912.420.458	100,00%	89,81%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	100	2.280.000	16	360.000	40	540.000	63	540.000	100	840.000	100	2.280.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	143.379.650	10	8.753.300	31	25.654.450	54	27.192.000	100	66.166.300	100	127.766.050	100,00%	89,11%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	1.464.550	-	-	25	359.250	53	417.600	100	687.700	100	1.464.550	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	2	318.500	-	-	-	-	-	-	-	318.500	-	318.500	0,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor (%)	100	26.650.000	14	3.625.000	50	7.195.000	61	5.345.000	70	10.220.000	70	26.385.000	70,00%	99,01%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%)	100	8.449.700	17	1.400.000	42	2.100.000	66	2.100.000	100	2.849.700	100	8.449.700	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan bahan/material (%)	100	17.291.900	16	2.728.300	37	3.684.200	58	3.701.000	97	6.691.900	97	16.805.400	97,00%	97,19%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi (%)	100	6.000.000	17	1.000.000	42	1.500.000	67	1.500.000	100	2.000.000	100	6.000.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Persentase pelaksanaan rapat	100												46,00%	82,14%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi SKPD (%)		83.205.000	-	-	20	10.816.000	46	14.128.400	46	43.398.500	46	68.342.900		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	2	20.550.000	-	-	2	20.550.000	-	-	2	-	4	20.550.000	200,00%	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	2	20.550.000	-	-	2	20.550.000	-	-	-	-	2	20.550.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	35.836.158	15	5.588.874	37	7.401.246	60	8.567.327	98	13.595.203	98	35.152.650	98,00%	98,09%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.036.158		5.588.874		4.701.246		5.867.327		8.195.203		24.352.650		97,27%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor (%)	100	10.800.000	25	-	50	2.700.000	50	2.700.000	100	5.400.000	100	10.800.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	30	58.243.365	-	5.047.050	-	16.108.750	20	13.326.150	8	18.522.944	28	53.004.894	93,33%	91,01%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (%)	100	43.383.365	12	5.047.050	34	9.666.750	54	8.518.150	88	14.912.944	88	38.144.894	88,00%	87,93%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan perbaikan peralatan kerja yang rusak ringan/sedang/berat (%)	100	8.110.000	-	-	22	1.750.000	55	2.750.000	100	3.610.000	100	8.110.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	100	6.750.000	-	-	67	4.692.000	100	2.058.000	100	-	100	6.750.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96,53%	90,07%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
KECAMATAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.800.000		4.800.000		7.200.000		7.200.000		9.600.000		28.800.000		100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-		-		-		-		-		0,00%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (kali)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerinatahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	28.800.000	17	4.800.000	42	7.200.000	66	7.200.000	100	9.600.000	100	28.800.000	100,00%	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan (buah)	125	21.600.000	2	3.600.000	1	5.400.000	3	5.400.000	2	7.200.000	8	21.600.000	6,40%	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan (buah)	125	7.200.000	31	1.200.000	31	1.800.000	31	1.800.000	32	2.400.000	125	7.200.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										29,80%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14.999.950		-		4.341.650		1.800.000		8.841.650		14.983.300		99,89%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (8) (Kali)	2	14.999.950	1	-	-	4.341.650	1	1.800.000	-	8.841.650	2	14.983.300	100,00%	99,89%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)	2	14.999.950	-	-	-	4.341.650	1	1.800.000	1	8.841.650	2	14.983.300	100,00%	99,89%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,89%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14.640.000		-		3.660.000		3.660.000		7.320.000		14.640.000		100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat Penyuluhan Kantibmas (240) (Orang)	264	14.640.000	66	-	66	3.660.000	66	3.660.000	66	7.320.000	264	14.640.000	100,00%	100,00%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas (orang)	264	14.640.000	66	-	66	3.660.000	66	3.660.000	66	7.320.000	264	14.640.000	100,00%	100,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			7.750.000		-		1.200.000		1.200.000		5.350.000		7.750.000		100,00%		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (4) (Desa)	4	7.750.000	4	-	4	1.200.000	4	1.200.000	4	5.350.000	4	7.750.000	100,00%	100,00%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (Desa) 4 (Desa)	4	7.750.000	4	-	4	1.200.000	4	1.200.000	4	5.350.000	4	7.750.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		2.467.714.301		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												95,80%	90,34%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

KECAMATAN CITTA															
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.068.442.971		336.660.588		595.648.120		403.028.381		470.070.259		1.805.407.348		87,28%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (11) (Dokumen)	11	4.036.600	-	-	5	-	5	3.166.800	1	849.800	11	4.016.600	100,00%	99,50%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	1.479.900	-	-	2	-	1	1.474.900	-	-	3	1.474.900	100,00%	99,66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	849.800	-	-	-	-	-	-	2	849.800	2	849.800	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (Dokumen)	6	1.706.900	-	-	1	-	2	1.691.900	3	-	6	1.691.900	100,00%	99,12%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keterpenuhan Administrasi Perkantoran (40) (Dokumen)	40	1.783.348.359	-	336.660.588	19	541.947.607	13	356.971.314	3	367.513.576	35	1.603.093.085	87,50%	89,89%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	19	1.779.027.459	19	336.660.588	19	541.947.607	19	355.314.414	19	366.813.576	19	1.600.736.185	100,00%	89,98%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah SPM yg diverifikasi (Dokumen)	112	2.634.000	-	-	25	-	44	-	27	700.000	96	700.000	85,71%	26,58%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
SKPD															
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Dokumen)	20	1.686.900	4	-	5	-	6	1.656.900	5	-	20	1.656.900	100,00%	98,22%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (19) (ASN)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-		0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Keterpenuhan Administrasi Umum (6) (Paket)	6	131.630.695	1	-	2	23.155.100	2	14.703.100	-	52.118.850	5	89.977.050	83,33%	68,36%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	20	1.999.565	-	-	5	1.079.000	7	751.000	8	-	20	1.830.000	100,00%	91,52%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	28.195.000	-	-	1	1.750.000	-	765.000	2	20.690.000	3	23.205.000	100,00%	82,30%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	23332	15.749.400	4.567	-	5.890	3.142.600	5.970	-	6.905	10.358.650	23.332	13.501.250	100,00%	85,73%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	2	31.833.130	-	-	1	15.157.500	-	11.567.500	1	1.575.000	2	28.300.000	100,00%	88,90%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	280	7.000.000	-	-	-	-	-	-	12	400.000	12	400.000	4,29%	5,71%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	245	46.853.600	-	-	8	2.026.000	30	1.619.600	31	19.095.200	69	22.740.800	28,16%	48,54%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan (1) (Unit)	1	3.200.000	-	-	1	2.960.000	-	-	-	-	1	2.960.000	100,00%	92,50%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	1	3.200.000	-	-	1	2.960.000	-	-	-	-	1	2.960.000	100,00%	92,50%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2) (Paket)	2	58.475.947	-	-	1	15.249.413	-	11.455.367	1	19.090.833	2	45.795.613	100,00%	78,32%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telpon,Air dan Listrik (Kali)	12	47.675.947	3	-	3	12.549.413	3	8.755.367	3	13.690.833	12	34.995.613	100,00%	73,40%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	1	10.800.000	-	-	-	2.700.000	1	2.700.000	-	5.400.000	1	10.800.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara (12) (Unit)	12	87.751.370	1	-	3	12.336.000	5	16.731.800	2	30.497.200	11	59.565.000	91,67%	67,88%





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	6	59.596.370	-	-	2	9.486.000	2	13.001.800	2	13.367.200	6	35.855.000	100,00%	60,16%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	12	19.280.000	2	-	3	-	3	3.730.000	4	11.150.000	12	14.880.000	100,00%	77,18%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranapendukung gedung Kantor yang dipelihara/Rehab (Unit)	1	8.875.000	-	-	-	2.850.000	1	-	-	5.980.000	1	8.830.000	100,00%	99,49%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												98,03%	87,28%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
KECAMATAN																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.600.000		-		5.400.000		5.400.000		10.800.000		21.600.000		100,00%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-		-		-		-		-		0,00%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			-		-		-		-		-		-		0,00%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (150) (Buah)	150	21.600.000	33	-	37	5.400.000	45	5.400.000	15	10.800.000	130	21.600.000	86,67%	100,00%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan (buah)	50	5.400.000	9	-	12	1.350.000	17	1.350.000	12	2.700.000	50	5.400.000	100,00%	100,00%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan (buah)	100	16.200.000	17	-	29	4.050.000	31	4.050.000	23	8.100.000	100	16.200.000	100,00%	100,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	100,00%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22.019.950		-		4.050.000		4.050.000		13.889.950		21.989.950		99,86%		





Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (8) (Kali)	8	22.019.950	-	-	3	4.050.000	3	4.050.000	1	13.889.950	7	21.989.950	87,50%	99,86%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (kali) 8 (Kali)	8	22.019.950	2	-	2	4.050.000	2	4.050.000	2	13.889.950	8	21.989.950	100,00%	99,86%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,86%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14.640.000		-		3.600.000		3.000.000		7.850.000		14.450.000		98,70%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat Penyuluhan Kantibmas (240) (Orang)	240	14.640.000	55	-	55	3.600.000	57	3.000.000	59	7.850.000	226	14.450.000	94,17%	98,70%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas (orang)	240	14.640.000	55	-	60	3.600.000	65	3.000.000	55	7.850.000	235	14.450.000	97,92%	98,70%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,92%	98,70%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			6.980.000		-		1.500.000		1.500.000		3.945.000		6.945.000		99,50%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (4) (Desa)	4	6.980.000	1	-	1	1.500.000	1	1.500.000	-	3.945.000	3	6.945.000	75,00%	99,50%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (Desa) 4 (Desa)	4	6.980.000	1	-	1	1.500.000	1	1.500.000	1	3.945.000	4	6.945.000	100,00%	99,50%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,50%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		2.133.682.921		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										98,08%	87,66%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi
TOTAL ANGGARAN SELURUH SKPD		1.307.380.874.577		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										97,97%	85,30%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi





2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi dan misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Permasalahan pembangunan selalu berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini, didasarkan pada isu strategis daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tidak diantisipasi, akan berdampak pada kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka tertentu, dan juga berdampak pada permasalahan daerah yang berhubungan dengan proritas dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disajikan pada table berikut :

MASALAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
<i>"Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas dan Perwujudan Daya Saing Daerah"</i>			
Belum optimalnya standar pelayanan minimal (SPM) secara menyeluruh yang menyebabkan kualitas hidup manusia relatif tertinggal dan struktur serta produktivitas perekonomian daerah belum menjamin kesejahteraan yang tinggi dan merata	Meningkatkan Kualitas - Manusia yang Kompetitif, dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM
		Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar
		Meningkatnya Derajat Pendidikan Literasi dan Kualitas Fisik Masyarakat	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan
Masih belum maksimalnya produktivitas Ekonomi Daerah serta daya saing daerah yang	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah





MASALAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
masih tertinggal dan terjadinya degradasi lingkungan serta sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan	Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)
		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)
			Tingkat pengangguran terbuka (%)
		Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (Kasus)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks resiko bencana
			Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)
			Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)
Tatakelola pemerintahan yang baik belum terwujud sepenuhnya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang - Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Opini Laporan Keuangan
			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
			Indeks Inovasi Daerah

Kualitas hidup manusia merupakan muara dari semua upaya pembangunan. Ini diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Soppeng yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,99 dan masih pada kategori sedang, sementara nilai IPM Sulawesi Selatan sudah mencapai 72,24 dan nasional sebesar 72,39 di tahun yang sama. Untuk itu pada tahun 2023 dilakukan upaya umum dalam mewujudkan kualitas manusia seutuhnya baik upaya dalam peningkatan derajat Pendidikan, Kesehatan maupun urusan lainnya yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Adapun bidang urusan yang terkait dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik lainnya adalah sebagai berikut:

A. Pendidikan

Masalah untuk SPM pendidikan adalah angka partisipasi pendidikan dasar yang baru mencapai 86,54%, partisipasi pendidikan kesetaraan sebesar 100%, dan partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru mencapai 56,10%. Akar masalah belum tercapainya target SPM pendidikan





dasar adalah masih adanya anak usia SD yang tidak bersekolah karena faktor ekonomi dan perhatian orang tua atas pendidikan yang masih rendah, serta adanya anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan dari SD ke SMP dan adanya yang putus sekolah pada level SD ataupun SMP. Sebagian besar dari permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi.

Untuk partisipasi pendidikan kesetaraan yang telah menunjukkan angka 100%, akan tetapi masih banyaknya warga negara usia 7 – 18 Tahun yang belum berminat untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya minat masyarakat yang belum tamat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan, jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan mutu yang baik masih terbatas, dan dari segi pendataan terdapat sebagian sasaran yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempat tinggal di luar Kabupaten Soppeng.

Penyebab belum tercapainya target SPM PAUD adalah keberadaan sebagian PAUD swasta dipelosok-pelosok yang kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sementara itu PAUD yang berstatus negeri baru sebesar 15 unit sekolah. Data yang ada menunjukkan jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit dan RA sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun 2021 sebanyak 6.124 maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 240,04%.

Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh lembaga PAUD.

B. Kesehatan

Masalah untuk SPM kesehatan adalah belum terpenuhinya target pelayanan kesehatan untuk warga usia produktif yang hanya sebesar 20,11%. Untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, telah terpenuhi 100%.

Tidak terpenuhinya target 100% untuk pelayanan warga usia produktif diakibatkan karena belum maksimalnya pelaksanaan skrining kesehatan pada warga usia tersebut. Akar masalah yang menjadi tantangan lima tahun kedepan adalah soal akurasi data calon penerima layanan agar kalkulasi penyiapan unsur pendukung pelayanan bisa diupayakan dengan optimal.





C. Pekerjaan Umum

Masalah untuk SPM pekerjaan umum adalah belum terpenuhinya target 100% untuk penyediaan air minum sehari-hari (94,55%) sedangkan untuk pelayanan pengelolaan limbah domestik sudah mencapai 100% berdasarkan jumlah rumah tangga yang seharusnya dilayani. Akar masalah belum terpenuhinya SPM air minum sehari-hari adalah menurunnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku air minum, terbatasnya penyediaan air minum oleh PDAM dan Non PDAM yang sehat, dan belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum. Walaupun pelayanan pengolahan limbah domestik sudah mencapai 100 % dari 57.543 rumah tangga yang dilayani, akan tetapi diperkirakan masih ada rumah tangga yang berada di pedesaan atau perkotaan yang belum terpenuhi pelayanan pengolahan limbahnya. Akar masalah penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat atas penyediaan sarana penanganan limbah domestik yang memenuhi kriteria layak dan belum tercukupinya fasilitasi pemerintah atas layanan yang memenuhi standar kelayakan dimaksud yakni penggunaan kloset leher angsa yang dilengkapi dengan tangki septik baik di pedesaan maupun di perkotaan serta adanya layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal terutama di perkotaan.

D. Perumahan

Masalah untuk SPM perumahan rakyat, adalah belum tercapainya jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Ini disebabkan belum tersedianya data yang lengkap dan akurat mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan tersebut, belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar perumahan rakyat.

E. Ketenteraman dan Ketertiban

Masalah untuk SPM ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat adalah masih perlunya peningkatan layanan akibat penegakan Perda dan Perkada serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu pelayanan informasi rawan bencana juga belum sepenuhnya berjalan disebabkan belum tersedianya peta wilayah rawan bencana secara detail. Untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan korban kebakaran sudah mencapai target 100%. Akar masalah lain terkait SPM ini adalah kurang lengkapnya data mengenai warga negara yang berhak menerima layanan, serta belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan penerima layanan.

F. Sosial

Masalah terkait SPM untuk urusan sosial adalah perlunya peningkatan untuk layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti, layanan untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, serta layanan rehabilitasi sosial dasar untuk tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti belum ada terealisasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta kelengkapan data terkait warga yang berhak menerima





layanan tersebut. Layanan sosial yang telah mencapai target 100% adalah rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana.

Selain sektor tersebut upaya meningkatkan fasilitas ekonomi wilayah juga perlu dilakukan pada sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor yang memiliki prospek dikembangkan di Kabupaten Soppeng, karena sektor ini memiliki potensi yang cukup besar. Selama ini kepariwisataan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, khususnya dari objek wisata yang dikembangkan, seperti objek wisata permandian alam ompo, permandian alam Lejja, permandian citta dan beberapa objek wisata lainnya yang dikelola pemerintah desa. Kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab dari penurunan tersebut karena ketidaksiapan destinasi wisata yang ada. Ketidaksiapan tersebut dalam arti minimnya pengembangan objek wisata.

Pemerintah Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah berhasil membentuk dan membina sentra industri pada 5 Kecamatan. Sentra ini sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster. Salah satu sentra yang dikembangkan di tahun 2021 adalah sentra kerajinan daun lontar yang dikenal dengan nama “Ikajao Citta” yang terletak di kecamatan Citta.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kab Soppeng mulai Kembali meningkat sebesar 6,15% jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2,19 %.

Selama tahun 2017-2021 angka Indeks Gini di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 dan 2018 indeks gini sebesar 0,359. Dan pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 0,392, dan di tahun 2020 menyentuh angka 0,403. Hingga pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,406. Walaupun terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2021, Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang. Hal ini berarti bahwa pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng pada kurun waktu 2017 – 2021 masih terbelah cukup merata. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan maka indeks gini Kabupaten Soppeng cukup tinggi. Begitupun jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan percepatan pergerakan arus barang dan jasa di wilayah sehingga aktivitas ekonomi juga akan semakin tinggi. Kegiatan sektor transportasi merupakan





tulang punggung pola distribusi baik barang dan jasa maupun penumpang. Pengelolaan Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jalan untuk Jalan di wilayah Kabupaten menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten, sehingga Jalan yang berada di Pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antar Kecamatan, antar desa akan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Untuk Kondisi Jalan dan Jembatan masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya, dan memenuhi aspek aksesibilitas, aspek mobilitas dan aspek keselamatan.

Pada tahun 2021 luas irigasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, akan tetapi luas irigasi tersebut masih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini diakibatkan karena selain adanya penambahan luas irigasi juga diakibatkan karena masih adanya saluran irigasi yang rusak sedang dan berat yang perlu direhabilitasi serta masih ada saluran tanah, Kondisi eksternal akibat banjir yang berdampak pada Sebagian infrastruktur irigasi yang menambah kerusakan sarana dan prasarana jaringan irigasi.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng adalah terkait pemulihan lahan kritis dan peningkatan luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Lahan kritis akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak terkendali yang berakibat pada rendahnya kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya frekuensi terjadinya bencana khususnya bencana banjir.

Salah satu tugas besar dari pelaksanaan urusan lingkungan hidup lain yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan, yang sampai saat ini masih fokus pada Ibu kota kecamatan di 8 Kecamatan. Kemampuan daerah untuk menangani persampahan belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta personil yang ada.

Berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Reformasi birokrasi telah dijalankan pada delapan area, namun demikian perwujudan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi masih kurang optimal. Untuk skor reformasi birokrasi kabupaten soppeng tahun 2021 yang masih CC, nilai sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) dengan skor 62 (B), indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik yang belum tinggi, meskipun pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan wajar (WTP). Akar masalahnya adalah perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas kinerja, pembinaan administrasi dan keuangan beserta pengawasannya yang belum didukung oleh tenaga APIP berkompetensi dalam jumlah cukup, terbatasnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur untuk mengoptimalkan kinerja tertentu. Selain itu, belum optimalnya penerapan e-government dalam mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan agar lebih mudah diakses oleh publik.





2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1. Bidang Pendidikan

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan adalah

- a) Pendidikan Anak Usia Dini yang masih rendah belum mencapai 100%. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebihan untuk menampung keseluruhan penduduk usia 4-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 4-6 tahun sudah terlayani oleh Lembaga PAUD. Keberadaan sebahagian PAUD swasta dipelosok-pelosok kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada Lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD Swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- b) Belum tercapainya target APM100 persen, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.
- c) Masih terdapat angka putus sekolah yang disebabkan karena Faktor ekonomi keluarga, Faktor jarak tempuh ke sekolah, masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun, serta masih kurangnya pemahaman atau kesadaran anak/orang tua/wali tentang pendidikan.
- d) Fasilitas pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2021 terealisasi sebesar 77,20% dari target 85,90%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah bertambahnya jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan masih adanya bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi.
- e) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum mencapai 100% yakni sebesar 94,44% di tahun 2021. Hal ini berdampak pada kemampuan memberikan materi , dimana Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

2.3.2.1.2. Bidang Kesehatan

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang kesehatan adalah



1. Masih adanya angka kematian bayi di Soppeng. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin belum optimal.
2. Masih adanya balita dengan gizi buruk di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2021 sebesar 0,024% yaitu termasuk kategori rendah menurut WHO (di bawah 10%) tetapi meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 0,015.
3. Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,46%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,56%. Pada tahun 2017 untuk menentukan status gizi secara manual dengan menggunakan buku standar antropometri. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

2.3.2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut adalah Identifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

1. Masih perlunya peningkatan Persentase Infrastruktur Kondisi Baik. Infrastruktur yang ditingkatkan meliputi Infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan jaringan irigasi.
2. Dari akses air minum terdapat 17.307 rumah tangga pada tahun 2021 dengan akses perpipaan dan 39.688 rumah tangga non perpipaan. Terdapatnya 5.29% akses air minum yang tidak layak. Salah satu belum terpenuhinya akses air minum dikarenakan menurunnya debit air produksi andalan (Ompo) untuk wilayah perkotaan. Selain itu karena kondisi geografis, maka beberapa area layanan tidak terlayani secara maksimal.
3. Walaupun akses sanitasi sudah mencapai 100%, tetapi berdasarkan target pembangunan sanitasi nasional dalam TPB/RPJMN 2019-2024 sebesar 90% layak (termasuk 15% Aman) dan 10% dasar pada tahun 2024. Defenisi layak dalam target Nasional adalah:
 - Perkotaan dan perdesaan: menggunakan kloset leher angsa dan menggunakan tangki septik.
 - Khusus perdesaan masih bisa menggunakan kloset leher angsa meskipun tangkinya tidak kedap air.

Sedangkan defenisi aman dalam Target Nasional diatas adalah:

- Akses layak yang sudah melakukan layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal terutama pada area perkotaan.

Berdasarkan target nasional di atas perlu dilakukan upaya kembali untuk meningkatkan kondisi sanitasi yang ada, khususnya di kawasan pedesaan.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Soppeng perlu ditinjau kembali karena RTRW yang ada tidak memuat program yang lebih detail dan tidak ada



spesifikasi program dan lokasi yang direncanakan selain itu substansi RTRW telah mengalami perubahan sehingga perda RTRW yang sekarang tidak dapat mengakomodir pertumbuhan yang ada di Soppeng. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa dikaji atau diperhitungkan kesesuaiannya dengan Perda RTRW.

5. Belum optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Soppeng yang diakibatkan karena kapasitas TPA yang terbatas dan teknologi pengolahan sampah sangat terbatas.
6. Belum optimalnya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten Soppeng dimana jalan yang memiliki drainase pada tahun 2021 masih sebesar 47,12%.

2.3.2.1.4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah

1. Belum optimalnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Soppeng.
2. Belum optimalnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
3. Masih kurangnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
4. Belum optimalnya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dimana kondisi pada tahun 2021 merupakan gambaran minimnya jumlah rumah yang dibangun terfasilitasi PSU, yakni 244 rumah dari 56.899 jumlah total rumah yang ada di Kabupaten Soppeng.

2.3.2.1.5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah

1. Belum optimanya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dimana Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran masih sebesar 94,20%.
2. Belum optimalnya tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di tahun 2021 sebesar 64,44%.
3. Belum optimalnya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Belum optimalnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
5. Masih perlunya peningkatan cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.



6. Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang diakibatkan diantaranya masih terbatasnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

2.3.2.1.6. Bidang Sosial

Berikut adalah Identifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Sosial adalah

1. Belum optimalnya pemberdayaan sosial yang diakibatkan karena Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial belum maksimal
2. Belum optimalnya rehabilitasi sosial
3. Belum maksimalnya perlindungan dan jaminan sosial

2.3.2.2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1. Bidang Tenaga Kerja

Belum optimalnya kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Soppeng. Dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 baru mencapai 58,94%.

2.3.2.2.2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana rasio KDRT di Soppeng pada tahun 2021 sebesar 0,013. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran juga belum menyeluruh pada OPD.

2.3.2.2.3. Bidang Pangan

Perlunya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan. Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Soppeng Tahun 20 mencapai 75,80%, dengan angka idealnya 100.

2.3.2.2.4. Bidang Pertanahan

Belum optimalnya penatagunaan tanah dimana yang diakibatkan oleh belum adanya Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.3.2.2.5. Bidang Lingkungan Hidup

- a) Belum maksimalnya perencanaan lingkungan hidup di Soppeng yang diakibatkan karena belum adanya Perda RPPLH dan Perbub RPPLH
- b) Belum optimalnya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena Belum terakreditasinya Laboratorium lingkungan serta masih kurang lengkapnya peralatan laboratorium lingkungan
- c) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Belum maksimalnya pengelolaan persampahan dimana timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2021 sebesar 74,06%, Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R sebesar



9,62%, Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng sebesar 27%.

2.3.2.2.6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Belum optimalnya pendaftaran penduduk dimana Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk masih sebesar 0,99.
- b) Belum optimalnya pencatatan sipil dimana Rasio Bayi Berakta Kelahiran sebesar 0,98%.

2.3.2.2.7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masih rendahnya desa berstatus swasembada dimana pada tahun 2021 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa sebesar 12,24%. Berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dan PDT, pada tahun 2021 Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng hanya satu yakni Desa Timusu.

2.3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belum efektifnya keterlibatan perangkat daerah dalam pengembangan kampung KB. Ini terkait dengan belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengendalian dan kuantitas dan kualitas penduduk.

2.3.2.2.9. Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimana Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng di tahun 2021 yang tidak dilakukan dikarenakan alat yang digunakan mengalami kerusakan, dan pengadaan alat yang baru tiba pada bulan desember dan pemasangan rambu-rambu masih sebesar 61%.

2.3.2.2.10. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi dimana Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng masih sebesar 66,15%.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah.

2.3.2.2.11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dimana pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Soppeng sebesar 90,36%.
2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM dimana pada tahun 2021 Persentase Usaha Mikro dan Kecil masih sebesar 99,16%. Hal ini diakibatkan karena Minimnya akses pasar dan ruang usaha yang layak dan sesuai standar bagi produk Koperasi dan UMKM, dan Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan asset.

2.3.2.2.12. Bidang Penanaman Modal

1. Laju Investasi di Kabupaten masih fluktuatif.



2. Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
3. Persebaran investasi yang belum merata.

2.3.2.2.13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif.
2. Capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten soppeng masih rendah
3. Perlunya peningkatan prestasi olah raga. Capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Soppeng sekitar 4 prestasi.

2.3.2.2.14. Bidang Statistik

Belum maksimalnya penyelenggaraan statistik sektoral dimana lambatnya data statistik dasar pada tahun berjalan, belum adanya sumber daya manusia yang memadai dalam bidang statistik. Selain itu masih adanya ditemukan beberapa data yang berbeda, padahal dihasilkan dari sumber data yang sama.

2.3.2.2.15. Bidang Perpustakaan

1. Masih rendahnya pengunjung perpustakaan daerah.
2. Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi).

2.3.2.2.16. Bidang Kearsipan

Perlunya peningkatan kualitas cakupan penerapan arsip di tingkat desa secara baku.

2.3.2.3. Urusan Pilihan

2.3.2.3.1. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Belum optimalnya jumlah produksi perikanan kelompok nelayan yang hanya sebesar 87,26% di tahun 2021.
2. Perlunya peningkatan konsumsi ikan. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 102,50% dari target daerah.
3. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dimana pada tahun 2021 cakupan bina kelompok nelayan sebesar 10%.

2.3.2.3.2. Bidang Pariwisata

1. Belum optimalnya pengembangan terutama dalam hal destinasi wisata, pengembangan sarana prasarana kepariwisataan, untuk meningkatkan daya tarik pengunjung baik dalam daerah maun di luar daerah.
2. Masih rendahnya rata-rata waktu kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada stagnannya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan.
3. Penurunan fungsi objek wisata, khususnya objek wisata alam, terkadang berbagi fungsi dengan kepentingan lainnya, dan juga berdampak pada pendeknya waktu kunjungan wisatawan rata-rata hanya dua malam.

2.3.2.3.3. Bidang Pertanian

1. Perlunya peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan.
2. Belum optimalnya pemasaran produk pertanian.
3. Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian khususnya infrastruktur irigasi tersier.
4. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

2.3.2.3.4. Bidang Perdagangan

1. Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan dimana masih ada sarana dan prasarana perdagangan yang harus direvitalisasi.
2. Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/ toko modern.
3. Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar.
4. Belum optimalnya informasi harga pasar.

2.3.2.3.5. Bidang Perindustrian

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
2. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM dalam Inovasi dan update teknologi industri
3. Belum adanya keserasian dan sinergitas program antar perangkat daerah yang terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina.
4. Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal.
5. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.
6. Belum adanya ikon produk industri yang identik dan menjadi ciri khas Kabupaten Soppeng.
7. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM.
8. Belum maksimalnya penataan sentra industri.
9. Kurangnya tenaga penyuluh industri.

2.3.2.4. Fungsi Penunjang urusan

2.3.2.4.1. Bidang Perencanaan

1. Perlunya mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
2. Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

2.3.2.4.2. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan;
2. Belum optimalnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah serta masih rendahnya jumlah inovasi yang diajukan oleh perangkat daerah.

2.3.2.4.3. Bidang Kepegawaian

Rasio ASN di Kabupaten Soppeng yang mengikuti diklat masih rendah;

2.3.2.4.4. Bidang Keuangan

1. Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dibidang pendapatan yang belum memadai.

2.3.2.4.5. Bidang Pengawasan

Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan dimana persentase tindak lanjut temuan sebesar 59,54% dan temuan BPK yang ditindaklanjuti sebesar 12 temuan.

2.4. Isu Strategis

1) Identifikasi Isu Strategis dari Level Global

✓ Pemulihan kondisi dari dampak pandemik Covid-19

Pandemik Covid-19 merupakan masalah global, nasional hingga daerah yang mempengaruhi perekonomian global, pergerakan manusia dan barang antar negara, selain masalah kesehatan itu sendiri. Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang terpapar, telah berupaya optimal dalam penanganan pandemic Covid-19 dari sisi pelayanan kesehatan, khususnya dalam bentuk berfungsinya laboratorium uji swab sehingga menjadi rujukan bagi daerah lain. Selain itu, dengan fasilitas uji swab tersebut pemerintah daerah lebih mudah melakukan identifikasi dan tracing bila ada warga terpapar, selain terus menegakkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan. Dalam pembangunan Kabupaten Soppeng TAHUN 2022, dampak Covid-19 merupakan faktor yang penting diperhatikan pengaruhnya. Selain terhadap kesehatan masyarakat melalui upaya penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi, upaya strategis juga diperlukan untuk pemenuhan berbagai aspek kehidupan seperti stagnasi pertumbuhan UMKM, kemunduran pariwisata, stagnasi bisnis transportasi dan penginapan/perhotelan, dan sebagainya. Isu strategis terkait Covid-19 lebih kepada upaya pemulihan pada berbagai aspek kehidupan yang terdampak negative oleh pandemic Covid-19.

✓ Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim kemungkinan akan semakin signifikan. Lembaga internasional seperti FAO, lembaga nasional dalam bidang klimatologi, serta beberapa ahli, memprediksi akan terjadinya fenomena kekeringan yang ekstrim secara bergantian dengan fenomena hujan lebat. Kabupaten Soppeng yang mengandalkan perekonomian dan sumber nafkah masyarakatnya dari pertanian akan terdampak dengan perubahan iklim tersebut tidak hanya terhadap produksi pertanian tetapi juga dengan dampak bencana yang menyertainya. Tantangan bukan hanya pada diperlukannya tindakan pengurangan efek rumah kaca pada berbagai sektor



pembangunan, tetapi terutama pada tindakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada pertanian, peternakan, dan perikanan.

✓ **Revolusi Industri 4.0**

Bila pandemic Covid-19 telah berakhir, kemungkinan pengaruh revolusi industri 4.0 kembali signifikan terhadap perekonomian dan aspek kehidupan lainnya. Pada dunia bisnis, perkembangan bisnis berbasis aplikasi internet akan mendorong lahirnya start-up UMKM, industri kreatif, serta tergusurnya sejumlah model bisnis dan digantikan oleh model bisnis baru berbasis elektornik tersebut. Dunia birokrasi akan terpengaruh dengan semakin diterapkan sejumlah aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis elsktornik sehingga transparansi akan semakin terbuka dan dengan itu kontrol masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan semakin terfasilitasi. Isu strategis lain terkait revolusi industri 4.0 adalah semakin dituntutnya inovasi dalam pelayanan public, penyelenggaraan pemerintahan, ataupun pengembangan ekonomi masyarakat.

✓ **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global yang dipatuhi oleh semua negara di bawah arahan PBB. Di dalamnya termuat 17 tujuan dan 169 target/indikator. TPB tersebut mencakup: 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua; 7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan; 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan; 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi; 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara; 11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12. Memastikan penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16. Meningkatkan



masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah lima tahun 2022 di Kabupaten Soppeng, indikator dan target dari TPB akan diintegrasikan dengan indikator dan target lainnya.

2) Identifikasi Isu Strategis dari Level Nasional

✓ Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 memuat visi dan misi, agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

✓ Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah No.2/2018 dan Permendagri 100/2019 mengamanahkan seluruh daerah untuk menyelenggarakan SPM pada sejumlah urusan yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sejumlah indikator untuk masing-masing SPM telah ditetapkan dan targetnya adalah 100%. Kabupaten Soppeng konsisten akan memenuhi target SPM tersebut.

3) Identifikasi Isu Strategis Provinsi

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memuat beberapa kebijakan/program nyata Gubernur yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah yakni:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
3. Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi
4. Hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam
5. Pembangunan rest-area
6. Pembangunan rumah sakit regional bertaraf internasional.

Dari berbagai kebijakan tersebut, yang relevan sebagai isu strategis Kabupaten Soppeng adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk koneksi antar wilayah dan memperlancar pelayanan. Selain itu, hilirisasi pengelolaan produk sumberdaya alam relevan sebagai isu strategis, khususnya pengembangan industri pengolahan beras dan bisnis kuliner berbahan baku beras seperti tape beras, kue bolu dan sebagainya.

4) Identifikasi Isu Strategis dari Masalah Pembangunan Daerah

Dari masalah pembangunan daerah yang telah dipaparkan pada bab 2 sebelumnya, faktor yang dianggap penting dalam mempengaruhi pembangunan tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Pembangunan infrastruktur daerah
5. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah



6. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik
7. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis dari level global, nasional, provinsi dan masalah pembangunan daerah, maka isu strategis yang dianggap relevan untuk pembangunan Kabupaten Soppeng lima tahun kedepan adalah:

1. Pemulihan kondisi dari dampak Covid-19;
2. Pengembangan inovasi dalam merespons revolusi industri 4.0;
3. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
4. Pengurangan kesenjangan dan pemerataan pembangunan;
5. Revolusi mental;
6. Pembangunan kebudayaan;
7. Pembangunan infrastruktur;
8. Hilirisasi pengelolaan produksi sumberdaya alam;
9. Peningkatan kualitas hidup manusia;
10. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
11. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
12. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah untuk daya saing daerah;
13. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik;
14. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam;
15. Pembangunan pertanian;
16. Pengembangan UMKM;
17. Penguatan kapasitas desa;
18. Pengembangan pariwisata.

2.5. Inovasi Daerah

Dalam mempercepat dan mendukung tujuan pembangunan daerah, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh SKPD di Kabupaten Soppeng. Pada dokumen RKPD ini, terdapat Tiga Inovasi Daerah tahun 2021 yang merupakan *Top Three* inovasi daerah di Kabupaten Soppeng.

1. Legenda Dukcapil (Layanan Pengambilan Golongan Darah sebagai elemen data kependudukan dan Pencatatan Sipil)

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng yang belum memiliki golongan darah di KTP-el pada tahun 2019 sebanyak 193.100 jiwa. Sementara 92 % (178.080 jiwa) diantaranya merupakan wajib KTP-el. Selama ini proses pengurusan KTP-el terpisah dengan proses pengurusan golongan darah. Akibatnya masyarakat menghabiskan waktunya diperjalanan dari Labkesda ke Dukcapil, belum lagi waktu yang dihabiskan untuk menunggu antrian. Biasanya, Proses pengurusan pengambilan golongan darah membutuhkan waktu sekitar 1 -2 jam. Biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk pengurusannya kurang lebih Rp. 50.000. Selain itu masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk mengetahui golongan darahnya pada saat pengurusan KTP-el. Dengan permasalahan tersebut maka Dukcapil membuat terobosan berupa Inovasi Layanan Pengambilan Golongan Darah sebagai elemen

data kependudukan dan Pencatatan Sipil (LAGENDA DUKCAPIL). Inovasi ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan/Laboratorium kesehatan daerah. Inovasi LAGENDA DUKCAPIL bertujuan untuk :

- 1) Mengefektifkan waktu pengurusan dokumen kependudukan bersamaan dengan golongan darah,
- 2) Mengefisienkan biaya pengurusan dan
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengurus golongan darahnya.

1.2. Deskripsi inovasi

Inovasi LAGENDA DUKCAPIL Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng bekerjasama dengan Labkesda dalam proses pengurusan dokumen kependudukan dan golongan darah. Layanan dilakukan secara terpadu dalam waktu yang bersamaan dengan menggunakan SOP. Alasan memilih layanan ini karena Dukcapil tidak dapat mencapai target layanan secara regular disebabkan karena keterlambatan dokumen pendukung (kartu golongan darah) yang harus diurus secara terpisah.

Pendekatan pelayanan terpadu dengan komitmen melalui Perjanjian Kerja sama untuk mempercepat proses penyelesaian pengurusan KTP-el. Petugas Labkesda menempatkan tenaga kesehatan di Kantor Dukcapil untuk melayani secara langsung pengambilan golongan darah bagi setiap pemohon KTP-el. Inovasi ini memberikan kemudahan layanan karena masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan mengeluarkan biaya untuk mengurus secara terpisah.

1.3. Strategi keberlanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan inovasi LAGENDA DUKCAPIL setiap tahun Disdukcapil Soppeng menerbitkan SK Pembentukan Tim Fasilitasi Pengambilan Golongandarah Strategi Institusional berupa regulasi :

- SK Tahun 2019 Nomor : 38.a/Dukcapil/X/2019 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengambilan Golongan darah
- SK Tahun 2020 Nomor : 21.a/Dukcapil/III/2020 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengambilan Golongan darah
- SK Tahun 2021 Nomor : 19/Dukcapil/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengambilan Golongan darah
- PKS Tahun 2019 Nomor : 456/Dukcapil/VIII/2019 dan Nomor: 2582-PKS/KES/VIII/2019 Tentang Penempatan Tenaga Kesehatan untuk Pengambilan Golongandarah pada Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng
- PKS Tahun 2020 Nomor : 337/Dukcapil/IX/2020 dan Nomor: 2263/DK/IX/2020 Tentang Penempatan Tenaga Kesehatan untuk Pengambilan Golongandarah pada Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng
- PKS Tahun 2021 Nomor : 32/Disdukcapil/I/2021 dan Nomor: 378-PKS/KES/I/2021 Tentang Penempatan Tenaga Kesehatan untuk Pengambilan Golongandarah pada Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng





- Strategi sosial berupa Kerjasama dengan Labkesda dalam hal penyediaan alat tes golongan darah serta petugas tes golongan darah
- Strategi manajerial dilakukan antara lain peningkatan kapasitas kepada operator SIAK

1.4. Inovatif

Proses pengurusan dokumen kependudukan dan golongan darah dilakukan secara terpisah sehingga membutuhkan waktu dan biaya. Oleh karena itu melalui Inovasi LAGENDA DUKCAPIL masyarakat yang belum mengetahui golongan darahnya dapat terfasilitasi secara efektif dengan bekerjasama dengan Labkesda. Proses pengurusannya lebih cepat dan efisien. Adapun keunikan dari inovasi ini adalah

- Mengefektifkan waktu pengurusan KTP-el dan golongan darah yang semula 1-2 jam menjadi 5-10 menit
- Mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat selama proses pengurusan KTP-el dan Golongan Darah antara Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 menjadi Rp. 20.000
- Pelayanan Terpadu melalui Kolaborasi antara Dinas Dukcapil dengan Labkesda melalui penandatanganan PKS

1.5. Evaluasi

Secara internal evaluasi dilakukan melalui pertemuan bulanan dengan Tim Administrasi kependudukan dalam rangka mengetahui target capaian inovasi LAGENDA DUKCAPIL. Dan Evaluasi akhir tahun, khusus evaluasi Layanan Golongan darah hasilnya adalah meningkatnya kepemilikan golongan darah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa target cakupan kepemilikan KTP-el dan Golongan darah mencapai 95 % di Kabupaten Soppeng. Dengan demikian maka target kinerja pelayanan Dukcapil untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el dan golongan darah dapat dicapai.

Variabel	Sebelum	Sesudah		
	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk	236.156	237.115	239.391	237.875
	LK=113.525	LK=113.993	LK=115.590	LK=114.684
	PR=122.631	PR=123.122	PR=123.801	PR=123.191
Kepemilikan Golongan Darah di KTP-el	29.953 jiwa	38.254 jiwa	56.117 jiwa	67.748 jiwa
	LK=15.508	LK=19802	LK=29.274	LK=34.502
	PR=14.445	PR=18.452	PR=26.843	PR=33.246
Efisiensi :				
Waktu pengurusan	1-2 jam	5-10 menit		
Biaya	Rp.50.000 s/d Rp.100.000	Rp. 20.000		
Tingkat kepastian	Tidak Ada Kepastian	Ada kepastian ,Terfasilitasi melakukan tes golongan darah disatu tempat bersamaan dengan pengurusan dokumen kependudukan		



2. Mobile Class Mario

2.1. Latar belakang dan Tujuan

Inovasi ini berawal dari tingginya pengguna elektronik dikalangan siswa baik dalam berinteraksi sosial maupun dalam mengisi waktu luang setelah jam pelajaran di sekolah. Akan tetapi, kondisi ini mengakibatkan tingginya keresahan orang tua siswa yang melihat anak-anaknya cenderung menggunakan selulernya untuk mengakses konten non pelajaran. Selain itu, dengan munculnya wabah Covid-19 kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng mulai menurun. Ketuntasan belajar siswa di SD Negeri 135 Salebbo Mario hanya mencapai 65%. Hal ini disebabkan karena interaksi antara guru dengan siswa yang terbatas. Proses pembelajaran hanya memanfaatkan media *WhatsApp* saja.

Awalnya inovasi ini dikembangkan sebagai sumber belajar siswa setelah pulang dari sekolah. Akan tetapi seiring dengan munculnya Covid-19 maka inovasi ini dikembangkan menyesuaikan sisten Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Inovasi ini mendesain kelas digital dengan sumber belajar yang dibuhkan dan memudahkan siswa untuk berinteraksi baik dengan guru maupun sesama siswa.

Tujuan inovasi ini adalah untuk menjaga kualitas Pendidikan di masa Covid-19; meningkatkan literasi ICT guru, siswa dan orang tua; memfasilitasi siswa untuk belajar dimana saja dan kapan saja; dan menghasilkan produk berupa aplikasi pembelajaran yang adaptif. Populasi yang mendapatkan manfaat dari inovasi ini adalah guru, siswa dan orang tua siswa di Wilayah I Kec. Marioriwawo yang terdiri atas 221 siswa dan 17 guru.

2.2. Deskripsi Inovasi

Di masa awal munculnya pandemi Covid-19 dan dengan penerapan sistem BDR, kondisi Pendidikan di Kabupaten Soppeng cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pelaku pendidikan menyesuaikan diri dengan sistem yang diterapkan. Salah satu solusi yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan teknologi digital dengan asumsi proses layanan Pendidikan tetap berjalan secara normal dengan tetap memitigasi penyebaran Covid-19. Mobile Class MARIO dikembangkan dalam 6 menu utama, yaitu:

1. Menu Absen, yang digunakan siswa mengumpulkan data kehadiran setiap hari dan aktivitas di rumahnya yang terdeteksi oleh GPS;
2. Menu Materi Pelajaran yang digunakan siswa mempelajari materi pelajaran berupa ringkasan materi, video pembelajaran, gambar, game/permainan, bahan latihan dan Media 3 Dimensi;
3. Menu Tugas yang dimanfaatkan siswa untuk melihat dan mengumpulkan tugas setiap hari;
4. Menu Meeting yang digunakan guru untuk mengajar secara virtual dan ruang untuk berdiskusi kelompok;
5. Menu Perpustakaan yang dimanfaatkan siswa mempelajari berbagai buku elektronik;
6. Menu Kalkulator yang membantu siswa mengatasi perhitungan.

2.3. Inovatif

Kebaruan dari inovasi ini adalah menggunakan sistem *e-learning* yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi lingkungan dan perkembangan zaman saat ini. Selain itu, yang menjadi nilai tambah adalah mendukung percepatan sistem Digitaslisasi sekolah yang menjadi fokus utama dari Kemdikbudristek saat ini. Inovasi ini membuka ruang bagi siswa untuk belajar dimana saja dan kapan saja sehingga siswa mengatasi masalah yang dihadapinya dengan cepat. Hal yang berbeda dengan inovasi sebelumnya dan yang menjadi keunggulan dari inovasi ini adalah dapat digunakan baik pada Android, Tablet maupun komputer baik secara *online* maupun *offline*. Guru dan orang tua siswa dapat menggunakannya dengan kemampuan IT yang pas-pasan.

2.4. Strategi Keberlanjutan

Program ini telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Diluncurkan di 5 sekolah dasar pada kelas 4, 5, dan 6, dan inovasi ini direplikasi pada 5 sekolah dasar pada kelas yang sama yaitu kelas 4, 5, dan 6 sebagai program resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng sejak tahun 2010 dan akan terus berlanjut baik dimasa normal baru, sejalan dengan tujuan SDG's /TPB. Untuk menjaga kelangsungan inovasi ini, telah disusun beberapa peraturan:

1. SK Bupati Soppeng Nomor: 260/IV/2022 tentang Inovasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang Diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2022;
2. SK Bupati Soppeng Nomor: 456/XI/2021 tentang TOP Five Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021;
3. Strategi institusional berupa SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 269/SK/Dikbud/I/2019 tentang Tim Inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2019;
4. Nota Kesepakatan berupa Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Komunitas Guru Hidup, Nomor : 016/Um-KGH/IV/2022 dan Nomor: 421 /871/ Dikbud /IV/2022;
5. Strategi publikasi secara masif berupa website yaitu <https://mobileclassmario.kgh.or.id/>;
6. Strategi sosial berupa sosialisasi awal kepada stakeholder Sekolah Dasar, yang selanjutnya pada orang tua siswa melalui Komite Sekolah;
7. Strategi manajerial berupa peningkatan SDM dengan melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi mengoperasikan aplikasi.

Inovasi ini diperkenalkan di 10 Sekolah dasar inti pada tahun 2020 dan 2021. Sejak 2022, Mobile Class MARIO telah diadopsi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang siap untuk di publikasikan secara masif, sehingga lebih dari 200 sekolah dasar di Kabupaten Soppeng menerima akses yang mudah untuk direplikasi. Inisiatif ini akan terus berlanjut dalam jangka panjang melalui kerjasama yang berkelanjutan antara pihak dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan komunitas dan swasta.



2.5. Evaluasi

Bentuk penilaian yang dilakukan sebagai tolak ukur dari dampak inovasi ini adalah evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah untuk melihat keaktifan dan kemajuan belajar siswa. Pengawas Kepala Sekolah dan Tim Inovasi melakukan pemantauan secara langsung untuk melihat penggunaan aplikasi tersebut dan meminta laporan apakah terdapat hambatan dalam penerapannya. Sedangkan evaluasi eksternal diukur dari umpan balik yang masuk berupa survei dan wawancara dengan peserta didik sebagai pengguna dan orang tua sebagai penerima manfaat. Selain itu, tim inovasi melakukan koordinasi dengan komite sekolah tentang kondisi dilingkungan masyarakat apakah terdapat kesenjangan dari penggunaan aplikasi tersebut. Metode pelaksanaan evaluasi inovasi yang digunakan adalah survei, observasi dan kunjungan secara langsung setiap bulan sekaligus memantau sejauh mana perkembangan yang dialami oleh peserta didik di masa BDR. Indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan adalah survei tingkat keaktifan minimal 90%, kepuasan pengguna dengan klasifikasi minimal baik dan 85% peserta didik mengalami ketuntasan belajar. Hasil evaluasi dari penggunaan Mobile Class MARIO diperoleh data bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 65% menjadi 99%.

Berdasarkan angket yang dibagikan ke siswa untuk mengukur tingkat kepuasan dalam penggunaan Mobile Class MARIO, kepuasan pengguna sebesar 91% dan ketidakpuasan sebesar 9%. Sedangkan data keaktifan siswa mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 100%. Data tersebut dari keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran virtual, diskusi kelompok, dan hasil tugas yang dikumpulkan. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi maka dilakukan pembenahan dan perbaikan baik dari isi materi dan kendala yang dialami pengguna. Demikian pula data peningkatan literasi ICT guru sebelum penerapan inovasi sebesar 82% dan setelah inovasi ini diterapkan mencapai 93%.

3. Pabeta (Pengembangan Ayam Buras Berbasis Rumah Tangga)

3.1. Latar Belakang dan Tujuan

Inovasi PABETA sejalan dengan Tujuan Pembangunan Peternakan sebagai bagian integral Pembangunan Pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak, meningkatkan ketersediaan pangan protein hewani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah :

- Ayam buras dipelihara secara tradisional atau sub sistem dengan menganggapnya sebagai usaha sampingan dan pasrah dengan hasil yang diterimanya.
- Tidak menerapkan sapta usaha ternak berupa pemilihan bibit, reproduksi, perkandangan, pengendalian penyakit, pemberian pakan, tatalaksana dan pasca panen.
- Kematian atau mortalitas ayam buras mencapai 80 % dan pada umumnya terindikasi penyakit ND atau tetelo.
- Keterbatasan sumber daya pemerintah untuk menjangkau secara keseluruhan Rumah Tangga Peternak (RTP)

Berdasarkan masalah tersebut serta untuk mencapai tujuan pembangunan peternakan, maka lahirlah inovasi PABETA yang merupakan singkatan dari Pengembangan Ayam Buras Berbasis Rumah Tangga, juga mengandung pengertian dalam bahasa daerah bugis yaitu **“menang atau juara”**. PABETA diharapkan merupakan akronim yang menjadi motivasi semua pihak baik masyarakat peternak, pengusaha maupun pemerintah yang terlibat dalam kegiatan ini untuk sukses mencapai harapan yang diinginkan dalam kondisi serba tidak menentu dan bisa saja melumpuhkan perekonomian dan pendapatan masyarakat.

PABETA bertujuan:

- Menerapkan sapta usaha ternak berupa pemilihan bibit, reproduksi, perkandangan, pengendalian penyakit, pemberian pakan, tatalaksana dan pasca panen dalam pemeliharaan ternak ayam buras di tingkat masyarakat
- Mengurangi kematian atau mortalitas ayam buras karena penyakit ND atau Tetelo
- Menjadikan usaha ayam buras sebagai usaha pokok atau paling tidak menerapkan prinsip agribisnis.

3.2. Deskripsi Inovasi

Tahapan awal inovasi dimulai dengan perencanaan melalui diskusi dan rapat serta berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya pembentukan Tim Inovasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Nomor 46/DPKHP/III/2020 tanggal 16 Maret 2020. Pelaksanaan Inovasi PABETA :

1) Memilih kader

Kader adalah masyarakat peternak yang memiliki keterampilan, siap membantu pelaksanaan PABETA. Kader direkrut satu orang setiap desa/kelurahan selanjutnya berkembang sesuai kondisi wilayahnya.

2) Coaching kader

Coaching adalah metode pelatihan singkat **“head to head”** antara kader dengan petugas peternakan. Coaching ini meliputi pemahaman konsep PABETA, sapta usaha ternak khususnya teknik vaksinasi.

3) Persiapan lapangan

- Melakukan pendataan
- Menyepakati jadwal vaksinasi
- Memberikan informasi/laporan kepada DPKHP

4) Vaksinasi awal

- Vaksinasi awal, kader didampingi petugas
- Vaksinasi dilakukan dari rumah ke rumah

5) Vaksinasi massal dan edukasi sapta usaha

- Vaksinasi secara serempak dilakukan kader dari rumah ke rumah dibantu peternak binaannya
- Vaksin dan spuit disiapkan secara gratis oleh DPKHP, penyimpanan/penggunaannya diserahkan kepada kader.
- Syarat vaksinasi, peternak mengundang ternaknya, memisahkan anak dengan induk menggunakan kandang/brooder.

- vaksinasi setiap 3-4 bulan mempersyaratkan penerapan sapta usaha tani.
- Edukasi sapta usaha tani pada saat vaksinasi

6) Bantuan mesin tetas

Untuk pengembangan ayam buras, pemerintah memberikan bantuan mesin tetas kapasitas 100-200 butir dengan target keberhasilan 100%.

3.3. Inovatif

Keunikan inovasi ini adalah dalam pelaksanaan Vaksinasi ND terhadap ayam buras awalnya hanya dilakukan oleh petugas teknis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, setelah adanya Inovasi PABETA, kader PABETA mampu melakukan vaksinasi sendiri ayam peliharaannya. Serta dari segi budidaya ayam buras awalnya hanya melakukan penetasan secara alami yaitu ditetaskan oleh induknya dengan jumlah telur yang ditetaskan terbatas 10-15 butir, setelah adanya inovasi PABETA, kader mampu mengoperasikan mesin penetas dengan kapasitas 100 - 200 butir telur. Keunikan lainnya adalah melalui inovasi ini jangkauan vaksinasi lebih luas sehingga dapat menurunkan tingkat kematian ayam buras akibat penyakit ND.

3.4. Strategi Keberlanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan inovasi PABETA diterbitkan SK Pembentukan Tim PABETA (Pengembangan Ayam Buras Berbasis Rumah Tangga):

Strategi Institusional berupa regulasi :

- SK Tahun 2020 Nomor:45/DPKHP/III/2020 Tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
- SK Tahun 2020 Nomor: 46/DPKHP/III/2020 Tentang Pembentukan Tim Inovasi Pengembangan Ayam Buras Berbasis Rumah Tangga (PABETA) pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
- SK Tahun 2020 Nomor: 60/SK-DPKHP/VI/2020 Tentang Penetapan Tenaga Vaksinator Kader Program Kegiatan Inovasi Pengembangan Ayam Buras Berbasis Rumah Tangga (PABETA) Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2020
- Membuat group WA yang beranggotakan tim Inovasi, tenaga teknis dan kader PABETA untuk memantau kerja dan pengembangan PABETA

3.5. Evaluasi

Evaluasi Internal dan Eksternal

Evaluasi secara internal :

- Melakukan pertemuan rutin setiap bulan antara Tim Inovasi Pabeta dan Petugas Teknis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.
- Melakukan kunjungan langsung ke lokasi kader PABETA untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan inovasi.

Evaluasi secara eksternal :

Evaluasi secara eksternal dilakukan setiap bulan oleh Tim Inovasi





Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dengan agenda melihat secara langsung kegiatan yang telah dilaksanakan kader Vaksinator, termasuk keberhasilan dan hambatan yang terjadi.

Metode Pelaksanaan

Evaluasi Internal

- Melakukan rapat pengendalian kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dalam rangka mengetahui perkembangan program sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan upaya pemecahannya.
- Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kader.

Evaluasi eksternal :

Melakukan kunjungan langsung ke lokasi kader PABETA dan melakukan evaluasi dengan membagikan blanko evaluasi perkembangan ayam buras setelah adanya PABETA.

Output: Adapun Output dari inovasi ini terlihat pada tabel berikut:

No.	Tolak Ukur	Sebelum 2020	Setelah 2020
1	Jumlah ayam tervaksin ND yang difasilitasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	2.500 dosis	500.000 dosis
2	Tingkat mortalitas ayam buras karena penyakit ND	> 70%	< 50%
3	Motivasi masyarakat untuk memelihara ayam	Rendah	Meningkat
4	Jumlah persentase pertambahan populasi	< 50%	> 50%

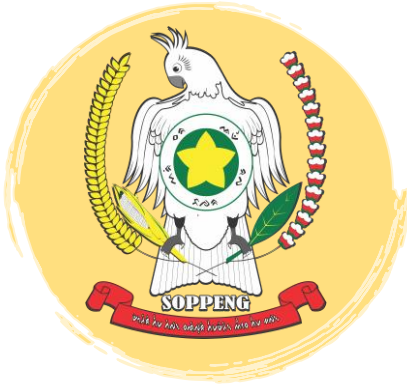
Outcome:

- Berkurangnya kematian yang dibarengi dengan meningkatnya populasi
- Peningkatan Konsumsi telur dan daging ayam buras karena ketersediaan yang meningkat

Adapun tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi adalah :

- Meningkatkan bimbingan, pengawasan dan motivasi terhadap kader PABETA
- Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi pada ayam buras peliharaan
- Membuat perencanaan untuk meyakinkan penyediaan anggaran yang lebih memadai





BAB III

KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH

"Pada Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah "

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Soppeng Tahun 2023 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kab. Soppeng serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2023.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun Pemulihan Ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan demikian pembangunan nasional tahun ini mengambil tema Peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada capaian 5,3–5,9 persen pada tahun 2023 (Tabel 3.9). Sementara itu perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi. Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan ekonomi 4,71 – 6,18 persen; Tingkat Kemiskinan 8,26 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 persen; Indeks Pembangunan Manusia 73,05; Gini Rasio 0,376 dan PDRB Perkapita (adhb) Rp65,98 Juta.

Kondisi prediktif ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi selatan maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Soppeng untuk tahun 2023 dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi nasional disamping itu juga tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022.

Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada melambatnya kondisi ekonomi di Kab. Soppeng hingga tahun 2021. Implikasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah merenggut korban jiwa serta kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi



tersebut tentunya mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 diprediksi membaik akibat adanya penanganan kesehatan misalnya diadakannya vaksinasi pada tahun 2021 sampai tahun 2022, sehingga perekonomian Kab. Soppeng diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha khususnya sector industry pengolahan dan sector perdagangan yang mulai mengalami peningkatan pada tahun 2021. Untuk sector industry Pertumbuhan kategori industri pengolahan pada tahun 2023 bergerak naik atas **terkendalinya Covid-19 dengan percepatan vaksinasi**. Hal ini akan menyebabkan peningkatan omzet terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar. Sementara itu Aktivitas ekonomi yang berangsur pulih pada tahun 2023 akan menyebabkan dampak daya beli masyarakat yang akan ikut membaik sehingga sektor perdagangan diprediksi akan tumbuh. Selain itu pada tahun 2023 sector pertanian, kehutanan dan kehutanan diprediksi akan tumbuh dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini akan dilakukan melalui Penguatan akses petani ke input produksi, pengawalan dan pendampingan lapangan. Dengan semakin berkurangnya dampak Covid 19 pada tahun 2023 rantai pasok dan sistem distribusi pangan, daya beli konsumen, ketidakstabilan harga, serta penurunan akses pasar akan lebih baik lagi di tahun 2023. Pertumbuhan kategori konstruksi Kabupaten Soppeng tahun 2023 diprediksi akan tumbuh positif. Hal ini disebabkan karena jumlah proyek konstruksi yang ada di tahun 2023 akan meningkat seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah yang bersumber dari belanja negara dan belanja daerah Hal-hal tersebut menjadi dasar pemulihan ekonomi sebagai salah satu kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kab. Soppeng tahun 2023.

3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2021

Kondisi pembangunan ekonomi di Kab. Soppeng di tahun 2021 membahas gambaran mengenai capaian indikator makro tahun 2021, gambaran dampak COVID-19 pada sektor ekonomi serta dampak COVID-19 terhadap perubahan anggaran atau refocusing APBD Tahun 2021. Gambaran indikator makro Kab. Soppeng yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan diuraikan sebagai berikut.

3.1.1.1. Pertumbuhan PDRB

3.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB





dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2021 Perekonomian Kabupaten Soppeng tetap menunjukkan laju perkembangan yang positif, meskipun ditengah kondisi bencana akibat Covid 19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi global, nasional dan daerah. Hal ini tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2021 yang sebesar Rp12.426.781,61 juta rupiah, dimana pada tahun 2020 sebesar Rp11.382.122,02 juta rupiah. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar di tahun 2021 sebesar Rp3.564.663,27 juta rupiah. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah pandemic Covid-19. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 terangkum dalam berikut:

Tabel 3. 1. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2017–2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,731,526.10	3,057,935.70	3,138,491.00	3,336,193.48	3,564,663.27
B	Pertambangan dan Penggalian	384,274.80	432,920.40	477,330.90	506,494.11	534,199.73
C	Industri Pengolahan	936,725.30	1,048,113.00	1,150,263.20	1,130,157.01	1,255,899.87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,449.30	8,125.20	8,682.00	9,068.90	9,885.39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,050.10	4,461.90	4,717.80	4,975.43	5,323.48
F	Konstruksi	1,098,866.00	1,290,274.60	1,468,400.10	1,537,616.97	1,761,452.76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,101,069.00	1,276,053.60	1,458,273.20	1,414,753.16	1,573,576.14
H	Transportasi dan Pergudangan	273,810.80	303,263.30	335,477.30	324,709.77	374,609.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,377.60	147,031.70	167,153.60	163,898.42	186,672.23
J	Informasi dan Komunikasi	261,882.20	299,074.30	332,939.00	369,116.18	415,216.70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	295,267.60	324,413.00	352,304.60	384,579.91	416,535.69
L	Real Estate	483,696.50	527,386.20	568,306.40	592,730.77	617,441.72
M,N	Jasa Perusahaan	17,835.60	19,750.50	22,149.90	21,350.43	24,001.83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561,179.30	607,050.80	685,513.70	722,368.41	731,851.14





Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	379,408.50	418,110.50	488,576.70	562,871.42	624,505.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,963.10	167,871.50	192,962.00	218,892.78	242,112.08
R,S, T,U	Jasa lainnya	64,825.10	74,102.00	85,846.60	82,344.87	88,833.80
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,876,207.00	10,005,938.30	10,937,388.00	11,382,122.02	12,426,781.61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp7.585.976,28 juta rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp7.146.654,36 juta rupiah.

Tabel 3. 2. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah), 2017 – 2021

Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,757,019.70	1,896,925.70	1,946,887.40	1,995,488.51	2,017,695.33
B	Pertambangan dan Penggalian	189,228.40	207,354.40	228,338.70	237,152.57	246,968.79
C	Industri Pengolahan	621,778.80	657,200.80	710,969.20	691,955.40	753,015.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,615.90	8,068.70	8,627.30	9,141.62	9,758.18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,391.50	3,712.90	3,915.30	4,129.08	4,377.65
F	Konstruksi	728,663.30	793,817.00	876,612.10	916,147.34	1,007,670.46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	860,583.90	943,562.00	1,047,940.10	1,005,657.51	1,092,249.23
H	Transportasi dan Pergudangan	172,636.30	190,016.30	209,471.00	196,819.02	216,796.66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95,683.30	107,252.30	120,543.40	117,067.77	131,956.60
J	Informasi dan Komunikasi	225,201.30	245,823.90	273,085.80	305,146.03	341,946.64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	174,714.40	185,203.20	196,578.50	213,335.14	222,314.13
L	Real Estate	290,107.20	306,756.60	324,701.80	337,560.00	351,632.88
M,N	Jasa Perusahaan	13,248.40	14,568.10	16,045.40	15,183.72	16,747.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	369,224.50	385,072.20	423,603.10	438,879.32	440,345.97





Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	342,203.40	376,713.30	415,966.80	461,390.37	511,912.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,580.00	124,167.00	136,049.70	150,430.20	166,014.76
R,S, T,U	Jasa lainnya	42,575.30	48,178.00	54,177.60	51,170.75	54,573.62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,007,455.72	6,494,392.43	6,993,513.10	7,146,654.36	7,585,976.28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2021 sebesar Rp2.017.695,33 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.092.249,23 juta rupiah dan Konstruksi sebesar Rp1.007.670,46 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ditengah pandemik Covid-19, tetapi sektor utama perekonomian di Kab. Soppeng pada tahun 2021 tetap memberikan kontribusi yang cukup.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

3.1.1.1.2. *Distribusi Sektoral*

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2017-2021 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2021 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,69%. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2021 yaitu konstruksi sebesar 14,17%.

Tabel 3. 3. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2021 (Persen)

Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.77	30.56	28.7	29.31	28.69
B	Pertambangan dan Penggalian	4.33	4.33	4.36	4.45	4.3
C	Industri Pengolahan	10.55	10.47	10.52	9.93	10.11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08





Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
F	Konstruksi	12.38	12.9	13.43	13.51	14.17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.4	12.75	13.33	12.43	12.66
H	Transportasi dan Pergudangan	3.08	3.03	3.07	2.85	3.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.45	1.47	1.53	1.44	1.50
J	Informasi dan Komunikasi	2.95	2.99	3.04	3.24	3.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.33	3.24	3.22	3.38	3.35
L	Real Estate	5.45	5.27	5.2	5.21	4.97
M,N	Jasa Perusahaan	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.32	6.07	6.27	6.35	5.89
P	Jasa Pendidikan	4.27	4.18	4.47	4.95	5.03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.64	1.68	1.76	1.92	1.95
R,S, T,U	Jasa lainnya	0.73	0.74	0.78	0.72	0.71
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , 2022

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Sulawesi Selatan.

3.1.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

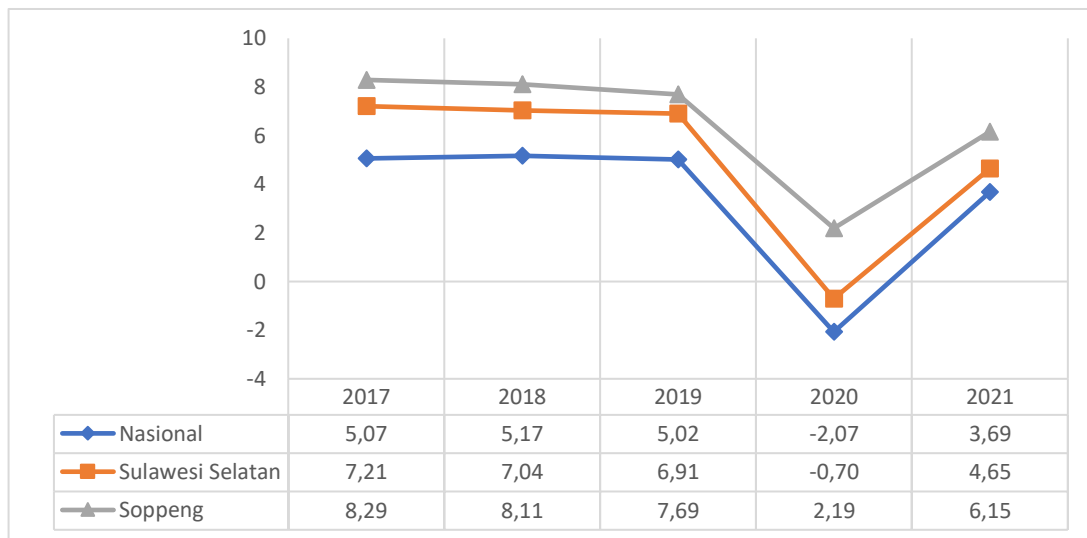
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.





Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-sel dan Nasional Tahun 2017-2021

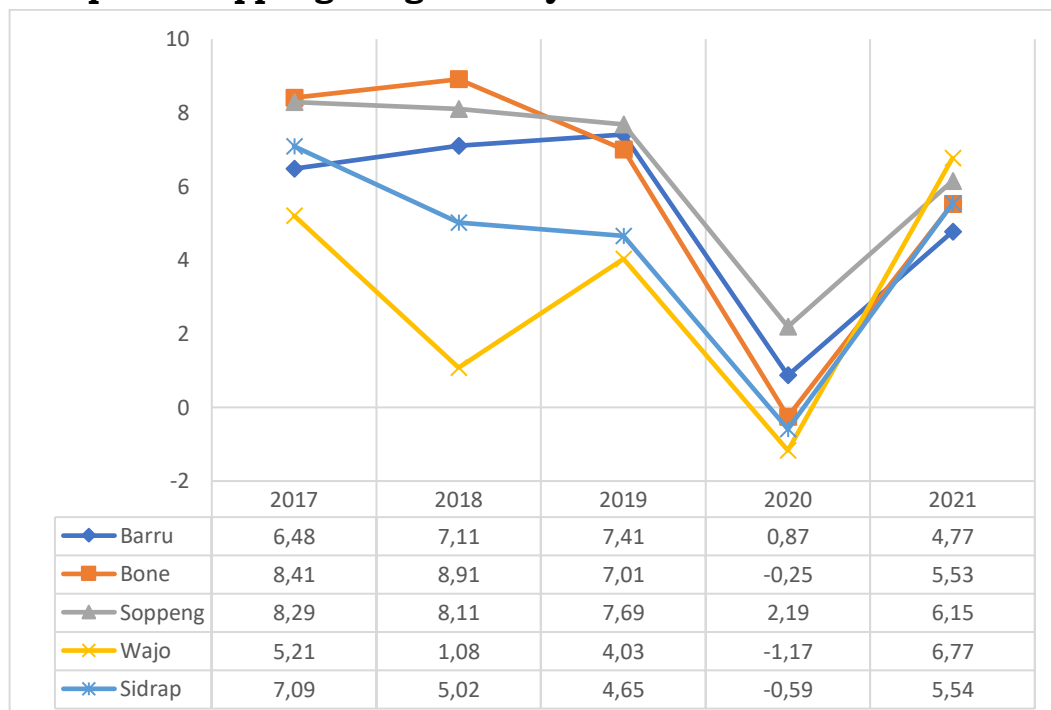


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 2,19 % mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan capain 6,15% lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai sebesar 3,69% dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 4,65%.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi wilayah sekitar, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng pada empat tahun terakhir berada pada posisi yang baik. Pada tahun 2021 walaupun masih dalam masa pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng terbilang tinggi yaitu berada pada posisi kedua yaitu sebesar 6,15% dari pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang setara. Perbandingan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017 – 2021



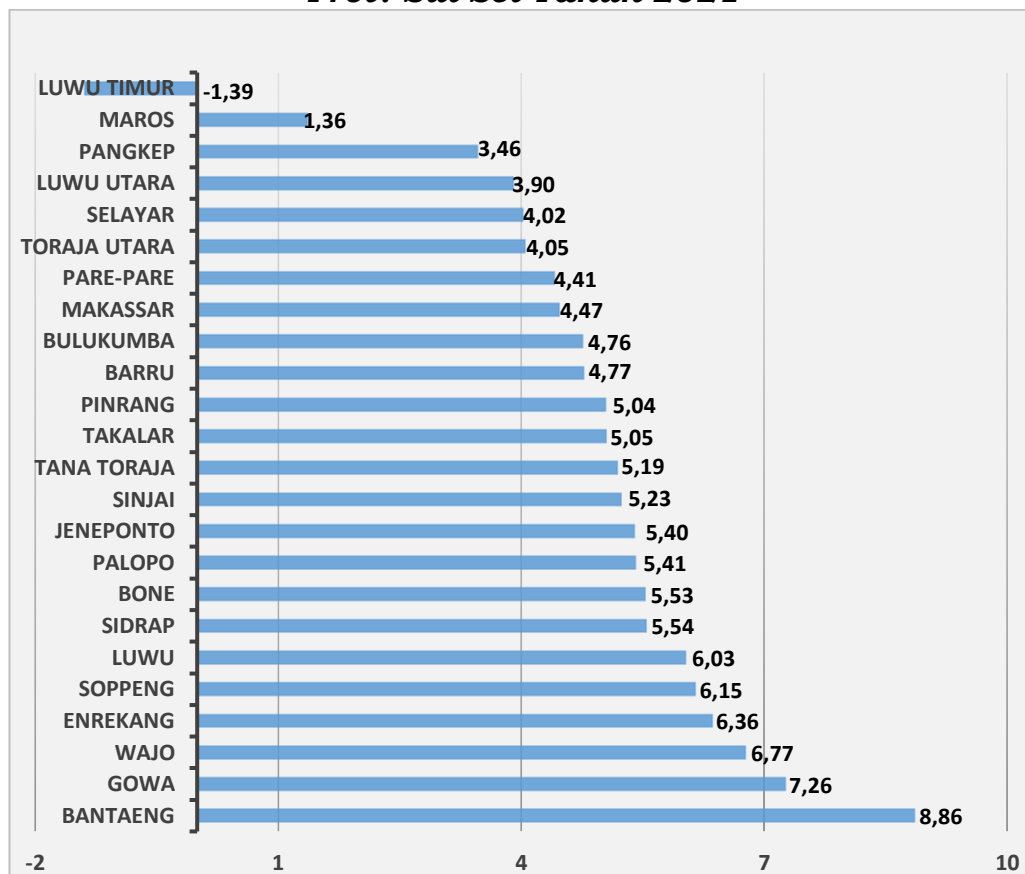
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022





Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sul-Sel, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Soppeng berada pada urutan kedua setelah kabupaten wajo. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi di Kabupaten Soppeng di tengah pandemi Covid -19 cukup menggeliat pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sulawesi Selatan.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di Prov. Sul-Sel Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha kecuali pada tahun 2021, dimana masih dalam pengaruh covid-19 beberapa sektor mulai bertumbuh yang sebelumnya mengalami kontraksi, industri pengolahan bertumbuh menjadi 8,82%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bertumbuh menjadi 8,61%, transforasi dan pergudangan tumbuh menjadi 10,15%, penyediaan akomodasi makan dan minum tumbuh menjadi 12,72% dan jasa perusahaan bertumbuh dengan capaian 10,30%, serta jasa lainnya bertumbuh menjadi 6.65%, sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pelambatan 1,11% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi yaitu pada sektor industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya. Kategori lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng meskipun pada tahun 2020, mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2019. Kategori lapangan





usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 yaitu kategori informasi dan komunikasi yang sebesar 11,74 persen.

**Tabel 3. 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng,
Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2017 – 2021**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.19	7.38	2.57	2.50	1.11
B	Pertambangan dan Penggalian	7.14	8.74	9.19	3.86	4.14
C	Industri Pengolahan	9.21	5.39	7.56	-2.68	8.82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.87	5.61	6.47	5.96	6.74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.97	8.66	5.17	5.46	6.02
F	Konstruksi	7.72	8.21	9.44	4.51	9.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.31	8.79	9.96	-4.03	8.61
H	Transportasi dan Pergudangan	7.29	9.15	9.29	-6.04	10.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.41	10.79	11.03	-2.88	12.72
J	Informasi dan Komunikasi	10.71	8.39	9.98	11.74	12.06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.94	5.66	5.79	8.52	4.21
L	Real Estate	3.28	5.43	5.53	3.96	4.17
M,N	Jasa Perusahaan	7.22	9.06	9.21	-5.37	10.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.68	4.12	9.1	3.61	0.33
P	Jasa Pendidikan	7.14	9.16	9.44	10.92	10.95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.87	8.53	8.73	10.57	10.36
R,S, T,U	Jasa lainnya	8.42	11.63	11.07	-5.55	6.65
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.29	8.11	7.69	2.19	6.15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

3.1.1.1.4. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola



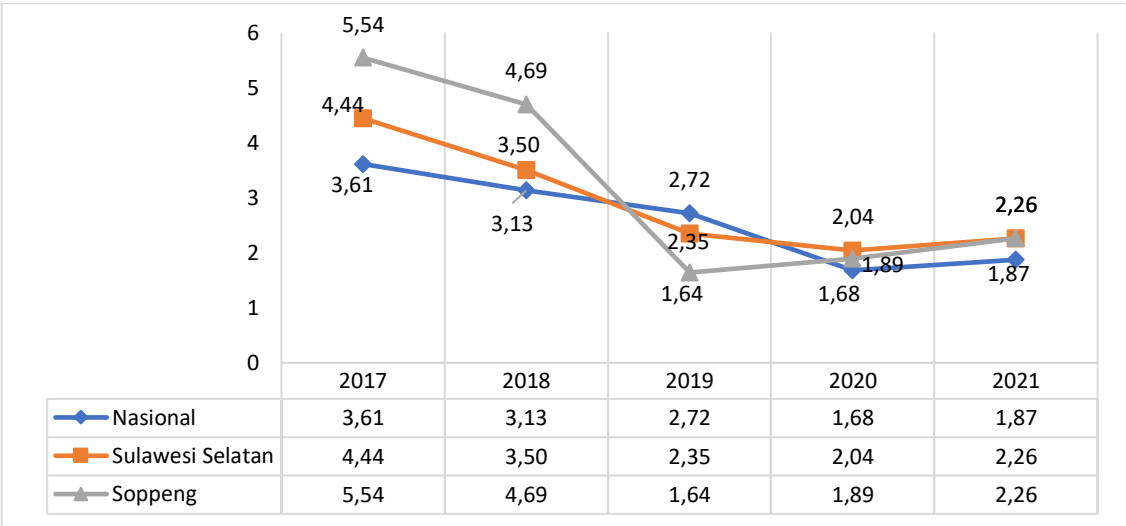


konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 2,26%, inflasi ini memberikan informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 2,26%, inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1,89%, Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2021 sama dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,26 %. Dan lebih tinggi dari laju inflasi nasional sebesar 1,87 persen.

Grafik 3.4. Perbandingan Inflasi Nasional, Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

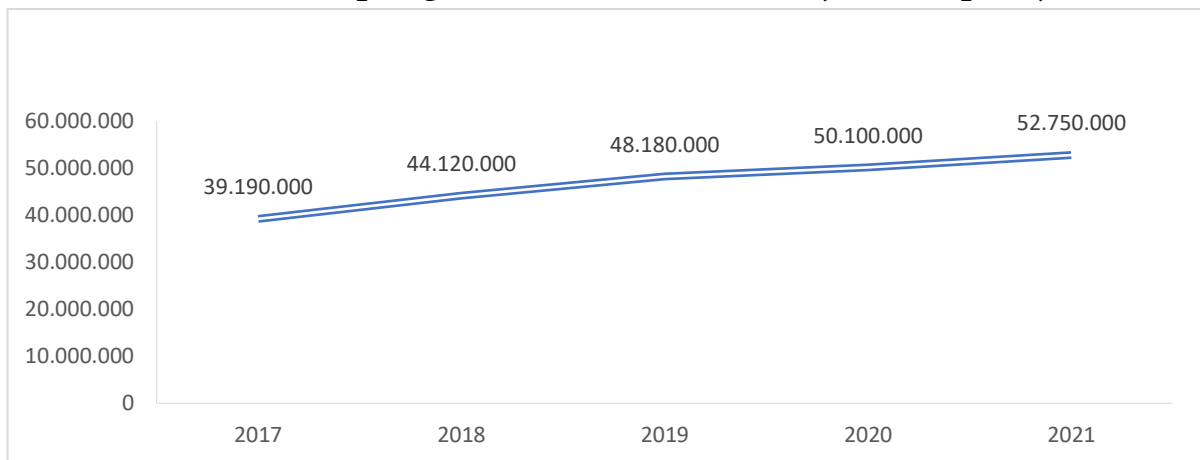
3.1.1.1.5. PDRB Perkapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp52.75 juta lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp50,10 juta.





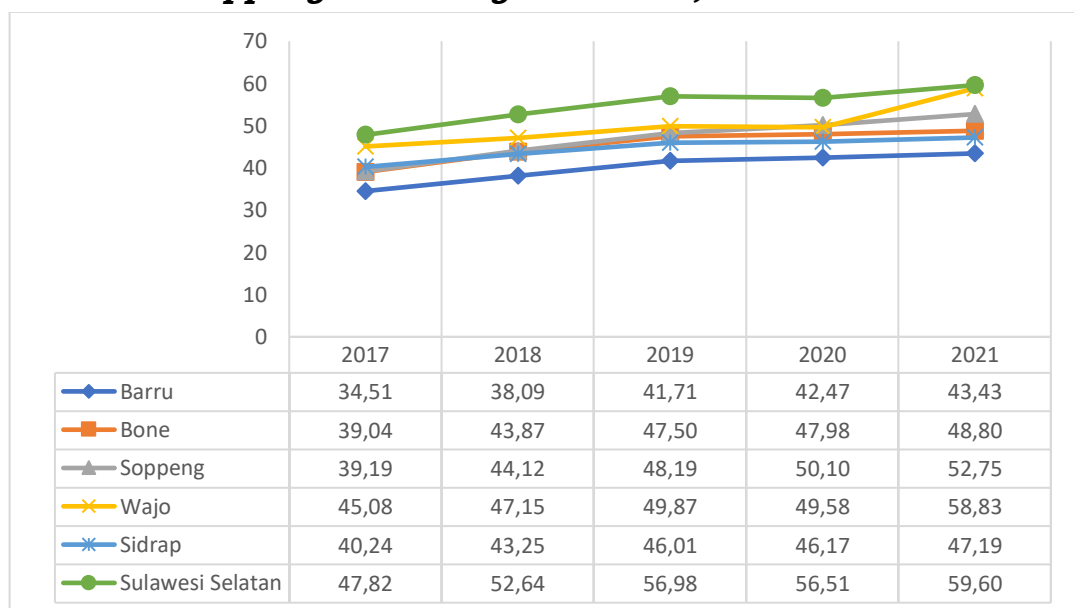
Grafik 3.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kab. Bone, Kab. Sidrap, Kab. Barru, dan Kab. Wajo. PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup tinggi.

Grafik 3.6. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar, 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

3.1.1.1.6. Indeks Gini/ Gini Ratio

Indeks Gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

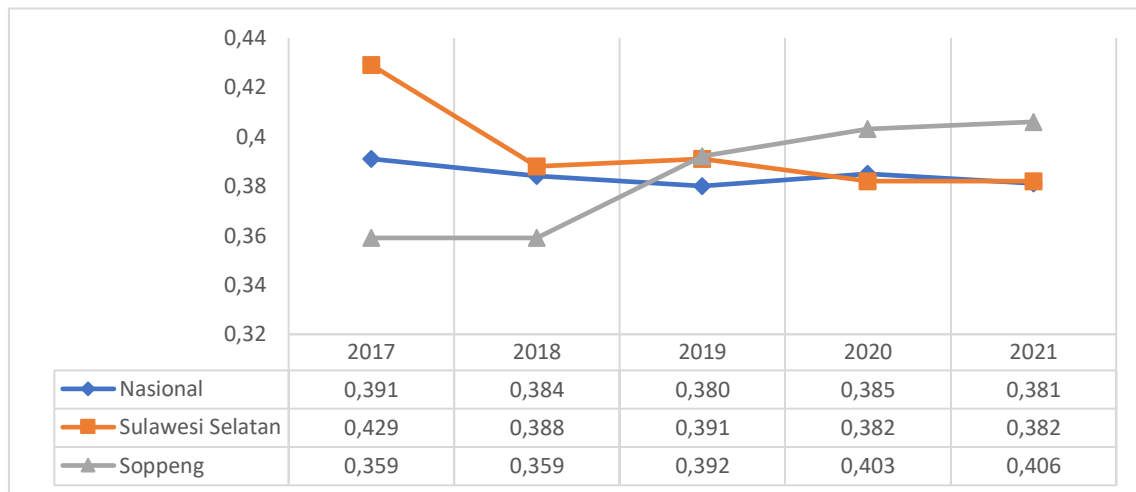
Nilai koefisien Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai gini rasio mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai gini rasio kecil atau mendekati nol, maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai gini rasio:





GR < 0,3 → ketimpangan rendah
0,3 ≤ GR ≤ 0,5 → ketimpangan sedang
GR > 0,5 → ketimpangan tinggi

Grafik 3.7. Perbandingan Indeks Gini Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh indeks gini selama tahun 2017-2021 berfluktuasi, dengan capaian indeks gini terendah sebesar 0,359 pada tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh indeks gini adalah sebesar 0,403 mengalami kenaikan 0,003 point pada tahun 2021 dengan indeks gini ratio sebesar 0,406. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, indeks gini Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 lebih tinggi dimana indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,382 dan Nasional sebesar 0,381. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2021, tetapi Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang.

3.1.1.1.7. Kemiskinan

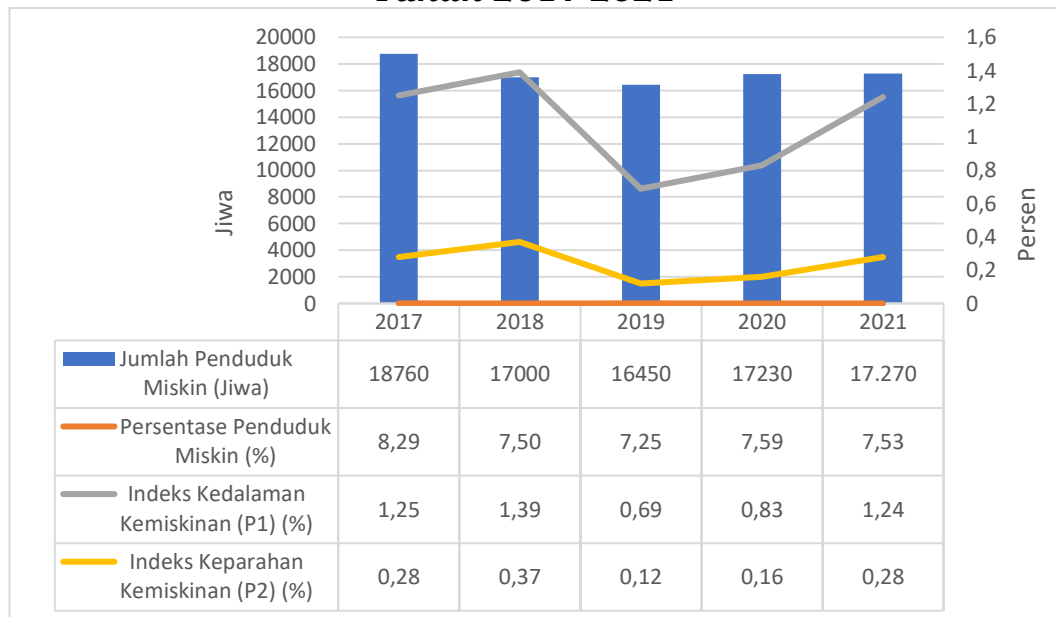
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 :





**Grafik 3.8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng
Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Pada kurun 2017 – 2019 penduduk miskin di Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 18.760 jiwa (8,29%) dan pada tahun 2019 sebanyak 16.450 jiwa (7,25%). Tetapi dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 17.230 jiwa (7,59%) dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 17.270 jiwa (7,53%) .

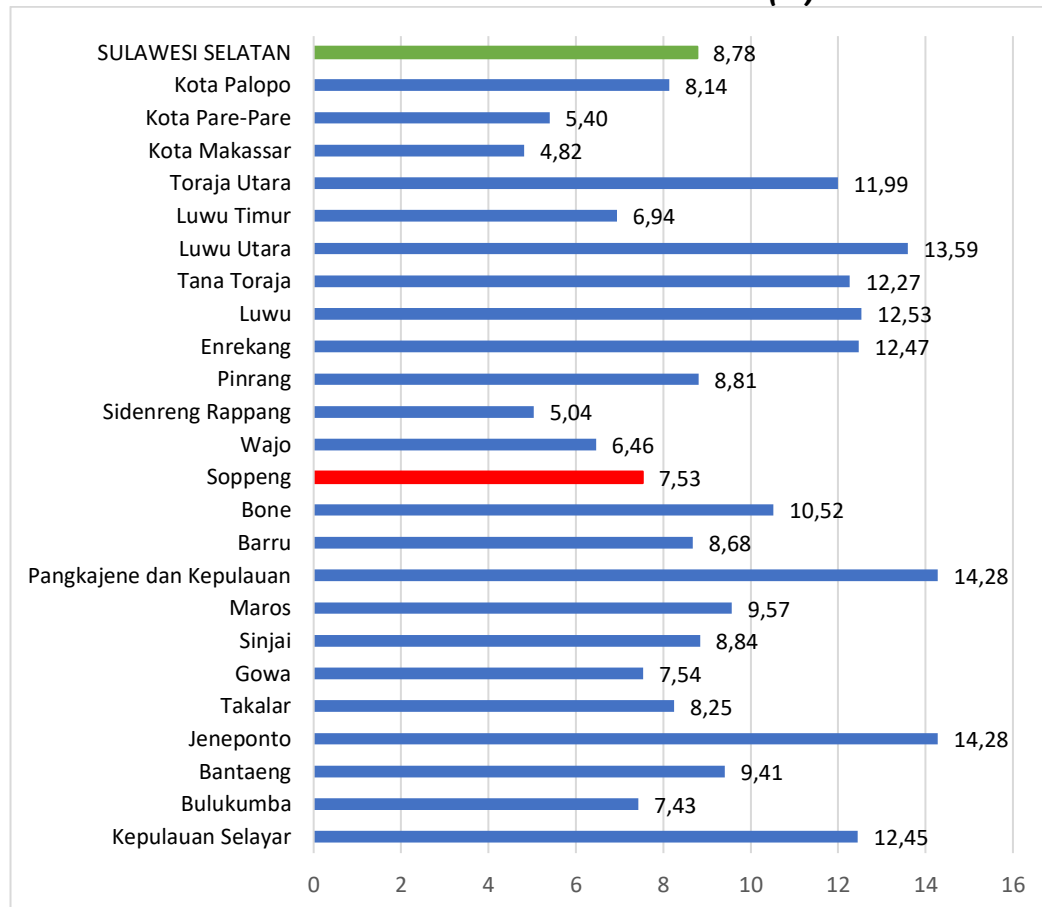
Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari ineks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2017 – 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dimana pada tahun 2017 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,25%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,24%. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, Indeks keparahan Kemiskinan (P2) juga berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,28 dan pada tahun 2021 sebesar 0,28. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (poverty gap) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin rendah.





**Grafik 3.9. Persentase Penduduk Miskin Kab./ Kota
Provinsi Sul-Sel Tahun 2021 (%)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Prov. Sulawesi selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah.

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan lapangan kerja (Pro Job).

3.1.1.1.8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah





saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2021 Perekonomian Kabupaten Soppeng tetap menunjukkan laju perkembangan yang positif, meskipun ditengah kondisi bencana akibat Covid 19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi global, nasional dan daerah. Hal ini tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2021 yang sebesar Rp12.426781,61 dan tahun 2020 sebesar Rp.11.382.122,02. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar di tahun 2021 sebesar Rp. 3.564.663,27 juta rupiah. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah pandemic Covid-19. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 terangkum dalam berikut:

Tabel 3. 5. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021

Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,731,526.10	3,057,935.70	3,138,491.00	3,336,193.48	3,564,663.27
B	Pertambangan dan Penggalian	384,274.80	432,920.40	477,330.90	506,494.11	534,199.73
C	Industri Pengolahan	936,725.30	1,048,113.00	1,150,263.20	1,130,157.01	1,255,899.87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,449.30	8,125.20	8,682.00	9,068.90	9,885.39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,050.10	4,461.90	4,717.80	4,975.43	5,323.48
F	Konstruksi	1,098,866.00	1,290,274.60	1,468,400.10	1,537,616.97	1,761,452.76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,101,069.00	1,276,053.60	1,458,273.20	1,414,753.16	1,573,576.14
H	Transportasi dan Pergudangan	273,810.80	303,263.30	335,477.30	324,709.77	374,609.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,377.60	147,031.70	167,153.60	163,898.42	186,672.23
J	Informasi dan Komunikasi	261,882.20	299,074.30	332,939.00	369,116.18	415,216.70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	295,267.60	324,413.00	352,304.60	384,579.91	416,535.69
L	Real Estate	483,696.50	527,386.20	568,306.40	592,730.77	617,441.72
M,N	Jasa Perusahaan	17,835.60	19,750.50	22,149.90	21,350.43	24,001.83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561,179.30	607,050.80	685,513.70	722,368.41	731,851.14





Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	379,408.50	418,110.50	488,576.70	562,871.42	624,505.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,963.10	167,871.50	192,962.00	218,892.78	242,112.08
R,S, T,U	Jasa lainnya	64,825.10	74,102.00	85,846.60	82,344.87	88,833.80
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,876,207.00	10,005,938.30	10,937,388.00	11,382,122.02	12,426,781.61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , 2022

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp7.585.976,28 juta rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp7.146.654,36 miliar rupiah.

Tabel 3. 6. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021

Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,757,019.70	1,896,925.70	1,946,887.40	1,995,488.51	2,017,695.33
B	Pertambangan dan Penggalian	189,228.40	207,354.40	228,338.70	237,152.57	246,968.79
C	Industri Pengolahan	621,778.80	657,200.80	710,969.20	691,955.40	753,015.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,615.90	8,068.70	8,627.30	9,141.62	9,758.18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,391.50	3,712.90	3,915.30	4,129.08	4,377.65
F	Konstruksi	728,663.30	793,817.00	876,612.10	916,147.34	1,007,670.46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	860,583.90	943,562.00	1,047,940.10	1,005,657.51	1,092,249.23
H	Transportasi dan Pergudangan	172,636.30	190,016.30	209,471.00	196,819.02	216,796.66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95,683.30	107,252.30	120,543.40	117,067.77	131,956.60
J	Informasi dan Komunikasi	225,201.30	245,823.90	273,085.80	305,146.03	341,946.64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	174,714.40	185,203.20	196,578.50	213,335.14	222,314.13
L	Real Estate	290,107.20	306,756.60	324,701.80	337,560.00	351,632.88
M,N	Jasa Perusahaan	13,248.40	14,568.10	16,045.40	15,183.72	16,747.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	369,224.50	385,072.20	423,603.10	438,879.32	440,345.97
P	Jasa Pendidikan	342,203.40	376,713.30	415,966.80	461,390.37	511,912.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,580.00	124,167.00	136,049.70	150,430.20	166,014.76





Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
R,S, T,U	Jasa lainnya	42,575.30	48,178.00	54,177.60	51,170.75	54,573.62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,007,455.72	6,494,392.43	6,993,513.10	7,146,654.36	7,585,976.28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2021 sebesar Rp2.017.95,33 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.092.249,23 juta rupiah dan Konstruksi sebesar Rp1.007.670,46 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ditengah pandemik Covid-19, tetapi sektor utama perekonomian di Kab. Soppeng pada tahun 2021 tetap memberikan kontribusi yang cukup.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

3.1.1.1.9. Distribusi Sektoral

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2017-2021 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2021 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,69 %. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2021 yaitu konstruksi sebesar 14,17 %.

Tabel 3. 7. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Persen)

Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.77	30.56	28.7	29.31	28.69
B	Pertambangan dan Penggalian	4.33	4.33	4.36	4.45	4.3
C	Industri Pengolahan	10.55	10.47	10.52	9.93	10.11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
F	Konstruksi	12.38	12.9	13.43	13.51	14.17





Kate- gori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.4	12.75	13.33	12.43	12.66
H	Transportasi dan Pergudangan	3.08	3.03	3.07	2.85	3.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.45	1.47	1.53	1.44	1.50
J	Informasi dan Komunikasi	2.95	2.99	3.04	3.24	3.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.33	3.24	3.22	3.38	3.35
L	Real Estate	5.45	5.27	5.2	5.21	4.97
M,N	Jasa Perusahaan	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.32	6.07	6.27	6.35	5.89
P	Jasa Pendidikan	4.27	4.18	4.47	4.95	5.03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.64	1.68	1.76	1.92	1.95
R,S, T,U	Jasa lainnya	0.73	0.74	0.78	0.72	0.71
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2022

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto Prov. Sulawesi Selatan (PDB).

3.1.1.1.10. Ketenakerjaan

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Terciptanya lapangan kerja baru akan membuka kesempatan kerja yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut terkait dengan semakin bertambahnya tenaga kerja yang terserap sehingga mampu mengurangi pengangguran dan memberikan pendapatan sehingga kesejahteraan yang diharapkan mampu terpenuhi.

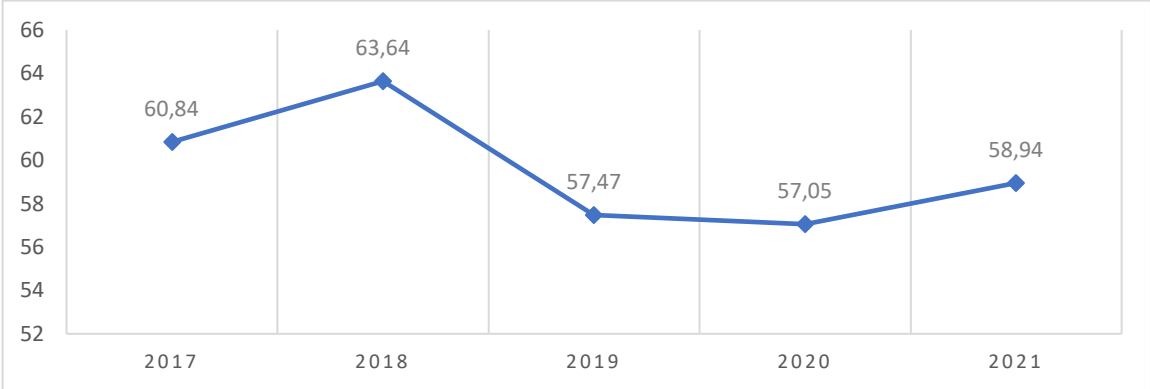
Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari setengah penduduk Kabupaten Soppeng termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 57,05% pada





tahun 2020 menjadi 58,94 % pada tahun 2021. Berdasarkan BPS 2022, Pada tahun 2021, ada sebanyak 108.914 angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dan 4.269 penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan pengangguran terbuka.

**Grafik 3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kab. Soppeng Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan status pekerjaannya, masyarakat kabupaten Soppeng yang memiliki usaha sendiri sebesar 36,92 % atau sebanyak 38.636 orang. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 15,80 % atau sebanyak 16.530 orang sedangkan yang Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebesar 4,43% atau sebanyak 4.640 orang. Yang menjadi Buruh/Karyawan atau pegawai sebesar 26,70% atau sebanyak 27.939 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai pekerja bebas sebesar 4,67% atau sebanyak 4.887 orang sedangkan yang bekerja sebagai pekerja keluarga tak dibayar sebesar 14,48% atau sebanyak 12.013 orang.

Tabel 3. 8. Jumlah Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2021

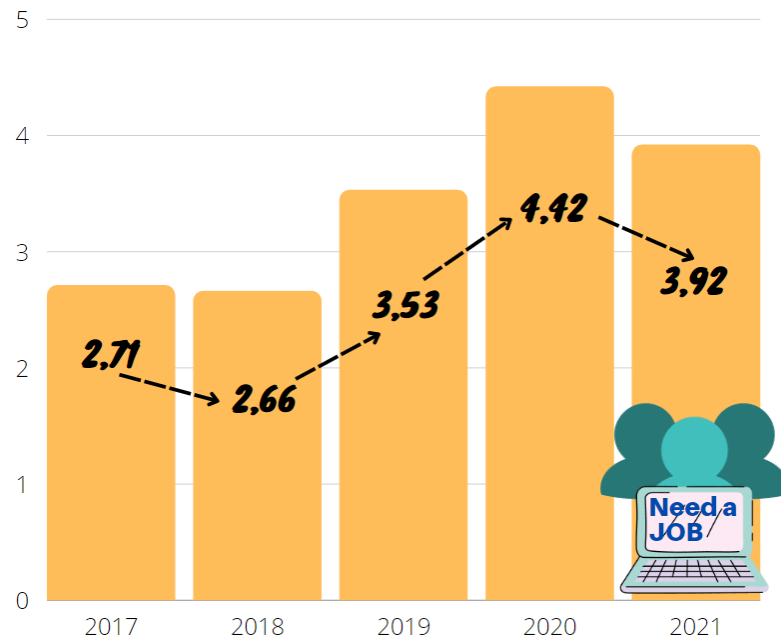
Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	29.804	8.832	38.636
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	12.350	4.180	16.530
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.657	983	4.640
Buruh/Karyawan/Pegawai	13.720	14.219	27.939
Pekerja Bebas	2.896	1.991	4.887
Pekerja Keluarga/tak dibayar	4.562	7.451	12.013
Jumlah	66.989	37.656	104.645

Sumber data : BPS, 2022

Konsep status pekerjaan dan pengangguran di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



**Grafik 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS, 2022

Pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 4,42% dan mengalami penurunan 2021 sebesar 3,92%

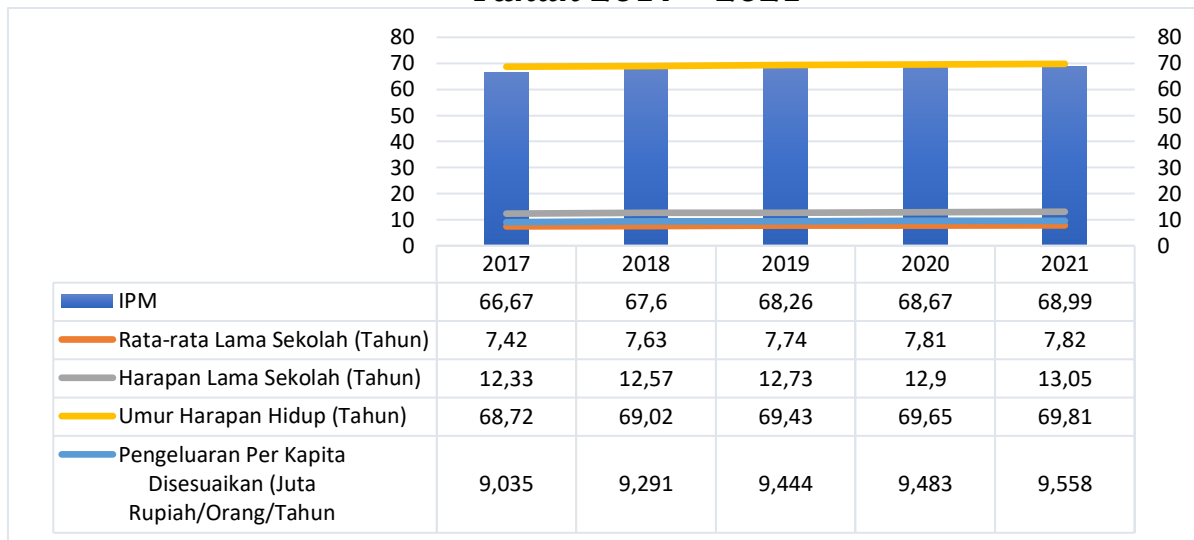
Lonjakan jumlah pengangguran di tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemik virus corona. Pandemi ini menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami kemandekan sebagai akibat dari pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus. Beberapa Pengusaha terpaksa mengurangi jumlah pekerja dikarenakan omset yang berkurang di masa pandemi. Namun di tahun 2021 jumlah pengangguran Kembali menurun dengan adanya upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19.

3.1.1.1.11. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.



Grafik 3.12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2017 – 2021

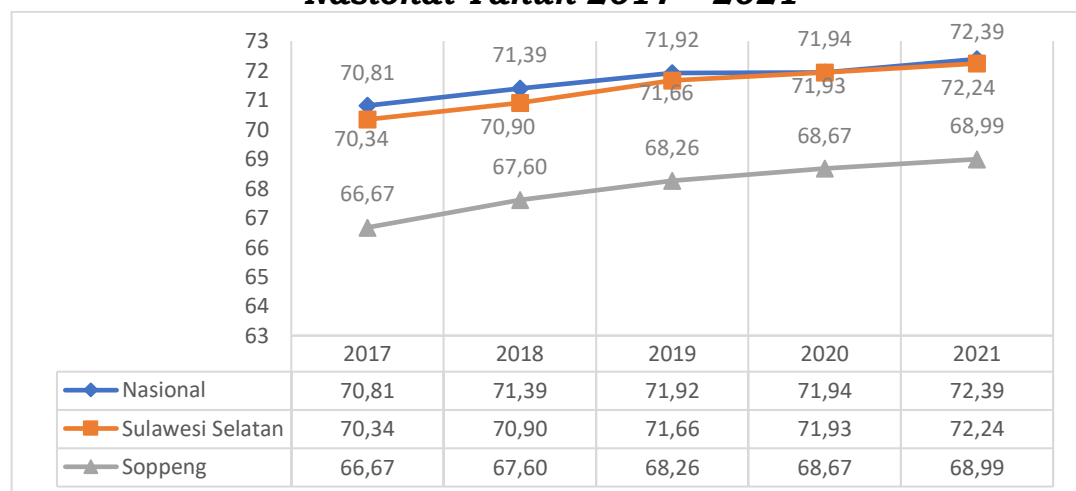


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2021 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,99 lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sebesar 68,67. Hal ini membuktikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik.

Namun, jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Nilai IPM Kab. Soppeng masih sangat rendah bahkan berada pada peringkat 18 pada tahun 2021.

Grafik 3.13. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.2.1. Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2023 diperkirakan membaik dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Prospek perekonomian yang membaik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terkendali, serta keseimbangan eksternal yang terjaga. Momentum positif kondisi perekonomian global dan domestik 2021 dan 2022 menjadi basis bagi berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan. pertumbuhan ekonomi pada tahun



2023 di prediksi meningkat yang didukung bergeliatnya beberapa sub sector ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan juga muncul berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah risiko inflasi yang meningkat terkait kenaikan harga minyak dan harga komoditas pangan. Dalam jangka menengah, masih terdapat beberapa tantangan struktural dari domestik yang dapat menghambat berlanjutnya pemulihan ekonomi. Tantangan tersebut berkaitan dengan penguatan daya saing perekonomian, penguatan kapasitas dan kapabilitas industri, penciptaan ekonomi yang inklusif, penyediaan sumber pembiayaan ekonomi yang berkesinambungan, dan perkembangan teknologi digital. Respons kebijakan ditempuh untuk mengawal perekonomian sehingga dapat tumbuh dengan struktur yang lebih baik dan ditopang stabilitas yang kokoh. Dalam kaitan ini, arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan.

Prospek perekonomian diyakini meningkat seiring dengan pandemi covid-19 diyakini sudah mereda dan masuk ke fase endemik, ini menjadi harapan baru untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian, namun tetap harus waspada munculnya varian-varian baru covid 19 .

Pemulihan ekonomi secara nasional akan menjadi efek positif bagi perekonomian Kabupaten soppeng, sehingga target prospek ekonomi diprediksi bertumbuh positif, target pertumbuhan ekonomi tersebut terutama berasal dari konsumsi dan investasi, dari belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan social, akselerasi dari infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan daya saing daerah

Sementara dari sisi suplai, pemerintah akan mengandalkan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta sektor pertanian.

Berdasarkan hal tersebut kondisi perekonomian Kab. Soppeng kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi terutama penanganan sektor kesehatan, sektor sosial dan sector perekonomian. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, dan pariwisata yang tidak dapat berusaha menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Kab. Soppeng.

3.1.2.2. Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula namun setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antar negara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (scarring effect).

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal dibeberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan



inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprakirakan kenaikan Fed Funds Rate lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4 persen dari 4,9 persen pada tahun 2022, yang utamanya didorong oleh risiko seperti perkembangan varian Omicron, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 4,1 dan 4,5 persen. Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda;
2. Dampak luka memar pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan;
3. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto;
4. Tuntutan ekonomi keuangan hijau;
5. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

3.1.2.3. Tantangan Perekonomian Nasional

Perkembangan Perekonomian Nasional, keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2023. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih



menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 3,69 % (C to C). Kemudian pada tahun 2022 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,7-6,0 % sedangkan tahun 2023 sebesar 5,3 – 5,9 %. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin Bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Pemerintahpun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2023, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih akan mewarnai tahun depan dan proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity. Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

3.1.2.4. Tantangan Perekonomian Daerah

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong dalam mengembangkan ekonomi regional. Dibutuhkan effort dari masing-masing perangkat daerah dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) sebagai interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis didaerah.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Target Ekonomi Makro Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun berlanjut dari pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas dan Perwujudan Daya Saing Daerah diarahkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.



Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas manusia yang kompetitif dan produktif akan terus dilakukan melalui penyelenggaraan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani, akuntabilitas, inovatif dan kolaboratif.

1) Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif

Tantangan perubahan di era digital yang disebut dengan revolusi industri menjadi entri point pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk dapat menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang sekaligus factor menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi sebab endahnya kualitas SDM dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi. Semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja akan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Hal itu mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat ikut meningkat dan total produksi perekonomian meningkat, dengan demikian program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas manusia maka pemberdayaan sektor Pendidikan, pemenuhan SPM dapat lebih maksimal. Selain itu bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan dan meningkatkan produktifitas masyarakat.

2) Peningkatan Produktivitas Ekonomi Dan Daya Saing Daerah Dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan

Produktivitas menjadi penentu tingkat kompetitif dan pertumbuhan sebuah, produktivitas sangat terkait jumlah output yang mampu dihasilkan dengan biaya tertentu. Produktivitas menentukan apakah kegiatan produksi dilakukan secara efisien dan memberikan keuntungan, produktifitas ekonomi akan berjalan apabila dilengkapi dengan modal fisik, teknologi baru, dan modal sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pemenuhan produksi barang dan jasa, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu mendukung infrastruktur dari pemerintah dan sektor privat untuk mengurangi biaya produksi. Selanjutnya dibutuhkan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, seperti kesempatan upgrade keahlian dari pekerja dan pelatihan-pelatihan yang mudah diakses masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas tidak yang saling mendukung antara pengusaha dan pekerja Selain itu meningkatkan fasilitas ekonomi wilayah untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah. Selain itu penciptaan iklim investasi yang kondusif dapat meningkatkan investasi pada daerah baik yang berasal dari dalam maupun luar Kab. Soppeng. Pemantapan Sektor sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di sekitar Kawasan pariwisata.

3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif Dan Kolaboratif

Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi



tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (future of work) khususnya di pemerintahan. Sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani, akuntabilitas, inovatif dan kolaboratif.

Berdasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Daerah maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 sebagai berikut :

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas hidup manusia merupakan muara dari semua upaya pembangunan. Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 68,99 (2021). Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Walaupun meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi Covid-19. Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu 0,32 poin, menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan dikoreksi oleh menurunnya pengeluaran per kapita penduduk sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 akan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian Covid-19. Pada tahun 2023, IPM Kab. Soppeng ditargetkan mencapai 70,29, melalui:

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, akses di semua jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi, percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, dengan perhatian khusus penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan
- Upaya di bidang ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan diperkirakan sebesar 6,57 % pada tahun 2023. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata menjadi sasaran yang harus dicapai. Selain kondisi ekonomi makro yang membaik, upaya penurunan penduduk miskin dan rentan baru akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 terus dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dua strategi utama pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan terus dipertajam.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi menjadi faktor kunci pencapaian target pembangunan kedepan. Keberhasilan ini diperkirakan dapat menurunkan TPT pada kisaran 4,22 persen pada tahun 2023. Dengan kembalinya





aktivitas sektor perdagangan, industri, pariwisata akan membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja ini dapat tercapai melalui upaya pertumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Upaya strategis lainnya antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2023 merupakan lajutan dari tahap percepatan pertumbuhan ekonomi setelah mengalami perlambatan akibat Covid 19 dimana pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,31 persen. Kebijakan pemerintah diarahkan pada perbaikan secara fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi yang kokoh bagi percepatan pertumbuhan Ekonomi. Dari sisi lapangan usaha sektor pertanian menjadi motor peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi diharapkan dapat pulih cepat dan mengalami peningkatan sejalan dengan kembali-normalnya kondisi global dan domestik, sehingga mampu menggerakkan roda produksi bersumber dari investasi, perdagangan, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi.

5) PDRB Per Kapita

Dengan semakin mebaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2023 maka akan berdampak pada PDRB Perkapita dimana pada tahun 2023 PDRB Per Kapita ditargetkan Rp63.001.000,-

6) Gini Rasio

Pada tahun 2023, target rasio gini sebesar 0,379. Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Intervensi pada kelompok 40 persen terbawah melalui peningkatan akurasi penargetan; penyaluran bantuan secara cepat, dan responsif kebencanaan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah.

Tabel 3. 9. Target Indikator Makro Kab. Soppeng Tahun 2023

No	Indikator Makro	Target		
		RKP Tahun 2023	Rankhir RKPD Provinsi Tahun 2023	RKPD Kab. Soppeng Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9	4,71 - 6,18	6,31
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	8,26	6,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	6,28	4,22
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 - 73,49	73,05	70,29
5	Rasio Gini	0,375 - 0,378	0,376	0,379
6	PDRB PerKapita (Rp)		65.980.000	63.001.000

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka





penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada tahun 2023, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah dengan tetap mendorong bertumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Potensi pendapatan daerah mulai membaik ditengah penanganan pandemic COVID-19 melalui pemulihan ekonomi. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproyeksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, yakni pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain memproyeksikan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik pada tahun 2023.

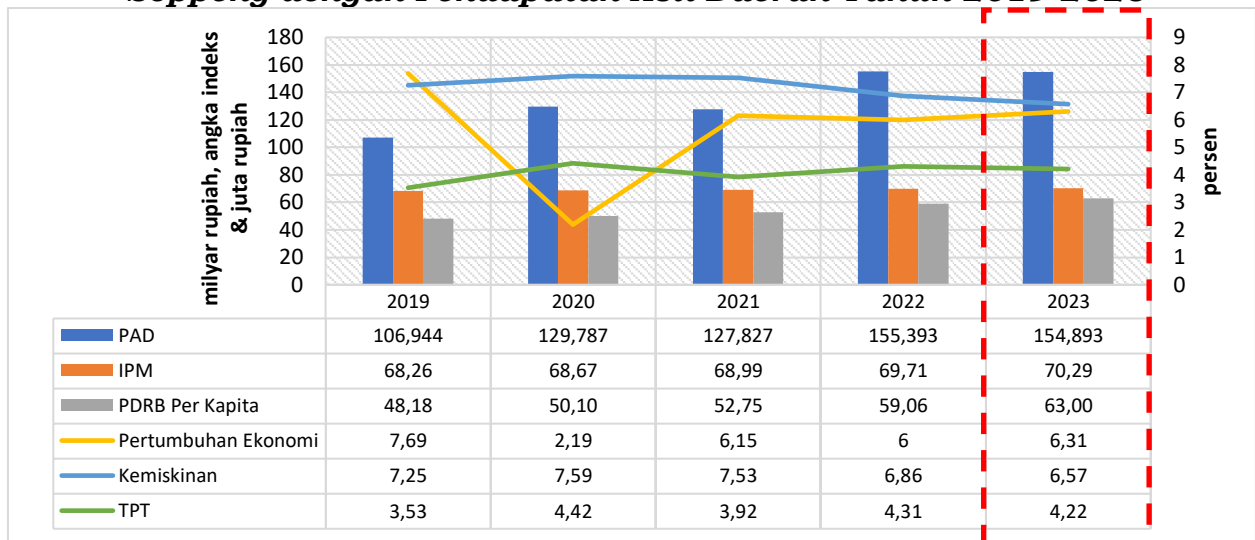
Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap meningkat meskipun sedikit melambat, PDRB per kapita yang bergerak pelan, IPM yang melambat tapi konsisten mengalami peningkatan, tingkat pengangguran yang terus menurun meskipun bergerak pelan, serta semakin berkurangnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meskipun tidak sepesat periode sebelumnya, merupakan kondisi yang diinginkan pada tahun 2023.

Akan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya meningkatnya kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, tetapi juga kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang akan mendorong peningkatan bagi hasil pajak dan non pajak di Kabupaten Soppeng untuk tahun 2023.





Grafik 3.14. Korelasi Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kab. Soppeng dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023



PAD
IPM
PDRB Per Kapita
Pert. Ekonomi
Kemiskinan
TPT

Tahun 2023 adalah asumsi
Tahun 2022 dan 2023 adalah angka target kinerja
Tahun 2022 dan 2023 adalah angka target kinerja
Tahun 2022 dan 2023 adalah angka target kinerja
Tahun 2022 dan 2023 adalah angka target kinerja
Tahun 2022 dan 2023 adalah angka target kinerja

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan pendapatan khususnya Dana Transfer, tidak memperlakukan secara defenitif, sebagai salah satu contoh Dana transfer DAU yang sifatnya Dinamis/tidak pasti.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama objek yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi.
- Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan.
- Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar OPD yang terkait.
- Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
- Pelaksanaan Uji petik pada objek pajak seperti warung, Kafe dan semacamnya
- Pelaksanaan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
- Penyederhanaan system dan prosedur pembayaran pajak;
- Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah.





- Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kab. Soppeng bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu 2020 dan 2021, anggaran 2022 serta proyeksi pendapatan tahun 2023 dan 2024 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan daerah Kab. Soppeng Tahun 2020-2024

Dalam Rupiah

NO	URAIAN PP 12 Tahun 2019	REALISASI 2021	PROYEKSI 2022 (Rp)	PROYEKSI 2023 (Rp)	PROYEKSI 2024	KENIKAN/ PENURUNAN
1	Pendapatan	1.211.844.366.827,90	1.184.562.980.681,00	1.187.374.561.255,00	1.218.425.226.697,00	2.811.580.574,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	155.453.702.843,90	155.393.731.010,00	158.205.311.584,00	156.420.146.883,00	2.811.580.574,00
1.1.1	Pajak Daerah	20.151.052.607,00	20.900.595.200,00	20.998.500.000,00	21.493.552.384,00	97.904.800,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.462.038.543,00	9.288.732.731,00	8.513.466.901,00	6.663.307.763,00	(775.265.830,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.163.344.683,00	18.396.001.683,00	19.163.344.683,00	19.901.089.876,00	767.343.000,00
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	105.677.267.010,90	106.808.401.396,00	109.530.000.000,00	108.362.196.860,00	2.721.598.604,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.013.696.896.278,00	996.691.757.871,00	996.691.757.871,00	1.035.374.279.814,00	-
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	970.643.355.351,00	956.988.051.000,00	956.988.051.000,00	994.998.720.802,00	-
1.2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	43.053.540.927,00	39.703.706.871,00	39.703.706.871,00	40.375.559.012,00	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.693.767.706	32.477.491.800,00	32.477.491.800,00	26.630.800.000,00	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.272.262.198,00	3.575.511.800,00	3.575.511.800,00	2.000.000.000,00	-
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	32.421.505.508,00	28.901.980.000,00	28.901.980.000,00	24.630.800.000,00	-

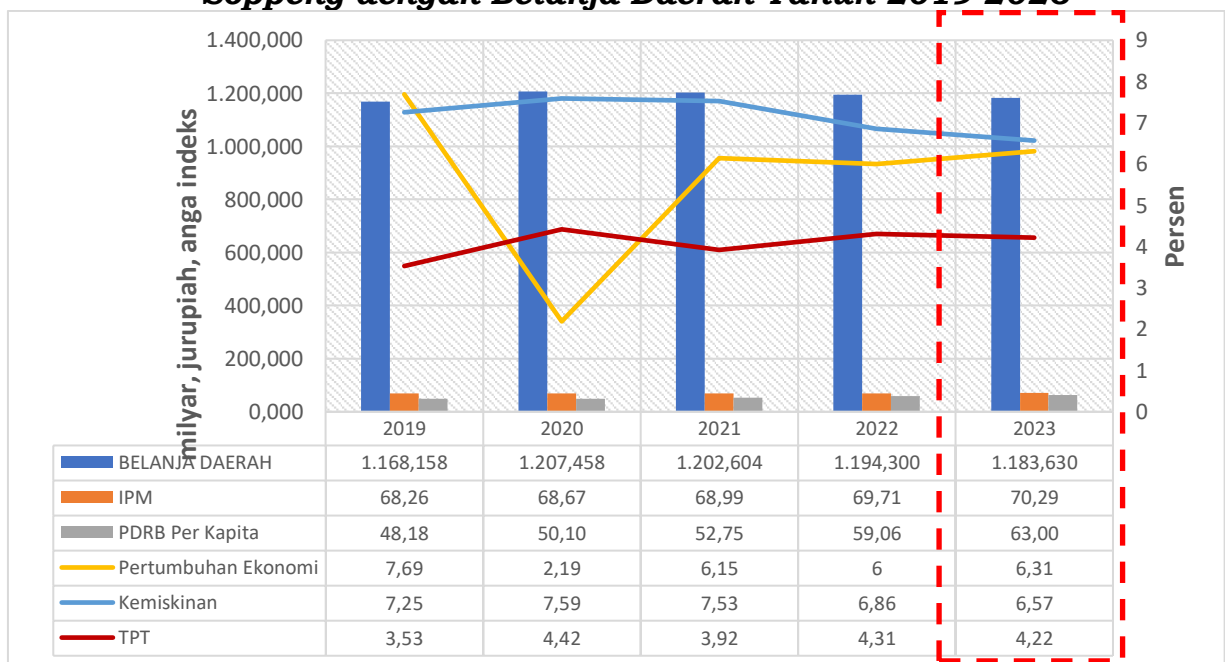
Sumber: BPKPD Kabupaten Soppeng 2022



3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2023, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan. Target tren pertumbuhan ekonomi yang melambat, peningkatan PDRB per kapita yang meningkat sedikit, peningkatan IPM yang konsisten meningkat tapi melambat, serta penurunan tingkat kemiskinan yang sedikit melambat serta tingkat pengangguran yang meningkat akibat pandemic COVID-19, tetapi kembali membaik seiring dengan perbaikan ekonomi daerah, akan menuntut kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang meningkat pada tahun 2023. Target-target makro ekonomi pada tahun 2023 berimplikasi pada alokasi belanja, bukan hanya ditujukan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk menjamin dukungan terhadap akselerasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan untuk pemulihan pandemic COVID-19. Implikasinya, proyeksi alokasi kebutuhan belanja untuk dukungan pelayanan dasar, pelayanan publik serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2023.

Grafik 3.15. Korelasi Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kab. Soppeng dengan Belanja Daerah Tahun 2019-2023



Belanja Daerah
IPM
PDRB Per Kapita
Pert. Ekonomi
Kemiskinan
TPT

Tahun 2023 adalah asumsi
Tahun 2022 dan 2023 adalah Target Kinerja
Tahun 2022 dan 2023 adalah Target Kinerja
Tahun 2022 dan 2023 adalah Target Kinerja
Tahun 2022 dan 2023 adalah Target Kinerja
Tahun 2022 dan 2023 adalah Target Kinerja

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kab. Soppeng dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kab. Soppeng menunjukkan





kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan belanja daerah Kab. Soppeng tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi.
2. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
3. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
4. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
5. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
6. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan standar pelayanan SPM serta pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD.
7. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja amanah undang-undang misalnya dana desa, Dana alokasi Desa, Dana Kelurahan, dan dan Tambahan P3K.
8. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja yang diarahkan misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
9. Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat.
10. Prioritas III, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum tercover dalam prioritas I dan II, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Belanja Operasi**

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka





pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon





penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

➤ **Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun sebelumnya.

➤ **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 3. 10. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024

Dalam Rupiah

NO	URAIAN PP 12 (Tahun 2019)	REALISASI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
2	Belanja Daerah	1,115,036,766,234.37	1,264,648,548,531.00	1,187,374,561,255.00	1,187,856,015,531.99
2.1	Belanja Operasi	787,306,534,904.00	872,955,528,384.00	844,280,739,164.00	846,082,827,459.99
2.1.1	Belanja Pegawai	531,862,769,860.00	539,652,336,672.00	535,239,743,472.00	563,154,027,287.99
2.1.2	Belanja Barang Jasa	248,456,188,422.00	316,787,158,853.00	293,284,040,053.00	241,155,527,752.00
2.1.3	Belanja Bunga		8,753,605,027.00	8,753,605,027.00	
2.1.3	Belanja Hibah	5,265,533,682.00	5,989,155,412.00	7,003,350,612.00	40,000,000,000.00
2.1.4	Belanja Bansos	1,722,042,940.00	1,773,272,420.00		1,773,272,420.00
2.2	Belanja Modal	211,659,163,573.37	282,796,430,259.00	232,929,454,859.00	216,532,580,165.00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	25,412,400.00	216,075,000.00	462,000,000.00	601,862,986.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,638,354,185.00	58,679,852,274.00	62,885,858,784.00	65,253,159,556.00
2.2.3	Belanja Modal gedung dan bangunan	100,973,576,964.37	51,274,559,710.00	67,633,063,119.00	61,155,753,681.00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49,247,401,924.00	172,511,693,275.00	101,592,282,956.00	88,995,690,957.00
2.2.5	Belanja Modal Aset tetap lainnya	774,418,100.00	114,250,000.00	356,250,000.00	526,112,985.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	629,389,500.00	3,243,778,790.00	4,511,556,134.00	5,000,000,000.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	629,389,500.00	3,243,778,790.00	4,511,556,134.00	5,000,000,000.00
2.4	Belanja Transfer	115,441,678,257.00	105,652,811,098.00	105,652,811,098.00	120,240,607,907.00
2.4.1	Belanja Bagi hasil	2,574,554,592.00	2,595,992,398.00	2,595,992,398.00	2,815,686,015.00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	112,867,123,665.00	103,056,818,700.00	103,056,818,700.00	117,424,921,892.00

Sumber: BPKPD Kabupaten Soppeng 2022





Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.187.374.561.255,00 yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar Rp844.280.739.164,00 Belanja Modal sebesar Rp232.929.454.859,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.511.556.134,00 serta Belanja Transfer sebesar Rp105.652.811.098,00 Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2023.

Untuk Belanja urusan wajib diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial dilakukan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan wajib berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) di tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp174.576.601.440 atau 14,70 persen dari total Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 11. Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2023

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.213.267.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70.800.633.989	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.264.507.001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.154.371.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	261.663.200	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.742.357.550	SATPOL PP dan DAMKAR
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	821.771.700	BPBD
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.028.164.350	SATPOL PP dan DAMKAR
6	Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	211.265.400	Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	78.600.000	Dinas Sosial
Total			174.576.601.440	

Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran telah menentukan porsi besaran anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebesar Rp1.118.531.341.017 atau 94,20 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp1.187.374.561.255 untuk membiayai 52 program prioritas yang rinciannya telah tertuang pada tabel dibawah ini:





Tabel 3. 12. Proyeksi Alokasi Anggaran Program Prioritas tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100%	87.213.267.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)(%)	100%		
				Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100%		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	70.800.633.989	Dinas Kesehatan
				Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah waga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	4.264.507.001	Dinas PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	4.154.371.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	261.663.200	Dinas PERKIM





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
				Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	3.742.357.550	SATPOL PP & DAMKAR
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	3.028.164.350	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100%	821.771.700	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100%		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	211.265.400	Dinas Sosial
				Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%		
				Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%		
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	78.600.000	
		Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	100%	286.090.000	DPMPSTPKT
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	133.055.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,20%		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	96,50	12.089.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100%	761.420.000	8 Kecamatan
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri Donri(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	100%		





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
		Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat		Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)	100%		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	100%	880.006.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1,22	253.721.696	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1,07%	429.513.700	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	29,83%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	1	129.108.828		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar	74%	Telah Dianggarkan Sebelumnya	Dinas Kesehatan
				Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	75%		
				Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	96%		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase keterpenuhan Sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	95%	2.210.600.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman yang Sesuai Standar	100%	289.936.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	60%	664.485.000		
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100%	176.400.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100%	1.650.380.000	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	10,46	17.650.000	DTPHPKP
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan	17,52%	769.139.550	Dinas PERKIM
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda	100%	Telah Dianggarkan Sebelumnya	Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	59,5	80.995.756.000	Dinas PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,25	9.268.776.001	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilavani oleh jaringan irigasi	0,72		





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	83	1.955.176.800	Dinas Perhubungan
				V/C Ratio	0,07		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	12.999.600	Dinas PERKIM
		Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	44,62%	478.002.748	DISPAPORA
		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9,77%	2.287.505.858	DTPHPKP
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	21,28%		
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	4,91%		
				Produksi daging (Kg)	503.065	252.381.100	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
				Produksi Telur (Kg)	10.011.821		
				Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	100.479		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	100%	6.729.720.000	DTPHPKP
				Persentase Prasarana (Peternakan) yang Digunakan	95,00%	125.373.635	DPKHP
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	8%	5.558.483.250	DTPHPKP
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut ke madya	16%		
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya ke utama	8%		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	27,14%	2.713.070.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	438,72	272.573.000	DPKHP
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	58,25	69.412.650	DPPKUMK
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50,00%	681.150.000	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	24%	15.146.000	DPMPTSPTKT
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	5,00%	130.400.000	
		Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat terselesaikan	100%	Telah Dianggarkan Sebelumnya	SATPOL PP & DAMKAR
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	100%	573.200.000	BAKESBANGPOL





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	100%	1.208.000.000	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	38,33%	Telah Dianggarkan Sebelumnya	BPBD
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	86.928.280	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Kawasan yang terkelola sesuai standar (m²)	9351	40.047.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	69%	3.089.779.995	
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	100%	395.258.000	BAPPELITBANGDA
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100%		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan	100	98.995.000	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	85%	1.485.944.400	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	60%	392.291.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100%	121.136.235.559	BPKPD
				Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan Tepat Waktu	100%		
				Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	100%		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	100%	884.340.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100	1.205.798.750	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD	100%	693.148.397.277	semua SKPD
			TOTAL				





Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun 2023 telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah dengan total Rp1.187.374.561.255, rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13. Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	OPD	PAGU RKPD TAHUN 2023
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	382.288.034.036
2	DINAS KESEHATAN	251.664.628.586
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	136.929.859.737
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.239.770.918
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.772.708.051
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.329.551.340
7	DINAS SOSIAL	6.409.930.687
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.514.324.459
9	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	35.594.357.180
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.951.219.682
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.802.821.214
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.991.832.010
13	DINAS PERHUBUNGAN	7.250.127.146
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.324.260.917
15	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	7.508.795.313
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.159.603.281
17	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.028.034.195
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.325.141.346
19	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	6.764.454.535
20	SEKRETARIAT DAERAH	21.287.426.000
21	SEKRETARIAT DPRD	24.937.695.250
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.050.601.060
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	143.182.452.000
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.207.159.936
25	INSPEKTORAT DAERAH	9.602.532.887
26	KECAMATAN LILIRILAU	9.406.678.440
27	KECAMATAN CITTA	2.719.063.747
28	KECAMATAN GANRA	3.154.153.567
29	KECAMATAN DONRI-DONRI	3.168.913.000
30	KECAMATAN MARIORIAWA	11.285.821.218
31	KECAMATAN LILIRIAJA	8.575.364.782
32	KECAMATAN LALABATA	16.180.155.374
33	KECAMATAN MARIORIWAWO	6.991.832.123
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.775.257.238
TOTAL		1.187.374.561.255

Dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD. Sehingga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah



Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp222.718.359.104 atau 18,34 persen dari total Belanja Daerah untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proyeksi pagu anggaran pada program pembangunan daerah yang berkaitan dengan TPB/SDGS Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 14. Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah Terhadap Tujuan TPB/SDGS Tahun 2023

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
1	TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.650.380.000
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.503.467.399
		3	Program Rehabilitasi Sosial	166.815.400
		4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	228.700.300
		5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.764.507.001
		6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.154.371.000
		7	Program Pengelolaan Pendidikan	71.550.000
		8	Program Pendaftaran Penduduk	133.055.800
		9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12.999.600
		10	Program Penanggulangan Bencana	821.771.700
		11	Program Penanganan Bencana	15.600.000
2	TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	12	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.713.070.000
		13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22.705.655.749
		14	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	891.330.000
		15	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	99.109.500
		16	Program pengelolaan perikanan budidaya	272.573.000
		17	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	38.362.400
		18	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	132.973.000
		19	Program Pemberdayaan Sosial	176.400.000
		20	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sudah dianggarkan sebelumnya pada tujuan 1
		21	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	423.287.000



No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
		22	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.771.301.800
		23	Program Pengelolaan Pendidikan	4.955.784.250
		24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sudah dianggarkan sebelumnya pada tujuan 1
		25	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	119.086.600
3	TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA	26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sudah dianggarkan sebelumnya pada tujuan 1
		27	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Sudah dianggarkan sebelumnya pada tujuan 1
		28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.166.000.000
4	TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	29	Program Pengelolaan Pendidikan	Sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 1
5	TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN	30	Program Perlindungan Perempuan	21.114.800
		31	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	27.825.000
		32	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	28.986.000
		33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	31.118.200
		34	Program Pengelolaan Pendidikan	Sdh dianggarkan sebelumnya pada tujuan 1
		35	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Sdh dianggarkan sebelumnya pada tujuan 2
		36	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	138.500.000
6	TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA	37	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 1
		38	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 1
		39	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.268.776.001
7	TUJUAN : 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN,	40	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.146.000



No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
	KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA			
8	TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI	41	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	141.184.600
		42	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.802.000
		43	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	110.001.000
		44	Program Penataan Bangunan Gedung	17.132.040.000
		45	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.826.000.000
		46	Program Penyelenggaraan Jalan	80.995.756.000
9	TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA	47	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 1
10	TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	48	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 1
		49	Program Penanggulangan Bencana	sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 1
		50	Program Pengelolaan Persampahan	3.196.562.650
11	TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN	51	Program Pengelolaan Persampahan	3.089.779.995
12	TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA	52	Program Penanggulangan Bencana	sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 1
13	TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	53	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	40.047.700



No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
14	TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN	54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	34.051.200
		55	Program Pencatatan Sipil	12.089.000
15	TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	56	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.125.618.750
		57	Program Pendaftaran Penduduk	Sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 1
		58	Program Pencatatan Sipil	Sdh dianggarkan sebelumnya pada Tujuan 16
TOTAL				181.231.550.395

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang difisit sehingga harus ditutupi dengan surplus dari pembiayaan netto, sedangkan jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah maka terjadi surplus sehingga harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. Untuk itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.



3.2.3.1. **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar Kembali, kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun 2022 diarahkan pada penerimaan utang jangka Panjang yang bersumber dari PT SMI melalui Program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sedangkan 2023 belum terdapat kebijakan penerimaan pembiayaan selain penggunaan Silpa tahun sebelumnya.

3.2.3.2. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima Kembali, Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan Modal pada Lembaga keuangan bank dan non bank.

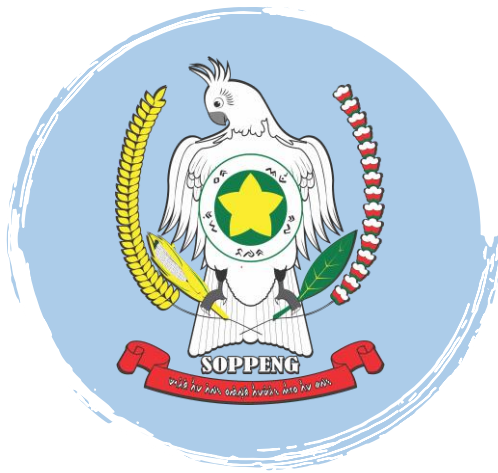
Selengkapnya Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021- 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3. 15. Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Soppeng, Tahun 2021-2024**

Dalam Rupiah

URAIAN	REALISASI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
PEMBIAYAAN			-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63,500,406,586.94	301,721,926,677.47	-	0.00
Penggunaan Silpa tahun Sebelumnya	63,500,406,586.94	160,306,659,677.47		
Penerimaan pinjaman		141,415,267,000.00		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2,000,000,000.00	-	30,569,211,166.00
Penyertaan Modal	-	2,000,000,000.00		7,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang				23,569,211,166.00
PEMBIAYAAN NETTO	63,500,406,586.94	296,721,926,677.47	-	(30,569,211,166.00)

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng 2022



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

"Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan"



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Kab. Soppeng pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dan program prioritas nasional dalam RKP serta visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang termuat dalam RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, (4) melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Untuk visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih telah dimuat pada Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Pembangunan Kab. Soppeng tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kab. Soppeng periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu dengan ditetapkannya RPJMD Kab. Soppeng dengan Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 maka RKPD Kab. Soppeng Tahun 2023 mengacu pada peraturan tersebut.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kab. Soppeng. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Kab. Soppeng. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.





4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, berdasarkan tema tersebut maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %
3. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0 %

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018- 2023 adalah sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang akan dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel





- 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
- 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
- 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Tabel 4. 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Kinerja Tahun 2023

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target 2023
Misi Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif						
1	Tujuan 1 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	B (61,18)	BB (71-80)	A (81-90)
	Sasaran 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	B (65,01)	A (>70-80)	A (>80-90)
	Sasaran 2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3. Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	A (4,10)	A (4,01-4,50)	A (4,51-4,50)
Misi Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dna Aksesibel						
2	Tujuan 2 Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4. Indeks Williamsom	Angka	0,568	0,608	0,607
	Sasaran 3.Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah	5. Indeks layanan infrastruktur	Angka	79,44	81,70	83,40
Misi Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Inovatif						
3	Tujuan 3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat secara merata	6. PDRB Perkapita AHB	Rp. Juta	59,66	62,37	65,98
		7. Tingkat Kemiskinan	%	8,53	8,10	7,45
	Sasaran 4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8. Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,72	5,90	5,69
	Sasaran 5. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	9. Rasio Gini	Angka	0,377	0,381	0,381
Misi Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter						
4	Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas SDM yang kompetitif, Inklusif dab Berkarakter	10. IPM	Angka	72,24	72,57	73,05
	Sasaran 6. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	11. Indeks Pendidikan	Angka	65,76	66,57	67,05
	Sasaran 7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12. Indeks Kesehatan	Angka	77,94	77,82	77,86
	Sasaran 8. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76,32	76,36	77,23
	Sasaran 9. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14. Angka kriminalitas	Kasus	15.210	24.573	24.438
Misi Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan						
5	Tujuan 5 Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15. Pertumbuhan ekonomi	%	4,65	4,62-5,98	5,04-6,52
	Sasaran 10. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16. Produktivitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	77.819.958	77.086.000	77.349.122





Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target 2023
	Tujuan 6 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup secara berkelanjutan Lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	17. IKLH	Poin	73,23	72,63	72,84
	Sasaran 11 Terpeliharanya kualitas Lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18. Potensi Penurunan Emisi GRK Ton (Juta CO2Eq)	Juta Ton CO2Eq	1,130	1,198	1,347

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2023

RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 telah ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2021 sehingga arah tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang termuat di RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pad RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Visi dan misi Kepala daerah terpilih tahun 2021 adalah
“*Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera*”

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang **kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat** yang hendak diwujudkan.

Tabel 4. 2. Penjelasan Visi Kepala Daerah Terpilh Kab. Soppeng

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera	Lebih Melayani	pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Diekspektasi bahwa Kabupaten Soppeng akan termasuk lima besar Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan SPM.
	Lebih Maju	daerah Soppeng akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia. Dalam empat tahun terakhir ranking IPM Kabupaten Soppeng telah terakselerasi dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 di Sulawesi Selatan. Dalam lima tahun kedepan diekspektasi bahwa capaian IPM Kabupaten Soppeng makin terakselerasi dan dapat menempati peringkat 17 diantara daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemajuan dalam hal kualitas manusia akan didukung oleh infrastruktur daerah dan kondisi keamanan dan ketentraman daerah yang semakin kindusif serta fasilitas ekonomi wilayah yang semakin terpenuhi dan berkualitas. Selama ini





Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya.
	Lebih Sejahtera	masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan telah menurun, PDRB/kapita telah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi cukup stabil, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemic Covid-19. Dalam lima tahun kedepan, capaian dalam berbagai indikator perekonomian tersebut akan semakin dimantapkan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti umum, UMKM, industri kecil, perdagangan, dan pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam sejumlah upaya umum. Substansi yang termuat dalam misi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan daerah; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menyelesaikan persoalan daerah; mensterilkan pelaksanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional; dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Misi juga harus mengacu pada permasalahan pokok daerah yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan misi sebagai berikut:

- (1) **Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar**
- (2) **Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat**
- (3) **Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah**
- (4) **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik**
- (5) **Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Tabel 4. 3. Penjelasan Misi Kepala Daerah Terpilih

Visi	Misi	Penjelasan Misi
Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera	Misi-1: Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar pelayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
	Misi-2: Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari





Visi	Misi	Penjelasan Misi
		pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian utama yakni pertanian dalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan.
	Misi-3: Memantapkan pencapaian daya saing daerah	Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata. Selain itu salah satu kewajiban kepala daerah adalah menjaga keamanan dan ketentraman wilayah yang pada akhirnya akan menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah.
	Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik	Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng
	Misi-5: Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

Tujuan RPJMD diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah: 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; 2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan





permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C. Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah: 1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; 2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan 3) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. 4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 yang termuat Dalam RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
SOPPING YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA					
Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar					
1		Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak		IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	87,93
			Sasaran-1.1.1: Meningkatkan mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
			Sasaran-1.1.2: Meningkatkan mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	86
Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat					
2		Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		IPM	70,29
			Sasaran-2.1.1: Meningkatkan derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	64,06
			Sasaran-2.1.2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,65
		Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata		Indeks Gini	0,379
				PDRB/kapita (Rp)	63.001.000
			Sasaran-2.2.1: Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,31
				Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,22





NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
			Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,57
3	Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah				
		Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah		Indeks daya saing infrastruktur daerah	73,65
			Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	65,93
			Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322,483
			Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	75
4	Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik				
		Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif		Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	55/CC
				Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,1/Tinggi
			Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
				Opini laporan keuangan	WTP
				Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	62 (B)
				Indeks Inovasi Daerah	40,01 - 45,00 (inovatif)
5	Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan				
		Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup		Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui
				Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)
			Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)		66,57	

2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025

RKPD Tahun 2023 merupakan bagian dari tahapan keempat atau pelaksanaan tahun ke 18 dalam periode RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025. Tahapan keempat merupakan tahapan pemantapan dalam mencapai





berbagai sasaran pokok RPJPD ini. Ini merupakan tahapan terakhir dari 20 tahun periode RPJPD. Pada tahapan ini, beberapa sasaran pokok yang kurang diprioritaskan arah kebijakan pembangunannya, pada tahapan ini sasaran pokok dan arah kebijakan tersebut menjadi prioritas. Pada tahapan ini, juga menjadi perhatian untuk mengejar target-target kinerja sasaran pokok yang belum tercapai berdasarkan akumulasi dampak dari prioritas arah kebijakan pembangunan periode sebelumnya.

Tabel 4. 5. Arah Kebijakan RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025

RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10 Tahun
	Angka Harapan Lama Sekolah	15,25 Tahun
	Angka Harapan Hidup	70,23 Tahun
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,9 Persen
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,75 Persen
	Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA)	Menurun Tingkat kekerasan Terhadap Anak
Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)	Angka Kriminalitas	3,75 Persen
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan)	97 Persen
Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Insfrastruktur
	Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (km dan %)	86,7 persen
	Rasio jaringan irigasi	13,30 Persen
	Persentase rumah tangga berakses air bersih	86,2 Persen
	Jumlah pengguna terminal	35.000 orang
	Rasio rumah layak huni	95,21 persen
	Persentase Desa yang terjangkau angkutan umum	100 Persen
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi
	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	BB
	Opini laporan keuangan	WTP
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	100 Persen
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	90,00 Persen
Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu (S6)	Angka Kemiskinan	6,85 Persen
	Persentase PMKS yang terlayani	100 Persen
Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan (S7)	%Desa Tertinggal	0,2 Persen
	Meningkatnya desa kualifikasi Mandiri	Meningkatnya Desa Mandiri





RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	% Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,83
	PDRB/kapita (Rp)	62.296.000
	Gini Ratio	0,25 Persen
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5
	% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	33,5
	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB	17,2
	% kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	45
Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9)	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100
	Indeks Lingkungan Hidup	73,30 Persen
	Indeks Kualitas Air	1 Persen
	Indeks Kualitas Udara	92,45 Persen
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0,45 Persen

3. Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Berdasarkan sasaran pokok pada RPJPD, Tujuan dan Sasaran RKP Tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan Prov. Sulawesi Selatan serta visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih maka rumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. 6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023

NO.	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Tujuan-1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	87,93
	Sasaran-1.1.: Meningkatkan mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
	Sasaran-1.2: Meningkatkan mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	86
2	Tujuan-2: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	70,29
	Sasaran-2.1.: Meningkatkan derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	64,06
	Sasaran-2.2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,65
3	Tujuan-3: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini	0,379
		PDRB/kapita (Rp)	63.001.000
	Sasaran-3.1: Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,31
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,22
	Sasaran-3.2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,57





NO.	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2023
4	Tujuan-4: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	73,65
	Sasaran-4.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	65,93
	Sasaran-4.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322,483
	Sasaran-4.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	75
5	Tujuan-5: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	55/CC
	Sasaran-5.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,1/Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
		Opini laporan keuangan	WTP
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	62 (B)
		Indeks Inovasi Daerah	40,01 - 45,00 (inovatif)
6	Tujuan-6: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui
	Sasaran-6.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,57

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menunjukkan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 serta memperhatikan sasaran pokok yang telah ditetapkan pada RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025. Indikator yang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kab. Soppeng terdiri atas 6 tujuan, 11 sasaran dengan rumusan indikator tujuan sebanyak 7 indikator tujuan dan 18 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kab. Soppeng Tahun 2023 sebanyak 25 indikator. Tujuan dan sasaran pembangunan yang mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005- 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 4. 7. Keterkaitan antara Tujuan dan Pembangunan Tahun 2023 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025

NO	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2023			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026			RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2023	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2023	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET 2025
1	Tujuan-1.: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	87,93	Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	87,93	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	100 Persen
	Sasaran-1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100	Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Sasaran-1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	86	Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	86	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	90,00 Persen
2	Tujuan-2: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	70,29	Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	70,29	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Sasaran-2.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	64,06	Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	64,06	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Sasaran-2.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,65	Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,65	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
3	Tujuan-3: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini	0,379	Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini	0,379	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	Gini Ratio	0,25 Persen
		PDRB / kapita (Rp)	63.001.000		PDRB / kapita (Rp)	63.001.000	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	PDRB / kapita (Rp)	62.296.000
	Sasaran-3.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,31	Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,31	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	% Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,83
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,22		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,22	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5





NO	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN RPKD TAHUN 2023			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026			RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2023	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2023	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET 2025
	Sasaran-3.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,57	Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,57	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Angka Kriminalitas	3,75 Persen
4	Tujuan-4: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	73,65	Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	73,65	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur
	Sasaran-4.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	65,93	Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	65,93	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur
	Sasaran-4.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322,483	Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322,483	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)		
	Sasaran-4.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	75	Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	75	Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)	Angka Kriminalitas	3,75 Persen
5	Tujuan-5: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi (Nilai / kategori)	55/CC	Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi (Nilai / kategori)	55/CC	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)		
	Sasaran-5.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,1 / Tinggi	Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,1 / Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B			
		Opini laporan keuangan	WTP		Opini laporan keuangan	WTP		Opini laporan keuangan	WTP
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	62 (B)		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	62 (B)	Berkurangnya keteringgalan desa dan kawasan perdesaan (S7)	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	BB
6		Indeks Inovasi Daerah	40,01 - 45,00 (inovatif)		Indeks Inovasi Daerah	40,01 - 45,00 (inovatif)			
	Tujuan-6: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui	Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui			





NO	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2023			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026			RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2023	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2023	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET 2025
	tampung lingkungan hidup			tampung lingkungan hidup					
	Sasaran-6.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)	Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)			
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238			
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,57		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,57	Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9)	Indeks Lingkungan Hidup	73,30 Persen

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.





- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023) merupakan RKP tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Tema RKP Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024. Tema RKP Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri dan pembangunan pariwisata.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 telah disepakati 7 Rancangan Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan





3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table 4.8 berikut:

Tabel 4. 8. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2023		
					RKPD 2023	P-RPJMD	RKP 2023
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	A (81 – 90)	A (81 – 90)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2 Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	A (>80–90)	A (>80–90)	
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3 Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	A (4,51 – 5,0)	A (4,51 – 5,0)	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4 Indeks Williamson	Angka	0,567- 0,607	0,607	





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target 2023		
					RKPD 2023	P-RPJMD	RKP 2023
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5 Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4	83,4	
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6 PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98	65,98	
			7 Tingkat Kemiskinan	%	7,75-8,00	7,45	7,75 – 8,00
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8 Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69	5,69	4,95 – 5,50
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunkan kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9 Rasio Gini	Angka	0,376-0,381	0,381	0,375 – 0,378
5	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10 IPM	Angka	73,17	73,05	73,50 – 73,53
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,05	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12 Indeks Kesehatan	Angka	78,23	77,86	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	77,23	77,23	
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14 Angka kriminalitas	Kasus	24,438	24,438	
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15 Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06–6,59	5,04–6,52	6,70 – 7,30
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16 Produktifitas Total Daerah	Rp/Angk atan Kerja	77.349.122	77.349.122	
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17 IKLH	poin	73,24	72,84	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18 Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ² Eq)	Juta Ton CO ² Eq	1,347	1,347	

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023





4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Kab. Soppeng terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/investasi di Kab. Soppeng. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu massive, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Kab. Soppeng pasca pandemi COVID-19 dengan menitikberatkan pada peningkatan dalam pemenuhan layanan dasar, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing daerah agar masyarakat dapat kembali memiliki ketahanan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026, sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2023 dan RKPD Prov. Sul-Sel Tahun 2023 serta visi, misi dan program prioritas Bupati Terpilih, maka tema RKPD Tahun 2023 adalah:

“ Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas dan Perwujudan Daya Saing Daerah “

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023 terdapat dua pokok tema, yaitu “*Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas*” dimaknai sebagai Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif, inovatif, untuk hadirnya pemerintahan untuk melayani rakyat dalam menghadapi persaingan dengan tetap menjaga keunggulan komparatif daerah (comparative advantage) sehingga keterpenuhan hak dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan tetap terjaga secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. “*Dan Perwujudan Daya Saing Daerah*” dimaknai Peningkatan potensi pengembangan daerah dan keswadayaan masyarakat serta Peningkatan pemanfaatan Sumber daya Alam yang berkelanjutan serta berbasis kearifan lokal di daerah dalam rangka memberikan peluang pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya Unggulan Daerah dan Potensi Desa serta Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang sesuai dengan kondisi kebutuhan dan potensi daerah sehingga dapat menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengembangan kawasan strategis daerah.. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”.

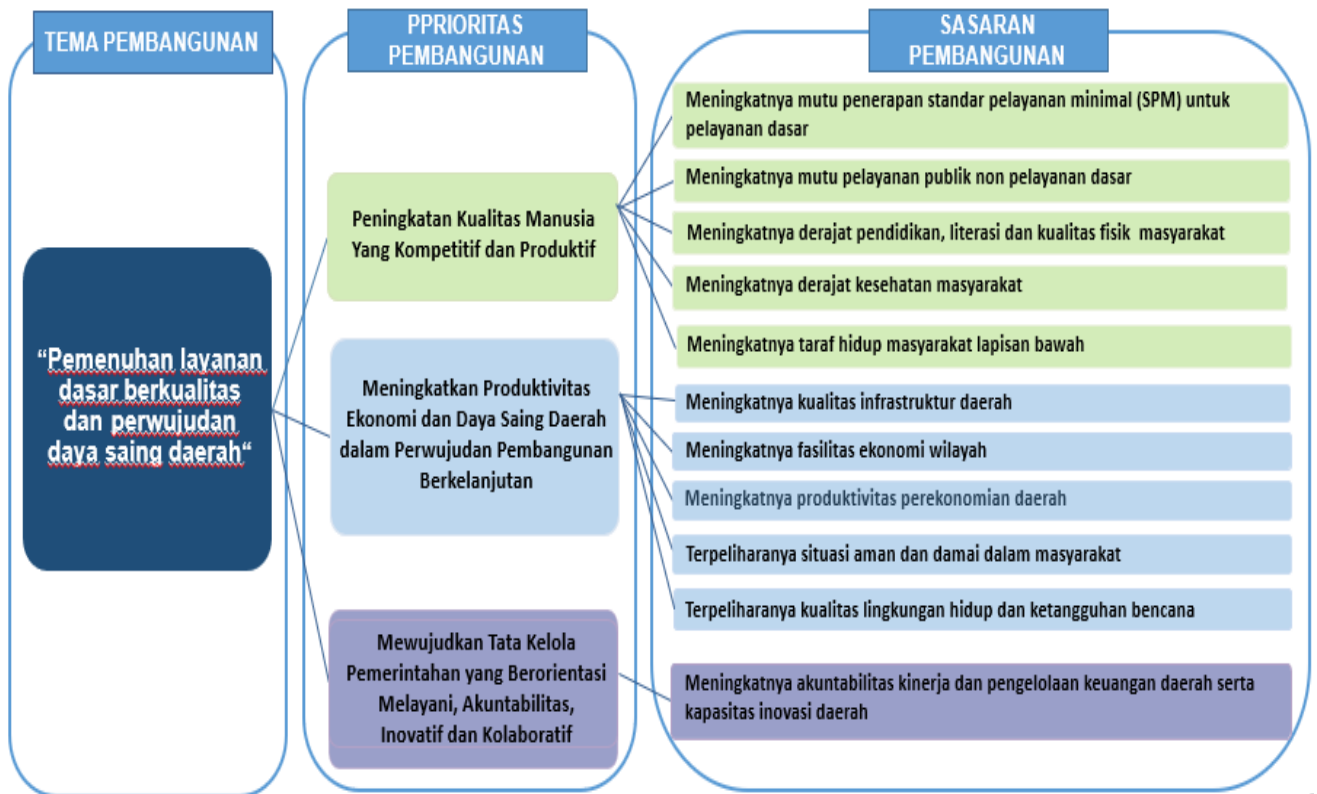
Berangkat dari Tema pembangunan, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2023 yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas sebagai berikut :





1. Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, dan Produktif
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif;

Gambar 4.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023



Penyusunan prioritas pembangunan ini selain mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, juga termasuk memperhatikan adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, selain itu juga memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 4. 9. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Soppeng Tahun 2023

TEMA : PEMENUHAN LAYANAN DASAR BERKUALITAS DAN PERWUJUDAN DAYA SAING DAERAH			
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	86
	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	64,06





TEMA : PEMENUHAN LAYANAN DASAR BERKUALITAS DAN PERWUJUDAN DAYA SAING DAERAH			
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,65
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,31
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,22
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,57
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	65,93
	Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322,483
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	75
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,57
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,1/Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
		Opini laporan keuangan	WTP
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	62 (B)
		Indeks Inovasi Daerah	40,01 – 45,00 (inovatif)

Tabel 4. 10. Sinergitas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kab. Soppeng Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023		
					RKPD Kab.Soppeng	RKPD Prov.Sul-Sel	RKP
1	Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif	Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	1 IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Nilai	86,4		
		Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	1 Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	Nilai	100		
		Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	2 IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	Nilai	86		
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	2 IPM	Nilai	70,29	73,17	73,50 – 73,53
		Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	3 Indeks Pendidikan	Nilai	64,06	67,05	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4 Indeks Kesehatan	Nilai	77,65	78,23	





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023		
					RKPD Kab.Soppeng	RKPD Prov.Sul-Sel	RKP
2	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	5 Angka kemiskinan (%)	%	6,57	7,75-8,00	7,75 – 8,00
		Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	3 Indeks Gini	Nilai	0,379	0,376-0,381	0,375 – 0,378
			4 PDRB Per Kapita	Rp	63.001.000	65.980.000	
		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	6 Pertumbuhan ekonomi (%)	%	6,31	5,06–6,59	6,70 – 7,30
			7 Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	4,22	5,69	4,95 – 5,50
		Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	5 Indeks daya saing infrastruktur daerah	Nilai	73,65		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	8 Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	65,93		
		Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	9 Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	Milyar Rp	322,483		
		Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	10 Angka Kriminalitas (kasus)	Kasus	75	24,438	
		Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup	6 Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Nilai / Kategori	Belum Terlampaui		
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	11 Indeks Risiko Bencana	Nilai			
			12 Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co ²)	Ton Co ²	36238	1,347	
			13 Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	Nilai	66,57	73,24	
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	7 Indeks reformasi birokrasi	Nilai / Kategori	55/CC	A (81 – 90)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	14 Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	Skor/Sta tus Kinerja	4,1/Tinggi		
			15 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai / Predikat	B		
			16 Opini laporan keuangan	Predikat	WTP		
			17 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai / Predikat	62 (B)	A (>80–90)	
			18 Indeks Inovasi Daerah	Nilai	40,01 – 45,00 (inovatif)		

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 di atas dimaksudkan sebagai fokus pembangunan tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah tahun 2023 sebagai mana yang telah di bahas pada bab II (kedua), untuk melihat sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2023, sebagai mana tabel 4.10 sebagai berikut:





Tabel 4. 11. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan daerah dan isu strategis dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Prioritas
		Global	Nasional	Provinsi	Daerah			
1	Belum optimalnya standar pelayanan minimal (SPM) secara menyeluruh yang menyebabkan kualitas hidup manusia relatif tertinggal dan struktur serta produktivitas perekonomian daerah belum menjamin kesejahteraan yang tinggi dan merata	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas	Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, dan Produktif	Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
							Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM
			Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar				IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	
		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Bonus Demografi	Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM
				Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas			Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan
				Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
			Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah		Angka kemiskinan (%)	





No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Prioritas
		Global	Nasional	Provinsi	Daerah			
2	Masih belum maksimalnya produktivitas ekonomi daerah serta daya saing daerah yang masih tertinggal dan terjadinya degradasi lingkungan serta sumber daya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan	Pandemi Covid-19	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini
		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan				PDRB Per Kapita
		Pandemi Covid-19	Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi	Revitalisasi Paradigma pengelolaan komoditi (Petik, Olah, Jual)			Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)
			Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan				Tingkat pengangguran terbuka (%)
		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian	Pembangunan Infrastruktur Wilayah		Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah
							Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah
		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan	Pengembangan Fasilitas Ekonomi Wilayah		Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)
				Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas			Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)





No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Prioritas
		Global	Nasional	Provinsi	Daerah			
		Perubahan Iklim	Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Pelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Alam		Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan
							Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana
								Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)
								Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)
3	Tatakelola pemerintahan yang baik belum terwujud sepenuhnya	Transformasi Digital		Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas	Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola yang Baik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi
							Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)
								Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
								Opini laporan keuangan
								Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
								Indeks Inovasi Daerah





4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 dirumuskan suatu strategi yang merupakan rangkaian tahapan berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Selain strategi juga dirumuskan arah kebijakan yang merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 sebagaimana tabel 4.12 berikut.

Tabel 4. 12. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kab. Soppeng Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan kuantaitas dan kualitas SDM dalam penyelenggaraan SPM
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diringi dengan dukungan regulasi	Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik pada PTSP, OPD, dan mitra teknis
	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan penguatan literasi masyarakat dan pengembangan prestasi olah raga serta kepemudaan	Pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya preventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit	Pemberdayaan masyarakat untuk upaya preventif dan promotif kesehatan
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Mendorong kolaborasi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa	Penguatan ekonomi berbasis keluarga dan individu rumah tangga miskin
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Mengefektifkan fungsi infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi
	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata	Pengembangan fasilitas ekonomi penunjang sebagai daerah tujuan maupun daerah persinggahan
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif	Hilirisasi produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan





PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepatuhan terhadap norma sosial secara bersinergi dengan teladan dari aparatur	Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana	Pelestarian keanekaragaman hayati dan penataan taman kota
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Mengakselerasi implementasi Road-Map reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu	Harmonisasi produk hukum daerah dan penguatan tata laksana

4.2.5. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kab. Soppeng tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari Visi, misi dan program prioritas bupati terpilih sebagai mana pada table 4.13 berikut.

Tabel 4. 13. Program Prioritas Kab. Soppeng Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	OPD
1	2	3	4	5	9
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)(%)	100%	
			Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100%	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
			Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	





PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	OPD
			Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas PERKIM
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	SATPOL PP & DAMKAR
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100%	BPBD
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100%	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabiitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial
			Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%	
			Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%	
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%	





PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	OPD
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	100%	DPMPTSPTKT
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	DISDUKCAPIL
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,20%	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	96,50	8 Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100%	
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri Donri(%)	100%	
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliraja(%)	100%	
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100%	
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lirililau(%)	100%	
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100%	
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	100%	
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)	100%	
	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1,22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1,07%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	29,83%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	1	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar	74%	Dinas Kesehatan
			Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	75%	
			Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	96%	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase keterpenuhan Sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	95%	





PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	OPD
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman yang Sesuai Standar	100%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	60%	
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100%	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100%	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	10,46	DTPHPKP
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan	17,52%	Dinas PERKIM
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda	100%	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	59,5	Dinas PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,25	
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,72	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	83	Dinas Perhubungan
			V/C Ratio	0,07	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	
	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	44,62%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pembinaan/Pengawasan Investasi Bagi Investor dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif	18,40%	DPMPTSPTKT
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Kabupaten/Kota	58,00%	
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9,77%	DTPHPKP
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	21,28%	
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	4,91%	
			Produksi daging (Kg)	503.065	DPKHP
			Produksi Telur (Kg)	10.011.821	





PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	OPD
			Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	100.479	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	100%	DTPHPKP
			Persentase Prasarana (Pernakan) yang Digunakan	95,00%	DPKHP
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	8%	DTPHPKP
			Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut ke madya	16%	
			Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya ke utama	8%	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	27,14%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	438,72	DPKHP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi	1,70%	DPPKUMK
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	58,25	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50,00%	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	24%	DPMPTSPTKT
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	5,00%	
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentruman dan Ketertiban Umum yang dapat terselesaikan	100%	SATPOL PP & DAMKAR
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	100%	BAKESBANGP OL
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	100%	
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	38,33%	BPBD





PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	OPD
	ketangguhan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Kawasan yang terkelola sesuai standar (m ²)	9351	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti	100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	69%	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	100%	BAPPELITBAN GDA
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100%	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan	100	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	85%	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	60%	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100%	BPKPD
			Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan Tepat Waktu	100%	
			Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD	100%	semua SKPD





Adapun keselarasan antara prioritas pembangunan Nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 14. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pembangunan manusia	Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, dan Produktif
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian lingkungan hidup	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif

Untuk keselarasan target Indikator makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 15. Keterkaitan Target Capaian Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2023

NO	NAMA INDIKATOR	TARGET		
		NASIONAL	PROVINSI SUL-SEL	KAB. SOPPENG
1	IPM	73,29 – 73,35	73,17	70,29
2	Angka Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	7,75-8,00	6,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0	5,69	4,22
4	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 – 5,9	5,06–6,59	6,31
5	Gini Ratio	0,375 – 0,0378	0,376-0,381	0,379
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02	1,347	36238
7	NILAI TUKAR PETANI (NTP)	103 - 105		
8	NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)	105 - 107		





BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

“Bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat”



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Kerangka pendanaan pada sub bab ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran Kabupaten Soppeng untuk tahun 2023. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan kemampuan keuangan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program.

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 5. 1. Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023

NO	URAIAN PP 12 (Tahun 2019)	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
2	Belanja Daerah	1,187,374,561,255.00	1,187,856,015,531.99
2.1	Belanja Operasi	844,280,739,164.00	846,082,827,459.99
2.1.1	Belanja Pegawai	535,239,743,472.00	563,154,027,287.99
2.1.2	Belanja Barang Jasa	293,284,040,053.00	241,155,527,752.00
2.1.3	Belanja Bunga	8,753,605,027.00	
2.1.3	Belanja Hibah	7,003,350,612.00	40,000,000,000.00
2.1.4	Belanja Bansos		1,773,272,420.00
2.2	Belanja Modal	232,929,454,859.00	216,532,580,165.00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	462,000,000.00	601,862,986.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62,885,858,784.00	65,253,159,556.00
2.2.3	Belanja Modal gedung dan bangunan	67,633,063,119.00	61,155,753,681.00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	101,592,282,956.00	88,995,690,957.00
2.2.5	Belanja Modal Aset tetap lainnya	356,250,000.00	526,112,985.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	4,511,556,134.00	5,000,000,000.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4,511,556,134.00	5,000,000,000.00
2.4	Belanja Transfer	105,652,811,098.00	120,240,607,907.00
2.4.1	Belanja Bagi hasil	2,595,992,398.00	2,815,686,015.00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	103,056,818,700.00	117,424,921,892.00

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Program prioritas ditetapkan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Perumusan program prioritas pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 3 prioritas pembangunan daerah di kabupaten soppeng tahun 2023. Prioritas pertama yakni Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif dengan 5 sasaran dan dijabarkan ke dalam 27 program prioritas, Prioritas kedua yakni Meningkatkan Produktifitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan dengan 5 sasaran dan dijabarkan ke dalam 25 program prioritas, Prioritas ketiga yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif dengan 1 sasaran dan dijabarkan ke dalam 8 program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2023 sebanyak 3 prioritas pembangunan dengan 11 sasaran serta 52 program prioritas sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.





Tabel 5. 2. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100%	87.213.267.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)(%)	100%		
				Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100%		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	70.800.633.989	Dinas Kesehatan
				Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah waga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	4.264.507.001	Dinas PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	4.154.371.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	261.663.200	Dinas PERKIM
				Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program	100%		





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
				Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	3.742.357.550	SATPOL PP & DAMKAR
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	3.028.164.350	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100%	821.771.700	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100%		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	211.265.400	Dinas Sosial
				Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%		
				Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%		
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	78.600.000	
		Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	100%	286.090.000	DPMPTSPKTKT
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	133.055.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,20%		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	96,50	12.089.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100%	761.420.000	8 Kecamatan
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri Donri(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawa(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	100%		
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada	100%		





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
		Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat		Kecamatan Citta(%)			
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	100%	880.006.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1,22	253.721.696	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1,07%	429.513.700	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	29,83%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	1	129.108.828		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar	74%	Telah Dianggarkan Sebelumnya	Dinas Kesehatan
				Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	75%		
				Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	96%		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase keterpenuhan Sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	95%	2.210.600.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman yang Sesuai Standar	100%	289.936.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	60%	664.485.000	
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100%	176.400.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100%	1.650.380.000	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	10,46	17.650.000	DTPHPKP
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan	17,52%	769.139.550	Dinas PERKIM
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda	100%	Telah Dianggarkan Sebelumnya	Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	59,5	80.995.756.000	Dinas PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,25	9.268.776.001	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang	0,72		





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
	Berkelanjutan			dilayani oleh jaringan irigasi			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	83	1.955.176.800	Dinas Perhubungan
				V/C Ratio	0,07		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	12.999.600	Dinas PERKIM
		Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	44,62%	478.002.748	DISPAPORA
		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9,77%	2.287.505.858	DTPHPKP
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	21,28%		
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	4,91%		
				Produksi daging (Kg)	503.065	252.381.100	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
				Produksi Telur (Kg)	10.011.821		
				Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	100.479		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	100%	6.729.720.000	DTPHPKP
				Persentase Prasarana (Peternakan) yang Digunakan	95,00%	125.373.635	DPKHP
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	8%	5.558.483.250	DTPHPKP
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut ke madya	16%		
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya ke utama	8%		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	27,14%	2.713.070.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	438,72	272.573.000	DPKHP
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	58,25	69.412.650	DPPKUKM
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50,00%	681.150.000	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	24%	15.146.000	DPMPTSPTKT
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	5,00%	130.400.000	
		Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat terselesaikan	100%	Telah Dianggarkan Sebelumnya	SATPOL PP & DAMKAR
			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada	100%	573.200.000	BAKESBANGPOL





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	PERANGKAT DAEAH
			PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba			
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	100%	1.208.000.000	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	38,33%	Telah Dianggarkan Sebelumnya	BPBD
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	86.928.280	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Kawasan yang terkelola sesuai standar (m²)	9351	40.047.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	69%	3.089.779.995	
			3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100%						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan	100				98.995.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	85%				1.485.944.400	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	60%				392.291.500	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100%				121.136.235.559	BPKPD
	Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan Tepat Waktu	100%					
	Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	100%					
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	100%				884.340.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100				1.205.798.750	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD	100%				693.148.397.277	
TOTAL						1.118.531.341.017	





5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023

Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan pada Tahun 2023, ditetapkan Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pendanaannya. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya (prakiraan maju 1 (satu) tahun) dan tahun yang direncanakan, pendanaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 juga ditempuh melalui sumber-sumber yang lain yaitu dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Soppeng. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Soppeng telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya yang dijabarkan dalam urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Serta telah menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Soppeng tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 5. 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				380.879.126.836				375.359.994.032	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100 %	291.987.952.686			100 %	336.016.093.161	
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %	218.823.566			100 %	230.805.923	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	150.063.566	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	155.169.923	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	312 Dokumen	68.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		312 Dokumen	75.636.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	288.928.638.720			100 %	333.955.657.990	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2500 Orang/ bulan	288.614.838.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2500 Orang/ bulan	333.764.257.990	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1000 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Dokumen	1.320.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	298.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	190.080.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	33.091.000			100 %	13.592.150	
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	27.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	6.914.050	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	0 Dokumen	6.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	6.678.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)		100 %	1.015.223.150			100 %	710.398.098	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Paket	4.747.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	374.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	44.437.998	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	86.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	95.425.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	47.669.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	41.985.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Paket	69.084.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Paket	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	500 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Laporan	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	148 Laporan	429.772.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		148 Laporan	472.749.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	1.257.128.000			100 %	518.738.000	
1	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		10 Unit	305.028.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Unit	492.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	518.738.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	460.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	369.910.000			100 %	406.901.000	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	187.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	206.261.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	182.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	200.640.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	165.138.250			100 %	180.000.000	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	83 Unit	54.038.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 Unit	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	16 Unit	11.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	80 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Unit	110.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			87.213.267.250			100 %	37.966.473.281	
						Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100 %				100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %				100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)		100 %				100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100 %				100 %		
1	1	2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD			52.507.782.400			100 %	31.982.252.126	
1	1	2	2.0 1	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Ruang	928.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		1 Ruang	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 Ruang	1.561.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		1 Ruang	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	3 Ruang	1.496.492.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Pendidikan-		3 Ruang	617.804.724	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan			Reguler-SD				
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 1	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 Ruang	411.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		1 Ruang	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 1	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 Unit	4.046.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		1 Unit	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 1	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	20 Ruang	5.993.389.250	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		20 Ruang	14.685.748.976	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	24 Ruang	4.782.371.950	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		24 Ruang	4.971.672.976	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua	1 Ruang	102.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-		1 Ruang	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kelurahan			Reguler-SD				
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Ruang	1.212.714.500	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		9 Ruang	959.750.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	47 Paket	8.941.090.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		47 Paket	6.151.237.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan								
						Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan								
						Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan								





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Satuan Pendidikan	44.469.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Satuan Pendidikan	42.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	21000 Peserta Didik	3.743.694.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21000 Peserta Didik	3.703.837.150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Soppeng		19.245.360.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler			14.556.524.801	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama			28.280.600.600			100 %	0	
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	0 Unit	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 2	1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	10 Ruang	7.630.772.600	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		10 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 2	1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	8 Ruang	1.893.200.000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		8 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 2	1 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 Ruang	1.500.000.000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 2	1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	4 Ruang	1.196.000.000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		4 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 2	1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	4 Ruang	3.596.000.000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		4 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 2	2 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	0 Unit	1.350.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.0 2	3 2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1500 Peserta Didik	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1500 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.0 2	3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	0 Paket	820.960.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		0 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 2	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10000 Peserta Didik	1.417.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.0 2	4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Satuan Pendidikan	71.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Soppeng		7.301.720.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler			0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.0 3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD			4.955.784.250			100 %	5.037.005.875	
1	1	2	2.0 3	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Unit	531.000.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Unit	584.100.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 3	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	6 Unit	1.687.896.250	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		6 Unit	1.424.165.875	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.0 3	1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 Satuan Pendidikan	58.800.000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD		1 Satuan Pendidikan	64.680.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan							





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau		2.678.088.000	DAK Non Fisik-BOP PAUD			3.625.372.096	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			1.469.100.000			100 %	947.215.280	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	0 Satuan Pendidikan	1.469.100.000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		0 Satuan Pendidikan	947.215.280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Mulok yang Dikembangkan		1 Kurikulum	32.900.000			1 Kurikulum	36.190.000	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum mulok pendidikan dasar yang ditetapkan		1 Kali	32.900.000			1 Kali	36.190.000	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	32.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	36.190.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV		100 %	1.645.006.900			100 %	968.007.590	
						% PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV		100 %				100 %		





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	1	4	2.0 1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV		40 Orang	1.645.006.900			40 Orang	968.007.590	
1	1	4	2.0 1	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 Laporan	1.645.006.900	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		40 Laporan	968.007.590	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.408.907.200				373.230.000	
2	2	2	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Daerah		94,12 %	17.400.000			94,12 %	19.140.000	
2	2	2	3	2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pementasan kesenian daerah		2 Kali	17.400.000			2 Kali	19.140.000	
2	22	3	2.0 1	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	0 Lembaga	17.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Lembaga	19.140.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	2	2	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan		100 %	1.391.507.200			100 %	354.090.000	
						Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan		25 %				25 %		
2	2	2	5	2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan		28 Objek	69.200.000			28 Objek	0	
						Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan		1 Paket				1 Paket		
2	22	5	2.0 1	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	0 Objek	69.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Objek	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	2	2	5	2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan		1 Paket	1.322.307.200			1 Paket	354.090.000	
2	22	5	2.0 2	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Objek	1.322.307.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Objek	354.090.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TOTAL									382.288.034.036					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
DINAS KESEHATAN														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				251.664.628.586				215.090.553.506	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan			177.698.973.597			100 %	171.548.664.057	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang Tersusun tepat Waktu		100 Persen	96.800.000			100 Persen	70.300.000	
						Persentase Dokumen Penganggaran yang Disusun Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen		
						Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen		
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	24.300.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.850.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Peubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.850.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	34.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.300.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Keuangan		100 Persen	71.518.369.923			100 Persen	63.643.544.000	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	917 ASN	71.471.669.923	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		917 ASN	63.602.344.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	46.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	41.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan		100 Persen	32.700.000			100 Persen	0	
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	21 Laporan	32.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	24.300.000			100 Persen	17.500.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	24.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	17.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 Persen	609.421.060			100 Persen	402.290.000	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Paket	10.046.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	7.752.000			1 Paket	12.455.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	0			1 Paket	12.455.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Paket	82.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	70.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Paket	58.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Paket	66.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	129.900.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	26.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	13 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	14.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	310.772.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	201.380.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik		100 Persen	18.300.000			100 Persen	225.000.000	
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	46 Unit	18.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 Unit	225.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1.643.061.218			100 Persen	810.388.000	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	14 Laporan	902.661.218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	210.388.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	13 Laporan	740.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	600.000.000	DINAS KESEHATAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik		100 Persen	447.620.000			100 Persen	1.344.786.000	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	76 Unit	425.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		76 Unit	448.262.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	58 Unit	22.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		58 Unit	448.262.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	448.262.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kemandirian Keuangan Puskesmas		100 Persen	103.308.401.396				105.034.856.057	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		17 Unit Kerja	103.308.401.396			17 Unit Kerja	105.034.856.057	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	70.800.633.989			100 %	41.940.763.449	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan		96 %				96 %		
						Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar		74 %				74 %		
						Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar		75 %				75 %		
1	2	2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia		100 Persen	39.788.962.000			100 Persen	23.633.495.000	
1	2	2	2.0 1	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	2.000.000.000			1 Unit	2.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 1	1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	1.460.000.000			1 Unit	2.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 1	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Unit	29.095.467.000			4 Unit	12.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	5.008.115.000			1 Paket	5.008.115.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	2.151.063.000			1 Paket	2.151.063.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 1	2 1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Paket	74.317.000			17 Paket	74.317.000	DINAS KESEHATAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.958.871.989			100 Persen	104.409.119.34 9	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2574 Orang	627.305.800			2574 Orang	36.132.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2811 Orang	125.299.000			2811 Orang	69.949.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2790 Orang	186.743.000			2790 Orang	46.545.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 Dokumen	153.116.000			1 Dokumen	14	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5673 Orang	585.809.500			5673 Orang	44.714.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	76096 Orang	28.750.000			76096 Orang	4.950.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20317 Orang	217.492.850			20317 Orang	84.900.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4940 Orang	290.031.500			4940 Orang	12.600.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2555 Orang	35.373.750			2555 Orang	13.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	413 Orang	13.740.000			413 Orang	12.150.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	194 Orang	36.724.000			194 Orang	9.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2596 Orang	9.200.000			2596 Orang	9.200.000	DINAS KESEHATAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	1.887.835.750			17 Dokumen	249.995.335	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	1.317.334.700			17 Dokumen	593.788.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	339.297.750			17 Dokumen	42.305.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	446.397.500			17 Dokumen	232.880.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	448.909.850			17 Dokumen	124.943.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	10.550.000			8 Dokumen	10.550.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	2.950.000			1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	358.468.100			17 Dokumen	75.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	4.839.354.550			17 Dokumen	227.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	13.503.467.399			1 Dokumen	15.695.580.600	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	117.725.000			1 Dokumen	24.570.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	594.000.000			1 Dokumen	85.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		17 Dokumen	1.349.337.400			17 Dokumen	1.349.337.400	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Dokumen	1.380.289.340			1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Unit	439.180.000			17 Unit	439.180.000	DINAS KESEHATAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	7.850.000			1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 2	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Unit	1.606.339.250				0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100 %	15.300.000			100 %	214.986.500	
1	2	2	2.0 3	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	6.300.000			17 Dokumen	103.986.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 3	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	9.000.000			17 Dokumen	111.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Izin Operasional		100 %	37.500.000			100 %	32.500.000	
1	2	2	2.0 4	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Unit	22.300.000			20 Unit	20.300.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.0 4	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	15.200.000			1 Dokumen	12.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai dengan Standar			2.210.600.000			95 %	1.011.600.000	
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2.166.000.000			100 Persen	966.000.000	
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	150 Orang	2.166.000.000			150 Orang	966.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.0 3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan kompetensi		100 Persen	44.600.000			100 Persen	45.600.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	2.0 3	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	230 Orang	44.600.000			230 Orang	45.600.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Pengawasan		100 %	289.936.000			100 %	261.516.000	
1	2	4	2.0 2		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat Produksi		100 Persen	55.900.000			100 Persen	49.800.000	
1	2	4	2.0 2	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Dokumen	55.900.000			12 Dokumen	49.800.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.0 3		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT		100 Persen	101.180.000			100 Persen	101.180.000	
1	2	4	2.0 3	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	270 Dokumen	101.180.000			270 Dokumen	101.180.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi		100 Persen	22.320.000			100 Persen	0	
1	2	4	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	22.320.000			1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	4	2.0 6		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan		100 Persen	110.536.000			100 Persen	110.536.000	
1	2	4	2.0 6	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	270 Unit	110.536.000			270 Unit	110.536.000	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		60 %	664.485.000			60 %	328.010.000	
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100 Persen	195.160.000			100 Persen	195.160.000	
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	195.160.000			17 Dokumen	195.160.000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2.0 2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersihdan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100 Persen	95.000.000			100 Persen	120.000.000	
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	95.000.000			17 Dokumen	120.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	374.325.000			100 Persen	12.850.000	
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Dokumen	374.325.000			17 Dokumen	12.850.000	DINAS KESEHATAN
TOTAL									251.664.628.586					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				136.929.859.737				42.438.000.000	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100 %	14.106.544.735			100 %	14.943.000.000	
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan perangkat daerah tepat waktu		100 %	36.500.000			100 %	42.000.000	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Dokumen	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Dokumen	17.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	12.265.335.583			100 %	14.045.000.000	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	140 Orang/bulan	12.212.335.583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		140 Orang/bulan	14.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	43.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	45.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100 %	9.000.000			100 %	0	
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Keterpenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		100 %	2.000.000			100 %	3.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	2.0 4	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	49.000.000			100 %	50.000.000	
1	3	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	24.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	24.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	690.279.580			100 %	268.000.000	
1	3	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	8.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	40.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Paket	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Paket	80.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	13000000 Laporan	11.927.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13000000 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1100 Laporan	414.852.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1100 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	51.600.000			100 %	55.000.000	
1	3	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	51.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	55.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	379.953.222			100 %	170.000.000	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	159.953.222	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	170.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase keterpenuhan pemeliharaan barang milik daerah		100 %	622.876.350			100 %	310.000.000	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	44.996.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	69 Unit	224.496.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		69 Unit	195.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Unit	230.000.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Unit	25.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	97.432.825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota		0,25 %	9.268.776.001			0,25 %	345.000.000	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				541.000.000				50.000.000	
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	41.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	0.2 KM	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.2 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	2	2.0 2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		6941 Ha	8.727.776.001			6941 Ha	295.000.000	
1	3	2	2.0 2	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Soppeng, Mariorawa, Manorang Salo	3 KM	8.497.926.001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.0 2	2 7	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Unit	12.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.0 2	2 8	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 DI	217.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 DI	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari		100 %	4.264.507.001			100 %	1.300.000.000	
1	3	3	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan		0 Unit	4.264.507.001			0 Unit	1.300.000.000	
1	3	3	2.0 1	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Liter/Detik	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Liter/Detik	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	2.0 1	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Watu Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko Kab. Soppeng, Donri Donri, Pesse Kab. Soppeng, Donri Donri, Tottong Kab. Soppeng, Ganra, Ganra Kab. Soppeng, Citta, Labae	200 SR	2.764.507.001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		200 SR	950.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan		66,00 %	200.000.000			66,00 %	500.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	4	2.0 1		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Daerah yang dikelola dan dikembangkan		16	200.000.000			16	500.000.000	
1	3	4	2.0 1	6	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		100 %	4.154.371.000			100 %	1.750.000.000	
1	3	5	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan		317 Unit	4.154.371.000			317 Unit	1.750.000.000	
1	3	5	2.0 1	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga Kab. Soppeng, Lilirilau, Tetewatu Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Paroto Kab. Soppeng, Marioriawa, Laringgi Kab. Soppeng, Donri Donri, Labokong Kab. Soppeng, Citta, Kampiri	300 Rumah Tangga	4.024.771.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		300 Rumah Tangga	1.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5	2.0 1	1 4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Rumah Tangga	129.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Rumah Tangga	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat		56 %	400.000.000			56 %	450.000.000	
1	3	6	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten yang Dikelola dan Dikembangkan			400.000.000				450.000.000	
1	3	6	2.0 1	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	400 M	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 M	450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB		0,60 %	17.132.040.000			0,60 %	15.375.000.000	
1	3	8	2.0 1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi			17.132.040.000				15.375.000.000	
1	3	8	2.0 1	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	200 Dokumen	350.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Dokumen	375.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	2.0 1	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Dokumen	16.782.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Peningkatan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan		30 %	5.826.000.000			30 %	1.500.000.000	
1	3	9	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang bangunan dan lingkungannya ditata		1 Kawasan	5.826.000.000			1 Kawasan	1.500.000.000	
1	3	9	2.0 1	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Kawasan	5.826.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kawasan	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		59,5 %	80.995.756.000			59,5 %	5.850.000.000	
1	3	10	2.0 1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, derehabilitasi dan dipelihara kabupaten		17 Km	80.995.756.000			17 Km	5.850.000.000	
1	3	10	2.0 1	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.0 1	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tetikenrarae	7 KM	77.521.036.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		7 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Marioriwawo, Watu							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Tetewatu							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Bila							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Labokong							
							Kab. Soppeng, Ganra, Ganra							
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KM	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 KM	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	17 M	3.094.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 M	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 M	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 M	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		0,30	131.975.000			0,30	205.000.000	
1	3	11	11		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih		100 Orang	27.050.000			100 Orang	35.000.000	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Orang	10.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 Orang	16.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	11		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten		1 Dokumen	60.000.000			1 Dokumen	115.000.000	
1	3	11	2.02	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	2.0		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang diterbitkan		40 Rekomendasi	28.025.000			40 Rekomendasi	38.000.000	
1	3	11	2.0	2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 Dokumen	18.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Dokumen	18.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	2.0	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	35 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang	20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 Dokumen	16.900.000			1 Dokumen	17.000.000	
1	3	11	2.0	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 Orang	16.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	17.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW		43 %	449.890.000			43 %	220.000.000	
1	3	1	2.0		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab yang disusun		1 Dokumen	257.000.000			1 Dokumen	0	
1	3	12	2.0	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	257.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten		1 Dokumen	177.900.000			1 Dokumen	200.000.000	
1	3	12	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	27.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	2.0	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun		1 Dokumen	14.990.000			1 Dokumen	20.000.000	
1	3	12	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	14.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TOTAL									136.929.859.737					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.235.370.918				10.000.000.000	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		100 %	3.092.597.968			100 %	5.360.000.000	
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 Persen	17.316.000			100 Persen	40.000.000	
						Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 Persen				100 Persen		
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu		100 Persen				100 Persen		
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	4.329.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	4.329.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	4.329.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	4.329.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 Persen	2.284.288.111			100 Persen	3.530.000.000	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya		20 Orang	2.274.713.311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	3.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Dokumen	5.249.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		350 Dokumen	15.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	4	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2 Dokumen	4.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 Persen	413.769.492			100 Persen	740.000.000	
1	4	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	1.327.882	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	3.256.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	72.335.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	12.453.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	30.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	68.348.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan	256.048.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Laporan	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 Persen	23.150.000			100 Persen	500.000.000	
1	4	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	23.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	270.161.000			100 Persen	400.000.000	
1	4	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	57.761.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	4	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	312 Laporan	212.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		312 Laporan	300.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik		100 Persen	83.913.365			100 Persen	150.000.000	
1	4	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	74.503.365	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Unit	9.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		100 %	261.663.200			100 %	630.000.000	
						Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100 %				100 %		
1	4	2	2.0 1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (dok)		2 Dokumen	8.749.600			2 Dokumen	40.000.000	
1	4	2	2.0 1	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	8.749.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.0 1	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.0 2		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi yang dilakukan		2 Kali	0			2 Kali	20.000.000	
1	4	2	2.0 2	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	4	2	2.0 3		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun dan direhab		31 Unit	249.414.000			31 Unit	530.000.000	
1	4	2	2.0 3	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Unit Rumah	249.414.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Unit Rumah	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.0 3	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	30.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.0 6		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan (rekomendasi)		100 Persen	3.499.600			100 Persen	40.000.000	
1	4	2	2.0 6	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.499.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	40.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani		50,45 %	98.970.600			50,45 %	1.880.000.000	
1	4	3	2.0 1		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan (rekomendasi)		100 Persen	5.000.000			100 Persen	80.000.000	
1	4	3	2.0 1	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	30.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	4	3	2.0 2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah/luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditata (Kawasan/ Ha)		0 Persen	0			0 Persen	100.000.000	
1	4	3	2.0 2	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.0 2	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.0 3		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah/luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya		25.23 Persen	93.970.600			25.23 Persen	1.700.000.000	
1	4	3	2.0 3	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.0 3	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit Rumah	85.770.600			6 Unit Rumah	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.0 3	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.0 3	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	97.85 Ha	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		97.85 Ha	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.0 3	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan		17,52 %	769.139.550			17,52 %	1.000.000.000	
						Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan		17,52 %				17,52 %		
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Di Luar KawasaKumuh		2.64 Persen	769.139.550			2.64 Persen	1.000.000.000	
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit Rumah	769.139.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit Rumah	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum)		1	12.999.600			1	1.130.000.000	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang dibangun/ rehab (kawasan)		1 Kawasan	12.999.600			1 Kawasan	1.130.000.000	
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	40.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Lokasi	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Lokasi	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	40.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	12.999.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				4.400.000			110.000.000		
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya di Atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan		100 %	0			100 %	50.000.000	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan		0 Persen	0			0 Persen	50.000.000	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi		100 %	4.400.000			100 %	30.000.000	
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten yang diselesaikan		100 Persen	4.400.000			100 Persen	30.000.000	
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Berita Acara	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	30.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100 %	0			100 %	30.000.000	
2	10	6	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Hak Milik Yang Dikeluarkan		100 Persen	0			100 Persen	30.000.000	
2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOTAL									4.239.770.918					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.772.708.051				15.711.425.278	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		100 %	6.002.186.151			100 %	6.580.597.728	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan dan yang disusun tepat waktu		100 %	9.000.000			100 %	35.000.000	
						Persentase dokumen penganggaran dan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
						Persentase dokumen perencanaan,penganggaran, dan pelaporan perangkat daerah secara tepat waktu		100 %				100 %		
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	35.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	5.204.508.939			100 %	5.506.608.786	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	54 Orang/bulan	5.184.578.939	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 Orang/bulan	5.466.608.786	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	4.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	7.800.000			100 %	20.000.000	
1	5	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	113.837.585			100 %	225.000.000	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	5.307.591	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	17.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	13.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	72.511.594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	5.118.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	85.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	4.950.000			100 %	40.000.000	
1	5	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	4.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa urusan pemerintahan daerah		100 %	103.988.942			100 %	103.988.942	
1	5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	103.988.942	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	103.988.942	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	558.100.685			100 %	650.000.000	
1	5	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	44.527.685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Unit	513.573.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang dapat terselesaikan		100 %	3.742.357.550			100 %	4.091.232.550	
1	5	2	2.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		100 %	3.739.332.550			100 %	3.941.232.550	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	5	2	2.0 1	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Kasus	3.736.832.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		86 Kasus	3.871.232.550	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.0 1	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kasus	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Kasus	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.0 1	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan		100 %	2.275.000			100 %	100.000.000	
1	5	2	2.0 2	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.0 2	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	1.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.0 3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang terbina		100 %	750.000			100 %	50.000.000	
1	5	2	2.0 3	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100 %	3.028.164.350			100 %	5.039.595.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	5	4	2.0 1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dalam Daerah/kota		100 %	3.028.164.350			100 %	5.039.595.000	
1	5	4	2.0 1	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.019.714.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.039.595.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	2.0 1	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	8.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TOTAL									12.772.708.051					
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.329.551.340			5.259.661.257		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	3.507.779.640			100 %	3.669.097.745	
1	5	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %	56.496.200			100 %	50.700.000	
1	5	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	13.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	12.713.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	14.300.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	13.619.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	4.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	16.623.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	26.900.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	2.679.834.694			100 %	2.387.535.983	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan	2.610.008.294	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang/bulan	2.358.585.983	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		150 Dokumen	5.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Dokumen	6.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		5 Dokumen	61.293.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	19.250.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.633.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	452.788.444			100 %	501.093.500	
1	5	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	1.336.594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	28.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	18.103.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		5 Paket	62.206.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	45.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250 Laporan	337.292.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Laporan	388.593.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	27.120.000			100 %	430.876.162	
1	5	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	27.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	430.876.162	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan		100 %	169.811.000			100 %	173.892.100	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	40.811.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	44.892.100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	129.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	129.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik		100 %	121.729.302			100 %	125.000.000	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	35.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	65.310.052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	1.719.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 %	821.771.700			100 %	1.590.563.512	
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %				100 %		
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan Informasi Rawan Bencana		1 layanan	38.873.200			1 layanan	100.832.000	
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		10000 Orang	38.873.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Orang	50.832.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		3 layanan	580.872.000			3 layanan	632.325.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Terhadap Bencana								
1	5	3	2.0 2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		800 Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		800 Orang	9.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 2	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		30 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 2	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)		5 Dokumen	50.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	31.125.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		55 Orang	530.722.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55 Orang	549.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 2	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		2 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 2	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		800 Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		800 Orang	7.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3 layanan	202.026.500			3 layanan	857.406.512	
1	5	3	2.0 3	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)		2 Dokumen	112.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	35.125.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 3	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)		10000 Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Orang	38.277.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 3	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		10000 Orang	89.826.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Orang	69.004.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0 3	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		12 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	715.000.012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL									4.329.551.340					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
DINAS SOSIAL														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.409.930.687			7.996.579.000		
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial		100 %	4.239.611.017			100 %	5.357.638.330	
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %	57.400.000			100 %	79.900.000	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	28.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	33.100.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	15.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	17.750.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	14.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	29.050.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	3.199.466.362			100 %	4.077.913.675	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	32 Orang/bulan	3.158.666.362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Orang/bulan	4.017.863.675	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	21.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	18.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20.800.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	18.250.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah inventaris barang milik daerah		100 %	9.000.000			100 %	12.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						persentase keterpenuhan adminstrasi barang milik daerah		100 %				100 %		
1	6	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	12.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan adminstrasi umum		100 %	518.580.750			100 %	646.160.750	
1	6	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	23.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	23.750.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	5 Paket	116.058.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	209.638.450	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	378.772.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	412.772.300	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik		100 %	69.860.000			100 %	121.060.000	
1	6	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	69.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	121.060.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	182.908.080			100 %	182.908.080	
1	6	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	100.108.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	100.108.080	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	82.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	82.800.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	202.395.825			100 %	237.695.825	
1	6	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Unit	90.395.825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	125.695.825	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	35 Unit	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Unit	22.000.000	DINAS SOSIAL





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	90.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial		100 %	176.400.000			100 %	225.900.000	
1	6	2	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial		100 %	176.400.000			100 %	225.900.000	
1	6	2	2.0 3	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102 Orang	50.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		102 Orang	100.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.0 3	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	99.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Orang	99.750.000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.0 3	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Lembaga	26.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Lembaga	26.150.000	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti		100 %	211.265.400			100 %	230.465.400	
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar panti		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		100 %				100 %		
1	6	4	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		173 jiwa	201.015.400			173 jiwa	220.215.400	
1	6	4	2.0 1	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170 Orang	86.290.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		170 Orang	105.490.400	DINAS SOSIAL





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	6	4	2.0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	8.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	8.325.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.0 1	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	31.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	31.250.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.0 1	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	8.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	8.750.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.0 1	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	27.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	27.200.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.0 1	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1134 Orang	39.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1134 Orang	39.200.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		2500 Orang	10.250.000			2500 Orang	10.250.000	
1	6	4	2.0 2	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	5.250.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.0 2	1 3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang	5.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial		100 %	1.650.380.000			100 %	2.007.701.000	
1	6	5	2.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		26764 KK	1.650.380.000			26764 KK	2.007.701.000	
1	6	5	2.0 2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18000 Keluarga	79.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18000 Keluarga	79.900.000	DINAS SOSIAL





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	6	5	2.0 2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1462 Keluarga	1.520.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1462 Keluarga	1.847.801.000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.0 2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	80.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		100 %	78.600.000			100 %	121.200.000	
1	6	6	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial		3283 jiwa	15.600.000			3283 jiwa	31.200.000	
1	6	6	2.0 1	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	714 Jiwa	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		714 Jiwa	31.200.000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna siaga Bencana zang diberdayakan		17 Orang	63.000.000			17 Orang	90.000.000	
1	6	6	2.0 2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Orang	63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Orang	90.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	TMP yang Dikelola		100 %	53.674.270			100 %	53.674.270	
1	6	7	2.0 1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang dikelola		1 TMP	53.674.270			1 TMP	53.674.270	
1	6	7	2.0 1	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Makam	53.674.270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Makam	53.674.270	DINAS SOSIAL
TOTAL									6.409.930.687					





V-64





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Orang	3.812.576.478	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Orang	4.314.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	21.774.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	19.888.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	19.887.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	8.644.000			100 %	20.000.000	
2	8	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	8.644.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah		100 %	34.866.000			100 %	42.500.000	
2	8	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	54 Dokumen	17.958.000			54 Dokumen	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	16.908.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	17.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	351.760.715			100 %	617.000.000	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	3.002.155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	32.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	47.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	14.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	28.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	67.869.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	85.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	27.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	300 Laporan	229.939.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Laporan	425.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	130.854.863			100 %	144.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	67.254.863	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	62.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	63.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	82.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Baik		100 %	171.324.403			100 %	684.070.000	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Unit	56.667.403	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	116.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	59 Unit	84.540.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		59 Unit	252.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Unit	15.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	86.070.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	14.566.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	230.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		13,25 %	31.118.200			13,25 %	62.887.000	
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		3 %	9.405.000			3 %	20.450.000	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		34 Perangkat Daerah	9.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Perangkat Daerah	20.450.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan		75 %	17.638.200			75 %	35.687.000	
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Organisasi	17.638.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Organisasi	35.687.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang terbina		100 %	4.075.000			100 %	6.750.000	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Orang	4.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	6.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,001	21.114.800			0,001	79.110.000	
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan pada korban terlaksana		100 %	2.783.600			100 %	64.110.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	3	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Layanan	2.783.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Layanan	64.110.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terbina		100 %	18.331.200			100 %	15.000.000	
2	8	3	2.0 3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Orang	18.331.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ketersediaan Layanan Pembelajaran Keluarga		88 %	27.825.000			88 %	42.100.000	
2	8	4	2.0 1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang dibina		1.74 %	4.250.000			1.74 %	6.750.000	
2	8	4	2.0 1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Perangkat Daerah	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Perangkat Daerah	6.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4	2.0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan/kelurahan yang didampingi dalam penyediaan lembaga layanan pembelajaran keluarga		2 kec/kel/desa	19.975.000			2 kec/kel/desa	25.000.000	
2	8	4	2.0 2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Orang	19.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4	2.0 3		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pembelajaran keluarga yang tersedia		2 lembaga	3.600.000			2 lembaga	10.350.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Layanan	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Layanan	10.350.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak		29,41 %	28.986.000			29,41 %	46.675.000	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah yang memiliki petugas data informasi gender dan anak		45 %	28.986.000			45 %	46.675.000	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	10.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	21.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	18.831.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.675.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi		79,17 %	28.404.000			79,17 %	11.500.000	
2	8	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa yang terfasilitasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha		10 kec/kel/desa	17.525.000			10 kec/kel/desa	4.500.000	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	17.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	4.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang mendapatkan penguatan kelembagaan		57 %	10.879.000			57 %	7.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	6	2.0 2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	10.879.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	7.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota		100 %	36.025.000			100 %	115.000.000	
2	8	7	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak		0.003	34.975.000			0.003	25.000.000	
2	8	7	2.0 1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Perangkat Daerah	34.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Perangkat Daerah	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	2.0 2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peersentase kasus kekerasan terhadap anak yang memperoleh layanan komprehensif		100 %	1.050.000			100 %	90.000.000	
2	8	7	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Layanan	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Layanan	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.750.815.200				3.931.675.800	
2	1 4	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		56,00 %	142.730.850			56,00 %	172.466.450	
2	1 4	2	2.0 1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang tersusun		1 dokumen	4.944.600			1 dokumen	9.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	14	2	2.0 1	1 3	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Organisasi	4.944.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Organisasi	9.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.0 2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang didampingi dalam pengembangan kampung KB		24 %	137.786.250			24 %	163.466.450	
2	14	2	2.0 2	1 1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	39.319.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1 Dokumen	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.0 2	1 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	98.466.450	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1 Dokumen	98.466.450	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		78,4 %	1.836.782.550			78,4 %	1.983.764.550	
2	14	3	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kecamatan yang didampingi		8 kecamatan	588.772.250			8 kecamatan	665.850.000	
2	14	3	2.0 1	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Organisasi	4.375.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		15 Organisasi	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.0 1	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Dokumen	25.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1 Dokumen	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Budaya Lokal	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang							KELUARGA BERENCANA
							Kab. Soppeng, Lalabata, Botto							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri							
							Kab. Soppeng, Ganra, Ganra							
							Kab. Soppeng, Citta, Citta							
2	14	3	2.0 1	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Dokumen	70.640.000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		1 Dokumen	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Botto							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri							
							Kab. Soppeng, Ganra, Ganra							
							Kab. Soppeng, Citta, Citta							
2	14	3	2.0 1	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	8 Laporan	124.800.000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		8 Laporan	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang							





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Lalabata, Botto							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri							
							Kab. Soppeng, Ganra, Ganra							
							Kab. Soppeng, Citta, Citta							
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	8 Laporan	323.957.250	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		8 Laporan	380.850.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang								
						Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang								
						Kab. Soppeng, Lalabata, Botto								
						Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu								
						Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri								
						Kab. Soppeng, Ganra, Ganra								
						Kab. Soppeng, Citta, Citta								
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	4 Laporan	40.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4 Laporan	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang								
						Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang								
						Kab. Soppeng, Lalabata, Botto								





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri							
							Kab. Soppeng, Ganra, Ganra							
							Kab. Soppeng, Citta, Citta							
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga fungsional penyuluh KB PKB/PLKB dan IMP yang terlatih		85 %	339.544.600			85 %	354.574.000	
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Laporan	3.544.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140 Orang	336.000.000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		140 Orang	349.574.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Faskes		100 %	681.215.700			100 %	728.890.550	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	8.100.000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		18 Laporan	44.701.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5700 orang	228.700.300	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		5700 orang	228.700.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	14	3	2.0 3	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Dokumen	17.078.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	16.962.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.0 3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri Kab. Soppeng, Ganra, Ganra Kab. Soppeng, Citta, Citta	8 Unit	373.837.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		8 Unit	373.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.0 3	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7050 Orang	49.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7050 Orang	56.289.850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.0 3	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	4.050.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		18 Laporan	8.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	3	2.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan kemitraan yang dibina		61.68 %	227.250.000			61.68 %	234.450.000	
2	14	3	2.0	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	22 Organisasi	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Organisasi	10.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.0	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga Kab. Soppeng, Liliraja, Pattojo Kab. Soppeng, Liliraja, Timusu Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo Kab. Soppeng, Lalabata, Maccile Kab. Soppeng, Marioriawa, Patampanua Kab. Soppeng, Marioriawa, Tellulimpoe Kab. Soppeng, Donri Donri, Sering Kab. Soppeng, Donri Donri, Kessing Kab. Soppeng, Ganra, Belo Kab. Soppeng, Ganra, Lompulle Kab. Soppeng, Citta, Citta Kab. Soppeng, Citta, Tinco	13 Kampung	224.250.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		13 Kampung	224.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	4	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan		62,5 %	1.771.301.800			62,5 %	1.775.444.800	
2	1	4	4	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		33 kelompok	1.771.301.800			33 kelompok	1.775.444.800	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 unit	717.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		42 unit	717.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Laporan	33.281.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	37.424.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	543 Orang	1.021.020.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		543 Orang	1.021.020.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TOTAL									8.514.324.459					
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.849.875.000				1.285.697.000	
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan		27,14 %	2.713.070.000			27,14 %	400.000.000	
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Yang Dilaksanakan		7 Paket	2.713.070.000			7 Paket	400.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	9	2	2.0 1	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	2.713.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Unit	400.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi		94,80 %	1.096.283.000			94,80 %	853.000.000	
2	9	3	2.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	JUmlah fasilitasi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Terhadap Stabilisasi Pasokan		6 kali	83.453.000			6 kali	83.260.000	
2	9	3	2.0 1	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	8.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 Laporan	17.997.400	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.0 1	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan	30.493.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	7 Laporan	16.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	15.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 Laporan	15.792.600	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.0 1	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	18.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Dokumen	14.970.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.0 1	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	9.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	9 Unit	18.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola		6084 Kg	121.500.000			6084 Kg	170.500.000	
2	9	3	2.0 2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Laporan	10.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.0 2	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15000 Ton	104.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	15000 Ton	160.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	9	3	2.0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Paket fasilitasi Kegiatan Upaya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Masyarakat yang Dilaksanakan		3 Paket	891.330.000			3 Paket	599.240.000	
2	9	3	2.0 4	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	848.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	8 Laporan	560.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.0 4	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	42.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Laporan	39.240.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (poin)		10,46 poin	17.650.000			10,46 poin	15.000.000	
2	9	4	2.0 1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kerentanan Pangan yang akan Dihilaskan		1 Dokumen	17.650.000			1 Dokumen	15.000.000	
2	9	4	2.0 1	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Dokumen	15.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		100 %	22.872.000			100 %	17.697.000	
2	9	5	2.0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengawasan Keamanan Pangan yang Dilaksanakan		5 kali	22.872.000			5 kali	17.697.000	
2	9	5	2.0 1	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sertifikat	22.872.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	4 Sertifikat	17.697.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				31.744.482.180				21.431.454.000	
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan		100 %	17.072.533.572			100 %	13.945.449.000	
3	2 7	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		8 Dokumen	75.950.000			8 Dokumen	18.050.000	
3	27	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	55.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 Dokumen	6.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	6.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Dokumen	1.280.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	6.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Dokumen	1.270.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Laporan	8.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	8 Laporan	9.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	15.226.949.997			100 %	12.972.949.000	
3	27	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	145 Orang/bulan	15.172.979.997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	145 Orang/bulan	12.931.949.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	320 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	320 Dokumen	39.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	18.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	7 Dokumen	2.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	843.720.300			100 %	406.724.000	
3	27	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Paket	500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	17.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 Paket	29.400.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	3 Paket	13.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	94.285.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 Paket	92.029.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Laporan	5.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100 Laporan	5.490.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	150 Laporan	706.544.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	150 Laporan	266.305.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik		100 %	156.450.000			100 %	15.000.000	
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	71.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 Unit	15.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	84.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	0 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat daerah		100 %	299.667.700			100 %	278.400.000	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	147.467.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	12 Laporan	138.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	152.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	4 Laporan	140.400.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Baik		100 %	469.795.575			100 %	254.326.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	42.061.175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	1 Unit	32.937.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	153 Unit	151.603.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	153 Unit	188.053.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	29.231.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 Unit	23.996.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Unit	10.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	20 Unit	9.340.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Unit	236.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	500 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		4,91 %	2.287.505.858			4,91 %	1.625.000.000	
						Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		21,28 %				21,28 %		
						Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		9,77 %				9,77 %		
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Penerima Sarana Pertanian yang Diawasi dan Didampingi Penggunaannya		17 kelompok	1.216.783.650			17 kelompok	566.668.000	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	518.890.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	17 Laporan	496.213.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	697.893.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	0 Laporan	70.455.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	2	2	2.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sumber Daya Genetik Tumbuhan yang Dikelola dan Dikembangkan		3 Jenis	1.070.722.208			3 Jenis	1.058.332.000	
3	27	2	2.0	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 VUB	77.556.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 VUB	176.354.500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	2.0	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Dokumen	993.166.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	15 Dokumen	881.977.500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan		100,00 %	6.729.720.000			100,00 %	3.342.800.000	
3	2	3	2.0		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Paket Dukungan Pengembangan Prasarana Pertanian		3 Paket	45.620.000			3 Paket	38.470.000	
3	27	3	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	45.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	3 Laporan	38.470.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	3	2.0		Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun dan Berfungsi dengan Baik		100 %	6.684.100.000			100 %	3.304.330.000	
3	27	3	2.0	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Unit	3.051.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	25 Unit	2.273.530.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	1.824.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	0 Unit	1.030.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.0	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	1.808.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	0 Unit	800.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)		97,77 %	96.239.500			97,77 %	68.205.000	
3	2	5	2.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		97.77 %	96.239.500			97.77 %	68.205.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	5	2.0 1	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ha	96.239.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	5 Ha	68.205.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	2.0 1	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut ke Madya		16 %	5.558.483.250			16 %	2.450.000.000	
						Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Madya ke Utama		8 %				8 %		
						Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula ke Lanjut		8 %				8 %		
3	27	7	2.0 1	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani Yang meningkat Skor Kemampuannya		685 Unit	5.558.483.250			685 Unit	2.450.000.000	
						Jumlah Posluhdes Aktif yang difasilitasi		4 Unit				4 Unit		
3	27	7	2.0 1	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	740.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	2 Unit	795.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	2.0 1	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	571 Unit	248.717.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	571 Unit	575.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	2.0 1	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	424.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	8 Unit	580.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	2.0 1	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	2.771.315.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	8 Unit	250.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	2.0 1	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	1.373.051.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	8 Unit	250.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
TOTAL									35.594.357.180					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				8.951.219.682			10.549.053.943		
2	1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup		100 %	5.668.688.707			100 %	6.586.053.943	
2	1	1	1	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 Persen	40.325.240			100 Persen	75.000.000	
2	11	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	25.250.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	7.374.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	7.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 Persen	5.311.643.856			100 Persen	5.990.000.000	
2	11	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	56 Orang/bulan	5.280.400.056	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 Orang/bulan	5.950.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	27.243.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	15.600.000			100 Persen	17.000.000	
2	11	1	2.0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	56 Dokumen	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 Dokumen	17.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 Persen	121.735.430			100 Persen	300.000.000	
2	11	1	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	4.937.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	11	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	25.701.030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	42.738.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	45.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan	32.009.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Laporan	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 Persen	16.000.000			100 Persen	53.943	
2	11	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Unit	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	53.943	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	91.471.094			100 Persen	105.000.000	
2	11	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	56.071.094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	35.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik		100 Persen	71.913.087			100 Persen	99.000.000	
2	11	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	22.207.687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	37.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	54 Unit	45.305.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 Unit	47.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	11	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	21 Unit	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Unit	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100 %	86.928.280			100 %	185.000.000	
2	11	3	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		3 Kegiatan	76.603.280			3 Kegiatan	155.000.000	
2	11	3	2.0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	59.603.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	120.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.0 1	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	35.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	10.325.000			1 Kegiatan	30.000.000	
2	11	3	2.0 2	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan kawasan yang dikelola sesuai standar		9351 m2	40.047.700			9351 m2	110.000.000	
2	11	4	2.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Keanekaragaman Hayati Kabupaten yang dikelola		3 Kawasan	40.047.700			3 Kawasan	110.000.000	
2	11	4	2.0 1	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ha	40.047.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Ha	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan kelompok masyarakat yang sadar lingkungan		60 Persen	48.600.000			60 Persen	70.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	8	2.0		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		50 Orang	48.600.000			50 Orang	70.000.000	
2	11	8	2.0	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	39.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8	2.0	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Orang	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup		100 %	17.175.000			100 %	30.000.000	
2	1	9	2.0		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan		1 Entitas	17.175.000			1 Entitas	30.000.000	
2	11	9	2.0	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Entitas	17.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Entitas	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti		100 %	0			100 %	15.000.000	
2	1	10	2.0		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindak Lanjuti		1 Pengaduan	0			1 Pengaduan	15.000.000	
2	11	10	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani		69 %	3.089.779.995			69 %	3.553.000.000	
2	1	11	2.0		Pengelolaan Sampah	volume timbulan sampah yang ditangani (M3)		8038 M3	3.089.779.995			8038 M3	3.553.000.000	
2	11	11	2.0	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	84.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24123 Ton	2.954.376.895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24123 Ton	3.220.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	525 Unit	50.488.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		525 Unit	223.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL									8.951.219.682					
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.802.821.214				6.253.853.000	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100 %	4.618.334.164			100 %	5.845.069.000	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu		100 %	20.355.000			100 %	93.892.743	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	12.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	27.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	15.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Laporan	4.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Laporan	50.992.743	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	3.239.517.746			100 %	3.394.588.207	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	29 Orang/bulan	3.210.407.746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 Orang/bulan	3.357.122.207	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Dokumen	25.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	33.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	12	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	4.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	4.466.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	64.875.000			100 %	75.432.500	
2	12	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	52 Paket	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Paket	28.050.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	23.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	25.382.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	16.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	465.608.343			100 %	1.018.312.752	
2	12	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Paket	997.389	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	166.331.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	218.083.844	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Paket	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	1.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	38.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	55.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Paket	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Paket	16.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	56 Paket	74.722.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 Paket	118.278.908	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	702 Laporan	170.382.044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		702 Laporan	600.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	130.000.000			100 %	319.000.000	
2	12	1	2.0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	44.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Unit	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	275.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100 %	550.381.800			100 %	755.000.000	
2	12	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	100.381.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	175.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	580.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	147.596.275			100 %	188.842.798	
2	12	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	44.850.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	49.341.643	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	74.995.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	77.650.155	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	23 Unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	15.851.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	5.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk		99 %	133.055.800			99 %	282.700.000	
						Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		60,2 %				60,2 %		
2	1	2	2.0		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan		4 Dokumen	133.055.800			4 Dokumen	282.700.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	12	2	2.0 1	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Dokumen	128.145.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	275.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.0 1	7	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	4.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		96,5 %	12.089.000			96,5 %	27.500.000	
2	12	3	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan		2 Dokumen	7.010.000			2 Dokumen	11.000.000	
2	12	3	2.0 1	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	7.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	2.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan		100 %	5.079.000			100 %	16.500.000	
2	12	3	2.0 2	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	5.079.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	16.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan		88,23 %	39.342.250			88,23 %	98.584.000	
2	12	4	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan		2 Paket	39.342.250			2 Paket	98.584.000	
2	12	4	2.0 3	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	9.342.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.0 3	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	53.584.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TOTAL									4.802.821.214					
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.991.832.010				5.310.071.150	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		100 %	2.766.707.210			100 %	3.819.082.000	
2	13	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	37.720.000			100 %	48.320.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
						Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	12.494.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.295.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	13.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	17.410.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	11.615.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	15.615.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan adminstrasi keuangan		100 %	2.166.195.868			100 %	2.443.852.000	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	23 Orang/bulan	2.130.959.468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Orang/bulan	2.415.532.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	24.587.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	16.320.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	10.649.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada dinasPMD		100 %	12.591.000			100 %	12.500.000	
2	13	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	12.591.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	12.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perngkat daerah		100 %	33.110.000			100 %	31.000.000	
2	13	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	12.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	20.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	19.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	366.143.650			100 %	823.500.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	1.505.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	29.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	14.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	16.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	106.136.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	325.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	57 Laporan	1.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		57 Laporan	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	489 Laporan	212.567.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		489 Laporan	395.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	20.850.000			100 %	311.910.000	
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	20.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	311.910.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	82.316.652			100 %	92.000.000	
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	55.316.652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	27.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	47.780.040			100 %	56.000.000	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Unit	41.740.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Unit	6.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	3	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa menyusun RPJMDesa , RKPDesa dan APBDesa sesuai regulasi		100 %	1.035.975.600			100 %	1.347.500.000	
2	1	3	4	2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dibina dan diawasi		441 orang	1.035.975.600			441 orang	1.347.500.000	
2	13	4	2.0 1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	49 Dokumen	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 Dokumen	900.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.0 1	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	49 Dokumen	34.610.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 Dokumen	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.0 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	57.081.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.0 1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	98 Orang	10.755.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98 Orang	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.0 1	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	49 Dokumen	20.142.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 Dokumen	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.0 1	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	33 Laporan	13.385.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Laporan	312.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1	3	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		4,29 %	189.149.200			4,29 %	143.489.150	
2	1	3	5	2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan		7 LKD	189.149.200			7 LKD	143.489.150	
2	13	5	2.0 1	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	70 Lembaga	47.299.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Lembaga	21.919.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.780.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	7.763.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.763.900	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	119.086.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	108.025.450	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TOTAL									3.991.832.010					
DINAS PERHUBUNGAN														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				7.250.127.146				8.663.722.000	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan		100 %	5.294.950.346			100 %	6.202.058.000	
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %	42.960.000			100 %	49.350.000	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	11.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	14.100.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	11.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	11.850.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	5.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	14.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	15.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	4.616.576.422			100 %	4.887.477.450	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Orang/bulan	4.574.126.422	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang/bulan	4.843.877.450	DINAS PERHUBUNGAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	37.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	38.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	120.950.000			100 %	431.700.000	
2	15	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	245 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		245 Paket	170.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	60.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	60.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	10.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		100 %	243.710.000			100 %	342.766.600	
2	15	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	4.666.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	5.189.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.189.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	665.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	3.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	20.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	82.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia (jenis)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	15.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	15.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Paket	58.614.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	70.500.000	DINAS PERHUBUNGAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Laporan	133.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	154.077.600	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%)		100 %	29.880.000			100 %	200.000.000	
2	15	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Unit	29.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	92.066.189			100 %	105.133.950	
2	15	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	41.666.189	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	54.733.950	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	50.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	50.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik		100 %	148.807.735			100 %	185.630.000	
2	15	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	31.828.665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	38.630.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Unit	94.999.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Unit	21.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	47.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten /Kota		83 %	1.955.176.800			83 %	2.461.664.000	
						V/C Ratio		0.07 %				0.07 %		
2	15	2	2.0 1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Rencana Induk Jaringan LLAJ		83 %	0			83 %	7.500.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan		92 %	884.162.200			92 %	1.542.335.350	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	108 Unit	272.406.400	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		108 Unit	781.480.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Unit	169.700.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		50 Unit	137.854.850	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1500 Unit	415.255.800	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		1500 Unit	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	2.0 2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Unit	26.800.000	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		10 Unit	223.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C		100 %	26.350.000			100 %	9.377.650	
2	15	2	2.0 3	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	26.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	9.377.650	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.0 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Retribusi Terminal dan Parkir (Rupiah)		353951000 Rupiah	330.851.000			353951000 Rupiah	353.951.000	
2	15	2	2.0 4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	330.851.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	353.951.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang memenuhi Persyaratan Tehnis dan Laik Jalan		92 %	52.950.000			92 %	37.500.000	
2	15	2	2.0 5	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	20.400.000	Pendapatan Pajak Daerah		6 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.0 5	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2276 Dokumen	32.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2276 Dokumen	37.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan		87.5 %	485.879.800			87.5 %	471.875.000	
2	15	2	2.0 6	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Laporan	425.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	425.625.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.0 6	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Unit	38.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	38.750.000	DINAS PERHUBUNGAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	21.854.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Bersyarat Yang Mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas		88 %	135.935.800			88 %	0	
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	5.935.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakakan		2 Kali	17.880.000			2 Kali	17.880.000	
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	17.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	17.880.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang disediakan		1164 Angkutan	10.000.000			1164 Angkutan	10.000.000	
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten yang diterbitkan		70 Rekomendasi	11.168.000			70 Rekomendasi	11.245.000	
2	15	2	2.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	11.168.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	11.245.000	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL									7.250.127.146					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.137.460.917			12.470.630.762		
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika		100 %	3.938.768.811			100 %	5.742.408.674	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran, dan pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	24.720.000			100 %	26.255.775	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	1.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.756.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	9.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.427.025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.995.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	11.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	11.077.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	3.438.729.311			100 %	3.544.805.349	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	31 Orang/bulan	3.422.719.311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Orang/bulan	3.528.988.884	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	4.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	3.963.750	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	11.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	11.852.715	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD		100 %	700.000			100 %	735.000	
2	16	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	735.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	37.550.000			100 %	39.427.500	
2	16	1	2.0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Dokumen	8.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	9.187.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	28.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	30.240.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	259.604.750			100 %	662.892.930	
2	16	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Paket	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Paket	1.050.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Paket	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	1.050.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	31.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	16.305.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	16.712.955	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.0	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	38.844.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	407.869.875	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	288 Laporan	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		288 Laporan	6.930.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	165.855.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	197.780.100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung,kendaraan,peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	39.390.000			100 %	26.908.400	
2	16	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	650.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Unit	38.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	26.258.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	27.160.000			100 %	49.308.000	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	19.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	20.328.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	28.980.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	110.914.750			100 %	1.392.075.720	
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	31.307.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	215.217.345	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	30.147.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	1.165.434.375	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	18 Unit	49.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	11.424.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi		100 %	1.025.810.000			100 %	2.095.431.975	
						Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		27 %				27 %		
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Strategi komunikasi (Strakom)		85 %	1.025.810.000			85 %	2.095.431.975	
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.943.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	293 Dokumen	19.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		293 Dokumen	9.187.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	16	2	2.0 1	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	151.236.225	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.0 1	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.675.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.0 1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	34 Orang	17.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.0 1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	3 Dokumen	966.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	1.925.390.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo		100 %	1.172.882.106			100 %	4.632.790.113	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	3	2.0		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan peraturan menteri kominfo no 5 tahun 2015		60 %	343.382.106			60 %	3.840.670.113	
2	16	3	2.0	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	103.982.106	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.833.320.113	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.0	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Unit	239.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	7.350.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	3	2.0		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks SPBE		2.5	829.500.000			2.5	792.120.000	
2	16	3	2.0	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	797.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	787.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.0	1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.620.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				138.500.000				104.212.500	
2	2	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	138.500.000			100 %	104.212.500	
2	2	2	2.0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten soppeng		100 %	138.500.000			100 %	104.212.500	
2	20	2	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	138.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	104.212.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				48.300.000				12.127.500	
2	2	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		265 .	48.300.000			265 .	12.127.500	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	2	2	2.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah		100 %	21.350.000			100 %	3.675.000	
2	21	2	2.0	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	21.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	3.675.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	2	2.0		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan		0.02 %	26.950.000			0.02 %	8.452.500	
2	21	2	2.0	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Perangkat Daerah	26.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Perangkat Daerah	8.452.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL									6.324.260.917					
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				6.536.414.713				6.718.186.668	
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		100 %	6.102.501.563			100 %	6.296.273.981	
2	1	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	33.630.000			100 %	26.750.000	
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
						Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
2	17	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	8.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	8.250.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	9.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	9.360.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	16.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	9.140.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	5.311.285.271			100 %	5.283.052.985	
2	17	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	53 Orang/bulan	5.287.245.271	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53 Orang/bulan	5.259.792.985	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	10.500.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	13.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	12.760.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		100 %	21.373.828			100 %	21.373.828	
2	17	1	2.0 4	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	21.373.828	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	21.373.828	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	104.966.625			100 %	49.132.000	
2	17	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	53 Paket	62.016.625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53 Paket	0	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	18.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	18.750.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Orang	24.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Orang	30.382.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	406.055.014			100 %	447.417.817	
2	17	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 paket	997.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	997.208	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	25.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	25.290.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	60.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	45.290.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	90.294.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	90.380.640	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.400.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	226.783.206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	283.059.969	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan,dan perlengkapan kantor yang diadakan dalam kondisi baik		100 %	24.800.000			100 %	207.218.691	
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Unit	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	47.700.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	17.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	159.518.691	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah		100 %	131.138.100			100 %	185.346.540	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	12 Laporan	89.738.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	155.946.540	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	41.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	29.400.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara berfungsi dengan baik		100 %	69.252.725			100 %	75.982.120	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	16 Unit	46.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	39.329.320	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	1 Unit	7.442.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	6.627.800	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	11 Unit	5.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	5.440.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	1 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	24.585.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat dari total koperasi aktif		21,08 %	7.250.000			21,08 %	7.250.000	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi		51.61 %	7.250.000			51.61 %	7.250.000	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit Usaha	7.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Unit Usaha	7.250.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat terhadap koperasi yang dinilai kesehatannya		70 %	7.250.000			70 %	7.250.000	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat		35 koperasi	7.250.000			35 koperasi	7.250.000	
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit Usaha	7.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit Usaha	7.250.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang memiliki SDM yang mencapai peningkatan kompetensi		48,39 %	350.000.500			48,39 %	350.000.000	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perkoperasian		110 orang	117.156.000			110 orang	117.155.500	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	5	2.0 1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	117.156.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 Orang	117.155.500	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	5	2.0 2		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi UKM		90 orang	232.844.500			90 orang	232.844.500	
2	17	5	2.0 2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190 orang	232.844.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		190 orang	232.844.500	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala mikro		58,25 %	69.412.650			58,25 %	57.412.687	
2	17	8	2.0 1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil		75 usaha mikro	69.412.650			75 usaha mikro	57.412.687	
2	17	8	2.0 1	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Unit Usaha	69.412.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 Unit Usaha	57.412.687	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				814.794.000				1.248.940.432	
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		50 %	681.150.000			50 %	1.143.150.432	
3	30	3	2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan termanfaatkan sesuai peruntukannya		18 unit pasar	665.100.000			18 unit pasar	1.127.860.432	
3	30	3	2.0 1	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	570.400.432	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	3	2.0 1	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 unit	590.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 unit	557.460.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	3	2.0 2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan yang terlaksana		3 kali	16.050.000			3 kali	15.290.000	
3	30	3	2.0 2	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	3 dokumen	16.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	15.290.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan							
							Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		3,92 %	41.900.000			3,92 %	23.600.000	
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah harga rata-rata dan stok barang Bapokting yang terdokumentasi		3 dokumen	6.900.000			3 dokumen	6.600.000	
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	1 laporan	6.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	6.600.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terawasi		8 Distributor	35.000.000			8 Distributor	17.000.000	
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	17.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		84,56 %	67.210.000			84,56 %	52.190.000	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat yang bertanda tera sah berlaku		2300 alat	67.210.000			2300 alat	52.190.000	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2300 unit	35.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2300 unit	33.700.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	80 Orang	25.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	12.230.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	6.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Unit	6.260.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri		2,49 %	24.534.000			2,49 %	30.000.000	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang terlaksana		2 event	24.534.000			2 event	30.000.000	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 UMKM	15.964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 UMKM	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi perdagangan yang tersedia Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data dan informasi 1 Dokumen	8.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 data dan informasi 1 Dokumen	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				157.586.600			270.630.000		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan perencanaan dan pembangunan industri unggulan daerah		33,33 %	141.184.600			33,33 %	235.630.000	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah paket pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		5 paket	141.184.600			5 paket	235.630.000	
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	2 Dokumen	8.584.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	128.950.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	31	2	2.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	32.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.680.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		100 %	7.600.000			100 %	20.000.000	
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUII), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan izin industri yang dipantau		25 permohonan	7.600.000			25 permohonan	20.000.000	
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IUII, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	7.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya informasi industri yang teredia secara lengkap dan terkini		45 %	8.802.000			45 %	15.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi industri yang tersedia		4 informasi	8.802.000			4 informasi	15.000.000	
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.802.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
TOTAL									7.508.795.313					
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.403.077.681			6.753.324.800		
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		100 %	4.222.131.681			100 %	6.375.583.760	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	65.400.000			100 %	155.257.200	
						Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu		100 %				100 %		
						Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun tepat waktu		100 %				100 %		
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	26.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	48.328.800	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.172.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.172.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	7	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.952.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.952.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Laporan	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	60.678.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	3.496.647.967			100 %	4.892.863.495	
2	7	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	32 Orang/bulan	3.473.247.967	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Orang/bulan	4.853.134.495	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	23.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	39.729.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	377.078.215			100 %	722.280.620	
2	7	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	2.733.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	8.001.120	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	55.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	66.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	14.162.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	82.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	140.356.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	140.899.500	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	203 Laporan	164.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		203 Laporan	424.930.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	0			100 %	239.835.845	
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0				239.835.845	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	166.405.500			100 %	200.166.600	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	166.405.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	200.166.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	116.599.999			100 %	165.180.000	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Unit	116.599.999	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	131.580.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	33.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		25 %	0			25 %	244.263.000	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota		1 dokumen	0			1 dokumen	244.263.000	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	244.263.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		24 %	15.146.000			24 %	50.207.520	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	jumlah jenis pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja		2 jenis	15.146.000			2 jenis	50.207.520	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	7	3	2.0 1	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Orang	15.146.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	50.207.520	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota		5,00 %	130.400.000			5,00 %	52.799.640	
2	7	4	2.0 1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase pencari kerja yang memperoleh layanan antar kerja		100 %	128.400.000			100 %	41.587.800	
2	7	4	2.0 1	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	400 Orang	128.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 Orang	41.587.800	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.0 3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (Sisnaker)		100 %	2.000.000			100 %	11.211.840	
2	7	4	2.0 3	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Orang	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	11.211.840	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		3,89 %	35.400.000			3,89 %	30.470.880	
2	7	5	2.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota		1 jumlah	35.400.000			1 jumlah	30.470.880	
2	7	5	2.0 2	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	750 Orang	35.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		750 Orang	30.470.880	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				725.325.600				1.021.822.200	
2	1 8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		100 %	22.360.000			100 %	180.000.000	
2	1 8	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	22.360.000			100 %	180.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Orang	22.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	180.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP		100 %	286.090.000			100 %	341.571.000	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis		2077 izin	286.090.000			2077 izin	341.571.000	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1452 Pelaku Usaha	208.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1452 Pelaku Usaha	285.411.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	213 Kegiatan Usaha	46.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		213 Kegiatan Usaha	56.160.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Orang	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Jumlah Pelaporan LKPM		46,90 %	356.875.600			46,90 %	428.251.200	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dipantau dibina dan diawasi menjadi kewenangan daerah		70 perusahaan	356.875.600			70 perusahaan	428.251.200	
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	60 Kegiatan Usaha	356.875.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Kegiatan Usaha	428.251.200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid		100 %	60.000.000			100 %	72.000.000	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi		1 dokumen	60.000.000			1 dokumen	72.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	72.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				31.200.000				91.719.000	
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina		1 UPT	31.200.000			1 UPT	91.719.000	
3	32	4	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	pendapatan perkapita transmigran		11600000 Rupiah	31.200.000			11600000 Rupiah	91.719.000	
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	85 Kepala Keluarga	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 Kepala Keluarga	7.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Satuan Permukiman	31.200.000			1 Satuan Permukiman	84.519.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TOTAL									5.159.603.281					
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA				5.473.675.447				6.347.917.587	
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		100 %	4.899.452.919			100 %	5.676.607.237	
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu		9 Dok	32.399.400			9 Dok	43.398.400	
						Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun tepat Waktu		2 Dok				2 Dok		
						Persentase Dokument Penganggaran Yang disusun Tepat Waktu		2 dok				2 dok		
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	9.779.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	14.779.800	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	19	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	8.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	9.820.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Laporan	14.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Laporan	18.798.600	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	4.438.605.185			100 %	5.083.953.361	
2	19	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	45 Orang/bulan	4.374.293.385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang/bulan	5.010.027.761	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	180 Dokumen	27.670.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		180 Dokumen	31.825.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	23.921.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	27.100.600	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	33 Laporan	7.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Laporan	9.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	5.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	6.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pengkat Daerah		100 %	8.880.000			100 %	10.200.000	
2	19	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Laporan	8.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	10.200.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	47.480.000			100 %	52.600.000	
2	19	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	23.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	26.100.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	23.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	26.500.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	174.298.175			100 %	264.138.873	
2	19	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	1 Paket	2.998.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.996.100	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	3 Paket	20.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	13.190.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	3 Paket	8.938.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	34.366.173	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	4 Paket	39.447.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	34.998.600	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	4 Laporan	2.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	24.320.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Laporan	99.703.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Laporan	150.268.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Perkantoran		100 %	112.742.226			100 %	137.749.873	
2	19	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	12 Laporan	97.142.226	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	102.149.873	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	12 Laporan	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	35.600.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	85.047.933			100 %	84.566.730	
2	19	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	9 Unit	75.547.933	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	70.046.730	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	18 Unit	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	14.520.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		29,83 %	429.513.700			29,83 %	405.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1	2	2.0		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Dan Wirausaha Muda Yang Diberdayakan		80 Orang	429.513.700			80 Orang	405.000.000	
2	19	2	2.0	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	71 Orang	429.513.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		71 Orang	405.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga		1 Prestasi Olahraga	129.108.828			1 Prestasi Olahraga	250.000.000	
2	1	3	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga		6 Cabor	40.408.828			6 Cabor	50.000.000	
2	19	3	2.0	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	40.408.828	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	3	2.0		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Kali	54.900.000			1 Kali	84.796.500	
2	19	3	2.0	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	30.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	52.489.250	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	2.0	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	24.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	32.307.250	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	3	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang Dibina		100 Cab OR	24.050.000			100 Cab OR	75.203.500	
2	19	3	2.0	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	21.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	36.464.250	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	2.0	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Orang	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	38.739.250	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	3	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina		3 Cabor	9.750.000			3 Cabor	40.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	19	3	2.0 5	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	9.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif		90,90 %	15.600.000			90,90 %	16.310.350	
2	19	4	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Yang Dibina		349 Organisasi	15.600.000			349 Organisasi	16.310.350	
2	19	4	2.0 1	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	16.310.350	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				554.358.748				1.580.000.000	
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara		44,62 %	478.002.748			44,62 %	1.520.000.000	
3	26	2	2.0 3		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota Yang Dikelolah		4 Buah	478.002.748			4 Buah	1.520.000.000	
3	26	2	2.0 3	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Lokasi	424.002.748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Lokasi	500.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	2	2.0 3	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	958.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	2	2.0 3	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Dokumen	44.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	62.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/Jasa Industri Kreatif yang Terdaftar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)		6 %	40.400.000			6 %	30.000.000	
3	26	4	2.0 1		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		2 Jenis	40.400.000			2 Jenis	30.000.000	
3	26	4	2.0 1	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	40.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	2	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi		33,30 %	35.956.000			33,30 %	30.000.000	
3	2	5	2.0		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Difasilitasi		20 Orang	35.956.000			20 Orang	30.000.000	
3	26	5	2.0	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	35.956.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TOTAL									6.028.034.195					
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.247.097.746				8.170.403.000	
2	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		100 %	4.987.216.050			100 %	5.383.568.000	
2	2	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	93.000.000			100 %	74.900.000	
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
						Persentase Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
2	23	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Dokumen	31.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	23.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Dokumen	28.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	27.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	11 Laporan	32.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Laporan	24.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	4.024.773.357			100 %	4.391.750.000	
2	23	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	39 Orang/bulan	3.992.173.357	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39 Orang/bulan	4.362.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	23	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	70 Dokumen	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Dokumen	10.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	20 Dokumen	22.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	19.250.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	35.000.000			100 %	34.000.000	
2	23	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	30.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Dokumen	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	4.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	429.595.360			100 %	458.900.000	
2	23	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	5.744.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.700.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	35.340.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.700.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	47.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	47.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	14.342.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	76.546.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	67.300.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	4 Laporan	2.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	12.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 Laporan	247.622.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		180 Laporan	300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung,Kendaraan,Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik		100 %	140.060.000			100 %	142.000.000	
2	23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Unit	60.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	67.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Unit	79.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	163.612.078			100 %	180.758.300	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Laporan	68.812.078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	85.958.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Laporan	94.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	94.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik		100 %	101.175.255			100 %	101.259.700	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Unit	38.802.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	38.812.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Unit	44.449.825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	44.447.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	4 Unit	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	8.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	3 Unit	9.422.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	9.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk		1,22	253.721.696			1,22	2.779.835.000	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun		4.15 %	128.818.600			4.15 %	164.700.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	23	2	2.0 1	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Perpustakaan	13.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Perpustakaan	17.100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 1	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	700 Eksemplar	2.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		700 Eksemplar	5.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 1	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Perpustakaan	22.244.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Perpustakaan	17.100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 1	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			13.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 1	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	500 Eksemplar	66.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Eksemplar	80.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 1	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		15943 Eksemplar	5.614.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15943 Eksemplar	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 1	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		15 Data	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Data	6.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun		12.096 Pengunjung	124.903.096			12.096 Pengunjung	2.615.135.000	
2	23	2	2.0 2	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		8 Lokus	38.635.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Lokus	85.135.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 2	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Perpustakaan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Perpustakaan	2.450.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 2	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		50 Orang	46.699.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.0 2	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Perpustakaan	23.302.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Perpustakaan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	23	2	2.0 2	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		5 Orang	16.266.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Wilayahnya		1 naskah	6.160.000			1 naskah	7.000.000	
2	23	3	2.0 1		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang di akuisisi dan di alihmediakan		1 Naskah	6.160.000			1 Naskah	7.000.000	
2	23	3	2.0 1	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		2 Orang	2.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	3.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	2.0 1	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		1500 Eksemplar	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1500 Eksemplar	3.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				78.043.600				85.595.000	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip		100 %	69.946.550			100 %	77.595.000	
2	24	2	2.0 1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Dinamis		6 SKPD	16.629.450			6 SKPD	20.000.000	
2	24	2	2.0 1	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Berkas	14.494.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Berkas	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	2.0 1	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Berkas	2.135.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Berkas	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	2.0 2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Statis		6 SKPD	35.241.600			6 SKPD	38.270.000	
2	24	2	2.0 2	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	20 Arsip	25.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Arsip	25.250.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	2.0 2	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Arsip	9.991.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Arsip	13.020.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	2.0 3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku		82.23 %	18.075.500			82.23 %	19.325.000	
2	24	2	2.0 3	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	3 Pengguna	2.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Pengguna	3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	25 Laporan	15.125.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Laporan	16.325.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana		100 %	8.097.050			100 %	8.000.000	
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	JUmlah Arsip yang dimusnahkan		5 Dok	8.097.050			5 Dok	8.000.000	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	50 Arsip	2.997.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Arsip	3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	50 Berkas	5.099.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Berkas	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TOTAL									5.325.141.346					
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				6.281.185.800				8.116.946.000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kersehatan Hewan dan Perikanan		100 %	5.871.140.900			100 %	7.094.446.000	
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	15.290.000			100 %	42.400.000	
						Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
						Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 dokumen	4.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	28.100.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	10.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	14.300.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	5.429.595.363			100 %	5.065.292.813	
3	25	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	51 Orang/bulan	5.397.905.363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		51 Orang/bulan	5.017.495.463	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	31.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	47.797.350	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		100 %	133.764			100 %	133.764	
3	25	1	2.0 4	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	133.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	133.764	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	177.446.040			100 %	776.957.760	
3	25	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	523.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.803.400	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	1.329.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.885.500	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	12.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	14.800.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	4.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	9.512.650	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	19.019.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	90.444.410	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	691 Laporan	140.003.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		691 Laporan	650.511.800	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	13.525.000			100 %	519.500.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	21 Unit	13.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Unit	519.500.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	123.821.024			100 %	196.750.209	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	12 Laporan	69.221.024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	77.350.209	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	54.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	119.400.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik		100 %	111.329.709			100 %	493.411.454	
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Unit	45.751.648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Unit	134.884.848	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	38.130.846	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	126.349.796	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	14.537.215	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	101.756.810	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Unit	3.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	19.970.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	3 Unit	9.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	110.450.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
3	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap		3047.53 ton	99.109.500			3047.53 ton	340.000.000	
3	2	3	2.0		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/ kota yang dikelola		1 paket	78.997.000			1 paket	240.000.000	
3	25	3	2.0	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	2 Unit	78.997.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	240.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	2	3	2.0		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan		3047.53 ton	20.112.500			3047.53 ton	100.000.000	
3	25	3	2.0	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	30 Orang	20.112.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	100.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya		438,72 ton	272.573.000			438,72 ton	600.000.000	
3	2	4	2.0		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan		5 kelompok	272.573.000			5 kelompok	600.000.000	
3	25	4	2.0	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja Kab. Soppeng, Lalabata, Maccile	5 Kelompok	272.573.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Kelompok	600.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	2	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jenis produk olahan hasil perikanan		100 %	38.362.400			100 %	82.500.000	
3	2	6	2.0		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mendapatkan rekomendasi		5 Unit	16.137.400			5 Unit	20.000.000	
3	25	6	2.0	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	16.137.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	20.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	2	6	2.0		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibina		30 kelompok	22.225.000			30 kelompok	62.500.000	
3	25	6	2.0	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit Usaha	22.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit Usaha	62.500.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				483.268.735				780.000.000	
3	2	7	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging		503065 kg	252.381.100			503065 kg	450.000.000	
						Produksi hasil ikutan lainnya		100479 kg				100479 kg		
						Produksi telur		10011821 kg				10011821 kg		
3	2	7	2	2.0	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bibit ternak yang disebar		414 ekor	252.381.100			414 ekor	450.000.000	
						Jumlah luas lahan HPT		485.97 Ha				485.97 Ha		
						Jumlah unit usaha (toko/ poultry shop) yang diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan		29 Unit				29 Unit		
3	27	2	2.0	3	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	252.381.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Laporan	450.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	2	7	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana (peternakan) yang digunakan		95 %	125.373.635			95 %	200.000.000	
3	2	7	3	2.0	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana peternakan yang diadakan		1 Unit	125.373.635			1 Unit	200.000.000	
3	27	3	2.0	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	1 Unit	125.373.635	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan							
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis anthrax		0 %	105.514.000			0 %	130.000.000	
						Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis avian influenza		0 %				0 %		
						Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis brucellosis		0,04 %				0,04 %		
						Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis rabies		0 %				0 %		
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan dan kesmavet		1300 ekor	97.904.000			1300 ekor	100.000.000	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	97.904.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	100.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan sampel kesmavet		20 sampel	7.610.000			20 sampel	30.000.000	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	7.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	30.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
TOTAL									6.764.454.535					
SEKRETARIAT DAERAH														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				190.180.000				230.928.000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	91.185.000			100 %	92.480.000	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	630.000			100 %	630.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Dokumen	630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	630.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	5.220.000			100 %	5.000.000	
4	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	5.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	85.335.000			100 %	86.850.000	
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	14.665.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	26.180.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.278.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	12.032.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	9.010.100	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	56.537.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	49.381.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan		100 %	98.995.000			100 %	138.448.000	
4	1	2	2.0 1		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah rumusan kebijakan administrasi tata pemerintahan yang disusun		10 Kebijakan	86.755.000			10 Kebijakan	122.508.000	
4	1	2	2.0 1	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	23.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.600.000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	2	2.0 1	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	14.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	34.088.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	49.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	62.820.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 4		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah rumusan Kebijakan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang disusun		1 Kebijakan	12.240.000			1 Kebijakan	15.940.000	
4	1	2	2.0 4	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	9.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	10.940.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 4	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	3.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				528.941.500				562.660.800	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	254.144.900			100 %	223.578.900	
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	135.520.000			100 %	118.720.000	
4	1	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko Kab. Soppeng, Liliraja, Barang Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre Kab. Soppeng, Lalabata, Mattabulu Kab. Soppeng, Marioriawa, Tellulimpoe Kab. Soppeng, Donri Donri, Tottong	700 Orang	135.520.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		700 Orang	118.720.000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Ganra, Ganra							
							Kab. Soppeng, Citta, Tinco							
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	118.624.900			100 %	104.858.900	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	19.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	19.495.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	10.775.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	10.775.900	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	88.354.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	74.588.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang Dirumuskan		100 %	274.796.600			100 %	339.081.900	
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi sesuai standar		100 %	274.796.600			100 %	339.081.900	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga	10 Dokumen	66.954.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	83.806.500	SEKRETARIAT DAERAH
							Kab. Soppeng, Liliraja, Jampu							
							Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge							
							Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba							
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca							
							Kab. Soppeng, Donri Donri, Lalabatariaja							
							Kab. Soppeng, Ganra, Enrekang							
							Kab. Soppeng, Citta, Labae							





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	2	2.0 3	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Kasus	122.465.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kasus	133.065.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko Kab. Soppeng, Liliraja, Galung Kab. Soppeng, Liliraja, Timusu Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo Kab. Soppeng, Lalabata, Bila Kab. Soppeng, Marioriwawo, Laringgi Kab. Soppeng, Donri Donri, Kessing Kab. Soppeng, Ganra, Lompulle Kab. Soppeng, Citta, Citta	80 Dokumen	85.376.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Dokumen	122.210.400	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				243.384.800				373.384.800	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	243.384.800			100 %	373.384.800	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	750.000			100 %	750.000	
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	750.000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	0			100 %	5.000.000	
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Orang	0			2 Orang	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	66.532.000			100 %	65.968.200	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.070.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	1.225.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	10.904.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	10.904.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	47.427.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	46.768.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi yang Disusun		10 Kebijakan	176.102.800			10 Kebijakan	301.666.600	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	76.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	92.050.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	49.960.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	60.594.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	34.051.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	86.972.200	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	16.051.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	47.050.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				306.360.150				207.187.250	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	62.416.950			100 %	58.614.650	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Keuangan		100 %	500.000			100 %	500.000	
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.480.000				0	
4	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	5.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Umum		100 %	56.436.950			100 %	58.114.650	
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	8.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.890.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	9.335.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	9.324.250	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	38.211.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	39.900.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Dirumuskan		100 %	243.943.200			100 %	148.572.600	
4	1	3	2.0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang disusun		5 Kebijakan	57.620.000			5 Kebijakan	67.365.000	
4	1	3	2.0 1	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	53.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	58.852.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 1	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	3.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	8.512.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kegiatan Strategis Daerah yang memiliki SOP/Juknis		100 %	186.323.200			100 %	81.207.600	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	3	2.0 4	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	183.473.200	DBH CHT		1 Dokumen	76.029.050	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 4	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.178.550	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				422.725.000				546.397.600	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	248.320.500			100 %	357.893.100	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	300.000			100 %	500.000	
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Dokumen	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	114.006.600			100 %	196.310.800	
4	1	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Orang	114.006.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Orang	196.310.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	134.013.900			100 %	161.082.300	
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	50.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	59.550.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	25.341.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	27.303.100	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	57.697.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	74.229.200	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif		9,90 %	174.404.500			9,90 %	188.504.500	
4	1	3	2.0 3		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		3 Kegiatan	174.404.500			3 Kegiatan	188.504.500	
4	1	3	2.0 3	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	550 Dokumen	122.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		550 Dokumen	125.580.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 3	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	21.124.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	26.374.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 3	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	250 Orang	30.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Orang	36.550.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				1.422.579.800				1.641.654.800	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	87.850.800			100 %	92.850.800	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	5.400.000			100 %	5.400.000	
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	85 Dokumen	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 Dokumen	5.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	0			100 %	5.000.000	
4	1	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang		0		2 Orang	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	82.450.800			100 %	82.450.800	
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	7.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.450.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	8.131.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.131.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	9.980.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	9.980.200	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	56.888.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	56.888.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Dirumuskan		100 %	1.334.729.000			100 %	1.548.804.000	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun		2 Kebijakan	1.334.729.000			2 Kebijakan	1.548.804.000	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Dokumen	947.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Dokumen	1.103.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	324.429.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	383.229.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	62.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	62.475.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				5.551.529.406				9.108.020.963	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	5.551.529.406			100 %	9.108.020.963	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	5.000.000			100 %	5.000.000	
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	27.160.000			100 %	46.850.000	
4	1	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	20.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	41.850.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Orang	6.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	639.086.099			100 %	1.103.969.525	
4	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	23.710.609	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	45.231.975	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	36.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	33.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	18.490.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	32.760.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	61.095.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	67.688.550	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	395.161.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	743.955.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	104.458.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	180.534.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik		100 %	49.360.000			100 %	21.110.000	
4	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	8.750.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	40.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	12.360.000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.047.359.300			100 %	1.799.352.934	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	648.059.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.000.752.934	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	399.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	798.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik		100 %	1.030.154.500			100 %	1.458.011.400	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	18 Unit	485.757.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	955.086.170	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	101 Unit	416.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		101 Unit	236.037.230	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	1.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	44 Unit	9.612.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44 Unit	12.445.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Unit	117.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	252.943.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keterpenuhan Pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu		100 %	1.284.636.372			100 %	1.832.732.104	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Orang/Bulan	392.984.372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang/Bulan	397.404.104	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	39 Paket	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39 Paket	102.500.000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.1 1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Orang/Bulan	786.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang/Bulan	1.282.828.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 2		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Keterpenuhan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang Dilaksanakan		100 %	570.573.135			100 %	1.390.745.000	
4	1	1	2.1 2	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	315.068.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	884.785.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	239.754.885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	495.960.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	15.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Acara Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi		100 %	898.200.000			100 %	1.450.250.000	
4	1	1	2.1 4	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	102.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 4	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	872.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	1.348.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				12.490.650.894				11.952.889.187	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	12.490.650.894			100 %	11.952.889.187	
4	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		100 %	61.290.000			100 %	76.694.500	
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun Tepat Waktu		100 %				100 %		
						Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu		100 %				100 %		
4	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	8.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	7.989.500	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	14.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	22.605.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	15.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	22.070.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	22.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	24.030.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	12.110.214.194			100 %	11.514.510.087	
4	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	112 Orang/Bulan	11.994.420.194	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		112 Orang/Bulan	11.392.376.087	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	105 Dokumen	86.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		105 Dokumen	85.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	28.844.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	36.234.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	10.700.000			100 %	7.500.000	
4	1	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	10.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	7.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	308.446.700			100 %	354.184.600	
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	22.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	3.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	7.000.000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	63.294.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	67.680.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	219.151.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	254.504.600	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				131.074.450				129.451.950	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	77.816.450			100 %	85.203.450	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	600.000			100 %	600.000	
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	5.480.000			100 %	5.000.000	
4	1	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Orang	5.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	71.736.450			100 %	79.603.450	
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	8.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	14.910.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	2.845.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	5.670.000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif			
4	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	9.954.050			4 Paket	9.954.050	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	50.186.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	49.069.400	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Dirumuskan		100 %	53.258.000			100 %	44.248.500			
4	1	3	2.0 2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun		1 Kebijakan	53.258.000			1 Kebijakan	44.248.500			
4	1	3	2.0 2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Laporan	53.258.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	44.248.500	SEKRETARIAT DAERAH		
TOTAL									21.287.426.000							
SEKRETARIAT DPRD																
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	2				SEKRETARIAT DPRD							24.937.695.250			25.646.813.000	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD		100 %	21.006.923.650			100 %	20.893.813.000			
4	2	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu		100 %	56.920.000			100 %	48.790.000			
						Persentase Dokumen Penganggaran Yang Disusun Tepat waktu		100 %				100 %				
						Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %				
4	2	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Dokumen	15.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.400.000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Dokumen	13.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	12.460.000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Dokumen	13.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	8.630.000	SEKRETARIAT DPRD		





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	27 Laporan	13.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	12.300.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	3.360.201.052			100 %	2.262.442.000	
4	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	36 Orang/bulan	3.210.026.052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Orang/bulan	2.171.092.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	96 Dokumen	131.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	70.550.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	36 Dokumen	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	15.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	12 Laporan	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	30.700.000			100 %	16.000.000	
4	2	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	4 Laporan	30.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	16.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	92.010.000			100 %	286.575.000	
4	2	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	68 Paket	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 Paket	51.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	5 Dokumen	6.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	6.050.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Dokumen	7.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	7.475.000	SEKRETARIAT DPRD





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	36 Dokumen	7.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	36 Orang	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Orang	5.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	64.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	210.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	1.037.756.300			100 %	734.651.000	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	19 Paket	81.836.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Paket	31.420.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	15 Paket	1.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	12.342.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Paket	72.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	72.200.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	6 Paket	23.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	23.770.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	5 Paket	173.423.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	100.504.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	7 Laporan	464.896.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan	222.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	151.125.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	203.415.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	3 Dokumen	69.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	69.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik		100 %	37.050.000			100 %	1.541.532.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	6 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	485.332.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	11 Unit	29.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	156.200.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Unit	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2.178.628.622			100 %	2.082.280.000	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	12 Laporan	466.228.622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	434.680.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.712.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.647.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Baik		100 %	472.565.040			100 %	456.690.000	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	36 Unit	312.195.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Unit	312.195.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	28 Unit	24.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Unit	24.170.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	5 Unit	136.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	120.325.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi Keuangan dan Kesejahteraannya		30 Orang	12.233.092.636			30 Orang	11.923.853.000	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	30 Orang/Bulan	11.949.667.636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang/Bulan	11.592.203.000	SEKRETARIAT DPRD





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	2.1 5	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	30 Paket	245.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Paket	294.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1 5	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	30 Orang	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	37.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1 6		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan		4 Paket	1.508.000.000			4 Paket	1.541.000.000	
4	2	1	2.1 6	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	115.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1 6	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	3 Paket	1.480.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	1.426.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Yang Terlaksana Sesuai Rencana		100 %	3.930.771.600			100 %	4.753.000.000	
4	2	2	2.0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Kegiatan Pembentukan PERDA yang difasilitasi		3 Kegiatan	686.984.000			3 Kegiatan	224.700.000	
4	2	2	2.0 1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	3 Dokumen	136.984.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	55.700.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	11 Dokumen	412.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	3 Dokumen	138.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	139.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD yang Difasilitasi		8 Kegiatan	52.480.000			8 Kegiatan	45.400.000	
4	2	2	2.0 2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.400.000	SEKRETARIAT DPRD





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	2	2.0 2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	9.900.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	9.900.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 2	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	9.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Yang Difasilitasi		8 Kegiatan	18.120.000			8 Kegiatan	20.700.000	
4	2	2	2.0 3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 3	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	2	2.0 3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Difasilitasi		5 Kegiatan	709.387.000			5 Kegiatan	842.475.000	
4	2	2	2.0 4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 4	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	366.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	380.375.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	5 Orang	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	90.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.387.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.100.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi		2 Kegiatan	1.225.676.000			2 Kegiatan	1.986.800.000	
4	2	2	2.0 5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	3 Dokumen	19.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	19.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	1.205.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	1.967.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD Yang Difasilitasi		3 Kegiatan	1.238.124.600			3 Kegiatan	1.632.925.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1.084.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	1.320.599.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.239.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	212.326.000	SEKRETARIAT DPRD	
TOTAL									24.937.695.250						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	1				PERENCANAAN				5.940.600.060				5.161.661.980		
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		100 %	5.287.934.060			100 %	4.488.011.980		
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	53.613.094			100 %	38.892.763		
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %				100 %			
						Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %			
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	12.712.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	14.358.298	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	18.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	13.018.031	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	3.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.211.316	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	18.250.594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	9.305.118	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	4.318.471.297			100 %	3.560.559.732	
5	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Orang/bulan	4.298.361.297	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Orang/bulan	3.539.573.628	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	5.885.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	14.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	15.101.104	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Admiistrasi Kepegawaian		100 %	13.360.000			100 %	32.385.000	
5	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	13.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	32.385.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Admnistrasi Umum		100 %	396.723.450			100 %	292.844.408	
5	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	4.007.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	4.237.945	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Paket	70.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	21.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	1.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	21.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	15.473.219	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Paket	55.013.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Paket	53.790.798	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		240 Laporan	224.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		240 Laporan	193.342.446	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik		100 %	14.349.000			100 %	48.000.000	
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	14.349.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	48.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	421.515.394			100 %	308.750.000	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	150.115.394	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	271.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	288.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%)		100 %	69.901.825			100 %	206.580.077	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Unit	41.821.825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	75.426.710	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	9.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	11.018.164	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	18.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	120.135.203	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100 %	395.258.000			100 %	240.000.000	
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100 %				100 %		





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	1	2	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun tepat waktu		100 %	355.043.000			100 %	220.000.000	
5	1	2	2.0 1	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	58.886.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Berita Acara	26.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Berita Acara	88.287.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	80.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	181.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang di manfaatkan SKPD		100 %	12.800.000			100 %	10.000.000	
5	1	2	2.0 2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Orang	12.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Orang	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	27.415.000			100 %	10.000.000	
5	1	2	2.0 3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	27.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur		100 %	257.408.000			100 %	433.650.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	1	3	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan		100 %	132.973.000			100 %	230.450.000	
5	1	3	2.0 1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.450.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	3.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	6.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	28.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	68.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	4.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	3.065.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	83.278.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	122.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian		100 %	40.055.000			100 %	82.600.000	
						Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang SDA (Sumber Daya Alam)		100 %				100 %		





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	1	3	2.0 2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	3.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Laporan	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	10.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Laporan	3.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	3.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	29.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	68.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Infrastruktur		100 %	84.380.000			100 %	120.600.000	
						Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan		100 %				100 %		
5	1	3	2.0 3	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Laporan	8.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	10.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Laporan	2.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	3.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0 3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	72.770.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	106.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				110.001.000			50.500.000		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		100 %	110.001.000			100 %	50.500.000	
				Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (SIDa)		35,29 %		35,29 %						
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun		100 %	57.475.000			100 %	0	
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	57.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Inovasi dan Teknologi		100 %	52.526.000			100 %	50.500.000	
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	52.526.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TOTAL									6.050.601.060					
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				142.923.816.600			150.676.395.760		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	19.777.622.291			100 %	28.924.481.647	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu		100 %	61.930.000			100 %	50.130.000	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Dokumen	8.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	7.795.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	18.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	14.705.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	20.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.830.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	14.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	11.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	10.311.810.854			100 %	18.630.269.764	
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Orang/bulan	10.154.347.854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang/bulan	18.616.806.764	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1200 Dokumen	144.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1200 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	13.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	13.463.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	75.550.000			100 %	265.000.000	
5	2	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	39.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	45.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	10.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Orang	26.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	1.175.827.890			100 %	1.250.000.000	
5	2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	27.676.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	30.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	205.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	250.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	324.332.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	335.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	250.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	25.352.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	30.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	527 Laporan	411.046.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		527 Laporan	340.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	167.400.000			100 %	240.000.000	
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	40.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Unit	149.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	7.805.869.220			100 %	8.295.858.153	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Laporan	7.276.069.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	7.776.058.153	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	519.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	519.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik		100 %	179.234.327			100 %	193.223.730	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	38.629.845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	100.444.050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	80 Unit	99.829.482	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Unit	70.729.680	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	39 Unit	19.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39 Unit	19.050.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	21.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu		100 %	121.136.235.559			100 %	120.288.234.113	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi		100 %	1.422.000.000			100 %	1.434.390.000	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	24.050.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	88.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	38.090.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Dokumen	75.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	0 Dokumen	31.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	75.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	21.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Dokumen	5.775.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	21.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Dokumen	5.950.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	2	2.0 1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	581.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	624.525.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	554.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	580.050.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	20.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.950.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi		100 %	192.540.000			100 %	150.000.000	
5	2	2	2.0 2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	17.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	30.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	10.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	21.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	20.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 2	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	21.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	53.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	2	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Laporan	43.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	24.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi		100 %	342.105.000			100 %	261.735.000	
5	2	2	2.0 3	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	41.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	40.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 3	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	43.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Dokumen	40.765.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 3	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	612 Laporan	34.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		612 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 3	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	85.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	85.900.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	66.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	30.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	2	2.0 3	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	12.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	65.070.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 3	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	57.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah		100 %	119.179.590.559			100 %	118.442.109.113	
5	2	2	2.0 4	3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	261.618.300	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		1 Laporan	3.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 4	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	8.753.605.027	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		1 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 4	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	103.056.818.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	110.626.049.237	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	4.511.556.134	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.0 4	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.595.992.398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.813.059.876	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen		100 %	884.340.000			100 %	751.425.000	
5	2	3	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keterpenuhihan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi		100 %	884.340.000			100 %	751.425.000	
5	2	3	2.0 1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	175.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	80.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	3	2.0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	27.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	36.425.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	392.000.000	Pajak Daerah		1 Laporan	424.240.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.0 1	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Laporan	108.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	36.140.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.0 1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	124.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	70.100.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.0 1	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Laporan	56.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	104.520.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.125.618.750			100 %	712.255.000	
5	2	4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 \$	1.125.618.750			100 \$	712.255.000	
5	2	4	2.0 1	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	10.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.0 1	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	76.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	79.955.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.0 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	23.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.0 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Laporan	274.700.000	Pajak Penerangan Jalan		10 Laporan	369.450.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.0 1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	657.673.750	Pajak Daerah		1 Dokumen	198.850.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	4	2.0 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	73.825.000	Pajak Daerah		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	8.800.000	Retribusi Jasa Umum		1 Laporan	4.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				40.668.800				39.515.000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	27.658.800			100 %	29.515.000	
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	27.658.800			100 %	29.515.000	
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Paket	2.240.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	66 Laporan	15.418.800	Pendapatan Pajak Daerah		66 Laporan	18.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	13.010.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	13.010.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.010.000	Pendapatan Pajak Daerah		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				28.653.800				29.515.000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	20.643.800			100 %	19.515.000	
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	20.643.800			100 %	19.515.000	
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	2 Paket	1.515.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	0 Paket	10.000.000	Pendapatan Pajak Daerah		0 Paket	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	29 Laporan	9.128.800	Pendapatan Pajak Daerah		29 Laporan	18.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	8.010.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	8.010.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	0 Dokumen	8.010.000	Pajak Daerah		0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				33.783.800				36.515.000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	22.173.800			100 %	26.515.000	
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	22.173.800			100 %	26.515.000	
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	2 Paket	1.515.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	38 Laporan	10.658.800	Pendapatan Pajak Daerah		38 Laporan	15.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	11.610.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	11.610.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.610.000	Pendapatan Pajak Daerah		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				37.553.800			31.515.000		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	24.043.800			100 %	21.515.000	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	24.043.800			100 %	21.515.000	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	2 Paket	1.515.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	49 Laporan	12.528.800	Pendapatan Pajak Daerah		49 Laporan	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	13.510.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	13.510.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.510.000	Pendapatan Pajak Daerah		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				29.323.800			31.515.000		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	20.813.800			100 %	21.515.000	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	20.813.800			100 %	21.515.000	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Semua Kelurahan	2 Paket	1.515.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Pajak Daerah		2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Semua Kelurahan	30 Laporan	9.298.800	Pendapatan Pajak Daerah		30 Laporan	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	8.510.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	8.510.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.510.000	Pendapatan Pajak Daerah		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				36.223.800				32.515.000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	24.213.800			100 %	22.515.000	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	24.213.800			100 %	22.515.000	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	2 Paket	1.515.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Pajak Daerah		2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	50 Laporan	12.698.800	Pendapatan Pajak Daerah		50 Laporan	11.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	12.010.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	12.010.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12.010.000	Pendapatan Pajak Daerah		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				27.813.800				31.515.000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	20.303.800			100 %	21.515.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	20.303.800			100 %	21.515.000	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	2 Paket	1.515.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Pajak Daerah		2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	27 Laporan	8.788.800	Pendapatan Pajak Daerah		27 Laporan	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	7.510.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	7.510.000			100 %	10.000.000	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.510.000	Pendapatan Pajak Daerah		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				24.613.800				29.515.000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	18.603.800			100 %	20.515.000	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	18.603.800			100 %	20.515.000	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	2 Paket	1.515.000	Pendapatan Pajak Daerah		2 Paket	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	17 Laporan	7.088.800	Pendapatan Pajak Daerah		17 Laporan	9.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah		100 %	6.010.000			100 %	9.000.000	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	6.010.000			100 %	9.000.000	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6.010.000	Pendapatan Pajak Daerah		1 Dokumen	9.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL									143.182.452.000					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	3				KEPEGAWAIAN				5.960.709.736				7.708.091.976	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100 %	5.341.627.336			100 %	6.361.810.776	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	46.026.200			100 %	44.890.000	
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
						Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	17.049.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	17.050.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	4.594.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	4.595.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	4.419.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	4.595.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	19.961.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	18.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	4.230.000.362			100 %	4.672.345.796	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	49 ASN/Bulan	4.193.510.709	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 ASN/Bulan	4.637.970.796	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	17.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	15.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	18.639.653	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	18.525.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada PD		100 %	10.849.800			100 %	10.850.000	
5	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Laporan	10.849.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	10.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	13.853.600			100 %	13.354.100	
5	3	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Dokumen	11.855.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	11.855.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Dokumen	1.998.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	1.499.100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		100 %	683.342.467			100 %	698.696.417	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Paket	5.062.137	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Paket	5.062.137	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Paket	3.776.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Paket	22.026.330	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	100.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	103.040.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	48.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	61.300.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	120.935.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	96.569.950	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	18.330.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	392.368.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	392.368.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)		100 %	79.030.000			100 %	41.000.000	
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	23 Unit	79.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	31.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)		100 %	212.284.622			100 %	239.654.178	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	169.084.622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	188.654.178	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	43.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	51.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik (%)		100 %	66.240.285			100 %	641.020.285	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	39.820.285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40.370.285	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Unit	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	12.680.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	23 Unit	14.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	14.570.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	25.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	548.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya		0,55 %	619.082.400			0,55 %	1.346.281.200	
						Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi		100 %				100 %		
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		100 %				100 %		
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaiannya		5221 ASN	128.905.600			5221 ASN	569.611.400	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	9.574.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	451.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	22.659.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	22.659.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Lembaga	49.122.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Lembaga	49.122.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	14 Dokumen	47.549.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Dokumen	46.329.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kapasitasnya		1085 ASN	105.172.600			1085 ASN	119.673.500	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	60.048.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	74.548.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	800 Dokumen	45.124.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		800 Dokumen	45.125.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi		235 ASN	309.465.000			235 ASN	581.456.300	
						Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya		29 ASN				29 ASN		
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	245.440.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Orang	175.649.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	175.650.300	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	3	2	2.0 3	1 2	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	115.132.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	141.932.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 3	1 4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	500 Orang	18.433.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	18.433.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN		100 %	75.539.200			100 %	75.540.000	
5	3	2	2.0 4	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	3.249.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.250.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 4	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	525 Orang	66.724.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		525 Orang	66.725.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 4	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendaptkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	60 Orang	5.564.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	5.565.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.246.450.200				2.416.867.400	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JP	1.246.450.200			20 JP	2.416.867.400	
5	4	2	2.0 1		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		400 ASN	181.035.000			400 ASN	146.585.600	
5	4	2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembanagan Kompetensi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 Orang	171.810.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	144.560.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.0 1	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	9.224.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	2.025.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manejerial dan Fungsional		317 ASN	1.065.415.200			317 ASN	2.270.281.800	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	4	2	2.0 2	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Laporan	1.063.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	2.265.298.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.0 2	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	2.025.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.983.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TOTAL									7.207.159.936					
INSPEKTORAT DAERAH														
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	1				INSPEKTORAT DAERAH				9.602.532.887				9.357.729.000	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah		100 %	7.724.296.987			100 %	7.157.729.000	
6	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan dan yang disusun tepat waktu.		100 %	8.025.000			100 %	14.800.000	
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu.		100 %				100 %		
						Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu.		100 %				100 %		
6	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.550.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Dokumen	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Dokumen	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Dokumen	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	9 Dokumen	1.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Dokumen	3.250.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	6.900.829.912			100 %	5.966.029.000	
6	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	59 Orang/bulan	6.892.879.912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		59 Orang/bulan	5.944.529.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	100 Dokumen	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	18.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Dokumen	1.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	1.625.000			100 %	5.000.000	
6	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Laporan	1.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	376.988.000			100 %	615.000.000	
6	1	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	20 Dokumen	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Dokumen	2.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	16 Orang	299.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Orang	370.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	59 Orang	36.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		59 Orang	140.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	251.858.750			100 %	311.900.000	
6	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Paket	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	1.900.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	3 Paket	55.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	73.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Paket	11.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Paket	70.536.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	67.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	80 Laporan	1.415.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Laporan	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	50 Laporan	111.582.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	150.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%)		100 %	20.392.000			100 %	50.000.000	
6	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Unit	20.392.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	84.800.000			100 %	85.000.000	
6	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	36 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	3 Laporan	34.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	35.000.000	INSPEKTORAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik (%)		100 %	79.778.325			100 %	110.000.000	
6	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	27 Unit	67.708.325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Unit	60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	40 Unit	12.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Unit	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti		85 %	1.485.944.400			85 %	1.700.000.000	
6	1	2	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa		91 LHP	1.138.947.000			91 LHP	1.210.000.000	
6	1	2	2.0 1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	3 Laporan	17.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	20.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.0 1	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	35 Laporan	335.555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Laporan	350.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.0 1	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	23 Laporan	277.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Laporan	350.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.0 1	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Laporan	68.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	80.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.0 1	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	22 Laporan	287.085.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Laporan	217.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.0 1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Dokumen	152.682.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	193.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat dan pengawasan tertentu		44 LHP	346.997.400			44 LHP	490.000.000	
6	1	2	2.0 2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Laporan	52.032.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.0 2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	43 Laporan	294.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43 Laporan	390.000.000	INSPEKTORAT DAERAH





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan		60 %	392.291.500			60 %	500.000.000	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		2 Kebijakan	87.591.000			2 Kebijakan	150.000.000	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Rekomendasi	59.356.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Rekomendasi	28.235.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa		16 Kali	304.700.500			16 Kali	350.000.000	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	34 perangkat daerah	28.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 perangkat daerah	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	34 perangkat daerah	50.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 perangkat daerah	135.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Kegiatan	197.675.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kegiatan	110.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	34 perangkat daerah	28.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 perangkat daerah	55.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
TOTAL									9.602.532.887					
KECAMATAN LILIRILAU														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				5.050.678.440				5.873.599.013	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau		100 %	4.932.328.440			100 %	5.578.599.013	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	32.150.000			100 %	89.128.350	
						Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Dokumen	9.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	29.374.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Dokumen	19.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	38.029.700	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Laporan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	21.724.650	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan (%)		100 %	4.251.447.730			100 %	5.065.462.168	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	52 Orang/bulan	4.245.097.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Orang/bulan	5.041.112.168	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	115 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		115 Dokumen	16.350.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	20 Dokumen	3.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	8.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)		100 %	48.200.000			100 %	25.000.000	
7	1	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Orang	48.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	25.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		100 %	249.620.580			100 %	189.908.495	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	8 Paket	2.257.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Paket	25.158.495	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Paket	50.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	51.750.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Paket	14.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	13.000.000	KECAMATAN LILIRILAU





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Paket	55.847.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	33.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	12 Laporan	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	12.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	600 Laporan	109.656.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		600 Laporan	55.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)		100 %	158.446.630			100 %	78.200.000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	5 Unit	25.338.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	23.200.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	3 Unit	104.558.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	45.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Unit	28.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100 %	101.526.900			100 %	75.900.000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	12 Laporan	49.326.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	46.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	12 Laporan	52.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	29.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		100 %	90.936.600			100 %	55.000.000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	3 Unit	50.716.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	42.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	5 Unit	11.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	5.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Unit	28.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	8.000.000	KECAMATAN LILIRILAU





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau (%)		100 %	81.200.000			100 %	210.000.000	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan		2 Kali	50.000.000			2 Kali	105.000.000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	105.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelimpahan Kewenangan Yang terlaksana		100 %	31.200.000			100 %	105.000.000	
7	1	2	2.0 4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Dokumen	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	60.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Laporan	23.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	45.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	10.400.000			100 %	30.000.000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat		2 kali	10.400.000			2 kali	30.000.000	
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Laporan	10.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	30.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	19.000.000			100 %	30.000.000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	19.000.000			100 %	30.000.000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Laporan	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	30.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau		100 %	7.750.000			100 %	25.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan ADD		8 Desa	7.750.000			8 Desa	25.000.000	
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	160 Dokumen	7.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		160 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.069.413.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan Lilirilau		100 %	120.000.000			100 %	100.413.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan (%)		100 %	2.000.000			100 %	2.500.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	40 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		100 %	45.214.960			100 %	49.500.000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	3 Paket	665.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	1.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	3 Paket	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	13.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Paket	1.401.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	5 Paket	17.755.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	18.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Laporan	500000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	12 Laporan	12.893.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)		100 %	7.280.000			100 %	14.560.000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Unit	7.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	14.560.000	KECAMATAN LILIRILAU





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100 %	47.222.000			100 %	14.353.000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	12 Laporan	10.022.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	10.353.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	12 Laporan	37.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		100 %	18.283.040			100 %	19.500.000	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	3 Unit	9.188.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	10.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	10 Unit	6.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	6.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Unit	2.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	7 Unit	756.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	756.825.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	2 Pokmas / Ormas	212.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	212.175.000	KECAMATAN LILIRILAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.089.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan Lilirilau		100 %	120.000.000			100 %	120.000.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan (%)		100 %	1.260.000			100 %	1.260.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	126 Dokumen	1.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		126 Dokumen	1.260.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		100 %	44.836.500			100 %	44.835.000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	4 Paket	652.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	652.600	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	3 Paket	12.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	12.800.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Paket	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.100.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		21 Paket	17.464.300			21 Paket	17.462.800	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	26 Laporan	5.819.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Laporan	5.819.600	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)		100 %	9.360.000			100 %	9.360.000	
7	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Unit	9.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	9.360.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100 %	50.227.740			100 %	50.227.740	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	3 Laporan	12.427.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	12.427.740	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	3 Laporan	37.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	37.800.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		100 %	14.315.760			100 %	14.317.260	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	2 Unit	8.075.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	8.075.760	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	4 Unit	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	2.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Unit	3.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.841.500	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	4 Unit	661.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	660.300.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	2 Pokmas / Ormas	307.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	308.700.000	KECAMATAN LILIRILAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.089.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan Lilirilau		100 %	120.000.000			100 %	120.000.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan (%)		100 %	1.270.000			100 %	1.270.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	40 Dokumen	1.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Dokumen	1.270.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		100 %	35.923.220			100 %	37.118.045	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Paket	703.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	651.995	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Paket	13.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	14.800.000	KECAMATAN LILIRILAU





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Paket	2.101.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.100.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Paket	10.249.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	10.296.450	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Laporan	6.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Laporan	3.239.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	3.269.600	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)		100 %	16.200.000			100 %	16.200.000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Unit	16.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	16.200.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100 %	52.627.740			100 %	51.429.915	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	3 Laporan	12.427.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	11.229.915	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Laporan	40.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	40.200.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		3 Unit	13.979.040			3 Unit	13.982.040	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	3 Unit	8.774.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	8.774.040	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Unit	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	2.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Unit	2.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.808.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	7 Unit	747.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	747.975.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Pokmas / Ormas	221.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	221.025.000	KECAMATAN LILIRILAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				726.180.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan Lilirilau		100 %	120.000.000			100 %	120.000.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan (%)		100 %	1.270.000			100 %	1.270.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Dokumen	1.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.270.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		100 %	35.781.220			100 %	37.118.045	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Paket	661.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	651.995	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	2 Paket	13.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	14.800.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Paket	2.050.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.100.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	4 Paket	10.480.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	10.296.450	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	2 Laporan	3.239.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	3.269.600	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)		100 %	15.900.000			100 %	15.900.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Unit	15.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	15.900.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100 %	53.069.740			100 %	51.729.915	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	3 Laporan	12.869.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	11.529.915	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Laporan	40.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	40.200.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		3 Unit	13.979.040			3 Unit	13.982.040	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Unit	8.774.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	8.774.040	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Unit	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	3 Unit	2.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	2.808.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	969.000.000			100 %	606.180.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %	969.000.000			100 %	606.180.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	14 Unit	609.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Unit	606.180.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	2 Pokmas / Ormas	359.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN LILIRILAU
TOTAL									9.406.678.440					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
KECAMATAN CITTA														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN			2.719.063.747				2.354.739.000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta	100 %	2.521.483.747			100 %	2.304.739.000		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	38.579.521			100 %	1.479.000		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Dokumen	11.255.921	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.479.000		KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Dokumen	3.931.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0		KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Dokumen	3.931.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0		KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Dokumen	8.731.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0		KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Dokumen	8.731.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0		KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Citta	27 Laporan	1.999.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Laporan	0		KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	1.747.611.465			100 %	1.871.760.000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Citta, Citta	25 Orang/bulan	1.726.291.465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang/bulan	1.861.760.000		KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Citta	96 Dokumen	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 Dokumen	5.000.000		KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Citta, Citta	96 Dokumen	14.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 Dokumen	5.000.000		KECAMATAN CITTA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		47 ASN	64.393.750			47 ASN	75.000.000	
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	42 Paket	17.393.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42 Paket	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	5 Orang	47.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	75.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	255.323.304			100 %	151.500.000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah keterpenuhan administrasi Umum	Kab. Soppeng, Citta, Citta	10 paket	11.298.424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 paket	5.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	5 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	5 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	4 Paket	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	35.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	3 Paket	16.964.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	14.500.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlha paket bahan / material yang disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	4 paket	73.318.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	45.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Citta, Citta	700 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		700 Laporan	12.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Citta	300 Laporan	56.742.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Laporan	40.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	206.050.000			100 %	30.000.000	
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN CITTA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Unit	22.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	5 Unit	93.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	30.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 7	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	90.341.582			100 %	85.000.000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Kampiri	12 Laporan	52.109.582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	55.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	12 Laporan	38.232.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	30.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		100 %	119.184.125			100 %	90.000.000	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Soppeng, Citta, Citta	7 unit	70.184.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	80.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Citta, Citta	5 Unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Soppeng, Citta, Citta	7 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	10.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	KECAMATAN CITTA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta (%)		100 %	120.920.000			100 %	0	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah tatap muka yang dilaksanakan		2 kali	50.000.000			2 kali	0	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Semua Kab/Kota, Citta, Citta	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0	KECAMATAN CITTA
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Jumlah Perizinan Non Usaha yang di terbitkan		150 Buah 50 Buah	70.920.000			150 Buah 50 Buah	0	
7	1	2	2.0 4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Perizinan Non Usaha yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	50 buah	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 buah	0	KECAMATAN CITTA
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Non Perizinan yang Dilaksanakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	150 buah	45.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 buah	0	KECAMATAN CITTA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta		100 %	31.660.000			100 %	30.000.000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan koordinasi Kecamatan Sehat		8 kali	31.660.000			8 kali	30.000.000	
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaankoordinasi kecamatan sehat	Kab. Soppeng, Citta, Citta	8 Laporan	31.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	30.000.000	KECAMATAN CITTA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta		100 %	25.000.000			100 %	0	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas		240 orang	25.000.000			240 orang	0	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	240 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		240 Laporan	0	KECAMATAN CITTA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta		100 %	20.000.000			100 %	20.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi		4 Desa	20.000.000			4 Desa	20.000.000	
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumrn yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kab. Soppeng, Citta, Citta	4 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN CITTA
TOTAL									2.719.063.747					
KECAMATAN GANRA														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				3.154.153.567				3.180.613.767	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra		100 %	3.036.213.567			100 %	2.833.113.767	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu		100 % 100 %	22.441.000			100 % 100 %	14.500.000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	2 Dokumen	13.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	2 Dokumen	3.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisyar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisyar realisasi kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	9 Laporan	5.581.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Laporan	10.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 ASN	2.068.757.157			22 ASN	2.151.582.502	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	22 orang/bulan	2.057.957.157	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 orang/bulan	2.149.302.502	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Dokumen	10.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	2.280.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrtasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	20.000.000			100 %	75.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	3 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	75.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	202.633.450			100 %	307.655.900	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Paket	4.094.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	2 Paket	23.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	60.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	6 Paket	11.823.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	30.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	3 Paket	22.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	50.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Paket	9.912.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.449.700	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	5 Paket	29.613.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	80.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	12 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	424 Laporan	80.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		424 Laporan	53.206.200	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	341.580.700			100 %	130.000.000	
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	4 Unit	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	60.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Di adakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	3 Paket	28.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	10.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	10 Unit	193.230.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	60.000.000	KECAMATAN GANRA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	57.524.280			12 Laporan	63.442.000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	12 Laporan	29.324.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	42.642.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	12 Laporan	28.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	20.800.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	323.276.980			100 %	90.933.365	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	5 Unit	47.276.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	43.383.365	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	32 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Unit	20.800.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Unit	256.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	26.750.000	KECAMATAN GANRA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra (%)		100 %	78.800.000			100 %	262.500.000	
						Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra		100 %				100 %		
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		100 %	50.000.000			100 %	105.000.000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	105.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang telah dilaksanakan		100 %	28.800.000			100 %	157.500.000	
7	1	2	2.0 4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Dokumen	21.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	105.000.000	KECAMATAN GANRA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	4 laporan	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	52.500.000	KECAMATAN GANRA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra		100 %	15.550.000			100 %	30.000.000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	15.550.000			4 Laporan	30.000.000	
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaanmasyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	4 laporan	15.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	30.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra		100 %	14.640.000			100 %	30.000.000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	14.640.000			4 Laporan	30.000.000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	4 Laporan	14.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	30.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra		100 %	8.950.000			100 %	25.000.000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		270 Dokumen	8.950.000			270 Dokumen	25.000.000	
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	270 Dokumen	8.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		270 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN GANRA
TOTAL									3.154.153.567					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
KECAMATAN DONRI-DONRI														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				3.168.913.000				3.398.913.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri		100 %	2.968.414.000			100 %	3.103.913.000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu		100 %	20.500.000			100 %	19.300.000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Dokumen	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.300.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	27 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	1.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan adminstrasi keuangan		100 %	2.196.719.000			100 %	2.521.213.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Orang/bulan	2.174.344.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Orang/bulan	2.508.838.250	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	96 Dokumen	9.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	24 Dokumen	12.574.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	11.374.750	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	41.491.000			100 %	57.000.000	
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	34 Paket	13.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Paket	12.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	3 Orang	27.891.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	45.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan admnistrasi umum		100 %	295.113.400			100 %	214.000.000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Paket	3.409.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	2.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	4 Paket	23.821.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	15.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	5 Paket	16.319.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	15.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Paket	51.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	45.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	3 Paket	25.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	20.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	4 Paket	53.927.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	40.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	4 Laporan	11.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	7.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	300 Laporan	109.206.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Laporan	70.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	236.455.000			100 %	110.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Unit	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	13 Unit	176.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Unit	55.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	3 Unit	24.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	15.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	66.465.800			100 %	62.400.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	12 Laporan	28.065.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	27.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	12 Laporan	38.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	35.400.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	111.669.800			100 %	120.000.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	4 Unit	79.059.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	60.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	17 Unit	10.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Unit	10.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Unit	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	50.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri (%)		100 %	96.700.000			100 %	200.000.000	
						Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri		100 %				100 %		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan		2 kali	50.000.000			2 kali	105.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	105.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang telah dilaksanakan		100 %	46.700.000			100 %	95.000.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	100 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	4 Laporan	31.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	70.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-Donri		100 %	39.799.000			100 %	40.000.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat		8 Kali	39.799.000			8 Kali	40.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	4 Laporan	39.799.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	40.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri		100 %	25.000.000			100 %	30.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kantibmas		350 Orang	25.000.000			350 Orang	30.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	4 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	30.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri		100 %	39.000.000			100 %	25.000.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		9 Desa	39.000.000			9 Desa	25.000.000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	270 Dokumen	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		270 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
TOTAL									3.168.913.000					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
KECAMATAN MARIORIAWA														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN			5.840.821.793					6.071.333.781	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	5.714.901.793			100 %	5.874.283.781	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %	25.270.600			100 %	36.055.000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Dokumen	2.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	12.055.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Dokumen	17.950.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Dokumen	1.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Dokumen	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Dokumen	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	27 Laporan	1.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	10.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	5.065.023.230			100 %	5.398.238.079	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	56 Orang/bulan	5.053.443.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 Orang/bulan	5.398.238.079	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	200 Dokumen	1.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Dokumen	0	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	20 Dokumen	9.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	0	KECAMATAN MARIORIAWA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		61 ASN	41.047.800			61 ASN	7.200.000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	18 Paket	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Paket	7.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	5 Orang	33.847.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	0	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	268.053.490			100 %	195.564.999	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	6 Paket	13.068.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	1.539.125	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Paket	8.177.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	7.215.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Paket	66.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	59.850.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Paket	12.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.901.400	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Paket	61.275.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	36.504.674	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Laporan	31.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	18.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	300 Laporan	75.232.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Laporan	66.554.800	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	77.340.000			100 %	50.000.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	5 Unit	77.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	50.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	142.174.623			100 %	127.774.823	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	12 Laporan	92.974.623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		12 Laporan	92.974.823	KECAMATAN MARIORIAWA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
										Umum				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	12 Laporan	49.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	34.800.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	95.992.050			100 %	59.450.880	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	3 Unit	59.127.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	42.450.880	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	14 Unit	16.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Unit	8.640.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Unit	20.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	8.360.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)		100 %	86.000.000			100 %	136.000.000	
						Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa		100 %				100 %		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa (%)		400 Buah	50.000.000			400 Buah	100.000.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	100.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana pada kecamatan Marioriawa		100 %	36.000.000			100 %	36.000.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	50 Dokumen	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	7.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Laporan	28.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	28.800.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	16.120.000			100 %	16.050.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat		2 kali	16.120.000			2 kali	16.050.000	
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Laporan	16.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	16.050.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	15.600.000			100 %	25.000.000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jasa Narasumber Penyuluhan Kantibmas		2 orang	15.600.000			2 orang	25.000.000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Laporan	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	25.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa		100 %	8.200.000			100 %	20.000.000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi		5 Desa	8.200.000			5 Desa	20.000.000	
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Dokumen	8.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.088.999.919				333.800.839	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	119.999.919			100 %	121.340.839	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	1.170.000			100 %	1.170.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	30 Dokumen	1.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	1.170.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	65.746.574			100 %	68.455.174	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	7 Paket	1.854.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	1.854.450	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Paket	18.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	18.760.000	KECAMATAN MARIORIAWA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Paket	1.651.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.652.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Paket	17.292.324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	16.640.724	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	4 Laporan	3.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	3.300.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	110 Laporan	22.888.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 Laporan	26.248.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	1.799.550			100 %	1.799.550	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Unit	1.799.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.799.550	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	37.075.795			100 %	35.875.795	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	12 Laporan	13.675.795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	13.675.795	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	12 Laporan	23.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	14.208.000			100 %	14.040.320	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Unit	6.552.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	6.384.320	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	11 Unit	6.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	6.820.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Unit	836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	836.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	969.000.000			100 %	212.460.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	212.460.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	8 Unit	756.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	0	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	50 Pokmas / Ormas	212.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Pokmas / Ormas	212.460.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.089.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	120.000.000			100 %	120.000.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	590.000			100 %	600.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	30 Dokumen	590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	600.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	58.107.758			100 %	58.107.758	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	7 Paket	751.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	751.950	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	4 Paket	15.865.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	15.865.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Paket	1.402.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	1.402.450	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	4 Paket	14.980.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	14.979.958	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	4 Laporan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	4.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	93 Laporan	21.108.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		93 Laporan	21.108.400	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	13.760.000			100 %	13.750.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Unit	13.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	13.750.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	32.038.202			100 %	32.038.202	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	12 Laporan	9.838.202	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	9.838.202	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Laporan	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	15.504.040			100 %	15.504.040	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	4 Unit	12.605.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	12.605.040	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	1 Unit	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	600.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	1 Unit	2.299.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.299.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	11 Unit	783.036.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	783.036.700	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	68 Pokmas / Ormas	185.963.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 Pokmas / Ormas	185.963.300	KECAMATAN MARIORIAWA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.088.999.940				625.689.937	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	119.999.940			100 %	108.589.937	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	1.020.000			100 %	1.020.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	30 Dokumen	1.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	1.020.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	59.691.185			100 %	62.461.435	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	5 Paket	494.675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	494.675	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	2 Paket	17.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	17.290.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	1 Paket	2.311.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.310.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	5 Paket	15.181.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	16.723.360	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	4 Laporan	4.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	4.575.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	95 Laporan	19.738.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 Laporan	21.068.400	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	5.250.000			100 %	5.700.000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	1 Unit	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	5.700.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	45.228.455			100 %	30.598.202	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	12 Laporan	9.828.455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	8.398.202	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	2 Laporan	35.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	8.810.300			100 %	8.810.300	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	2 Unit	6.747.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	6.747.300	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	1 Unit	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	600.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	1 Unit	1.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.463.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	969.000.000			100 %	517.100.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	517.100.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	6 Unit	752.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	300.360.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	65 Pokmas / Ormas	216.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 Pokmas / Ormas	216.740.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.088.999.816				1.089.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	119.999.816			100 %	120.000.000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	900.000			100 %	900.000	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	30 Dokumen	900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	900.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	58.070.136			100 %	57.930.136	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	6 Paket	990.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	990.800	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	3 Paket	17.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	17.400.000	KECAMATAN MARIORIAWA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	2 Paket	1.062.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	1.060.500	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	4 Paket	15.478.536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	15.340.036	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	4 Laporan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	4.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	104 Laporan	19.138.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		104 Laporan	19.138.800	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	17.800.000			100 %	17.804.824	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	2 Unit	17.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	17.804.824	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	30.284.640			100 %	29.880.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	12 Laporan	8.084.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	2 Laporan	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	12.945.040			100 %	13.485.040	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	3 Unit	9.001.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	9.541.040	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	1 Unit	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	600.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Manorang Salo	1 Unit	3.344.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.344.000	KECAMATAN MARIORIAWA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	12 Unit	668.412.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	668.640.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	103 Pokmas / Ormas	300.587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		103 Pokmas / Ormas	300.360.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.088.999.750				1.083.549.950	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	119.999.750			100 %	114.549.950	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan		100 %	1.110.000			100 %	1.110.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	30 Dokumen	1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	1.110.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	67.888.490			100 %	65.744.690	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	8 Paket	995.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Paket	995.300	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	3 Paket	23.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	23.275.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	2 Paket	2.214.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	2.148.500	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	4 Paket	14.130.590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	14.107.490	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	4 Laporan	3.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	3.100.000	KECAMATAN MARIORIAWA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Lompomajang	104 Laporan	23.398.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		104 Laporan	22.118.400	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	5.000.000			100 %	5.000.000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Lompomajang	1 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	5.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	38.729.500			100 %	35.423.500	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Lompomajang	12 Laporan	16.529.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	13.223.500	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Lompomajang	12 Laporan	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	7.271.760			100 %	7.271.760	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Marioriawa, Lompomajang	2 Unit	7.271.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	7.271.760	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Lompomajang	6 Unit	796.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	796.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Lompomajang	79 Pokmas / Ormas	173.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		79 Pokmas / Ormas	173.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
TOTAL									11.285.821.218					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
KECAMATAN LILIRIAJA														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				5.308.364.782				5.824.979.882	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliraja		100 %	5.133.264.782			100 %	5.552.179.882	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu, Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu, Persentase Dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	45.642.600			100 %	36.984.900	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Dokumen	10.744.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.144.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Dokumen	10.144.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.144.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Dokumen	3.424.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.424.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Dokumen	5.424.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.424.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Dokumen	3.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.424.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	27 Laporan	12.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	4.424.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	4.398.807.238			100 %	5.024.900.150	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	51 Orang/Bulan	4.384.107.238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		51 Orang/Bulan	5.010.226.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	32 Dokumen	4.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Dokumen	4.600.000	KECAMATAN LILIRIAJA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	36 Dokumen	10.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	10.074.150	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	75.160.000			100	60.000.000	
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	51 Paket	37.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		51 Paket	30.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Liliraja, Appanang	3 Orang	37.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	30.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	246.394.422			100 %	156.868.122	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Paket	7.658.422	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.658.422	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Paket	20.604.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Paket	32.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	24.240.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Paket	18.796.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	18.796.400	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	4 Paket	50.389.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	35.376.300	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Laporan	11.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	11.720.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	200 Laporan	104.425.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Laporan	55.077.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik		100 %	150.300.000			100 %	81.700.000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	5 Unit	125.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	56.700.000	KECAMATAN LILIRAJA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	25.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	128.659.662			100 %	103.425.850	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Laporan	50.059.662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	28.425.850	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Laporan	78.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	75.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		100 %	88.300.860			100 %	88.300.860	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	5 Unit	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	45.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	4 Unit	11.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	11.910.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Unit	31.390.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	31.390.860	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliraja(%)		100 %	107.300.000			100 %	200.000.000	
						Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliraja		100 %				100 %		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan		2 Kali	50.000.000			2 Kali	100.000.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	100.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perizinan non usaha dan non perizinan yang diterbitkan		500 Buah	57.300.000			500 Buah	100.000.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Dokumen	26.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	35.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Laporan	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	65.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja		100 %	22.800.000			100 %	22.800.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat		2 Kali	22.800.000			2 Kali	22.800.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Laporan	22.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	22.800.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliraja		100 %	25.000.000			100 %	30.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jasa narasumber penyuluhan kantibmas		2 Orang	25.000.000			2 Orang	30.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	30.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliraja		100 %	20.000.000			100 %	20.000.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan dana ADD		5 Desa	20.000.000			5 Desa	20.000.000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	100 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.087.610.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliraja		100 %	120.000.000			100 %	118.610.000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	500.000			100 %	500.000	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	24 Dokumen	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	500.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	38.098.305			100 %	38.898.305	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Paket	866.805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	866.805	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Paket	8.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	8.600.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Paket	5.239.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.239.400	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Paket	12.412.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	12.412.900	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	32 Laporan	5.779.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Laporan	5.779.200	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik		100 %	7.320.000			100 %	7.320.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Unit	7.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	7.320.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	60.649.615			100 %	58.849.615	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Laporan	6.049.615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.049.615	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Laporan	54.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	52.800.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		100 %	13.432.080			100 %	13.042.080	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	4 Unit	6.792.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	6.792.080	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	3 Unit	1.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	1.500.000	KECAMATAN LILIRIAJA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Unit	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	4.750.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		2 Paket	969.000.000			2 Paket	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	6 Unit	751.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	751.460.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	9 Pokmas / Ormas	217.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Pokmas / Ormas	217.540.000	KECAMATAN LILIRAJA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.089.808.350	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliraja		100 %	120.000.000			100 %	120.808.350	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	300.000			100 %	300.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	24 Dokumen	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	300.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	42.195.210			100 %	44.664.560	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Paket	974.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	974.560	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	2 Paket	20.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	20.600.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Paket	2.511.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.085.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	4 Paket	11.389.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	10.597.500	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	12 Laporan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4.000.000	KECAMATAN LILIRAJA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	12 Laporan	2.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4.407.500	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik		100 %	11.500.000			100 %	11.500.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	2 Unit	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	11.500.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	53.663.790			100 %	53.663.790	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	12 Laporan	8.063.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	8.063.790	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	12 Laporan	45.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	45.600.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		100 %	12.341.000			100 %	10.680.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	2 Unit	5.601.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	5.600.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	4 Unit	3.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	2.050.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Unit	3.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.030.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		2 Paket	969.000.000			2 Paket	969.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	8 Unit	841.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	841.700.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	9 Pokmas / Ormas	127.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Pokmas / Ormas	127.300.000	KECAMATAN LILIRAJA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.093.919.400	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliraja		100 %	120.000.000			100 %	124.919.400	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	600.000			100 %	600.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	24 Dokumen	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	600.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	39.444.563			100 %	41.653.813	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	1 Paket	500.213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	500.213	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	2 Paket	15.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	15.360.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	1 Paket	3.203.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.203.250	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	4 Paket	10.821.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	10.821.150	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	12 Laporan	3.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.780.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	34 Laporan	5.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Laporan	7.989.200	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik		100 %	21.750.000			100 %	22.300.000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	1 Unit	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.650.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	2 Unit	19.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	19.650.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	45.876.037			100 %	42.879.837	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	12 Laporan	6.876.037	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.879.837	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	12 Laporan	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	36.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		100 %	12.329.400			100 %	17.485.750	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	3 Unit	6.809.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	6.809.400	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	4 Unit	2.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	6.809.400	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	1 Unit	3.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.866.950	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		2 Paket	969.000.000			2 Paket	969.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	5 Unit	760.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	760.400.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	9 Pokmas / Ormas	208.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Pokmas / Ormas	208.600.000	KECAMATAN LILIRIAJA
TOTAL									8.575.364.782					
KECAMATAN LALABATA														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				8.557.155.374				10.122.207.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	8.418.115.374			100 %	9.937.467.000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	15.980.000			100 %	15.980.000	
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu		100 %				100 %		
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	10.980.000			2 Dokumen	10.980.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	8 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	7.809.471.345			100 %	9.513.176.593	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	85 Orang/bulan	7.781.891.345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 Orang/bulan	9.493.696.593	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	387 Dokumen	16.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		387 Dokumen	8.700.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	18 Dokumen	10.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Dokumen	10.780.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Kepegawaian		100 %	34.200.000			100 %	20.000.000	
						Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %				100 %		
7	1	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Orang	34.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Orang	20.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	265.842.420			100 %	184.508.350	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	9 Paket	14.613.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Paket	4.310.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	7 Paket	31.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	24.350.000	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Paket	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Paket	76.978.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	39.238.350	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Laporan	24.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	14.175.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	12 Laporan	110.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	96.235.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	119.747.000			100 %	57.500.000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	4.700.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Unit	119.747.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	52.800.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	99.070.252			100 %	87.202.200	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	12 Laporan	50.470.252	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	39.202.200	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	12 Laporan	48.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	48.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	73.804.357			100 %	59.099.857	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Unit	44.384.357	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	38.339.857	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	38 Unit	19.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38 Unit	10.760.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	8 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	10.000.000	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata (%)		100 %	92.500.000			100 %	140.000.000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan		2 Kali	57.800.000			2 Kali	50.000.000	
						PJumlah tatap muka yang dilaksanakan		2 Kali				2 Kali		
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Laporan	57.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	50.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang telah dilaksanakan		100 %	34.700.000			100 %	90.000.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan yang diterbitkan		35 Buah	19.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Buah	45.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Non perizinan yang diterbitkan		200 Buah	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Buah	45.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	21.340.000			100 %	19.540.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat		4 Kali	21.340.000			4 Kali	19.540.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Laporan	21.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	19.540.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	12.000.000			100 %	12.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Kamtibmas		300 Orang	12.000.000			300 Orang	12.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	12.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata		100 %	13.200.000			100 %	13.200.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi		3 Desa	13.200.000			3 Desa	13.200.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lababata, Semua Kelurahan	3 Desa	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Desa	13.200.000	KECAMATAN LABABATA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.089.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lababata		100 %	120.000.000			100 %	120.000.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	1.050.000			100 %	1.050.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		35 Dokumen	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Dokumen	1.050.000	KECAMATAN LABABATA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	45.158.480			100 %	45.158.480	
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	10.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	10.050.000	KECAMATAN LABABATA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	1 Paket	2.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.930.000	KECAMATAN LABABATA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 Paket	17.550.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	17.550.080	KECAMATAN LABABATA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2 Laporan	7.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	7.300.000	KECAMATAN LABABATA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lababata, Lababata Rilau	34 Laporan	7.328.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Laporan	7.328.400	KECAMATAN LABABATA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	15.050.000			100 %	15.050.000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	15.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	15.050.000	KECAMATAN LABABATA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	50.456.000			100 %	50.456.000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	14.456.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	14.456.000	KECAMATAN LABABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	36.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	8.285.520			100 %	8.285.520	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	2.995.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	2.995.520	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	1.900.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	3.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.390.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Unit	650.325.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	650.325.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Pokmas / Ormas	318.675.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	318.675.000	KECAMATAN LALABATA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.094.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	120.000.000			100 %	125.000.000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	1.650.000			100 %	1.650.000	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	35 Dokumen	1.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Dokumen	1.650.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	58.311.700			100 %	58.311.700	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	2 Paket	17.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	17.650.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	1 Paket	9.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	9.996.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	4 Paket	10.197.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	10.197.300	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	2 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	6.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	12 Laporan	14.468.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	14.468.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	3.200.000			100 %	8.200.000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	2 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	5.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	2 Unit	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	3.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	47.343.500			100 %	47.343.500	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	12 Laporan	11.943.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	11.943.500	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	12 Laporan	35.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	35.400.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	9.494.800			100 %	9.494.800	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	2 Unit	2.934.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	2.934.800	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	6 Unit	3.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	3.110.000	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	3.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.450.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	6 Unit	766.480.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		6 Unit	766.480.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	2 Pokmas / Ormas	202.520.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	202.520.000	KECAMATAN LALABATA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.103.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	120.000.000			100 %	134.000.000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	1.050.000			100 %	1.050.000	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	35 Dokumen	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Dokumen	1.050.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	40.131.000			100 %	40.131.000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Paket	13.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	13.125.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Paket	2.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.180.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Paket	14.337.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	14.337.600	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Laporan	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	3.500.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	12 Laporan	6.988.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.988.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	0			100 %	14.000.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	14.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	68.259.000			100 %	68.259.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	12 Laporan	8.859.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	8.859.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	12 Laporan	59.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	59.400.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	10.560.000			100 %	10.560.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Unit	5.060.000			1 Unit	5.060.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	6 Unit	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	2.500.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	8 Unit	743.405.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		8 Unit	743.405.000	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Pokmas / Ormas	225.595.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Pokmas / Ormas	225.595.000	KECAMATAN LALABATA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.086.935.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	120.000.000			100 %	125.735.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	510.000			100 %	510.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	35 Dokumen	510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Dokumen	510.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	37.950.800			100 %	37.950.800	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	287.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	287.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Paket	6.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	6.950.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	4.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.215.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	4 Paket	9.700.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	9.700.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Laporan	5.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.900.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Laporan	10.898.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	10.898.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	5.600.000			100 %	11.335.000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Unit	5.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	5.600.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	3 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	5.735.000	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	64.233.200			100 %	64.233.200	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Laporan	14.433.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	14.433.200	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Laporan	49.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	49.800.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	11.706.000			100 %	11.706.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Unit	3.036.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	3.036.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	6 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	5.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Unit	3.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.670.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	969.000.000			100 %	961.200.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	961.200.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Unit	693.725.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		5 Unit	693.725.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Pokmas / Ormas	275.275.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	267.475.000	KECAMATAN LALABATA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.089.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	120.000.000			100 %	120.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	830.000			100 %	1.830.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	35 Dokumen	830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Dokumen	1.830.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	39.472.600			100 %	45.732.600	
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	2 Paket	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	13.250.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Paket	4.127.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.437.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	4 Paket	12.127.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	12.127.200	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	2 Laporan	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.700.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	12 Laporan	8.518.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	10.218.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	10.500.000			100 %	14.200.000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Unit	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	14.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	63.489.400			100 %	50.289.400	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	12 Laporan	8.289.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	8.289.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	12 Laporan	55.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	42.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	5.708.000			100 %	7.948.000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	2 Unit	1.518.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	1.518.000	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lahabata, Bila	6 Unit	3.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	3.790.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lahabata, Bila	1 Unit	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.640.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lahabata		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lahabata, Bila	9 Unit	637.655.000			9 Unit	637.655.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lahabata, Bila	5 Pokmas / Ormas	331.345.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	331.345.000	KECAMATAN LALABATA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.089.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lahabata		100 %	120.000.000			100 %	120.000.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	1.000.000			100 %	1.000.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lahabata, Lapajung	35 Dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	45.843.100			100 %	45.843.100	
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lahabata, Lapajung	2 Paket	13.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	13.170.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lahabata, Lapajung	1 Paket	3.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.710.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lahabata, Lapajung	4 Paket	17.103.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	17.103.900	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	2 Laporan	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	4.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	12 Laporan	7.659.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.659.200	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	1.170.000			100 %	1.170.000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	3 Unit	1.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	1.170.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	64.274.100			100 %	64.274.100	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	12 Laporan	12.074.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	12.074.100	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	12 Laporan	52.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	52.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	7.712.800			100 %	7.712.800	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Unit	1.922.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.922.800	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	6 Unit	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	2.500.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Unit	3.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.290.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	5 Unit	716.215.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan		5 Unit	716.215.000	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
										Bagi Kelurahan				
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	2 Pokmas / Ormas	252.785.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	252.785.000	KECAMATAN LALABATA
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.089.000.000				1.094.000.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	120.000.000			100 %	125.000.000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	1.200.000			100 %	1.200.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	35 Dokumen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Dokumen	1.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	49.976.250			100 %	49.976.250	
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	2 Paket	11.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	11.700.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	1 Paket	5.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.520.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	4 Paket	15.927.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	15.927.050	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	2 Laporan	5.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.600.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	12 Laporan	11.229.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	11.229.200	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	4.000.000			100 %	9.000.000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	2 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	5.000.000	KECAMATAN LALABATA





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	3 Unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	4.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	54.611.750			100 %	54.611.750	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	12 Laporan	3.611.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.611.750	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	12 Laporan	51.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	51.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	10.212.000			100 %	10.212.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	2 Unit	3.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	3.542.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	6 Unit	3.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	3.010.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	1 Unit	3.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.660.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan		100 %	969.000.000			100 %	969.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	7 Unit	812.760.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		7 Unit	812.760.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	2 Pokmas / Ormas	156.240.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	156.240.000	KECAMATAN LALABATA
TOTAL									16.180.155.374					





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
KECAMATAN MARIORIWAWO														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN			4.756.691.142					5.648.318.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo		100 %	4.584.291.142			100 %	5.353.318.000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %	24.500.000			100 %	16.000.000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	3 Dokumen	900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Dokumen	9.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	6 Laporan	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	3.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	3.891.451.482			100 %	4.594.318.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	42 Orang/bulan	3.877.451.482	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42 Orang/bulan	4.579.318.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	100 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	20 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	11.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	94.133.125			100 %	75.000.000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae		19.133.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	5 Orang	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	75.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan admnistrasi umum		100 %	254.793.000			100 %	363.000.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	10 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	5.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	5 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	50.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	5 Paket	32.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	50.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	61.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	75.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Paket	11.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	4 Paket	41.468.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	105.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1000 Laporan	12.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Laporan	17.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	200 Laporan	76.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Laporan	50.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	207.900.000			100 %	140.000.000	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	2 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	40.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Unit	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	2 Unit	111.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	60.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 7	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	53.013.535			100 %	70.000.000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	12 Laporan	47.013.535	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	55.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	58.500.000			100 %	95.000.000	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	10 Unit	31.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	50.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	5 Unit	2.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	5.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	10 Unit	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1685.37 M2	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1685.37 M2	30.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo (%)		100 % 100 %	98.000.000			100 % 100 %	210.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan		2 Kali	50.000.000			2 Kali	105.000.000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	105.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkat dengan pelayanan nonperizinan		200 Buah	48.000.000			200 Buah	105.000.000	
						Persentase pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan		50 Buah				50 Buah		
7	1	2	2.0 4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	50 Dokumen	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	52.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	50 Laporan	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	52.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	32.800.000			100 %	30.000.000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat		8 kali	32.800.000			8 kali	30.000.000	
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	8 Laporan	32.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	30.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	21.600.000			100 %	30.000.000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas		240 Orang	21.600.000			240 Orang	30.000.000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	240 Laporan	21.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		240 Laporan	30.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	20.000.000			100 %	25.000.000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		11 desa	20.000.000			11 desa	25.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	11 Desa	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Desa	25.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.092.222.861				1.044.922.500	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo		100 %	162.082.861			100 %	59.922.500	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	600.000			100 %	500.000	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	54 Dokumen	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 Dokumen	500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan admnistrasi umum		100 %	138.549.200			100 %	43.122.500	
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	2 Paket	33.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	7.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Paket	5.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.622.500	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	6 Paket	56.819.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	20.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Laporan	8.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Laporan	33.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	16.533.661			100 %	13.000.000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Laporan	10.533.661	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	1 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	6.400.000			100 %	3.300.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	2 Unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	2.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	3 Unit	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	1.300.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	930.140.000			100 %	985.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		16 paket	930.140.000			16 paket	985.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	5 Unit	731.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	600.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	2 Pokmas / Ormas	199.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	385.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				1.142.918.120				1.043.050.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo		100 %	155.368.120			100 %	58.050.000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	500.000			100 %	500.000	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	54 Dokumen	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 Dokumen	500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	130.377.800			100 %	41.250.000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	2 Paket	25.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	7.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	1 Paket	5.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.750.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		6 Paket	58.147.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	20.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	1 Laporan	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	1 Laporan	33.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	17.690.320			100 %	13.000.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	1 Laporan	11.690.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	1 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	6.800.000			100 %	3.300.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	3 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	2.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	2 Unit	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	1.300.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	987.550.000			100 %	985.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		16 paket	987.550.000			16 paket	985.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	5 Unit	848.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	600.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	2 Pokmas / Ormas	139.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	385.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
TOTAL									6.991.832.123					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.775.257.238				23.365.423.000	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		100 %	4.127.306.626			100 %	4.772.011.000	
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu		100 %	24.500.000			100 %	27.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.815.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	27 Laporan	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Laporan	16.185.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	3.394.468.290			100 %	4.005.011.000	
8	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Orang/Bulan	3.358.168.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang/Bulan	3.965.011.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	96 Dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Dokumen	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Dokumen	28.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	366.546.336			100 %	350.000.000	
8	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Paket	4.999.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	8.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 paket	44.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 paket	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	43.586.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	70.826.546	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	70.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Laporan	10.009.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	300 Laporan	192.724.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Laporan	202.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor, dalam Kondisi Baik		100 %	181.120.000			100 %	200.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	169.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100 %	94.800.000			100 %	120.000.000	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Laporan	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	35.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Laporan	61.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	85.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik		100 %	65.872.000			100 %	70.000.000	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Unit	61.052.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	60.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Unit	4.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara		300 Orang	103.800.000			300 Orang	100.000.000	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan dibidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 %	103.800.000			100 %	100.000.000	
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Orang	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	18.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	81.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	82.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang diverifikasi		100 %	2.742.450.612			100 %	16.603.412.000	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Dibidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilu/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik		100 %	2.742.450.612			100 %	16.603.412.000	
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	2.224.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	205.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	21 Orang	514.050.612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Orang	16.348.282.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	50.130.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi		100 %	20.500.000			100 %	30.000.000	





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	1	4	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas		100 %	20.500.000			100 %	30.000.000	
8	1	4	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	70 Orang	16.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Orang	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba		100 %	573.200.000			100 %	660.000.000	
8	1	5	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya		100 %	573.200.000			100 %	660.000.000	
8	1	5	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	29.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	35.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435 Orang	535.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		435 Orang	610.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial		100 %	1.208.000.000			100 %	1.200.000.000	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	1.208.000.000			100 %	1.200.000.000	
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	116.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	125.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Orang	1.029.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 Orang	1.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	62.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL									8.775.257.238					
GRAND TOTAL									1.187.374.561.255				1.300.846.738.695	





BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

“Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan”



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah juga menetapkan target untuk pencapaian SPM di Kab. Soppeng dan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

6.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 6.1. Indikator Makro Kab.Soppeng Tahun 2023

No	Indikator Makro	Target Tahun 2023
1	2	3
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,31
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,22
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,29
5	Rasio Gini	0,379
6	PDRB PerKapita (Rp)	59.060.000

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator tujuan sasaran strategik RPJMD. Target capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 6.2.





**Tabel 6.2. Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kab. Soppeng
Tahun 2021 – 2023**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	ASUMSI CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Nilai	84,09	86,4	87,93
2	IPM	Nilai	68,99	69,71	70,29
3	Indeks Gini	Nilai	0,406	0,387	0,379
4	PDRB/kapita (Rp)	Rp	52.750.000	59.060.000	63.001.000
5	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Nilai		71,65	73,65
6	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	Nilai / Kategori	CC	53/CC	55/CC
7	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Nilai / Kategori	Belum terlampau	Belum terlampau	Belum terlampau
8	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	%	89,28%	100	100
9	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	%	83,83	85	86
10	Indeks Pendidikan	Nilai Indeks	62,32	63,2	64,06
11	Indeks Kesehatan	Nilai Indeks	76,63	77,22	77,65
12	Pertumbuhan ekonomi (%)	%	6,15	6	6,31
13	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	3,92	4,31	4,22
14	Angka kemiskinan (%)	%	7,53	7	7
15	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai Indeks	69,45	63,74	65,93
16	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya terhadap PDRB	milyar rupiah	275,5	301,348	322,483
17	Angka Kriminalitas (kasus)	Kasus	92	80	75
18	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	Skor/ Status Kinerja	3,7/Tinggi	4,0/Tinggi	4,1/Tinggi
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Indeks	A	A	B
20	Opini laporan keuangan	WTP / WDP TMPT / TW	WTP	WTP	WTP
21	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Skor/ Status Kinerja	62 (B)	61 (B)	62 (B)
22	Indeks Inovasi Daerah	Poin	35,48 (inovatif)	601 (inovatif)	40.01 - 45.00 (inovatif)
23	Indeks Risiko Bencana	Poin	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)
24	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	Ton Co2	36240	36238	36238
25	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	Poin	69,52	66,2	66,57





6.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 6.3

**Tabel 6.3. Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kab. Soppeng
Tahun 2021 - 2023
(Sesuai Permendagri 86 tahun 2017)**

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Layanan Urusan Wajib				
1	Pendidikan				
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	65,75	100	100
1.2	Angka Partisipasi kasar				
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	99,38	100	100
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	101,08	100	100
1.4	Angka Partisipasi Murni				
01.04.01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	90,04	100	100
01.04.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	65,07	100	100
1.5	Angka Partisipasi Sekolah:				
01.05.01	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	107,22	100	100
01.05.02	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	82,38	100	100
1.6	Angka Putus Sekolah:				
01.06.01	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,063	0	0
01.06.02	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,106	0	0
1.7	Angka Kelulusan:				
01.07.01	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	99,83	100	100
01.07.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,91	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM):				
01.08.01	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	102,41	100	100
01.08.02	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	95,44	100	100
1.9	Fasilitas Pendidikan:				
01.09.01	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	77,20	86,07	86,24
01.09.02	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	80,81	84,44	85,72





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
01.10	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	107,43	125,82	125,82
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	12,08	10	11
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	87,83	90	92
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,44	100	100
02	Kesehatan				
02.01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	0,073	10,5	10,3
02.02	Angka kelangsungan hidup bayi	%	99,92	89,5	89,7
02.03	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	0,37	1,2	1,1
02.04	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	0,37	7,6	7,5
02.05	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0,73	1,2	1,1
02.06	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	0,03	25	25
02.07	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,26	0,27	0,27
02.08	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,004	0,004	0,004
02.09	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,45	0,41	0,41
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	4,09	3,49	3,49
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100
02.13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	78,57	80	85
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	1,32	30	28
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	80,93	100	100
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	> 1	> 1
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	2,56	100	100
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	25,98	100	100





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	83,24	0	0
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0	0	0
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	25,98	100	100
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	96,55	100	100
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100
02.25	Penderita diare yang ditangani	%	4,41	100	100
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0	0	0
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0,0055	0	0
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,84	100	100
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	212,5	212,5
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	62,86	62,86	62,86
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	100
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	76,06	100	100
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100
02.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	92,54	100	100
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	97,76	100	100
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
03.01	Pekerjaan Umum:				
03.01.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,57	0,61	0,62
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,0038	0,0038	0,0039
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	8,12	9,5	9
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	57,32	58,5	58,6





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
03.01.05	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	47,12	48,2	48,4
03.01.07	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	99,95	72,5	75
03.01.09	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,21	55	56
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	1,79	1,7	1,6
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	65,31		72
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	0,022	0,022	0,088
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	94,71	95,5	96
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan	%	46,1	35	40
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	22,15	65	1,75
03.01.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,017	0,018	0,019
03.01.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	2,068	2	0,0027
03.02	Penataan Ruang:				
03.02.02	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	3,27	65	66
03.02.06	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,96	40	43
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
04.01	Rasio rumah layak huni		0,2110	0,2138	0,2142
04.02	Rasio permukiman layak huni		Na	0,98	0,98
04.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		88,21	88,38	88,56
04.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		65,19	65,19	65,19
04.05	Persentase pemukiman yang tertata	%	98,54	0,74	0,74
04.06	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,06	0,0550	0,0523
04.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		2,05	3,41	3,41
04.09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		100	63,84	63,84
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	Cakupan petugas :				
05.01	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	129,10	68,49	68,49
05.02	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	100	80	85
	Cakupan pelayanan :				
05.03	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	94	100	100
05.04	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	64	100	100
05.05	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100
6	Sosial				





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
06.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100
06.02	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100
06.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100
06.04	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	60	70
06.05	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100
06.06	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	100	100
06.07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100
06.08	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	20	30
06.09	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja				
01.01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0	0	0
01.03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	61,32	25,5	26
01.04	Keselamatan dan perlindungan	%	9,82	8,6	8,7
01.05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	71,36	95,3	95,4
01.06	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	13,79	13,25	13,25
02.02	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	23,33	24	24
02.03	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	90,27	93,27	93,52
02.04	Rasio KDRT		0,0127	0	0
02.06	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	89,10	98,25	98,75
02.07	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100
02.08	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
02.09	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	1	17,39	17,39
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	0,93	0,94	0,95
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,04	1,32	1,35
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	0,80	1,3	1,5
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	1,45	1,2	1,3
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,98	0,98	0,98
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	19,22	40	49,7
3	Pangan				
03.01	Ketersediaan pangan utama	%	351,3	283	316
03.02	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	11,995.00	9721	10110
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	288.20	248,5	258,44
03.03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100,0	100%	100%
4	Pertanahan				
04.01	Persentase luas lahan bersertifikat				
04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%		0%	0%
04.03	Penyelesaian izin lokasi	%		100%	100%
5	Lingkungan Hidup				
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada
05.29	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	60	72	72
05.30	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	93,87	91,6	91,7
05.31	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	40,85	78,9	78,9
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	0,6603774	65	67





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada		2	2
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan			0	0
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana			0	0
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	1	50	50
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%	74,06	73	72
05.44	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	9,62	26	27
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%	0,27	27,2	27,2
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	74,06	73	72
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	0	75	75
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	2,94	0	0
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
06.01	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99
06.02	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,98	0,98	0,98
06.03	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,64	0,63	0,64
06.04	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada
06.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah
06.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,26	99	99
06.07	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	97,66	98	98
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
07.01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	89,80	100	100
07.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	3	3	3
07.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	3	4	4





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
07.04	Persentase LSM aktif	%	100	100	100
07.05	Persentase LPM Berprestasi	%	0	4%	4%
07.06	Persentase PKK aktif	%	100	100	100
07.07	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100
07.08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,40	34,50%	34,60%
07.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80	80	80
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
08.01	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,13	0,07	0,06
08.02	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,16	2,15	2,13
08.03	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	29,41	100%	100%
08.04	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	61,76	90	95,9
08.05	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkad a	0	1	1
08.06	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	10	7	8
08.07	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	2	1	2
08.08	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	1,15	1,21	1,21
08.09	Ratio Akseptor KB	%	75,05	78,22	78,22
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	75,05	77,38	77,38
08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	16,65	16,1	15,9
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,81	2,5	2,5
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,98	12	11
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	2,97	30	35
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	33,25	45	56
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	64,23	65,67	67
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56,10	58,73	60
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	36,91	53	60
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	50	62,5
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	7,75	7,7	7,8





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100%	100%
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	47,87	85	86
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	77,61	26	27
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100%	100%
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	0
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100%	100%
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	23,01	85,85	88,44
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20	20	21
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,26	0,3	0,3
9	Perhubungan				
09.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	848,00	1005	1005
09.02	Rasio ijin trayek	Poin	0,00	0,0009	0,0009
09.03	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	0,00	100	130
09.04	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2,00	2	2
09.05	Persentase layanan angkutan darat	%	17,45	28,16	31,14
09.06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,00	70	100
09.07	Pemasangan Rambu- rambu		61%	86	89
10	Komunikasi dan Informatika				
10.01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		675,00	675	675
10.02	Cakupan Layanan Telekomunikasi		66,15	65,88	65,88
10.03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	0,75	76%	76%
10.04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	81,49	81,49	81,49
10.05	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	61%	61%	61%
11	Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah				
11.01	Persentase koperasi aktif	%	90,36	89,25	89,25





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
11.02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,16	99,25	99,32
11.03	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100
11.04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,16	99,25	99,32
12	Penanaman Modal				
12.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	63	52	58
12.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	123688144297,00	83.605.067.514	92.253.867.601
12.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	1,15	64,76	68,64
13	Kepemudaan dan Olah Raga				
13.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	0,37	100	100
13.03	Cakupan pembinaan olahraga	%	84,00	41	50
13.04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	69,70	90	90
13.05	Cakupan pembinaan atlet muda	%	98,45	60	66
13.06	Jumlah atlet berprestasi	Orang	9	10	15
13.07	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	4	14	14
14	Statistik				
14.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
14.02	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
14.03	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian				
15.01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0,76	13%	13%
16	Kebudayaan				
16.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	5,00	7	8
16.02	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25	380	380
16.03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	n,a	1	1
16.04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	8	3	3
17	Perpustakaan				
17.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	1,41	3,71	4,15
17.02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	100	31,69	31,8
17.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	1,58	0,21	0,23





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
17.04	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	8924,00	11.340	12.096
17.05	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	15687	15.687	15.947
17.06	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	0,56	100%	100%
18	Kearsipan				
18.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	20,59	79,94	82,23
18.02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1,00	2	2
	Layanan Urusan Pilihan				
1	Pariwisata				
01.01	Kunjungan wisata	%	3,23	35%	40%
01.02	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	2
01.03	PAD sektor pariwisata	%	0,18	0,2	0,2
2	Pertanian				
02.01	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	14,27	26,27	26,53
02.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	20,68	14	15
02.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	28,79	27,39	27,3
02.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100
02.05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,67	5,43	5,5
02.06	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100
5	Perdagangan				
05.01	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)		- 296,270.0 0		
05.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100%	100%	100%
6	Perindustrian				
06.01	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	56,94	50%	50%
8	Kelautan dan Perikanan				
08.01	Produksi perikanan	%	100,24	85	90
08.02	Konsumsi ikan	%	102,50	100	100
08.03	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10	10	10
08.04	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	87,26	88	90
08.05	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125	125	125
08.06	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	0,14
	Penunjang Urusan				
1	Perencanaan Pembangunan				
01.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
01.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
01.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100%	100%
01.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100%	100%
01.07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	97,96%	100%	100%
2	Keuangan				
02.01	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/TMT/TW	WTP	WTP	WTP
02.02	Persentase SILPA	%	12,26	8,99	7,99
02.03	Persentase SILPA terhadap APBD	%	12,26	8,99	7,99
02.04	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	1,14	0	0
02.05	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	31,29	30	20
02.06	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	24,73	19	10
02.08	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,20	0,2	21
02.09	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				
03.01	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	19,92 JP	20	20
03.02	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	6,66	7,7	7,8
03.03	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	83,13	87,1	86,79
03.04	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	33	33	33
03.05	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	1880	1915	1900
03.06	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	3091	3300	3320
4	Penelitian dan pengembangan				
04.01	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100%	100%
04.02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	0	100%	100%
	Penerapan SIDA:				
04.03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	23,53	17,65	35,29
04.04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	100	100
5	Pengawasan				
05.01	Persentase tindak lanjut temuan	%	59,54	79	79
05.02	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,55	00.06	0,06
05.03	Jumlah temuan BPK	Temuan	12	14	14





No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
	Sekretariat Dewan				
06.01	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
06.02	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
06.03	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 6.4. Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci Kab. Soppeng Tahun 2021 - 2023 (sesuai Permendagri 18 Tahun 2020)

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB				
1	URUSAN PENDIDIKAN				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	112,25	69	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	107,48	91,01	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	120,62	78,35	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,95	58,33	100
2	URUSAN KESEHATAN				
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,13	0,13	0,135
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	19,68	100	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	51,86	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	51,86	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	2,19	100	100





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM				
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	9,72	0,2	0,25
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	Tidak ada Pantai
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	6,21	0,68	0,72
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,02	0,35	40%
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,95	72,5	75
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		100	0,35	0,6
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	57,32	0,605	59,50%
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0	0,25	0,3
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	1	1
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	106,25	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	100%	50,45%
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	11,79	100%	2,44%
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,43	100%	100%
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	55,56	50	62
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	53426	101735	101735
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	53426	101735	101735
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	123456 jiwa	1001 KK	1002 KK
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	44,44	90	90
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	5,53	7,75	7,75





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023
6	URUSAN SOSIAL				
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	49,70	100	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100
7	URUSAN KETENAGA KERJAAN				
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	61,32	20	25
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,47	23,9	24
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	579642	3,85	3,89
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	3,98	4,9	5
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		61,32		
8	URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,56	2,75	3
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,03	0,04	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%		0,001	0,001
9	URUSAN PANGAN				
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	25,82	32	34
10	URUSAN PERTANAHAN				
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	70	72,5
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		100	n.a	n.a
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	n.a	100
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100	n.a	n.a
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50	100	100
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	69,52	82,16	82,2
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	74,06	68%	69%
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	11,43	65	67
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,59	99,33	99,33
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	64,25	60,15	60,2
	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,54	99,15	96,5
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	23,53	100	88,23
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	25	33
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	3,85	4	3
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,16	2,15	2,13
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	74,52	78,25	78,26





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,24	12,1	12
15	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	63	82	83
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,9	0,065	0,07
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,06	100	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	1	1,5
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	42,25	70	27
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	45,18	38,17	38,17
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	7,5	3,3	4,52
18	URUSAN PENANAMAN MODAL				
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	114,52	64,76	68.64
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	1,03	1,04	1,07
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5,49	28,54	29,83
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	2	4	1
20	URUSAN STATISTIK				
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
21	URUSAN PERSANDIAN				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	49,8	260	265
22	URUSAN KEBUDAYAAN				
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	25	21,88	21,88
23	URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai		50	51
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	28,73	0	0
24	URUSAN KEARSIPAN				
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	0	100	100
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	0	25	25
	URUSAN PILIHAN				
25	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3425,7	3451,73	3486,25
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		3017,35	3047,53
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		434,38	438,72
26	URUSAN PARIWISATA				
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	33	40
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	365,94	44,5	44,62
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	2184,13	10	10





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	4,97	1,48	1,5
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,18	0,2	0,2
27	URUSAN PERTANIAN				
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	547,85	5,43	5,5
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-42,86	29,5	29,5
28	URUSAN PERDAGANGAN				
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	3,77	0	0
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	26,81	22,5	23,8
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,55	80,88	84,56
29	URUSAN PERINDUSTRIAN				
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	47,62	43,33	44,19
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	20	100	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	0	0
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
	1. Keterkinian informasi industri :		0		
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	0	0	50
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	0	25	25
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	0
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :				
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	10	10	10
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	10	10	10
30	URUSAN TRANSMIGRASI				
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	UPT	1		
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	kk	85		
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	pemukiman	1		
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	13,78	31,75	31,75
	Rasio PAD	Poin	1,46	1,33	1,33
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	LEVEL 3	LEVEL 3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	LEVEL 2	LEVEL 3
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	14,28	0,66	0,66
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP/	WTP	WTP	WTP
2	PENGADAAN				
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0





No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	Target kinerja 2023
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	84	9,9	9,9
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	49,77	97	98
3	KEPEGAWAIAN				
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	675,93	7,81	8,72
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,39	1,6	0,25
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	39,75	1,02	0,69
4	MANAJEMEN KEUANGAN				
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-7,28	0,04	0,04
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	21,61	0,2	0,2
	Assets Management		ya	YA	YA
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	12,81	4,99	4,99
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK				
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Soppeng Tahun 2023 secara rinci disajikan pada Tabel 6.5

Tabel 6.5. Capaian dan Target Indikator Kinerja SPM Kab. Soppeng Tahun 2021- 2023

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	TARGET 2023
1	PENDIDIKAN					
1:01	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	56,1	100	100
1:02	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	86,54	100	100
1:03	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100
2	KESEHATAN					
2:01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
2:02	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
2:03	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang	%	100	100	100





NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	TARGET 2023
		mendapatkan layanan kesehatan				
2:04	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
2:05	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
2:06	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	20,11	100	100
2:07	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
2:08	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
2:09	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
2:10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100
2:11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
2:12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM					
3:01	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	94,55	100	100
3:02	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100
4	PERUMAHAN RAKYAT					
4:01	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	106	100	100
4:02	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	100	100





NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	Capaian 2021	Asumsi Capaian 2022	TARGET 2023
5	TRANTIBUMLINMAS					
5:01	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	100	100
5:02	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
5:03	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5:04	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
5:05	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
6	SOSIAL					
6:01	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
6:02	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
6:03	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
6:04	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100
6:05	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100

6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Soppeng Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.6

**Tabel 6.6. Capaian dan Target Indikator Kinerja SDGs / TPB
Kabupaten Soppeng Tahun 2021 -2023**

NO	INDIKATOR TPB	Satuan	Target 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
1	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan		1700	1500	1200





NO	INDIKATOR TPB	Satuan	Target 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
	(Prevalence of Undernourishment)				
Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan					
2	Jumlah Kecamatan yang Terbangun Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal		2	3	4
3	Jumlah Kecamatan yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		2	3	4
4	Indikator Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku		2	4	6
Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
5	Indikator Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan		6500	5000	4000
6	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI/ Sederajat		88	90	95
7	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Sederajat		0,70	0,73	0,760
Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan					
8	Indikator Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita		0,150	0,140	0,130
9	Indikator Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil		0,009	0,008	0,007
Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
10	Indikator Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terpilih		90%	95%	100%
11	Proporsi Kematian Akibat Keracunan		0,8	0,7	0,6
Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua					
12	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat		0,990	1,000	1,100
Tujuan : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
13	Indikator Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir		23,000	21,000	19,000
14	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Orang Lain selain Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir		23,000	21,000	19,000





NO	INDIKATOR TPB	Satuan	Target 2021	Asumsi Capaian 2022	Target 2023
	<i>Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh , serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</i>				
15	Indikator Laju Pertumbuhan PDB perkapita		8,000	9,000	10,000
16	Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur		0,030	0,025	0,020
17	Indikator Jumlah Wisatawan Mancanegara		7	8	9
18	Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara		210.000	230.000	250.000
19	Indikator Devisa Sektor Pariwisata		1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000
	<i>Tujuan : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati</i>				
20	Proporsi Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi terhadap Luas Lahan Keseluruhan		21.000	23.000	25.000
	<i>Tujuan : Memperkuat Masyarakat yang damai untuk pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</i>				
21	Indikator Proporsi Perempuan dan Laki-Laki muda Umur 18-24 Tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 Tahun		28	27	26
22	Indikator Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)		3%	4%	5%
23	Indikator Proporsi Anak Umur di Bawah Lima Tahun yang Kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Menurut Umur		12.500	13.000	13.500
	<i>Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</i>				
24	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB Menurut Sumbernya		0,95	1,00	1,5
25	Indikator Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB		0,03	0,05	0,07
26	Indikator Jumlah Metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)		13,00	14,00	15,00





BAB VII

PENUTUP

“Kesimpulan dan Saran terhadap keberhasilan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi misi serta program-program prioritas yang telah direncanakan”



BAB VII PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026. RKPD Kab. Soppeng Tahun 2023 dilaksanakan dengan tema **“Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas dan Perwujudan Daya Saing Daerah”**. Perwujudan prioritas pembangunan pada RKPD Kab. Soppeng Tahun 2023 melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2023 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan program prioritas nasional dalam RKP. Selain itu juga mengacu pada evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Oleh karena itu, dalam penyusunannya telah diselaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Seluruh proses penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng juga telah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan serta untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing SKPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Masing-masing SKPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2023 untuk menjaga keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan.

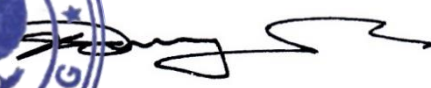




2. SKPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2023 dengan sebaik baiknya.
3. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Tingkat Kabupaten (Musrenbang RKPD), dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakankan.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023.
3. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
4. RKPD Tahun 2023 masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19 seperti potensi meningkatnya jumlah KK miskin, potensi meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya jumlah kunjungan wisata maka diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pencapaian cita-cita pembangunan Kabupaten Soppeng.

 **BUPATI SOPPENG,**

A. KASWADI RAZAK

